BUKU II
LAPORAN UTAMA

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI

TAHUN 2024

WALI KOTA CIMAHI

SURAT PERNYATAAN

NOMOR : 660 /2004 /DLH.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. H. Dicky Saromi, M.Sc.

Jabatan : Pj. WALI KOTA CIMAHI

Menyatakan bahwa penetapan isu prioritas pada Dokumen Infomasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 telah disasarkan pada proses yang partisipatif dan melibatkan Organisasi Daerah, Perguruan Tinggi, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lapisan masyarakat lainnya sebagai pemangku kepentingan di wilayah Kota Cimahi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Cimahi, 24 Juni 2024
Pj. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3, Cimahi, Jawa Barat 40513
Telepon. (022) 6654274, Fax. (022) 6654274 Laman www.cimahikota.go.id

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6654274, Faximile (022) 6654274,
Laman www.cimahikota.go.id, Pos-el dlh@cimahikota.go.id

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drg. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M.**

NIP : 19670320 199203 2 005

Jabatan : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI

Menyatakan bahwa validitas dan keabsahan data yang terdapat dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2024 (Tahun Data 2023) merupakan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

Cimahi, Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan,

Mengetahui,
Pj. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI,

drg. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670320 199203 2 005

WALI KOTA CIMAHI

SURAT PERNYATAAN INOVASI

Kepala Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa Inovasi berikut :

1. *Grak Ompimpah*
2. *Data Ngahiji*
3. *Pelaporan Persetujuan Lingkungan (Patali)*
4. *Sistem Informasi Status Lingkungan (Sitangan)*

adalah inovasi yang berasal dari inisiatif dari kami selaku kepala daerah atau pengembangan dari inisiatif Masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat/Perangkat Daerah di wilayah kami.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cimahi, Juni 2024
Yang memberikan pernyataan
Pj. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3, Cimahi, Jawa Barat 40513
Telepon. (022) 6654274, Fax. (022) 6654274 Laman www.cimahikota.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Berkat taufik dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2024. Dokumen ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas publik kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam dokumen ini disampaikan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi yang terdiri dari gambaran keadaan lingkungan hidup, baik penyebab dan dampak permasalahannya, maupun respon terhadap permasalahan tersebut yang bersumber dari pemerintah, masyarakat dan pihak lainnya dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. DIKPLHD ini disusun dan terwujud atas hasil Kerjasama antara Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Kota Cimahi, Perguruan Tinggi, Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta lapisan masyarakat lainnya, termasuk juga dalam proses penetapan isu prioritas.

DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi referensi data dan informasi yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi maupun bagi masyarakat, swasta, dan pihak lainnya. Terimakasih kami ucapkan kepada berbagai pihak atas peran sertanya sehingga penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi berbagai pihak dalam upaya mempercepat terwujudnya Kota Cimahi yang ramah lingkungan.

Cimahi, Juni 2024
Pj. WALI KOTA CIMAHI,

Dr. Ir. H. DICKY SAROMI, M.Sc.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **vi**
DAFTAR TABEL ..... **xvi**
DAFTAR GAMBAR ..... **xviii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxv**
BAB I PENDAHULUAN **I-26**
1.1 Latar Belakang I-26
1.2 Profil Daerah Kota Cimahi I-28
1.2.1 Letak Geografis dan Astronomis I-28
1.2.2 Luas dan Batas Wilayah Administrasi I-28
1.2.3 Penggunaan Lahan I-31
1.2.4 Hidrologi I-33
1.2.5 Topografi I-36
1.2.6 Geologi I-40
1.2.7 Klimatologi I-40
1.2.8 Demografi I-43
1.2.9 Potensi Pengembangan Wilayah I-44
1.3 Proses Penyusunan dan Perumusan Isu Prioritas I-51
1.4 Maksud dan Tujuan I-54
1.4.1 Maksud I-55
1.4.2 Tujuan I-55
1.4.3 Sasaran I-56
1.5 Ruang Lingkup I-56
1.6 Sistematika Penulisan I-57

BAB II ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, RESPONSE* PADA ISU LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA CIMAHI TAHUN 2024 ..... II-1

2.1 Tata Guna Lahan II-2

2.1.1 Driving Force II-3

2.1.1.1 Pertumbuhan Penduduk II-3

2.1.1.2 Pembangunan Perkotaan II-5

2.1.1.3 Pertumbuhan Industri di Kota Cimahi II-6

2.1.2 Pressure II-8

2.1.2.1 Konversi Lahan di Kota Cimahi II-8

2.1.2.2 Pembangunan Infrastruktur II-9

2.1.2.3 Ekspansi terhadap Wilayah Pertanian, Hutan II-10

2.1.3 State II-11

2.1.3.1 Perubahan Tata Guna Lahan di Kota Cimahi II-11

2.1.3.2 Fragmentasi Habitat II-12

2.1.3.3 Hilangnya Lahan Terbuka II-13

2.1.4 Impact II-15

2.1.4.1 Kehilangan Keanekaragaman Hayati II-15

2.1.4.2 Peringkat Risiko Bencana II-17

2.1.4.3 Perubahan Iklim Lokal II-17

2.1.5 Response II-18

2.1.5.1 Perencanaan Tata Ruang yang Berkelanjutan II-18

2.1.5.2 Pengawasan Pembangunan II-19

2.1.5.3 Pelestarian dan Restorasi Habitat II-20

2.1.5.4 Penghijauan dan Pengoptimalan RTH II-21

2.1.5.5 *Biodiversity by Design* II-23

2.2 Kualitas Air II-24
2.2.1 Driving Force II-25
2.2.1.1 Pertumbuhan Penduduk II-25
2.2.1.2 Curah Hujan Rata-rata di Kota Cimahi II-26
2.2.1.3 Kondisi Geografis Kota Cimahi dan Potensi Beban Pencemarannya II-28
2.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Industri II-28
2.2.2 Pressure II-29
2.2.2.1 Kepadatan Penduduk II-29
2.2.2.2 Daya Tampung Beban Pencemar Sungai II-30
2.2.2.3 Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tidak MemadaiII-31
2.2.2.4 Tingkat Kemiskinan II-33
2.2.2.5 Kontribusi Limbah Non Domestik II-34
2.2.2.6 Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat II-36
2.2.3 State II-37
2.2.3.1 Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung II-37
2.2.3.2 Kualitas Air Sungai II-45
2.2.3.3 Status Mutu Air II-57
2.2.3.4 Indeks Kualitas Air (IKA) II-58
2.2.3.5 Kualitas Air Hujan II-59
2.2.3.6 Kualitas Air Sumur II-60
2.2.4 Impact II-67
2.2.4.1 Krisis Air II-67
2.2.4.2 Penyakit yang Diderita Masyarakat II-68

2.2.4.3 Sumber Air Minum/Air Bersih II-69
2.2.4.4 Penurunan Muka Air Tanah..... II-70
2.2.4.5 Pengaduan Masyarakat II-71
2.2.5 Response..... II-72
2.2.5.1 Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Sumur.. II-72
2.2.5.2 Program Penurunan Beban Pencemar Sungai II-73
2.2.5.3 Program Sanitasi Berbasis Masyarakat..... II-77
2.2.5.4 Pengadaan Sumur Resapan II-78
2.2.5.5 Pengawasan Dokumen Persetujuan Lingkungan. II-79
2.2.5.6 Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Program Nasional Citarum Harum..... II-79
2.3 Kualitas Udara II-81
2.3.1 Driving Force II-83
2.3.1.1 Pertumbuhan Industri II-83
2.3.1.2 Transportasi II-83
2.3.1.3 Perkembangan Perkotaan..... II-84
2.3.1.4 Pertanian dan Pembakaran Sampah di Lahan Terbuka II-84
2.3.2 Pressure..... II-85
2.3.2.1 Emisi Gas dan Partikel..... II-85
2.3.2.2 Polusi Udara Lokal..... II-85
2.3.3 State..... II-86
2.3.3.1 Konsentrasi Polutan Udara..... II-86
2.3.3.2 Kualitas Udara Ambien II-89
2.3.3.3 Indeks Kualitas Udara (IKU) II-90

2.3.4 Impact II-90
2.3.4.1 Kesehatan Masyarakat II-90
2.3.4.2 Kerusakan Lingkungan II-91
2.3.4.3 Dampak Sosial Ekonomi II-92
2.3.5 Response II-92
2.3.5.1 Regulasi Lingkungan II-92
2.3.5.2 Pengelolaan Transportasi II-93
2.3.5.3 Kampanye Kesadaran Masyarakat II-94
2.3.5.4 Pemantauan Kualitas Udara Ambien Berkala II-96
2.3.5.5 Reaktivasi *Car Free Day* II-96
2.3.5.6 Uji Kelayakan dan Uji Emisi Kendaraan Bermotor II-98
2.3.5.7 Kegiatan *Earth Hour* II-99
2.3.5.8 Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) II-100
2.3.5.9 Pengawasan Dokumen Persetujuan Lingkungan II-101
2.4 Risiko Bencana II-101
2.4.1 Driving Force II-102
2.4.1.1 Letak Geografis Kota Cimahi II-102
2.4.1.2 Pertumbuhan Penduduk dan Perkotaan II-103
2.4.1.3 Perubahan Iklim II-103
2.4.2 Pressure II-105
2.4.2.1 Kerentanan Infrastruktur II-105
2.4.2.2 Kerentanan Sosial dan Ekonomi II-106
2.4.2.3 Kerentanan Lingkungan II-107
2.4.3 State II-107
2.4.3.1 Frekuensi dan Intensitas Bencana II-107

2.4.3.2 Kerusakan Infrastruktur dan Properti II-108
2.4.4 Impact II-109
2.4.4.1 Dampak Sosial II-109
2.4.4.2 Kerugian Ekonomi II-110
2.4.5 Response II-111
2.4.5.1 Mitigasi Bencana II-111
2.4.5.2 Respons Darurat II-112
2.4.5.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi II-114
2.4.5.4 Penghijauan II-115
2.4.5.5 Pengadaan Sumur Resapan II-115
2.4.5.6 Inovasi Lingkungan II-116
2.4.5.7 Sosialisasi Kebersihan Lingkungan & Sekolah Informal II-118
2.5 Perkotaan/Persampahan II-118
2.5.1 Driving Force II-120
2.5.1.1 Pertumbuhan Penduduk II-120
2.5.1.2 Urbanisasi II-121
2.5.1.3 Konsumsi Barang II-121
2.5.1.4 Kurangnya Kesadaran Lingkungan II-122
2.5.2 Pressure II-122
2.5.2.1 Peningkatan Volume Sampah II-122
2.5.2.2 Penggunaan Lahan untuk Pembuangan SampahII-123
2.5.3 State II-124
2.5.3.1 Timbulan Sampah Kota Cimahi II-124
2.5.3.2 Fasilitas Tempat Buang Air Besar II-125

2.5.3.3 Tempat Pengolahan Akhir Sampah II-126
2.5.3.4 Neraca Pengelolaan Sampah Kota Cimahi II-127
2.5.4 Impact II-128
2.5.4.1 Kesehatan Masyarakat II-128
2.5.4.2 Kerusakan Ekosistem II-130
2.5.4.3 Dampak Ekonomi II-131
2.5.5 Response II-131
2.5.5.1 Kebijakan dan Regulasi II-131
2.5.5.2 Program Pendidikan dan Kesadaran MasyarakatII-131
2.5.5.3 Investasi dalam Infrastruktur Pengelolaan Sampah II-132
2.5.5.4 Sosialisasi dan Edukasi II-132
2.5.5.5 Anggaran Pengelolaan Lingkungan II-133
2.5.5.6 Bank Sampah II-134
2.6 Tata Kelola II-136
2.6.1 Driving Force II-137
2.6.1.1 Regulasi Nasional Terkait Lingkungan Hidup II-138
2.6.1.2 Jumlah Penduduk Kota Cimahi II-138
2.6.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi II-139
2.6.1.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kota Cimahi. II-140
2.6.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) II-141
2.6.2 Pressure II-142
2.6.2.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup II-142
2.6.3 State II-144

2.6.3.1 Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia .. II-144
2.6.3.2 Jumlah Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan II-145
2.6.3.3 Jumlah Perusahaan yang Mendapat Persetujuan Teknis/Rincian Teknis Limbah B3 ..... II-146
2.6.3.4 Pendapatan Asli Daerah II-146
2.6.4 Impact II-147
2.6.4.1 Pengawasan Persetujuan Lingkungan..... II-147
2.6.4.2 Jumlah LSM Lingkungan Hidup II-147
2.6.4.3 Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup..... II-149
2.6.5 Response..... II-149
2.6.5.1 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup II-149
2.6.5.2 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup II-150
2.6.5.3 Inovasi Daerah II-151
2.6.5.4 Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat II-152
BAB III ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH III-1
3.1 Perumusan Isu Prioritas III-1
3.2 Penetapan Isu Potensial III-3
3.3 Analisis Kriteria Penetapan III-2
3.4 Verifikasi dan Klarifikasi.....III-4
3.5 Penetapan Isu Prioritas III-5
3.5.1 Isu Kualitas dan Kuantitas Air di Kota Cimahi III-6
3.5.2 Isu Kualitas Udara di Kota Cimahi III-7
3.5.3 Isu Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi III-8
3.5.4 Isu Alih Fungsi Lahan di Kota Cimahi.....III-9

3.5.5 Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan di Kota Cimahi III-10

BAB IV INOVASI DAERAH KOTA CIMAHI IV-1

4.1 Pemetaan Inovasi Daerah IV-1

4.2 PATALI IV-2

4.3 SITANGAN IV-4

4.4 AWAS PANIK MAMA (Kawasan Tuntas Pilah Sampah Organik Maggotisasi Mandiri) IV-6

4.5 Bemara Nurseries IV-7

4.6 Aplikasi SiMantan IV-8

4.7 Pelestarian Kampung Adat Cireundeu IV-9

4.8 Uji Emisi Gratis IV-12

4.9 GRAK OMPIMPAH (Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah) IV-15

4.10 TPS RDF Santiong IV-23

4.11 TIPIRING SAMPAH (Tindak Pidana Ringan Pembuangan Sampah) IV-23

4.12 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan IV-25

4.13 Proklim (Pembinaan Program Kampung Iklim) IV-28

4.14 UPTD Rusunawa *Ecogreen* IV-30

4.15 Data *Ngahiji* IV-31

4.16 JAWARA IV-34

4.17 Gema Bugar IV-36

4.18 QRIS Retribusi Sampah IV-37

4.19 GRIYA PLUS IV-38

4.20 Gertam Parti IV-39

4.21 Siterang-DIGI IV-40

4.22 TAKARA IV-41

4.23 PASS AJA IV-42

4.24 SiPinter (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu) .. IV-43

BAB V PENUTUP V-1

5.1 Simpulan V-1

5.2 Rencana Tindak Lanjut V-2

DAFTAR PUSTAKA .....

LAMPIRAN I Kelengkapan Administrasi Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024 .....

LAMPIRAN II Tabel Utama .....

LAMPIRAN III Tabel Tambahan .....

LAMPIRAN IV Peta Spasial .....

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Luas Tanah Menurut Peruntukannya di Kota Cimahi I-31
Tabel 1. 2 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi I-36
Tabel 1. 3 Luas Jenis Batuan Menurut Kecamatan I-40
Tabel 1. 4 Pemantauan Iklim Kota Cimahi Tahun 2023 ..... I-42
Tabel 2. 1 Rincian Luas Hutan Kota di Kota Cimahi II-14
Tabel 2. 2 Rincian Lokasi Hutan Kota Publik dan Privat di Kota Cimahi II-14
Tabel 2. 3 Rincian Status Flora dan Fauna di Kota Cimahi II-16
Tabel 2. 4 Realisasi Penghijauan Kota Cimahi Tahun 2024 ..... II-21
Tabel 2. 5 Banyaknya Perusahaan Menurut Jenisnya di Kota Cimahi Tahun 2023 ..... II-29
Tabel 2. 6 Status Mutu Air Sungai Kota Cimahi II-57
Tabel 2. 7 Profil Desa/Kelurahan Program Citarum Harum II-80
Tabel 2. 8 Penggunaan Bahan Bakar pada Industri II-85
Tabel 2. 9 Kategori ISPU di Lokasi Titik Pantau tahun 2023 ..... II-89
Tabel 2. 10 Jumlah dan Lokasi Kejadian Bencana Di Kota Cimahi II-108
Tabel 2. 11 Jumlah Korban Mengungsi Akibat Bencana yang Terjadi II-110
Tabel 2. 12 Realisasi Penghijauan Kota Cimahi Tahun 2023 ..... II-115
Tabel 2. 14 Volume Eksisting TPPAS II-127
Tabel 2. 14 Jumlah Penyakit Utama yang Diderita Masyarakat II-129
Tabel 2. 15 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan II-145
Tabel 2. 16 Rincian Besaran PAD di Kota Cimahi Tahun 2023 ..... II-147
Tabel 2. 17 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bidang Lingkungan Hidup II-148
Tabel 2. 18 Inovasi Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 ..... II-152
Tabel 2. 19 Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2023 ..... II-152

Tabel 3. 1 Rekap Isu Lingkungan di Kota Cimahi Tahun 2024..... III-4
Tabel 3. 2 Hasil Penyaringan Longlist Isu Potensial Lingkungan..... III-2
Tabel 3. 3 Hasil Scoring Isu Prioritas Oleh Tim Internal..... III-3
Tabel 3. 4 Rekapitulasi Hasil Scoring Isu Prioritas di Kota Cimahi..... III-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Persentase Luas Kecamatan di Kota Cimahi I-29
Gambar 1. 2 Peta Administrasi Kota Cimahi I-30
Gambar 1. 3 Peta Tutupan Lahan Kota Cimahi I-32
Gambar 1. 4 Peta Aliran Sungai Kota Cimahi I-34
Gambar 1. 5 Peta Kemiringan Lereng Kota Cimahi..... I-39
Gambar 1. 6 Jumlah Penduduk Kota Cimahi Tahun 2017-2023..... I-43
Gambar 1. 7 Diagram Alir Perumusan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024 ..... I-52
Gambar 2. 1 Framework DPSIR Isu Tata Guna Lahan.....II-3
Gambar 2. 2 Tren Jumlah Penduduk di Kota Cimahi II-4
Gambar 2. 3 Tren Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Cimahi.....II-5
Gambar 2. 4 Tren PDRB atas Dasar Harga Berlaku di Kota Cimahi....II-8
Gambar 2. 5 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Cimahi II-9
Gambar 2. 6 Peta Lahan Kritis di Kota Cimahi II-11
Gambar 2. 7 Tren Luas Penggunaan Lahan Non Pertanian di Kota Cimahi II-12
Gambar 2. 8 Jumlah Spesies Flora dan Fauna di Kota Cimahi.....II-16
Gambar 2. 9 Cuplikan Beranda siTarung Kota Cimahi II-19
Gambar 2. 10 Kampung Adat Cireundeu untuk Pelestarian Habitat...II-20
Gambar 2. 11 Sebaran Taman Lingkungan II-22
Gambar 2. 12 Framework DPSIR Isu Kualitas Air.....II-25
Gambar 2. 13 Tren Jumlah Penduduk di Kota Cimahi II-26
Gambar 2. 14 Curah Hujan Rata-rata Bulanan dan Hari Hujan Rata-rata Bulanan di Kota Cimahi Tahun 2023.....II-27
Gambar 2. 15 Tren Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi II-30

Gambar 2. 16 Perbandingan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai di Kota Cimahi Terhadap DAS Citarum II-31
Gambar 2. 17 Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Cimahi II-32
Gambar 2. 18 Peta Persentase Fasilitas Tempat BAB II-33
Gambar 2. 19 Tren Angka Kemiskinan di Kota Cimahi II-33
Gambar 2. 20 Tren Jumlah Penduduk Miskin di Kota Cimahi II-34
Gambar 2. 21 Jumlah Limbah Berdasarkan Sumber Pencemarnya II-35
Gambar 2. 22 Selisih Ketersediaan Air di Kota Cimahi II-37
Gambar 2. 23 Lokasi Pemantauan Embung Kota Cimahi II-38
Gambar 2. 24 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter Suhu di Kota Cimahi II-38
Gambar 2. 25 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter pH di Kota Cimahi II-39
Gambar 2. 26 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter TDS di Kota Cimahi II-39
Gambar 2. 27 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter TSS di Kota Cimahi II-40
Gambar 2. 28 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter DO di Kota Cimahi II-40
Gambar 2. 29 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter BOD di Kota Cimahi II-41
Gambar 2. 30 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter COD di Kota Cimahi II-41
Gambar 2. 31 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter Fenol di Kota Cimahi II-42
Gambar 2. 32 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter Minyak dan Lemak di Kota Cimahi II-42
Gambar 2. 33 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter Fecal Coliform di Kota Cimahi II-43
Gambar 2. 34 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter Total Coliform di Kota Cimahi II-43

Gambar 2. 35 Konsentrasi TSS Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023 .II-50
Gambar 2. 36 Konsentrasi DO Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023 ..II-51
Gambar 2. 37 Konsentrasi BOD Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023 II-52
Gambar 2. 38 Konsentrasi COD Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023 II-53
Gambar 2. 39 Konsentrasi Total Phosphat Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023 .....II-54
Gambar 2. 40 Konsentrasi Nitrat Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023 .....II-55
Gambar 2. 41 Konsentrasi Fecal Coliform Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023 .....II-56
Gambar 2. 42 Tren Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi II-59
Gambar 2. 43 Hasil Pemantauan Kualitas Air Hujan di Kota Cimahi...II-60
Gambar 2. 44 Peta Pemantauan Kualitas Air Sumur Kota Cimahi Tahun 2023 .....II-62
Gambar 2. 45 Hasil Uji Parameter NO3 sebagai N pada Kualitas Air Sumur Kota Cimahi.....II-63
Gambar 2. 46 Hasil Uji Parameter Besi pada Kualitas Air Sumur Kota Cimahi II-64
Gambar 2. 47 Hasil Uji Parameter Mangan pada Kualitas Air Sumur Kota Cimahi II-65
Gambar 2. 48 Hasil Uji Parameter E. Coli pada Kualitas Air Sumur Kota Cimahi II-66
Gambar 2. 49 Selisih Ketersediaan Air di Kota Cimahi Sejak Tahun 2023 .....II-67
Gambar 2. 50 Selisih Ketersediaan Air di Kota Cimahi Tahun 2023 ...II-68
Gambar 2. 51 Penurunan Penderita Penyakit Bawaan Air.....II-69
Gambar 2. 52 Tren Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Kota Cimahi II-70
Gambar 2. 53 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Media Lingkungan yang Tercemar II-71

Gambar 2. 54 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Domestik II-74
Gambar 2. 55 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Peternakan II-75
Gambar 2. 56 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Pertanian II-76
Gambar 2. 57 Peresmian Penggunaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Tahun 2023 .....II-78
Gambar 2. 58 Kolaborasi Pentaheliks sebagai upaya Pengurangan Sampah di Sungai II-81
Gambar 2. 59 Framework DPSIR Isu Kualitas Udara II-82
Gambar 2. 60 Tren Jumlah Perusahaan di Kota Cimahi per Tahun....II-83
Gambar 2. 61 Hasil Pemantauan Konsentrasi SO_2 di Kota Cimahi II-87
Gambar 2. 62 Hasil Pemantauan Konsentrasi NO_2 di Kota Cimahi.....II-87
Gambar 2. 63 Hasil Pemantauan Konsentrasi O_3 di Kota Cimahi II-88
Gambar 2. 64 Hasil Pemantauan Konsentrasi Pb di Kota Cimahi II-88
Gambar 2. 65 Tren Indeks Kualitas Udra Kota Cimahi.....II-90
Gambar 2. 66 Pemantauan Kualitas Air Hujan di Kota Cimahi Tahun 2023 .....II-92
Gambar 2. 67 Satlantas Polres Kota Cimahi mengawal kegiatan CFD di Kota Cimahi.....II-97
Gambar 2. 68 Uji KIR oleh Dishub Kota Cimahi Tahun 2024.....II-98
Gambar 2. 69 Poster Kegiatan *Earth Hour* Kota Cimahi.....II-100
Gambar 2. 70 Framework DPSIR Isu Risiko Bencana II-102
Gambar 2. 71 Tren Jumlah Penduduk di Kota Cimahi II-103
Gambar 2. 72 Tren Perubahan Suhu Di Kota Cimahi.....II-104
Gambar 2. 73 Tren Curah Hujan di Bulanan di Kota Cimahi II-104
Gambar 2. 74 *Overlay* Peta Bahaya Banjir dengan Citra Satelit Kota Cimahi II-106
Gambar 2. 75 Jumlah Perkiraan Kerugian Akibat Kejadian Bencana di Kota Cimahi Tahun 2023.....II-111

Gambar 2. 76 Sosialisasi Kampung Siaga Bencana Kota Cimahi..... II-112
Gambar 2. 77 Sosialisasi *Public Safety* Center Kota Cimahi II-114
Gambar 2. 78 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2023 ..... II-118
Gambar 2. 79 *Framework* Analisis DPSIR Isu Perkotaan/Persampahan II-119
Gambar 2. 80 Tren Jumlah Penduduk Kota Cimahi II-120
Gambar 2. 81 Timbulan Sampah Kota Cimahi II-123
Gambar 2. 82 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Cimahi Pertahun.... II-124
Gambar 2. 83 Komposisi Sampah Kota Cimahi Tahun 2023 ..... II-125
Gambar 2. 84 Jumlah Fasilitas Tempat Buang Air Besar Masyarakat di Kota Cimahi..... II-126
Gambar 2. 85 Neraca Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2024 ..... II-128
Gambar 2. 86 Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dengan *Junior Expert* dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA) II-133
Gambar 2. 87 Jumlah Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kota Cimahi II-134
Gambar 2. 88 Jumlah Bank Sampah Tiap tahun di Kota Cimahi..... II-135
Gambar 2. 89 Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Induk Cimahi (Samici) II-136
Gambar 2. 90 *Framework* Analisis DPSIR Isu Tata Kelola..... II-137
Gambar 2. 91 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi II-140
Gambar 2. 92 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Cimahi II-141
Gambar 2. 93 Tren Indeks Pembangunan Manusia di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat..... II-142
Gambar 2. 94 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Media Lingkungan yang Tercemar II-143

Gambar 2. 95 Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan II-144
Gambar 2. 96 Jumlah Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kota Cimahi II-150
Gambar 3. 1 Diagram Alir Prumusan Isu Prioritas III-2
Gambar 4. 1 Pemetaan Inovasi Daerah Terhadap Isu Prioritas Kota Cimahi Tahun 2023 ..... IV-1
Gambar 4. 2 Hasil Rekap Pelaporan PATALI IV-3
Gambar 4. 3 Dashboard SITANGAN IV-5
Gambar 4. 4 Hasil Rekap Pemantauan pada SITANGAN IV-6
Gambar 4. 5 Hasil Kegiatan Program Awas Panik mama IV-7
Gambar 4. 6 Kegiatan Bemara Nurseries IV-8
Gambar 4. 7 Tampilan Website SiMantan IV-9
Gambar 4. 8 Peta Wisata Kampung Cireundeu IV-11
Gambar 4. 9 Kegiatan Adat Warga Kampung Cireundeu IV-12
Gambar 4. 10 Pelaksanaan Uji emisi Gratis di kota Cimahi IV-15
Gambar 4. 11 Kegiatan Grak Ompimpah IV-17
Gambar 4. 12 Tren Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi IV-17
Gambar 4. 13 Penggunaan Tepung Grak Ompimpah IV-19
Gambar 4. 14 Sosilaisasi Pentas bank Sampah IV-21
Gambar 4. 15 Kegiatan CEU OMAH di Kota Cimahi IV-22
Gambar 4. 16 Kondisi TPS RDF Santiong IV-23
Gambar 4. 17 Kegiatan Tipiring Sampah IV-25
Gambar 4. 18 Hasil monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaku Usaha .. IV-27
Gambar 4. 19 Rekap Peringkat Prnilaian Ketaatan Kegiatan Usaha .. IV-28
Gambar 4. 20 Kegiatan Rusunawa Ecogreen IV-31
Gambar 4. 21 Dashboard Aplikasi Cimahi Ngahiji IV-33
Gambar 4. 22 Visualisasi 3D GIS Perkotaan IV-34
Gambar 4. 23 Proses Pembersihan dan Pengangkutan Sampah IV-35

Gambar 4. 24 Sosialisasi terkait Larangan Pembuangan Sampah ke Sungai IV-36
Gambar 4. 25 Kegiatan Gema Bugar Kota Cimahi IV-37
Gambar 4. 26 Kegiatan Pembayaran Retribusi Sampah IV-38
Gambar 4. 27 Kegiatan Perbaikan Jamban. (a) Sebelum Perbaikan (b) Setelah Perbaikan IV-39
Gambar 4. 28 Kegiatan Perbaikan Rumah. (a) Sebelum Perbaikan (b) Setelah Perbaikan IV-39
Gambar 4. 29 Kegiatan Gertam Parti IV-40
Gambar 4. 30 Pelaksanaan Inovasi Siterang IV-41
Gambar 4. 31 Konsep Inovasi TAKARA IV-42
Gambar 4. 32 Konsep Inovasi PASS AJA IV-43
Gambar 4. 33 Dashboard Aplikasi SiPinter IV-44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Kelengkapan Administrasi Penyusunan DIKPLHD Tahun 2024

- SK Tim Penyusun
- Biodata Penyusun
- Undangan Fokus Grup Diskusi (FGD)
- Berita Acara Fokus Grup Diskusi (FGD)
- Notulensi Fokus Grup Diskusi (FGD)
- Daftar Hadir Fokus Grup Diskusi (FGD)

Lampiran II Tabel Utama

Lampiran III Tabel Tambahan

Lampiran IV Peta Spasial

Lampiran V Hasil FGD

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan yang terjadi di lingkungan hidup merupakan hal yang wajar dialami karena salah satu bagian dari proses alam. Permasalahan lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu alam dan manusia. Masalah lingkungan hidup dari faktor alam yang terjadi tanpa menimbulkan akibat yang berarti, dapat pulih secara alami (Herlina, 2015). Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu global utama yang dihadapi saat ini. Manusia dengan segala kekuasaan yang dimiliki layak dikaitkan dengan masalah-masalah lingkungan hidup yang bermunculan. Pola pikir dan pandangan manusia terhadap pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan pada akhirnya akan menimbulkan pencemaran lingkungan.

Isu-isu terkait kualitas lingkungan seperti alih fungsi lahan, pencemaran air sungai, pencemaran udara, dan persampahan merupakan beberapa isu yang harus diperhatikan secara signifikan. Namun, sebagaimana hak dan kewajiban manusia atas lingkungan hidup di sekitarnya, seluruh *stakeholder* juga berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut perlu adanya informasi tentang kondisi lingkungan hidup, yaitu kondisi secara menyeluruh terkait permasalahan lingkungan yang sedang dialami. Oleh karena itu diperlukan informasi lingkungan hidup yang tersedia dan terakses oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 62 ayat (1-3) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

Sistem informasi lingkungan hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat; Sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lain.

Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk kesadaran lingkungan dan respon atas permasalahan lingkungan yang terjadi. Pemerintah Kota Cimahi menindaklanjuti upaya ini dengan mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan sekaligus menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan isu prioritas dan membuat rekomendasi bagi penyusun kebijakan dan perencanaan dalam mengelola lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan.

Pemerintah Kota Cimahi Menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2024. Penyusunan DIKPLHD ini merupakan bentuk akuntabilitas Pemerintah Kota Cimahi kepada publik. Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi didasari oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan disusun secara terpadu serta wajib dipublikasikan kepada masyarakat sehingga menjadi bagian penting bagi sarana penyediaan data pada sistem informasi lingkungan. DIKPLHD berisi pengumpulan dan pengolahan data, analisis data, dokumentasi kebijakan, dan penyajian informasi dengan model DPSIR (*Driving force, Pressure, State, Impact, and Response*) yang dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan pengelolaan/pengendalian isu lingkungan hidup yang terjadi atau sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan lingkungan, sehingga dapat memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan mewujudkan salah satu misi dari Kota Cimahi.

1.2 Profil Daerah Kota Cimahi

1.2.1 Letak Geografis dan Astronomis

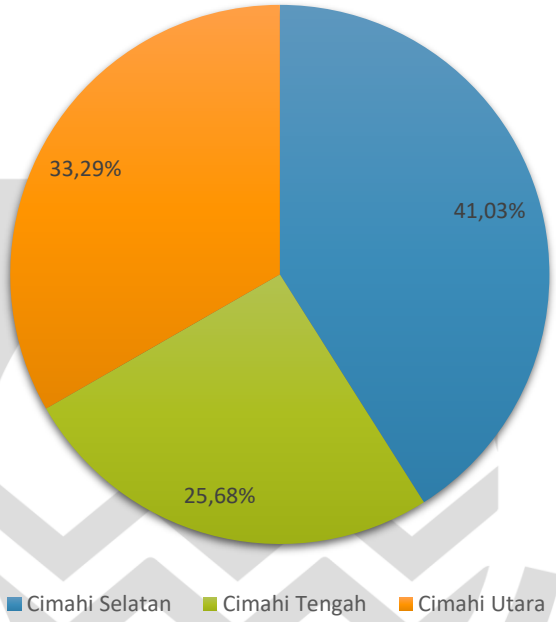
Letak astronomis wilayah Kota Cimahi yakni berada di $107^0$30'37" – $107^0$34'34" Bujur Timur dan $6^0$49'38" – $6^0$55'58" Lintang Selatan. Kota Cimahi adalah sebuah kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Cimahi disebut sebagai penyangga bagi Kota Bandung karena letaknya hanya sekitar 7,5 km dari Kota Bandung. Letak Kota Cimahi juga sangat strategis karena didukung oleh beberapa jalur kegiatan ekonomi regional, pertama jalan nasional yang menghubungkan Kota Bandung dan Kota Jakarta, kedua jalan tol Cileunyi-Padalarang-Purwakarta, dan ketiga jalur kereta api Bandung-Jakarta (Peraturan Wali Kota Cimahi nomor 12 Tahun 2022).

1.2.2 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kota Bandung Dengan Kota Cimahi, Kota Cimahi Dengan Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Dengan Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, luas Kota Cimahi secara keseluruhan mencapai 42,43 km^2 (4.243,20 Ha) dengan batas-batas wilayahnya, sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Parongpong, Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukasari, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Cicendo dan Kecamatan Andir Kota Bandung.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat, dan Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung.
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Padalarang, Kecamatan Batujajar dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Kota Cimahi terbagi menjadi 3 kecamatan, Kecamatan Cimahi Selatan memiliki lahan yang paling luas jika dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya yaitu 17,41 km^2 atau setara dengan 41,03 persen dari luas Kota Cimahi. Kecamatan Cimahi Utara dengan luas 14,13 km^2 atau 33,29 persen dan Kecamatan Cimahi Tengah degan persentase paling kecil yaitu 10,89 km^2 atau 25,68 persen dari luas Kota Cimahi. Persentase wilayah administrasi Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 1. 1.**



Gambar 1. 1 Persentase Luas Kecamatan di Kota Cimahi

(Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2017)

Kota Cimahi termasuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dan meliputi 3 Kecamatan yang terdiri atas 15 Kelurahan yaitu; Kecamatan Cimahi Utara terdiri atas 4 kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri atas 6 kelurahan, dan Kecamatan Cimahi Selatan terdiri atas 5 kelurahan**.** Peta wilayah administrasi Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 1. 2.**

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Batas Administrasi Kota Cimahi

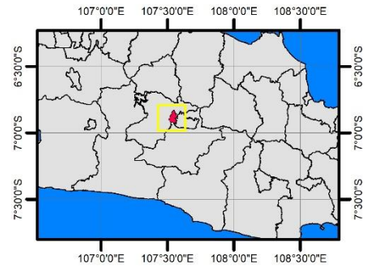
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Batas Kota
- Batas Kelurahan
- Sungai
- Danau

Batas Kecamatan

Kecamatan

- Kecamatan Cimahi Selatan
- Kecamatan Cimahi Tengah
- Kecamatan Cimahi Utara

Sumber Data dan Riwayat Peta : Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

1.2.3 Penggunaan Lahan

Berdasarkan fungsi kota secara umum, jenis kegiatan Kecamatan Cimahi Utara diarahkan untuk perumahan, pendidikan dan pelayanan umum. Kecamatan Cimahi Tengah, jenis kegiatannya diarahkan untuk perdagangan dan jasa, pemerintahan, serta pendidikan. Kecamatan Cimahi Selatan, jenis kegiatannya diarahkan untuk Industri, perumahan, pendidikan dan pelayanan umum. Secara keseluruhan penggunaan lahan di Kota Cimahi, dapat dilihat pada **Tabel 1. 1**. Secara visual, peruntukan lahan di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 1. 3.**

Tabel 1. 1 Luas Tanah Menurut Peruntukannya di Kota Cimahi

Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
Jalan Arteri Primer	5,57
Jalan Tol	28,35
Kolam	5,72
Lapangan	54,27
Perkebunan/Kebun	134,83
Permukiman dan Tempat Kegiatan	2.956,28
Sawah	323,63
Semak Belukar	158,5
Situ	0,63
Tanah Kosong/Gundul	129,78
Tegalan/Ladang	445,64
Total	4243,2

(Sumber: Dokumen Teknis Revisi RTRW Kota Cimahi 2012-2032)

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Pola Ruang
Kota Cimahi

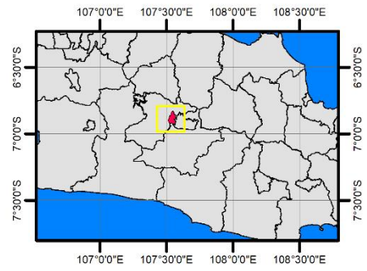
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Batas Kota
- Batas Kelurahan
- Sungai
- Danau

POLA RUANG

Zona

- Industri
- Perairan
- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Perlindungan Setempat
- Perumahan
- Peruntukan Campuran
- Peruntukan Khusus
- Peruntukan Lainnya
- Ruang Terbuka Hijau
- Sarana Pelayanan Umum

Sumber Data dan Riwayat Peta : Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

1.2.4 Hidrologi

Kondisi hidrologi Kota Cimahi secara umum terbagi ke dalam 2 (dua) jenis yaitu air permukaan dan air tanah. Kota Cimahi terletak di hulu Sungai Citarum merupakan bagian dari Daerah Cekungan Bandung dan salah satu daerah lembah Sungai Citarum. Sungai yang melalui Kota Cimahi adalah Sungai Cimahi dengan debit air rata-rata 3.800 l/dt. Anak sungai yang melalui Kota Cimahi ada lima yaitu Sungai Cisangkan, Sungai Cibeureum, Sungai Cihaur, Sungai Cilember, Sungai Cimahi. Peta aliran sungai Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 1. 4.** Bila ditinjau dari beban pencemar yang diterima badan air, terdapat tiga sungai yang menjadi badan air penerima buangan limbah industri, domestik, rumah sakit, dan lain sebagainya, adalah:

1. Sungai Cimahi, panjang 7 km, lebar (5-10) m, melintasi tiga kecamatan, yaitu Cimahi Tengah, Utara dan Selatan.
2. Sungai Cisangkan, panjang 4,5 km, lebar (3-7) m, melintasi Kec. Cimahi Tengah dan Selatan.
3. Sungai Cigugur/Cibaligo, panjang 2 km, lebar (3-5) m, melintasi Kec. Cimahi Selatan.

Kota Cimahi diproyeksikan memiliki potensi sumber daya air sebesar 46,71 juta m^3 per tahun yang terdiri atas air permukaan sebesar 33,10 juta m^3 dan air tanah sebesar 13,61 juta m^3. Air tanah di Kota Cimahi berasal dari air tanah di sebelah selatan Sesar Lembang. Kota Cimahi terletak pada wilayah hidrogeologi Cekungan Air Tanah (CAT) Bandung-Soreang yang juga mencakup beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pemanfaatan air tanah di Kota Cimahi diatur oleh Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah.

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Daerah Aliran Sungai Kota Cimahi

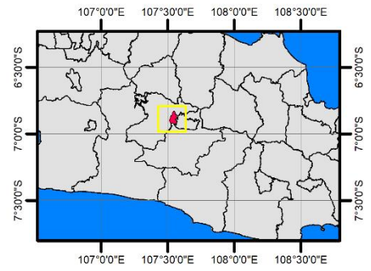
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Batas_Kota
- Sungai
- Danau

Nama DAS

- DAS Cibeureum
- DAS Cihaur
- DAS Cilember
- DAS Cimahi
- DAS Cisangkan

Sumber Data dan Riwayat Peta :
Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

Kondisi air tanah di Kota Cimahi juga ditandai dengan adanya daerah aliran langka. Potensi mata air langka tersebar di Kecamatan Cimahi Selatan seluas 553,02 Ha dan di Sebagian kecil wilayah Kecamatan Cimahi Tengah seluas 3,73 Ha. Disamping itu terdapat akuifer produktif di wilayah Kecamatan Cimahi Selatan seluas 855,12 ha. Potensi air tanah di Kota Cimahi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah air tanah (RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022, 2016):

a. Wilayah akuifer produktif tinggi dengan penyebaran luas.

Pada wilayah ini air tanah terdapat pada pori-pori antar butir dari endapan kipas vulkanik muda, yang terdiri dari tufa pasir dan tufa berbatu apung. Berdasarkan data hasil pemboran sumur bor PDAM (kedalaman 150-180 m), debit sumur berkisar 13-34 Liter/detik, harga *transmissivity* (keterusan) berkisar 100-1.000 m^2/hari. Kedalaman muka air tanah statis berkisar 0,6-50 m bawah muka tanah. Penyebaran wilayah air tanah ini meliputi bagian timur Kecamatan Cimahi Selatan serta Sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Tengah.

b. Wilayah akuifer produktif sedang dengan penyebaran luas.

Pada wilayah ini air tanah terdapat pada celah dan ruang antar butir dari endapan tufa pasir dan breksi. Debit sumur bor umunya kurang dari 7 Liter/detik, harga *transmissivity* (keterusan) kurang dari 100 m^2/hari. Kedalaman muka air tanah statis berkisar 20-50 m bawah muka tanah. Wilayah ini dijumpai dibagian selatan Kecamatan Cimahi Selatan serta pada Sebagian besar wilayah Kecamatan Cimahi Utara, air tanah dangkal umumnya dijumpai pada kedalaman > 10 meter.

c. Wilayah akuifer setempat.

Pada wilayah ini air tanah terdapat pada celah endapan breksi vulkanik dan lava. Wilayah ini dijumpai terutama dibagian barat Kecamatan Cimahi Selatan yang berbatasan dengan Batujajar.

1.2.5 Topografi

Secara topografi Kota Cimahi terletak pada elevasi +600 meter hingga +1.000 meter diatas permukaan laut (dpl), kondisi tersebut berdampak pada sebagian wilayah Kota Cimahi menjadi bagian Kawasan Bandung Utara (KBU) yaitu +750 meter dpl. Keadaan tersebut berdampak pada kegiatan pembangunan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku yang menunjang fungsi kawasan tersebut. Topografi wilayah Kota Cimahi merupakan lembah cekungan yang relatif melandai ke arah selatan selaras dengan arah aliran air permukaan. Ketinggian di bagian utara mencapai 1.040 mdpl (Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara), yang berupa lereng kaki komplek pegunungan Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu serta ketinggian di bagian selatan sekitar ± 685 mdpl (Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan) yang mengarah ke Sungai Citarum. Dilihat dari kemiringan lerengnya, Kota Cimahi memiliki kemiringan lereng 0-2% dominan terletak di Kecamatan Cimahi Tengah dan Cimahi Selatan. Daerah yang memiliki kemiringan lereng 2-15% dominan terletak di wilayah Kecamatan Cimahi Utara. Daerah yang memiliki kemiringan lereng 15-25%, 25-40% dan lebih besar dari 40% tersebar merata di seluruh Kota Cimahi yang total luasnya tidak lebih dari 4 Ha.

Secara rinci, luasan wilayah Kota Cimahi per kecamatan berdasarkan kemiringan lereng dapat dilihat pada **Tabel 1. 2.**

Tabel 1. 2 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lereng di Kota Cimahi

No.	Kecamatan	Kemiringan Lereng					Total (Km^2)
		0-2%	2-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1	Cimahi Selatan	9,75	3,03	0,82	0,97	0,29	14,86
2	Cimahi Tengah	10,33	2,89	0,14	0,11	0,02	13,48
3	Cimahi Utara	2,61	9,85	1,06	0,51	0,12	14,14
	Total (Km^2)	22,69	15,77	2,02	1,59	0,43	42,48

(Sumber : Peta Dasar Validasi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019)

Secara umum Kota Cimahi memiliki tiga jenis ekoregion darat, yaitu dataran vulkanik, perbukitan struktural, dan perbukitan vulkanik. Dataran vulkanik hampir mencakup seluruh kecamatan di Kota Cimahi yaitu Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Kondisi iklim di ekoregion dataran vulkanik secara umum relatif basah dengan curah hujan tahunan sedang hingga tinggi (2.000-4.000 mm) dengan suhu berkisar antara 22-26^{o}C. Topografi berupa dataran dengan morfologi datar hingga landai, dan kemiringan lereng secara umum 0-3%, berombak (3-8%), hingga bergelombang (8-15%). Material penyusun ekoregion ini umumnya berasal dari hasil erupsi gunung berapi berupa bahan-bahan piroklastik berukuran halus (pasir halus), sedang (kerikil), hingga kasar (kerakal) dengan sortasi yang baik (lapisan tebal dengan material kasar di bagian bawah, semakin ke atas semakin halus). Proses penyebaran dan pengendapan material dibantu oleh aktivitas aliran sungai (fluvial) dan angin serta gravitasi berupa material jatuhan (*airborne deposite*).

Perbukitan struktural Cimahi terletak di sebagian wilayah administratif Kota Cimahi yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan. Perbukitan struktural merupakan perbukitan yang tersusun oleh batuan intrusi dan batuan sedimen (batu gamping dan batu pasir) yang mengalami deformasi oleh tenaga tektonik, dengan membentuk struktur lipatan atau patahan. Morfologi yang terbentuk berupa perbukitan pada elevasi sedang (< 300 m) dengan kemiringan lereng yang curam (25-45%). Kondisi iklim pada umumnya termasuk tropika basah, namun semakin ke arah timur cenderung semakin kering. Suhu udara relatif sejuk (20-22^{o}C).

Perbukitan Vulkanik memiliki topografi berbukit dengan morfologi, amplitudo relief 0 – 30 m, dan kemiringan lereng yang curam (25 – 45%). Ekoregion ini sebagian besar dapat ditemukan di bagian lereng tengah gunung berapi yang ada. Tanah yang dijumpai pada ekoregion ini didominasi oleh Podsolik dan Latosol yang memiliki tingkat kesuburan yang

bervariasi. Sedangkan pada daerah yang memiliki ketinggian di atas permukaan laut yang cukup tinggi dapat dijumpai tanah Andosol yang kesuburannya cukup tinggi. Karakteristik yang demikian menyebabkan perbukitan vulkanik ini mempunyai tipe penutupan/penggunaan lahan beragam, hutan, semak belukar, lahan pertanian dan permukiman (KLH, 2014).

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Kemiringan Lereng Kota Cimahi

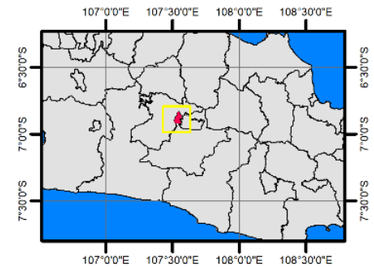
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horisontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Batas Kota
- Batas Kelurahan
- Sungai
- Danau

Kemiringan Lereng

Kategori

- 0 - 8 %
- 8 - 15 %
- 15 - 25 %
- 25 - 40 %

Sumber Data dan Riwayat Peta : Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

1.2.6 Geologi

Jenis batuan yang terdapat di Kota Cimahi terdiri dari jenis batuan Andesit, Basal, Lava, Tufa Berbatu apung, Tufa Pasir dan Breksi Tufaan Lava, Batu pasir, Konglomerat. Jenis batuan yang mendominasi di Kota Cimahi yaitu jenis batuan Tufa Berbatu apung yang tersebar di seluruh kecamatan, jenis batuan Tufa Berbatu apung dibanding dengan jenis batuan lainnya yang ada di Kota Cimahi merupakan jenis batuan yang kekerasan lunak di banding dengan jenis batuan andesit, basal dan breksi tufaan lava, batu pasir, konglomerat yang memiliki tingkat kekerasan tinggi. Bahan penyusun jenis batuan tufa berbatu apung terdiri dari pasir tufaan, lapili, bom-bom, lava berongga dan kepingan-kepingan andesit-basal padat bersudut yang berasal dari gunung Tangkuban perahu. Klasifikasi jenis batuan yang ada di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Tabel 1. 3.**

Tabel 1. 3 Luas Jenis Batuan Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jenis Batuan (Ha)						Total
		A	B	Pb	Qyt	Qyd	Qyl	
1	Cimahi Selatan	16,73	12,77	67,68	1.557,10	-	-	1.654,30
2	Cimahi Tengah	-	4,64	-	826,86	158,11	-	989,62
3	Cimahi Utara	-	-	-	298,62	1.082,71	27,63	1.408,96

Keterangan: A=Andesit, B= Basal, Pb=Breksi Tufaan lava, Batu pasir, Konglomerat, Qyt= Tufa Batu apung, Qyd= Tufa Pasir, dan Qyl= Lava

Sumber : Peta Dasar Validasi Badan Informasi Geospasial (BIG), 2019

1.2.7 Klimatologi

Kota Cimahi dan sekitarnya memiliki iklim tropis, dicirikan dengan adanya musim kemarau selama bulan Juni – September serta musim penghujan berlangsung pada periode Oktober – Mei. Rata-rata curah hujan tahunan pada setiap wilayah di sekitar Kota Cimahi bervariasi tergantung dari elevasi permukaan tanah. Pada elevasi ±700-850 mdpl, curah hujan bervariasi antara 1.700-3.000 mm/tahun, sedangkan pada elevasi > 850 mdpl hingga puncak pegunungan (+3.000 m) curah hujan mencapai 3.000-4.000 mm/tahun.

Kelembaban udara relatif konstan dengan variasi kecil. Pada dataran Bandung dan Cimahi kelembaban udara minimum sebesar 73% pada bulan September, dan maksimum 83 % pada bulan April. Rata-rata temperatur udara berkisar 22,7^{0}C – 23,2^{0}C. Temperatur udara cenderung turun sejalan dengan kenaikan elevasi, besarnya penurunan temperatur sekitar 0,6^{0}C setiap kenaikan elevasi 100 m. Evapotranspirasi bulanan berkisar 114 hingga 166 mm/bulan atau rata-rata 1.572 mm per tahun.

Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Oldeman (Lakitan, 2002), iklim di Kota Cimahi termasuk dalam iklim tipe B2. Jenis tanaman pertanian yang cocok untuk tipe iklim tersebut adalah tanaman padi yang dapat ditanam sebanyak dua kali dalam setahun dan palawija yang dapat ditanam baik pada saat musim hujan maupun musim kemarau. Dengan curah hujan berkisar antara 1.700–4.000 mm per tahun dan luar wilayah 4.052,88 ha, Kota Cimahi memiliki potensi volume air hujan sebesar 68,90 – 162,12 juta m^3 per tahun. Selain sebagai sumber air untuk pertanian, dengan sentuhan teknologi air hujan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih.

Pada tahun 2023, hujan relatif terjadi sepanjang tahun dengan intensitas yang berbeda-beda setiap bulannya. Curah hujan tertinggi pada bulan November yaitu sebesar 344,8 mm. Sementara curah hujan terendah terjadi pada bulan September yaitu hanya 16,8 mm. Pengamatan iklim di Kota Cimahi tahun 2023 dapat dilihat pada **Tabel 1. 4**

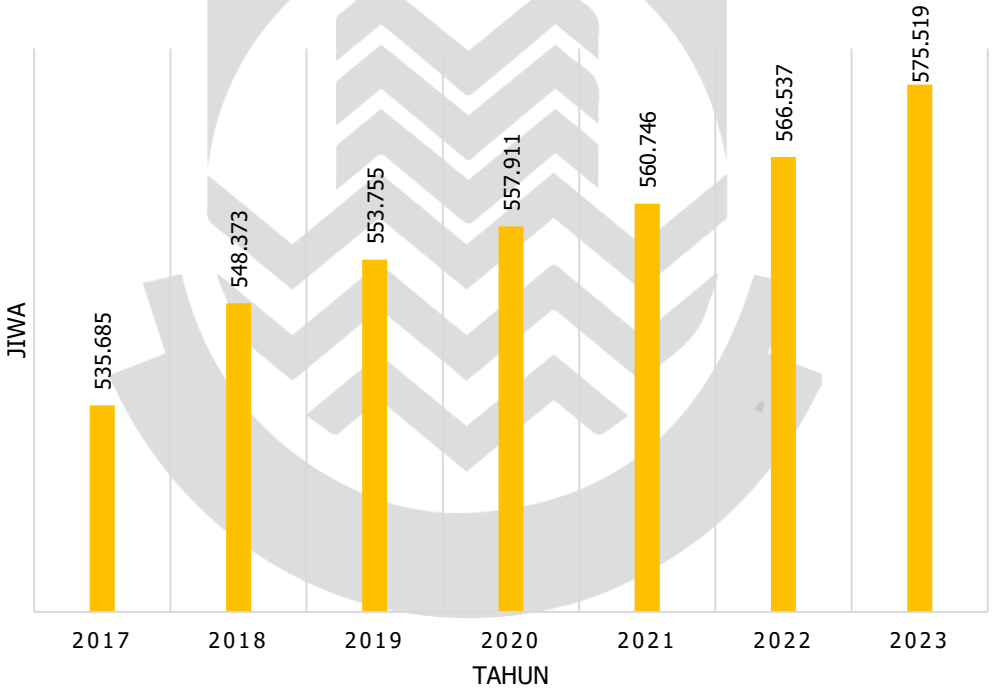
Tabel 1. 4 Pemantauan Iklim Kota Cimahi Tahun 2023

Bulan	Suhu (°C)			Kelembaban (%)			Kecepatan Angin (knot)			Tekanan Udara (mbar)			Jumlah Curah Hujan (mm/tahun)	Jumlah Hari Hujan (hari)
	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks	Min	Rata-rata	Maks		
Januari	17,6	23,9	32,2	65	80	87	-	2,8	6,7	1012	1015,1	1018	48	13
Februari	17	23,2	30,4	72	82	87	-	4	7,3	1013,2	1014,9	1016,8	166	20
Maret	18	23,6	32,4	65	83	91	-	2,7	6,5	1014,3	1016,1	1018,5	258	19
April	17	24	30,8	66	83	91	-	2,2	6,3	1013	1015,3	1017,7	159,5	18
Mei	17,6	24,5	31,6	63	80	88	-	2,3	5,9	1013,1	1016,7	1018,7	230,8	16
Juni	16,8	24,1	32,4	61	79	87	-	2,6	5,4	1014,9	1016,5	1017,7	113,1	13
Juli	15,2	23,1	30,8	55	74	85	-	2,8	6	1015,4	1017,2	1019,4	55,5	6
Agustus	16,2	23,2	32,8	47	73	88	-	2,9	5,8	1016	1017,9	1020,4	26,7	6
September	14,6	24,2	34	42	64	78	-	3,5	6,6	1016,2	1017,8	1019,1	16,8	2
Oktober	16,8	25,5	34,4	45	69	83	-	3,4	6,5	1016,3	1018,3	1019,4	103,4	8
November	18,2	24,5	32,8	68	82	89	-	2,2	6	1014,3	1016,5	1018	344,8	23
Desember	17,8	24,3	32,8	64	82	92	-	2,1	5,8	1015	1016,5	1018,7	248,6	19

Sumber : Kota Cimahi dalam Angka, 2023

1.2.8 Demografi

Jumlah penduduk Kota Cimahi yang banyak, akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat Kota Cimahi kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulanginya. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah penduduk Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah penduduk Kota Cimahi tahun 2020 berdasarkan Sensus Penduduk adalah sebesar 577.911 jiwa. Jumlah ini meningkat di tahun 2021 menjadi 560.746 jiwa. Jumlah penduduk Kota Cimahi tersebar dalam 15 kelurahan di Kota Cimahi, walaupun tidak terlalu signifikan peningkatannya, jumlahnya kian mengalami peningkatan. Jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2023 menjadi 575.519 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 1,59% dari tahun sebelumnya.



Gambar 1. 6 Jumlah Penduduk Kota Cimahi Tahun 2017-2023

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, 2024, diolah)

Berdasarkan *National Urban Development Strategy* (NUDS), kota dibagi menjadi beberapa klasifikasi berdasarkan jumlah penduduknya, yaitu Kota Metropolitan (lebih dari 1.000.000 penduduk), Kota Besar (500.000 –

1.000.000 penduduk), Kota Sedang (200.000 – 500.000 penduduk), Kota Kecil (20.000 – 200.000 penduduk), serta Kota Kecil Kecamatan (3.000 – 20.000 penduduk). Berdasarkan batasan tersebut, klasifikasi Kota Cimahi berada pada kategori Kota Besar dimana jumlah penduduknya diantara 500.000 – 1.000.000 penduduk.

1.2.9 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Kota Cimahi menjadi bagian dari Kawasan Cekungan Bandung dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung. Kota Cimahi menjadi bagian dari kawasan perkotaan inti dalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi. Kegiatan utama kota meliputi: pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri (ekonomi kreatif dan industri non polutif), pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan sistem angkutan umum dan penumpang regional serta pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara.

Rencana pola ruang wilayah Kota Cimahi meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan dengan peruntukan lindung terdiri atas badan air (sungai dan embung), kawasan perlindungan setempat (sempadan sungai) dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH). Kawasan RTH terdiri atas rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, pemakaman dan jalur hijau. Kawasan budidaya terdiri atas berbagai kawasan yang akan dijabarkan berikut ini (Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022):

Potensi pengembangan wilayah Kota Cimahi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya kota adalah wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Hal ini

tertuang dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 meliputi;

1. Kawasan Perumahan
    a. Pengembangan perumahan diarahkan pada intensitas pemanfaatan lahan berdasarkan kepadatannya, meliputi perumahan kepadatan tinggi diarahkan di Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Padasuka, Kelurahan Cigugur Tengah, Kelurahan Melong dan Kelurahan Karangmekar; perumahan kepadatan sedang diarahkan di Kelurahan Cibeber, Kelurahan Leuwigajah, Kelurahan Utama, Kelurahan Baros dan sebagian Kelurahan Setiamanah; dan perumahan kepadatan rendah diarahkan di sebagian Kelurahan Cipageran, Kelurahan Citeureup, Kelurahan Cibabat, sebagian Kelurahan Pasirkaliki, Kelurahan Cimahi dan sebagian Kelurahan Setiamanah;
    b. Pengembangan hunian vertikal di Kecamatan Cimahi Selatan, Kecamatan Cimahi Tengah dan sebagian Kecamatan Cimahi Utara; dan
    c. Penataan dan peremajaan kawasan perumahan padat tidak teratur di bantaran sungai di Kecamatan Cimahi Tengah dan Selatan.
2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

    Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan modern, toko dan ritel modern, dan perdagangan dan jasa lainnya, yang saat ini sebagian besar terpusat di wilayah Cimahi Tengah. Selain itu, wilayah Cimahi Selatan juga memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan perdagangan dan jasa dengan adanya akses ke Tol Baros.

    Adanya rencana pembentukan Sentra Perdagangan dan Jasa merupakan salah satu upaya dalam pengembangan Kawasan perdagangan dan jasa. Beberapa kota di Indonesia telah berhasil menata pusat kotanya sehingga menjadi destinasi wisata. Untuk itu

perlu adanya inovasi penataan kawasan alun-alun dan Kawasan Gandawijaya Kota Cimahi menjadi salah satu destinasi belanja dan menjadikan salah satu muka kota yang kreatif.

Untuk bisa mendukung perkembangan area *central business district* (CBD) lama di daerah alun-alun dan Jalan Gandawijaya perlu dilakukan inovasi penataan kawasan melalui penyediaan trotoar yang lebih luas bagi pejalan kaki dan ramah terhadap kaum disabilitas, tersedianya pemberhentian kendaraan umum yang kreatif, petunjuk area (*sign map*) yang kreatif, taman, jalur pesepeda dan penataan lampu kota. Diharapkan pusat kota dapat menjadi ruang publik yang terbuka bagi interaksi warganya untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif seperti pertunjukan di jalan (*street performance*) maupun *culinary night*. Sinkronisasi dan koordinasi kegiatan yang tersebar di banyak Perangkat Daerah menjadi unsur penting bagi berhasilnya penataan kawasan alun-alun dan Gandawijaya selain juga penegakan disiplin agar tetap rapi dan tidak menjadi kumuh. Kota yang kreatif akan bisa meningkatkan tingkat kebahagiaan warganya.

3. Kawasan Peruntukkan Industri
    a. Kota Cimahi tidak lagi mengembangkan Kawasan Peruntukkan Industri menengah dan besar, tetapi hanya menjaga kestabilan keberadaan industri menengah dan besar yang banyak tersebar di wilayah Cimahi Selatan, diantaranya di Kelurahan Leuwigajah, dan Kelurahan Melong serta di Kelurahan Cigugur Tengah, Kecamatan Cimahi Tengah. Keberadaan Kawasan Peruntukkan Industri tersebut diarahkan menjadi kawasan industri yang berwawasan lingkungan dengan pengembangan prasarana pengelolaan limbah industri terpadu;
    b. Pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi dipusatkan di wilayah Baros dengan dibangunnya Kawasan Cimahi *Technopark*. Industri kreatif yang dikembangkan adalah industri kreatif berbasis teknologi informasi diantaranya animasi dan film,

serta sentra-sentra produk unggulan lainnya untuk produk kuliner, kerajinan dan *fashion*; dan

c. Rencana pengembangan industri kecil dan rumah tangga berbasis klaster industri terutama di beberapa lokasi yang bisa dikembangkan menjadi sentra produk unggulan dengan prinsip ramah lingkungan.

4. Kawasan Peruntukkan Pariwisata
   a. Pengembangan Wisata Budaya dan Agro Eduwisata di Kelurahan Cipageran dan Kampung Cireundeu di Kelurahan Leuwigajah. Cireundeu tidak lagi hanya sebagai Desa Wisata Ketahanan Pangan saja tetapi berkembang menjadi Desa Wisata Seni Pertunjukan dan Budaya berbasis budaya ketahanan pangan singkong;
   b. Pengembangan Wisata *Heritage* dan Festival Tematik di Kecamatan Cimahi Tengah. Di Kota Cimahi terdapat 23 objek bangunan bersejarah yang memiliki potensi untuk ditetapkan sebagai bangunan *heritage* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang hingga saat ini belum termanfaatkan secara optimal. Diperlukan penggalian nilai-nilai sejarah dan perencanaan pemanfaatannya termasuk upaya pengembangan kewirausahaan dalam bidang pariwisata khususnya pada 23 objek bangunan bersejarah Kota Cimahi;
   c. Pengembangan kawasan wisata Cipageran yang meliputi daerah Lebak Saat (Chitos 1), Legok Awi (Pasar Legok Awi) yang terintegrasi dengan hutan kota dan sentra pertanian (peternakan). Perlu dilakukan *branding* tempat yang terintegrasi dalam satu kawasan wisata serta dilakukannya pengintegrasian pembinaan usaha kesenian/budaya, pariwisata, *homestay*, hilirisasi produk dan pembinaan UKM baik kuliner maupun kerajinan berbasis potensi lokal (bambu) oleh warga setempat; dan

d. Pengembangan Kampung Gambar di Kelurahan Cibabat sehingga mendatangkan manfaat ekonomi dan sosial. Saat ini di Kampung Gambar Cibabat belum muncul aktivitas bisnis dan baru lebih berfokus kepada aktivitas ekspresi kreatif. Perlu dikembangkan model bisnis yang tepat (*model business canvas*) dan pemberdayaan komunitas lokal.

5. Kawasan Perkantoran dan Fasilitas Sosial
   a. Kawasan perkantoran pemerintahan meliputi peningkatan kawasan perkantoran pemerintah Kota Cimahi, peningkatan kawasan perkantoran skala kecamatan dan kelurahan di seluruh Kota Cimahi, peningkatan kawasan perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dengan penyediaan ruang terbuka publik yang dapat digunakan untuk interaksi sosial, peningkatan kawasan pusat pengembangan teknologi informasi, Baros *Information Technology Center* (BITC) di Jalan HMS. Mintaredja Kelurahan Baros; Pembangunan Kawasan Mall Pelayanan Publik dan peningkatan dan pembangunan lokasi lain sesuai dengan kebutuhan; dan
   b. Kawasan perkantoran swasta mengarahkan dan mengembangkan kegiatan perkantoran swasta berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa.
6. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

   Kawasan pertahanan dan keamanan di Kota Cimahi meliputi: Markas Brigif – 15 Kujang II yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pussenarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pussenarhanud yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikarmed yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikpal yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikhub yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikpom yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikjas yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Pusdikbekang yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah,

Pusdikpengmilum yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kodim 0609/Kabupaten Bandung yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Yonarmed – 4/105 GS yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Kiban Yonzipur-3/Yudha Wirograha yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Rumkit TK. II 03.05.01 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Denbekang III-44-02.A yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Benglap-A-03-43-02 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Domatzi yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, Koramil 0609-22 yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah, dan Koramil 0609-25 yang terletak di Kecamatan Cimahi Utara. Di Kawasan ini bila dimungkinkan dapat dilakukan kerjasama dalam rangka pengembangan pembangunan di Kota Cimahi.

7. Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

   Pengembangan RTNH di kawasan komersial dan perkantoran di Kelurahan Setiamanah dan Kelurahan Baros dan perumahan tersebar di Kecamatan Cimahi Utara, Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Selatan, yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat berinteraksi masyarakat dan layak anak.

   Disamping itu terdapat juga lahan-lahan aset milik pemerintah Kota Cimahi berupa lahan kritis yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Cimahi bisa diarahkan dengan menerapkan konsep *agroforestry* sehingga kegiatan konservasi alam dan pertanian serta pariwisata bisa dikembangkan seperti di Bukit Padakasih Kelurahan Cibeber, di Cimenteng dan Legok Jawa Kelurahan Cipageran maupun ex-TPA Leuwigajah di Kelurahan Leuwigajah. Direncanakan juga pemanfaatan beberapa wilayah sekitar embung sebagai sarana ruang publik untuk olahraga dan pariwisata lokal;

8. Kawasan Peruntukkan Ruang untuk Sektor Informal

Merupakan sektor yang direncanakan untuk kegiatan sektor informal di lokasi yang direncanakan dengan membatasi pemanfaatan ruang terbuka publik untuk kegiatan sektor informal dengan pembatasan area dan pengaturan waktu berdagang, mengoptimalkan fungsi pasar, dan mengintegrasikan kegiatan sektor informal dengan sektor formal, menjaga fasilitas publik agar tidak digunakan untuk kegiatan sektor informal dan mewajibkan setiap pengembang mengalokasikan ruang untuk kegiatan sektor informal.

9. Kawasan Peruntukkan Ruang Evakuasi Bencana

Kawasan Rawan Bencana di Kota Cimahi terdiri dari kawasan rawan bencana tanah longsor, rawan banjir, rawan aliran lahar gunung berapi, dan rawan gempa bumi sehingga pengembangan kawasan ruang evakuasi diarahkan menyebar di seluruh wilayah kecamatan dengan memanfaatkan RTH, RTNH, gedung dan bangunan lainnya. Penyediaan jalur evakuasi bencana yang terjangkau oleh kendaraan roda empat pada wilayah-wilayah rawan bencana untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengungsi. Penyediaan sarana prasarana pada akses jalur evakuasi menuju ruang titik kumpul tersebar di seluruh wilayah kecamatan dengan memanfaatkan ruang publik dan RTNH.

10. Pengembangan Kawasan Peruntukkan Perikanan

Pengembangan kawasan peruntukkan perikanan budidaya air tawar melalui optimalisasi produksi ikan air tawar dan pemasaran hasil perikanan melalui optimalisasi pasar ikan di Kelurahan Cibabat.

11. Perlindungan Kawasan Peruntukkan Pertanian

Perlindungan kawasan pertanian diarahkan pada rencana penetapan regulasi dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Aspek lain pengembangan wilayah Kota Cimahi adalah berkaitan dengan wilayah administrasi di Kota Cimahi. Saat ini Kota Cimahi memiliki

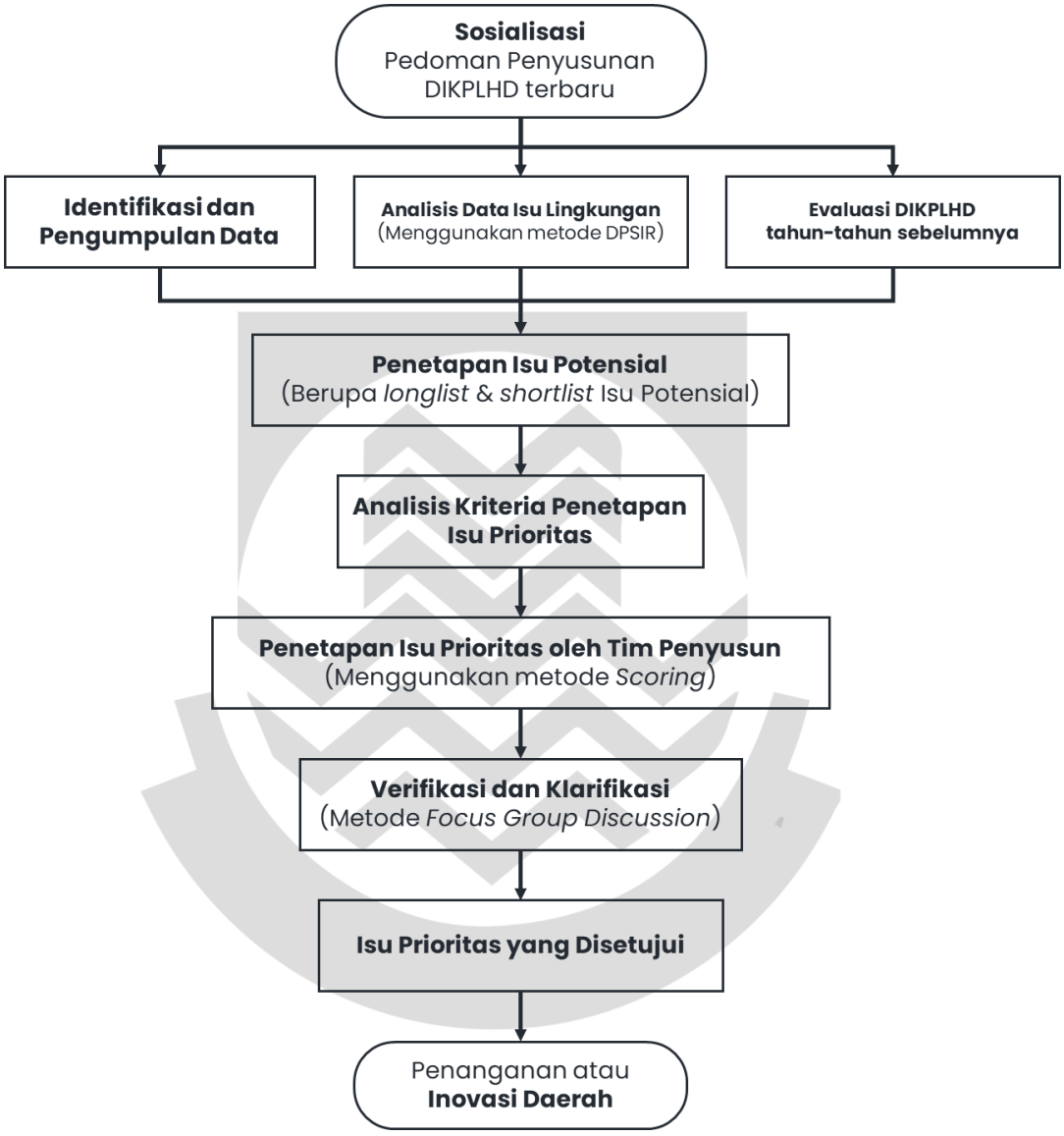
tiga kecamatan dan lima belas kelurahan. Sedangkan jika berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, jumlah minimal kecamatan untuk Kota adalah 4 (empat) kecamatan. Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan kajian pemekaran wilayah untuk memenuhi jumlah kecamatan sesuai dengan peraturan dan perundangan.

1.3 Proses Penyusunan dan Perumusan Isu Prioritas

Proses penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi dilakukan oleh tim kelompok kerja yang dibentuk oleh Walikota Cimahi yang keanggotaannya melibatkan unsur-unsur Perangkat Daerah (PD) terkait, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Masyarakat. Sedangkan pembentukan tim penyusun DIKPLHD keanggotaannya dikukuhkan dengan Surat Keputusan Walikota Cimahi.

Anggota tim penyusun DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024 terdiri atas Dinas Perhubungan, Kantor Pertanahan, Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Pusat Statistik, Dinas Lingkungan hidup, perwakilan masyarakat, dan perwakilan akademisi. Tugas tim penyusun DIKPLHD diantaranya adalah menetapkan isu prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup daerah, menginventarisasi data terbaru dari *stakeholder* terkait yang diperlukan untuk menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah tahun 2024, mendiskusikan hasil tahapan penyusunan yang dilakukan tim penyusun dalam sebuah *Focus Group Discussion*. Tugas tim penyusun meliputi menginput dan menganalisis data status lingkungan hidup daerah yang telah diinventarisasi oleh Tim Kelompok Kerja menggunakan metode *Driving Force-Pressure-State-Response* (DPSIR), mengidentifikasi data dan mengevaluasi dokumen

Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyusun Buku Ringkasan Eksekutif dan Buku Laporan Utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi tahun 2024. Langkah-langkah penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 1. 7.**



Gambar 1. 7 Diagram Alir Perumusan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024

Tahapan dalam penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024, yakni dimulai dari sosialisasi pedoman penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup terbaru yang diikuti oleh Tim Penyusun

DIKPLHD. Dalam kegiatan ini dijabarkan keseluruhan data yang dibutuhkan dalam analisis kinerja pengelolaan lingkungan kepada seluruh tim penyusun supaya pihak yang terkait pengisian data dapat mengisi data dengan sesuai.

Langkah berikutnya dalam penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024 adalah mengidentifikasi dan mengumpulkan data dari beberapa PD terkait kemudian dianalisis. Langkah analisis data dilakukan dengan metode DPSIR *(Driving Force-Pressure-State-Impact-Response)* terhadap 6 (enam) isu lingkungan sesuai pedoman penyusunan. Metode ini merupakan rantai hubungan sebab akibat yang dimulai dengan *driving force* atau kekuatan pendorong, melalui *pressure* atau tekanan ke *state* atau status, dan memberikan *impact* atau dampak pada manusia dan lingkungan. Pada akhirnya semua hal tersebut mengarah pada *response* atau jawaban untuk mengatasi masalah yang ada. Langkah penyusunan juga mempertimbangkan evaluasi terhadap dokumen tahun sebelumnya.

Setelah dilakukan analisis terhadap 6 (enam) isu lingkungan menggunakan metode DPSIR, maka dapat ditetapkan beberapa isu lingkungan yang potensial menjadi isu prioritas di Kota Cimahi. Langkah penetapan isu lingkungan potensial merupakan langkah berikutnya dalam penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi. Hasil isu lingkungan potensial tersebut merupakan isu yang tertuang juga di dalam RPPLHD Kota Cimahi, KLHS RTRW Kota Cimahi, RPJMD Kota Cimahi. Secara singkat, nantinya keseluruhan isu yang telah dianalisis dengan metode DPSIR akan memunculkan *longlist* atau daftar panjang isu potensial. Kemudian *longlist* isu potensial dihubungkan keterikatannya dalam satu kategori yang sama sehingga didapatkan *shortlist* atau daftar pendek isu potensial.

Langkah kelima adalah penetapan kriteria oleh tim penyusun DIKPLHD. Tahapan ini dilakukan untuk memberikan landasan dalam langkah sebelumnya, yakni penetapan isu lingkungan potensial. Mengingat banyaknya isu lingkungan yang teridentifikasi dalam berbagai studi terkait lingkungan di Kota Cimahi, kriteria ini menjadi penting untuk menindaklanjuti isu potensial yang menjadi isu prioritas di Kota Cimahi.

Kriteria yang akan digunakan adalah sesuai dengan pedoman penyusunan DIKPLHD Tahun 2024 dari KLHK, Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dan juga berdasarkan dokumen pengelolaan kualitas lingkungan hidup di Kota Cimahi, sehingga terdapat 13 (tiga belas) kriteria yang perlu ditimbang diantaranya kerusakan sumber daya alam, dampak signifikan, perhatian publik, kinerja jasa ekosistem, pemanfaatan sumber daya alam, ancaman keanekaragaman hayati, dampak dan risiko lingkungan, perubahan iklim, daya dukung lingkungan, RPPLHD Kota Cimahi, KLHS RTRW Kota Cimahi, dan KLHS RPJMD Kota Cimahi, serta tren IKLH 5 (lima) tahun terakhir. Penetapan kriteria menggunakan metode *scoring*, dimana tim penyusun terlebih dahulu memberikan penilaian terhadap isu lingkungan dengan bobot paling besar menjadi isu prioritas, sebelum nantinya dilaksanakan verifikasi dan klarifikasi bersama.

Verifikasi dan klarifikasi dilakukan untuk menentukan isu lingkungan potensial dan isu lingkungan prioritas yang sudah diidentifikasi pada langkah sebelumnya. Hal ini diperlukan sebagai upaya mengakomodasi dan *cross-check* isu lingkungan terhadap *stakeholder* lingkungan di Kota Cimahi. Metode yang dilakukan adalah dengan cara *Focus Group Discussion* yang kemudian dilanjutkan dengan rapat intensif dengan Tim Penyusun DIKPLHD Kota Cimahi. Dengan dilakukannya verifikasi dan klarifikasi ini, isu prioritas yang valid dan disetujui dapat ditetapkan.

Langkah Inovasi daerah merupakan jawaban dari permasalahan lingkungan. Dijelaskan mengenai inovasi apa saja yang dilakukan Kota Cimahi untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang ada.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi yang dilaksanakan setiap tahun memiliki maksud, tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai sebagai berikut:

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi ini adalah untuk memberikan informasi kinerja pengelolaan lingkungan di Kota Cimahi, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup Kota Cimahi pada tahun-tahun mendatang dan sebagai laporan rutin Kepala Daerah terkait data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup, yang dapat digunakan sebagai dasar dalam menilai dan menentukan prioritas masalah, dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.

1.4.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2024 adalah:

1) Mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi lingkungan baik dalam bentuk data dasar dan analisis dari data yang disampaikan untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2) Sebagai media informasi yang terbuka dan bertanggung jawab bagi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dan kesadaran dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup.
3) Menentukan isu prioritas tahun 2024, status kualitas lingkungan hidup kritis dan perubahannya, faktor pendorong serta sumber tekanan terhadap lingkungan dan dampaknya serta upaya yang telah dilakukan oleh Kota Cimahi selama kurun waktu tahun 2024 *(Driving Force-Pressure-State-Response).*
4) Menyiapkan dokumen yang mendorong inisiatif berbagai pemangku kepentingan dalam menyusun program dan kegiatan peningkatan keberlanjutan pembangunan sesuai dengan kompetensinya dan atau secara sinergis dengan pelaku lain.
5) Sebagai salah satu manajemen publik (*public management*) yang mengakomodasi hak-hak umum/kepentingan masyarakat (*public*

rights) yang meliputi akuntabilitas, transparansi, penegakan hukum dan partisipasi (dalam pelaksanaan pembangunan) untuk mencapai sasaran akhir yaitu tata kelola lingkungan yang baik atau *Good Environment Governance*.

1.4.3 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024:

1) Menjadi acuan bagi pengambil kebijakan pembangunan baik ditingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk semua sektor pembangunan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
2) Menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan lingkungan selama kurun waktu tahun 2024 sehingga dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan program/kegiatan kedepan.
3) Mengembangkan laporan kualitas lingkungan yang dapat menjadi acuan dalam pemaparan kondisi lingkungan serta dapat mendorong terjadinya partisipasi aktif dari *stakeholder* dalam mengatasi berbagai masalah lingkungan.

1.5 Ruang Lingkup

Lingkup penulisan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024 dibatasi pada data dan informasi yang terkait dengan status lingkungan hidup di Kota Cimahi, serta informasi terkait yang menggambarkan kinerja daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup. Ruang lingkup dalam penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

1) Ruang lingkup wilayah Kota Cimahi.
2) Ruang lingkup materi yang tercantum dalam Panduan Penyusunan Dokumen IKPLHD tahun 2024, yakni penentuan isu prioritas dianalisis dengan metode D-P-S-I-R *(Driving Force-Pressure-State-Response)* dan inovasi dalam pengelolaan daerah.

3) Ruang lingkup kedalaman data mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Panduan Penyusunan Dokumen IKPLHD tahun 2024.

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 terdiri atas 2 (dua) buku, yaitu (1) buku I, menyajikan Ringkasan Eksekutif dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah; (2) Buku II, merupakan buku yang berisi laporan utama Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi, profil daerah Kota Cimahi, proses penyusunan dan perumusan isu prioritas, maksud dan tujuan, ruang lingkup, serta sistematika penulisan.

BAB II Analisis *Driving Force, Pressure, State, Impact,* dan *Response*

Menyajikan analisis terhadap beberapa isu lingkungan seperti tata guna lahan, kualitas air, kualitas udara, risiko bencana, perkotaan, dan tata Kelola.

BAB III Isu Prioritas Lingkungan Hidup Daerah

Berisi mekanisme perumusan isu prioritas, mulai dari tahapan studi literatur hingga penetapan isu prioritas.

BAB IV Inovasi Daerah

Terdiri atas kajian dan uraian terhadap inovasi kebijakan, inovasi implementasi dan inovasi masyarakat/kearifan lokal dalam pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan rekomendasi atau rencana tindak lanjut pengelolaan lingkungan hidup Kota Cimahi.

BAB II
ANALISIS *DRIVING FORCE, PRESSURE, STATE, IMPACT, RESPONSE* PADA ISU LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA CIMAHI TAHUN 2024

Pada tahun 1994, *Organizational for Economic Co-operation and Development* (OECD) mempublikasikan bahwa model awal dari indikator kondisi lingkungan adalah dalam susunan *Pressure-State-Response* (PSR), yang didefinisikan sebagai aktivitas-aktivitas manusia yang memberikan *pressure* terhadap lingkungan sehingga menyebabkan perubahan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Selanjutnya, *The European Environment* (EEA) mengembangkan model awal yang sudah ada menjadi DPSIR (*driving forces, pressure, state, impact, response)* model. Lima indikator utama dalam analisis DPSIR terhadap isu lingkungan hidup, yaitu:

1) *Driving Force / Drivers* (Faktor Pemicu), yaitu aktivitas antropogenik yang mungkin memiliki efek terhadap lingkungan.
2) *Pressure* (Tekanan), indikator ini menggambarkan tekanan dari kegiatan manusia terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam.
3) *State* (Kondisi lingkungan hidup), indikator ini menggambarkan kualitas dan kuantitas sumber daya alam dan lingkungan hidup.
4) *Impact* (Dampak), indikator ini menggambarkan dampak lingkungan yang muncul akibat adanya *pressure.*
5) *Response* (Respons), indikator ini menunjukkan tingkat kepedulian *stakeholder* terhadap perubahan lingkungan yang terjadi, baik dari kalangan pemerintah, industri, LSM, lembaga penelitian, maupun masyarakat umum.

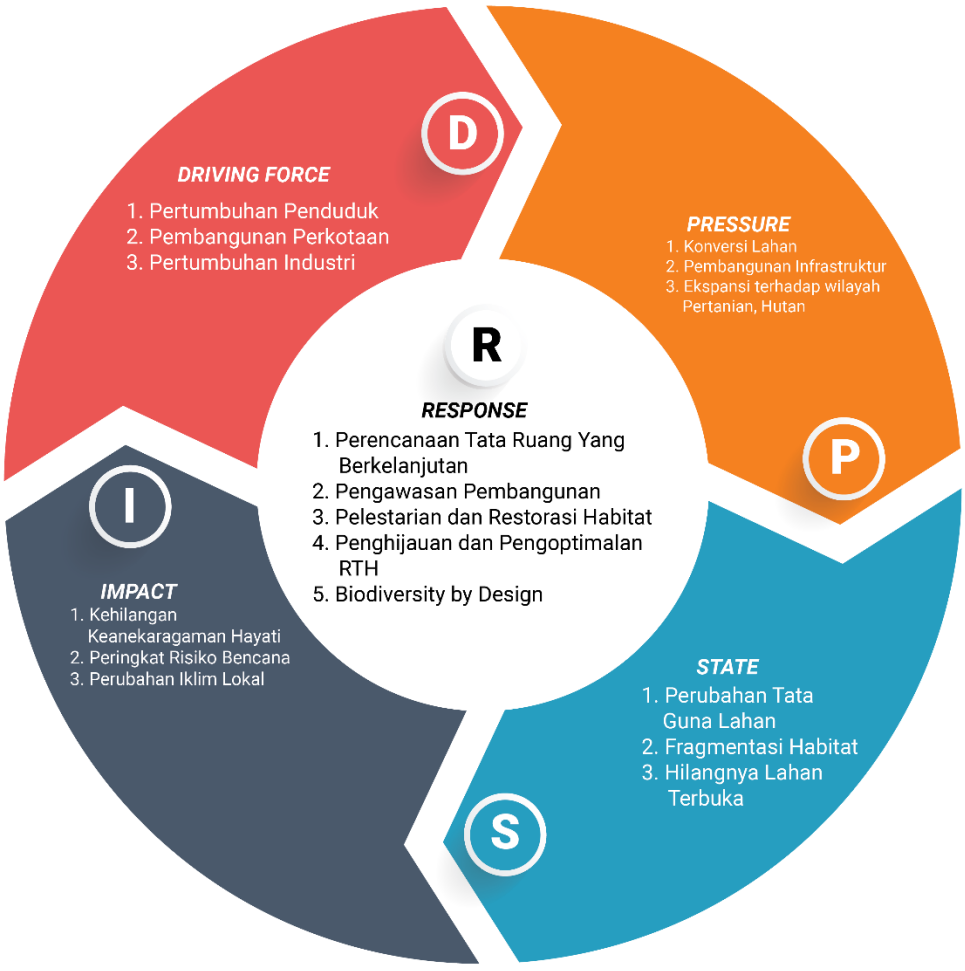
2.1 Tata Guna Lahan

Berdasarkan Lichfild dan Drabkin (1980), pembagian lahan dibedakan dari sudut pandangnya yaitu berdasarkan sudut pandang geografi dan sudut pandang ekonomi. Menurut sudut pandang geografi, lahan merupakan bidang tanah yang tetap dalam lingkungannya dan fungsi atau kegunaan suatu lahan sangat ditentukan oleh kualitas fisik tanahnya. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, lahan adalah sumber alamiah yang nilainya tergantung dari produksi atau pemanfaatannya.

Lahan merupakan lingkungan fisik dan biotik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap kehidupan dan kesejahteraan manusia. Lahan secara alami dapat terus berkembang tanpa adanya suatu intervensi (campur tangan) dari manusia. Lahan merupakan suatu komoditi yang memiliki harga, nilai dan biaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa lahan adalah sumberdaya alam yang terbatas dimana dalam penggunaannya memerlukan penataan dengan tujuan pemanfaatan yang optimal demi kesejahteraan masyarakat. Penataan penggunaan lahan atau biasa disebut Tata Guna Lahan mengatur penggunaan lahan suatu kawasan dalam bentuk pengalokasian fungsi kawasan sesuai kriteria tertentu (Darmawan, 2003). Dasar hukum terkait tata guna lahan di Kota Cimahi tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032.

Tujuan penataan ruang wilayah kota yaitu mewujudkan ruang wilayah Kota Cimahi sebagai Kota Inti dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Cekungan Bandung yang aman, nyaman, efisien dan berkelanjutan dengan meningkatkan fungsi kota sebagai pusat jasa dan perdagangan serta pusat industri kreatif yang berbasis telematika. Untuk mengetahui dinamika tata guna lahan yang terjadi di Kota Cimahi, maka perlu dilakukan analisis isu lingkungan. Isu lingkungan terkait tata guna lahan di Kota Cimahi dianalisis berdasarkan data tabel utama panduan Nirwasita Tantra tabel 1 sampai tabel 17. Namun beberapa tabel tersebut tidak dilakukan analisis karena kondisi geografis di Kota Cimahi yang tidak terdapat lahan pada kondisi

tersebut, seperti mangrove, padang lamun, hutan, tambang dan terumbu karang. Adapun *framework* (kerangka kerja) analisis DPSIR isu tata guna lahan dapat dilihat pada **Gambar 2. 1** dan analisis lebih lanjut akan dilakukan pada sub-bab selanjutnya berdasarkan kerangka kerja tersebut.



Gambar 2. 1 Framework DPSIR Isu Tata Guna Lahan

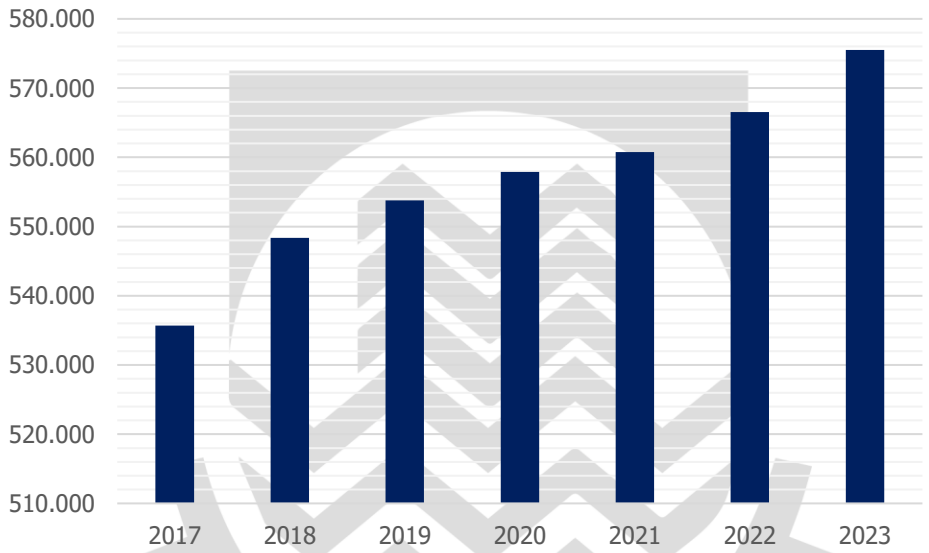
(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

2.1.1 Driving Force

2.1.1.1 Pertumbuhan Penduduk

Kota Cimahi memiliki perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan dan program pemerintah yang berhasil meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur di Kota Cimahi dapat mendorong pertumbuhan jumlah penduduk. Jumlah

penduduk bersifat dinamis, dan memiliki kecenderungan mengalami peningkatan. Semakin bertambahnya jumlah penduduk juga memberikan efek samping terhadap kualitas lingkungan, salah satunya lahan. Pertumbuhan penduduk yang cepat di Kota Cimahi mendorong permintaan akan lahan untuk perumahan, industri, dan infrastruktur. Dalam hal ini, pertumbuhan penduduk menjadi faktor pemicu adanya perubahan lahan di Kota Cimahi. Berdasarkan data DKB Semester II Kota Cimahi tahun 2023 dari Disdukcapil Kota Cimahi, tren jumlah penduduk Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 2.**



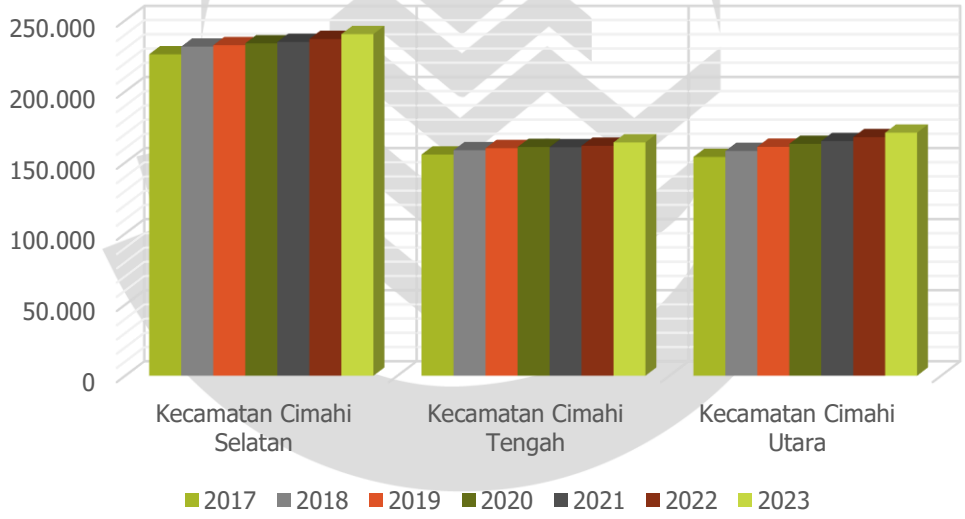
Gambar 2. 2 Tren Jumlah Penduduk di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, 2023, diolah)

Berdasarkan **Gambar 2. 2**, jumlah penduduk di Kota Cimahi di tahun 2023 mencapai 575.519 jiwa sementara pada tahun 2022 jumlah penduduk Kota Cimahi mencapai 566.537 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2023 sebesar 1,59% dan angka harapan hidup mencapai 75,27 tahun (Kota Cimahi dalam Angka, 2024). Kecamatan Cimahi Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak di Kota Cimahi yaitu sebesar 240.363 jiwa sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Cimahi Tengah, sejumlah 164.179 jiwa yang menduduki

kecamatan tersebut. Jumlah penduduk di Kecamatan Cimahi Utara pada tahun 2023 adalah 170.977 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk akan berbanding lurus dengan laju pertumbuhan lahan terbangun. Permintaan akan lahan terbangun yang terus meningkat ini tidak seimbang dengan persediaan lahan yang cenderung terbatas. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu pemicu terjadinya perubahan penutupan lahan atau alih fungsi lahan khususnya menjadi lahan terbangun (Syaifuddin, et al, 2013). Sedangkan dari sisi ekonomi, peningkatan permintaan lahan juga akan menyebabkan naiknya nilai lahan setiap tahunnya. Nilai lahan yang dipergunakan untuk kawasan permukiman maupun perindustrian jauh lebih tinggi dibandingkan nilai lahan peruntukkan pertanian dan pada akhirnya alih fungsi lahan akan lebih mudah terjadi berdasarkan perbedaan nilai dan manfaat yang diterima dari peruntukkan lahan tersebut (Rustiadi, 2011).



Gambar 2. 3 Tren Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, 2023, diolah)

2.1.1.2 Pembangunan Perkotaan

Tata guna lahan dapat terjadi karena berbagai faktor sosial, ekonomi, teknologi, dan tata kelola.

1. Pertumbuhan populasi manusia meningkatkan kebutuhan lahan, yang pada gilirannya memengaruhi perubahan penggunaan lahan.
2. Perkembangan ekonomi membutuhkan pembangunan fisik dalam bentuk kawasan industri, pusat bisnis, dan infrastruktur pendukung lainnya.
3. Teknologi memungkinkan pembangunan di area yang sebelumnya tidak dapat diakses atau tidak ekonomis untuk dikembangkan, dan juga meningkatkan kapasitas pembangunan untuk mengakomodasi lebih banyak orang dan kegiatan dalam ruang yang lebih terbatas.
4. Kebijakan pemerintah dan regulasi penggunaan lahan dapat merangsang pembangunan perkotaan melalui insentif untuk pengembang, zonasi yang mengizinkan penggunaan lahan yang intensif.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota pada hakikatnya adalah rencana pemanfaatan ruang yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan wilayah dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang ada dalam wilayah kota. Penataannya perlu didasarkan pada pemahaman terhadap isu-isu ekonomi, sosial dan lingkungan. Berdasarkan RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2023, terdapat dua kebijakan dan strategi dalam pengembangan pola ruang di Kota Cimahi, yaitu pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Arahan RTRW Kota Cimahi dapat menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan peruntukkan lahan atau tata guna lahan. Jika program pembangunan tidak sesuai dengan RTRW, maka besar kemungkinan terjadi permasalahan terhadap perubahan tata guna lahan.

2.1.1.3 Pertumbuhan Industri di Kota Cimahi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu pendorong utama dari ekspansi industri. Tumbuhnya ekonomi, menandakan ada kebutuhan yang meningkat untuk produksi barang dan jasa, yang membutuhkan lebih banyak fasilitas industri seperti pabrik, gudang, dan infrastruktur logistik.

Ini mendorong perubahan tata guna lahan dari penggunaan lain, seperti pertanian atau lahan kosong, menjadi penggunaan industri.

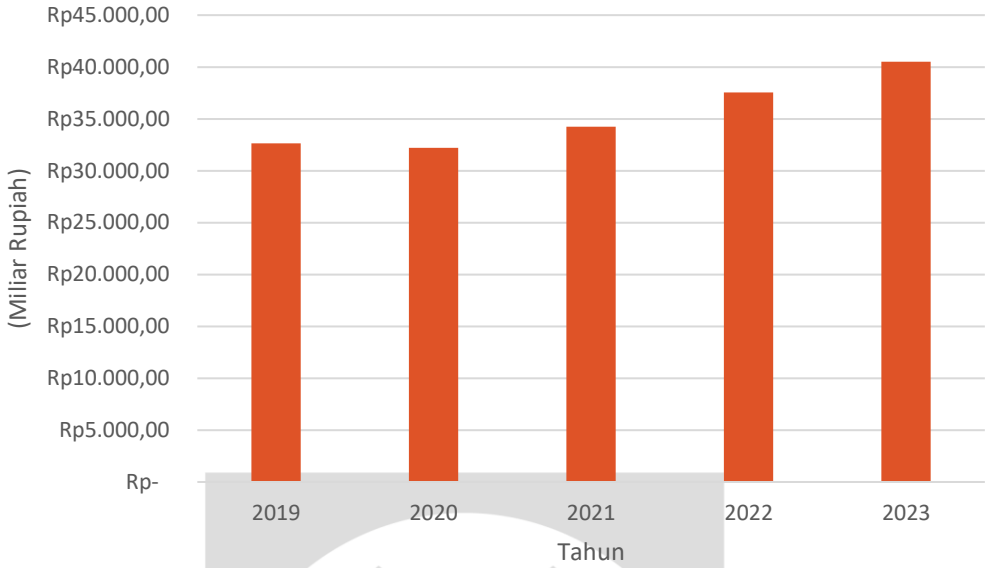
Kemajuan teknologi dalam manufaktur dan proses industri memungkinkan pengembangan industri yang lebih padat dan efisien. Hal ini dapat mendorong ekspansi industri, yang memerlukan realokasi lahan atau transformasi tata guna lahan yang ada.

Tata guna lahan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Melalui tata guna lahan yang tepat, lahan dapat dialokasikan untuk kegiatan yang paling produktif dan sesuai dengan kebutuhan wilayah. Tata guna lahan yang efektif juga dapat memfasilitasi pembangunan kawasan ekonomi yang berkembang. Penetapan kawasan industri, kawasan perdagangan, atau kawasan pariwisata yang sesuai dengan tata guna lahan dapat menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang terkait. Berdasarkan RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032 pasal 41, Rencana pengembangan kawasan peruntukkan industri seluas 436 hektar meliputi:

a. Pengembangan kawasan industri menengah dan besar, yang berada di Kelurahan Leuwigajah dan Kelurahan Cibeber di Kecamatan Cimahi Selatan
b. Pengembangan kawasan industri kreatif, yang berada di Kelurahan Baros Kecamatan Cimahi Tengah
c. Pengembangan industri kecil dan rumah tangga

Aktivitas ekonomi di Kota Cimahi mendorong pembangunan fasilitas dan sarana yang dapat menunjang berbagai kegiatan masyarakat didalamnya. Pada tahun 2023 sektor yang mendominasi dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi di Kota Cimahi mengalami penurunan menjadi 45,74% yaitu sektor industri pengolahan/*manufacturing* dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 15,48% yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan sektor ini menandakan diperlukannya perkembangan pembangunan fisik demi menunjang kegiatan

ekonomi. Namun pada praktiknya faktor keterbatasan lahan menjadi salah satu masalah krusial dalam tata guna lahan.



Gambar 2. 4 Tren PDRB atas Dasar Harga Berlaku di Kota Cimahi

(Sumber: BPS Kota Cimahi, 2024)

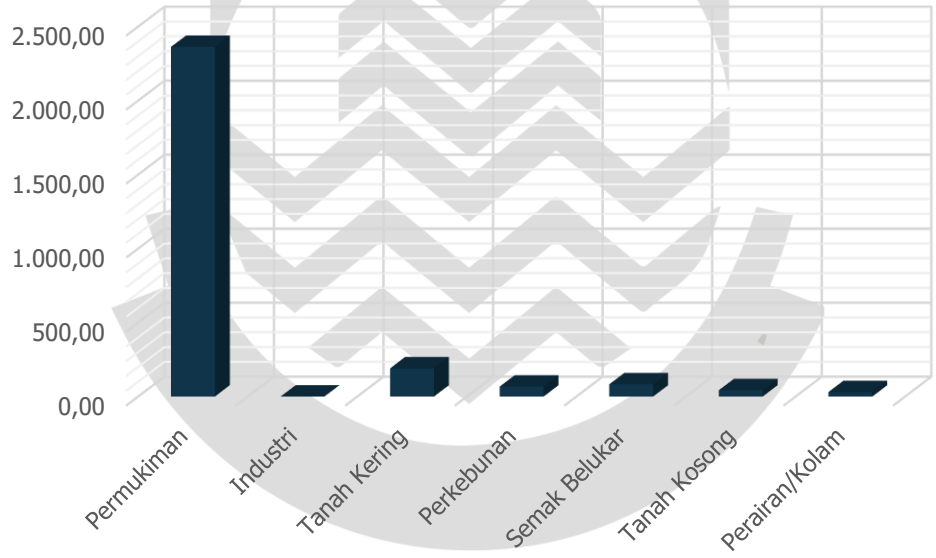
2.1.2 Pressure

2.1.2.1 Konversi Lahan di Kota Cimahi

Konversi penutup lahan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja ataupun alami dalam mengubah suatu penutup lahan menjadi penutup lahan baru. Dalam konversi lahan biasanya diikuti oleh terjadinya alih fungsi lahan jika penutup lahan yang baru tersebut tidak sesuai dengan peruntukkannya. Konversi penutup lahan yang mengarah pada alih fungsi lahan menjadi tekanan atau *pressure* bagi isu lingkungan tata guna lahan. Berdasarkan Danoedoro (2008), permasalahan tata guna lahan secara umum menunjukkan seperti apa ketatnya kompetisi pemanfaatan lahan di masa sekarang dan yang akan datang. Konversi lahan pertanian dan lahan hijau menjadi kawasan perumahan dan industri menyebabkan hilangnya lahan terbuka dan mengubah lanskap alamiah.

Kawasan peruntukkan pertanian adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura,

perkebunan dan/atau peternakan. Lahan pertanian di Kota Cimahi menjadi salah satu bukti terjadinya alih fungsi lahan, dimana peruntukkan lahan pertanian di Kota Cimahi kerap mengalami perubahan. Berdasarkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, pada tahun 2022 seluas 2.363 Ha lahan pertanian digunakan menjadi lahan permukiman, jumlah ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2023. Luas perubahan lahan pertanian dapat dilihat pada **Gambar 2. 5**. Perkembangan ekonomi serta pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur di Kota Cimahi menjadi magnet bagi masyarakat untuk tinggal dan menetap di Kota Cimahi. Pertumbuhan penduduk juga menyebabkan semakin tingginya jumlah permintaan lahan permukiman, yang pada akhirnya berdampak pada kelangkaan lahan dan tingginya harga lahan. Hal ini menjadi salah satu tekanan terhadap kondisi lahan.



Gambar 2. 5 Luas Perubahan Penggunaan Lahan Pertanian di Kota Cimahi

(Sumber: DPUPR Kota Cimahi, 2023)

2.1.2.2 Pembangunan Infrastruktur

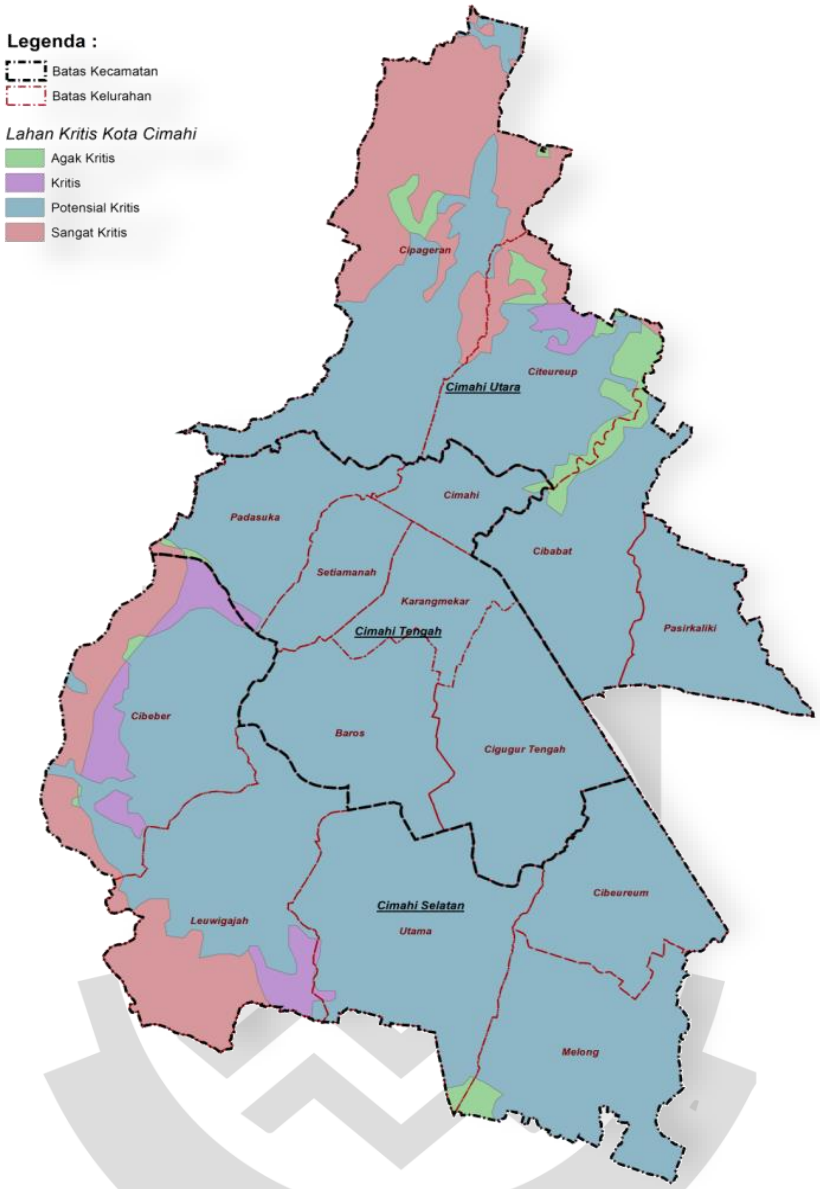
Pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan fragmentasi habitat alami dan mengisolasi populasi flora dan fauna, mengancam keberagaman hayati. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, bangunan, dan area

industri memecah habitat alami menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan terisolasi. Pembangunan ini langsung menekan ekosistem dengan mengurangi area yang tersedia untuk habitat dan membatasi pergerakan masyarakat. Pertumbuhan penduduk juga dapat menyebabkan terfragmentasinya habitat.

2.1.2.3 Ekspansi terhadap Wilayah Pertanian, Hutan

Perubahan tata guna lahan dapat menyebabkan degradasi lingkungan seperti lahan kritis dan lahan potensial kritis. Lahan kritis merujuk pada lahan yang mengalami degradasi, kerusakan, atau masalah lain yang membuatnya tidak produktif atau tidak berfungsi secara optimal. Terbentuknya lahan kritis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti topografi, jenis tanah, tingkatan erosi dan tutupan vegetasi.

Luas lahan sangat kritis non hutan paling besar berada di Kecamatan Cimahi Utara dengan luas sebesar 439,99 Ha dan luas lahan kritis non hutan mencapai 84,95 Ha. Di Kecamatan Cimahi Selatan luas lahan sangat kritis non hutan mencapai 124,66 Ha dan luas lahan kritis non hutan sebesar 33,48 Ha. Luas lahan sangat kritis non hutan paling kecil berada di Kecamatan Cimahi Tengah yaitu 2,87 Ha dan luas lahan kritis non hutan sebesar 3,43 Ha.



Gambar 2. 6 Peta Lahan Kritis di Kota Cimahi

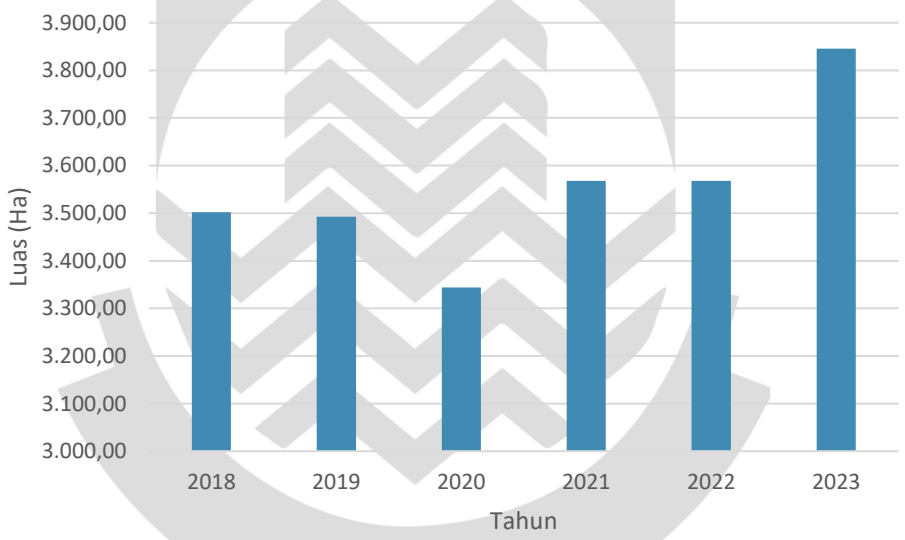
(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2020)

2.1.3 State

2.1.3.1 Perubahan Tata Guna Lahan di Kota Cimahi

Kota Cimahi umumnya memiliki penggunaan lahan yang intensif, dengan banyak permukiman, bisnis, dan fasilitas umum. Penggunaan lahan dan pengelolaan lahan memiliki kaitan yang erat dengan sumber daya alam seperti air, tanah, nutrisi, tanaman dan hewan. Penggunaan lahan utama

di Kota Cimahi didominasi dengan lahan non pertanian, dengan tujuan penggunaan lahan non pertanian adalah melakukan pembangunan sebagai penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Berdasarkan **Gambar 2. 7** lahan non pertanian di Kota Cimahi seluas 3.845,54 Ha. Jika dilihat dari tren penggunaan lahan utama di Kota Cimahi, luas lahan non pertanian pada tahun 2023 terjadi peningkatan dibanding tahun 2022 yaitu seluas 3.568 Ha. Tingginya kebutuhan lahan untuk rumah tinggal, perumahan, pekarangan, gudang, maupun kegiatan ekonomi seperti ruko dan rumah makan berpengaruh pada tingginya alih fungsi lahan. Seiring dengan kemajuan pembangunan perkotaan, potensi berkurangnya luas sawah akan terjadi karena terjadinya alih fungsi lahan yang sulit dihindari.



Gambar 2. 7 Tren Luas Penggunaan Lahan Non Pertanian di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, 2023)

2.1.3.2 Fragmentasi Habitat

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk, alih fungsi lahan, dan Pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan terfragmentasinya habitat. Perubahan dalam penggunaan lahan dapat langsung mempengaruhi kondisi fisik dan biologis habitat yang tersedia bagi flora dan fauna. Hal ini dapat

memengaruhi kondisi habitat, ketersediaan dan kualitas sumber daya, serta distribusi dan keanekaragaman spesies.

Kondisi lahan saat ini tidak terlepas dari kebijakan RTRW Kota Cimahi tahun 2012-2032 yang telah disebutkan, yaitu pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Kawasan hutan lindung termasuk dalam zonasi perlindungan dalam dokumen RPPLHD Kota Cimahi, yaitu daerah yang harus dijaga kualitas jasa lingkungannya karena memiliki nilai jasa yang sangat penting dan menentukan dalam memastikan ekosistem berfungsi secara optimal. Kawasan-kawasan tersebut juga akan berpotensi bencana jika bentan alam dan/atau tutupan lahannya berubah. Didalam zona perlindungan tidak diperkenankan dilakukan pemanfaatan lahan. Data luas kawasan lindung berdasarkan RTRW dan tutupan Lahannya tahun 2022 dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-1.

2.1.3.3 Hilangnya Lahan Terbuka

Lahan hijau dan ruang terbuka publik dapat hilang atau berkurang akibat pembangunan dan konversi lahan. Di Kota Cimahi sendiri tidak terdapat penggunaan lahan sebagai hutan, sehingga Kota Cimahi mengandalkan hutan kota atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyerap polutan, penyerap bau, peredam kebisingan, habitat satwa liar, ameliorasi iklim, pengendalian bahaya banjir, pengelolaan air tanah, penahan angin, dan lain sebagainya. Peran pemerintah dalam menjaga luas lahan hijau menjadi krusial di Kota Cimahi. Luas hutan kota di Kota Cimahi sebesar 237,12 Ha yang terletak di beberapa lokasi. Rincian luas hutan kota di Cimahi dapat dilihat pada **Tabel 2. 1**. Adapun rincian luas hutan publik dan privat di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Tabel 2. 2**. Hutan kota merupakan pendekatan dan penerapan salah satu atau beberapa fungsi hutan dalam kelompok vegetasi di perkotaan untuk mencapai tujuan proteksi, rekreasi, estetika, dan kegunaan fungsi lainnya bagi kepentingan masyarakat perkotaan. Dengan demikian, hutan kota tidak hanya berarti hutan yang berada di kota, tetapi dapat pula berarti bahwa hutan kota dapat

tersusun dari komponen hutan, dan kelompok vegetasi lainnya yang berada di kota, seperti taman kota, jalur hijau, serta kebun dan pekarangan. Berkurangnya luas hutan akibat adanya alih fungsi lahan menjadi perkebunan, permukiman, dan sebagainya dapat mempengaruhi indeks kualitas tutupan lahan.

Tabel 2. 1 Rincian Luas Hutan Kota di Kota Cimahi

No.	Lokasi	Luasan (Ha)
1	Hutan Kota Publik dan privat lainnya	213,60
2	RW 18 Lebak Saat	0,48
3	Penambahan Taman Kehati	0,93
4	Peta Kawasan RTH dari PUPR (RTRW 2012-2022)	4,17
5	RW 8 Cibeber	0,90
6	RW 5 Citeureup PDU (Pusat Daur Ulang)	0,22
7	RW 12 Cipageran	0,86
8	RW 21 Cipageran	0,20
9	RW 21 Cipageran	0,43
10	RW 21 Cipageran	0,55
11	RW.15 Padasuka	0,10
12	Hutan Kota (SK 2007)	8,02
13	Hutan Kota (SK 2012)	6,67
Total		237,12

Sumber: Profil Keanekaragaman Hayati tahun 2022 dan DLH Kota Cimahi, 2023

Tabel 2. 2 Rincian Lokasi Hutan Kota Publik dan Privat di Kota Cimahi

No.	Lokasi	Luas (Ha)
1	Kawasan RW 10 Kel. Leuwigajah	5,00
2	Kawasan Sepanjang Jalan Tol Cipularang	18,80
3	Kawasan UNJANI	10,00
4	Kawasan Bukit Cirendeu	25,00
5	Kawasan Perkantoran TTUC	5,00
6	Kawasan Lap Brigif TNI AD	14,00
7	Gunung Bohong	50,00
8	Bukit Cibogo	82,20

No.	Lokasi	Luas (Ha)
9	Tikungan Ciawitali	0,40
10	P4TK	3,00
11	Hutan Perumahan Kota Mas	0,17
20	DPRD Kota Cimahi	0,04
Total		213,60

Sumber: Profil Keanekaragaman Hayati tahun 2021 dan DLH Kota Cimahi, 2023

2.1.4 Impact

Alih fungsi lahan yang terjadi dan tidak sesuai dengan perencanaan dapat menimbulkan beberapa permasalahan lingkungan. Jika pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik, maka berdampak pada kondisi lingkungan yang menjadi rusak.

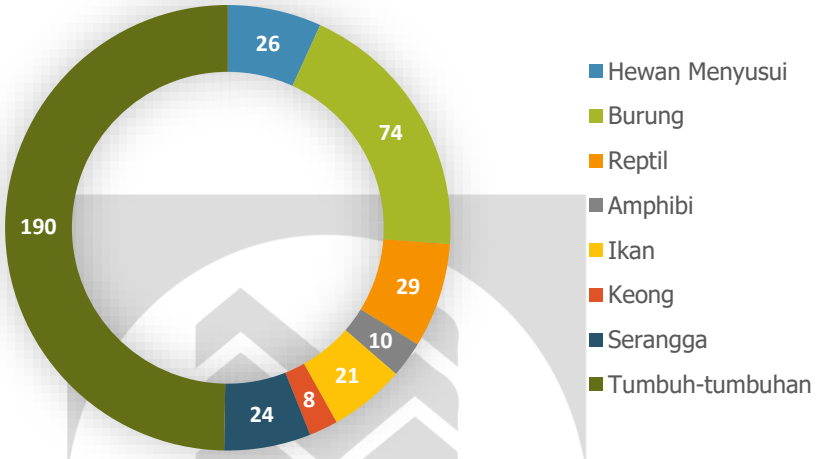
2.1.4.1 Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kehilangan keanekaragaman hayati akibat perubahan tata guna lahan memiliki dampak yang luas dan signifikan, baik untuk ekosistem maupun bagi manusia. Beberapa faktor yang mungkin menyebabkan penurunan *biodiversity*, yaitu:

1) Hilangnya habitat. Perubahan penggunaan lahan dari area alami menjadi perkotaan atau pengembangan infrastruktur mengakibatkan hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies.
2) Fragmentasi Habitat. Pembangunan kota dan pembangunan jalan dapat memisahkan dan membagi-bagi habitat menjadi bagian-bagian yang lebih kecil.
3) Pencemaran. Aktivitas perkotaan seperti industri, kendaraan bermotor, dan limbah domestik dapat menyebabkan pencemaran. Pencemaran ini dapat merusak ekosistem dan mengganggu organisme hidup.

Ekosistem daratan sangat mempengaruhi kondisi keragaman biota di Kota Cimahi. Semakin tinggi kualitasnya maka semakin tinggi pula keanekaragaman hayati yang hidup didalamnya. Hilangnya habitat alami

mengancam kelangsungan hidup flora dan fauna endemik di Kota Cimahi. Kondisi keanekaragaman hayati di Kota Cimahi dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-4. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Cimahi mencatat terdapat 382 jenis spesies flora dan fauna yang berada di Kota Cimahi. Dari jumlah spesies tersebut terbagi menjadi flora fauna yang terancam dan dilindungi, dimana rincian jumlahnya dapat dilihat pada **Gambar 2. 8.**



Gambar 2. 8 Jumlah Spesies Flora dan Fauna di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023)

Tabel 2. 3 Rincian Status Flora dan Fauna di Kota Cimahi

Golongan	Jumlah			
	Terancam	Tidak Terancam	Dilindungi	Tidak Dilindungi
Hewan Menyusui	6	20	1	25
Burung	63	11	11	63
Reptil	19	10	0	29
Amphibi	0	10	0	10
Ikan	0	21	0	21
Keong	0	8	0	8
Serangga	0	24	0	24
Tumbuh-tumbuhan	13	177	0	190
Jumlah Spesies Terdata	**101**	**281**	**12**	**370**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

2.1.4.2 Peringkat Risiko Bencana

Perubahan tata guna lahan yang tidak terencana dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan kebakaran. Banjir dapat terjadi akibat jumlah air yang ada di danau, sungai, ataupun daerah aliran air lainnya melebihi kapasitas atau daya dukung kondisi eksisting di wilayah tersebut (daya serap oleh tanah/tanaman dan kondisi drainase). Sedangkan bencana longsor dapat terjadi akibat pergerakan tanah maupun pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukan. Namun, jumlah vegetasi atau pepohonan yang cukup dapat mencegah atau meminimalkan dampak longsor tersebut. Sehingga lahan yang digunakan untuk ruang terbuka hijau tentu sangat bermanfaat dalam pengendalian bencana ini. Kondisi Kebakaran sering disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya korsleting listrik, dan kelalaian manusia. Faktor lain seperti Alih fungsi lahan permukiman yang tidak sesuai rencana tata ruang wilayah meningkatkan potensi bencana kebakaran. Data kejadian bencana dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-44. Pada tahun 2023, kejadian bencana di Kota Cimahi tercatat sebanyak 53 kejadian bencana angin kencang, 6 kejadian bencana pergerakan tanah, 17 kejadian bencana banjir, 15 kejadian bencana tanah longsor, 17 kejadian bencana kebakaran, dan 55 kejadian bencana kekeringan. Secara detail kejadian bencana akan dibahas pada sub–BAB Risiko Bencana. Tingkat risiko bencana Kota Cimahi berdasarkan BNPB adalah 82,01 (Kategori sedang) (BNPB, 2022).

2.1.4.3 Perubahan Iklim Lokal

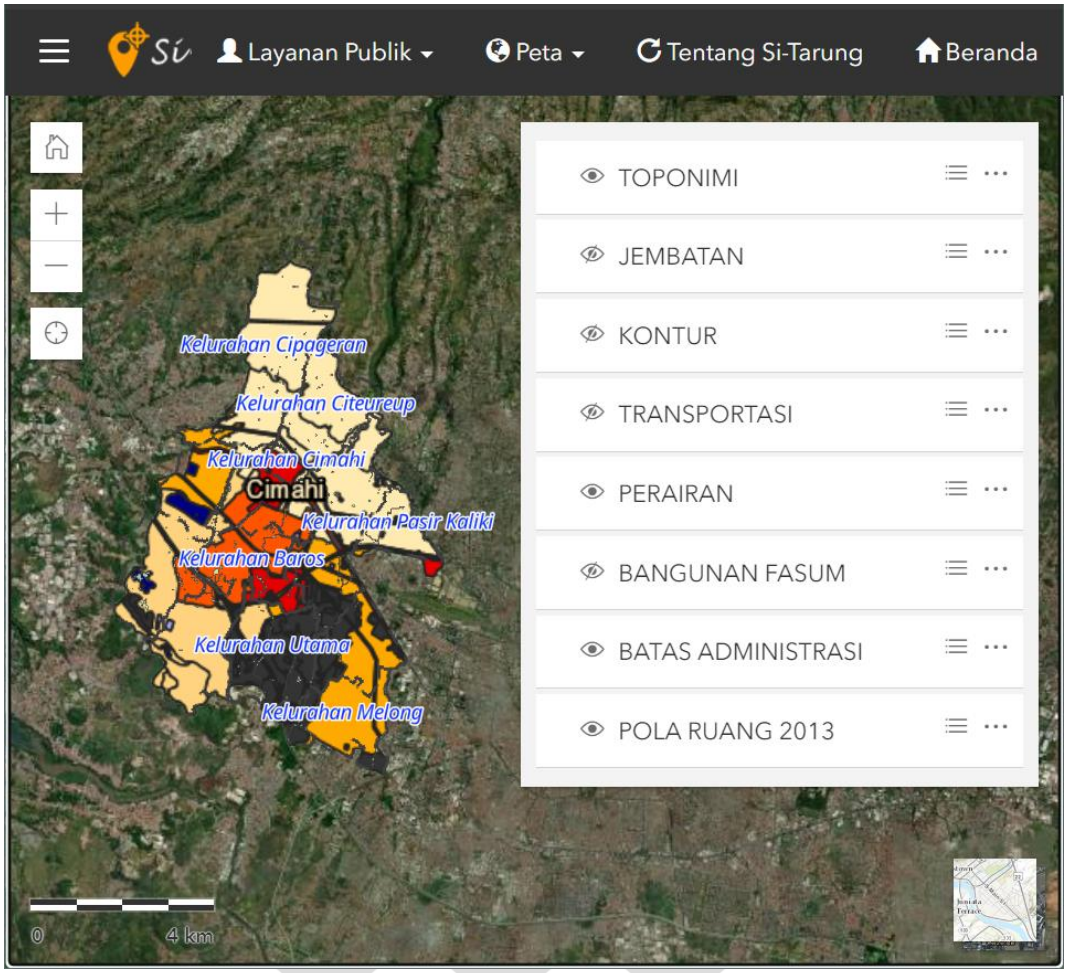
Peningkatan pembangunan menyebabkan perubahan area yang sebelumnya ditutupi oleh vegetasi dengan beton dan aspal yang memiliki kapasitas penyerapan panas lebih tinggi dan menyebabkan terjadinya kenaikan suhu lokal. Perubahan tata guna lahan juga dapat mengubah pola curah hujan lokal, mengubah dinamika angin, suhu, dan distribusi polutan di udara, serta memengaruhi konsentrasi gas rumah kaca.

2.1.5 Response

2.1.5.1 Perencanaan Tata Ruang yang Berkelanjutan

Pemerintah Kota Cimahi dapat mengembangkan kebijakan tata ruang yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mengatur penggunaan lahan yang lebih berkelanjutan. Perencanaan tata ruang berkelanjutan merupakan langkah proaktif untuk mengelola dan menggunakan lahan dengan cara yang berkelanjutan dan efisien.

Sebagai sebuah inovasi tata ruang, dibuat sebuah Sistem Informasi Geografis (SIG) yang disebut sistem informasi penataan ruang yang dapat menampilkan RTRW Kota Cimahi dan rencana rincinya berbasis web untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dengan memanfaatkan data – data yang telah ada sehingga bermanfaat khususnya dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan di Kota Cimahi.



Gambar 2. 9 Cuplikan Beranda siTarung Kota Cimahi

(Sumber: https://sitarung.cimahikota.go.id/content/map.php)

2.1.5.2 Pengawasan Pembangunan

Berdasarkan RTRW Kota Cimahi tahun 2012-2032, terdapat dua kebijakan dan strategi dalam pengembangan pola ruang di Kota Cimahi, yaitu pengembangan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya. Arahan RTRW Kota Cimahi dapat menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dengan peruntukkan lahan.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan evaluasi dan memastikan pematuhan terhadap regulasi tata guna lahan dan lingkungan sebelum memberikan izin pembangunan baru. Tercatat pada tahun 2023, sebanyak 34 kegiatan telah memiliki SPPL dan 4 kegiatan memiliki UKL-UPL.

2.1.5.3 Pelestarian dan Restorasi Habitat

Menerapkan program pelestarian dan restorasi habitat untuk memulihkan lahan terbuka dan menjaga keanekaragaman hayati. Pelestarian dan restorasi habitat merupakan upaya dalam mengembalikan kondisi ekosistem atau mengurangi dampak negatif dari perubahan penggunaan lahan terhadap ekosistem alami.

Kampung Cireundeu memiliki 3 hutan selain hutan baladahan, hutan lainnya yang terdapat di kampung Cireundeu yakni hutan larangan dan hutan tutupan, alasan tidak semuanya dijadikan hutan garapan yakni guna menghindari pengikisan tanah, longsor, dan banjir, serta untuk menjaga sumber air, oksigen yang bersih, dan keutuhan alam yang dibutuhkan makhluk hidup untuk kehidupan.



Gambar 2. 10 Kampung Adat Cireundeu untuk Pelestarian Habitat

(Sumber: kompasiana, 2023)

2.1.5.4 Penghijauan dan Pengoptimalan RTH

Upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi perubahan tata guna lahan adalah dengan melakukan penghijauan dan reboisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan menyebutkan penghijauan adalah upaya pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan, sedangkan reboisasi adalah upaya penanaman jenis pohon hutan pada kawasan hutan rusak yang berupa lahan kosong, alang-alang atau semak belukar untuk mengembalikan fungsi hutan. Selain untuk mengurangi tingkat pencemaran udara, vegetasi ini juga dapat meminimalkan risiko banjir karena aliran air mampu diserap oleh akar-akar tanaman. Upaya penghijauan dilakukan pemerintah Kota Cimahi pada setiap kecamatan. Pada tahun 2021, realisasi penghijauan di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Tabel 2. 4**. Penambahan pepohonan atau vegetasi tersebut sangat perlu dilakukan di sekitar permukiman dan industri.

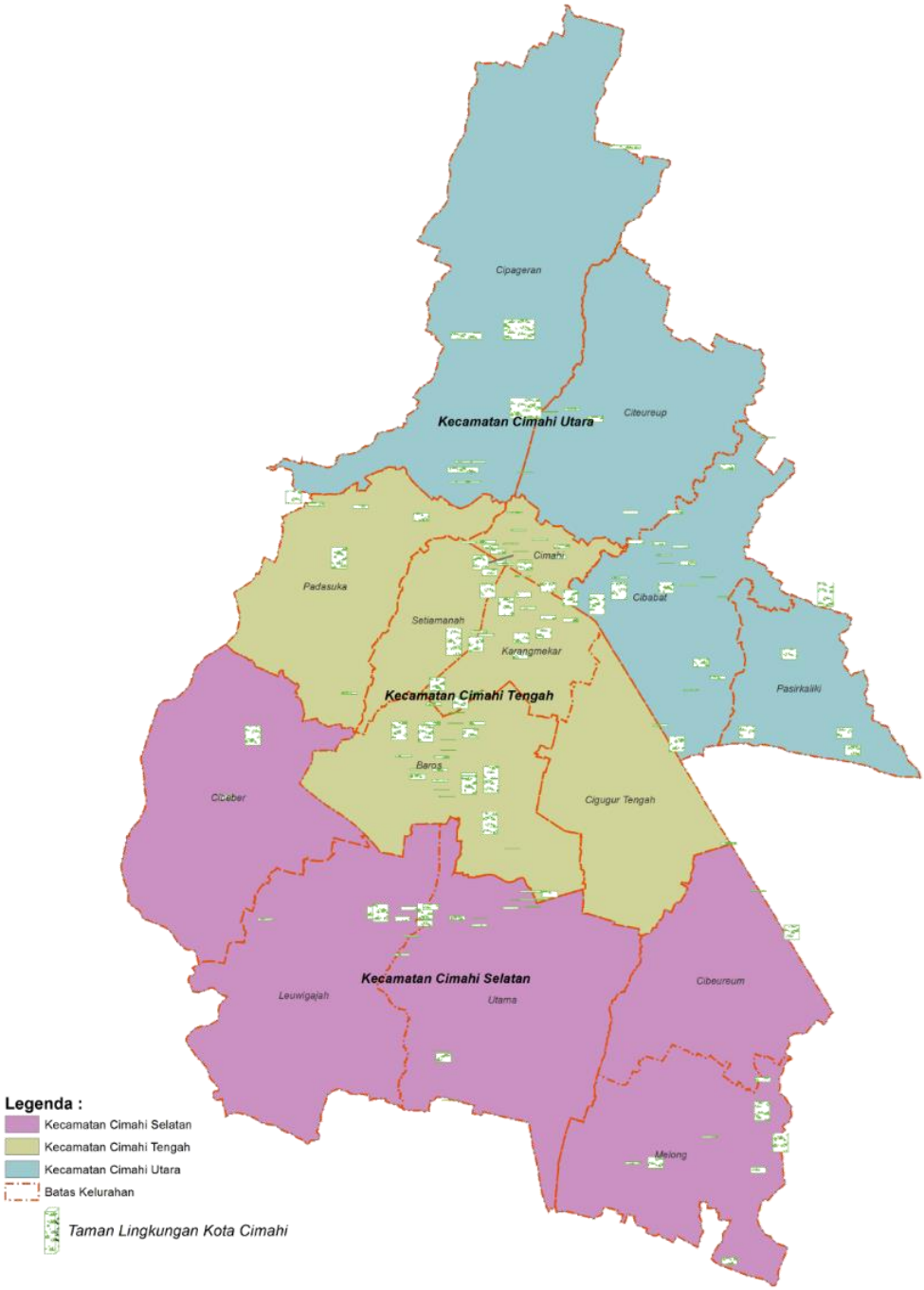
Tabel 2. 4 Realisasi Penghijauan Kota Cimahi Tahun 2024

No.	Kecamatan	Penghijauan		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
1	Cimahi Utara	0,15	0,01806	301
2	Cimahi Tengah		0,09246	1.541
3	Cimahi Selatan		0,02424	404

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Di Kota Cimahi, tidak terdapat penggunaan lahan sebagai hutan. Kota Cimahi mengandalkan hutan kota dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai penyerap polutan, penyerap bau, peredam kebisingan, habitat satwa liar, ameliorasi iklim, pengendalian bahaya banjir, dan sebagainya. Peningkatan RTH di wilayah Kota Cimahi terus diupayakan oleh pemerintah Kota Cimahi, guna memenuhi 30% lahan untuk RTH sesuai arahan pada RTRW yang telah ada untuk lokasi-lokasi penambahan RTH di Kota Cimahi. Diharapkan dengan adanya realisasi penghijauan ini dapat menyeimbangkan ekosistem yang ada antara lingkungan sosial dan ekonomi yang saat ini sedang

berkembang di Kota Cimahi. Upaya yang dilakukan dalam penambahan ruang terbuka hijau ini berupa taman lingkungan dengan persebaran seperti yang terlihat pada **Gambar 2. 11**.



Gambar 2. 11 Sebaran Taman Lingkungan

(Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2023)

2.1.5.5 *Biodiversity by Design*

Kota sebagai tempat bermukim penduduk dan pusat kegiatan ekonomi serta berbagai macam jasa umumnya cenderung dihuni oleh penduduk yang semakin banyak dengan sarana-prasarana yang semakin beragam dan masif. Paling tidak, permasalahan lingkungan perkotaan yang kerap muncul adalah tingginya laju pertambahan penduduk, tingginya laju pertambahan lahan terbangun, dan semakin menurunnya luas lahan Ruang Terbuka Hijau (Kusmana, 2015). Vegetasi merupakan suatu elemen dalam ekosistem perkotaan yang dapat menangkap energi cahaya matahari dan menyerap CO_2 dari atmosfer. Makhluk hidup ini juga mengambil air oleh akar dari dalam tanah tempat tumbuhnya, dengan bantuan zat hijau daun membentuk karbohidrat (energi kimia) sebagai sumber energi dan Oksigen yang sangat penting untuk menggerakkan aliran energi antar makhluk hidup lainnya. Dalam tata ruang kota, vegetasi menempati elemen Ruang Terbuka Hijau (RTH) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan RTH kota seperti keamanan, kenyamanan, kesejahteraan penghuninya dan keindahan wilayah perkotaan tersebut (Indrawati dalam Kusmana, 2007).

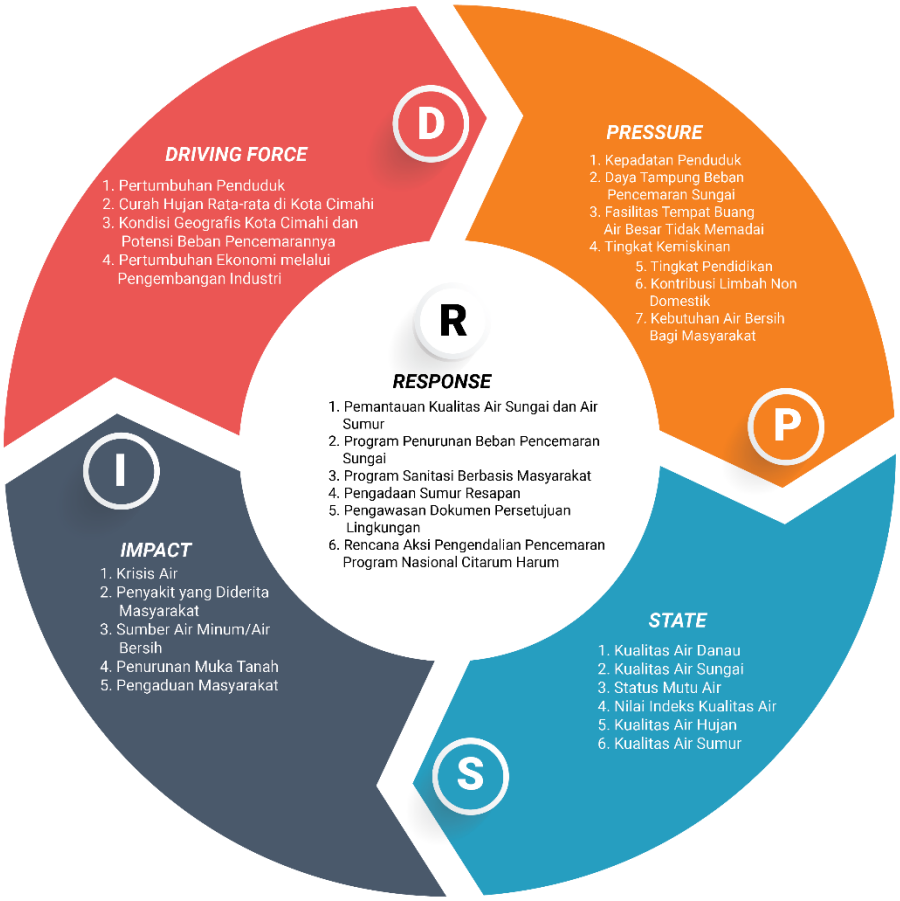
Suatu RTH kota yang berbentuk hutan kota tergantung pada komposisi jenis dan tujuan perancangannya. Adapun tujuan perancangannya sebagai berikut; (1) Fungsi lanskap, yaitu meliputi fungsi fisik sebagai perlindungan kondisi fisik alami seperti angin, sinar matahari, pemandangan kurang bagus, serta sebagai tempat interaksi sosial yang produktif, sarana pendidikan dan pelatihan, rekreasi, kesehatan, penghasil makanan/minuman/obat-obatan; (2) Fungsi pelestarian lingkungan seperti sebagai paru-paru kota, penurunan suhu udara kota, habitat satwa liar, sebagai *bio-engineering* dan bio-filter untuk mengendalikan pencemaran lingkungan. Hutan kota yang disusun oleh komposisi jenis tumbuhan dengan ukuran, bentuk, warna, tekstur tanaman yang serasi, serta desain penanaman yang tertata dengan baik akan menimbulkan pemandangan

visual yang indah sebagai tempat rekreasi. Pada tahun 2022 ini, DLH Kota Cimahi mencanangkan wisata kota dengan konsep edukasi yang dibangun di kawasan konservasi alam. Taman kehati di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara.

2.2 Kualitas Air

Air merupakan kebutuhan dasar makhluk hidup, sehingga kualitas air memiliki peran penting untuk mengukur kualitas kehidupan manusia dan kondisi ekonomi di sekitarnya. Sumber daya air dikelola dengan menjaga siklus daur hidrologi. Air sungai dan air tanah merupakan sumber air baku yang biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Kota Cimahi.

Kota Cimahi terletak di hulu Sungai Citarum yang merupakan bagian dari Daerah Cekungan Bandung dan salah satu daerah lembah Sungai Citarum. *Framework* atau kerangka kerja analisis isu kualitas air dapat dilihat pada **Gambar 2. 12.** Data pendukung untuk analisis isu kualitas air dapat menggunakan Tabel-22 sampai dengan Tabel-30**.**



Gambar 2. 12 Framework DPSIR Isu Kualitas Air

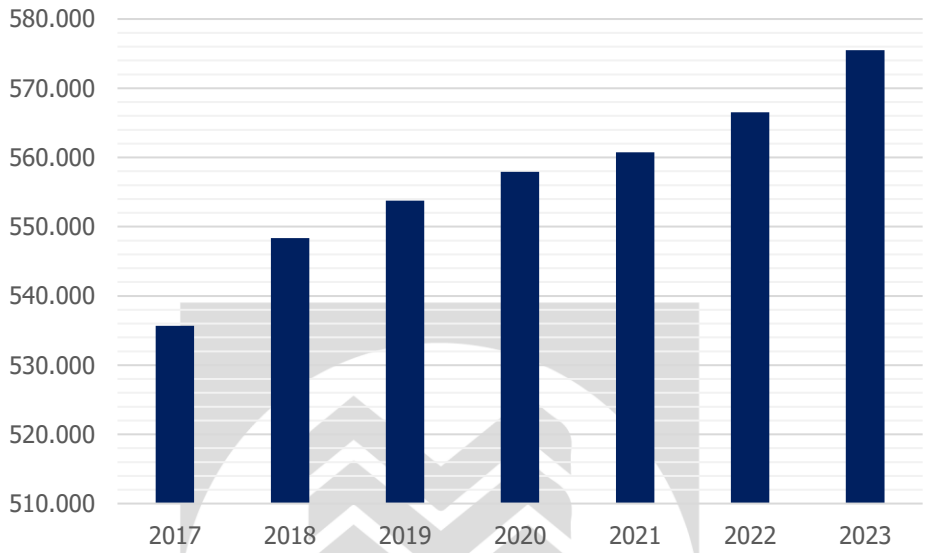
(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

2.2.1 Driving Force

2.2.1.1 Pertumbuhan Penduduk

Hal pertama yang menjadi faktor pendorong/pemicu tentang pengelolaan kualitas air ialah pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk yang tinggi berarti ada permintaan air yang lebih besar untuk keperluan domestik, industri, pertanian dan komersial. Permintaan air yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan eksploitasi sumber daya air, termasuk sumber air permukaan dan air tanah. Selain itu dalam daerah dengan populasi padat, limbah domestik dan limbah industri yang ditimbulkan juga meningkat. Jika sistem pengolahan limbah tidak memadai, limbah tersebut

dapat mencemari sumber air permukaan atau air tanah. Hal ini dapat mengurangi kualitas air dan membuatnya tidak layak untuk dikonsumsi atau digunakan. Bahkan jika populasi melebihi kapasitas suplai air yang tersedia, maka dapat terjadi kekurangan air bersih. Oleh karena itu, pertumbuhan penduduk menjadi faktor pemicu yang utama dalam isu kualitas air.



Gambar 2. 13 Tren Jumlah Penduduk di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, 2023, diolah)

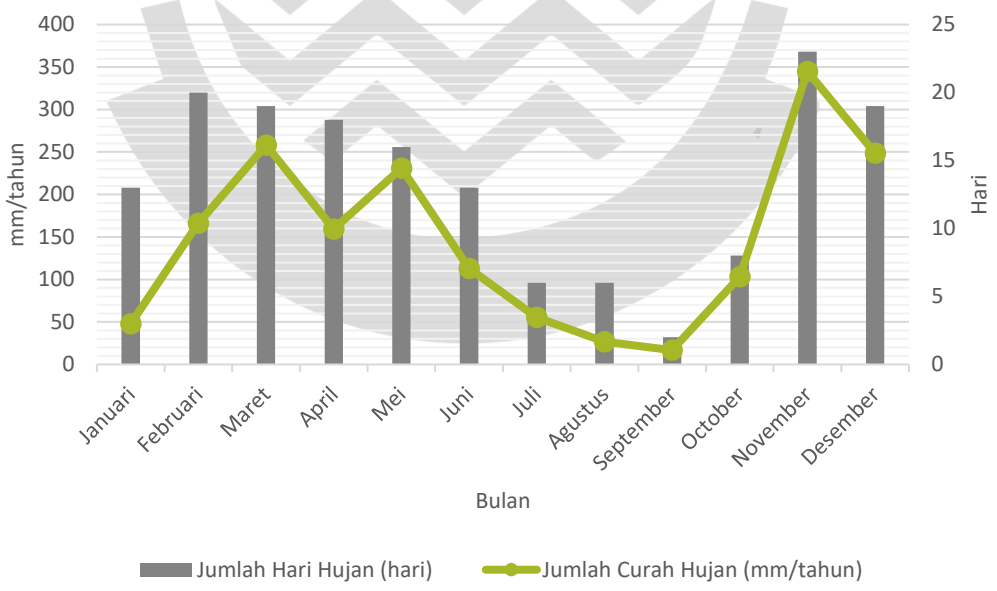
Kota Cimahi semenjak tahun 2017 terus mengalami pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk di Kota Cimahi mencapai 575.519 jiwa pada tahun 2023. Laju pertumbuhan penduduk di tahun 2023 sebesar 1,59% dengan angka harapan hidup mencapai 75,27 tahun (Kota Cimahi dalam Angka, 2023).

2.2.1.2 Curah Hujan Rata-rata di Kota Cimahi

Air memiliki siklus biogeokimia yang bernama siklus hidrologi atau siklus air. Salah satu proses pada siklus air yaitu evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air yang ada di sungai, danau, tumbuhan, dan laut menuju udara. Penguapan ini dibantu dengan adanya cahaya matahari. Uap air akan melakukan kondensasi berupa titik-titik air di udara dan jika sudah berada pada titik jenuh air, terjadilah hujan atau disebut sebagai proses

presipitasi. Terjadinya hujan dengan pola curah hujan tertentu dapat memfasilitasi pengangkutan bakteri ke dalam perairan alami, sehingga menyebabkan pencemaran mikroba di daerah aliran sungai (Shehane, 2005). Curah hujan dengan tingkat tertentu diperkirakan dapat meningkatkan beban pencemar di sungai dikarenakan air limpasan yang berasal dari permukaan serta mengandung senyawa-senyawa organik ikut masuk ke dalam sungai.

Pemantauan curah hujan yang terjadi selama tahun 2023 di Kota Cimahi sangat berfluktuatif, curah hujan dengan intensitas yang tingi mempengaruhi besarnya infiltrasi, aliran air tanah, dan aliran permukaan tanah menuju ke sungai. Curah hujan yang tinggi berpotensi menyebabkan terjadinya banjir dan longsor. Curah hujan paling tinggi di Kota Cimahi terjadi pada Bulan November yaitu mencapai 344,8 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari sedangkan curah hujan paling rendah terjadi di Bulan September yaitu 16,8 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 2 hari. Data curah hujan rata-rata bulanan di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 14.**



Gambar 2. 14 Curah Hujan Rata-rata Bulanan dan Hari Hujan Rata-rata Bulanan di Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: Kota Cimahi dalam Angka, 2024)

2.2.1.3 Kondisi Geografis Kota Cimahi dan Potensi Beban Pencemarannya

Kota Cimahi terletak ±11 km di sebelah barat pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung. Kota Cimahi terletak di bagian hulu Sungai Citarum yang merupakan bagian dari daerah Cekungan Bandung dan salah satu daerah lembah Sungai Citarum. Kota Cimahi diproyeksikan memiliki potensi sumber daya air sebesar 46,71 juta m^3 per tahun yang terdiri atas air permukaan sebesar 33,10 juta m^3 dan air tanah sebesar 13,612 juta m^3. Kota Cimahi terletak pada wilayah hidrogeologi Cekungan Air Tanah (CAT) Bandung-Soreang yang juga mencakup beberapa wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (KLHS Perubahan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2017-2022). Kota Cimahi merupakan wilayah yang berada dalam cakupan Wilayah Sungai (WS) Citarum, yaitu pada dua Wilayah Distrik (WD), yaitu WD Citarum Tengah dan WD Cekungan Bandung. Selain Kota Cimahi, kedua WD ini juga mencakup beberapa kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat. Hal ini menyebabkan adanya tambahan potensi beban pencemar air sungai pada Kota Cimahi yang berasal dari beberapa daerah dalam cakupan kedua WD tersebut.

2.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengembangan Industri

Laju ekonomi dapat menjadi faktor pendorong terhadap isu kualitas air. Pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali disertai dengan peningkatan aktivitas industri. Aktivitas ini dapat menghasilkan limbah cair, limbah padat, dan polutan lainnya yang dapat mencemari air jika tidak dikelola dengan baik. Di Kota Cimahi, aktivitas kegiatan industri terus bergerak untuk menopang perekonomian kota. Aktivitas sektor perindustrian berpotensi menghasilkan limbah padat, limbah cair, bahkan limbah B3 yang dapat mencemari air sungai. Jumlah industri yang terdata oleh BPS (2024) di Kota Cimahi pada tahun 2023 sejumlah 123 perusahaan (dapat dilihat pada **Tabel 2. 5**).

Tabel 2. 5 Banyaknya Perusahaan Menurut Jenisnya di Kota Cimahi Tahun 2023

No.	Industri	Jumlah
1	Makanan dan Minuman	2
2	Tekstil	53
3	Pakaian Jadi	16
4	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	2
5	Kayu, Barang-barang dari Kayu (Tidak Termasuk Furnitur), dan Barang-barang dari Anyaman dari Rotan, Bambu, dan Sejenisnya	1
6	Kertas, Barang dari Kertas dan Sejenisnya	2
7	Penerbitan, Percetakan, dan Reproduksi Media Rekaman	2
8	Kimia dan Barang-barang Dari Bahan Kimia	9
9	Karet, Barang dari Karet, dan Bahan dari Plastik	5
10	Logam Dasar	1
11	Barang dari Logam, kecuali Mesin dan Peralatannya	6
12	Mesin Listrik Lainnya dan Perlengkapannya	4
13	Radio,Televisi dan Peralatan Komunikasi, serta Perlengkapannya	1
14	Peralatan Kedokteran, Alat-alat Ukur, Peralatan Navigasi, Peralatan Optik, Jam dan Lonceng	4
15	Kendaraan Bermotor	2
16	Alat Angkutan, Selain Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	3
17	Furnitur dan Industri Pengolahan Lainnya	10

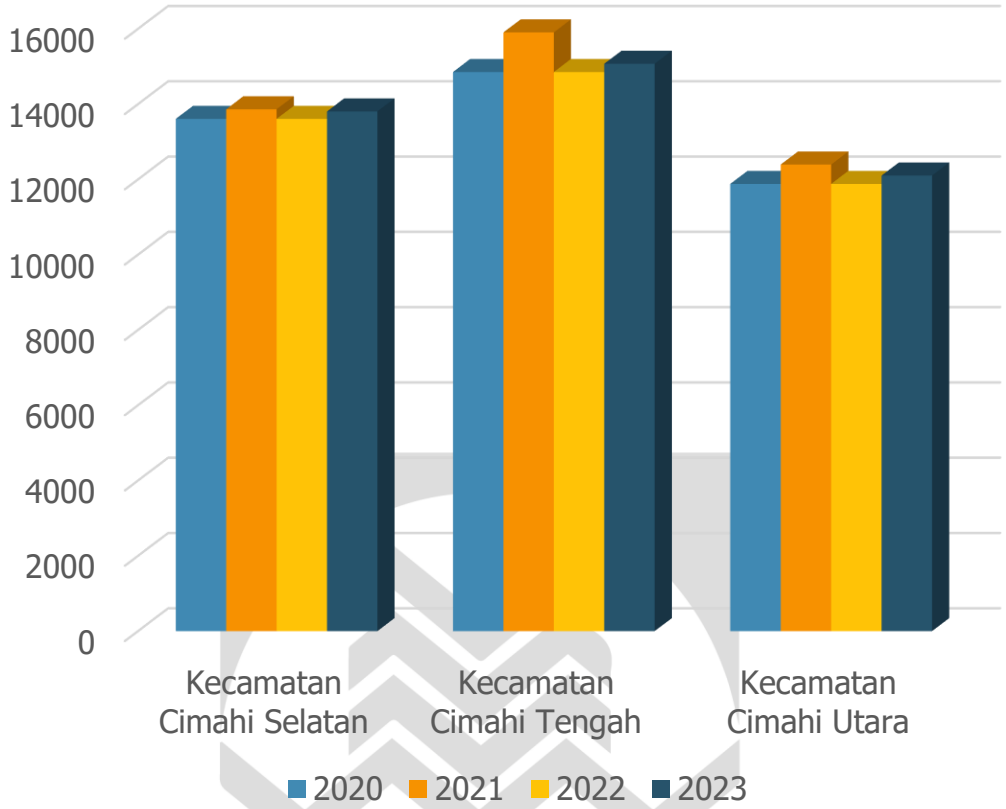
Sumber: Kota Cimahi dalam Angka Tahun 2024

2.2.2 Pressure

2.2.2.1 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk dapat memiliki pengaruh terhadap kualitas air. Dalam daerah dengan kepadatan penduduk tinggi, permintaan air untuk keperluan domestik, industri, dan pertanian juga meningkat. Jika pasokan air tidak memadai atau tidak dikelola dengan baik, dapat terjadi penurunan kualitas air. Kepadatan penduduk yang tinggi juga cenderung menyebabkan peningkatan limbah domestik. Berdasarkan data kependudukan di Kota Cimahi Tahun 2023, wilayah terpadat di Kota Cimahi adalah Kecamatan Cimahi Tengah, yaitu 15.071 jiwa/km^2. Jika sebagian masyarakat menggunakan air sumur untuk kebutuhan air bersih, maka hal ini juga

berpotensi terjadi penurunan muka tanah di Kota Cimahi. Grafik kepadatan penduduk di Kota Cimahi Tahun 2023 dapat dilihat pada **Gambar 2. 15.**



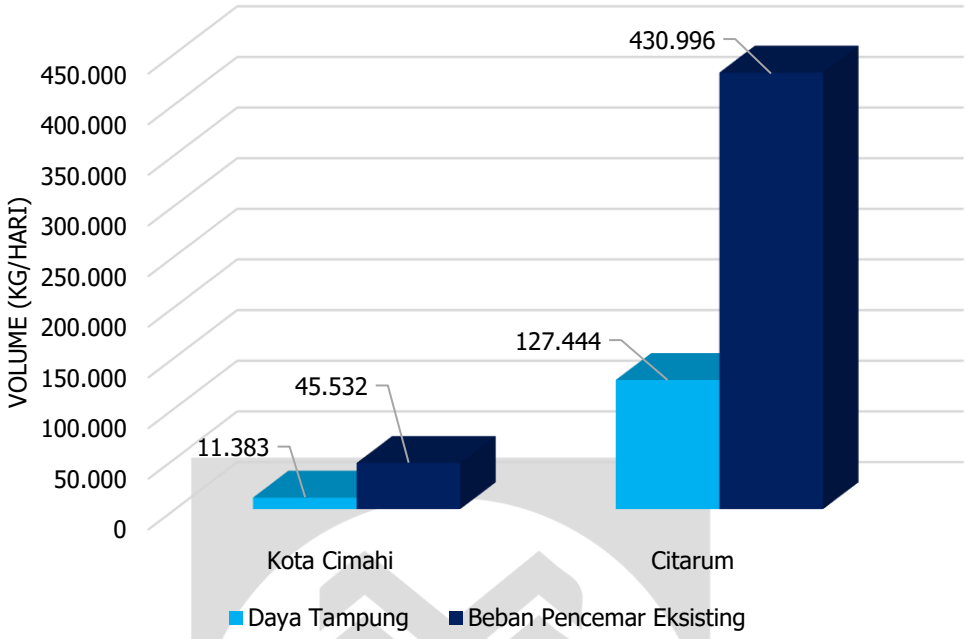
Gambar 2. 15 Tren Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, 2023, diolah)

2.2.2.2 Daya Tampung Beban Pencemar Sungai

Kota Cimahi memiliki beberapa sungai yang bermuara pada Sungai Citarum, diantaranya adalah Sungai Cibaligo, Cimahi, Cisangkan, Cibeureum dan Cilember. Mengacu SK.300/MenLHK/Setjen/PKL.1/6/2017 tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Citarum, alokasi beban pencemar pada Sungai Citarum yang ditetapkan oleh pemerintah dapat dilihat pada **Gambar 2. 16**. Daya tampung beban pencemaran DAS Citarum sudah melewati batas, Kota Cimahi berkontribusi mencemari DAS Citarum sebesar 10 persen dari total beban pencemaran. Sumber beban pencemar yang berada di Kota

Cimahi diantaranya berasal dari beberapa sektor, seperti sektor domestik, pertanian, peternakan dan industri.

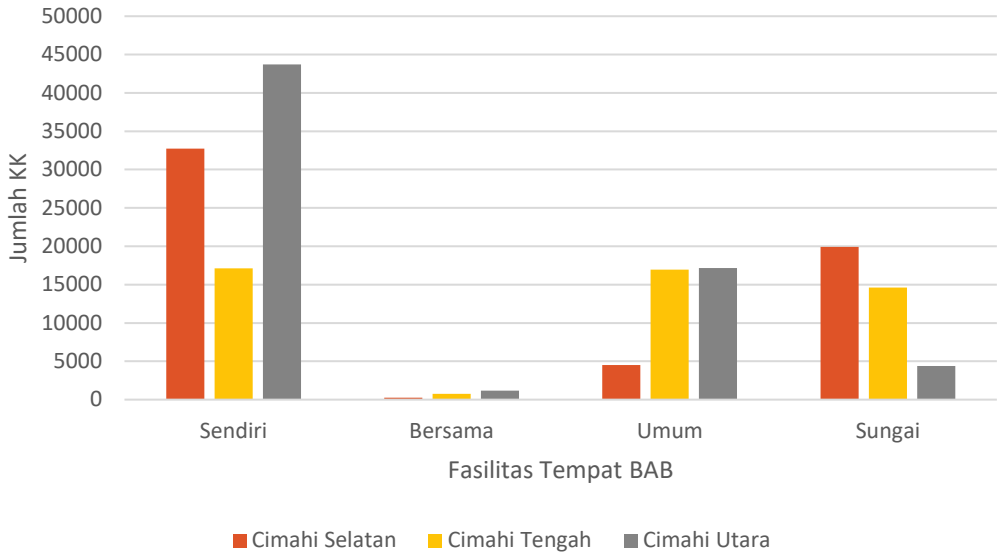


Gambar 2. 16 Perbandingan Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai di Kota Cimahi Terhadap DAS Citarum

(Sumber: SK.300/MenLHK/Setjen/PKL.1/6/2017)

2.2.2.3 Fasilitas Tempat Buang Air Besar Tidak Memadai

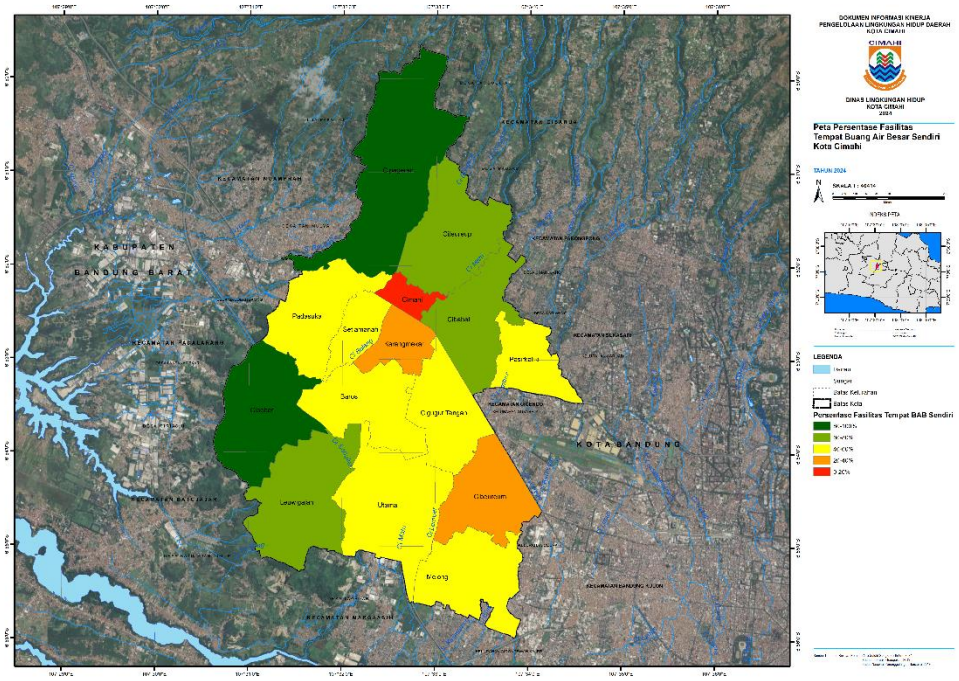
Penyediaan sarana prasarana permukiman seperti sanitasi yang layak pakai harus terpenuhi untuk masyarakat Kota Cimahi. Jumlah fasilitas tempat buang air besar di Kota Cimahi lebih banyak yang dikelola sendiri (jamban sehat). Namun, fasilitas tersebut masih belum merata sehingga masih ada sejumlah kepala keluarga yang menjadikan sungai sebagai tempat buang air besar. Berdasarkan **Gambar 2. 17**, rumah tangga (RT) di Kota Cimahi paling banyak memakai fasilitas tempat buang air besar milik sendiri yaitu sebanyak 93.564 KK, sedangkan RT yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar bersama sebanyak 2.197 KK, dan RT yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar umum sebanyak 38.652 KK, serta masih ada RT yang buang air besar sembarangan sebanyak 38.919 KK.



Gambar 2. 17 Fasilitas Tempat Buang Air Besar di Kota Cimahi

(Sumber: Dinkes dan DPKP Kota Cimahi, 2023)

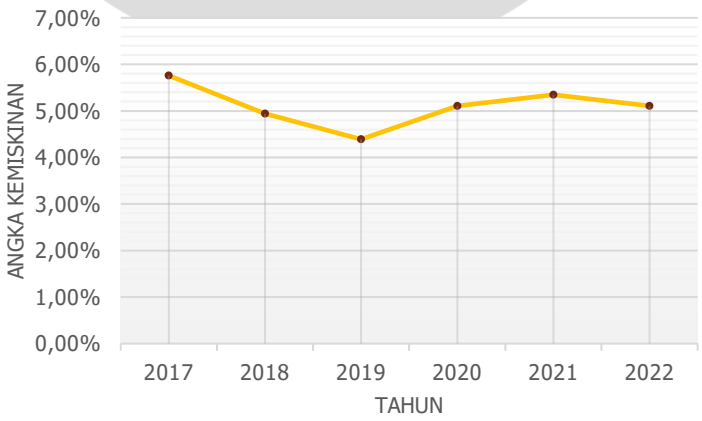
Jumlah RT yang memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri terbanyak berada di Kecamatan Cimahi Selatan, dan jumlah RT yang menggunakan tempat buang air besar umum paling banyak di Kecamatan Cimahi Tengah. Sedangkan jumlah RT yang masih membuang air besar sembarangan (ke sungai) berada di Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Tengah. Untuk menjaga kualitas air yang baik, penting untuk memiliki fasilitas tempat buang air besar masyarakat yang memadai dan memastikan pengelolaan limbah yang efektif. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik juga perlu ditingkatkan untuk mendorong praktik yang lebih sehat dan lingkungan yang bersih.



Gambar 2. 18 Peta Persentase Fasilitas Tempat BAB

2.2.2.4 Tingkat Kemiskinan

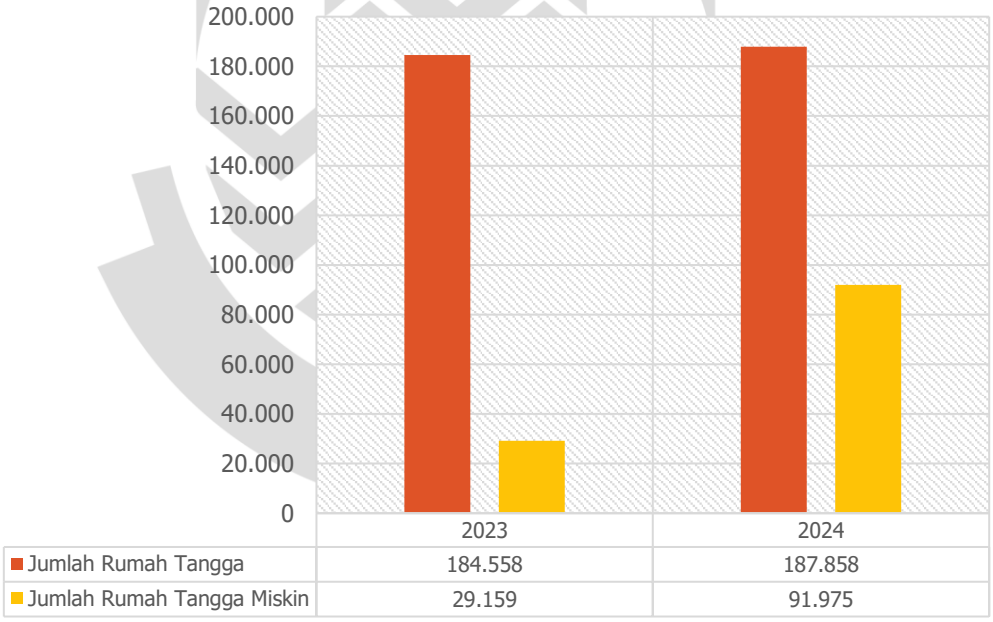
Permasalahan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar bisa disebabkan oleh faktor kemiskinan. Kemiskinan merupakan permasalahan laten baik di level nasional maupun daerah. Secara umum tingkat kemiskinan di Kota Cimahi berfluktuasi semenjak tahun 2017 hingga tahun 2022. Angka kemiskinan di Kota Cimahi pada tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2021 menjadi 5,11% (**Gambar 2. 19**).



Gambar 2. 19 Tren Angka Kemiskinan di Kota Cimahi

(Sumber: BPS Kota Cimahi, 2023)

Tingkat kemiskinan masyarakat mempengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengenyam pendidikan dan kemampuan masyarakat dalam membayar pengelolaan jasa lingkungan. Dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, gaya hidup seseorang mempengaruhi *personal hygiene*, kebiasaan dalam mengelola limbahnya, dan keinginan untuk membayar (*willingness to pay*) terhadap jasa pengelolaan lingkungan. Pada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah sampai menengah ke atas umumnya tinggal pada area permukiman yang layak sehingga memiliki keinginan untuk membayar dalam sistem pengelolaan sampah dan ikut dalam penggunaan sistem air jaringan. Sebaliknya, masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, tidak memiliki keinginan untuk membayar jasa lingkungan yang tinggi. Jumlah penduduk miskin di Kota Cimahi pada tahun 2023 sebesar 91.975 kk atau 48,95% dari 187.858 rumah tangga.



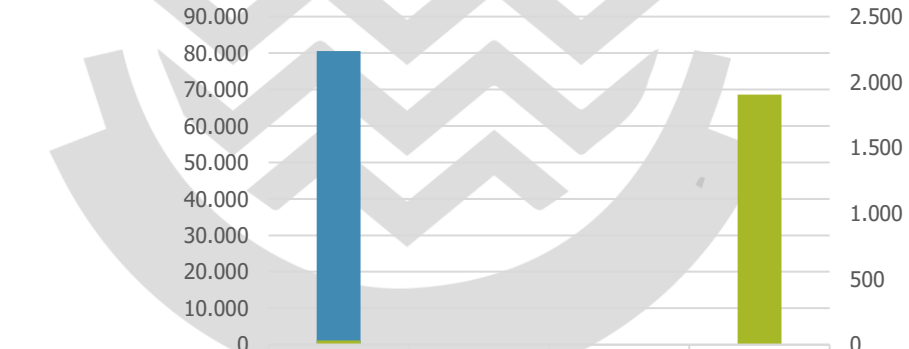
Gambar 2. 20 Tren Jumlah Penduduk Miskin di Kota Cimahi

(Sumber: Dinsos dan Disdukcapil (Data Konsolidasi Bersih Kota Cimahi), 2023)

2.2.2.5 Kontribusi Limbah Non Domestik

Tumbuhnya sektor perindustrian dan kegiatan jasa lainnya seperti pertokoan, hotel, rumah sakit, dan tempat wisata memiliki tujuan

meningkatkan perekonomian di Kota Cimahi. Namun, aktivitas sektor perindustrian berpotensi menimbulkan limbah padat, limbah cair, bahkan limbah B3. Limbah non domestik juga berpotensi menjadi salah satu faktor penekan terhadap kualitas air. Sebagai contoh tingginya nilai COD dapat diakibatkan salah satunya karena keberadaan industri tekstil. Keberadaan industri lainnya juga memberikan potensi menurunkan kualitas air pada parameter lainnya, seperti BOD, DO, pH dan sebagainya. Pada tahun 2023, jumlah limbah yang berasal dari sektor non domestik dapat dilihat pada **Gambar 2. 21**. Volume limbah non domestik di Kota Cimahi yang terdata didominasi dengan limbah B3 padat. Jumlah limbah B3 padat yang ditimbulkan dari jenis pencemar industri mencapai 80.524 ton/tahun, sedangkan fasilitas pelayanan kesehatan menimbulkan 217 ton/tahun, dan laboratorium lingkungan menimbulkan 2 ton/tahun. Jumlah limbah B3 cair paling banyak ditimbulkan pada jenis pencemar yang berasal dari industri pengumpul limbah B3 yaitu 1.907 m^3/tahun, dan jumlah limbah B3 cair yang berasal dari industri sebesar 33 m^3/tahun.



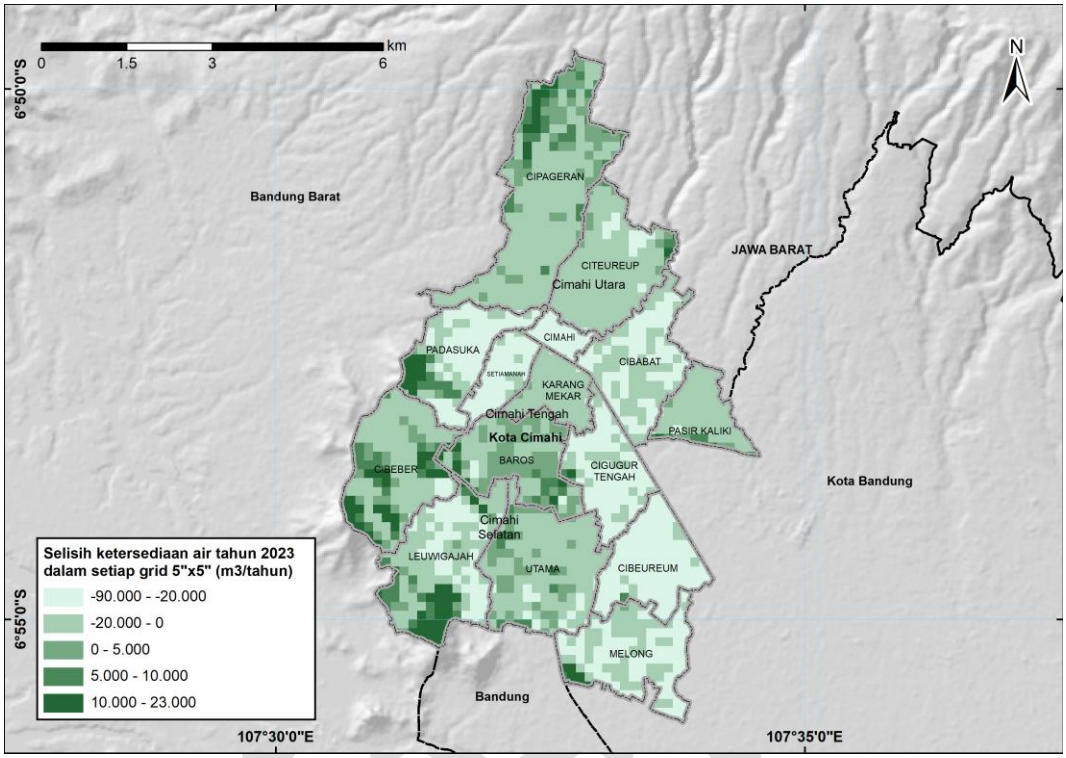
	Industri	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Laboratorium Lingkungan	Pengumpul Limbah B3
Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	80.524	217	2	0
Jumlah Limbah B3 Cair (m3/tahun)	33	0	0	1.907

Gambar 2. 21 Jumlah Limbah Berdasarkan Sumber Pencemarnya

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2022)

2.2.2.6 Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat

Faktor pendorong berupa aktivitas domestik dan pertumbuhan penduduk yang terus terjadi di setiap tahunnya sangat berpengaruh terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan akan air bersih. Dalam hal kebutuhan air, kebutuhan air domestik mengacu pada PermenLH No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Data Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Kebutuhan air di Kota Cimahi terkonsentrasi di Kecamatan Cimahi Utara dan Cimahi Selatan, terutama di Kelurahan Cipageran, Melong, Citeureup, Leuwigajah, Cibeureum, dan Cibabat. Di kelurahan-kelurahan tersebut, kebutuhan air domestik mendominasi, mencapai sekitar 90% dari total kebutuhan air. Namun, di beberapa kelurahan seperti Cipageran, Citeureup, Cibeber, Leuwigajah, dan Utama, kebutuhan air untuk penggunaan lahan dan industri juga cukup besar, yaitu sekitar 20-38%. Atas dasar kebutuhan ini, Kota Cimahi mengalami tekanan terkait ketersediaan air bersih guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Untuk mengidentifikasi wilayah dengan kelebihan dan kekurangan air, dilakukan perhitungan selisih ketersediaan air dengan cara mengurangi ketersediaan air dengan kebutuhan air. Berdasarkan **Gambar 2. 22**, sebagian besar wilayah memiliki selisih negatif atau defisit, terutama di Kelurahan Cimahi, Cigugur Tengah, Cibeureum, Setiamanah, dan Melong. Di sisi lain, beberapa kelurahan memiliki selisih positif atau surplus, seperti Kelurahan Baros, Cibeber, Cipageran, dan Utama.



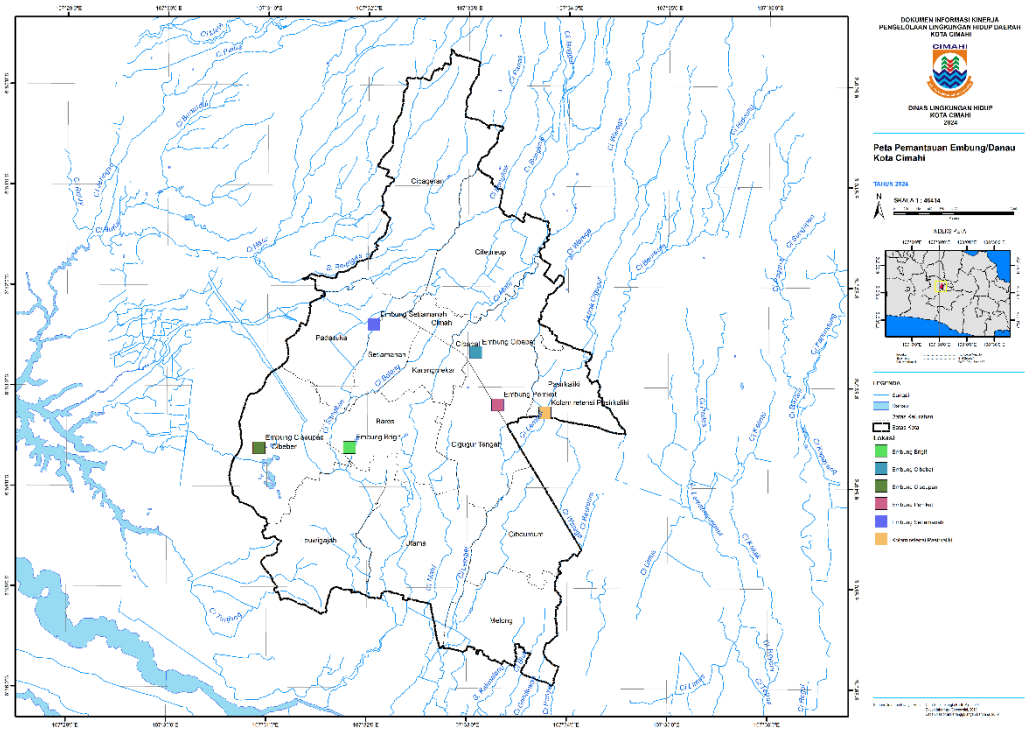
Gambar 2. 22 Selisih Ketersediaan Air di Kota Cimahi

(Sumber: KLHS RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045)

2.2.3 State

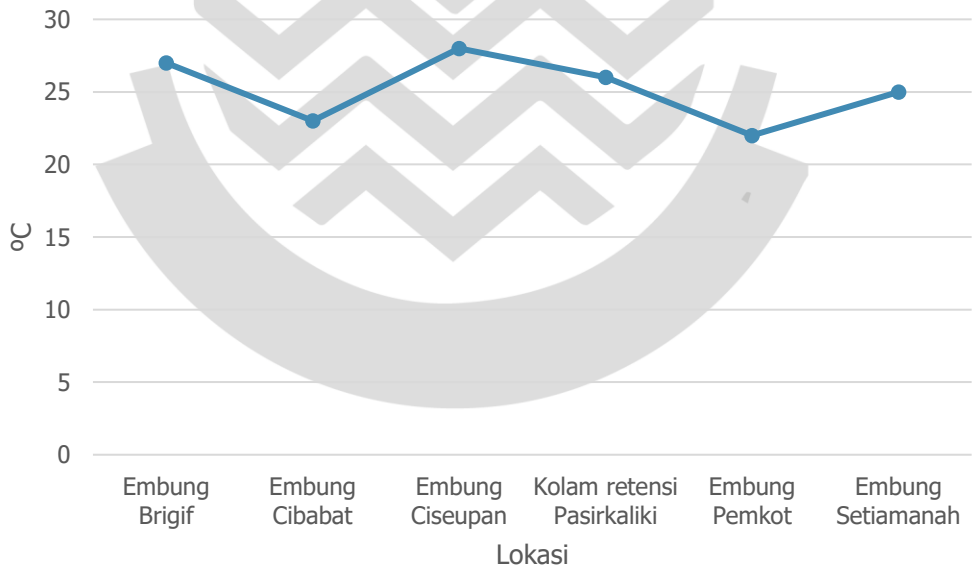
2.2.3.1 Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung

Pemantauan kualitas air danau/waduk/situ/embung di Kota Cimahi dilakukan pada bulan Februari, dengan 6 lokasi titik pantau. Lokasi pemantauan kualitas air danau di Embung Brigif, Embung Cibabat, Embung Ciseupan, Kolam Retensi Pasirkaliki, Embung Pemkot, dan Embung Setiamanah dan dapat dilihat pada **Gambar 2. 23**. Hasil pemantauan kualitas air danau dapat dilihat pada **Gambar 2. 24** sampai **Gambar 2. 34.** Berdasarkan hasil pemantauan, konsentrasi parameter DO, BOD, COD, *Total Coliform*, fenol, minyak dan lemak tidak memenuhi baku mutu, sedangkan TSS, TDS, *Fecal Coliform* masih ada beberapa titik yang memenuhi baku mutu kualitas air danau berdasarkan PP 22 tahun 2021 Lampiran VI.



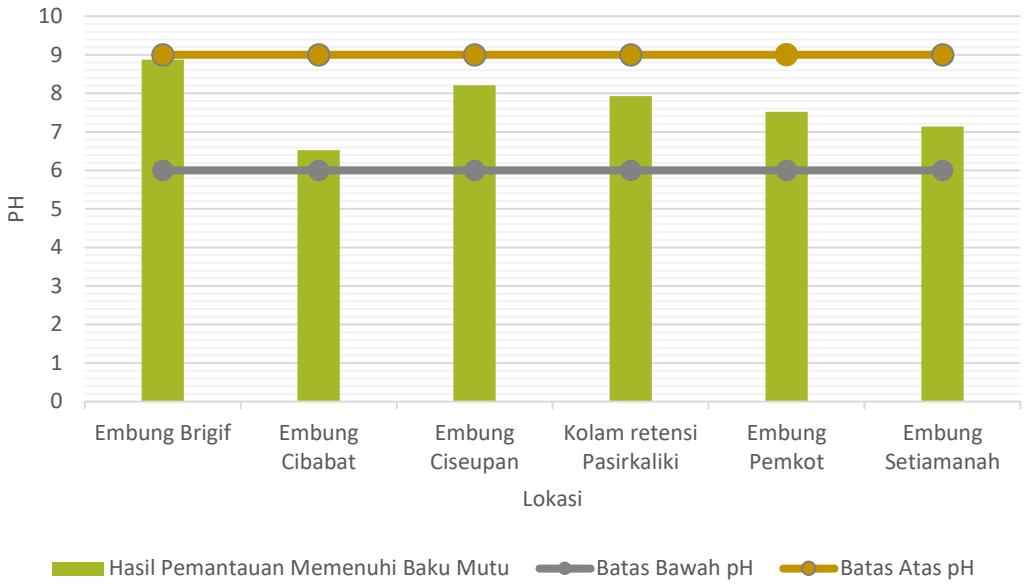
Gambar 2. 23 Lokasi Pemantauan Embung Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Embung, 2023, diolah)



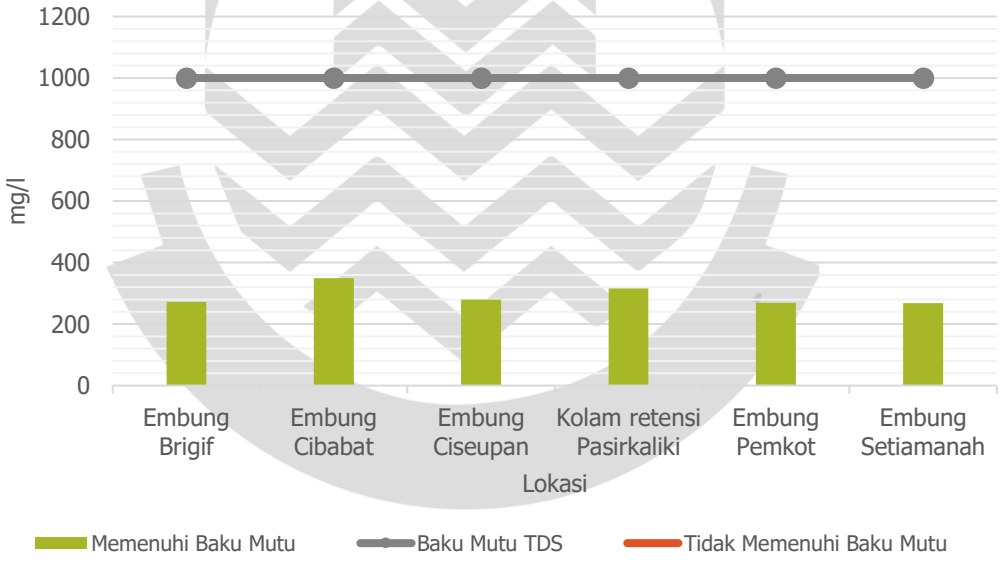
Gambar 2. 24 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter Suhu di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Embung, 2023)



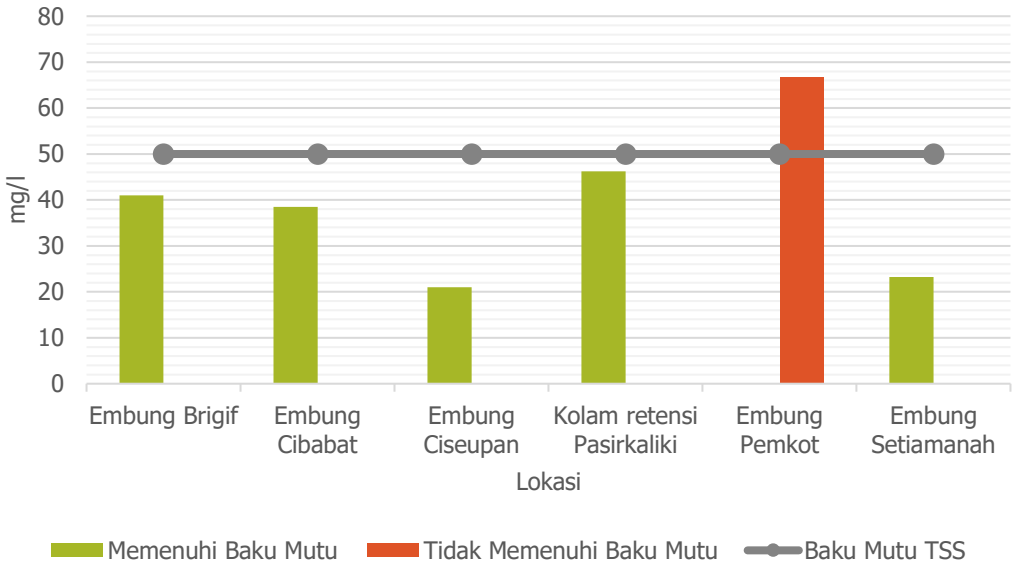
Gambar 2. 25 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter pH di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Embung, 2023)



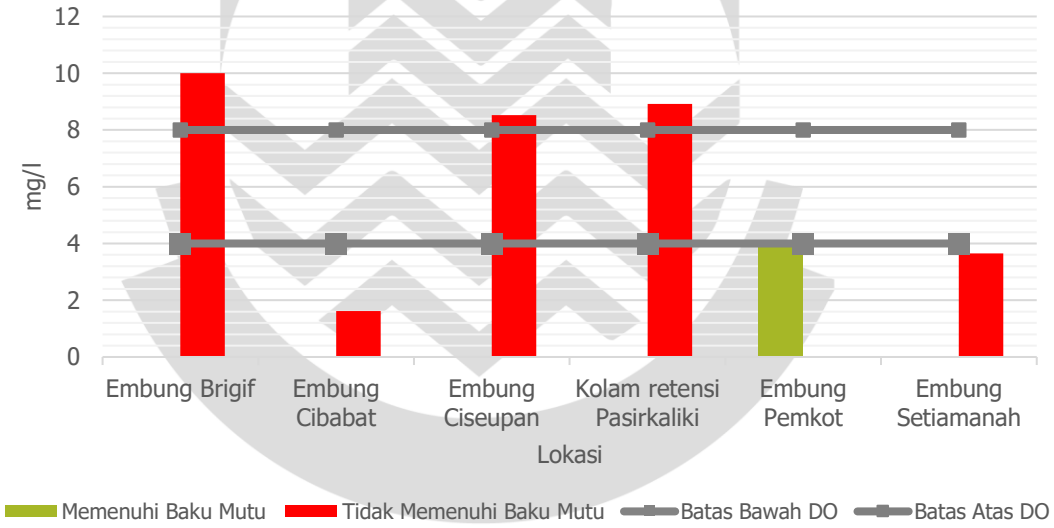
Gambar 2. 26 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter TDS di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Embung, 2023)



Gambar 2. 27 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter TSS di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Embung, 2023)



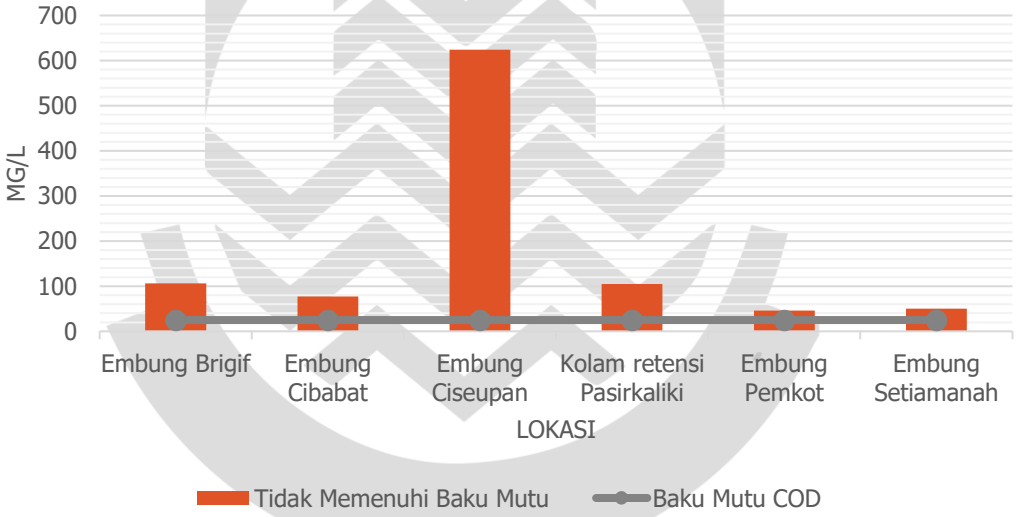
Gambar 2. 28 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter DO di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Embung, 2023)



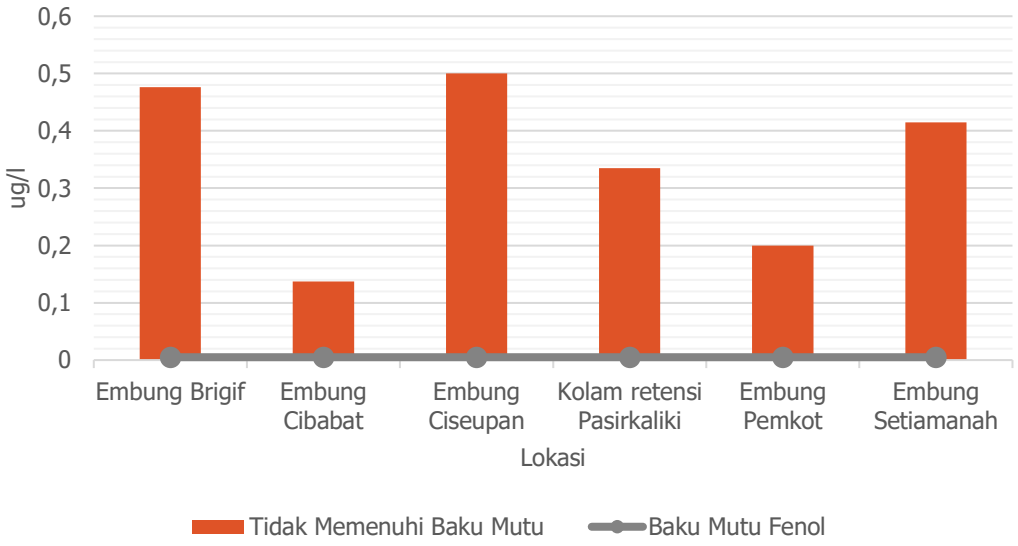
Gambar 2. 29 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter BOD di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Embung, 2023)



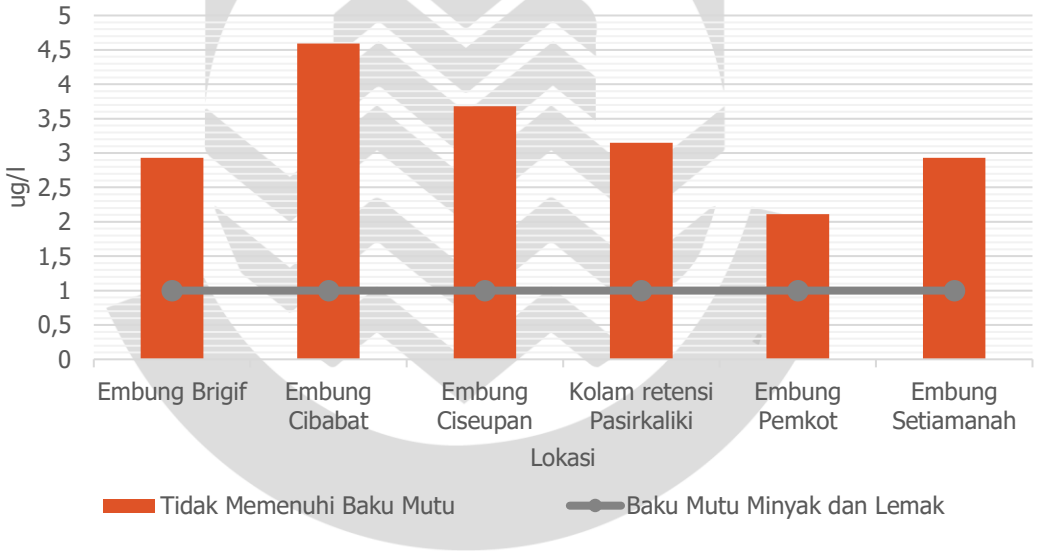
Gambar 2. 30 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter COD di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Embung, 2023)



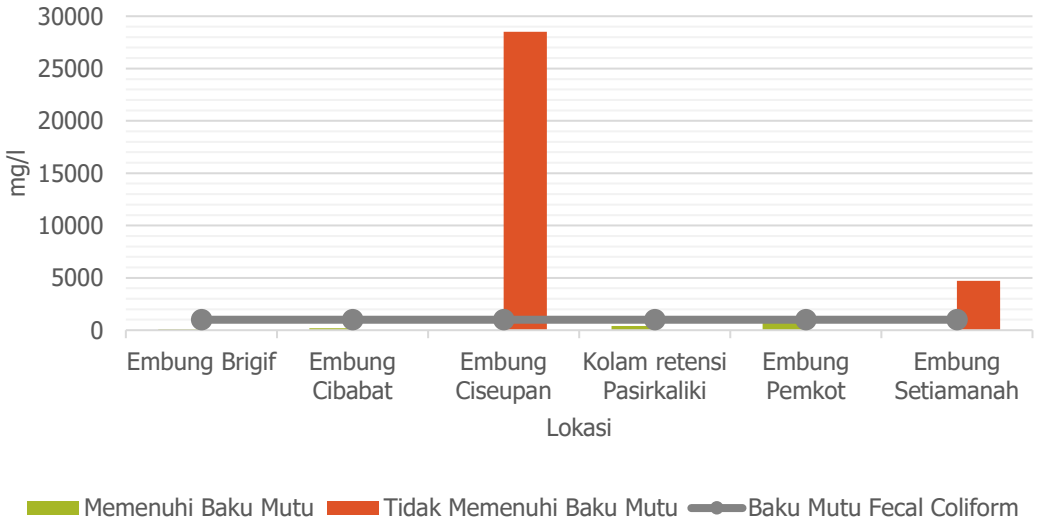
Gambar 2. 31 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter Fenol di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Embung, 2023)



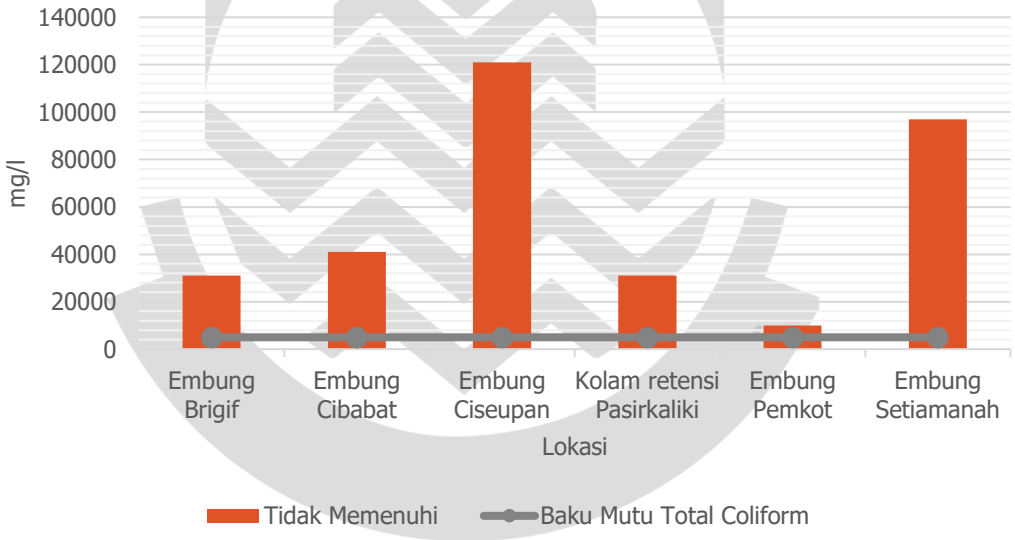
Gambar 2. 32 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter Minyak dan Lemak di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Embung, 2023)



Gambar 2. 33 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter Fecal Coliform di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Embung, 2023)



Gambar 2. 34 Hasil Pemantauan Kualitas Air Danau Parameter Total Coliform di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Embung, 2023)

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas air danau, didapatkan beberapa analisis sebagai berikut:

1) Parameter BOD. Kualitas air danau di Kota Cimahi memiliki nilai konsentrasi BOD yang melebihi baku mutu. Nilai konsentrasi BOD

paling tinggi berada di Embung Ciseupan dengan konsentrasi mencapai 218 mg/L.

2) Parameter COD. Sama halnya dengan parameter BOD, kualitas air danau di Kota Cimahi memiliki nilai konsentrasi COD yang melebihi baku mutu, dengan nilai konsentrasi mencapai 624 mg/L berada di Embung Ciseupan. Nilai BOD dan COD yang tinggi menunjukkan adanya pencemaran organik yang berlebihan dalam air. Kedua parameter tersebut sangat berkaitan karena dibutuhkan jumlah oksigen yang lebih banyak untuk menguraikan materi organik. Peningkatan bahan organik dalam air dapat merangsang pertumbuhan mikroorganisme secara berlebihan. Jika danau digunakan sebagai sumber air minum, nilai BOD yang melebihi baku mutu dapat menyebabkan pencemaran air minum.
3) Hasil pemantauan kualitas air danau dalam parameter biologi, yaitu *fecal coliform* menunjukkan nilai konsentrasi diatas baku mutu pada Embung Ciseupan dengan nilai yang paling tinggi yaitu 28.510 jumlah/100 ml (parameter *fecal coliform*) dan 121.000 jumlah/100 ml (parameter *total coliform*). *Total coliform* merupakan parameter yang dapat digunakan untuk standar sanitasi dalam menentukan dugaan adanya patogen dalam air. Sedangkan parameter *fecal coliform* digunakan untuk menunjukkan adanya indikasi kontaminasi fekal yang berasal dari tinja makhluk hidup.
4) Parameter fenol. Fenol adalah senyawa organik yang dapat hadir dalam air sebagai hasil dari aktivitas industri, pengolahan limbah, atau bahan kimia yang digunakan dalam proses produksi. Hasil pemantauan kualitas air danau menunjukkan kualitas fenol di semua lokasi melebihi baku mutu. Konsentrasi fenol paling tinggi terdapat di Embung Ciseupan yang mencapai 0,5 µg/L. Fenol adalah zat beracun bagi makhluk hidup, termasuk manusia. Pajanan yang tinggi terhadap fenol dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernapasan.

Fenol juga dapat mengganggu sistem pernapasan ikan dan organisme air lainnya.

5) Parameter Minyak dan Lemak. Minyak dan lemak merupakan pencemar umum di perairan, terutama akibat kegiatan industri, pertanian, dan aktivitas manusia lainnya. Konsentrasi minyak dan lemak paling banyak terdapat di Embung Cibabat yaitu 4,59 µg/L. Dampak dari kandungan minyak dan lemak di perairan yaitu minyak dan lemak yang mencampur dengan air dapat membentuk lapisan tipis di permukaan air, yang menghalangi oksigenasi air dan menciptakan kondisi tidak sehat bagi organisme air.

2.2.3.2 Kualitas Air Sungai

Kualitas sungai dipantau berdasarkan baku mutu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Tujuan dilakukan pemantauan kualitas air sungai ini antara lain untuk mengetahui kecenderungan perubahan air serta mengetahui indeks pencemaran air sungai sebagai evaluasi indikator keberhasilan pengendalian pencemaran air, serta menetapkan kebijakan dan strategi lebih lanjut. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada Bulan Maret (bulan basah), Bulan Juni (bulan kering) dan Bulan Oktober (bulan basah) untuk menunjukkan kualitas air sungai di Kota Cimahi. Posisi Kota Cimahi yang berada di hilir kota Bandung, menyebabkan kondisi sungai di kota Cimahi tidak murni disebabkan aktivitas Kota Cimahi seperti contoh pada pemantauan TSS Bulan Juni tahun 2023 di Sungai Cilember dimana kualitas air di bagian hulu sudah terlampau tinggi sedangkan pada bagian hilir mengalami penurunan, artinya terjadi perbaikan kualitas air sungai yang melewati Kota Cimahi. Hasil pemantauan kualitas air sungai dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-29. Terdapat 5 sungai yang diuji kualitas air sungainya, yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cilember, Sungai Cisangkan, Sungai Cihaur, dan Sungai Cibeureum. Sehingga total titik pemantauan sebanyak 45 titik.

***Total Suspended Solid*.** Analisis tingginya parameter *Total Suspended Solid* (TSS) disebabkan oleh adanya buangan limbah dari kegiatan domestik atau industri, serta kehadiran zat padat di dalam badan air juga dapat disebabkan oleh adanya kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa oleh air (Tchobanoglous, et al., 2014). Nilai TSS yang tertinggi ada di titik pemantauan Sungai Cilember bagian Hulu dengan nilai mencapai 216 mg/L pada bulan Juni tahun 2023. Baku mutu yang digunakan untuk parameter TSS sebesar 50 mg/lt. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, bahwa konsentrasi TSS pada air sungai di Kota Cimahi terdapat 23 titik yang melebihi baku mutu. Hasil uji konsentrasi TSS pada sungai-sungai di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 35**. TSS dapat berupa berbagai jenis material, seperti lumpur, tumbuhan dan hewan yang membusuk, limbah industri, dan sampah. Menurut Murphy (2007), padatan tersuspensi dengan konsentrasi tinggi dapat menyebabkan banyak masalah bagi kesehatan dan kehidupan akuatik.

***Dissolved Oxygen*.** Parameter DO merupakan ukuran seberapa banyak oksigen terlarut dalam air. Konsentrasi DO menjadi penting karena hubungan dengan kualitas air yang cocok untuk kehidupan ikan. Selain itu, DO juga bermanfaat untuk menunjukkan suatu ekologis yang masih baik (EPA, 2001). Parameter DO memiliki baku mutu kelas air (kelas 2) sebesar 4 mg/lt. Berbeda dengan parameter lainnya, parameter DO merupakan parameter khusus. Nilai DO semakin besar akan semakin baik, dan berguna sebagai sumber oksigen terlarut pada proses respirasi. Jika nilai DO di sungai melebihi 4 mg/lt maka itu akan lebih baik ketimbang nilai DO di sungai di bawah 4 mg/lt. Berdasarkan data, konsentrasi DO di beberapa sungai Kota Cimahi banyak yang tidak memenuhi baku mutu, Hasil uji konsentrasi DO pada sungai di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 36**. Konsentrasi DO pada air permukaan dipengaruhi oleh temperatur dan memiliki siklus musiman dan harian. Air yang dingin cenderung menyimpan lebih banyak DO dibandingkan air hangat (USGS, 2017). DO tidak memberikan dampak secara langsung terhadap kesehatan, tetapi air minum

dengan sedikit atau tanpa oksigen sama sekali akan terasa tidak enak bagi sebagian orang (Omer, 2019).

Biochemical Oxygen Demand. Parameter BOD merupakan parameter kimia yang mewakili kebutuhan jumlah oksigen yang dikonsumsi oleh bakteri dan mikroorganisme saat mereka menguraikan material organik dalam kondisi aerobik pada suhu tertentu (USGS, 2020). Data BOD biasanya dipergunakan untuk mengetahui besaran limbah yang perlu diolah secara biologis, dan untuk melihat potensi perubahan maksimum pada BOD sungai yang akan menerima buangan air limbah/cemaran (EPA, 2001). Parameter BOD memiliki nilai baku mutu sebesar 3 mg/lt sebagai peruntukan kelas II. Berdasarkan data pemantauan, konsentrasi BOD pada anak sungai di Kota Cimahi belum ada yang memenuhi baku mutu. Pengaruh konsentrasi BOD dapat mengakibatkan konsentrasi DO turun dan kualitas ekosistem air tidak berjalan baik. Konsentrasi BOD dapat dilihat pada **Gambar 2. 37**.

Chemical Oxygen Demand. Parameter COD merupakan jumlah total oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi secara biologis, menjadi karbon dioksida dan air (Effendi, 2003). Dengan demikian, nilai COD juga merupakan ukuran bagi pencemaran air oleh zat organik. Parameter COD memiliki nilai baku mutu sebesar 25 mg/lt sebagai peruntukan kelas II. Sama halnya dengan parameter BOD, konsentrasi COD pada anak-anak sungai di Kota Cimahi masih belum menunjukkan pengendalian pencemaran yang optimal. Nilai konsentrasi COD paling tinggi berada di Sungai Cibeureum bagian Hilir yang mencapai nilai 2.337 mg/L. Hasil uji konsentrasi COD dapat dilihat pada **Gambar 2. 38.**

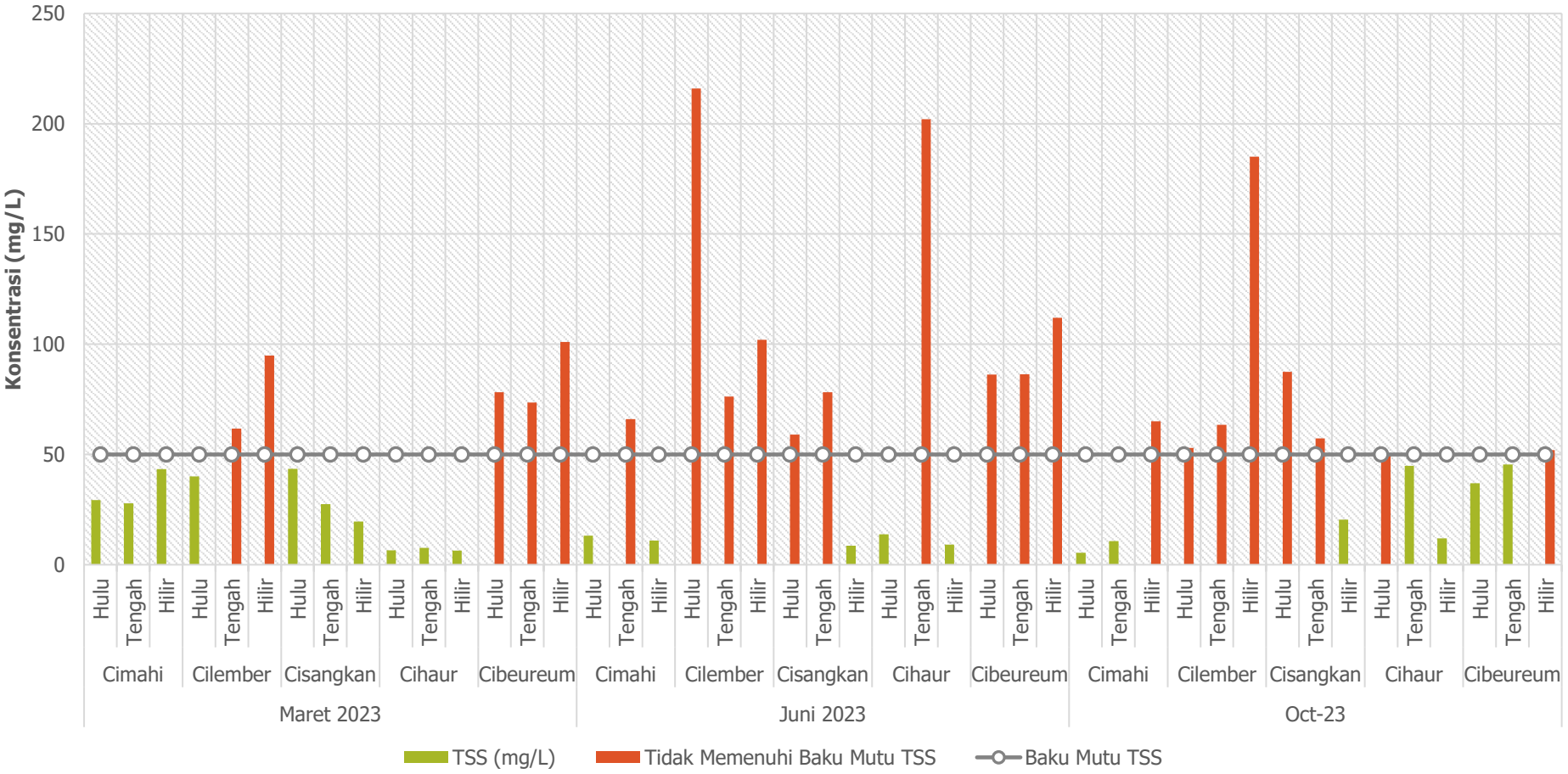
Total Phosphat. Unsur fosfor ditemukan dalam bentuk senyawa anorganik yang terlarut (ortofosfat dan poliofosfat). Keberadaan fosfat yang berlebihan pada badan air dapat menyebabkan kondisi penyuburan unsur hara perairan (eutrofikasi). Badan air yang tercemar fosfor Bersama dengan

nitrat akan mendorong fenomena *blooming-algae* dan tanaman lain (EPA, 2001). Jika terdapat terlalu banyak fosfat di dalam air, alga dan gulma akan tumbuh dengan cepat sehingga dapat menyumbat saluran air, dan menggunakan oksigen dalam jumlah besar, sehingga tidak terjadi fotosintesis dan tumbuhan akan mati, kemudian membusuk dan dikonsumsi oleh bakteri aerobik (Oram, 2020). Sumber alami fosfor di perairan adalah pelapukan batuan mineral, dan dekomposisi bahan organik. Baku mutu total fosfat dalam perairan yaitu 0,2 mg/lt. Konsentrasi total fosfat pada sungai di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 39.** Fosfat tidak bersifat toksik bagi manusia dan hewan kecuali badan air tercemar fosfat dalam konsentrasi yang sangat tinggi. Konsentrasi fosfat paling tinggi sebesar 3,79 mg/L yang berada di Sungai Cilember Hulu.

Nitrat. Nitrat adalah ion yang mengandung nitrogen dan oksigen dengan rumus kimia NO_3^-. Nitrat biasanya terdapat dalam air tanah dan air permukaan sebagai hasil dari proses alami dan aktivitas manusia, seperti penggunaan pupuk dalam pertanian dan limbah industri. Tingginya kadar nitrat dalam air minum dapat menjadi masalah kesehatan, terutama bagi bayi dan wanita hamil, karena dapat menyebabkan kondisi yang dikenal sebagai "*blue baby syndrome*" atau methemoglobinemia Hasil uji konsentrasi NO_3 dapat dilihat pada **Gambar 2. 40**. Mengacu pada PP No. 22 tahun 2021, baku mutu NO_3 untuk mutu air kelas II adalah 10 mg/L. Berdasarkan hasil pemantauan, konsentrasi nitrat paling tinggi berada di titik pantau Sungai Cibeureum Hulu pada Bulan Juni 2023 yaitu sebesar 7,36 mg/L. Potensi pencemar berasal dari buangan limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai, limbah rumah tangga yang tidak diolah dengan baik dapat mengandung nitrat yang tinggi. Selain itu, Penggunaan pupuk yang mengandung nitrat di lahan pertanian dapat menyebabkan aliran nitrat ke sungai melalui limpasan permukaan (*runoff*) atau perkolasi ke air tanah.

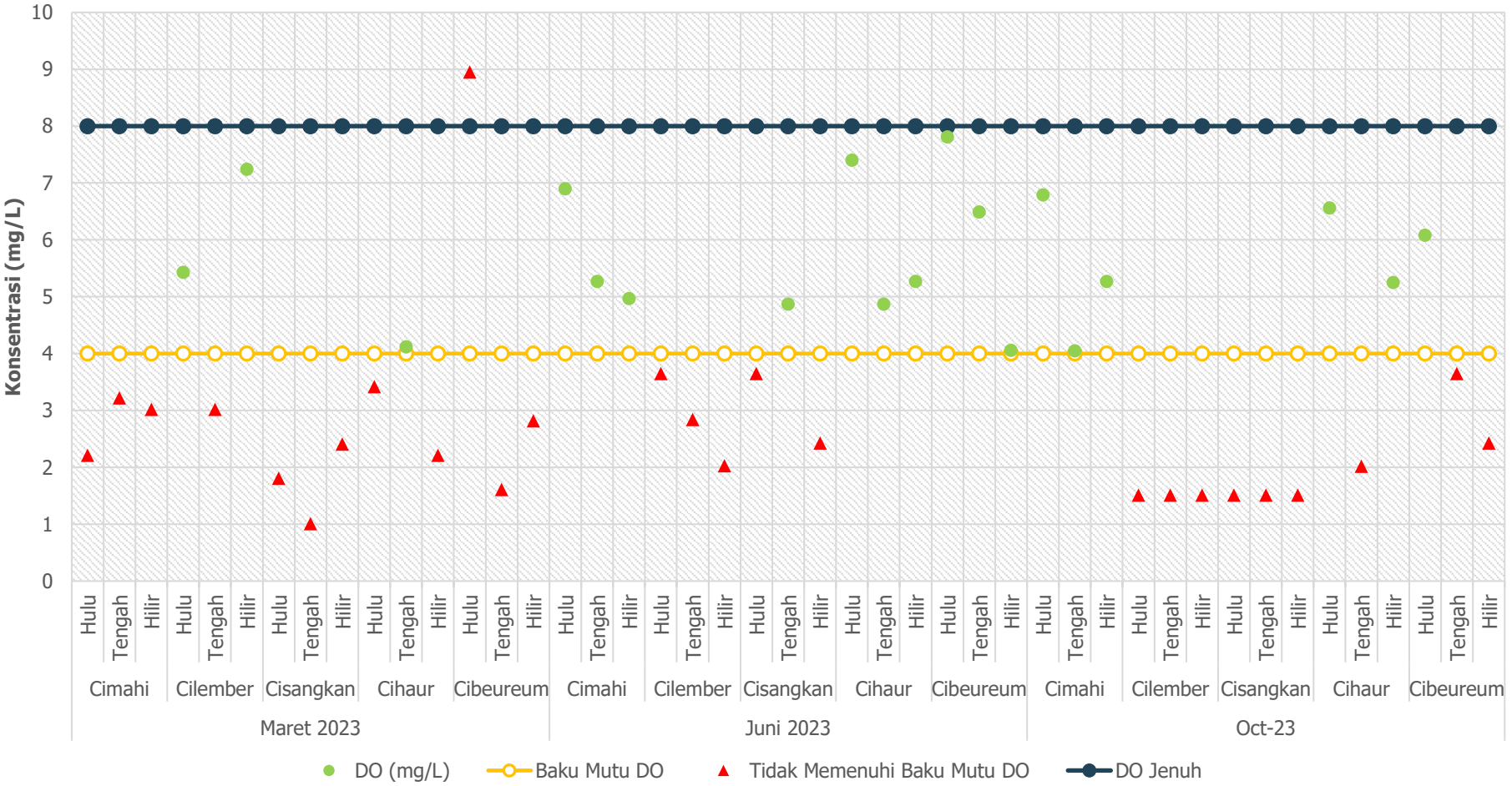
Fecal Coliform. Bakteri *coliform* total meliputi semua jenis bakteri yang dapat memfermentasi laktosa dan menghasilkan gas dalam waktu 48

jam pada suhu 35^{o}C. Oleh karena itu, bakteri *coliform* total terdiri dari *Eschereichia*, *Citrobacter, Klebsiella,* dan *Enterobacter*. Adapun kandungan bakteri *coliform* total dalam tinja manusia sekitar 107 sel/g tinja (Yates, 1992 dalam Effendi, 2003). Bakteri *coliform* adalah organisme agresif dan bertahan hidup di air lebih lama dari kebanyakan patogen. Keberadaan bakteri ini dalam sumber air merupakan bukti bahwa kontaminasi tinja telah terjadi (EPA, 2001). Hasil uji konsentrasi *fecal coliform* dapat dilihat pada **Gambar 2. 41**. Mengacu pada PP No. 22 tahun 2021, baku mutu *fecal coliform* untuk mutu air kelas II adalah 1.000/100ml. Potensi pencemar berasal dari buangan limbah domestik dari warga yang tinggal di sekitar aliran sungai, sehingga konsentrasi *fecal coliform* terlampau tinggi. Limbah domestik yang dibuang bukan hanya merusak ekosistem sungai secara kimia saja, banyaknya sampah yang menghambat laju air, juga ikut mendukung tercemarnya sungai. Sehingga diperlukan upaya-upaya pembersihan terhadap sungai, tindakan pencegahan, serta tidak membuang limbah baik sampah rumah tangga maupun limbah dari kegiatan MCK (mandi cuci kakus) ke sungai.



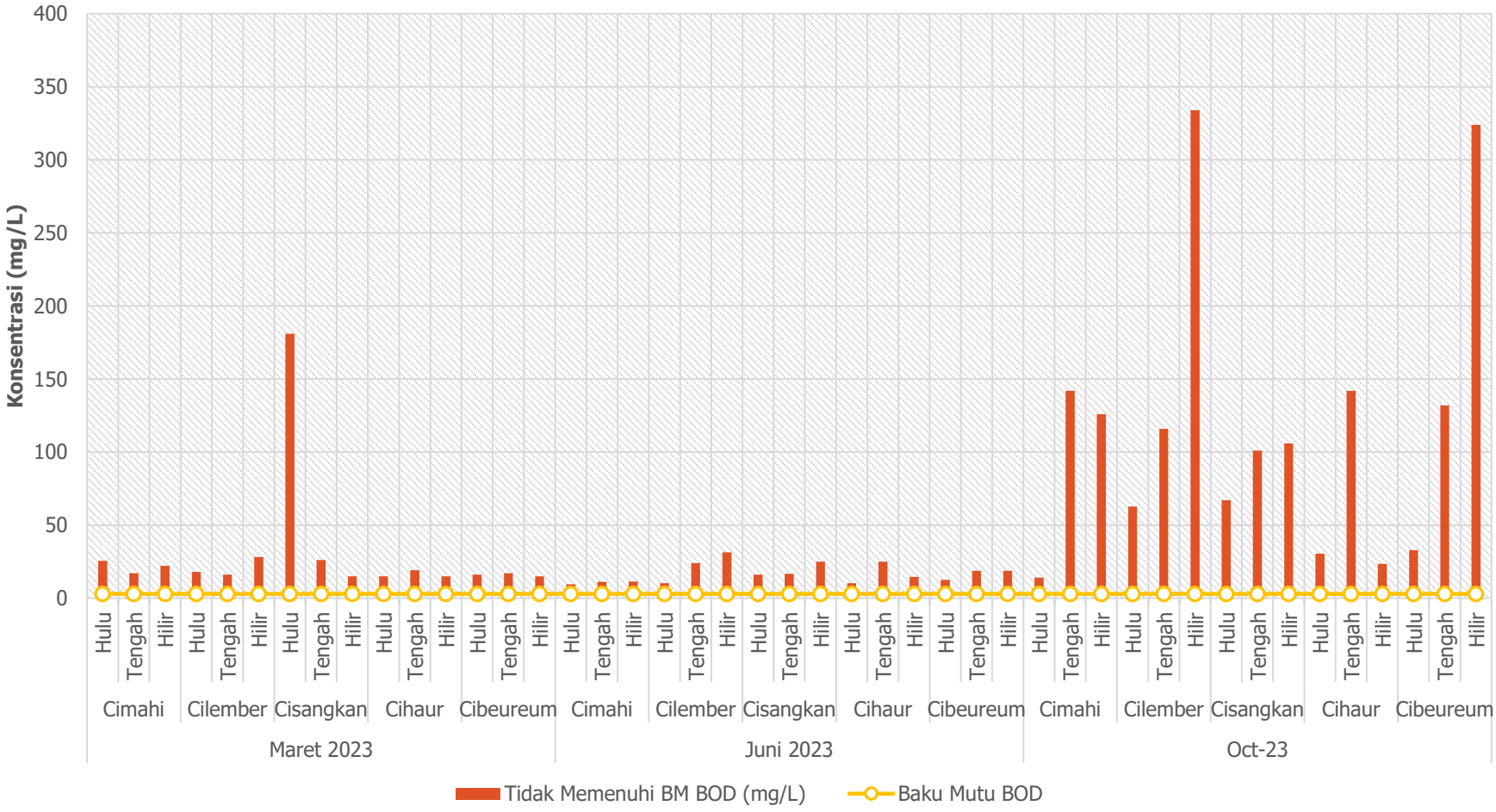
Gambar 2. 35 Konsentrasi TSS Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: LHU Kualitas Air Sungai, 2023)



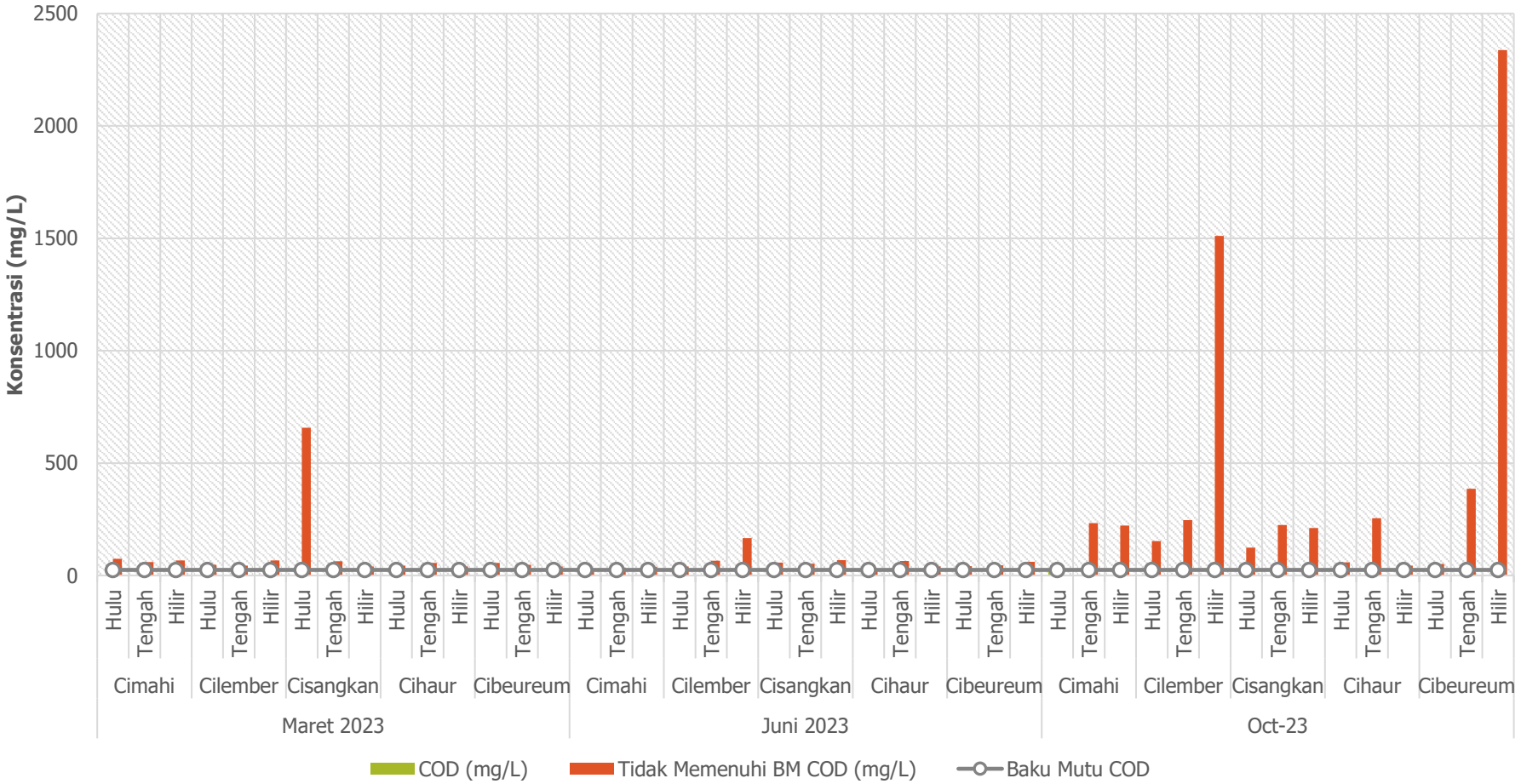
Gambar 2. 36 Konsentrasi DO Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: LHU Kualitas Air Sungai, 2023)



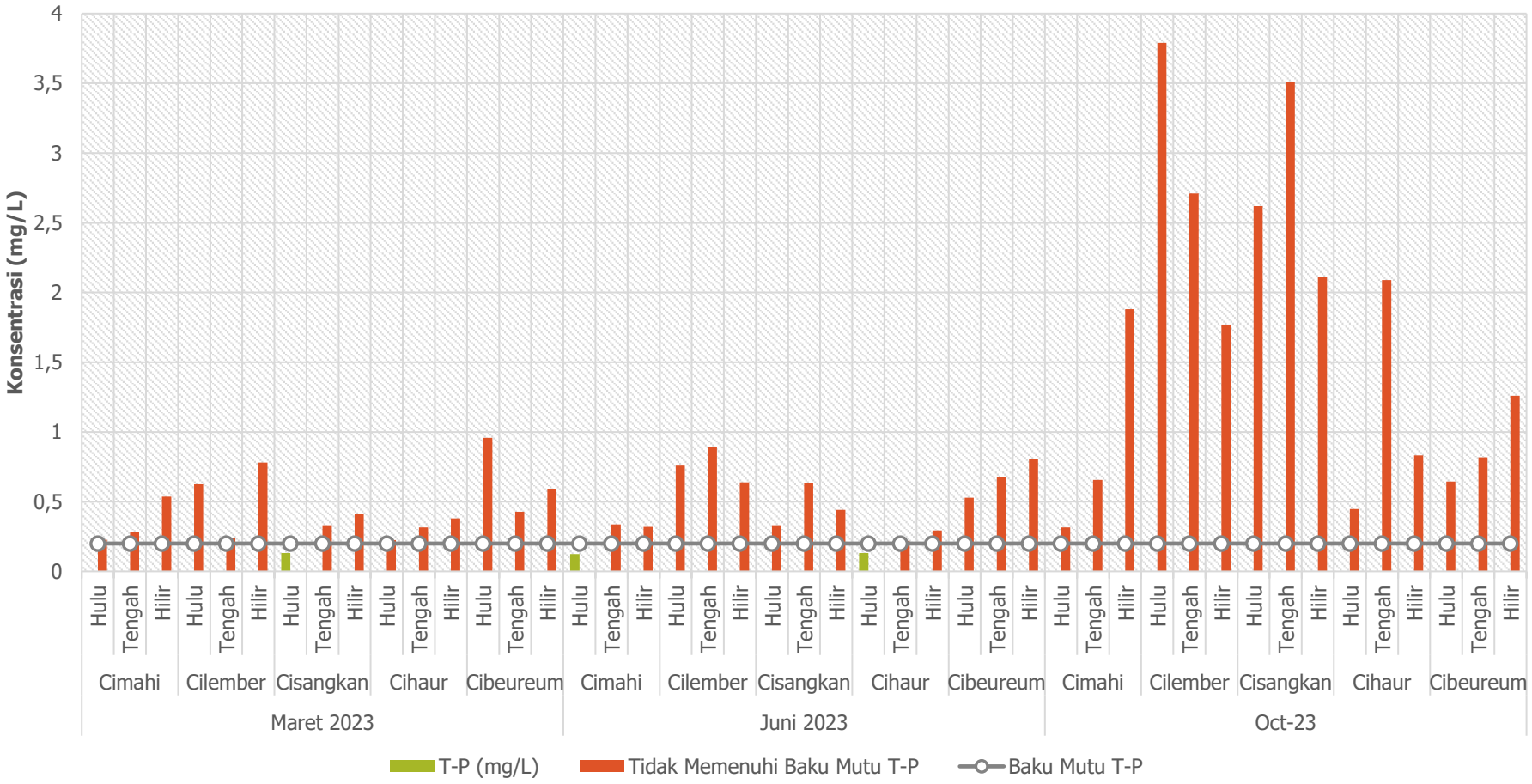
Gambar 2. 37 Konsentrasi BOD Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: LHU Kualitas Air Sungai, 2023)



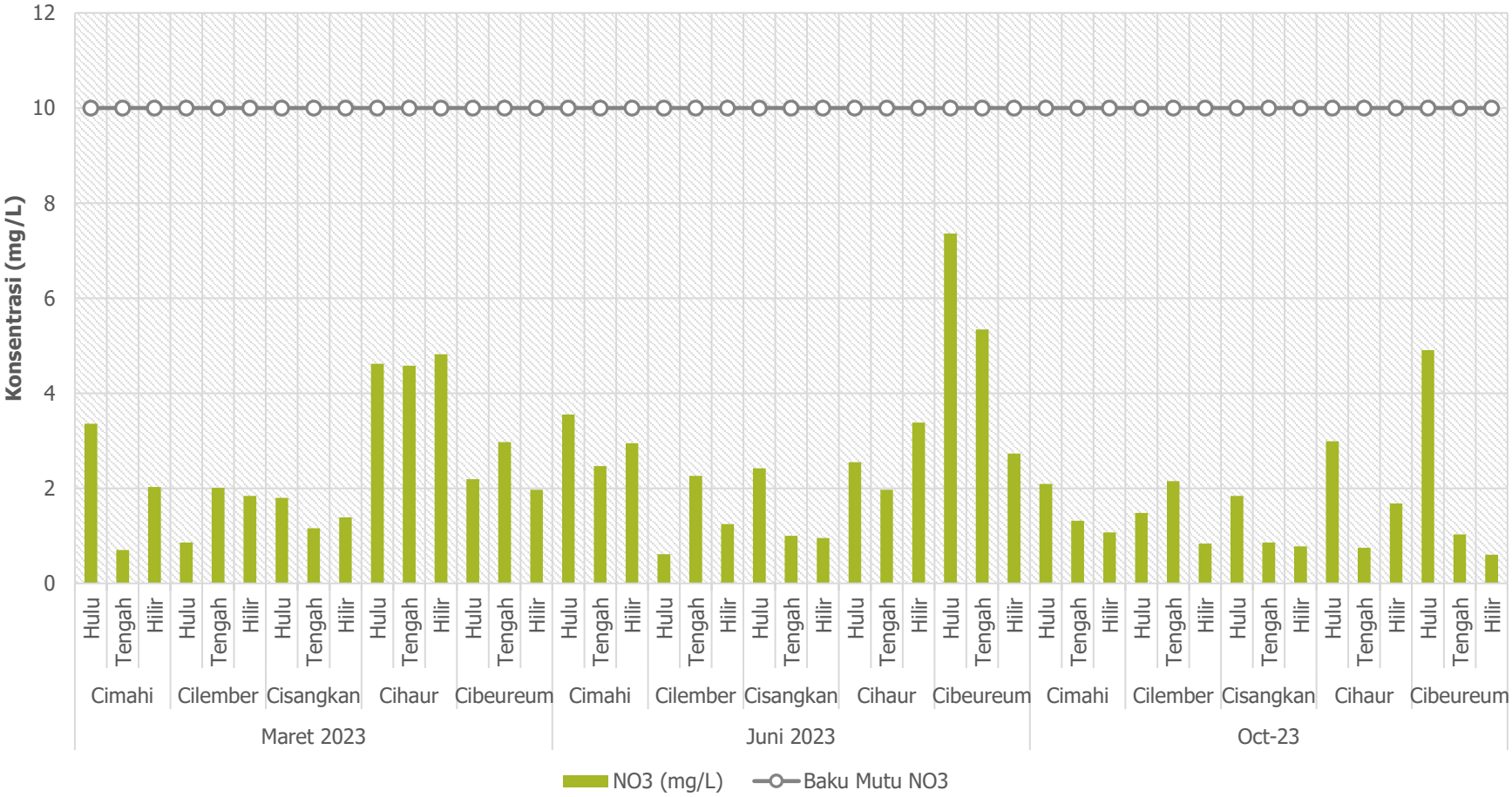
Gambar 2. 38 Konsentrasi COD Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: LHU Kualitas Air Sungai, 2023)



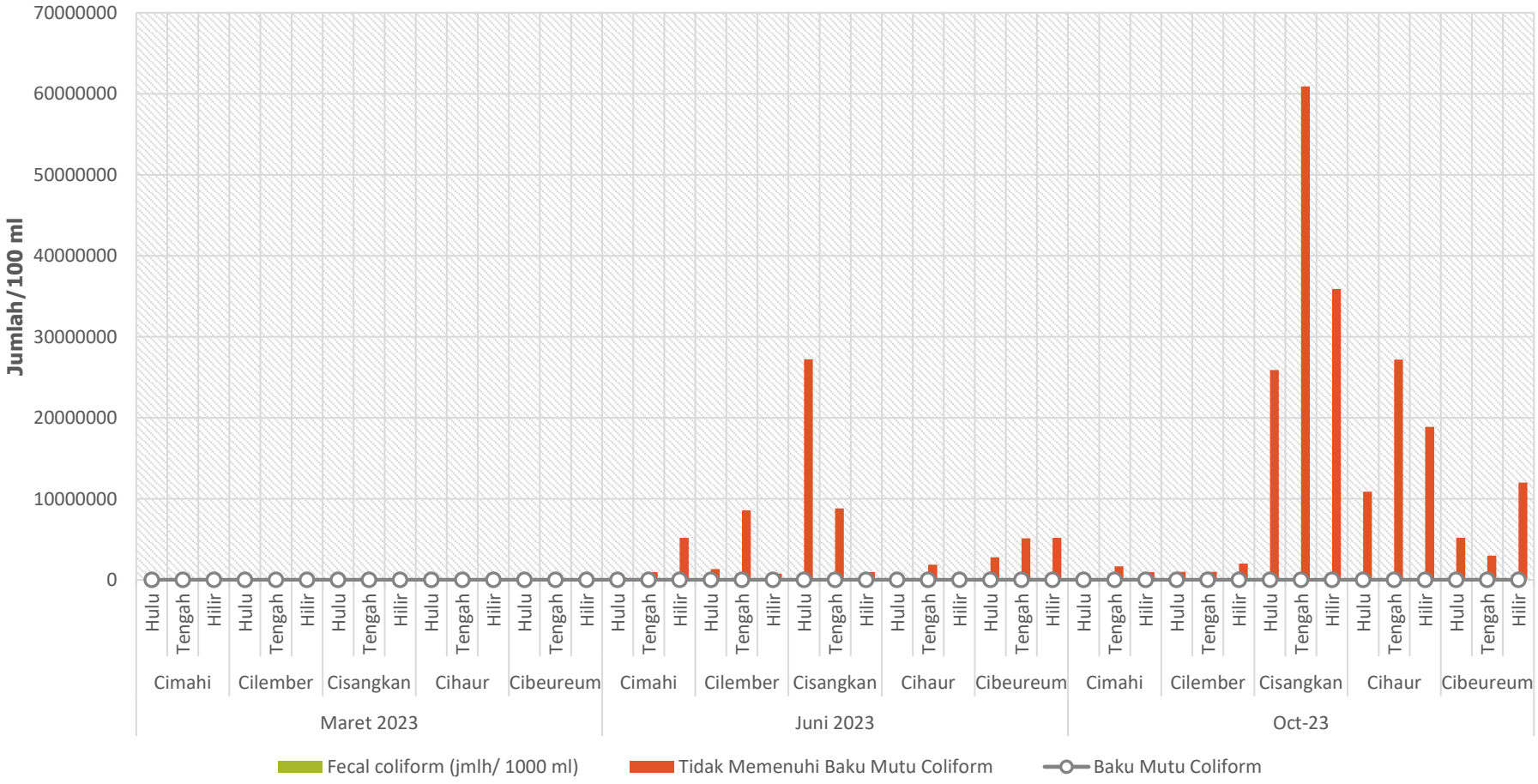
Gambar 2. 39 Konsentrasi Total Phosphat Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: LHU Kualitas Air Sungai, 2023)



Gambar 2. 40 Konsentrasi Nitrat Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: LHU Kualitas Air Sungai, 2023)



Gambar 2. 41 Konsentrasi Fecal Coliform Air Sungai Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: LHU Kualitas Air Sungai, 2023)

2.2.3.3 Status Mutu Air

Status mutu air dihitung lebih detail dan menyeluruh terhadap parameter-parameter kualitas air yang diuji. Perhitungan dan penentuan kelas cemar air sungai dilakukan dengan menggunakan perhitungan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Pemantauan kualitas air sungai di Kota Cimahi dilakukan pada Bulan Maret, Bulan Juni, dan Bulan Oktober. Terdapat 5 sungai yang diuji kualitas air sungainya, yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cilember, Sungai Cisangkan, Sungai Cihaur, dan Sungai Cibeureum. Sehingga total titik pemantauan sebanyak 45 titik. Adapun parameter yang digunakan dalam perhitungan yaitu pH, TSS, DO, BOD, COD, NO_3, Total Fosfat, dan *E. coli*. Oleh karena itu, dilakukan penilaian status mutu air untuk setiap sungai di 3 titik pantau (hulu, tengah, hilir) dengan 3 periode pemantauan. Hasil analisis dapat dilihat pada **Tabel 2. 6.** Hasil pemantauan kelima sungai di Kota Cimahi menunjukkan jumlah titik pantau Cemar Berat sebanyak 26 titik, Cemar Sedang sebanyak 15 titik, dan Cemar Ringan sebanyak 4 titik.

Tabel 2. 6 Status Mutu Air Sungai Kota Cimahi

Sungai	Titik Pantau	Pemantauan Bulan Maret		Pemantauan Bulan Juni		Pemantauan Bulan Oktober	
		Indeks	Status	Indeks	Status	Indeks	Status
Cimahi	hulu	4,31	Cemar Ringan	9,80	Cemar Sedang	7,13	Cemar Sedang
	tengah	5,83	Cemar Sedang	11,66	Cemar Berat	12,73	Cemar Berat
	hilir	5,05	Cemar Sedang	14,31	Cemar Berat	12,00	Cemar Berat
Cilember	hulu	3,63	Cemar Ringan	12,45	Cemar Berat	12,04	Cemar Berat
	tengah	7,92	Cemar Sedang	15,39	Cemar Berat	12,23	Cemar Berat
	hilir	7,78	Cemar Sedang	11,51	Cemar Berat	13,30	Cemar Berat
Cisangkan	hulu	8,32	Cemar Sedang	17,10	Cemar Berat	17,06	Cemar Berat
	tengah	7,94	Cemar Sedang	15,39	Cemar Berat	18,60	Cemar Berat
	hilir	5,49	Cemar Sedang	11,73	Cemar Berat	17,52	Cemar Berat

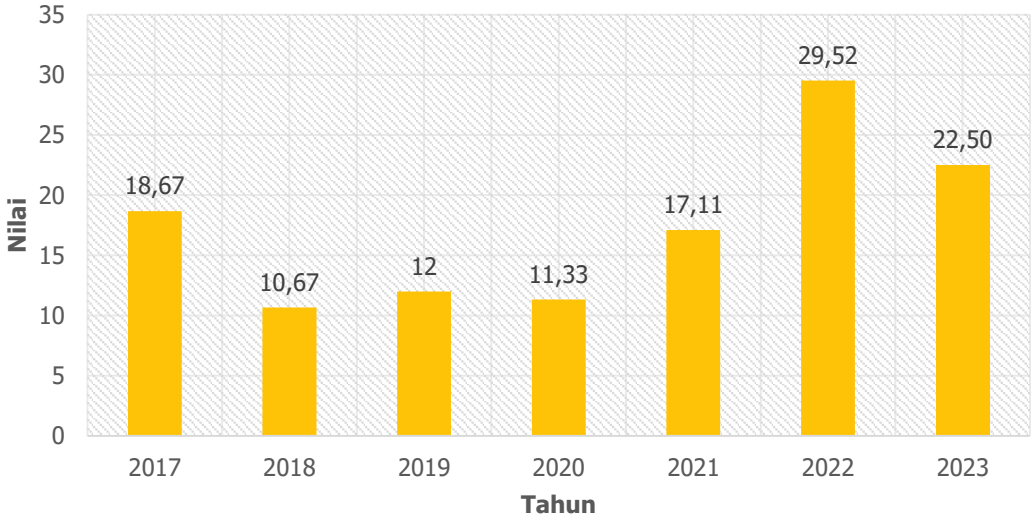
Sungai	Titik Pantau	Pemantauan Bulan Maret		Pemantauan Bulan Juni		Pemantauan Bulan Oktober	
		Indeks	Status	Indeks	Status	Indeks	Status
Cihaur	hulu	3,65	Cemar Ringan	4,86	Cemar Ringan	15,44	Cemar Berat
	tengah	5,27	Cemar Sedang	12,90	Cemar Berat	17,15	Cemar Berat
	hilir	5,52	Cemar Sedang	8,24	Cemar Sedang	16,34	Cemar Berat
Cibeureum	hulu	6,12	Cemar Sedang	13,49	Cemar Berat	14,38	Cemar Berat
	tengah	7,70	Cemar Sedang	14,38	Cemar Berat	13,69	Cemar Berat
	hilir	7,66	Cemar Sedang	14,48	Cemar Berat	15,96	Cemar Berat

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.2.3.4 Indeks Kualitas Air (IKA)

Kualitas air tidak hanya ditunjukkan dengan besaran konsentrasi dan status mutu saja, melainkan dapat pula dengan menggunakan Indeks Kualitas Air (IKA). Ketiga hasil uji tersebut saling berkaitan yang mana kualitas air yang didapat dari hasil pengukuran digunakan untuk menghitung dan menentukan status mutu air, kemudian data tersebut digunakan untuk menentukan indeks kualitas airnya (IKA). Indeks kualitas air Kota Cimahi tahun 2023 dihitung berdasarkan persentase jumlah titik pantau tiap status mutu terhadap total data terpantau dan digabungkan dengan hasil pemantauan dari KLHK. Pada analisis ini, perhitungan indeks kualitas air disesuaikan dengan indeks kualitas air pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut hasil perhitungan indeks kualitas air berdasarkan status mutunya.

Berdasarkan hasil perhitungan, pada tahun 2023 indeks kualitas air sungai di Kota Cimahi bernilai 22,50. Tren nilai Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 42**.

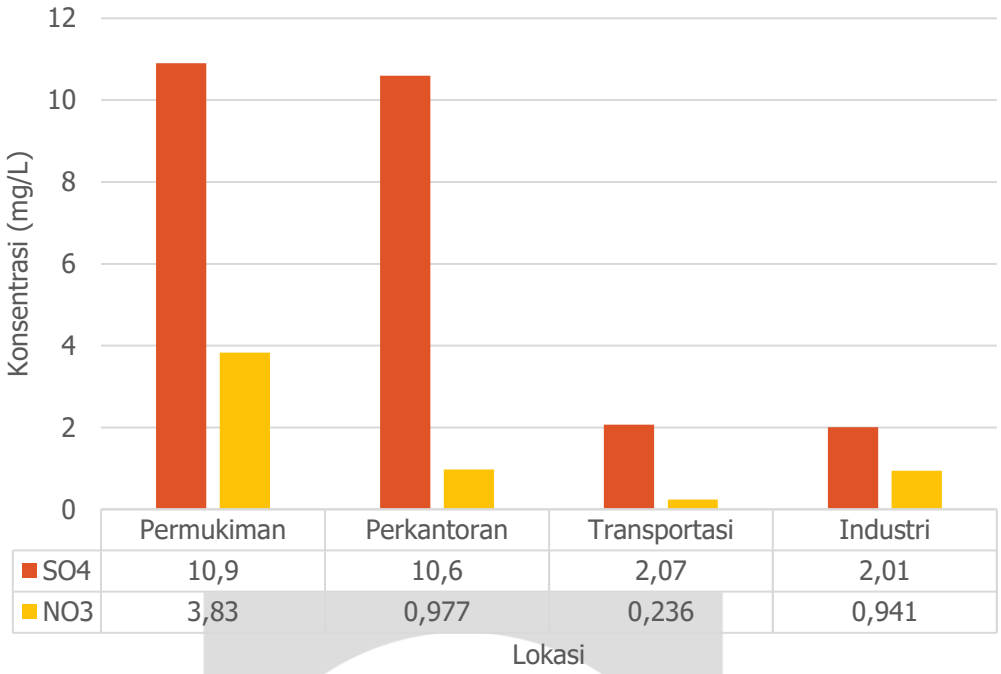


Gambar 2. 42 Tren Indeks Kualitas Air di Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

2.2.3.5 Kualitas Air Hujan

Pemerintah Kota Cimahi juga melakukan pemantauan pada kualitas air hujan di 4 (empat) titik pemantauan, yaitu industri, permukiman, perkantoran, dan transportasi. Berdasarkan hasil pemantauan parameter pH, nilai pH kualitas air hujan di Kota Cimahi berada di sekitar 6-7. Rendahnya nilai pH mengindikasikan terjadinya hujan asam, hal ini diikuti dengan kualitas SO_4 dan NO_3 yang tinggi di titik pantau industri. Hasil pemantauan kualitas air hujan di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 43**. Air hujan yang turun dalam kondisi asam (pH rendah) dapat disebabkan air hujan yang baru turun banyak melarutkan gas CO_2 atau gas SO_4 yang ada di atmosfer (Said & Widayat, 2014). Pada kondisi tertentu, oksida sulfur dan oksida nitrogen dari hasil pembakaran bahan bakar fosil akan berubah secara kimiawi menjadi asam sulfat dan asam nitrat.



Gambar 2. 43 Hasil Pemantauan Kualitas Air Hujan di Kota Cimahi

(Sumber: LHU Kualitas Air Hujan, 2024)

2.2.3.6 Kualitas Air Sumur

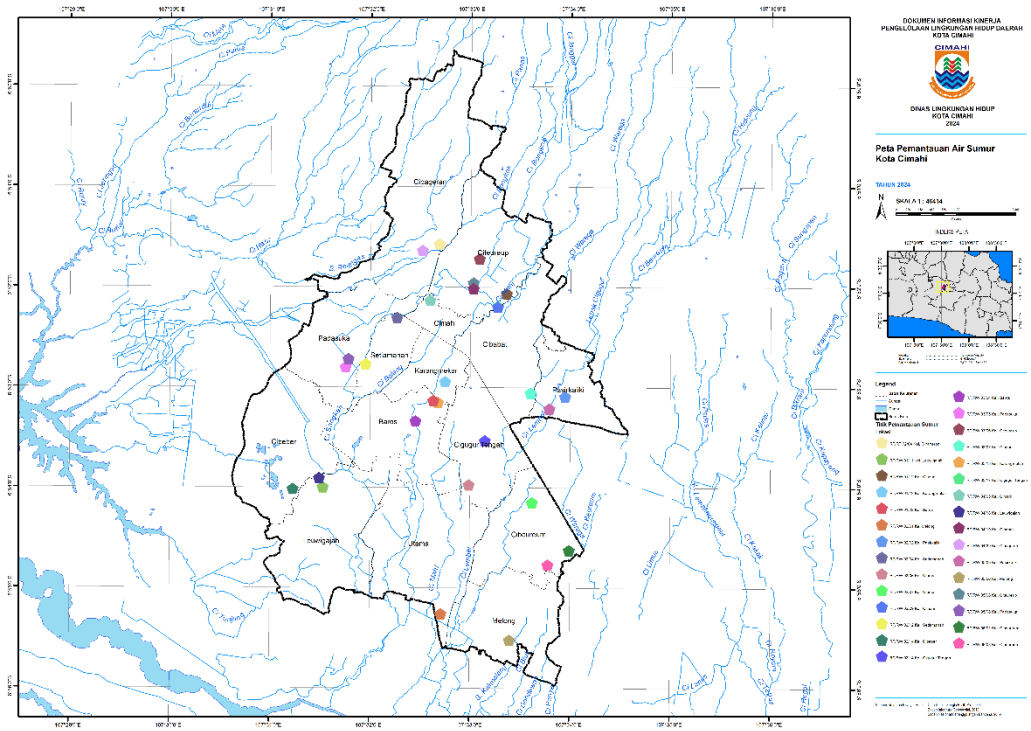
Air sumur sebagai salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Cimahi, perlu ada pengujian kualitas air sumur untuk mengetahui kelayakan air sumur. Pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menguji 30 titik air sumur dalam satu periode yang sama yaitu di Bulan Agustus dan Juli. Pengujian kualitas air sumur dalam analisis ini dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2017. Baku mutu yang digunakan adalah standar pemakaian air tanah untuk higiene sanitasi. Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu Air untuk Keperluan Higiene Sanitasi dapat digunakan sebagai air baku air minum. Kualitas air sumur pada 30 titik pantau di Kota Cimahi

dapat dilihat pada **Gambar 2. 45** sampai **Gambar 2. 48**. Kualitas air sumur diuji terhadap 17 parameter, beberapa diantaranya yaitu:

1. Hasil pengujian parameter NO_3 sebagai N menunjukkan terdapat 20 titik sampel tidak memenuhi baku mutu dan hanya 2 titik sampel yang memenuhi baku mutu. Parameter Nitrat berdasarkan Permenkes Nomor 32 Tahun 2017 adalah 10 mg/L. Konsentrasi Nitrat yang paling tinggi berada di titik pantau air sumur RT04/RW19 Kelurahan Cibabat, dengan nilai konsentrasinya mencapai 120 mg/L. Konsentrasi nitrat secara berlebihan (lebih dari 10 mg/L) dalam air minum dapat menyebabkan ancaman kesehatan dari tingkat sedang hingga berat terhadap bayi (Tchobanoglous, 1985). Hasil pemantauan kualitas air sumur parameter Nitrat dapat dilihat pada **Gambar 2. 45.**
2. Hasil pengujian parameter Besi pada kualitas air sumur di Kota Cimahi menunjukkan terdapat 28 titik yang melebihi baku mutu (1 mg/L) dengan nilai konsentrasi paling tinggi mencapai 6,18 mg/L di Kelurahan Pasirkaliki RT05/RW03. Hasil pemantauan kualitas air sumur pada parameter Besi dapat dilihat pada **Gambar 2. 46.** Keberadaan besi dalam air sumur yang melebihi baku mutu dapat memiliki berbagai dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan kualitas hidup sehari-hari. Konsumsi air dengan kadar besi tinggi seringkali menyebabkan gangguan pencernaan seperti rasa logam yang tidak enak, mual, muntah, sakit perut, dan diare, terutama pada anak-anak dan individu dengan sensitivitas tinggi terhadap besi. Dampak tambahan dari besi dalam air sumur meliputi perubahan rasa dan bau air yang menjadi tidak enak, serta noda pada pakaian, peralatan rumah tangga, dan instalasi pipa yang dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan seperti mesin cuci dan pemanas air.
3. Parameter Mangan pada kualitas air sumur yang diuji, terdapat 5 titik tidak memenuhi baku mutu baku mutu (0,5 mg/L). Nilai konsentrasi Mangan paling tingi terdapat di RT05/RW08 Kelurahan Citeureup yang

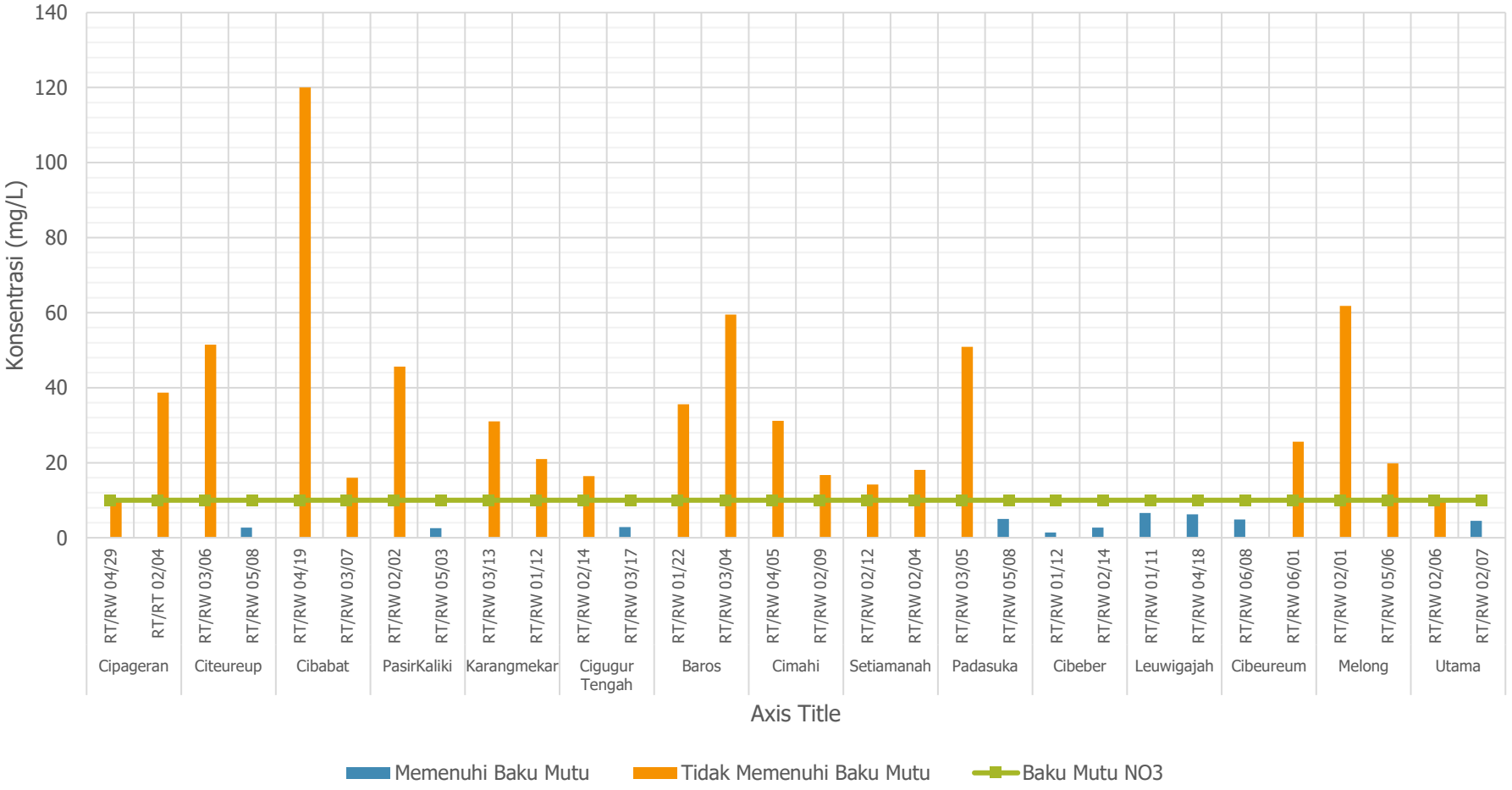
mencapai 3,59 mg/L. Hasil pemantauan kualitas air sumur parameter Mangan dapat dilihat pada **Gambar 2. 47.**

4. Parameter *Fecal Coliform* pada kualitas air sumur juga diuji. Dari 30 titik sampel yang diuji, semua titik memiliki nilai *fecal coliform* yang melebihi baku mutu. Nilai konsentrasi *fecal coliform* paling tingi terdapat di RT05/RW06 Kelurahan Melong yang mencapai 63.800/100ml. Hasil pemantauan kualitas air sumur parameter *fecal coliform* dapat dilihat pada **Gambar 2. 48.**



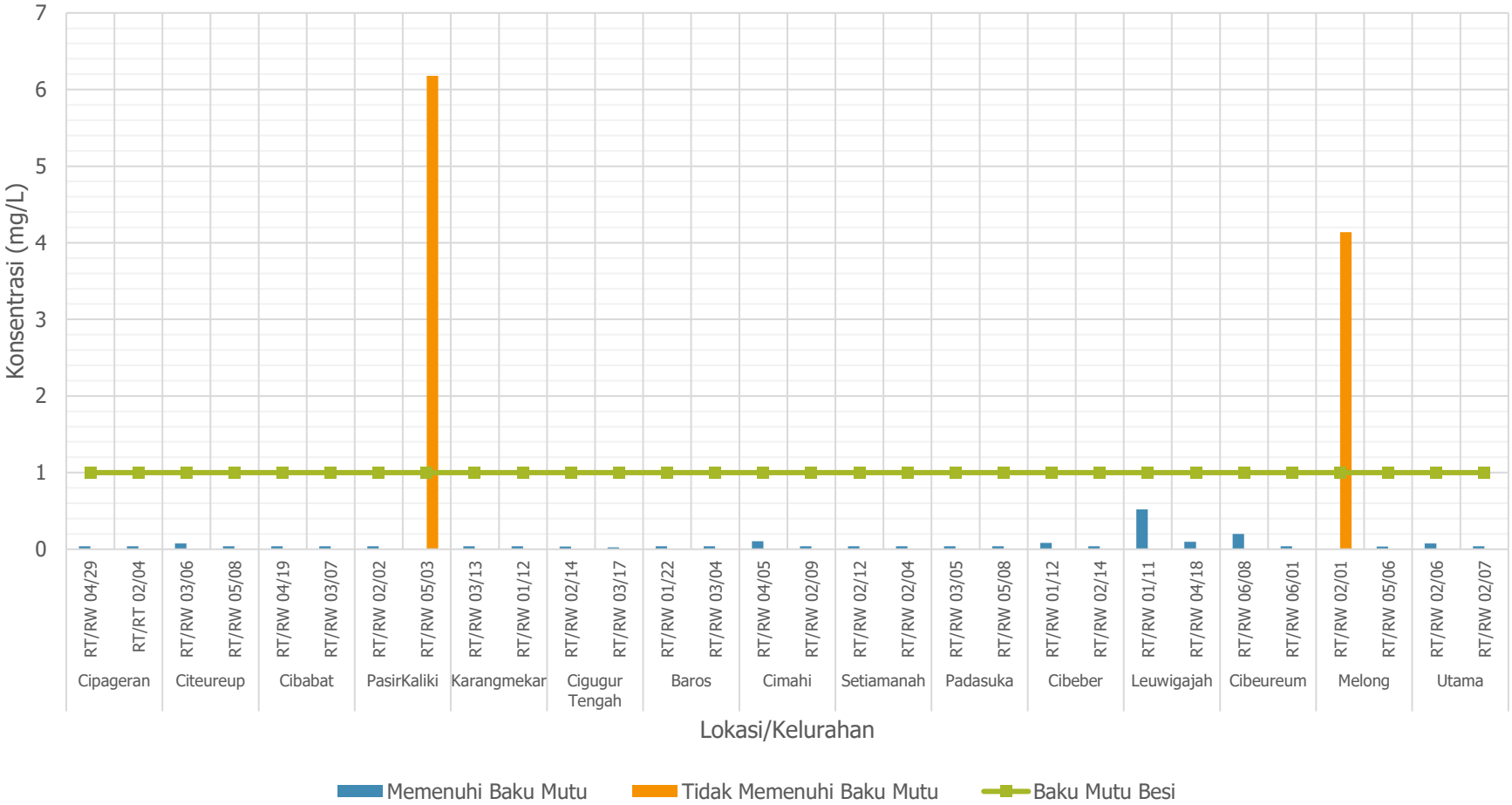
Gambar 2. 44 Peta Pemantauan Kualitas Air Sumur Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: Hasil Analisis, 2024))



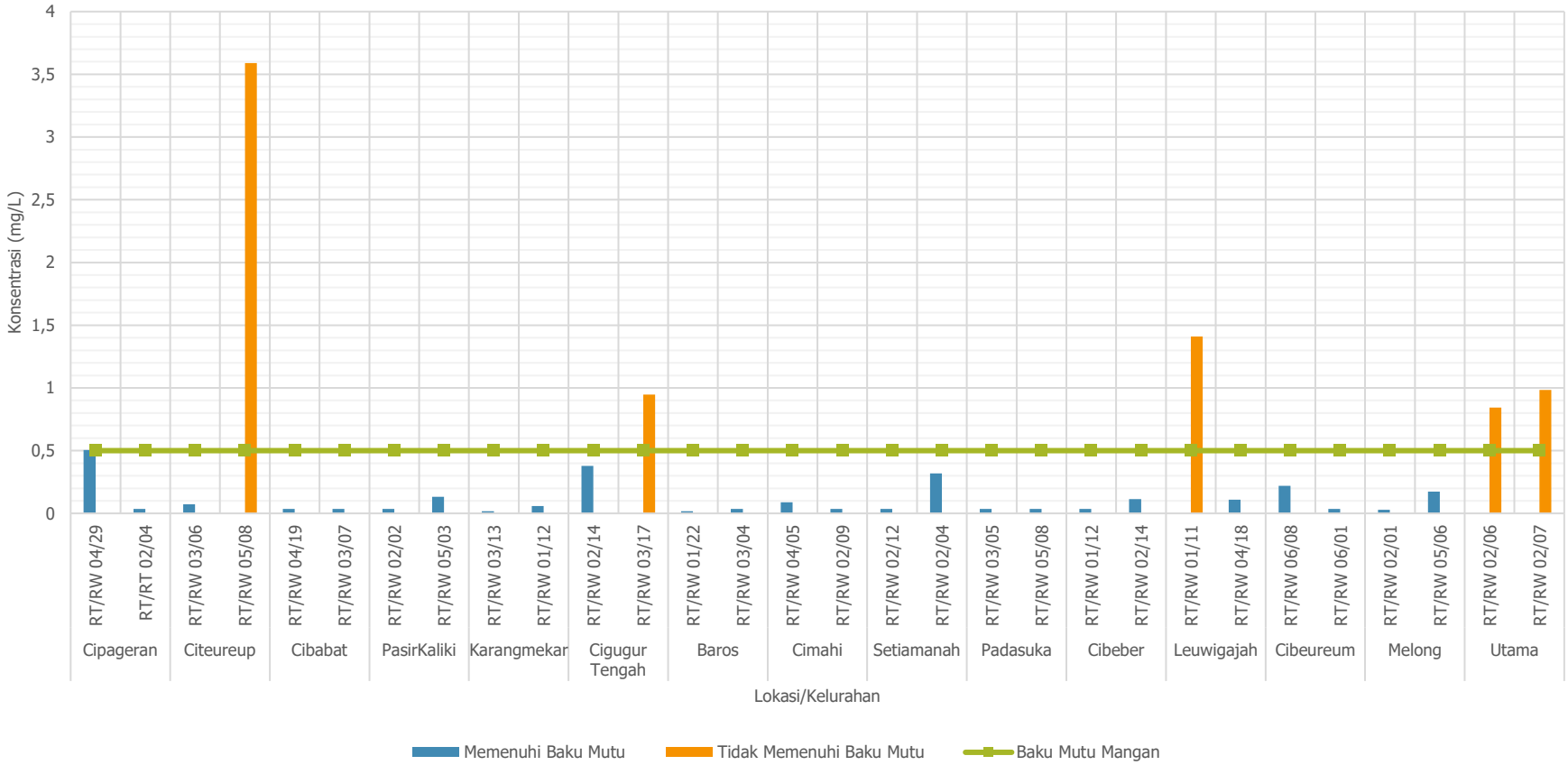
Gambar 2. 45 Hasil Uji Parameter NO3 sebagai N pada Kualitas Air Sumur Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Sumur 2023)



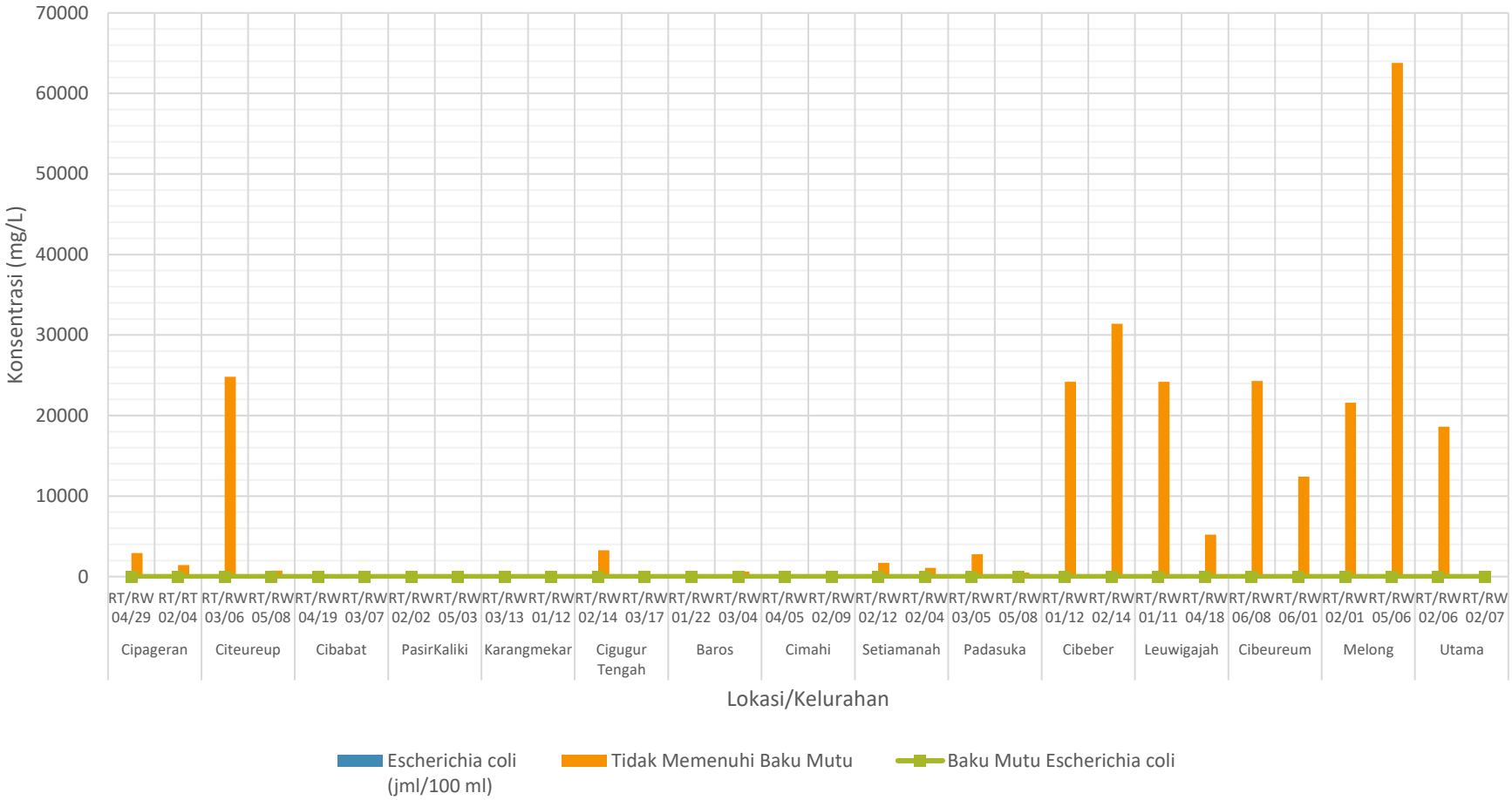
Gambar 2. 46 Hasil Uji Parameter Besi pada Kualitas Air Sumur Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Sumur 2023)



Gambar 2. 47 Hasil Uji Parameter Mangan pada Kualitas Air Sumur Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Sumur 2023)



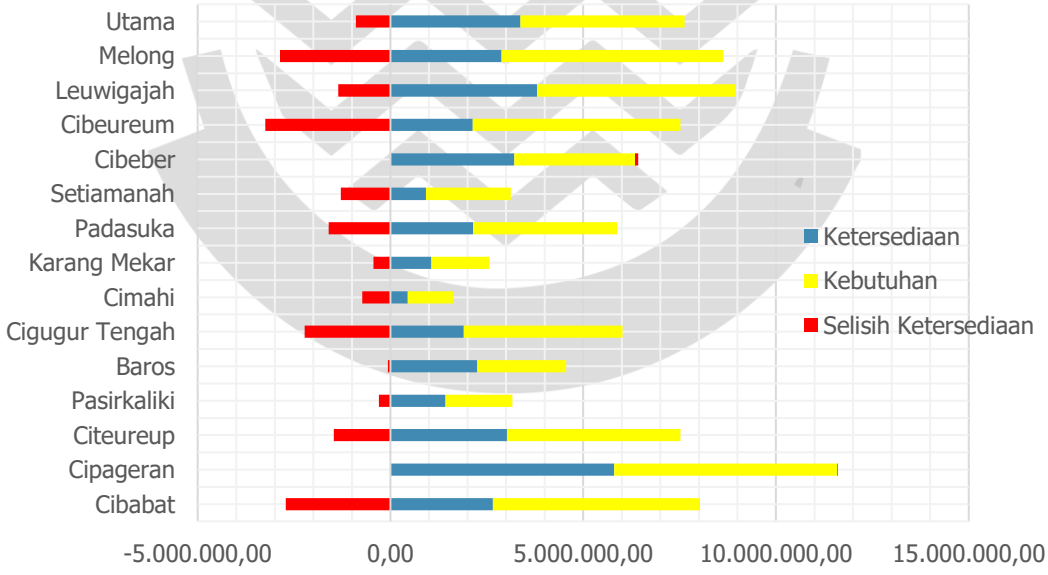
Gambar 2. 48 Hasil Uji Parameter E. Coli pada Kualitas Air Sumur Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Sumur 2023)

2.2.4 Impact

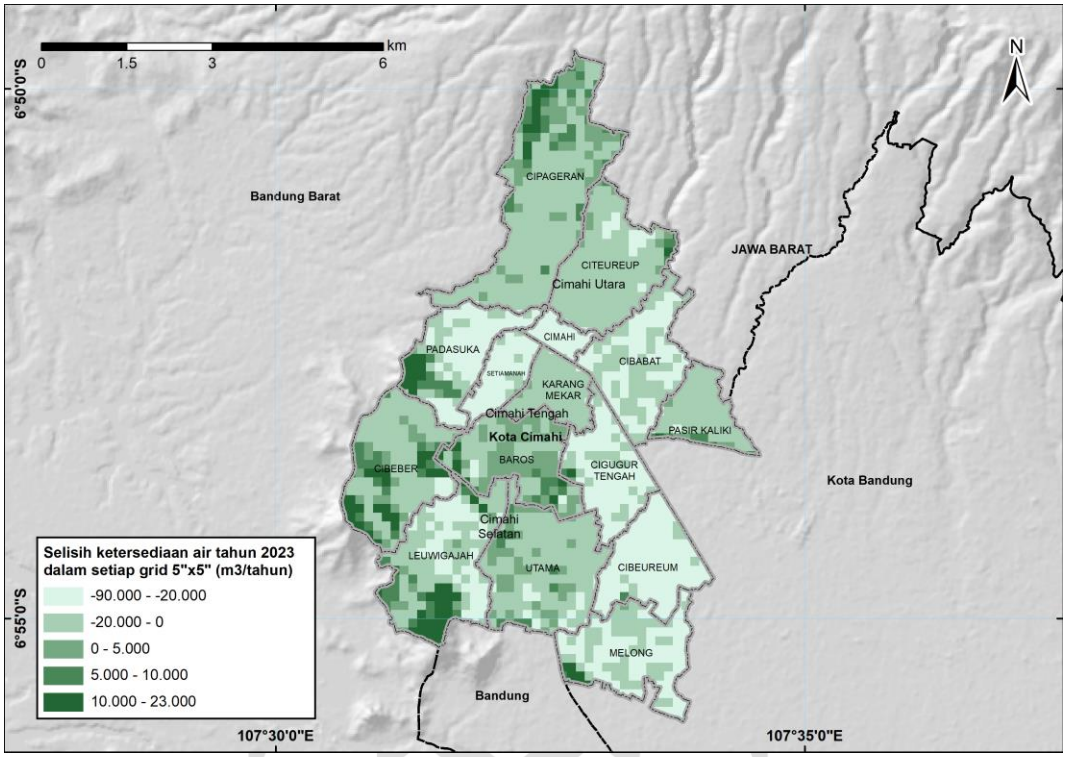
2.2.4.1 Krisis Air

Untuk mengidentifikasi daerah dengan kelebihan atau kekurangan air, dilakukan perhitungan dengan mengurangi ketersediaan air dari kebutuhan air di Kota Cimahi. Perhitungan ini menggunakan konsep *in situ*, yang hanya memperhitungkan potensi sumber daya air dan kebutuhan air tanpa mempertimbangkan aliran air antar wilayah. Analisis ini membantu mengidentifikasi daerah yang mengalami defisit air, meskipun tidak berarti daerah tersebut mengalami kekeringan. Defisit air menunjukkan bahwa daerah tersebut bergantung pada wilayah lain di sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan airnya. Sebagian besar wilayah di Kota Cimahi menunjukkan defisit air, terutama di Kelurahan Cimahi, Cigugur Tengah, Cibeureum, Setiamanah, dan Melong. Namun, beberapa kelurahan seperti Kelurahan Baros, Cibeber, Cipageran, dan Utama memiliki surplus air.



Gambar 2. 49 Selisih Ketersediaan Air di Kota Cimahi Sejak Tahun 2023

(Sumber: KLHS RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045)



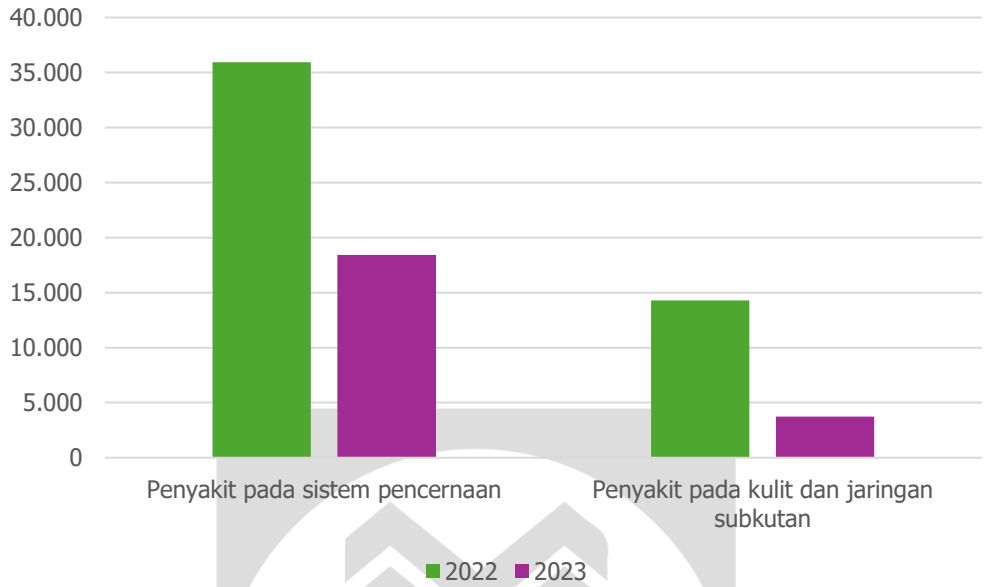
Gambar 2. 50 Selisih Ketersediaan Air di Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: KLHS RPJPD Kota Cimahi Tahun 2025-2045)

2.2.4.2 Penyakit yang Diderita Masyarakat

Kualitas air dapat mempengaruhi kondisi lingkungan perairan juga berdampak terhadap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dari penurunan kualitas air adalah terkait kesehatan masyarakat. Di Kota Cimahi pada tahun 2023, jumlah kasus penyakit dan jenis penyakit di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 51**. Berdasarkan data tersebut, kualitas air memberikan dampak terhadap manusia, dampak dari penurunan kualitas air salah satunya menyebabkan penyakit pencernaan sebesar 18.435 penderita dan penyakit kulit sebanyak 9.000 penderita. Jumlah penderita penyakit bawaan air tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, dimana jumlah penderita penyakit sistem pencernaan sebanyak 35.927 orang dan penyakit kulit sebanyak 14.293 orang. Secara tidak langsung, hal ini dapat dianggap bahwa kualitas air di

Kota Cimahi mengalami perbaikan jika dilihat dari indikator kesehatan masyarakat.



Gambar 2. 51 Penurunan Penderita Penyakit Bawaan Air

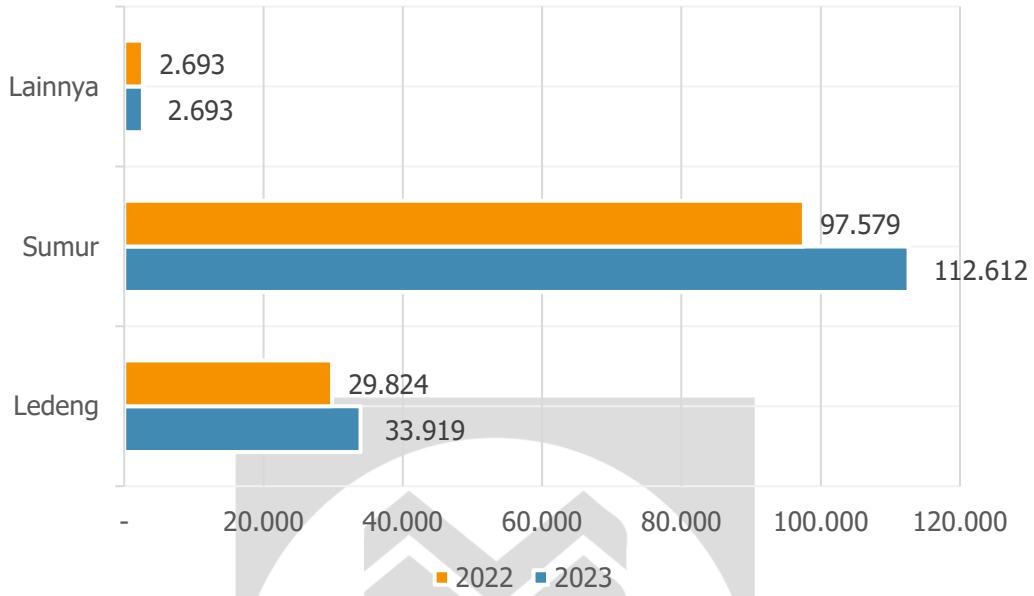
(Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023, 2022, diolah)

2.2.4.3 Sumber Air Minum/Air Bersih

Peningkatan jumlah penduduk secara langsung akan berpengaruh pada peningkatan kebutuhan akan air minum. Ketersediaan akses air minum dan sanitasi yang aman, terjangkau, dan berkelanjutan merupakan keinginan dari sebagian besar masyarakat. Dengan adanya *pressure* dan kondisi yang telah disebutkan sebelumnya, akan berdampak pada ketersediaan air bersih yang layak minum bagi masyarakat Kota Cimahi. Pelayanan air bersih/air minum di Kota Cimahi berasal dari PDAM Tirta Raharja yang dimiliki Kabupaten Bandung.

Dalam memenuhi kebutuhan akan air minum, penduduk Kota Cimahi mendapatkannya dari beberapa sumber. Sebagaimana yang ditampilkan pada **Gambar 2. 52.** Berdasarkan data Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Kota Cimahi Tahun 2023, jumlah rumah tangga dan sumber air minum di

Kota Cimahi didominasi bersumber dari air sumur sebanyak 112.612 SR meningkat dari tahun sebelumnya.



Gambar 2. 52 Tren Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum Kota Cimahi

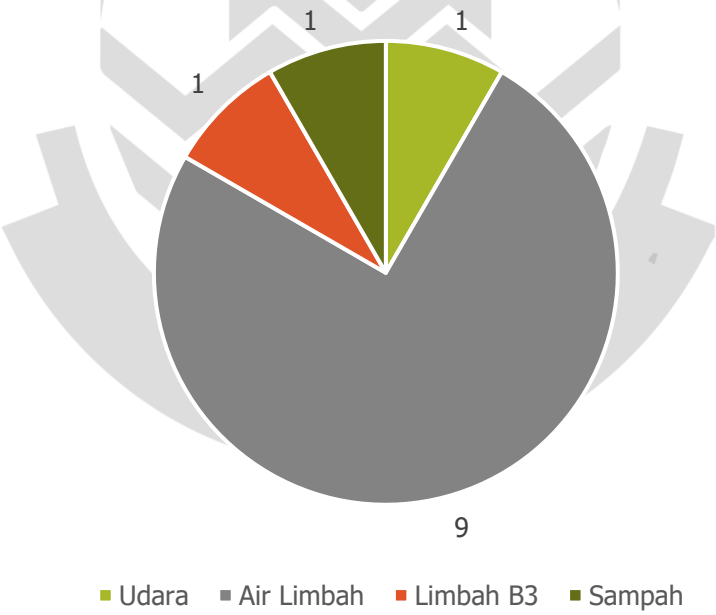
(Sumber: Pendataan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Kota Cimahi, 2022, DPKP Kota Cimahi, 2023, diolah)

2.2.4.4 Penurunan Muka Air Tanah

Kedudukan geografis Kota Cimahi yang sangat strategis dan memiliki potensi sebagai sentra berbagai kegiatan pelayanan jasa, terutama industri, pendidikan, pariwisata dan perdagangan, menyebabkan peningkatan pengambilan sumber daya air. Potensi pemanfaatan air di Kota Cimahi berasal dari air tanah (mata air, air tanah dangkal dan air tanah dalam) dan air permukaan (danau/kolam dan Sungai Cimahi). Pengambilan air tanah umumnya dilakukan sebagian besar dengan menggunakan sumur bor untuk usaha industri, usaha komersial lainnya atau masyarakat, dimana beberapa pengambilan air tanah telah melebihi kapasitas yang diizinkan dalam SIPA/Surat Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

2.2.4.5 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan adalah penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan dari setiap pengadu kepada instansi penanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pelanggaran, potensi dan/atau dampak di bidang lingkungan hidup dan/atau kehutanan dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan. Pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Pada tahun 2023, terdapat pengaduan terkait kualitas air yaitu adanya pencemaran air limbah industri, pencemaran air sumur, pencemaran air limbah domestik, dan air sungai. Jumlah kasus pengaduan masyarakat berdasarkan topik aduan dapat dilihat pada **Gambar 2. 53**, detail aduan masyarakat dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-50.



Gambar 2. 53 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Media Lingkungan yang Tercemar

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023)

2.2.5 Response

2.2.5.1 Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Sumur

Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi setiap tahunnya melakukan pemantauan kualitas air secara rutin. Hal tersebut dilakukan agar dapat melihat data *series* kualitas air setiap tahunnya, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut sebagai upaya pengendalian jika didapati hasil kualitas yang kurang baik. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 5 Sungai dengan 3 titik pemantauan di masing-masing sungainya, sungai yang dilakukan pemantauan yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cilember, Sungai Cisangkan, Sungai Cihaur, dan Sungai Cibeureum. Pemantauan kualitas air sungai dilakukan pada Bulan Maret, Bulan Juni, dan Oktober 2023. Hasil monitoring dapat menjadi acuan dalam menganalisis sebab akibat dari hasil kualitas air sungai tersebut yang nantinya akan dilakukan pengelolaan atau suatu pengendalian untuk pemulihan kualitas air sungai.

Selain air sungai, DLH Kota Cimahi melakukan pemantauan air sumur dalam setahun yaitu 1 (satu) kali periode pemantauan pada tahun 2023. Lokasi pemantauan air tanah sebanyak 30 (tiga puluh) titik sampling yang terbagi dalam 15 Kelurahan di Kota Cimahi, diantaranya:

- Kelurahan Cibeber
- Kelurahan Leuwigajah
- Kelurahan Utama
- Kelurahan Melong
- Kelurahan Cibeureum
- Kelurahan Cimahi
- Kelurahan Padasuka
- Kelurahan Karang Mekar
- Kelurahan Baros
- Kelurahan Cigugur Tengah
- Kelurahan Cibabat
- Kelurahan Setiamanah
- Kelurahan Cipageran
- Kelurahan Citeureup
- Kelurahan Pasir Kaliki

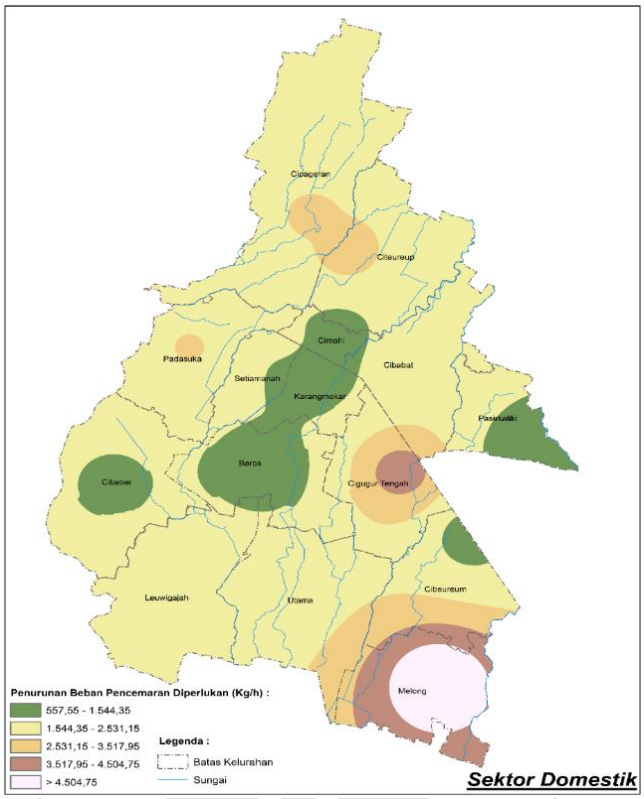
Tujuan dari pemantauan air tanah tersebut, sama halnya dengan pemantauan kualitas air sungai, yaitu sebagai upaya dari DLH Kota Cimahi

secara objektif mengetahui kualitas dari air tanah di Kota Cimahi. Pemantauan kualitas dan kuantitas air bisa menjadi dasar dalam penentuan kebijakan ataupun kegiatan yang memperbaiki kualitas air. DLH Kota Cimahi juga telah menerapkan sistem informasi lingkungan sebagai bentuk upaya pemantauan pengelolaan lingkungan di kota ini.

2.2.5.2 Program Penurunan Beban Pencemar Sungai

Pemerintah Kota Cimahi berupaya menurunkan beban pencemar air untuk setiap sektor yang menjadi sumber pencemar terhadap sungai. Penurunan beban pencemar dilakukan berdasarkan beberapa sektor terkait, yaitu:

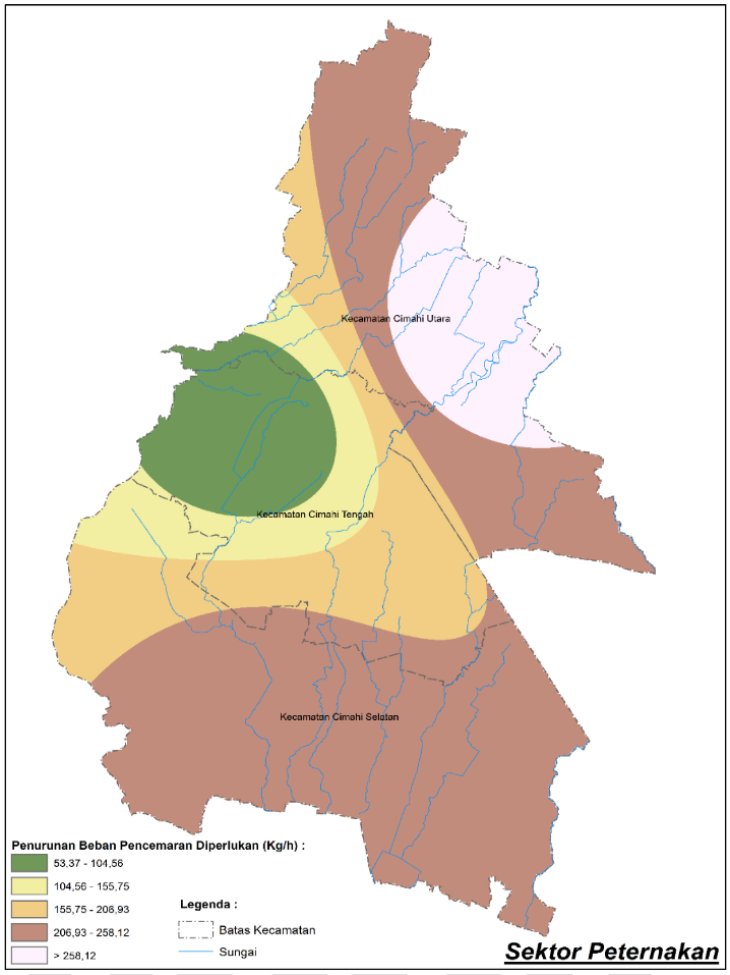
a) Sektor Domestik. Program penurunan beban pencemar sektor domestik direncanakan dengan konsentrasi yang berbeda-beda setiap wilayahnya. Berikut ini peta penurunan beban pencemar di Kota Cimahi dari sektor domestik.



Gambar 2. 54 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Domestik

(Sumber: Review RPPLH, 2018)

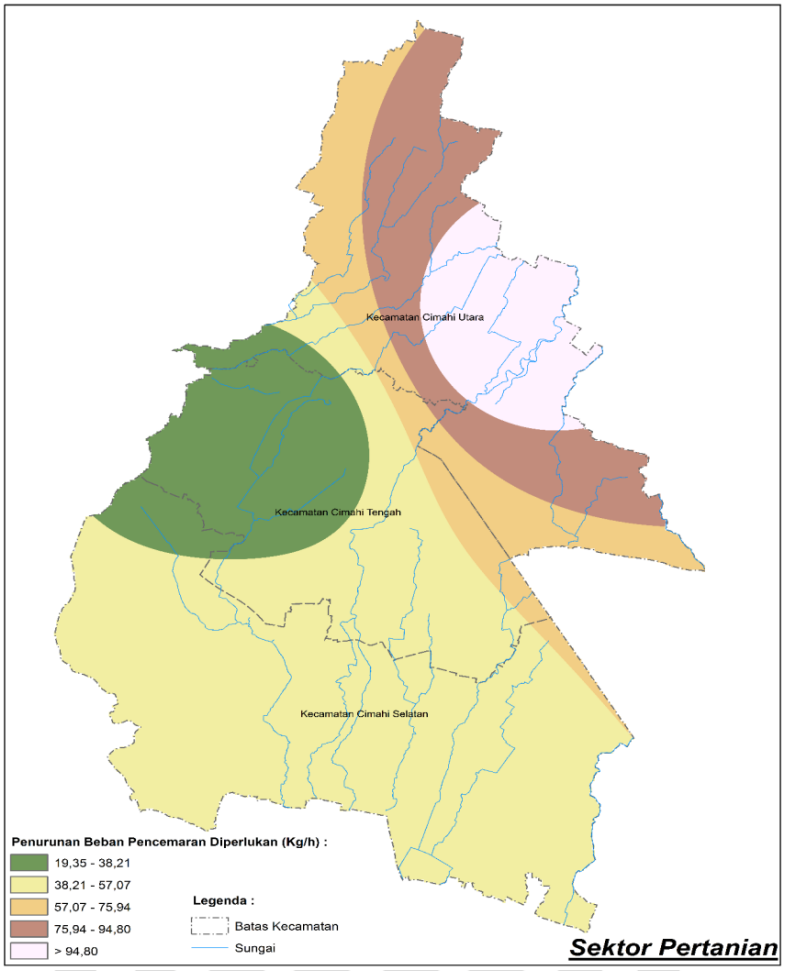
b) Sektor Peternakan. Selain sektor domestik, Kota Cimahi berupaya menurunkan beban pencemar yang masuk ke sungai melalui sektor peternakan agar dapat mendukung memenuhi daya tampung sungai Citarum. Sektor peternakan di Kota Cimahi terdiri dari hewan sapi, domba, ayam, itik, kerbau, kuda, dan kambing. Sama halnya dengan sektor domestik, program penurunan sektor peternakan direncanakan dengan skala wilayah. Peta penurunan beban pencemar di Kota Cimahi dari sektor peternakan dapat dilihat pada Error! Reference source not found.



Gambar 2. 55 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Peternakan

(Sumber: Review RPPLH, 2018)

c) Sektor Pertanian. Adanya kebijakan yang mengharuskan Kota Cimahi menurunkan beban pencemar dari sektor pertanian. Dari arahan tersebut, Kota Cimahi mengembangkan program penurunan beban pencemar dengan skala wilayah. Dimana sektor sumber pencemar dari sawah dan kebun setiap kecamatan berasal dari persentase luasan total penggunaan lahan. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah Kota Cimahi yang salah satunya dilakukan melalui sektor pertanian. Berikut ini peta penurunan beban pencemar di Kota Cimahi dari sektor pertanian.



Gambar 2. 56 Peta Penurunan Beban Pencemar BOD Sektor Pertanian

(Sumber: Review RPPLH, 2018)

d) Sektor Industri. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.300/Menlhk/Setjen/PKL.1/6/2017 Tentang Penetapan Daya Tampung beban Pencemaran Air dan Alokasi beban Pencemaran Air Sungai Citarum, Kota Cimahi perlu menurunkan beban pencemar BOD sebesar 2.081,5 kg/hari dari sektor industri.

Beberapa program terkait upaya penurunan beban pencemar ke badan air yang telah dilakukan oleh Kota Cimahi di antaranya adalah Wirausaha Sanitasi, Program Karismatik, Program Pengerukan Sedimen Sungai dan Drainase, Program Mantri Kamalir, dan Program Kajian Pembentukan Sentra Industri Pengolahan Kota Cimahi, Revitalisasi Sarana

dan Prasarana Pasar Atas, GAS (Gerakan Anti Sembarangan), Solar STBM, dan Program Haur Hiber.

2.2.5.3 Program Sanitasi Berbasis Masyarakat

Akses penduduk terhadap prasarana dan sarana sanitasi pada dasarnya erat dengan aspek Kesehatan, lingkungan hidup, pendidikan, sosial budaya serta ekonomi. Semakin besar akses penduduk kepada fasilitas sanitasi domestik serta pemahaman tentang higiene, semakin kecil kemungkinan terjadinya kasus penyebaran penyakit yang ditularkan melalui media air dan tanah. Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan salah satu program yang rutin dilaksanakan oleh Kota Cimahi untuk menyediakan sarana pengolahan air limbah domestik di masyarakat. Dengan Sanimas masyarakat diajak untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tujuan Sanimas yaitu:

1) Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
3) Mencapai kualitas kehidupan masyarakat sehat.

Di Kota Cimahi sendiri sudah dibangun IPAL Sanimas sebanyak 118 unit dengan kapasitas rata-rata 50 KK yang melayani hingga 10.676 KK hingga tahun 2022. Pada tahun 2023, kegiatan yaitu pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Skala Permukiman dan Tangki Septik Individual. Jumlah sarana yang terbangun adalah:

1) 100 unit tangki septik individu di Kelurahan Cibabat
2) 1 unit IPAL komunal di kelurahan Karangmekar
3) 2 unit IPAL komunal di kelurahan Baros
4) 2 unit IPAL komunal di kelurahan Leuwigajah
5) 1 unit IPAL komunal di kelurahan Melong



Gambar 2. 57 Peresmian Penggunaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) Tahun 2023

(Sumber: https://cimahikota.go.id/, 2024)

2.2.5.4 Pengadaan Sumur Resapan

Secara umum Kota Cimahi memiliki tiga jenis ekoregion darat, yaitu dataran vulkanik, perbukitan struktural, dan perbukitan vulkanik. Ketiga jenis ekoregion tersebut masuk dalam kelas ekoregion darat Jawa Barat yaitu pegunungan vulkanik G. Halimun-G. Salak-G. Sawal. Ekoregion ini memiliki sumber daya air permukaan dan air tanah yang melimpah, sehingga pegunungan vulkanik berperan sebagai sumber cadangan air yang sangat besar.

Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam menangani permasalahan kekurangan air adalah mengendalikan pembangunan dengan peraturan daerah, kemudian menginventarisasi sumur resapan dan biopori. Drainase vertikal (sumur resapan) merupakan program saluran air yang dibangun untuk mengalirkan air hujan dari permukaan ke dalam tanah yang berupa kolom-kolom pasir atau bahan lain

yang ditanam memanjang secara vertikal di dalam tanah. Selama tahun 2021, Kota Cimahi telah mendata aset sumur resapan di tiap Kecamatan. Total sumur resapan di Kota Cimahi sebanyak 48 buah sumur resapan yang tersebar di Kelurahan Cibabat, Kelurahan Pasir Kaliki, Kelurahan Cibeber, Kelurahan Cibeureum, Cimahi *Technopark*, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Padasuka.

2.2.5.5 Pengawasan Dokumen Persetujuan Lingkungan

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Maka perlu dianalisis sejak awal perencanaan sehingga pengendalian dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Tindak lanjut untuk menjaga kualitas air salah satunya menggunakan instrumen persetujuan lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan SPPL). Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 34 SPPL dan 4 UKL-UPL telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cimahi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan.

2.2.5.6 Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Program Nasional Citarum Harum

Terdapat satu program yang mendorong Kota Cimahi untuk membenahi pengelolaan air sungai, yaitu Program Nasional Citarum Harum. Program tersebut didasari atas Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai Citarum. Keberadaan Kota Cimahi di daerah hulu (sungai orde 2 dan 3) menjadi faktor pemicu kualitas air selanjutnya ke bagian tengah hingga hilir, sehingga wilayah sungai di Kota Cimahi harus memiliki kualitas yang baik. Jika tidak, hal tersebut tentu dapat berdampak terhadap aliran selanjutnya.

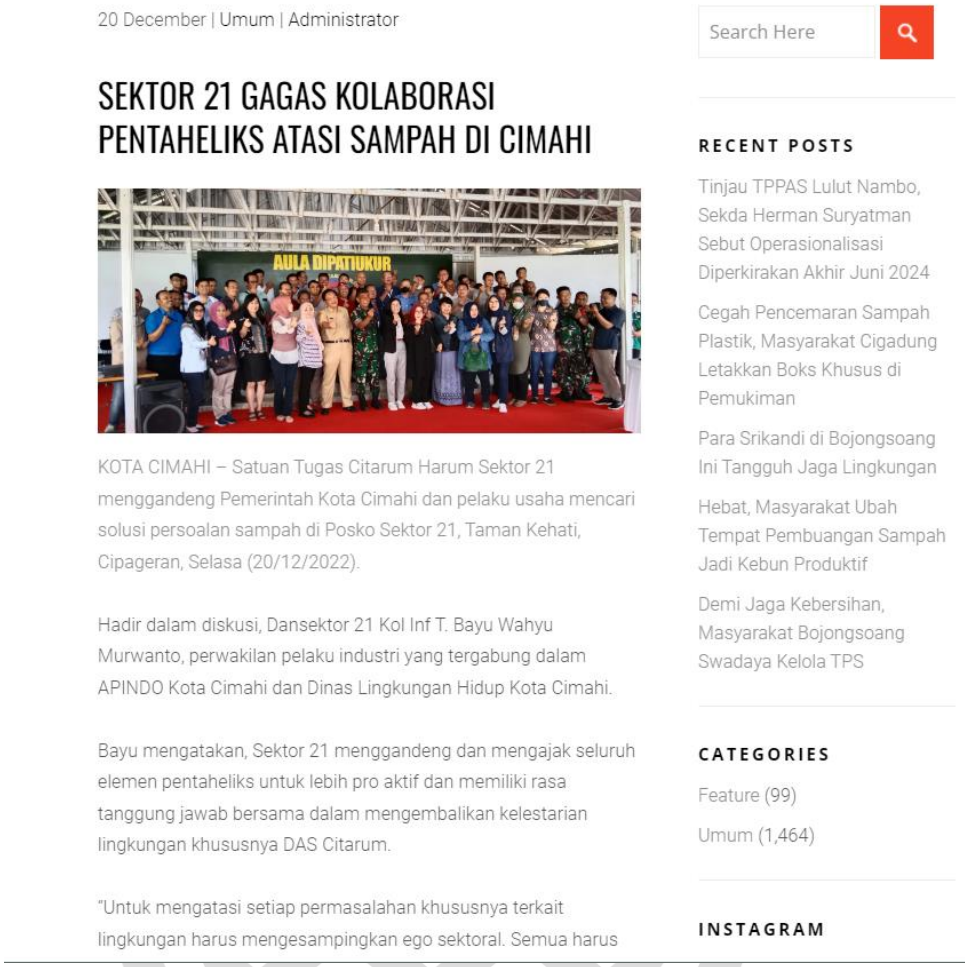
Berdasarkan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum Tahun 2019-2025 bahwa data dan informasi kualitas air DAS

Citarum yang lebih representatif dan termutakhir merupakan target *outcome* pemantauan kualitas air sebagai evaluasi Program Citarum Harum. Instansi terkait melakukan pemantauan kualitas air baik secara manual maupun secara *online monitoring.* Target *outcome* penanganan air limbah domestik terdiri dari aspek kondisi infrastruktur sanitasi layak dan kondisi kesadaran masyarakat untuk tidak buang air besar sembarangan. Terdapat 11 desa/kelurahan yang difokuskan melakukan kegiatan penanganan air limbah domestik dan dapat dilihat pada **Tabel 2. 7**.

Tabel 2. 7 Profil Desa/Kelurahan Program Citarum Harum

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Cimahi Utara	Cibabat, Citeureup
2	Cimahi Tengah	Cigugur Tengah, Cimahi, Karang Mekar, Setiamanah
3	Cimahi Selatan	Cibeber, Cibeureum, Leuwigajah, Melong, Utama

Sumber: Satgas Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum, 2019



20 December | Umum | Administrator

SEKTOR 21 GAGAS KOLABORASI PENTAHELIKS ATASI SAMPAH DI CIMAHI

KOTA CIMAHI – Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 21 menggandeng Pemerintah Kota Cimahi dan pelaku usaha mencari solusi persoalan sampah di Posko Sektor 21, Taman Kehati, Cipageran, Selasa (20/12/2022).

Hadir dalam diskusi, Dansektor 21 Kol Inf T. Bayu Wahyu Murwanto, perwakilan pelaku industri yang tergabung dalam APINDO Kota Cimahi dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

Bayu mengatakan, Sektor 21 menggandeng dan mengajak seluruh elemen pentaheliks untuk lebih pro aktif dan memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam mengembalikan kelestarian lingkungan khususnya DAS Citarum.

"Untuk mengatasi setiap permasalahan khususnya terkait lingkungan harus mengesampingkan ego sektoral. Semua harus

Search Here

RECENT POSTS

Tinjau TPPAS Lulut Nambo, Sekda Herman Suryatman Sebut Operasionalisasi Diperkirakan Akhir Juni 2024

Cegah Pencemaran Sampah Plastik, Masyarakat Cigadung Letakkan Boks Khusus di Pemukiman

Para Srikandi di Bojongsoang Ini Tangguh Jaga Lingkungan

Hebat, Masyarakat Ubah Tempat Pembuangan Sampah Jadi Kebun Produktif

Demi Jaga Kebersihan, Masyarakat Bojongsoang Swadaya Kelola TPS

CATEGORIES

Feature (99)

Umum (1,464)

INSTAGRAM

Gambar 2. 58 Kolaborasi Pentaheliks sebagai upaya Pengurangan Sampah di Sungai

Sumber: https://citarumharum.jabarprov.go.id/sektor-21-gagas-kolaborasi-pentaheliks-atasi-sampah-di-cimahi/, 2022 diakses pada Mei 2024

2.3 Kualitas Udara

Kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya terhadap udara menjadi prioritas utama untuk kelangsungan hidup. Perkembangan teknologi dan industri mengubah pola aktivitas manusia yang seiring waktu semakin tinggi intensitasnya. Pertumbuhan industri, manufaktur, bisnis hingga mobilitas manusia memiliki potensi peningkatan emisi yang berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Kondisi kualitas udara di Kota

Cimahi mengacu terhadap data tabel 36 – tabel 40. Selain itu juga didapatkan data penunjang lainnya yang dapat digunakan sebagai data analisis DPSIR pada isu kualitas udara di Kota Cimahi. Kerangka kerja analisis DPSIR Kota Cimahi terhadap isu kualitas udara dapat dilihat pada **Gambar 2. 59.**



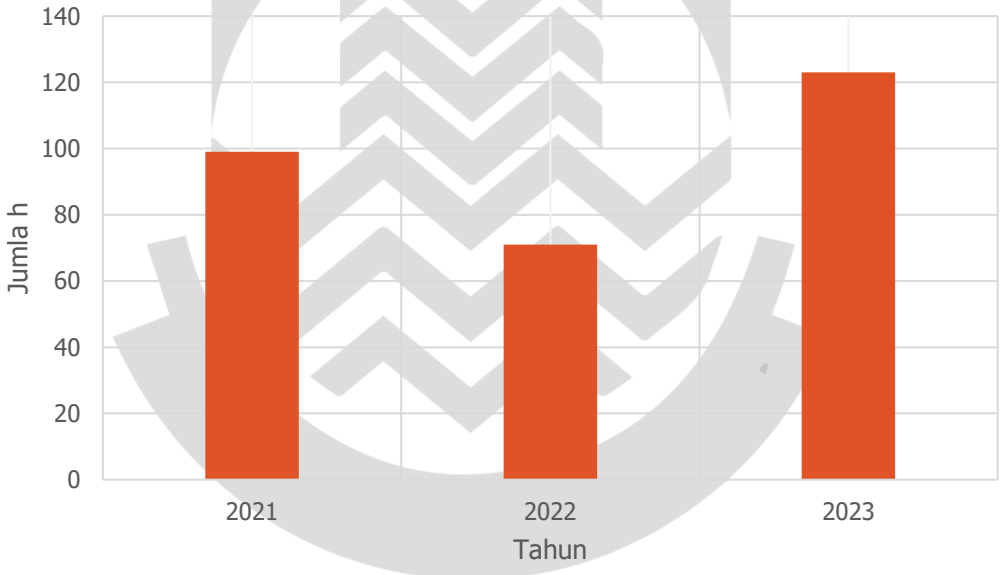
Gambar 2. 59 Framework DPSIR Isu Kualitas Udara

(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

2.3.1 Driving Force

2.3.1.1 Pertumbuhan Industri

Kota Cimahi, yang dikenal sebagai salah satu pusat industri di Jawa Barat, mengalami pertumbuhan industri yang pesat. Peningkatan aktivitas industri ini seringkali disertai dengan peningkatan emisi polutan ke udara, seperti partikel debu (PM_{10} dan $PM_{2.5}$), sulfur dioksida (SO_2), nitrogen dioksida (NO_2), karbon monoksida (CO), dan senyawa organik volatil (VOC). Polutan-polutan ini berasal dari berbagai proses industri, termasuk pembakaran bahan bakar fosil, pengolahan bahan kimia, dan produksi material. Grafik tren banyaknya perusahaan di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 60.**



Gambar 2. 60 Tren Jumlah Perusahaan di Kota Cimahi per Tahun

(Sumber: Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2021 2022 2023, diolah)

2.3.1.2 Transportasi

Kendaraan bermotor, terutama yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin dan diesel, mengeluarkan berbagai polutan ke udara. Polutan utama meliputi karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), sulfur

dioksida (SO_2), dan hidrokarbon (HC). Kendaraan diesel menghasilkan partikel halus (PM_{10} dan $PM_{2.5}$) yang dapat masuk ke paru-paru dan menyebabkan masalah kesehatan serius seperti asma, bronkitis, dan penyakit jantung.

2.3.1.3 Perkembangan Perkotaan

Perkembangan perkotaan yang pesat dapat berdampak signifikan terhadap kualitas udara. Infrastruktur jalan yang tidak memadai untuk menampung pertumbuhan jumlah kendaraan menyebabkan kemacetan lalu lintas, meningkatkan waktu mesin berjalan pada keadaan diam (*idle*) dan memperburuk emisi polutan.

Permukaan beton dan aspal menyerap lebih banyak panas, meningkatkan suhu di area perkotaan dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Peningkatan suhu ini dapat mempercepat reaksi kimia yang menghasilkan polutan udara seperti ozon troposfer.

2.3.1.4 Pertanian dan Pembakaran Sampah di Lahan Terbuka

Pembakaran sampah di lahan terbuka melepaskan sejumlah besar polutan ke atmosfer, termasuk karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO2), nitrogen oksida (NOx), dan partikulat ($PM_{2.5}$ dan PM_{10}). Selain itu, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan menjadi salah satu faktor pemicu kualitas udara.

Beberapa pestisida dan herbisida yang digunakan dalam pertanian dapat menguap dan mencemari udara, melepaskan senyawa organik volatil (VOC) yang dapat berkontribusi pada pembentukan ozon troposfer.

2.3.2 Pressure

2.3.2.1 Emisi Gas dan Partikel

Faktor penekan perubahan kualitas udara ditimbulkan salah satunya dari kegiatan industri, manufaktur, bisnis hingga konstruksi. Di Kota Cimahi sebanyak 123 industri terdata menggunakan bahan bakar berupa Batubara, Gas LPG, dan Solar (BPS Kota Cimahi, 2023).

Tabel 2. 8 Penggunaan Bahan Bakar pada Industri

Penggunaan	Batubara	Gas LPG	Solar
Aneka Industri	35.720,16 ton/bulan	76.070,58 kg/bulan	276.945,38 L/bulan

Sumber: Data GRK dan Kapasitas Produksi Kota Cimahi 2023

Penggunaan bahan bakar tersebut dapat meningkatkan konsentrasi pencemar udara. Secara jangka panjang berpotensi menimbulkan pencemaran udara berupa emisi Gas Rumah Kaca. Emisi yang berupa gas rumah kaca diantaranya karbon dioksida (CO_2), Metana (CH_4), dan Di nitrogen Oksida (N_2O), selain gas rumah kaca dihasilkan juga pencemar udara berupa Nitrogen oksida (NOx), Sulfur oksida (SOx), Hidrokarbon (HC), Black Karbon (BC), *Non methane volatile organic compound* (NMVOC), *Particulate Matter* 10 (PM_{10}), dan *Particulate Matter* 2,5 ($PM_{2,5}$). Unsur-unsur tersebut merupakan parameter pencemaran udara, jika mengalami peningkatan konsentrasi di udara maka akan menyebabkan pencemaran udara karena kadarnya melebihi baku mutu yang sudah ditetapkan, dengan meningkatnya kadar tersebut dampak berdampak negatif terhadap lingkungan maupun manusia.

2.3.2.2 Polusi Udara Lokal

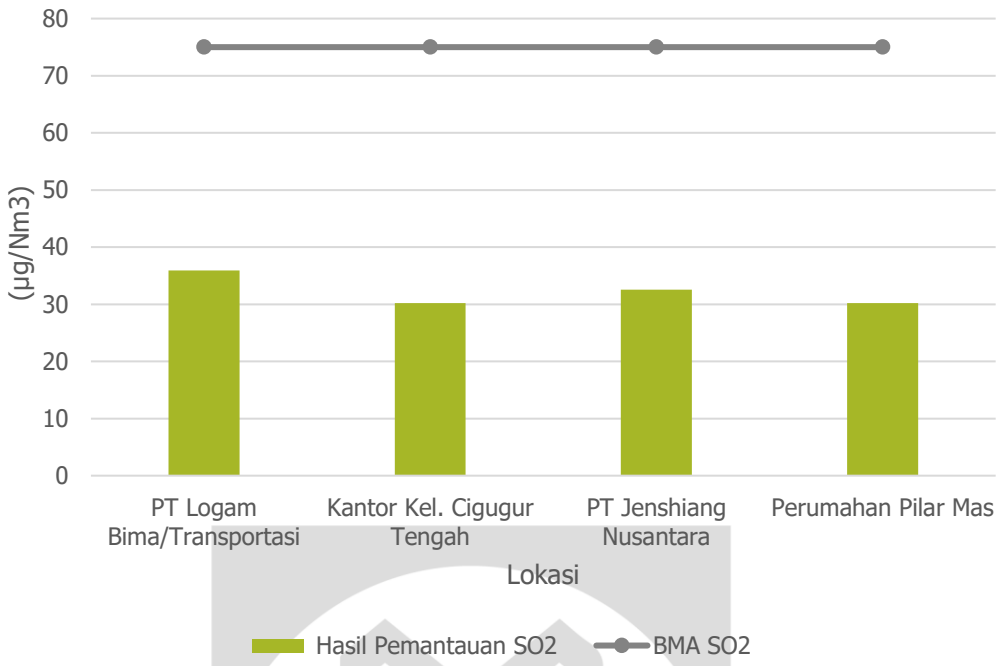
Kepadatan lalu lintas di jalan-jalan perkotaan di Kota Cimahi menyebabkan emisi gas buang yang tinggi, termasuk karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), dan partikulat ($PM_{2.5}$ dan PM_{10}). Kemacetan lalu lintas dapat memperburuk emisi gas buang karena kendaraan terpaksa

menghabiskan lebih banyak waktu dalam keadaan *idle.* Penggunaan bahan bakar yang tidak berkualitas baik atau ilegal juga dapat menyebabkan peningkatan emisi polutan. Pabrik dan perusahaan industri di sekitar kota Cimahi dapat menyebabkan emisi gas dan partikel yang signifikan. Pembakaran sampah terbuka, baik yang dilakukan secara terencana maupun tidak terencana, dapat menghasilkan asap dan gas beracun yang mencemari udara. Pemanasan rumah tangga dengan bahan bakar fosil seperti kayu bakar, arang, atau bahan bakar minyak tanah juga dapat menyebabkan emisi polutan seperti CO, NOx, dan partikulat.

2.3.3 State

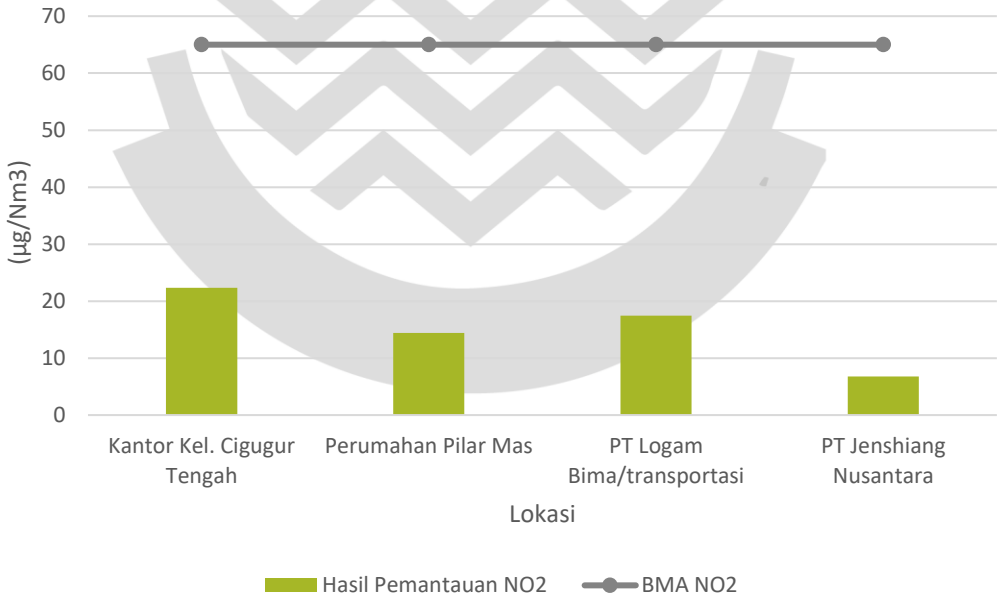
2.3.3.1 Konsentrasi Polutan Udara

Kualitas udara ambien di Kota Cimahi dipengaruhi oleh pencemaran udara yang terjadi di Kota Cimahi. Pencemaran udara merupakan masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya. Hasil pemantauan kualitas udara dapat dilihat pada **Gambar 2. 61** sampai **Gambar 2. 64.**



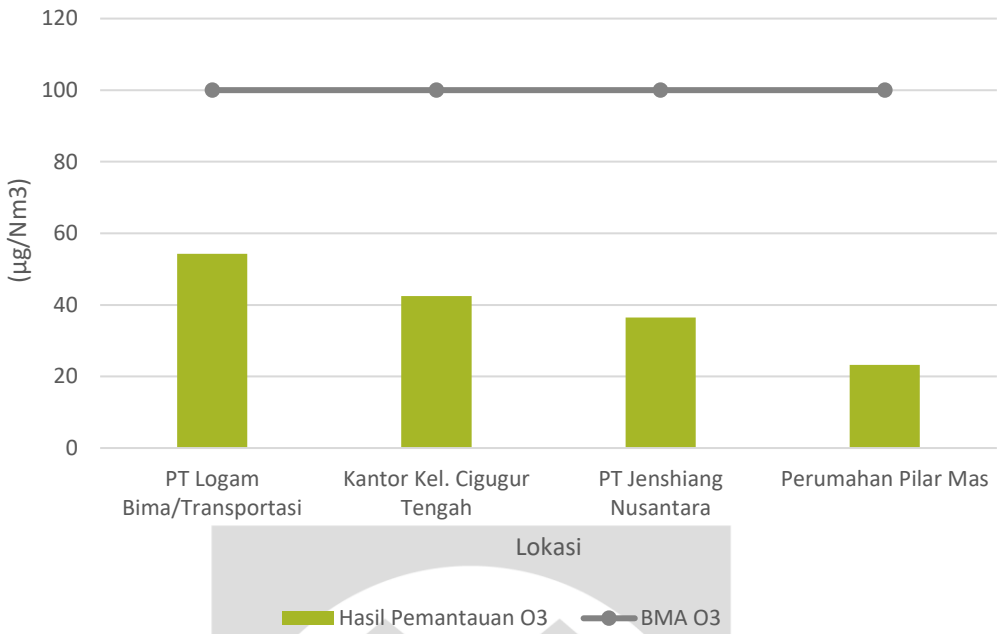
Gambar 2. 61 Hasil Pemantauan Konsentrasi SO_2 di Kota Cimahi

(Sumber: LHU Kualitas Udara, 2023)



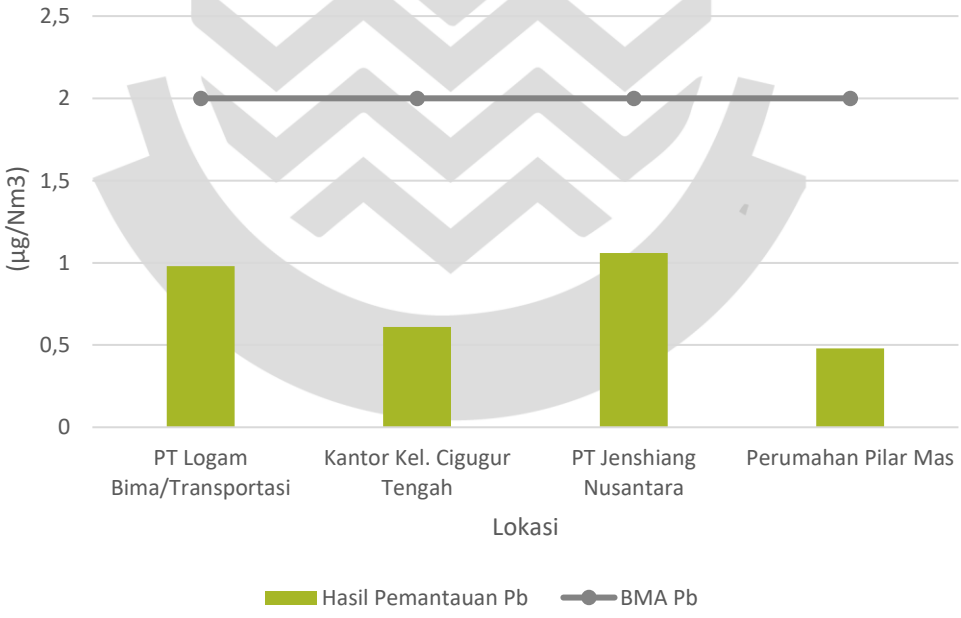
Gambar 2. 62 Hasil Pemantauan Konsentrasi NO_2 di Kota Cimahi

(Sumber: LHU Kualitas Udara, 2023)



Gambar 2. 63 Hasil Pemantauan Konsentrasi O_3 di Kota Cimahi

(Sumber: LHU Kualitas Udara, 2023)



Gambar 2. 64 Hasil Pemantauan Konsentrasi Pb di Kota Cimahi

(Sumber: LHU Kualitas Udara, 2023)

2.3.3.2 Kualitas Udara Ambien

Kualitas udara di Kota Cimahi ditentukan berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien. Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan metode *passive sampling* dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup. Lokasi pemantauan kualitas udara pada tahun 2023 mencakup permukiman, transportasi, industri, dan perkantoran. Pada pengukuran kualitas udara ambien, baku mutu yang digunakan mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, konsentrasi SO_2 yang diperbolehkan yaitu 75 µg/Nm^3 (waktu pengukuran 24 jam) dan konsentrasi NO_2 yang diperbolehkan yaitu 65 µg/Nm^3 (waktu pengukuran 24 jam). Pengukuran kualitas udara di Kota Cimahi dilakukan pada perkantoran (Kantor di Kelurahan Cigugur Tengah), perumahan (Perumahan Pilar Mas), transportasi (PT Logam Bima), dan industri (PT Jenshiang Nusantara). Nilai ISPU terbagi menjadi 5 kategori yaitu baik (0-50), sedang (51–100), tidak sehat (101-200), sangat tidak sehat (201-300), dan berbahaya (>301).

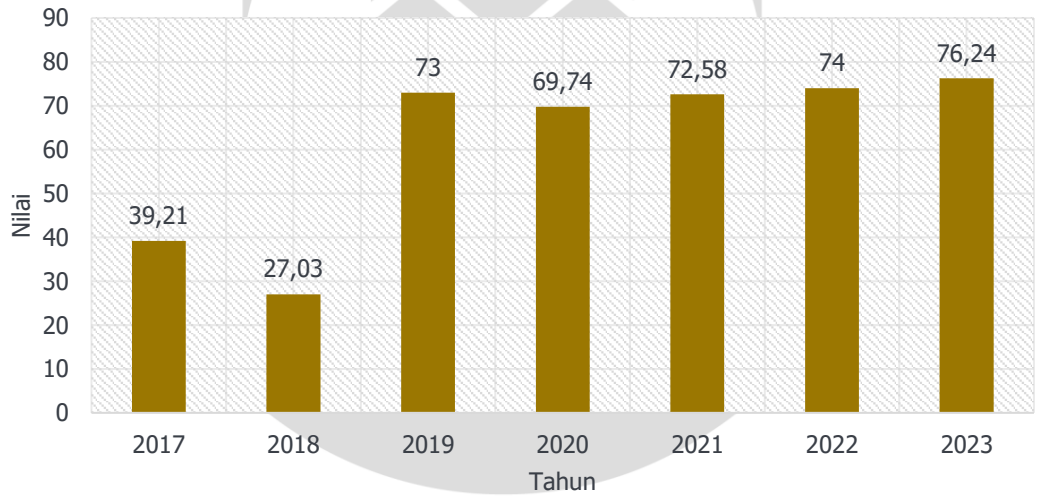
Tabel 2. 9 Kategori ISPU di Lokasi Titik Pantau tahun 2023

Lokasi	Parameter SO_2		Parameter NO_2		Parameter PM_{10}	
	ISPU	Kategori	ISPU	Kategori	ISPU	Kategori
PT Logam Bima/Transportasi	34,54	Baik	13,9	Baik	60,22	Sedang
Kantor Kel. Cigugur Tengah	29,05	Baik	9	Baik	55,51	Sedang
PT Jenshiang Nusantara	31,27	Baik	10,89	Baik	60,77	Sedang
Perumahan Pilar Mas	29,05	Baik	4,23	Baik	59,56	Sedang

Sumber: Hasil Analisis, 2024

2.3.3.3 Indeks Kualitas Udara (IKU)

Penyusunan indeks kualitas udara (IKU) bertujuan sebagai pelaporan kualitas udara yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat. Indeks kualitas udara dihitung berdasarkan 4 area lokasi tersebar di area industri, perkantoran, transportasi dan perumahan. Parameter yang digunakan dalam penentuan IKU adalah SO_2 dan NO_2 sesuai dengan PermenLH Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Data yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara adlaah data pemantauan yang sudah terintegrasi dengan pemantauan KLHK, dimana nilai Indeks Kualitas Udara di Kota Cimahi pada tahun 2023 mencapai 76,24. Nilai Indeks Kualitas Udara dapat dilihat pada



Gambar 2. 65 Tren Indeks Kualitas Udra Kota Cimahi

2.3.4 Impact

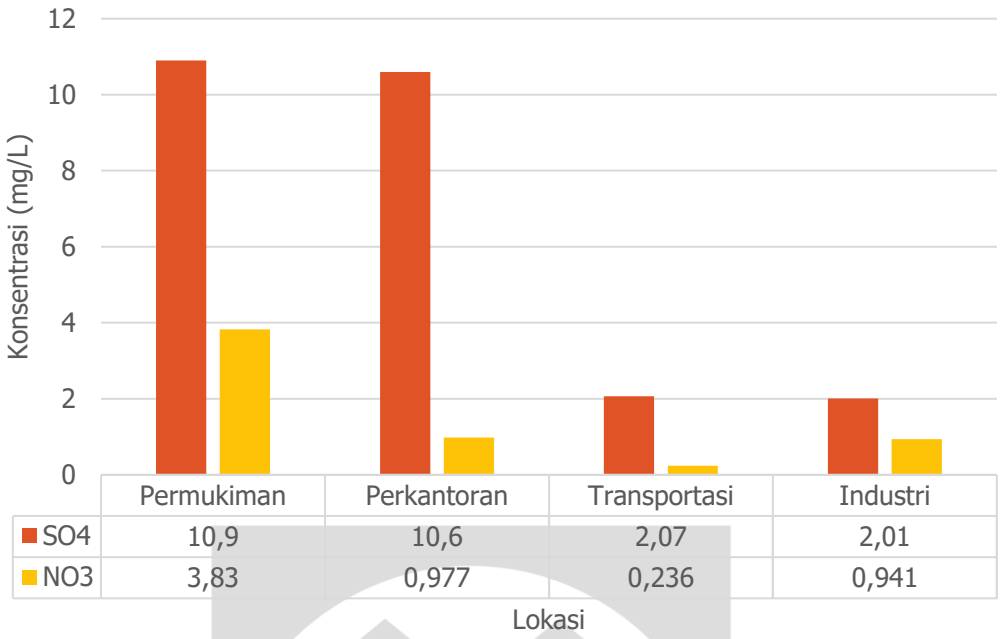
2.3.4.1 Kesehatan Masyarakat

Kualitas udara yang menurun dapat berdampak pada masalah kesehatan manusia. Pencemar seperti PM_{10} dan $PM_{2,5}$ jika terhirup ke dalam sistem pernapasan menyebabkan gangguan pernapasan. Gangguan

tersebut diantaranya infeksi saluran pernapasan, penyakit paru-paru, dan lain-lain. Jenis penyakit utama yang diderita penduduk Kota Cimahi dapat dilihat pada Error! Reference source not found.. Kualitas udara memberikan d ampak terhadap manusia, dampak dari penurunan kualitas udara adalah terkait kesehatan masyarakat. Salah satunya menyebabkan penyakit saluran pernapasan sebesar 26,36% atau sebanyak 64.019 penderita.

2.3.4.2 Kerusakan Lingkungan

Emisi gas-gas asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen oksida dapat menyebabkan asidifikasi tanah dan air, merusak ekosistem akuatik dan tanah serta mengurangi keanekaragaman hayati. Gas-gas yang berada di udara sejatinya memiliki sifat untuk berinteraksi dengan air, oksigen, dan unsur kimia lainnya yang kemudian membentuk unsur baru. Gas SO_2 di udara dapat mengalami oksidasi sehingga membentuk SO_3 jika konsentrasi uap air sangat rendah, namun jika uap air di udara jumlahnya sesuai maka uap air tersebut akan bergabung membentuk tetesan asam sulfat (H_2SO_4). Tetesan tersebut bersifat asam karena memiliki nilai pH di bawah nilai pH air hujan ideal. Serupa dengan proses pembentukan asam sulfat, asam nitrat (HNO_3) yang bersifat asam berasal dari NO_x yang teroksidasi lalu membentuk NO_3 dan kemudian berinteraksi dengan uap air membentuk HNO_3. Hasil pemantauan kualitas air hujan dapat dilihat pada **Gambar 2. 66.**



Gambar 2. 66 Pemantauan Kualitas Air Hujan di Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: LHU Kualitas Air Hujan Kota Cimahi, 2023)

2.3.4.3 Dampak Sosial Ekonomi

Paparan polusi udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, penyakit jantung, dan gangguan kesehatan lainnya. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan biaya kesehatan dan tingkat absensi kerja di antara masyarakat, serta menurunkan kualitas hidup. Penyakit dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh polusi udara dapat mengurangi produktivitas pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Ini dapat mengakibatkan kehilangan jam kerja dan pendapatan bagi individu serta kerugian ekonomi bagi perusahaan dan pemerintah

2.3.5 Response

2.3.5.1 Regulasi Lingkungan

Regulasi lingkungan terkait kualitas udara memiliki potensi besar untuk memperbaiki kualitas udara dengan mengurangi emisi polutan dan

mengatur standar kualitas udara yang lebih ketat. Regulasi dapat mengatur emisi dari industri-industri besar yang menghasilkan polusi udara. Adapun regulasi yang mengatur kualitas udara:

1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.14 Tahun 2020

2.3.5.2 Pengelolaan Transportasi

Untuk mengelola transportasi dengan lebih efektif dan berkelanjutan, diperlukan beberapa langkah strategis yang komprehensif dan terintegrasi. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem transportasi, tetapi juga untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Berikut adalah beberapa langkah penting yang dapat diambil untuk mencapai tujuan tersebut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan transportasi massal seperti bus dan kereta api. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi. Dengan memperbanyak frekuensi perjalanan, memperluas rute, serta meningkatkan kenyamanan dan ketepatan waktu, masyarakat akan

lebih memilih menggunakan transportasi massal dibandingkan kendaraan pribadi.

2. Membangun jalur khusus pejalan kaki dan sepeda yang aman dan nyaman. Pembangunan infrastruktur ini akan mendorong masyarakat untuk lebih sering berjalan kaki atau bersepeda. Jalur yang didesain dengan baik, dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas, dan pencahayaan yang memadai akan meningkatkan keselamatan dan kenyamanan para pengguna.
3. Menggunakan sensor dan perangkat monitoring untuk memantau kualitas udara. Teknologi ini dapat memberikan informasi yang akurat dan *real-time* mengenai kondisi udara kepada masyarakat. Dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kualitas udara dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi polusi.
4. Menetapkan zona emisi rendah, yaitu area di mana hanya kendaraan dengan emisi rendah yang diizinkan masuk. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi polusi udara di daerah yang padat aktivitas. Kendaraan ramah lingkungan seperti mobil listrik atau hibrida akan lebih diprioritaskan, sehingga kualitas udara di zona tersebut dapat lebih terjaga.

2.3.5.3 Kampanye Kesadaran Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kualitas udara di Kota Cimahi merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Kualitas udara yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik masyarakat, tetapi juga pada kesejahteraan umum dan kualitas hidup sehari-hari. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya kolaboratif dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, industri, komunitas, hingga individu, untuk menghadapi tantangan polusi udara. Berikut adalah beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk

meningkatkan kesadaran dan mendorong tindakan nyata dalam menjaga kualitas udara di Kota Cimahi:

1. Menyelenggarakan kompetisi dan memberikan penghargaan kepada komunitas, sekolah, atau perusahaan yang berhasil mengurangi emisi polusi udara secara signifikan. Inisiatif ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan partisipasi aktif dalam upaya pengurangan emisi. Dengan mengadakan kompetisi, berbagai kelompok masyarakat akan termotivasi untuk menerapkan praktik ramah lingkungan dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara. Penghargaan yang diberikan dapat berupa pengakuan publik, sertifikat, atau insentif lainnya yang dapat memacu semangat untuk terus berinovasi.
2. Mengadakan sesi dialog publik dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah, industri, dan masyarakat untuk membahas masalah kualitas udara dan solusi yang dapat diambil bersama. Dialog ini penting untuk menciptakan ruang komunikasi yang terbuka dan inklusif, di mana berbagai pihak dapat berbagi pandangan, pengalaman, dan solusi yang dapat diimplementasikan bersama. Sesi ini juga berfungsi sebagai platform untuk membangun kesepakatan dan kolaborasi yang lebih erat dalam menangani isu polusi udara.
3. Menyediakan peta interaktif yang menunjukkan tingkat polusi udara di berbagai wilayah kota. Peta ini akan memberikan informasi *real-time* tentang kondisi kualitas udara, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait aktivitas luar ruangan mereka. Misalnya, peta ini dapat membantu orang tua memilih waktu yang tepat untuk mengajak anak-anak bermain di luar rumah atau membantu pelari memilih rute yang lebih bersih untuk berolahraga. Dengan akses informasi yang mudah dan akurat, masyarakat akan lebih sadar akan pentingnya menjaga kualitas udara dan dapat mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka dari paparan polusi.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan masyarakat Kota Cimahi akan lebih peka terhadap isu kualitas udara dan termotivasi untuk ikut serta dalam upaya menjaga lingkungan. Kampanye kesadaran ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup saat ini, tetapi juga akan memberikan warisan lingkungan yang lebih baik untuk generasi mendatang.

2.3.5.4 Pemantauan Kualitas Udara Ambien Berkala

Dalam upaya pengelolaan dan pengendalian pencemaran udara khususnya terkait dengan udara ambien. Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi setiap tahunnya melakukan pemantauan kualitas udara di beberapa titik pemantauan. Hal tersebut dilakukan agar dapat melihat data *series* kualitas udara setiap tahunnya, sehingga dapat dilakukan tindak lanjut sebagai upaya pengendalian jika didapati hasil kualitas yang kurang baik.

Pemantauan dilakukan di daerah yang mewakili sektor-sektor sumber pencemar kualitas udara ambien diantaranya sektor perniagaan, permukiman, industri dan transportasi. Pemantauan kualitas udara ambien diharapkan bisa dilakukan dalam waktu dua periode. Selain pemantauan terhadap sumber tidak bergerak, pemerintah Kota Cimahi juga melakukan uji emisi terhadap sumber bergerak yaitu pada kendaraan-kendaraan di Kota Cimahi, hasil uji emisi tersebut bertujuan sebagai tolak ukur emisi yang dihasilkan oleh kendaraan yang berada di Kota Cimahi.

2.3.5.5 Reaktivasi *Car Free Day*

Pemerintah Kota Cimahi menyadari salah satu sumber pencemar di Kota Cimahi yang mempengaruhi kualitas udara salah satunya adalah berasal dari kendaraan bermotor. Keberadaan kendaraan bermotor dan padatnya lalu lintas ketika hari kerja di Kota Cimahi menghasilkan emisi-emisi dari kendaraan bermotor. Upaya yang pernah dilakukan pemerintah

Kota Cimahi salah satunya adalah dengan melakukan rekayasa lalu lintas setiap hari libur (minggu) dengan dilakukan *Car Free Day* dengan tujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor dan mengurangi dampak efek pemanasan global yang berbahaya bagi kehidupan akibat makin tingginya jumlah kendaraan bermotor baik itu polusi udara ataupun polusi suara. Sempat terhambat pelaksanaan *car free day* (CFD) di Kota Cimahi akibat pandemi Covid-19, diharapkan dengan adanya pengaktivasian kegiatan hari bebas kendaraan bermotor dapat mengurangi polutan di Kota Cimahi. Pemberlakuan CFD sendiri tentunya dapat mengurangi emisi kendaraan khususnya pada wilayah yang diberlakukannya CFD.



Gambar 2. 67 Satlantas Polres Kota Cimahi mengawal kegiatan CFD di Kota Cimahi

(Sumber: Satlantas Kota Cimahi, 2023)

2.3.5.6 Uji Kelayakan dan Uji Emisi Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kelayakan kendaraan bermotor terhadap setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan. Pelayanan ini diberikan oleh Dinas perhubungan Kota Cimahi yang bertujuan untuk:

- Memberikan Jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor
- Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor di jalan.
- Memberikan pelayanan umum kepada kendaraan bermotor milik masyarakat.

Kegiatan *ramp check* (uji kelayakan kendaraan) kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi, kegiatan ini melakukan pemeriksaan emisi gas buang dengan menggunakan uji emisi portabel.



Gambar 2. 68 Uji KIR oleh Dishub Kota Cimahi Tahun 2024

(Sumber: Dishub Kota Cimahi, 2023)

Pemerintah Kota Cimahi melakukan uji emisi terhadap sumber bergerak yaitu pada kendaraan-kendaraan di Kota Cimahi, hasil uji emisi tersebut bertujuan sebagai tolak ukur emisi yang dihasilkan oleh kendaraan yang berada di Kota Cimahi. Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi melaksanakan Uji Emisi Gratis bagi kendaraan roda empat pribadi, dinas atau angkutan barang yang tidak wajib KIR. Uji Emisi Gratis ini dilaksanakan selama 3 (tiga) hari mulai dari 6 Juni 2023 hingga 8 Juni 2023. Uji emisi dilakukan untuk mengetahui kondisi kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Emisi atau gas buang kendaraan adalah sisa pembakaran di ruang mesin, yang akan keluar melalui *exhaust system* atau knalpot. Gas buang sisa pembakaran ini sangat berbahaya karena mengandung cukup banyak zat beracun, di antaranya karbon monoksida, karbon dioksida, nitrogen oksida dan hidrokarbon. Oleh karenanya setiap kendaraan perlu melakukan uji emisi untuk mengetahui tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin. Pengujian ini perlu dilakukan karena memberikan dampak besar bagi lingkungan hidup maupun kondisi kendaraan itu sendiri.

2.3.5.7 Kegiatan *Earth Hour*

Pemanasan global merupakan isu lingkungan yang dihadapi secara bersama-sama dari nasional hingga internasional. Salah satu pengendalian pemanasan global yang bisa dilakukan menghemat penggunaan energi. Pemerintah Kota Cimahi pada turut serta dalam program *"Earth Hour",* program tersebut menyuarakan aksi peduli lingkungan dengan mematikan lampu selama satu jam. Tujuan program yang diselenggarakan Pemerintah Kota Cimahi ini adalah menghemat dan memelihara energi dan berbagai sumberdaya alam maupun buatan, agar pencemaran dapat tereduksi dan panas bumi bisa terkendali.



Gambar 2. 69 Poster Kegiatan *Earth Hour* Kota Cimahi

(Sumber: DLH Kota Cimahi, 2023)

2.3.5.8 Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT)

Aktivitas pembakaran batu bara yang digunakan sebagai sumber energi pembangkit listrik, menghasilkan buangan polusi yang sangat banyak. Hal ini mempengaruhi kualitas udara di suatu kota. Salah satu solusi yang bisa diterapkan adalah mengganti sumber energi menjadi sumber energi yang ramah lingkungan. Ada beberapa bentuk aksi yang berkontribusi pada pengurangan emisi yaitu konservasi energi, efisiensi energi, dan penggunaan energi baru terbarukan (EBT).

Kota Cimahi dapat menirukan pemanfaatan EBT yang dilakukan pada Kabupaten/Kota lain, seperti Kabupaten/Kota Sukabumi. Dikutip dari detik.com, Kabupaten/Kota Sukabumi memasang sebanyak 350 unit Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya.

Pemanfaatan EBT (seperti tenaga surya) dapat mengurangi timbulan emisi karbon yang mengancam kesehatan pernapasan, kelestarian alam dan iklim.

2.3.5.9 Pengawasan Dokumen Persetujuan Lingkungan

Tindak lanjut untuk menjaga kualitas udara salah satunya menggunakan instrumen persetujuan lingkungan (Amdal, UKL-UPL dan SPPL). Di tahun 2023, sebanyak 34 SPPL dan 4 UKL-UPL telah diterbitkan oleh Pemerintah Kota Cimahi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan. Kualitas udara yang buruk dapat menyebabkan pemerintah mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang lebih ketat, seperti peraturan emisi industri yang lebih ketat.

2.4 Risiko Bencana

Menurut UN-ISDR (*United Nations International Strategic of Disaster Reduction*) tahun 2009, risiko bencana adalah potensi kerugian yang diakibatkan bencana terhadap nyawa, status Kesehatan, penghidupan, aset dan layanan yang dapat terjadi pada satu komunitas atau masyarakat tertentu selama jangka waktu tertentu di masa mendatang. Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia yang dikeluarkan oleh BNPB, pada tahun 2021 Kota Cimahi memiliki skor risiko bencana sebesar 91,71 dengan kelas risiko sedang, sedangkan pada tahun 2022 Kota Cimahi memiliki skor risiko bencana sebesar 82,01 dengan kelas sedang. Analisis risiko bencana merumuskan informasi rawan bencana dan faktor-faktor pendorong terjadinya bencana yang berpotensi menimbulkan bencana alam di Kota Cimahi serta respons yang diberikan oleh pemerintah Kota Cimahi. Analisis risiko bencana menggunakan Tabel-44, namun beberapa tabel lainnya juga digunakan untuk menunjang analisis. Adapun kerangka kerja analisis DPSIR Isu Risiko Bencana dapat dilihat pada **Gambar 2. 70.**



Gambar 2. 70 Framework DPSIR Isu Risiko Bencana

(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

2.4.1 Driving Force

2.4.1.1 Letak Geografis Kota Cimahi

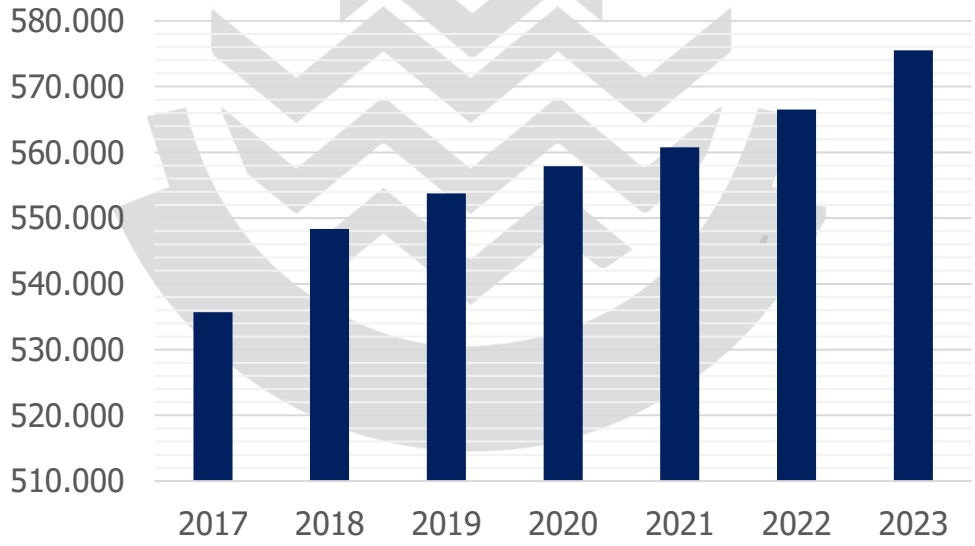
Sejak awal, potensi bencana sangat dipengaruhi oleh profil geografi dan kependudukan, profil geologi, profil lingkungan, topografi, dan iklim suatu daerah. Kota Cimahi memiliki kondisi topografi ketinggian yang beragam mulai dari 685 mdpl hingga 1.075 mdpl, hal ini menjadi pendorong timbulnya risiko bencana di suatu wilayah, seperti bencana tanah longsor dan banjir di dataran yang lebih rendah. Keadaan topografi seperti ini akan diperburuk dengan perubahan lahan yang mengganggu kestabilan tanah, seperti dibangunnya perumahan atau bangunan lainnya. Di wilayah Kota Bandung terdapat struktur Sesar Lembang dengan Panjang jalur sesar yang

mencapai 30 Km. Wilayah Kecamatan Cimahi Utara termasuk ke dalam wilayah yang berisiko gempa cukup tinggi.

2.4.1.2 Pertumbuhan Penduduk dan Perkotaan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa faktor pendorong berupa kepadatan penduduk akan memengaruhi perubahan lahan seiring dengan bertumbuhnya penduduk di suatu kota. Kejadian bencana dapat terjadi juga akibat faktor manusia, maka salah satu pemicu utama bencana yaitu dari ulah manusia itu sendiri. Risiko bencana dapat dipicu oleh pertumbuhan penduduk di suatu wilayah.

Semakin tinggi jumlah penduduk akan diikuti oleh peningkatan perubahan penggunaan lahan, hal ini akan memicu kejadian bencana yang cukup serius. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kota Cimahi mengalami kenaikan sebesar 1,59%.



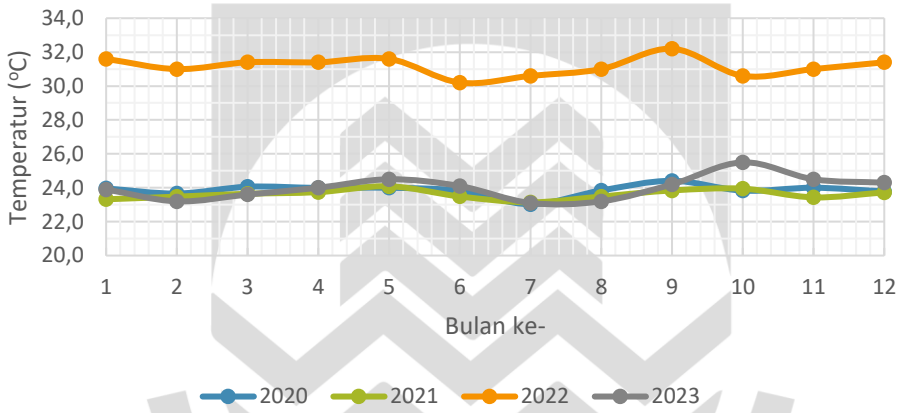
Gambar 2. 71 Tren Jumlah Penduduk di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, 2023, diolah)

2.4.1.3 Perubahan Iklim

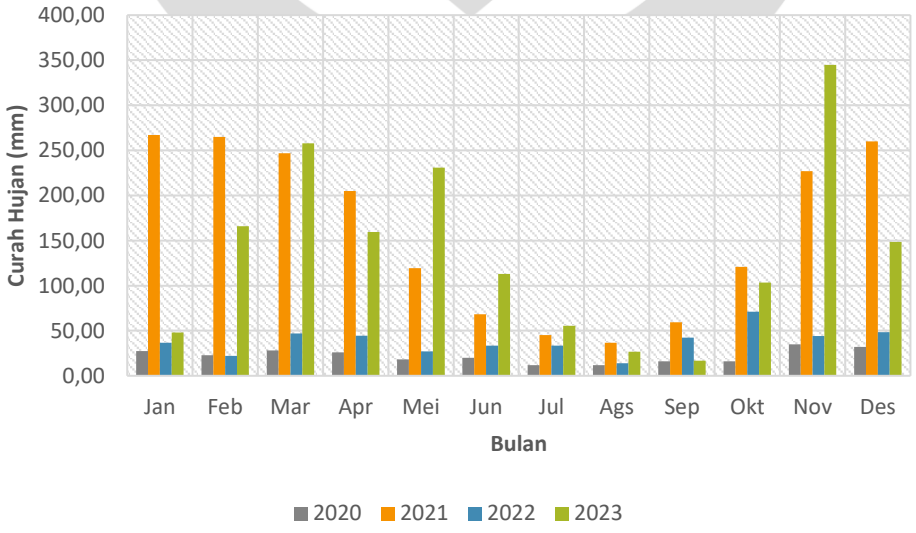
Perubahan iklim dapat menyebabkan percepatan erosi dan aliran air di permukaan, kekeringan, kelebihan air yang selanjutnya terjadi banjir dan

longsor (Utami, 2019). Perubahan iklim juga menyebabkan curah hujan tinggi serta menyebabkan banjir. Di Kota Cimahi terjadi perubahan suhu yang cukup signifikan dari tahun 2022 menuju tahun 2023. Dimana pada tahun 2022 suhu rata-rata bulanan berada di rentang antara 30^{o}C – 32^{o}C, namun pada tahun 2023 suhu rata-rata bulanan berada diantara 22^{o}C - 24^{o}C (**Gambar 2. 72**). Perubahan iklim juga dapat menyebabkan curah hujan ekstrem yang lebih sering dan lebih intens, sehingga meningkatkan risiko banjir yang lebih besar. Pada tahun 2023, curah hujan paling tinggi terdapat di Bulan November dengan intensitas 344,8 mm (**Gambar 2. 73**).



Gambar 2. 72 Tren Perubahan Suhu Di Kota Cimahi

(Sumber: Kota Cimahi dalam Angka Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, diolah)



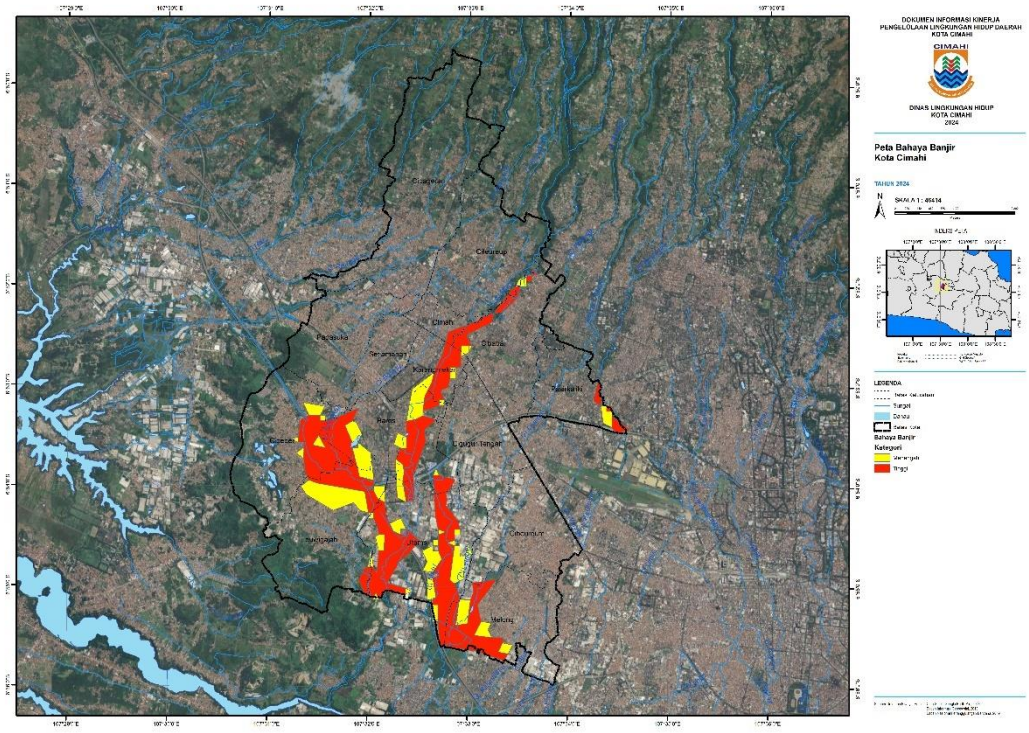
Gambar 2. 73 Tren Curah Hujan di Bulanan di Kota Cimahi

(Sumber: Kota Cimahi dalam Angka Tahun 2021, 2022, 2023, 2024, diolah)

2.4.2 Pressure

2.4.2.1 Kerentanan Infrastruktur

Kerentanan infrastruktur menjadi tekanan terhadap bencana karena infrastruktur yang lemah atau tidak memadai dapat memperburuk dampak bencana dan menghambat proses pemulihan. Pembangunan yang tidak terkoordinasi dan tidak terkendali dapat mengubah aliran air, mengurangi lahan penyerapan air, dan meningkatkan risiko banjir serta genangan di kota. Pembangunan yang mengubah tata guna lahan dapat mengurangi kapasitas air tanah dan meningkatkan risiko kekeringan. Selain itu, pembangunan infrastruktur di area yang rawan bencana seperti daerah rawan gempa, banjir, atau tanah longsor semakin menambah tekanan terhadap risiko bencana yang ada. Pembangunan yang tidak memperhatikan mitigasi risiko bencana dapat memperburuk situasi saat terjadi bencana, seperti kerusakan infrastruktur yang luas dan lambannya proses pemulihan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan konstruksi yang memperhatikan ketahanan terhadap bencana menjadi kunci penting dalam mengurangi kerentanan dan meminimalkan dampak buruk bencana di masa depan.



Gambar 2. 74 *Overlay* Peta Bahaya Banjir dengan Citra Satelit Kota Cimahi

(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

2.4.2.2 Kerentanan Sosial dan Ekonomi

Kejadian bencana dapat terjadi juga akibat faktor manusia, maka salah satu pemicu utama bencana yaitu dari ulah manusia itu sendiri. Risiko bencana dapat dipicu oleh pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk rata-rata di Kota Cimahi mencapai 13.563 jiwa/km^2. Semakin padatnya penduduk di suatu wilayah mengakibatkan tingginya permintaan lahan untuk kebutuhan bermukim. Tingkat pendidikan yang rendah dapat berkontribusi pada kurangnya kesadaran tentang risiko bencana dan tindakan pencegahan yang dapat diambil. Kerentanan sosial dan ekonomi menjadi faktor penekan terhadap kebencanaan karena ketidakmampuan masyarakat untuk mempersiapkan diri, merespons, dan pulih dari bencana.

2.4.2.3 Kerentanan Lingkungan

Kerentanan lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap kebencanaan karena lingkungan yang rusak atau tidak dikelola dengan baik dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam. Vegetasi memainkan peran penting dalam menahan tanah. Deforestasi atau hilangnya vegetasi menyebabkan tanah kehilangan stabilitas, sehingga lebih rentan terhadap tanah longsor dan erosi. Vegetasi berfungsi untuk menyerap air hujan. Hilangnya penutup vegetasi mengurangi kapasitas tanah untuk menyerap air, meningkatkan aliran permukaan yang dapat menyebabkan banjir. Perubahan tata guna lahan yang tidak terencana, seperti urbanisasi yang cepat tanpa infrastruktur yang memadai, dapat meningkatkan risiko banjir, tanah longsor, dan polusi. Pengelolaan air yang buruk, termasuk drainase yang tidak memadai dan pembuangan limbah sembarangan, menyebabkan banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau.

2.4.3 State

2.4.3.1 Frekuensi dan Intensitas Bencana

Selama tahun 2023, Kota Cimahi dilanda bencana beberapa bencana. Adapun bencana yang terjadi di Kota Cimahi yaitu bencana kebakaran, banjir, angin kencang, tanah longsor, dan pergerakan tanah. Tercatat sebanyak 163 kejadian bencana yang terjadi di Kota Cimahi. Detail data kebencanaan yang terjadi di Kota Cimahi selama tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-44. Rekapitulasi data kebencanaan dapat dilihat pada **Tabel 2. 10.**

Tabel 2. 10 Jumlah dan Lokasi Kejadian Bencana Di Kota Cimahi

Kecamatan	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian
Cimahi Utara	Angin Kencang	21
	Pergerakan Tanah	6
	Banjir	1
	Tanah Longsor	11
	Kebakaran	7
	Kekeringan	23
Cimahi Tengah	Angin Kencang	17
	Pergerakan Tanah	0
	Banjir	1
	Tanah Longsor	0
	Kebakaran	0
	Kekeringan	22
Cimahi Selatan	Angin Kencang	15
	Pergerakan Tanah	0
	Banjir	15
	Tanah Longsor	4
	Kebakaran	10
	Kekeringan	10

Sumber: BPBD Kota Cimahi, 2023

2.4.3.2 Kerusakan Infrastruktur dan Properti

Kota Cimahi sering menghadapi berbagai bencana alam yang menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dan properti. Selama tahun 2023, perkiraan kerugian akibat bencana mencapai ±Rp2.413.450.000,00. Angin kencang, misalnya, dapat merusak atap rumah, merobohkan pohon, dan mengganggu jaringan listrik, menyebabkan gangguan besar dalam kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi. Pergerakan tanah dan tanah longsor, yang sering dipicu oleh curah hujan tinggi atau gempa bumi, dapat merusak jalan, jembatan, dan bangunan, serta menimbulkan risiko keselamatan bagi penduduk. Banjir yang terjadi akibat curah hujan berlebihan dan sistem drainase yang tidak memadai juga sering merusak properti, menghancurkan perabotan rumah tangga, dan mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar. Kebakaran, baik

yang disebabkan oleh faktor alam maupun kelalaian manusia, dapat menghancurkan rumah, bangunan komersial, dan fasilitas umum, serta menimbulkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan. Kekeringan, di sisi lain, dapat merusak lahan pertanian, mengurangi pasokan air bersih, dan yang semuanya berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat.

2.4.4 Impact

2.4.4.1 Dampak Sosial

Bencana alam di Kota Cimahi memiliki dampak sosial yang sangat signifikan dan luas. Ketika bencana seperti angin kencang, tanah longsor, banjir, kebakaran, dan kekeringan terjadi, masyarakat sering kali kehilangan tempat tinggal, properti, dan mata pencaharian, yang dapat menyebabkan tekanan emosional dan psikologis yang besar. Kehilangan tempat tinggal membuat banyak keluarga harus tinggal di tempat penampungan sementara dengan kondisi yang kurang memadai, sering kali menyebabkan over kapasitas dan penyebaran penyakit. Kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2023 menyebabkan sebanyak 1.778 korban mengungsi. Adapun jumlah korban mengungsi di masing-masing kecamatan di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Tabel 2. 11**. Dampak sosial lainnya adalah peningkatan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Bencana dapat menghancurkan aset produktif dan sumber daya ekonomi masyarakat, membuat mereka sulit untuk pulih secara finansial. Komunitas yang sudah rentan sebelum bencana cenderung mengalami dampak yang lebih parah, memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Jaringan sosial dan komunitas juga dapat terganggu akibat bencana, karena perpindahan penduduk dan hilangnya anggota keluarga atau teman dekat.

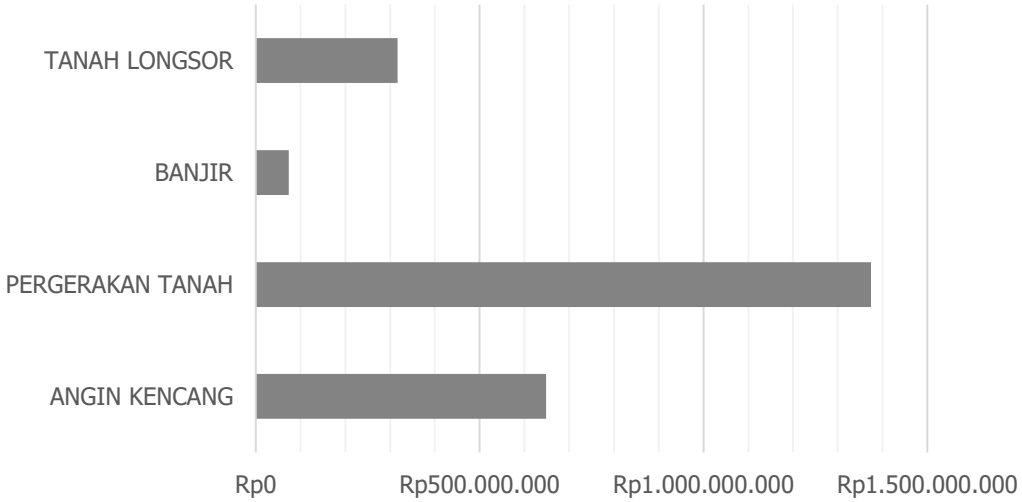
Tabel 2. 11 Jumlah Korban Mengungsi Akibat Bencana yang Terjadi

Jenis Bencana	Kecamatan	Jumlah Korban Mengungsi
Angin Kencang	Cimahi Utara	87
	Cimahi Tengah	11
	Cimahi Selatan	3
Pergerakan Tanah	Cimahi Utara	6
	Cimahi Tengah	0
	Cimahi Selatan	0
Banjir	Cimahi Utara	7
	Cimahi Tengah	0
	Cimahi Selatan	92
Tanah Longsor	Cimahi Utara	35
	Cimahi Tengah	0
	Cimahi Selatan	46
Kebakaran	Cimahi Utara	51
	Cimahi Tengah	0
	Cimahi Selatan	52
Kekeringan	Cimahi Utara	69
	Cimahi Tengah	38
	Cimahi Selatan	1.227

Sumber: BPBD Kota Cimahi, 2023

2.4.4.2 Kerugian Ekonomi

Kota Cimahi dengan segala karakteristik daerahnya, sering dilanda oleh Angin Kencang. Kejadian angin kencang atau angin puting beliung sering terjadi di daerah dengan kondisi suhu udara yang tidak stabil. Kondisi topografi Kota Cimahi yang beragam terutama lahan yang curam berpotensi memicu risiko bencana tanah longsor. Adapun kerugian material yang terjadi akibat bencana di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 75.**



Gambar 2. 75 Jumlah Perkiraan Kerugian Akibat Kejadian Bencana di Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: BPBD, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, 2023)

2.4.5 Response

2.4.5.1 Mitigasi Bencana

Pemerintah Kota Cimahi perlu melakukan berbagai upaya mitigasi bencana untuk meningkatkan ketahanan kota terhadap ancaman bencana alam. Pemerintah perlu mengidentifikasi dan memetakan wilayah yang rentan terhadap bencana, seperti daerah rawan banjir, tanah longsor, dan gempa bumi. Pemerintah dapat mengadopsi pendekatan proaktif dalam perencanaan tata ruang kota dengan memperhitungkan risiko bencana dalam pembangunan infrastruktur dan pemukiman. Strategi memperkuat tata ruang kota untuk mengurangi risiko bencana perlu dilakukan, misalnya dengan menghindari pembangunan di daerah rawan bencana atau meningkatkan drainase kota untuk mengurangi risiko banjir, atau melibatkan masyarakat dalam program pelatihan dan pendidikan bencana untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang risiko bencana dan bagaimana meresponsnya.



Gambar 2. 76 Sosialisasi Kampung Siaga Bencana Kota Cimahi

(Sumber: cimahikota.go.id, 2024)

2.4.5.2 Respons Darurat

Dalam menghadapi kebencanaan, pemerintah Kota Cimahi perlu menyusun dan melaksanakan upaya respons darurat yang efektif guna melindungi dan membantu masyarakat selama periode krisis. Pemerintah harus memiliki rencana respons darurat yang terperinci dan terkoordinasi untuk setiap jenis bencana yang mungkin terjadi, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau kebakaran. Rencana tersebut harus mencakup prosedur evakuasi yang jelas, alokasi sumber daya yang memadai, dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Pemerintah perlu memiliki tim

tanggap darurat yang terlatih dan siap bertindak dalam waktu singkat setelah terjadinya bencana. Tim ini harus dilengkapi dengan peralatan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pencarian dan penyelamatan, pertolongan medis darurat, dan distribusi bantuan kepada korban. Selain itu, kerjasama yang baik dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan relawan lokal juga penting untuk meningkatkan efektivitas respons darurat.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cimahi memiliki pelayanan *Public Safety Center* (PSC) 119 dalam rangka penguatan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT). Tujuan SPGTD adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kegawatdaruratan. Selain itu juga untuk mempercepat waktu penanganan (respon time) korban atau pasien gawat darurat dan menurunkan angka kematian serta kecacatan. Penyelenggaraan SPGDT terdiri atas sistem komunikasi gawat darurat, sistem penanganan korban atau pasien gawat darurat, dan sistem transportasi gawat darurat.



Gambar 2. 77 Sosialisasi *Public Safety* Center Kota Cimahi

(Sumber: Dinkes Kota Cimahi, 2023)

2.4.5.3 Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah terjadinya bencana, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi krusial bagi Pemerintah Kota Cimahi untuk memulihkan infrastruktur, ekonomi, dan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan evaluasi kerusakan dan kebutuhan pemulihan di berbagai sektor, seperti infrastruktur publik, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan. Selain

itu, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi juga harus mencakup pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak. Pemerintah perlu menyediakan bantuan keuangan, pelatihan keterampilan, dan program pemulihan ekonomi untuk membantu penduduk yang kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan akibat bencana.

2.4.5.4 Penghijauan

Kota Cimahi dengan tanggap melakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana dengan mengoptimalkan penggunaan lahan seperti yang direncanakan dalam RTRW tahun 2012-2032. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah ialah melakukan penghijauan yang dilakukan pada tahun 2024. Diharapkan kegiatan penghijauan tetap dilaksanakan setiap tahunnya.

Tabel 2. 12 Realisasi Penghijauan Kota Cimahi Tahun 2023

No.	Kecamatan	Penghijauan		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
1	Cimahi Utara	0,15	0,0954	1.590
2	Cimahi Selatan		0,0234	390

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

2.4.5.5 Pengadaan Sumur Resapan

Perubahan alih fungsi lahan di Kota Cimahi yang termasuk di wilayah Kawasan Bandung Utara (KBU) mengancam kelestarian area resapan air. Mengacu pada RTRW Kota Cimahi, kawasan resapan air termasuk ke dalam kawasan lindung. Pengadaan sumur resapan air hujan berguna untuk menambah ketersediaan air tanah, dan mendukung fungsi konservasi kawasan resapan air. Kawasan resapan air bermanfaat bagi kehidupan, salah satunya sebagai pengendali banjir dan pencegahan kekeringan saat musim kemarau.

2.4.5.6 Inovasi Lingkungan

Program kerja Lingkungan merupakan salah satu cara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bagian ini akan memuat inisiatif-inisiatif dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Inisiatif yang dilakukan dalam bentuk peningkatan kapasitas lembaga daerah, inisiatif yang dikembangkan oleh masyarakat dan lain sebagainya. Program kerja lingkungan Kota Cimahi yang dapat menjadi salah satu respons diantara lain:

a) Zero Waste

Zero Waste City merupakan inovasi lingkungan andalan pemerintah Kota Cimahi dalam pengelolaan sampah. Program Cimahi *Zero Waste City* 2037 berisikan perencanaan jangka pendek hingga panjang bersama dengan *stakeholder* mengenai pengelolaan sampah dan strategi dalam penekanan angka timbulan sampah dengan mengurangi sampah sejak dari sumber.

b) Cimahi Walagri

"Wahana lega, lingkungan asri" adalah kepanjangan dari Cimahi Walagri. Program Cimahi Walagri ini bertujuan untuk mewujudkan kondisi sungai yang lebar. Membuat kondisi sungai agar sesuai dengan kapasitas optimum untuk mengalirkan air, sehingga perumahan dan permukiman yang berada di wilayah daerah aliran sungai dapat terbebas dari banjir, memiliki ruang terbuka hijau hingga dapat terciptanya lingkungan asli serta masyarakat agar dapat hidup nyaman dan sehat.

c) Pelestarian Kampung Adat

"Teu Nyawah Asal Boga Pare, Teu Boga Pare Asal Boga Beas, Teu Boga Beas Asal Bisa Nyangu, Teu Nyangu Asal Dahar, Teu Dahar Asal Kuat" merupakan salah satu prinsip hidup yang dimiliki oleh masyarakat di salah satu wilayah di Kota Cimahi yaitu Kampung Cireundeu. Dengan

prinsip yang dianut oleh masyarakat lokal kampung Cirendeu, Kampung Cirendeu merupakan daerah yang dapat mempertahankan keberadaan ruang terbuka hijau di Kota Cimahi.

d) Pengembangan Varietas Lokal

Varietas lokal dikembangkan dengan Program Toko Tani Indonesia Center (TTIC). Dimana TTI merupakan sebuah wadah pemasaran hasil pertanian lokal yang ada di Kota Cimahi. Pengembangan varietas lokal ini menjaga ruang terbuka hijau yang ada di Kota Cimahi, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan hidup kedepannya.

e) Pemberdayaan Komunitas Lingkungan

Pemberdayaan Komunitas Lingkungan akan melibatkan masyarakat dalam keikutsertaannya dalam mengelola lingkungan menjadi lebih baik lagi. Program pemberdayaan masyarakat akan komunitas lingkungan di Kota Cimahi antara lain adalah Kader dasa wisma Pemantau Jentik, Haur Hiber, dan Sekolah Berkebun. Diharapkan dengan program-program tersebut, dapat meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang ada di Kota Cimahi.

f) Goyang Gotik

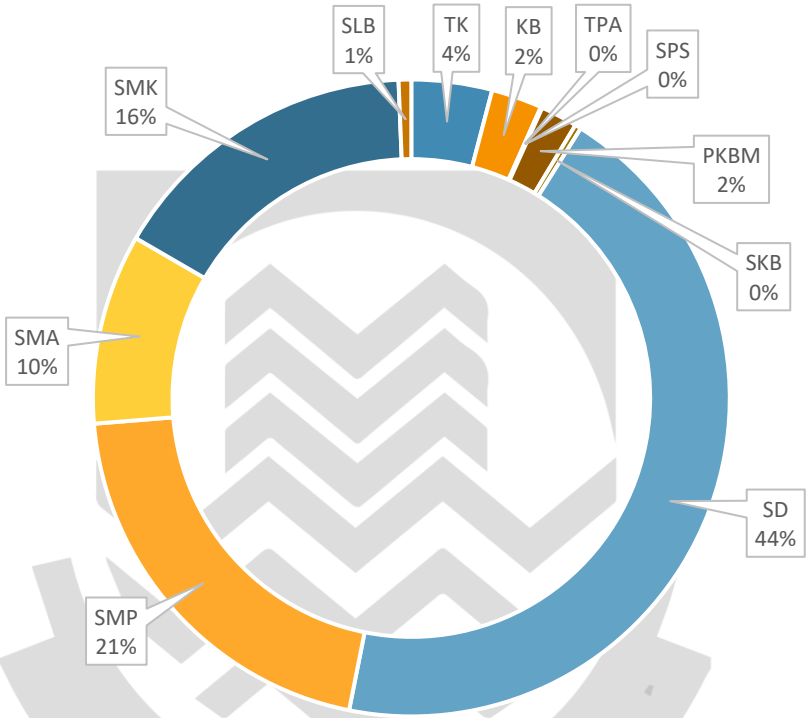
Goyang Gotik merupakan akronim dari "Gotong Royong Nabung Kanggo Tangki Septik". Program Goyang gotik ini merupakan salah satu penyedia jasa pembuatan tangki septik. Dengan adanya program tersebut, diharapkan Kota Cimahi akan sehat baik dari segi sanitasi lingkungan ataupun segi kesehatan masyarakat. Hal ini akan berdampak pada lingkungan hidup yang lebih baik.

g) Sistem Informasi Lingkungan

Sistem Informasi Lingkungan dimaksudkan untuk menyediakan basis data dan layanan informasi yang akurat, cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.

2.4.5.7 Sosialisasi Kebersihan Lingkungan & Sekolah Informal

Rendahnya tingkat pendidikan di Kota Cimahi juga menjadi salah satu faktor pemicu adanya kejadian bencana. Salah satu solusinya adalah dengan mengadakan sekolah informal kepada masyarakat yang tidak bersekolah, mengingat jumlah penduduk yang tidak bersekolah cukup banyak.



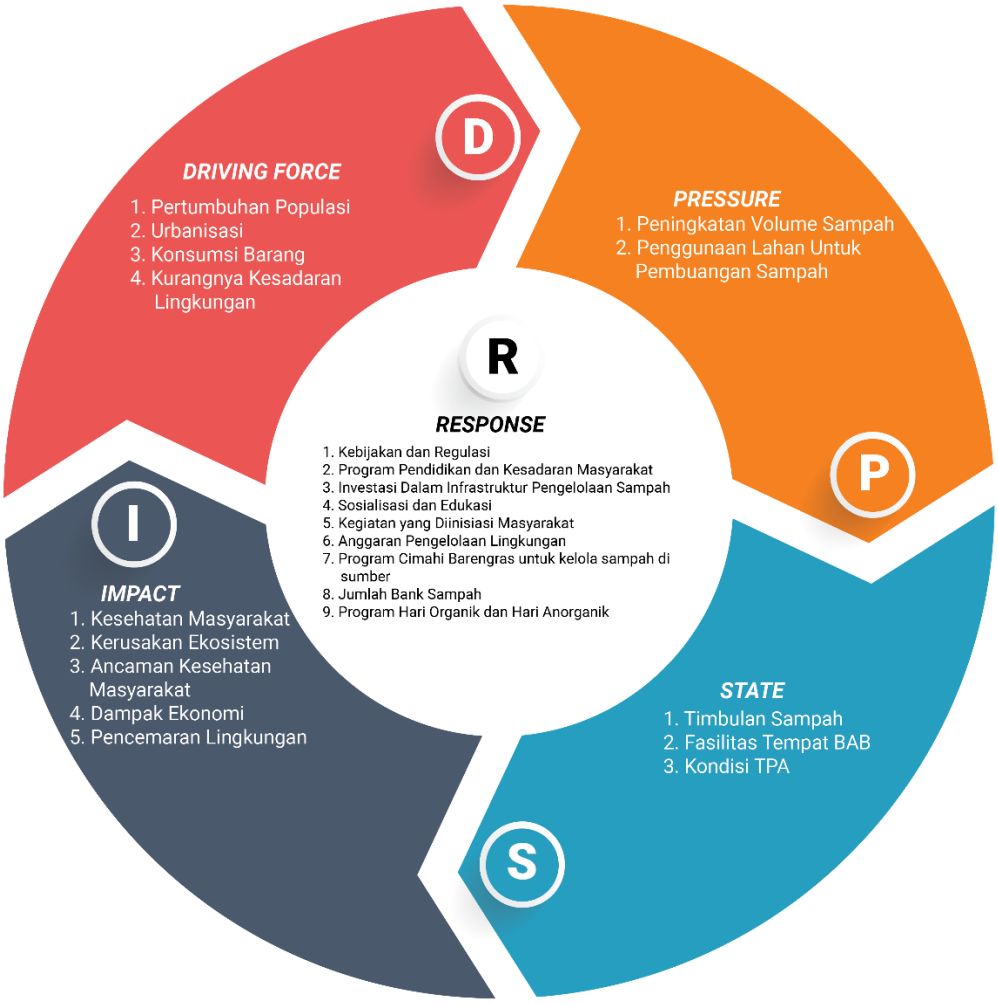
Gambar 2. 78 Tingkat Pendidikan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: Dapodikdasmen, 2023)

2.5 Perkotaan/Persampahan

Permasalahan di perkotaan biasanya ditimbulkan dari perkembangan penduduk dan kegiatan masyarakat perkotaan yang semakin sulit dikontrol sehingga sering kali menimbulkan banyak persoalan. Indikator yang menunjukkan bahwa suatu kota atau wilayah memiliki kondisi lingkungan

yang sehat adalah tingginya kesadaran masyarakat dalam memperhatikan kondisi lingkungan di sekitarnya. Pada sub bab ini akan mengkaji informasi permasalahan lingkungan hidup terkait perkotaan di Kota Cimahi dengan menganalisis data dari tabel 31, tabel 35, tabel 46 sampai tabel 47. Kerangka kerja analisis DPSIR isu perkotaan/persampahan dapat dilihat pada **Gambar 2. 79.**



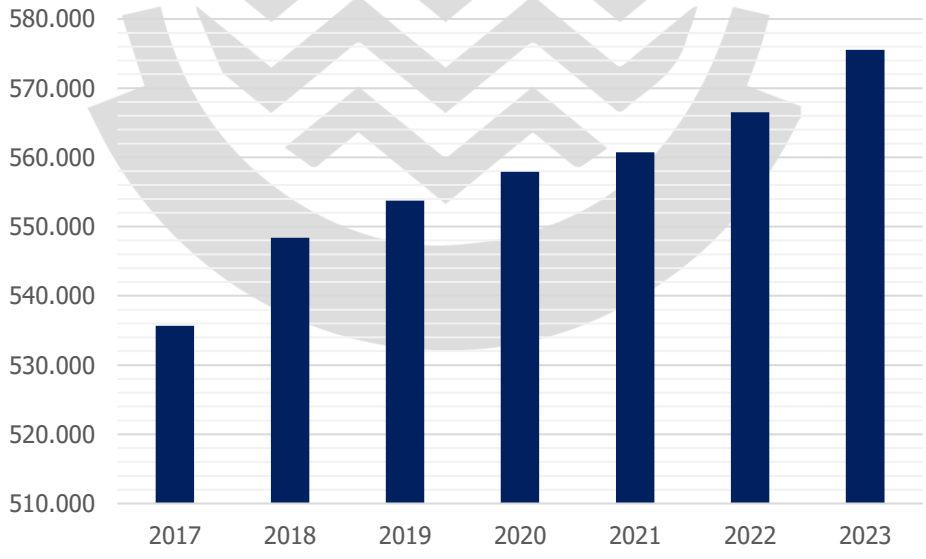
Gambar 2. 79 *Framework* Analisis DPSIR Isu Perkotaan/Persampahan

(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

2.5.1 Driving Force

2.5.1.1 Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat, Kota Cimahi disebut sebagai kota terpadat di Jawa Barat, bahkan di Indonesia. Kondisi ini terus berkembang mengingat luas wilayah Kota Cimahi yang hanya sekitar 40 kilometer persegi tidak sebanding dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kota Cimahi. Sejumlah faktor yang meningkatkan jumlah penduduk di Kota Cimahi di antaranya adalah faktor angka kelahiran hidup dan perpindahan penduduk. Jumlah penduduk menjadi faktor pemicu isu persampahan di Kota Cimahi, peningkatan jumlah penduduk maka semakin meningkatnya aktivitas warga dan dapat menimbulkan permasalahan lingkungan salah satunya timbulan sampah. Semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi pula timbulan sampahnya. Perkembangan kepadatan penduduk di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 80**.



Gambar 2. 80 Tren Jumlah Penduduk Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, 2023, diolah)

2.5.1.2 Urbanisasi

Urbanisasi yang cepat di Kota Cimahi membawa dampak signifikan terhadap timbulan sampah di kota tersebut. Pertumbuhan populasi yang pesat, perubahan gaya hidup, dan peningkatan konsumsi barang-barang kemasan menjadi faktor utama yang menyebabkan peningkatan jumlah sampah. Urbanisasi biasanya terjadi sebagai respons terhadap perkembangan industri dan ekonomi di kota yang menawarkan lapangan kerja yang lebih banyak, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik, serta berbagai fasilitas umum dan infrastruktur yang memadai. Berdasarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dalam Kota Cimahi Dalam Angka Tahun 2024, jumlah penduduk datang pada tahun 2023 sebesar 5.744 jiwa. Walaupun jumlahnya menurun dari tahun sebelumnya, namun hal ini menandakan Kota Cimahi kerap menjadi tempat bernaung masyarakat sehingga meninggalkan timbulan limbah padat.

2.5.1.3 Konsumsi Barang

Perubahan dalam gaya hidup konsumtif, pengembangan distribusi global dan strategi pemasaran, serta pengaruh teknologi memengaruhi jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan. Preferensi konsumen terhadap barang dengan kemasan berlebihan atau yang tidak ramah lingkungan dapat meningkatkan produksi sampah. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan pembangunan ekonomi, masyarakat cenderung mengonsumsi lebih banyak barang, termasuk barang-barang kemasan, produk konsumsi sehari-hari, dan barang-barang elektronik. Barang-barang kemasan, terutama yang terbuat dari plastik dan bahan tidak mudah terurai, menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap timbulan sampah di kota. Selain itu, tren konsumsi barang-barang elektronik yang cepat, seperti ponsel,

komputer, dan perangkat elektronik lainnya, juga berdampak pada peningkatan limbah elektronik yang sulit didaur ulang.

2.5.1.4 Kurangnya Kesadaran Lingkungan

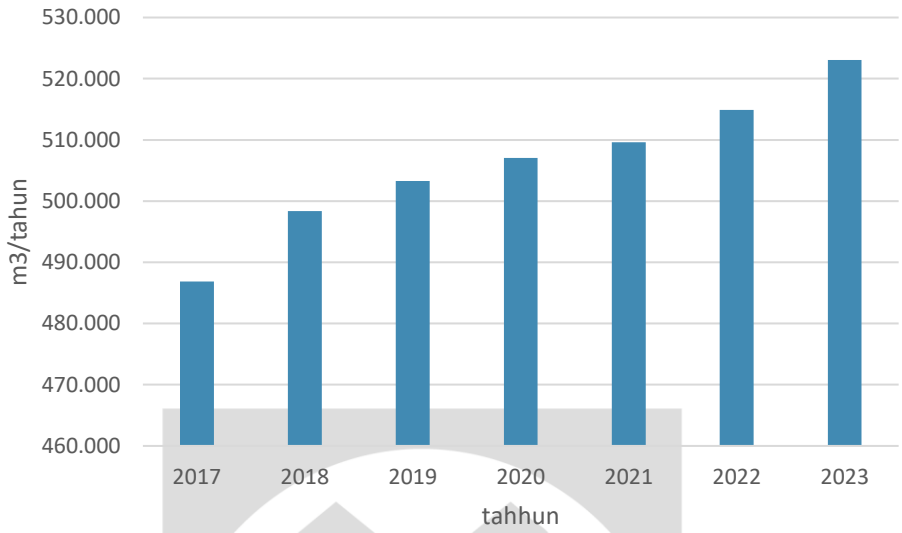
Kurangnya kesadaran lingkungan dapat menjadi faktor pemicu yang signifikan dalam meningkatkan timbulan sampah di Kota Cimahi. Kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan sampah dapat menyebabkan masyarakat tidak menyadari dampak negatif dari perilaku konsumsi dan pembuangan sampah yang tidak tepat. Selain itu, kurangnya akses terhadap infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai juga dapat menjadi faktor pemicu kurangnya kesadaran lingkungan. Jika masyarakat tidak memiliki akses yang mudah ke tempat pembuangan sampah yang terorganisir, fasilitas daur ulang, atau informasi tentang praktik pengelolaan sampah yang tepat, mereka mungkin cenderung membuang sampah secara sembarangan atau tidak memperhatikan cara yang lebih ramah lingkungan untuk membuangnya.

2.5.2 Pressure

2.5.2.1 Peningkatan Volume Sampah

Timbulan sampah di Kota Cimahi dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2023, timbulan sampah di Kota Cimahi diperkirakan sebesar 1.433,04 m^3/hari. Jika timbulan sampah tidak ditangani dengan baik, maka akan terjadi penumpukan sampah di TPS. Salah satu cara mengelola persampahan adalah penyediaan infrastruktur. Namun mengingat luas wilayah Kota Cimahi yang terbatas, maka perlu penanganan pengelolaan sampah yang lebih menitikberatkan pada pengelolaan sampah sejak di sumber. Perubahan penggunaan lahan di Kota Cimahi memberikan kesempatan kecil kepada pemerintah untuk menambah infrastruktur persampahan di Kota Cimahi. Masyarakat akan lebih mementingkan lahan

digunakan untuk pemukiman dibanding dengan penyediaan lahan sebagai infrastruktur pengelolaan sampah.



Gambar 2. 81 Timbulan Sampah Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023)

2.5.2.2 Penggunaan Lahan untuk Pembuangan Sampah

Penggunaan lahan untuk pembuangan sampah dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tekanan terhadap timbulan sampah yang semakin tinggi di Kota Cimahi. Ketika lahan yang tersedia untuk pembuangan sampah semakin berkurang, maka akan sulit untuk menemukan tempat yang aman dan sesuai. Penggunaan lahan yang tidak tepat untuk pembuangan sampah juga dapat meningkatkan risiko pencemaran air tanah dan sungai, terutama jika lokasi pembuangan tersebut tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai untuk mengelola tumpahan dan limbah cair yang dihasilkan oleh sampah.

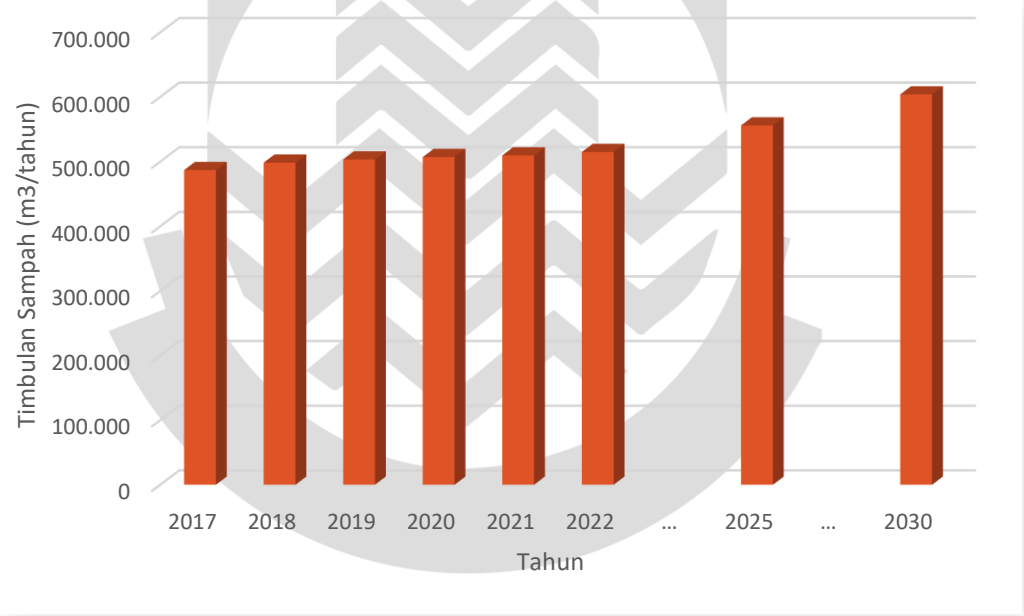
Semenjak kejadian kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir Sarimukti pada 22 Agustus 2023, berbagai strategi telah dilakukan Pemkot Cimahi untuk mengatasi permasalahan sampah. Pemerintah Kota Cimahi melakukan *upscale* tiga Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS)

menjadi TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Tiga TPS tersebut adalah TPS Pasar Atas, TPS Leuwigoong dan TPS Cibeber.

2.5.3 State

2.5.3.1 Timbulan Sampah Kota Cimahi

Pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan suatu kota. Semakin tingginya jumlah penduduk dengan kesadaran lingkungan yang rendah akan berdampak pada permasalahan lingkungan. Pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah limbah yang dihasilkan. Timbulan sampah di Kota Cimahi pun tiap tahun kian meningkat seperti digambarkan pada **Gambar 2. 82**.



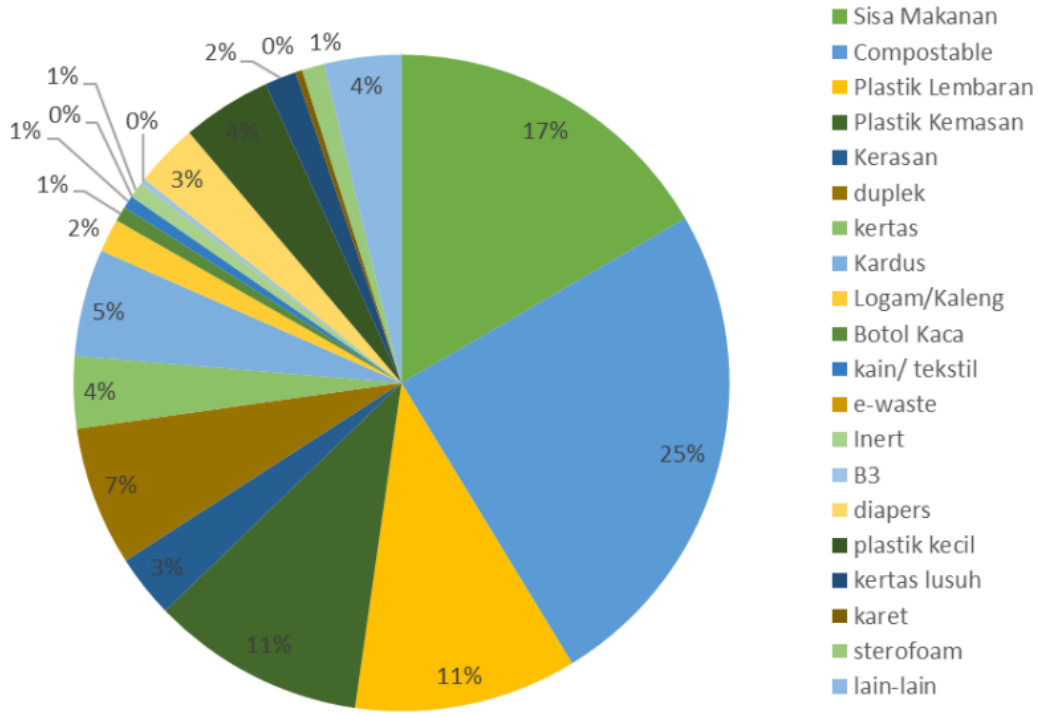
Gambar 2. 82 Proyeksi Timbulan Sampah Kota Cimahi Pertahun

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023)

Proyeksi timbulan sampah Kota Cimahi telah dijelaskan pada **Gambar 2. 82** dimana Timbulan sampah pada tahun 2023 mencapai 1.433,04 m^3 per hari dan akan terus meningkat. Sebagian besar sampah ditimbulkan dari Kecamatan Cimahi Selatan. Distribusi timbulan sampah di Kecamatan

Cimahi Selatan menimbulkan lebih banyak sampah karena jumlah penduduknya lebih banyak dari dua kecamatan lainnya. Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Utara masing-masing berkontribusi 29% timbulan sampah di Kota Cimahi, sedangkan Kecamatan Cimahi Selatan berkontribusi sebanyak 42% timbulan sampah Kota Cimahi.

Dikutip dari pikiran-rakyat.com, komposisi sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Cimahi masih didominasi sampah organik yang mencapai 50 persen. Sampah organik dapat dimanfaatkan menjadi kompos, gas metana (kompor)/biodigester, pupuk cair, sedangkan anorganik banyak yang mempunyai nilai ekonomi, bisa di daur ulang atau digunakan kembali. Komposisi sampah Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 83.**



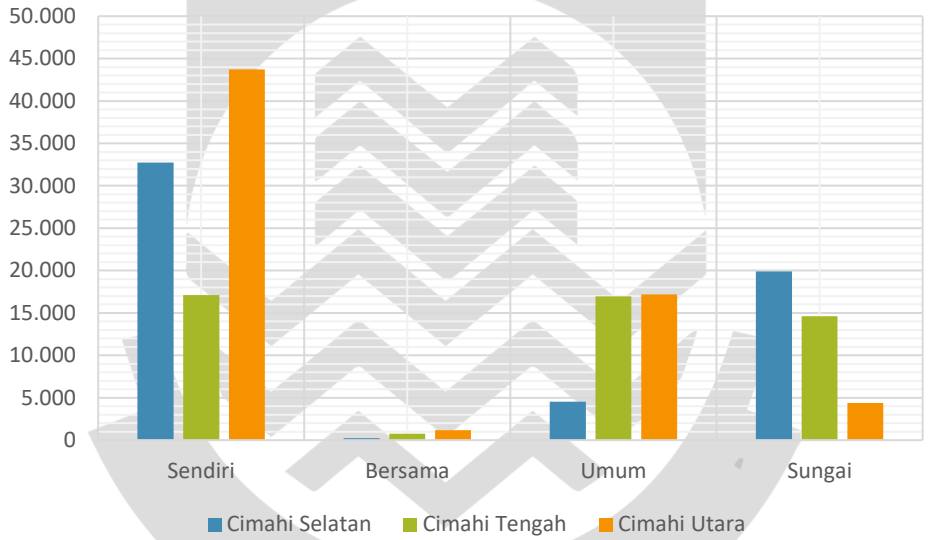
Gambar 2. 83 Komposisi Sampah Kota Cimahi Tahun 2023

(Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat, 2023)

2.5.3.2 Fasilitas Tempat Buang Air Besar

Sarana fasilitas buang air besar sebagai indikator kemampuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

Berdasarkan data, tercatat masyarakat yang membuang air besarnya ke sungai berada di Kelurahan Melong, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Utama, Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Karang Mekar. Keadaan ini memicu perilaku hidup tidak sehat yaitu melakukan Buang Air Besar (BAB) di tempat yang tidak memadai dan berpotensi mencemari badan air. Fasilitas tempat buang air besar masyarakat di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 84,** sebanyak 93.564 RT telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri di Kota Cimahi, dan sebanyak 2.197 RT memiliki tempat buang air besar bersama. Namun terdapat 38.919 RT yang masih membuang air besarnya ke sungai.



Gambar 2. 84 Jumlah Fasilitas Tempat Buang Air Besar Masyarakat di Kota Cimahi

(Sumber: Dinas Kesehatan dan DPKP Kota Cimahi, 2023)

2.5.3.3 Tempat Pengolahan Akhir Sampah

Permasalahan terbesar Kota Cimahi dalam penanganan sampah adalah belum adanya Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) mandiri di Kota Cimahi. Sulitnya Kota Cimahi dalam pencarian lahan menjadi penyebab utama dalam keterbatasan Kota Cimahi dalam menangani sampahnya. Saat ini Kota Cimahi masih menggunakan TPA

Regional Sarimukti sebagai satu-satunya tempat pemrosesan akhir sampah. Sampah yang terangkut dari Kota Cimahi akan dibawa menuju TPPAS Regional Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat. Namun karakteristik TPPAS tersebut tidak dapat dibilang layak untuk kondisi saat ini, kondisi karakteristik TPPAS Sarimukti dapat dilihat pada **Tabel 2. 13**

Tabel 2. 13 Volume Eksisting TPPAS

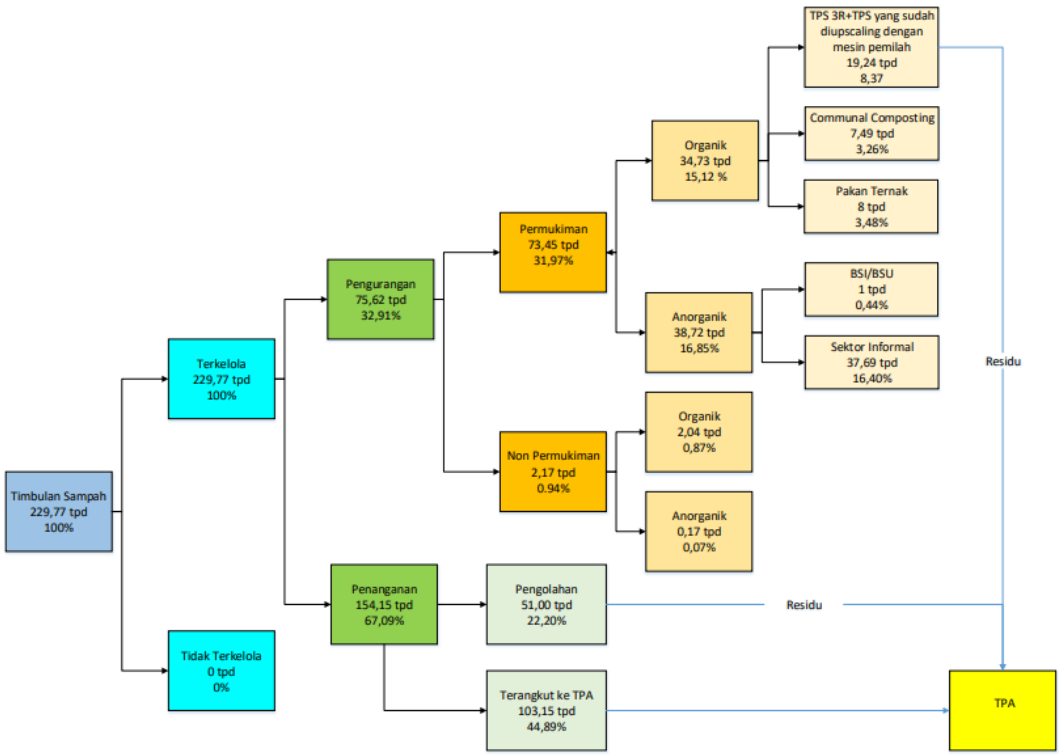
Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (m^3)	Tahun	Volume Eksisting (m^3)
TPPAS Regional Sarimukti	Open Dumping	25,5	6.135,91 m^3/hari	2018	29.656.900
				2019	32.455.401
				2020	32.539.045
				2021	34.003.491
				2022	35.434.319
				2023	36.684.093

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

2.5.3.4 Neraca Pengelolaan Sampah Kota Cimahi

Neraca pengelolaan sampah adalah sebuah laporan yang mencatat jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan, diolah, didaur ulang, dan dibuang dalam suatu wilayah atau sistem tertentu dalam periode waktu tertentu. Laporan neraca pengelolaan sampah bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi efisiensi sistem pengelolaan sampah serta dampaknya terhadap lingkungan. Pada tahun 2022, jumlah timbulan sampah yang tercatat oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi sebanyak 100.542,32 ton/tahun. Jumlah sampah yang dikelola sebesar 77,09% atau 77.503,88 ton/tahun dan jumlah sampah tidak terkelola mencapai 22,91% atau 23.038,44 ton/tahun. Neraca pengelolaan sampah di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 85**. Neraca pengelolaan sampah adalah alat penting dalam memantau kinerja sistem pengelolaan sampah suatu daerah. Data yang dikumpulkan dari neraca pengelolaan sampah dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait untuk mengevaluasi kebijakan dan

program pengelolaan sampah yang ada, serta merancang strategi yang lebih efektif untuk mengurangi dampak negatif sampah pada lingkungan.



Gambar 2. 85 Neraca Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi Tahun 2024

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023)

2.5.4 Impact

2.5.4.1 Kesehatan Masyarakat

Dampak pertama dari permasalahan persampahan yaitu timbulnya vektor penyakit akibat dari kotornya lingkungan akibat sampah dan bau yang tidak nyaman yang berada di area sekitar pemukiman penduduk. Penyakit yang dapat disebabkan karena pengelolaan sampah yang kurang baik dapat berupa penyakit langsung seperti virus dan bakteri yang ditularkan langsung dari kontak antara sampah dan masyarakat, penyakit tidak langsung dapat ditularkan melalui vektor perantara seperti serangga maupun hewan. Pada **Tabel 2. 14** ditampilkan jumlah penderita penyakit

yang umum terjadi karena pengelolaan lingkungan yang kurang baik seperti diare, kolera, ISPA, dan sebagainya yang telah didata oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Penyakit yang diderita oleh masyarakat di Kota Cimahi merupakan salah satu buntut dari permasalahan persampahan di Kota Cimahi karena pengelolaan sampah yang kurang optimal. Bibit penyakit bisa berkembang akibat tumpukan sampah, sampah yang dibakar juga bisa menjadi indikasi munculnya penyakit pernapasan. Sampah yang menumpuk dapat menjadi tempat berkembangbiaknya vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan nyamuk. Ini dapat menyebabkan penyebaran penyakit seperti demam berdarah, malaria, leptospirosis, dan penyakit gastrointestinal seperti diare dan kolera.

Tabel 2. 14 Jumlah Penyakit Utama yang Diderita Masyarakat

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1	*Acute upper respiratory infections*	64.019
2	*Hypertensive diseases*	35.126
3	*Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws*	29.371
4	*Diseases of oesophagus, stomach and duodenum*	18.435
5	*Soft tissue disorders*	13.871
6	*Diabetes mellitus*	13.065
7	*Dermatitis and eczema*	9.000
8	*Intestinal infectious diseases*	8.204
9	*Tuberculosis*	7.295
10	*Dorsopathies*	5.415
11	*Chronic lower respiratory diseases*	5.392
12	*Ischaemic heart diseases*	5.384
13	*Other forms of heart disease*	4.425
14	*Arthrosis*	3.865
15	*Infections of the skin and subcutaneous tissue*	3.740

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
16	*Disorders of ocular muscles, binocular movement, accommodation and refraction*	3.599
17	*Cerebrovascular diseases*	3.561
18	*Pediculosis, acariasis and other infestations*	3.344
19	*Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders*	3.112
20	*Episodic and paroxysmal disorders*	2.683

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023

2.5.4.2 Kerusakan Ekosistem

Kerusakan ekosistem merupakan salah satu dampak serius dari timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Ketika sampah dibuang secara sembarangan, terutama di area terbuka seperti sungai, atau lahan kosong, sampah tersebut dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem yang sensitif. Plastik, bahan kimia, dan limbah lainnya dapat mencemari air tanah, sungai, dan laut, menyebabkan kerusakan pada habitat air dan mengancam keberlangsungan hidup makhluk hidup yang bergantung pada lingkungan tersebut. Selain itu, sampah yang terbuang di lahan terbuka dapat menyebabkan kerusakan habitat alami dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya biodiversitas, penurunan kualitas tanah, dan penurunan produktivitas pertanian. Selain itu, pembakaran sampah yang tidak terkontrol dapat menghasilkan polusi udara yang berbahaya, menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia dan hewan, serta merusak tanaman dan vegetasi di sekitarnya. Dengan demikian, kerusakan ekosistem merupakan dampak yang serius dari timbulan sampah yang tidak terkelola dengan baik, dan menuntut tindakan yang segera dan efektif untuk mengurangi timbulan sampah dan melindungi lingkungan hidup.

2.5.4.3 Dampak Ekonomi

Efektivitas pengelolaan sampah dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi mulai dari biaya pengelolaan hingga peluang ekonomi baru. Pengelolaan sampah yang efektif dapat mengurangi insiden penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak higienis, seperti penyakit pernapasan dan diare. Ini dapat mengurangi biaya kesehatan bagi masyarakat dan pemerintah.

2.5.5 Response

2.5.5.1 Kebijakan dan Regulasi

Kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah yang efektif di Kota Cimahi dapat memperbaiki masalah persampahan dengan cara menyediakan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penerapan peraturan yang ketat mengenai pembuangan sampah ilegal dan sanksi yang tegas bagi pelanggar dapat mengurangi praktik pembuangan sampah sembarangan. Selain itu, pemerintah kota dapat mengembangkan program pengurangan sampah di sumbernya. Aturan terkait pengelolaan sampah di Kota Cimahi telah tertuang dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 254 Tahun 2019 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.

2.5.5.2 Program Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Program pendidikan dan kesadaran masyarakat merupakan upaya dalam mengatasi tekanan persampahan dengan meningkatkan pemahaman, mengembangkan keterampilan, dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan di masyarakat. Masyarakat dapat memainkan peran aktif dalam mengurangi dampak negatif persampahan terhadap lingkungan dan mengarah pada pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui:

1. Peningkatan kesadaran mengenai dampak persampahan
2. Peningkatan praktik pengelolaan sampah melalui pengurangan sampah, penggunaan kembali, pemilahan, dan daur ulang.
3. Penerapan kebijakan tentang pengurangan pembuangan penggunaan sampah plastik dan sekali pakai dan peningkatan fasilitas daur ulang
4. Peningkatan partisipasi komunitas guna membangun rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap lingkungan lokal.

2.5.5.3 Investasi dalam Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Dengan meningkatkan investasi, pemerintah kota dapat membangun dan memperbarui fasilitas pengelolaan sampah. Investasi ini juga mencakup pengadaan alat-alat pengangkut sampah yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Seperti fasilitas daur ulang, dan pusat pengolahan sampah organik. Dengan adanya fasilitas yang memadai, pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih cepat dan lebih teratur, mengurangi risiko penumpukan sampah yang dapat menyebabkan pencemaran dan masalah kesehatan. Investasi dalam infrastruktur harus dibarengi dengan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas kebersihan dan pengelola sampah, sehingga mereka dapat bekerja lebih efektif dan aman.

2.5.5.4 Sosialisasi dan Edukasi

Masyarakat di Kota Cimahi harus memiliki kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk meningkatkan kualitas lingkungan adalah dengan memberikan sosialisasi dan edukasi yang diperuntukkan perwakilan masyarakat dari seluruh kelurahan yang tinggal di sekitar bantaran sungai yang ada di Kota Cimahi. Hal ini berlandaskan rendahnya tingkat pendidikan di Kota Cimahi sehingga perilaku hidup bersih dan sehat belum tertanamkan. Tujuan kegiatan sosialisasi dan edukasi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya menjaga kebersihan sanitasi

lingkungan dan perairan, dan secara tidak langsung akan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat.



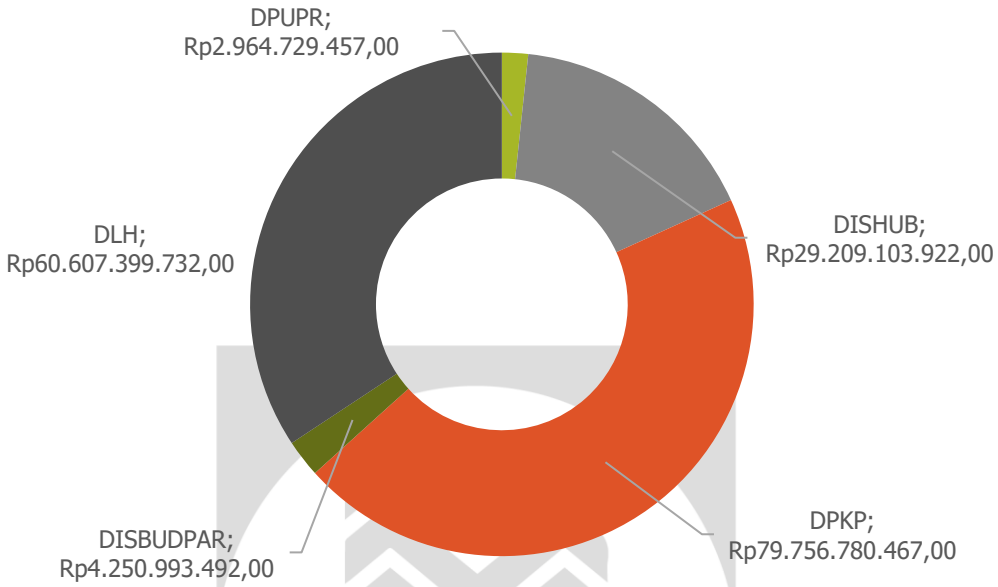
Gambar 2. 86 Sosialisasi Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi dengan *Junior Expert* dari *Japan International Cooperation Agency* (JICA)

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023)

2.5.5.5 Anggaran Pengelolaan Lingkungan

Dalam upaya mengatasi isu lingkungan persampahan yang terjadi di Kota Cimahi, Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLH) membuat program/kegiatan yang bersumber dari APBD. Respons pemerintah dalam upaya perbaikan pengelolaan lingkungan hidup

perkotaan atau persampahan di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 87.** Anggaran pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi dapat digunakan untuk mendanai program-program perbaikan lingkungan.



Gambar 2. 87 Jumlah Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kota Cimahi

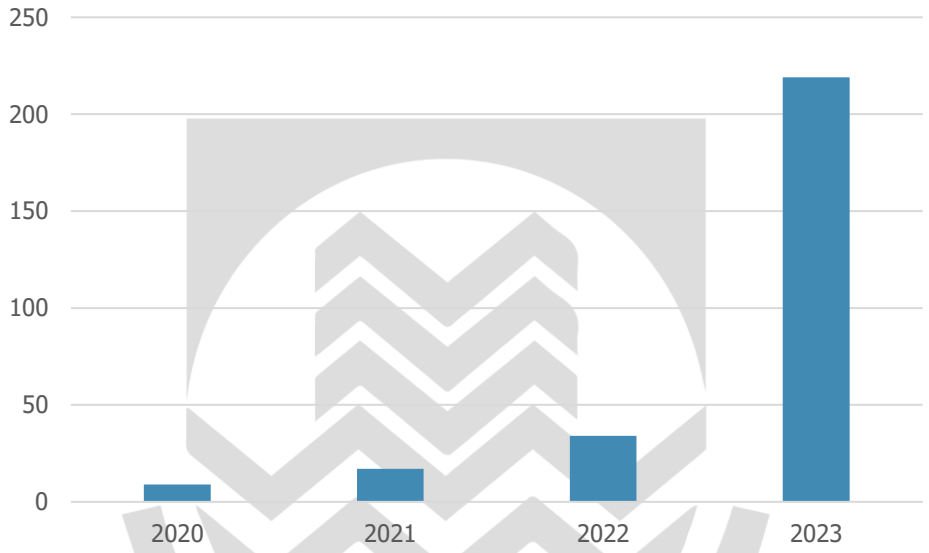
(Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Cimahi, 2023)

2.5.5.6 Bank Sampah

Sarana pengolahan sampah di Kota Cimahi dilakukan dengan cara komposter, *composting plant*, *reactor* kompos, biodigester, bank sampah dan TPS 3R. Alternatif upaya yang juga dapat dilakukan untuk mengurangi timbulan sampah dapat dilakukan di setiap kecamatan dengan cara mengelola sampah melalui Bank Sampah. Pada tahun 2022, jumlah Bank Sampah yang terdata sebanyak 34 unit dan tersebar di beberapa kecamatan.

Pemerintah Daerah Kota Cimahi, sejak beberapa waktu yang lalu telah menggalakkan program Bank Sampah Induk Cimahi (Bank Samici). Bank sampah ini mengusung konsep penampungan sampah kering atau sampah anorganik yang menggunakan manajemen seperti perbankan. Dengan kata

lain, pihak penyetor (dalam hal ini: masyarakat) diberi buku tabungan, lalu menabung sampah di bank sampah tersebut. Sampah yang ditabung nantinya akan dikalkulasi menjadi uang yang bisa ditarik oleh pihak penyetor. Bank Samici berlokasi di Jl. Kyai H. Usman Dhomiri No.15, Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat ini mendaur ulang sampah-sampah yang diterima hingga menjadi alat/benda yang bernilai jual dan bisa dipergunakan Kembali.



Gambar 2. 88 Jumlah Bank Sampah Tiap tahun di Kota Cimahi

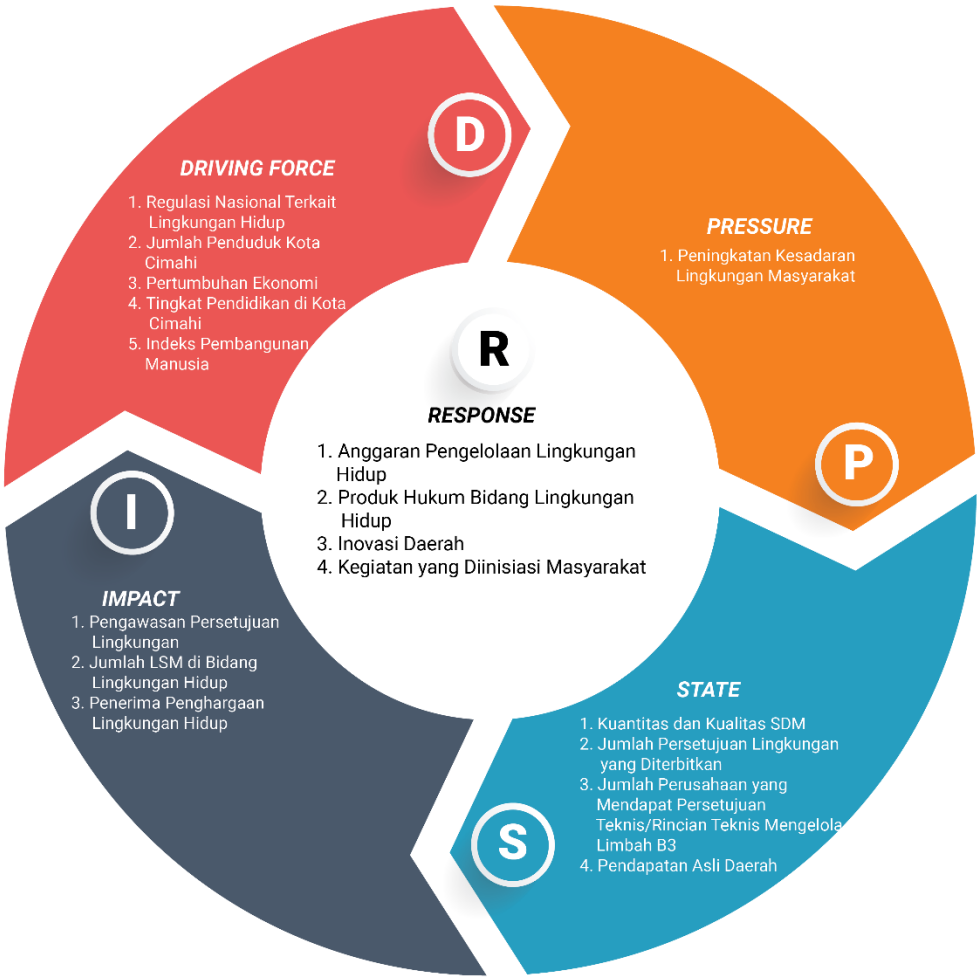
(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023)



Gambar 2. 89 Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Induk Cimahi (Samici)

2.6 Tata Kelola

Pada skala perkotaan, pengelolaan lingkungan hidup membutuhkan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan. Adanya tata kelola lingkungan hidup yang baik dapat memastikan Kota Cimahi tetap bisa melakukan pembangunan berkelanjutan di masa yang akan datang. Data pendukung yang digunakan dalam analisis isu tata kelola yaitu tabel-18, tabel-21, tabel-41, tabel-43, tabel-50, tabel-61. Kerangka kerja analisis DPSIR isu tata kelola dapat dilihat pada **Gambar 2. 90.**



Gambar 2. 90 *Framework* Analisis DPSIR Isu Tata Kelola

(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

2.6.1 Driving Force

Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu dari visi Kota Cimahi. Pernyataan misi mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik tersirat dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif, dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik. Adapun faktor pemicu yang memengaruhi tata kelola di Kota Cimahi sebagai berikut.

2.6.1.1 Regulasi Nasional Terkait Lingkungan Hidup

Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus digalakkan demi mengendalikan dampak negatif dan dampak positif dapat dikembangkan sejak awal perencanaan. Penataan dan pengelolaan lingkungan bergantung pada regulasi umum terkait izin lingkungan. Segala hal yang berkaitan dengan perizinan tersebut akan menjadi landasan pemerintah dalam menerapkan tata kelola. Regulasi terkait yang menjadi panduan dalam hal ini antara lain:

- Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 38 Tahun 2019 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2.6.1.2 Jumlah Penduduk Kota Cimahi

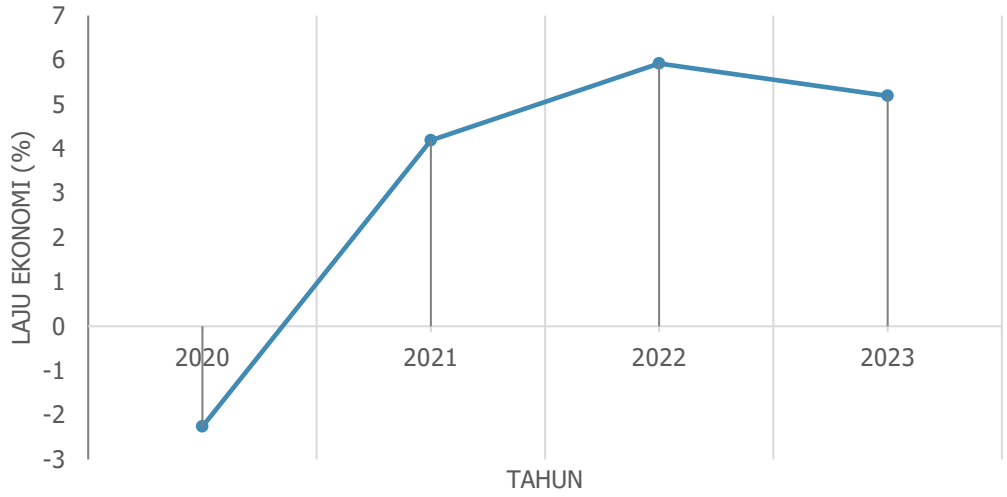
Pertambahan penduduk sejalan linear dengan sektor-sektor lain yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat, seperti transportasi dibutuhkan untuk mobilitas, industri untuk menunjang konsumsi barang dan jasa, dan konstruksi untuk menunjang permintaan rumah hunian. Tingginya jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya kebutuhan hunian dan dapat menggeser ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), kemudian meningkatnya kebutuhan lapangan pekerjaan atau

industri yang berekspansi untuk mendorong peningkatan ekonomi. Pada akhirnya tingginya jumlah penduduk di Kota Cimahi membutuhkan tata kelola yang baik untuk mengakomodir kebutuhan dan kepentingan tersebut, namun tetap tidak mengabaikan aspek lingkungan untuk mendukung keberlanjutan kota.

2.6.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi

Faktor pemicu berikutnya yaitu misi peningkatan taraf ekonomi dan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Tujuan misi tersebut ialah untuk meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan. Misi yang direncanakan oleh pemerintah ini akan mempengaruhi pendapatan daerah, anggaran pengelolaan lingkungan hidup, penerapan izin lingkungan beserta pengawasannya, jumlah dan kapasitas SDM, dan sebagainya. Salah satu indikator untuk melihat gambaran pembangunan ekonomi daerah adalah dengan menggunakan perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Pertumbuhan Ekonomi Cimahi tumbuh sebesar 5,19 persen pada tahun 2023. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 14,45 persen. Diikuti Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,84 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 11,39 persen. Sektor Industri Pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB di Kota Cimahi yaitu sebesar 45,74 persen, diikuti oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 15,48 persen (BPS Kota Cimahi, 2024).



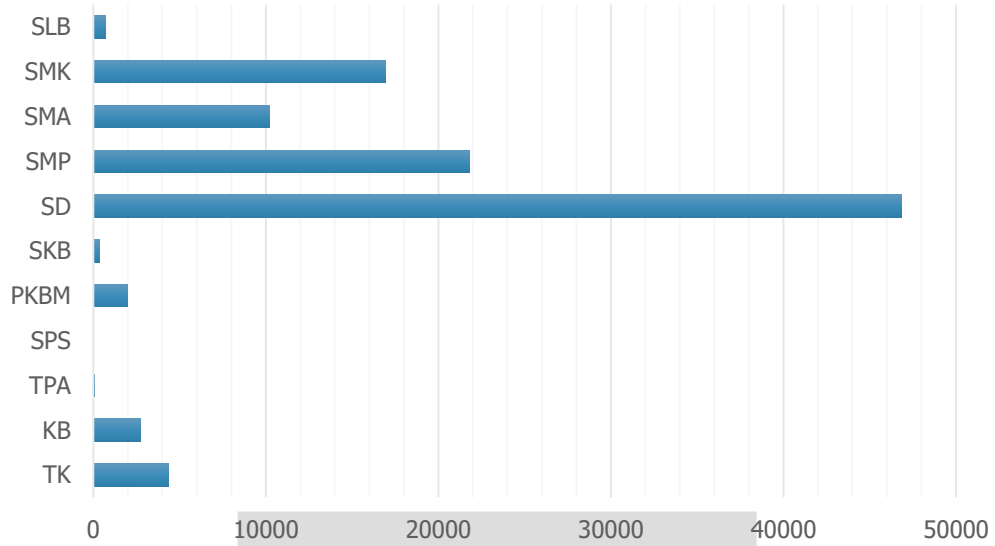
Gambar 2. 91 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi

(Sumber: Kota Cimahi dalam Angka Tahun 2023, 2022, 2021, diolah)

2.6.1.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat di Kota Cimahi

Tingkat pendidikan mempengaruhi pola pikir masyarakat, kesadaran, dan pengetahuan terhadap lingkungan. Tingkat pendidikan yang rendah dapat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan hidup yang berkualitas, kebersihan, pengelolaan sampah dan limbah domestik.

Pada tahun 2023, jumlah peserta didik yang memasuki tingkat sekolah dasar sebesar 46.833 orang, tingkat SMP 21.803 orang, tingkat SMA dan SMK sebanyak 10.231 orang dan 16.946 orang. Grafik tingkat pendidikan masyarakat di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 92.**



Gambar 2. 92 Tingkat Pendidikan Masyarakat Kota Cimahi

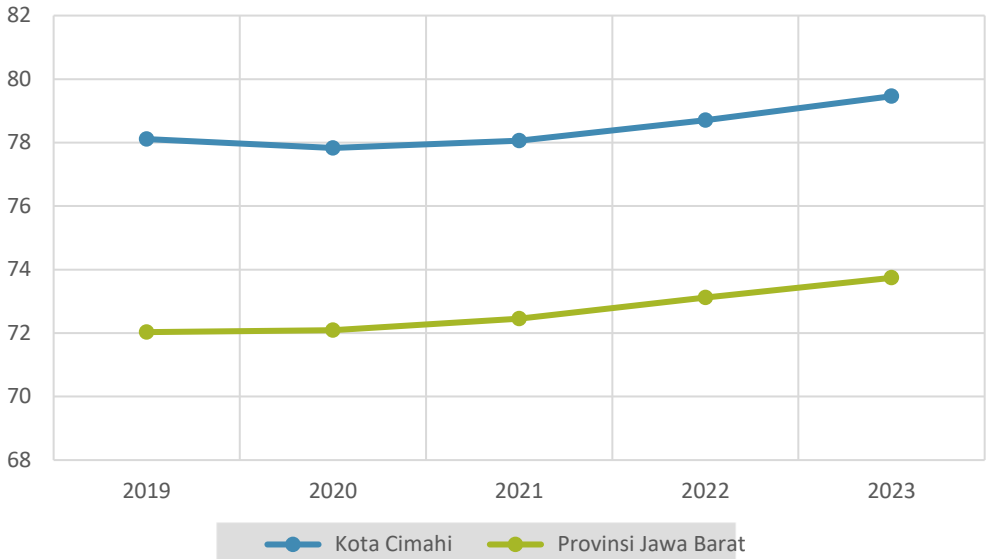
(Sumber: Dapodikdasmen, 2023)

2.6.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibangun dari tiga dimensi dasar, yaitu:

- Umur panjang dan hidup sehat
- Pengetahuan
- Standar Hidup Layak

Pada tahun 2023, Kota Cimahi memiliki nilai IPM dalam kategori sedang (79,46) diatas nilai IPM Provinsi Jawa Barat (73,74). IPM dan pembangunan kota memiliki hubungan yang erat. Tingkat IPM yang tinggi biasanya mencerminkan kondisi sosial-ekonomi yang baik di suatu wilayah. Ketika IPM meningkat, penduduk kota umumnya mendapatkan manfaat dalam hal akses terhadap fasilitas dan layanan yang diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik. Adapun tren indeks pembangunan manusia di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Gambar 2. 93.**



Gambar 2. 93 Tren Indeks Pembangunan Manusia di Kota Cimahi dan Provinsi Jawa Barat

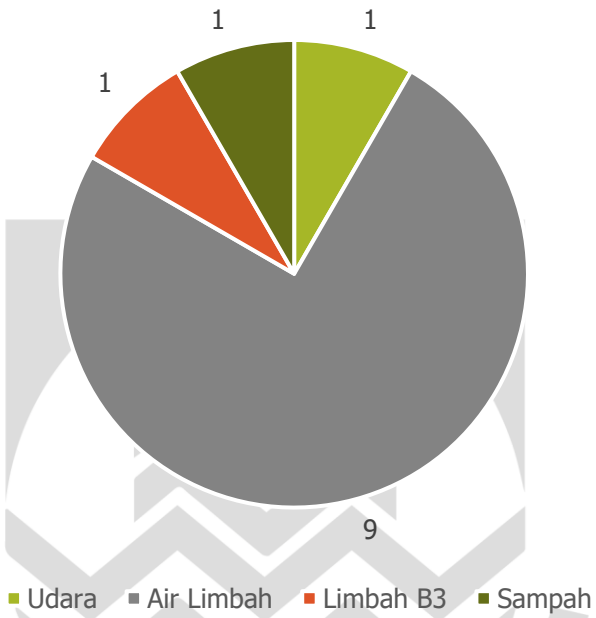
(Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, 2023)

2.6.2 Pressure

2.6.2.1 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup

Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah dalam usaha peningkatan pelayanan publik yang menjadi salah satu tolak ukur *good governance.* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik. Undang-undang pelayanan publik juga mengatur hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik sehingga sebagai pengguna pelayanan publik, masyarakat mempunyai hak menyampaikan keluhan atas pelayanan publik yang tidak sesuai standar dan prosedur melalui mekanisme pengaduan masyarakat.

Pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu bentuk pengawasan masyarakat terhadap pemerintah. Adapun jumlah kasus pengaduan masyarakat berdasarkan media lingkungan yang tercemarnya dapat dilihat pada **Gambar 2. 94.**



Gambar 2. 94 Jumlah Pengaduan Berdasarkan Media Lingkungan yang Tercemar

(Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023)

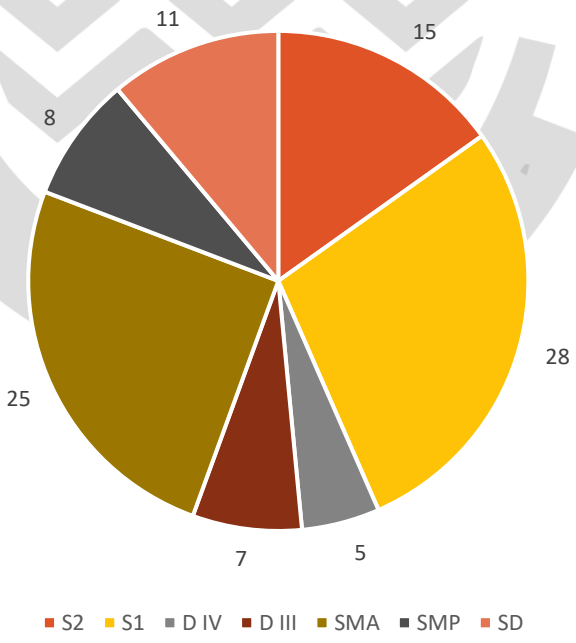
Pengaduan masyarakat sejatinya adalah bentuk kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat terkait layanan publik. Tidak adanya pengaduan masyarakat menunjukkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, pengaduan masyarakat yang tidak terselesaikan menunjukkan kurangnya respon pemerintah dalam menanggapi aduan yang masuk. Sedangkan pengaduan yang selesai menunjukkan peningkatan fasilitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.

2.6.3 State

2.6.3.1 Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi sesuai dengan dasar hukum Perda Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 dan Perwal Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 bertugas membantu Wali Kota Cimahi melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kota.

Pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi ditunjang dengan sumber daya manusia atau personil yang tergabung dalam Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Instansi ini juga didukung oleh personil dengan latar belakang pendidikan yang bervariasi. Pada tahun 2023, jumlah personil yang terikat dengan lembaga pengelola lingkungan hidup yaitu 99 orang dengan keterangan berdasarkan tingkat pendidikan seperti yang dapat dilihat pada **Gambar 2. 95**.



Gambar 2. 95 Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(Sumber: Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023)

Semakin berkembangnya permasalahan lingkungan di Kota Cimahi harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam mengelola lingkungan hidup. Selain itu, dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan, Pemerintah Kota Cimahi melakukan upaya peningkatan kapasitas personel melalui program diklat pada jajaran Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi terus meningkatkan kualitas personilnya, dengan cara melakukan pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan motivasi kerja, membangun kemampuan berpikir, membangun kepercayaan diri, meningkatkan kedisiplinan, dan sebagainya. Pada tahun 2023, jumlah staf yang telah mengikuti diklat dapat dilihat pada **Tabel 2. 15.**

Tabel 2. 15 Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf Yang Sudah Diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Dinas Lingkungan Hidup	PPLH	0	0	3	2
2.	Dinas Lingkungan Hidup	PPNS LH	0	0	2	0
3.	Dinas Lingkungan Hidup	PPNS	0	0	0	0
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	1	2	0	0
5	Dinas Lingkungan Hidup	Pranata Laboratorium Lingkungan	0	0	1	3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

2.6.3.2 Jumlah Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan

Kondisi eksisting dari implementasi tata kelola dapat dilihat salah satunya dari daftar perusahaan yang telah mendapatkan izin lingkungan. Sepanjang tahun 2023, Pemerintah Kota Cimahi telah menerbitkan 38 dokumen izin lingkungan berupa Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan

(SPPL) sebanyak 34 dokumen, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebanyak 4 dokumen. Rincian terkait kegiatan dan pemrakarsa tercantum dalam Lampiran II Tabel-41.

2.6.3.3 Jumlah Perusahaan yang Mendapat Persetujuan Teknis/Rincian Teknis Limbah B3

Peningkatan jumlah pelaku usaha, khususnya industri yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah timbulan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) juga perlu diperhatikan kelengkapan perizinannya. Selama tahun 2023, tercatat sebanyak 14 perusahaan yang memiliki persetujuan teknis/rincian teknis limbah B3. Daftar perusahaan yang telah mendapat izin tersebut dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-42.

2.6.3.4 Pendapatan Asli Daerah

Retribusi perijinan tertentu merupakan pungutan atas pelayanan perijinan tertentu oleh pemerintah daerah atas dasar pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, hal ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Pembangunan yang menjadi inti perkembangan suatu kota perlu dibiayai, salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah adalah pajak, dan retribusi. Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Cimahi di tahun 2023 adalah Rp235.616.755.113,00 namun jumlah ini belum ditambahkan dengan pendapatan dari retribusi daerah pada tahun 2023 karena belum dilakukan pendataan. Besaran anggaran pengelolaan lingkungan hidup dipengaruhi oleh besaran PAD suatu daerah. Rincian jumlah pendapatan asli daerah di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Tabel 2. 16.**

Tabel 2. 16 Rincian Besaran PAD di Kota Cimahi Tahun 2023

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
1	Pajak	210.047.163.097
2	Laba BUMD	11.627.628.409
3	Pendapatan lainnya yang Sah	13.941.963.607

Sumber: Bappenda Kota Cimahi, 2023

2.6.4 Impact

2.6.4.1 Pengawasan Persetujuan Lingkungan

Tata kelola yang tidak baik dapat menimbulkan terjadinya sengketa terkait lingkungan. Bila pemerintah tidak tegas dalam menegakkan aturan atau izin membangun usaha, maka penyelewengan izin lingkungan dapat terjadi. Sengketa lingkungan dapat mempengaruhi isu tata guna lahan, kualitas air dan kuantitas air, kualitas udara, risiko bencana, dan persampahan. Pengawasan izin lingkungan dilakukan untuk memastikan bahwa izin yang telah diberikan tidak disalahgunakan. Pengawasan persetujuan lingkungan dilakukan dengan pelaksanaan UKL- UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), maupun SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan). Data pengawasan izin lingkungan di Kota Cimahi dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-43. Dengan demikian, pemerintah harus tegas memberikan sanksi terhadap pelanggar izin lingkungan. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 53 perusahaan telah dilakukan pengawasan terkait izin lingkungan.

2.6.4.2 Jumlah LSM Lingkungan Hidup

Tata kelola terkait dengan permasalahan lingkungan hidup juga didukung dengan adanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). *Civil society* adalah kelompok non-negara (NGOs) atau Lembaga Swadaya Masyarakat yang membentuk benteng sejarah dalam rangka menghadapi hegemoni negara di hampir semua sektor kehidupan, sehingga tidak berlebihan jika

masyarakat sipil dikatakan sebagai penunjang tercapainya *good governance* yang bersifat bebas dan mandiri sehingga menjadi penyeimbang dan pendamping bagi negara dan pemerintah (Efendi, dkk, 2019). LSM berperan sebagai jembatan penghubung masyarakat terhadap pemerintah serta memiliki peranan untuk memonitoring segala kegiatan pemerintah. Di Kota Cimahi selama tahun 2023 tercatat sebanyak 7 (tujuh) LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Kemunculan LSM di Kota Cimahi dapat dijadikan indikator bahwa tingkat kepedulian masyarakat terkait dengan isu lingkungan hidup masih ada. Detail nama LSM, lokasi, dan Nomor Akta Pendirian dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-51.

Tabel 2. 17 Jumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Bidang Lingkungan Hidup

No.	Nama LSM	Lokasi	Akta Pendirian
1	JARAMBAH	Kel. Cipageran Cimahi Utara	AHU-00195333.AH.01.04
2	PAKU SUNDA	jl. Central Kel. Cibabat Cimahi Utara	AHU-0008997.AH.01.05
3	Badan Advokasi Lingkungan Cimahi	Kp. Leuweung Gede RT.01 RW.11	Skt. 220.1/16/Kesbang
4	Soroti Lingkungan Hidup dan Korupsi (SOLUSI)	Jl. Sangkuriang No.31 RT.04 RW.20	AHU-0064111.AH.07. Tahun 2016
5	Yayasan Peduli Lingkungan Cimahi (YPLC)	Jl. Kihapit Barat No. 34 RT.04 RW.09	AHU-0011340.AH.01.04. Tahun 2016 Tanggal 31 Mei 2022
6	Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GMP Ling)	Jl. Pojok Selatan No.1 RT.02 RW.07	AHU-0001149.AH.01.07 Tahun 2019 12 Februari 2019
7	Pecinta Alam Jaya Lestari Kota Cimahi	Komplek KCVRI Blok A No. 13-14	SKt. 00.32.77/73/X/2013

Sumber: Bangkesbangpol Kota Cimahi, 2023

2.6.4.3 Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup

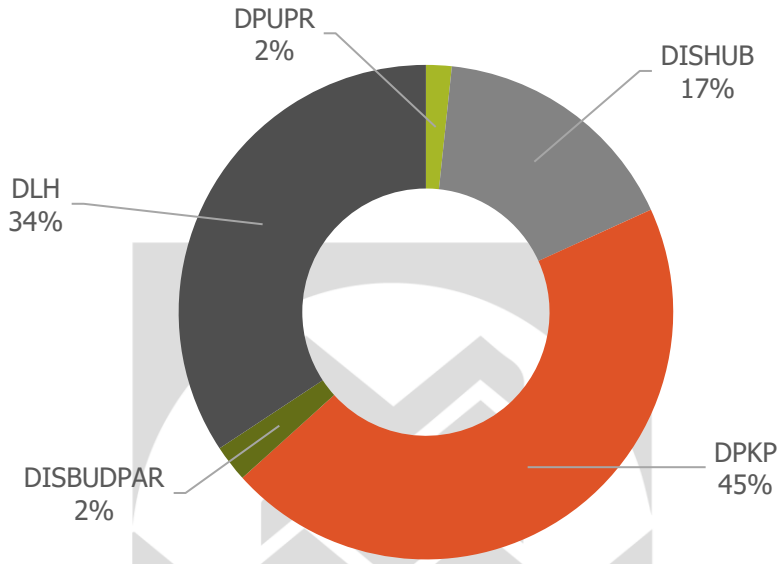
Penghargaan lingkungan hidup diberikan sebagai bentuk kepedulian pihak *stakeholder* dalam mengelola lingkungan hidup. Bentuk penghargaan juga dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi pemerintah untuk terus berlomba-lomba dalam memperbaiki lingkungan, serta penghargaan lingkungan dapat dijadikan ajang koordinasi antara pemerintah dan masyarakat/organisasi untuk menjalin tata kelola kota yang baik. Pada tahun 2023, Kota Cimahi telah memberikan penghargaan lingkungan hidup berupa PROPER kepada badan usaha sejumlah 26 unit, diantaranya PROPER BIRU 12 perusahaan dan PROPER MERAH 14 perusahaan.

2.6.5 Response

2.6.5.1 Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perencanaan tata kelola disusun dan dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam dokumen tersebut dijabarkan visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Salah satu kunci keberhasilan penataan dan pengelolaan lingkungan ialah anggaran yang mencukupi. Disamping itu, penganggaran (APBD) merupakan salah satu bentuk konkret dalam merespon isu lingkungan hidup. Semakin banyaknya pencemaran lingkungan mengakibatkan banyaknya kegiatan pengelolaan lingkungan yang membutuhkan anggaran. Secara tidak langsung, alokasi dana berperan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Komposisi APBD dari tahun ke tahun berikutnya akan memperlihatkan tingkat kepedulian sektor lingkungan hidup. Peningkatan anggaran pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi terjadi pada tahun 2023, jumlah anggaran dalam APBD dan program-program pengelolaan lingkungan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

mengindikasikan keseriusan suatu daerah untuk mencegah dan mengendalikan pencemaran. Jumlah anggaran pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi tahun 2023 mencapai Rp176.789.007.070, dan peruntukkan anggaran masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada Lampiran II Tabel-59.



Gambar 2. 96 Jumlah Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Kota Cimahi

(Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Cimahi, 2023)

2.6.5.2 Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal membentuk tata kelola yang baik atau *good governance* fungsi legislasi dan kapasitas DPRD salah satunya adalah merumuskan peraturan daerah. Sesuai dengan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum, pengembangan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan harus diberi dasar hukum yang jelas, tegas dan menyeluruh. Pemerintah Kota Cimahi pada tahun 2022 menyusun beberapa produk hukum bidang pengelolaan lingkungan sebagai dasar untuk

menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup. Produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi sebanyak 5 buah peraturan yakni:

1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tanggal 17 Februari 2022 tentang Penawasan Penyelenggaraan Usaha Konstruksi
2) Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Simpul Jaringan Pemerintah Daerah Kota Cimahi
3) Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah kota Cimahi Tahun 2023-2026
4) Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi tahun 2023
5) Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Tata Kelola Satu Data Daerah Kota Cimahi

2.6.5.3 Inovasi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, yang dimaksud inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Demi mencapai tujuan tersebut inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Adapun pengusulan inisiatif inovasi daerah dapat berasal dari Walikota, anggota DPRD, ASN, pegawai BUMD, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota masyarakat, agar seluruh elemen terwadahi dan dapat mengusulkan inovasinya masing-masing. Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Cimahi mencatat terdapat 8 inovasi yang dapat dilihat pada **Tabel 2. 18.**

Tabel 2. 18 Inovasi Daerah Kota Cimahi Tahun 2023

No.	Nama Inovasi	No.	Nama Inovasi
1	Pengembangan Kampung Hortikultura	5	Dilan Bawa Tas
2	GOYANG GOTIK	6	Mudik Gratis
3	Dilanda Cita	7	Operasi Penegakan Hukum di Jalan
4	RW Tuntas	8	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Sumber: DLH Kota Cimahi, 2023

2.6.5.4 Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat

Melalui prinsip partisipasi, *Good* Governance berarti melibatkan aktor-aktor meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. Dapat diketahui bahwa masyarakat merupakan elemen penting dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik, peran pentingnya dalam kegiatan pemerintah adalah membantu memberikan masukan penyelesaian masalah publik yang ada di masyarakat. Sebagai upaya peningkatan peran serta masyarakat, pada tahun 2023 terdapat 7 (tujuh) kegiatan yang diinisiasi masyarakat. Hal ini cukup membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang ada di Kota Cimahi. Kegiatan yang diinisiasi masyarakat dapat dilihat **Tabel 2. 19**.

Tabel 2. 19 Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat Kota Cimahi Tahun 2023

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
1	Pengembangan Kampung Hortikultura	Dinas Pangan dan Pertanian	Tahun 2022-2023
2	Rencana Penanaman Pohon (Penghijauan RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	Agustus 2023
3	Penanaman Pohon	Dinas Lingkungan Hidup	November 2023
4	Karya Bakti dan Gerakan Pungut Sampah (Pembersihan Saluran Air)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Oktober 2023

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan (bulan/tahun)
5	Penanganan Longsor yang berlokasi di RW.26 Sungai Cibeureum Kelurahan Melong	DPKP	Maret 2023
6	Pengerukan Saluran Irigasi Leuwilayung	DPKP	Juli 2023
7	Pengerukan/Pembersihan Saluran Permukiman dan Saluran Sungai di RW.02 Kelurahan Melong	DPKP	September 2023

Sumber: Seluruh Perangkat Daerah Kota Cimahi, 2023

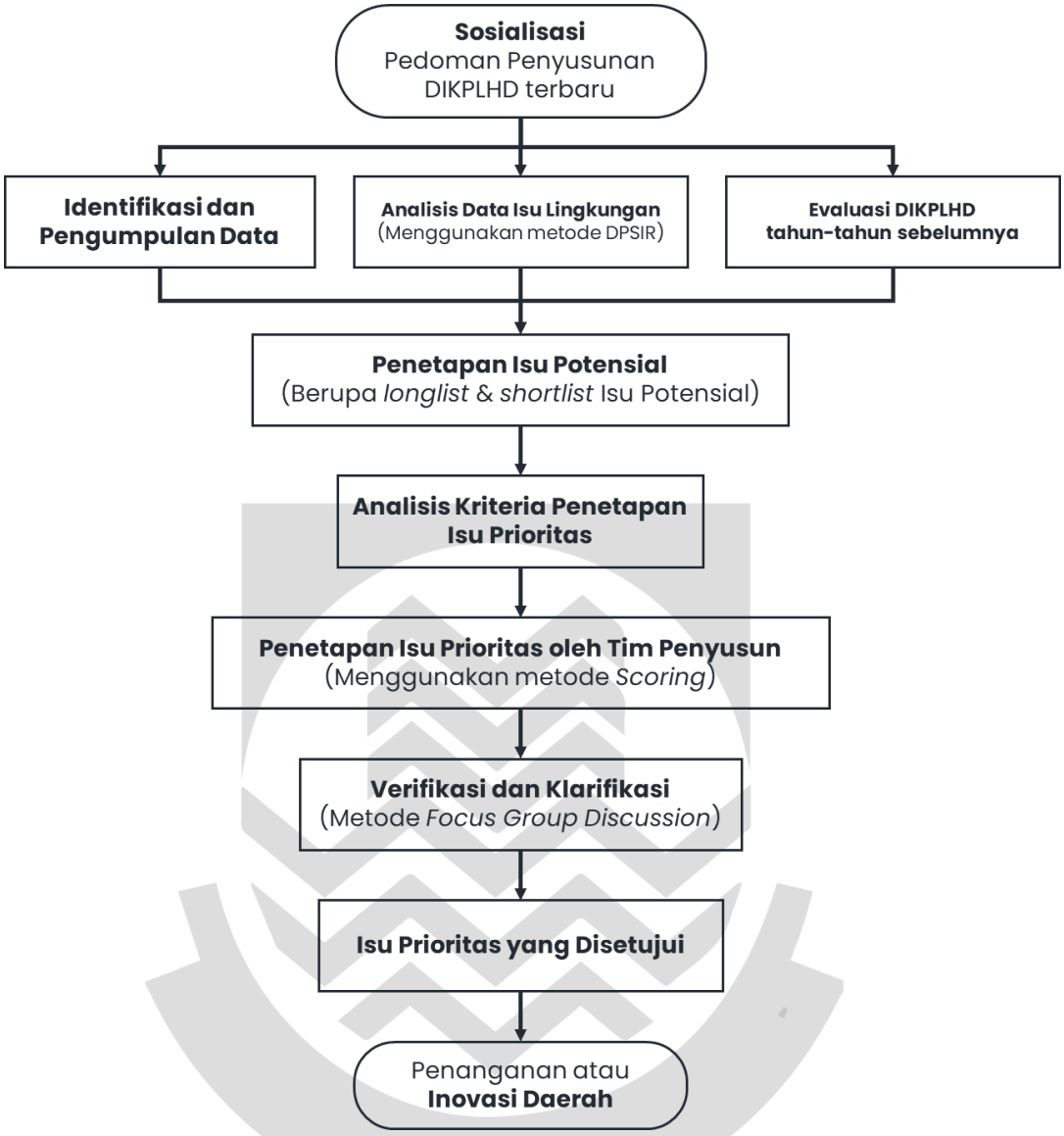
BAB III
ISU PRIORITAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

3.1 Perumusan Isu Prioritas

Masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan teknis; perlu adanya tinjauan sosial, ekonomi, dan ekologi. Kajian lingkungan hidup merupakan kajian yang bersifat multidisipliner karena menyentuh aspek geografis, biologis, teknologi, politik, dan sosial budaya. Oleh karena itu, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus berperan dalam merumuskan isu-isu lingkungan di Kota Cimahi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara kolektif.

Isu prioritas adalah isu utama yang menjadi fokus dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup di suatu daerah pada waktu tertentu disepakatinya isu prioritas. Penetapan isu prioritas ini melibatkan partisipasi pemangku kepentingan, dan didasari dari pendekatan analisis DPSIR (*Driving Force, Pressure, State, Impact, and Response*). Berdasarkan Surat Pedoman DIKPLHD Tahun 2024, isu prioritas yang diambil adalah berdasarkan data-data yang sebelumnya telah dijelaskan pada BAB II, masalah utama yang dihadapi, serta tren IKLH dalam 5 tahun terakhir. Dengan demikian, isu yang diprioritaskan menggambarkan atau mempunyai hubungan yang kuat dengan masalah yang akan dipecahkan yang dapat pula tercermin dalam tren IKLH.

Perumusan isu prioritas di Kota Cimahi pada tahun 2024 menggunakan alur penyusunan isu prioritas lingkungan hidup yang dapat dilihat pada **Gambar 3. 1**, perumusan isu prioritas memilih 3 (tiga) sampai 5 (lima) isu terpenting untuk dipecahkan dengan inovasi daerah.



Gambar 3. 1 Diagram Alir Prumusan Isu Prioritas

(Sumber: Hasil Analisis, 2024)

Perumusan isu prioritas di Kota Cimahi memerlukan beberapa tahapan/langkah pengerjaan, mulai dari analisis data isu lingkungan utama yang tercantum dalam BAB II, hingga verifikasi dan klarifikasi dengan metode *focus group discussion*.

3.2 Penetapan Isu Potensial

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan lingkungan melalui metode DPSIR pada pembahasan di BAB II, kemudian dikaji untuk melakukan penetapan isu potensial lingkungan hidup di Kota Cimahi. Tujuan dilakukannya penetapan isu potensial ini adalah untuk memperoleh daftar panjang dan daftar pendek isu lingkungan di Kota Cimahi selama periode penilaian. Isu potensial ini dapat mengenai *pressure* (berbagai penyebab terjadinya masalah, dapat berupa aspek-aspek sosial, ekonomi, birokrasi, kelembagaan maupun politik), *state* (kondisi atau potret lingkungan hidup pada saat periode penilaian), atau *response* (kebijakan, program maupun kegiatan yang berhubungan dengan jenis *pressure* yang ditetapkan untuk memperbaiki *state*). Rekap isu lingkungan hidup utama dapat dilihat pada **Tabel 3. 1**.

Tabel 3. 1 Rekap Isu Lingkungan di Kota Cimahi Tahun 2024

Isu	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
Tata Guna Lahan	1. Pertumbuhan Penduduk 2. Pembangunan Perkotaan 3. Pertumbuhan Industri di Kota Cimahi	1. Konversi Lahan 2. Pembangunan Infrastruktur 3. Ekspansi terhadap Wilayah Pertanian, Hutan	1. Perubahan Tata Guna Lahan 2. Fragmentasi Habitat 3. Hilangnya Lahan Terbuka	1. Kehilangan Keanekaragaman Hayati 2. Peringkat Risiko Bencana 3. Perubahan Iklim Lokal	1. Perencanaan Tata Ruang yang Berkelanjutan 2. Pengawasan Pembangunan 3. Pelestarian dan Restorasi Habitat 4. Penghijauan dan Pengoptimalan RTH 5. Biodiversity by Design
Kualitas Air	1. Pertumbuhan Penduduk 2. Curah Hujan Rata-rata di Kota Cimahi 3. Kondisi Geografis Kota Cimahi dan Potensi Beban Pencemarannya 4. Pertumbuhan Ekonomi melalui Pengembangan Industri	1. Kepadatan Penduduk 2. Daya Tampung Beban Pencemaran Sungai 3. Fasilitas Tempat Buang Air Besar yang Tidak Memadai 4. Tingkat Kemiskinan 5. Kontribusi Limbah Non Domestik 6. Kebutuhan Air Bersih Bagi Masyarakat	1. Kualitas Air Danau 2. Kualitas Air Sungai 3. Status Mutu Air 4. Nilai Indeks Kualitas Air 5. Kualitas Air Hujan 6. Kualitas Air Sumur	1. Krisis Air 2. Penyakit yang Diderita Masyarakat 3. Sumber Air Minum atau Air Bersih 4. Penurunan Muka Tanah 5. Pengaduan Masyarakat	1. Pemantauan Kualitas Air Sungai dan Air Sumur 2. Program Penurunan Beban Pencemaran Sungai 3. Program Sanitasi Berbasis Masyarakat 4. Pengadaan Sumur Resapan 5. Pengawasan Dokumen Persetujuan Lingkungan 6. Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Program Nasional Citarum Harum

Isu	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
Kualitas Udara	1. Pertumbuhan Industri 2. Transportasi 3. Perkembangan Perkotaan 4. Pertanian dan Pembakaran Lahan	1. Emisi Gas dan Partikel 2. Polusi Udara Lokal	1. Konsentrasi Polutan Udara 2. Kualitas Udara Ambien	1. Kesehatan Masyarakat 2. Kerusakan Lingkungan 3. Dampak Sosial Ekonomi	1. Regulasi Lingkungan 2. Pengelolaan Transportasi 3. Kampanye Kesadaran Masyarakat 4. Pemantauan Kualitas Udara Ambien 5. Reaktivasi Car Free Day 6. Uji Kelayakan dan Uji Emisi Kendaraan Bermotor 7. Kegiatan Earth Hour 8. Penggunaan energi Baru Terbarukan 9. Pengawasan Dokumen Persetujuan Lingkungan
Risiko Bencana	1. Letak Geografis 2. Pertumbuhan Penduduk dan Perkotaan 3. Perubahan Iklim	1. Kerentanan Infrastruktur 2. Kerentanan Sosial dan ekonomi 3. Kerentanan Lingkungan	1. Frekuensi dan Intensitas Bencana 2. Kerusakan Infrastruktur dan Properti 3. Dampak Sosial	1. Kerugian Manusia 2. Kerugian Ekonomi	1. Mitigasi Bencana 2. Response Darurat 3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi 4. Penghijauan 5. Pengadaan Sumur Resapan 6. Inovasi Lingkungan 7. Sosialisasi Kebersihan & Sekolah Informal
Perkotaan	1. Pertumbuhan Penduduk 2. Urbanisasi 3. Konsumsi Barang 4. Kurangnya Kesadaran Lingkungan	1. Peningkatan Volume Sampah 2. Penggunaan Lahan untuk Pembuangan Sampah	1. Timbulan Sampah 2. Fasilitas Tempat Buang Air Besar 3. Kondisi TPA 4. Neraca Pengelolaan Sampah Kota Cimahi	1. Kesehatan Masyarakat 2. Kerusakan Ekosistem 3. Dampak Ekonomi	1. Kebijakan dan Regulasi 2. Program Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat 3. Investasi dalam infrastruktur Pengelolaan Sampah 4. Sosialisasi dan Edukasi 5. Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat 6. Anggaran Pengelolaan Lingkungan 7. Jumlah Bank Sampah

Isu	Driving Force	Pressure	State	Impact	Response
Tata Kelola	1. Regulasi Nasional Terkait Lingkungan Hidup 2. Jumlah Penduduk Kota Cimahi 3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Cimahi 4. Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi 5. Indeks Pembangunan Manusia	1. Peningkatan Kesadaran Lingkungan Masyarakat	1. Kuantitas dan Kualitas SDM 2. Jumlah Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan 3. Jumlah Perusahaan yang Mendapat Izin Mengelola Limbah B3 4. Pendapatan Asli Daerah	1. Pengawasan Persetujuan Lingkungan 2. Jumlah LSM di Bidan Lingkungan Hidup 3. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup	1. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Produk Hukum Bidang Lingkungan Hidup 3. Inovasi Daerah 4. Kegiatan yang Diinisiasi Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tahap awal dalam menyepakati isu prioritas adalah melakukan penyaringan isu-isu lingkungan yang menjadi isu potensial lingkungan dilakukan oleh Tim Internal Penyusun DIKPLHD Kota Cimahi. Isu potensial lingkungan hidup didapatkan dari hasil analisis DPSIR dan diuraikan dalam *longlist* isu potensial. Penetapan isu potensial lingkungan hidup Kota Cimahi juga didasari atas studi literatur, panduan Nirwasita Tantra dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berikut merupakan daftar panjang (*longlist*) isu potensial lingkungan hidup di Kota Cimahi tahun 2024:

1. Peningkatan Lahan Permukiman Penduduk
2. Menurunnya Lahan Sawah & Lahan Perkebunan
3. Minimnya Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Cimahi
4. Pencemaran Air Sungai
5. Kekurangan Air
6. Potensi Beban Pencemaran dari Limbah Non Domestik
7. Indeks Standar Pencemaran Udara Parameter $PM_{2,5}$
8. Jumlah Penggunaan Bahan Bakar
9. Fasilitas Tempat Buang Air Besar Masyarakat
10. Penyakit yang Diderita Masyarakat
11. Kejadian Bencana Alam
12. Kejadian Bencana Kebakaran
13. Rendahnya Jumlah Tempat Pembuangan Sampah
14. Jumlah Timbulan Sampah
15. Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan

Bersama dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) Kota Cimahi, dilakukan verifikasi daftar isu panjang tersebut yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan isu yang berkorelasi melalui diskusi Bersama. Berdasarkan hasil diskusi tersebut, didapatkan *shortlist* atau daftar pendek 9 isu lingkungan hidup potensial (dapat dilihat pada **Tabel 3. 2**).

Tabel 3. 2 Hasil Penyaringan *Longlist* Isu Potensial Lingkungan

No.	*Longlist*	*Shortlist*
1	Peningkatan Lahan Permukiman Penduduk	Alih Fungsi Lahan
2	Menurunnya Lahan Sawah & Lahan Perkebunan	
3	Jumlah RTH di Kota Cimahi	
4	Pencemaran Air Sungai	Kualitas dan Kuantitas Air
5	Kekurangan Air	
6	Potensi Beban Pencemaran dari limbah non domestik	Pengelolaan Limbah B3
7	Indeks Standar Pencemaran Udara Parameter PM2,5	Kualitas Udara
8	Penggunaan Bahan Bakar	Sistem Transportasi & Teknologi Ramah Lingkungan
9	Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Sanitasi & Kesehatan Masyarakat
10	Penyakit yang diderita masyarakat	
11	Kejadian Bencana Alam	Bencana Alam dan Kebakaran
12	Kejadian Bencana Kebakaran	
13	Jumlah TPS	Pengelolaan Sampah
14	Timbulan Sampah	
15	Kebijakan & tata kelola lingkungan	Kebijakan & Tata Kelola

Sumber: Hasil Analisis, 2024

3.3 Analisis Kriteria Penetapan

Isu yang diangkat pada tahun 2024, selain dirumuskan secara partisipatif dengan keterlibatan berbagai *stakeholder* yang dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD) juga dilakukan melalui penetapan kriteria isu prioritas dan penilaian terhadap kriteria-kriteria yang telah diputuskan. Adapun kriteria-kriteria yang digunakan dalam penetapan isu prioritas diantaranya adalah:

1. Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.
2. Berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan kualitas lingkungan hidup.
3. Mendapat perhatian publik dan harus ditangani segera (*urgent*).

4. Berhubungan dengan tren IKLH dalam 5 tahun terakhir.
5. Mengancam keanekaragaman hayati yang ada di sekitarnya.
6. Berpengaruh pada daya dukung lingkungan.
7. Berdampak pada perubahan iklim.
8. Menjadi kajian lebih lanjut dalam KLHS RTRW, KLHS RPJMD, dan RPPLH Kota Cimahi.

Dalam merumuskan isu prioritas, deskripsi kondisi daerah terutama keunikan daerah menjadi bahan pertimbangan. Kekhususan wilayah Kota Cimahi yaitu Kota Cimahi menjadi bagian dari Kawasan Cekungan Bandung dan termasuk dalam Wilayah Pengembangan Cekungan Bandung. Kota Cimahi menjadi bagian dari kawasan perkotaan inti dalam Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang merupakan kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi. Kegiatan utama kota meliputi: pusat pemerintahan kota dan/atau kecamatan, pusat perdagangan dan jasa skala regional, pusat industri (ekonomi kreatif dan industri non polutif), pusat pelayanan pendidikan tinggi, pusat pelayanan sistem angkutan umum dan penumpang regional serta pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara. Dengan mempertimbangkan data yang ada, dilakukan penilaian terhadap kriteria penetapan pada isu potensial lingkungan hidup di Kota Cimahi. Metode penilaian atau *scoring* ini ditentukan dengan memberikan nilai 1-5 pada setiap isu potensial lingkungan hidup terhadap 8 (delapan) kriteria yang telah ditetapkan, dimana bobot nilai 5 = sangat prioritas, nilai 4 = prioritas, nilai 3 = cukup prioritas, nilai 2 = kurang prioritas, nilai 1 tidak prioritas. Hasil penilaian isu prioritas dapat dilihat pada **Tabel 3. 3.**

Tabel 3. 3 Hasil *Scoring* Isu Prioritas Oleh Tim Internal

No.	Isu Potensial	Kriteria Penetapan								Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Kualitas Udara	5	5	4	5	2	5	5	1	32
2	Kualitas dan Kuantitas Air	4	4	2	5	5	5	3	3	31
3	Alih Fungsi Lahan	3	4	2	5	4	5	1	1	25

No.	Isu Potensial	Kriteria Penetapan								Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	
4	Pengelolaan Sampah	1	4	5	1	4	3	5	1	24
5	Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat	2	1	2	1	4	2	3	1	16
6	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	2	1	2	1	1	3	3	5	18
7	Kejadian Bencana Alam dan Kebakaran	1	4	5	1	3	2	1	1	18
8	Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan	1	4	5	1	1	4	1	1	18
9	Sistem Transportasi Umum dan Ramah Lingkungan	1	4	2	2	1	2	5	1	18

Sumber: Hasil Analisis, 2024

Keterangan Kriteria Penetapan:

1 : Terjadi Pencemaran
2 : Dampak signifikan
3 : Perhatian publik
4 : Tren IKLH
5 : Ancaman keanekaragaman hayati
6 : Daya dukung lingkungan
7 : Perubahan iklim
8 : Kajian dalam KLHS Kota Cimahi

Berdasarkan hasil diskusi dengan Tim Internal DIKPLHD Kota Cimahi, terdapat 4 isu yang memiliki nilai tinggi dan perlu menjadi kajian dalam isu prioritas. Isu-isu tersebut diantaranya adalah Kualitas Udara, Kualitas dan Kuantitas Air, Alih Fungsi Lahan, Pengelolaan Sampah. Dilakukan verifikasi dan klarifikasi untuk menyepakati isu prioritas Kota Cimahi dengan khalayak ramai dan stakeholder di Kota Cimahi.

3.4 Verifikasi dan Klarifikasi

Isu lingkungan prioritas yang sudah ditentukan pada langkah sebelumnya ditegaskan melalui tahap verifikasi dan klarifikasi. Tahap ini dilaksanakan sebagai Upaya mengakomodasi dan *cross-check* isu lingkungan terhadap *stakeholder-stakeholder* yang ada di Kota Cimahi. Verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan adalah dengan *Focus Group Discussion* (FGD), yang dihadiri oleh Perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, pemangku kepentingan lain (akademisi, pelaku usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan filantropi) serta narasumber penyusun DIKPLHD.

Pelaksanaan FGD ini bertujuan untuk membuka kemungkinan para *stakeholder* untuk berpendapat mengenai isu lingkungan yang terjadi sesuai sudut pandangnya.

3.5 Penetapan Isu Prioritas

Penetapan isu prioritas dalam forum *Focus Group Discussion* (FGD), diawali dengan paparan materi kepada para *stakeholders* di Kota Cimahi dan dilanjutkan dengan sesi diskusi. Masukan dan saran para *stakeholder* menjadi respons baik bagi tim penyusun DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024. Penetapan isu prioritas dilakukan dengan pengisian formulir secara *online* (dalam jaringan) karena FGD kali ini dilaksanakan secara luar jaringan. Sistem *scoring* disesuaikan dengan jumlah isu potensial lingkungan hidup yaitu 9 isu yang perlu diberikan nilai oleh para peserta. Hasil *scoring* isu prioritas di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Tabel 3. 4**.

Tabel 3. 4 Rekapitulasi Hasil Scoring Isu Prioritas di Kota Cimahi

No.	Isu Potensial	TOTAL NILAI	RANKING
1	**Kualitas dan Kuantitas Air**	**218**	**1**
2	**Kualitas Udara**	**212**	**2**
3	**Pengelolaan Sampah**	**211**	**3**
4	**Alih Fungsi Lahan**	**201**	**4**
5	**Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan**	**197**	**5**
6	Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat	192	6
7	Sistem Transportasi Umum dan Ramah Lingkungan	188	7
8	Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	182	8
9	Kejadian Bencana Alam dan Kebakaran	180	9

Sumber: Hasil Perhitungan Scoring FGD, 2024

Kegiatan FGD dihadiri oleh beberapa pemangku kepentingan yang ada di Kota Cimahi, sebanyak 45 responden telah memberikan suaranya terkait isu lingkungan yang perlu dijadikan prioritas. Berdasarkan hasil diskusi, diperoleh bahwa 5 (lima) isu dengan nilai paling tinggi disetujui menjadi isu prioritas di Kota Cimahi. Berikut daftar isu prioritas di Kota Cimahi yang

telah disepakati dan ditambahkan dengan *scoring* oleh Tim Internal Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi:

1. Kualitas dan Kuantitas Air
2. Kualitas Udara
3. Pengelolaan Sampah
4. Alih Fungsi Lahan
5. Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan

3.5.1 Isu Kualitas dan Kuantitas Air di Kota Cimahi

Terdapat 5 sungai yang diuji kualitas air sungainya, yaitu Sungai Cimahi, Sungai Cilember, Sungai Cisangkan, Sungai Cihaur, dan Sungai Cibeureum. Berdasarkan hasil pemantauan kelima sungai di Kota Cimahi bahwa jumlah titik pantau Cemar Berat sebanyak 26 titik, Cemar Sedang sebanyak 15 titik, dan Cemar Ringan sebanyak 4 titik. Maka berdasarkan hal tersebut, nilai indeks kualitas air (IKA) berada pada nilai 20,22. Nilai IKA mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Mengacu pada SK.300/MenLHK/Setjen/PKL.1/6/2017 tentang Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air dan Alokasi Beban Pencemaran Air Sungai Citarum, daya tampung beban pencemar eksisting di Kota Cimahi telah melampaui batas daya tampung yang disyaratkan, yaitu mencapai 45.532 kg/hari. Salah satu faktor penekan terhadap kualitas air sungai di Kota Cimahi adalah jumlah penyediaan sarana prasarana permukiman seperti sanitasi yang layak pakai. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah rumah tangga (RT) di Kota Cimahi paling banyak memakai fasilitas tempat buang air besar milik sendiri yaitu sebanyak 93.564 KK, sedangkan RT yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar bersama sebanyak 2.197 KK, dan RT yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar umum sebanyak 38.652 KK, serta masih ada RT yang buang air besar sembarangan sebanyak 38.919 KK. Selain air sungai, kualitas air sumur di Kota Cimahi juga kerap dilakukan pemantauan. Air sumur sebagai salah satu solusi untuk memenuhi

kebutuhan air bersih di Kota Cimahi, pada tahun 2023, Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menguji 30 titik air sumur dalam satu periode yang sama yaitu di Bulan Agustus dan Juli. Berdasarkan hasil pemantauan konsentrasi pencemar pada beberapa sumur di Kota Cimahi tidak memenuhi baku mutu, sehingga akan berdampak pada kesehatan. Seperti hasil pengujian parameter Besi pada kualitas air sumur di Kota Cimahi menunjukkan terdapat 28 titik yang melebihi baku mutu (1 mg/L) dengan nilai konsentrasi paling tinggi mencapai 6,18 mg/L di Kelurahan Pasirkaliki RT05/RW03. Konsumsi air dengan kadar besi tinggi seringkali menyebabkan gangguan pencernaan seperti rasa logam yang tidak enak, mual, muntah, sakit perut, dan diare, terutama pada anak-anak dan individu dengan sensitivitas tinggi terhadap besi. Berdasarkan data Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Kota Cimahi Tahun 2023, jumlah rumah tangga dan sumber air minum di Kota Cimahi didominasi bersumber dari air sumur sebanyak 112.612 SR. Maka Kualitas air dapat mempengaruhi kondisi lingkungan perairan juga berdampak terhadap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dari penurunan kualitas air salah satunya menyebabkan penyakit pencernaan sebesar 18.435 penderita atau 7,59% dan penyakit kulit sebanyak 9.000 penderita atau 3,71%.

3.5.2 Isu Kualitas Udara di Kota Cimahi

Kualitas udara ambien di Kota Cimahi dipengaruhi oleh pencemaran udara yang terjadi di Kota Cimahi. Kualitas udara di Kota Cimahi ditentukan berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara ambien. Kegiatan pemantauan kualitas udara ambien dilakukan dengan metode *passive sampling* dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup. Lokasi pemantauan kualitas udara pada tahun 2023 mencakup permukiman, transportasi, industri, dan perkantoran. Berdasarkan hasil pemantauan, diperoleh bahwa kategori nilai ISPU diperoleh bahwa kategori Tidak Sehat terjadi di Transportasi dengan nilai ISPU pada parameter $PM_{2,5}$

mencapai 115,48. Faktor penekan perubahan kualitas udara ditimbulkan salah satunya dari kegiatan industri, manufaktur, bisnis hingga konstruksi. Di Kota Cimahi sebanyak 123 industri terdata menggunakan bahan bakar berupa Batubara, Gas LPG, dan Solar. Penggunaan bahan bakar tersebut dapat meningkatkan konsentrasi pencemar udara. Secara jangka panjang berpotensi menimbulkan pencemaran udara berupa emisi Gas Rumah Kaca. Emisi yang berupa gas rumah kaca diantaranya karbon dioksida (CO_2), Metana (CH_4), dan Di nitrogen Oksida (N_2O), selain gas rumah kaca dihasilkan juga pencemar udara berupa Nitrogen oksida (NOx), Sulfur oksida (SOx), Hidrokarbon (HC), Black Karbon (BC), *Non methane volatile organic compound* (NMVOC), *Particulate Matter* 10 (PM_{10}), dan *Particulate Matter* 2,5 ($PM_{2,5}$). Kepadatan lalu lintas di jalan-jalan perkotaan di Kota Cimahi juga menyebabkan emisi gas buang yang tinggi, termasuk karbon monoksida (CO), nitrogen oksida (NOx), dan partikulat ($PM_{2.5}$ dan PM_{10}). Kualitas udara yang menurun dapat berdampak pada masalah kesehatan manusia. Pencemar seperti PM_{10} dan $PM_{2,5}$ jika terhirup ke dalam sistem pernapasan menyebabkan gangguan pernapasan. Gangguan tersebut diantaranya infeksi saluran pernapasan, penyakit paru-paru, dan lain-lain. Salah satu dampak penurunan kualitas udara adalah menyebabkan penyakit saluran pernapasan sebesar 26,36% atau sebanyak 64.019 penderita.

3.5.3 Isu Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

Timbulan sampah pada tahun 2023 mencapai 1.433,04 m^3 per hari dan akan terus meningkat. Sebagian besar sampah ditimbulkan dari Kecamatan Cimahi Selatan. Distribusi timbulan sampah di Kecamatan Cimahi Selatan menimbulkan lebih banyak sampah karena jumlah penduduknya lebih banyak dari dua kecamatan lainnya. Kecamatan Cimahi Tengah dan Kecamatan Cimahi Utara masing-masing berkontribusi 29% timbulan sampah di Kota Cimahi, sedangkan Kecamatan Cimahi Selatan berkontribusi sebanyak 42% timbulan sampah Kota Cimahi. Komposisi

sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Cimahi masih didominasi sampah organik yang mencapai 50 persen. Salah satu faktor yang menyebabkan tekanan terhadap timbulan sampah yang semakin tinggi di Kota Cimahi. Ketika lahan yang tersedia untuk pembuangan sampah semakin berkurang, maka akan sulit untuk menemukan tempat yang aman dan sesuai. Penggunaan lahan yang tidak tepat untuk pembuangan sampah juga dapat meningkatkan risiko pencemaran air tanah dan sungai, terutama jika lokasi pembuangan tersebut tidak dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai untuk mengelola tumpahan dan limbah cair yang dihasilkan oleh sampah. Selain fasilitas pengelolaan sampah, Sarana fasilitas buang air besar sebagai indikator kemampuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Berdasarkan data, tercatat masyarakat yang membuang air besarnya ke sungai berada di Kelurahan Melong, Kelurahan Cibeureum, Kelurahan Utama, Kelurahan Baros, Kelurahan Cigugur Tengah, dan Kelurahan Karang Mekar. Keadaan ini memicu perilaku hidup tidak sehat yaitu melakukan Buang Air Besar (BAB) di tempat yang tidak memadai dan berpotensi mencemari badan air. sebanyak 93.564 RT telah memiliki fasilitas tempat buang air besar sendiri di Kota Cimahi, dan sebanyak 2.197 RT memiliki tempat buang air besar bersama. Namun terdapat 38.919 RT yang masih membuang air besarnya ke sungai.

3.5.4 Isu Alih Fungsi Lahan di Kota Cimahi

Kota Cimahi umumnya memiliki penggunaan lahan yang intensif, dengan banyak permukiman, bisnis, dan fasilitas umum. Penggunaan lahan utama di Kota Cimahi didominasi dengan lahan non pertanian, dengan tujuan penggunaan lahan non pertanian adalah melakukan pembangunan sebagai penunjang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian. Lahan non pertanian di Kota Cimahi seluas 3.845,54 Ha. Jika dilihat dari tren penggunaan lahan utama di Kota Cimahi, luas lahan non

pertanian pada tahun 2023 terjadi peningkatan dibanding tahun 2022 yaitu seluas 3.568 Ha. Tingginya kebutuhan lahan untuk rumah tinggal, perumahan, pekarangan, gudang, maupun kegiatan ekonomi seperti ruko dan rumah makan berpengaruh pada tingginya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan yang terjadi dan tidak sesuai dengan perencanaan dapat menimbulkan beberapa permasalahan lingkungan. Jika pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik, maka berdampak pada kondisi lingkungan yang menjadi rusak.

3.5.5 Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan di Kota Cimahi

Pertambahan penduduk sejalan linear dengan sektor-sektor lain yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat, seperti transportasi dibutuhkan untuk mobilitas, industri untuk menunjang konsumsi barang dan jasa, dan konstruksi untuk menunjang permintaan rumah hunian. Tingginya jumlah penduduk mengakibatkan bertambahnya kebutuhan hunian dan dapat menggeser ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dan meningkatnya kebutuhan lapangan pekerjaan atau industri yang berekspansi untuk mendorong peningkatan ekonomi. Pada akhirnya tingginya jumlah penduduk di Kota Cimahi membutuhkan tata kelola yang baik untuk mengakomodir kebutuhan dan kepentingan tersebut, namun tetap tidak mengabaikan aspek lingkungan untuk mendukung keberlanjutan kota. Pengaduan masyarakat sejatinya adalah bentuk kesadaran masyarakat dan partisipasi masyarakat terkait layanan publik. Tidak adanya pengaduan masyarakat menunjukkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan, pengaduan masyarakat yang tidak terselesaikan menunjukkan kurangnya respon pemerintah dalam menanggapi aduan yang masuk. Sedangkan pengaduan yang selesai menunjukkan peningkatan fasilitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Pada tahun 2023, sejumlah pengaduan dilakukan diantaranya adalah terkait pencemaran udara, pencemaran dari air limbah, limbah B3, dan

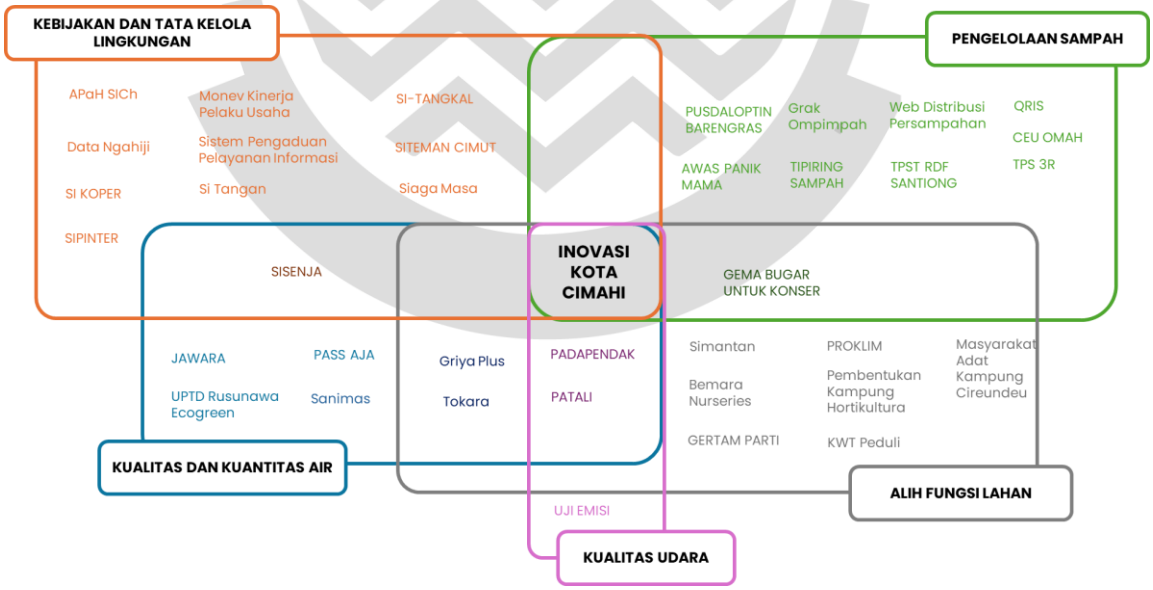
persampahan. Dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu dari visi Kota Cimahi. Oleh karena itu, aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan harus sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan demi mengendalikan dampak negatif dan dampak positif dapat dikembangkan sejak awal perencanaan.

BAB IV
INOVASI DAERAH KOTA CIMAHI

4.1 Pemetaan Inovasi Daerah

Penyusunan inovasi daerah dalam prinsipnya sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada dalam lingkungan daerah. Fokus dari inovasi daerah dalam dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah diarahkan pada isu prioritas lingkungan hidup yang telah disepakati bersama. Adapun isu prioritas lingkungan hidup yang menjadi fokus utama selama tahun 2023 di Kota Cimahi, yaitu:

1. Kualitas dan Kuantitas Air
2. Kualitas Udara
3. Pengelolaan Sampah
4. Alih Fungsi Lahan
5. Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan



Gambar 4. 1 Pemetaan Inovasi Daerah Terhadap Isu Prioritas Kota Cimahi Tahun 2023

4.2 PATALI

Kewajiban melaporkan pemantauan lingkungan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 480 yang mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang dikembangkan terintegrasi secara elektronik. Patali sendiri merupakan implementasi dari sistem informasi pelaporan persetujuan lingkungan, dimana sistem ini terus dikembangkan agar dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 483, Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedepannya, sistem ini juga akan dikembangkan sebagai input data dalam sistem informasi status lingkungan hidup, terutama untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan.

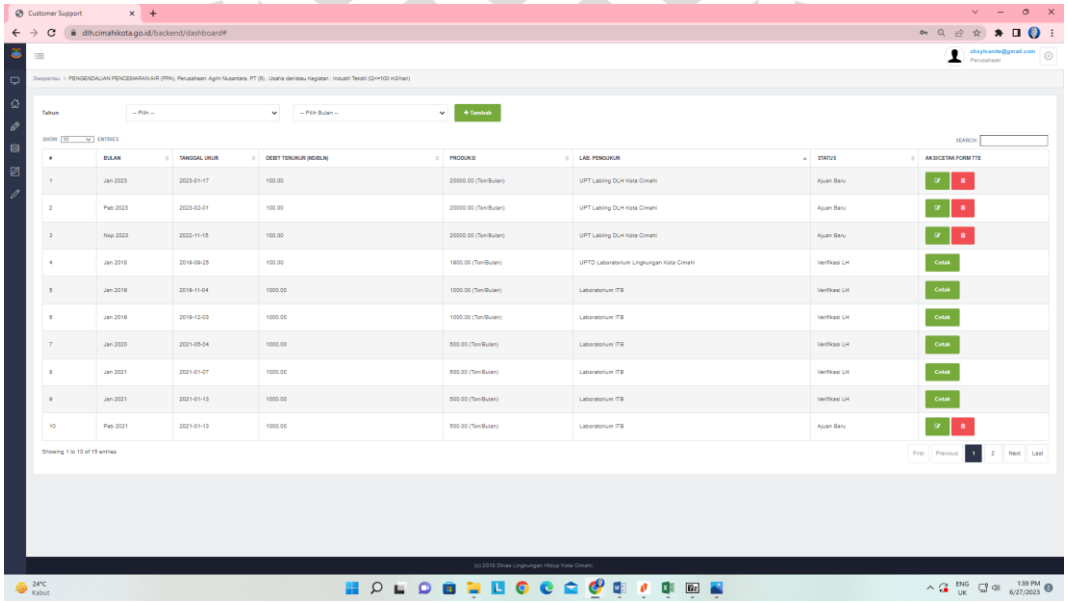
Pelaporan Persetujuan Lingkungan atau disingkat PATALI merupakan sistem laporan berbasis *online* untuk pelaporan monitoring lingkungan yang dilakukan oleh pelaku usaha di Kota Cimahi. PATALI dibuat pada tahun 2018 dan mulai disosialisasikan dan digunakan pada awal tahun 2019. Banyaknya *database* izin yang dimiliki pelaku usaha/kegiatan yang tidak tersusun dengan baik menjadi hambatan untuk instansi pengawas dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dalam melakukan evaluasi, pemantauan dan pengawasan pada pelaku usaha atau kegiatan. Adanya sistem informasi lingkungan membantu untuk merekap dan menyusun dokumen dan hasil pemantauan yang dimiliki oleh pelaku usaha. Sehingga memudahkan dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan ketaatan pelaku usaha. Kedepannya, sistem akan dikembangkan untuk menghitung daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup Kota Cimahi. Data yang ada dalam

sistem juga dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan kajian.

Strategi keberlanjutan yang dilakukan untuk inovasi PATALI adalah dengan pelaksanaan sosialisasi kepada pelaku usaha di Kota Cimahi secara bertahap untuk tata cara pengisian laporan secara *online*. Sosialisasi yang dilakukan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing sektor, misalnya untuk industri tekstil, industri makanan, pelayanan kesehatan dan lainnya.

Keberlanjutan dari sistem ini memperbarui *user manual* untuk pengguna agar lebih *user friendly,* menyusun Standar Operasional Prosedur untuk alur pelaporan dan pengawasan di internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi. tidak menutup kemungkinan pelaporan ini dibuat menjadi sebuah aplikasi pelaporan.

Kedepannya, sistem ini juga akan dikembangkan sebagai input data dalam sistem informasi status lingkungan hidup, terutama untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan dan status lingkungan hidup.



Gambar 4. 2 Hasil Rekap Pelaporan PATALI

4.3 SITANGAN

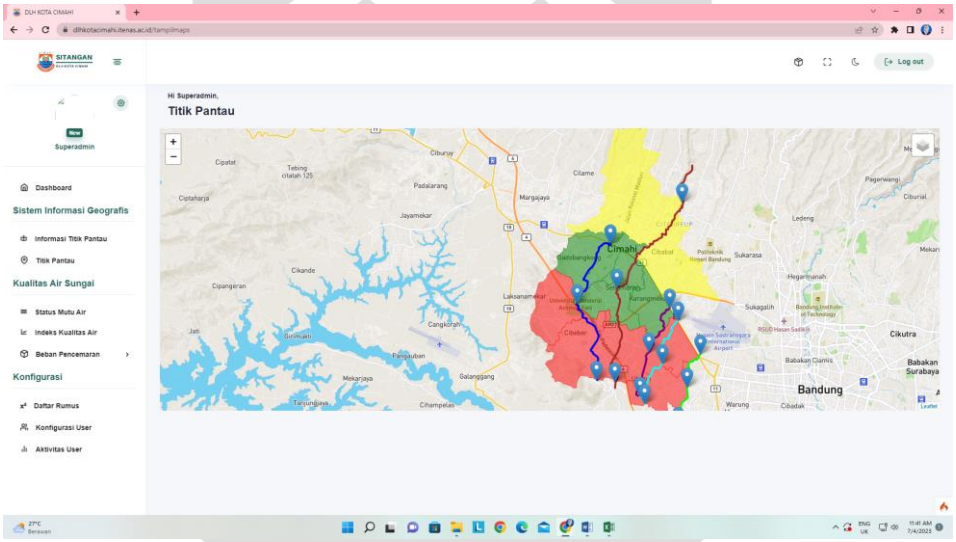
Konsep daya tampung lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memiliki kedudukan strategis sebagai salah satu instrument penilai kelayakan kebijakan, rencana atau program (KRP) dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Bahkan jika hasil dari KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka KRP pembangunan wajib diperbaiki melalui rekomendasi KLHS.

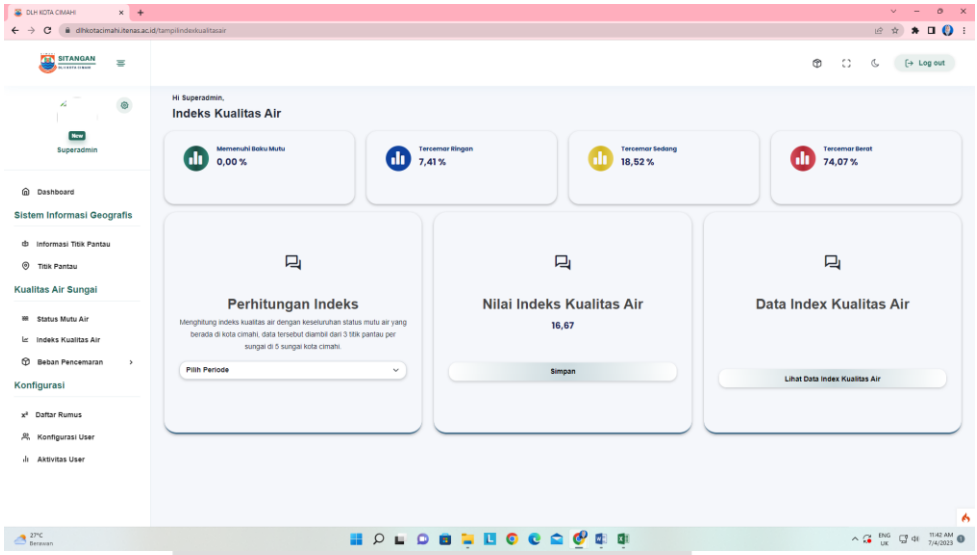
Pertimbangan tersebut dirasa diperlukan sistem untuk dapat menyediakan data untuk menghitung daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup. Sitangan merupakan Sistem Informasi Lingkungan Hidup, dibuatnya sistem ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 480 bahwa Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang dikembangkan terintegrasi secara elektronik yang terdiri atas sistem informasi:

1. Dokumen Lingkungan Hidup
2. Pelaporan Persetujuan Lingkungan
3. Status Lingkungan Hidup
4. Pengelolaan Limbah B3
5. Peta Rawan Lingkungan
6. Pengawasan dan Penerapan Sanksi Administratif
7. Infomasi Lingkungan Hidup Lainnya

Rancang bangun dari sistem ini adalah mengembangkan portal Sistem Informasi Lingkungan Hidup dan mengintegrasikan Pelaporan Persetujuan Lingkungan Hidup dengan Sitangan. Data yang didapatkan dari Patali selanjutnya menjadi bahan baku atau input dari Sitangan untuk dihitung sebagai beban pencemar sektor industri. Kedepannya, sistem ada dikembangkan dengan melakukan kolaborasi antar perangkat daerah untuk mendapatkan data beban pencemar sektor domestik, sektor peternakan dan sektor pertanian. Dibuatnya sistem ini diharapkan dapat menjadi portal data sebagai dasar perhitungan daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang valid yang bisa menghasilkan kebijakan yang tepat sesuai dengan prinsip "Good Data, Good Decision".



Gambar 4. 3 Dashboard SITANGAN



Gambar 4. 4 Hasil Rekap Pemantauan pada SITANGAN

4.4 AWAS PANIK MAMA (Kawasan Tuntas Pilah Sampah Organik Maggotisasi Mandiri)

Pemerintah Kota Cimahi saat ini sudah mulai secara perlahan meninggalkan paradigma lama penanganan sampah yang sentralistik dengan cara kumpul-angkut-buang dan beralih ke tata kelola sampah skala kawasan yang terdesentralisasi dengan pemilahan sampah di rumah tangga sebagai ujung tombaknya.

Latar belakang inovasi ini dikarenakan banyaknya sampah yang masih tercampur dan langsung dibuang ke kontainer sampah sedangkan potensi sampah organik sangat besar untuk dapat diolah menjadi hasil organik yang bermanfaat seperti kompos, pakan ternak dan bahan bakar biogas. Disamping memanfaatkan sampah organik yang terbuang inovasi ini juga sekaligus bisa mengurangi volume sampah yang terbuang ke kontainer yang pada akhirnya dapat menyumbang angka penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA Regional Sarimukti.

Awas panik merupakan pengembangan inovasi Kawasan Tuntas Pilah Sampah Organik (Awas Panik). Masyarakat yang telah memilah sampah, kemudian diberdayakan untuk mengelola sampah organiknya secara mandiri dengan metode maggotisasi.

Jadi inovasi ini bertujuan mengurangi timbulan sampah tercampur yang terbuang dengan menanamkan pola pemilahan kepada warga agar dapat memanfaatkan sampah organiknya.

Program ini memiliki kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan terutama pada capaian nomor 11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan dan nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab karena mengedepankan pengelolaan dan pelayanan persampahan serta pengolahan sampah di suatu wilayah.



Gambar 4. 5 Hasil Kegiatan Program Awas Panik mama

4.5 Bemara Nurseries

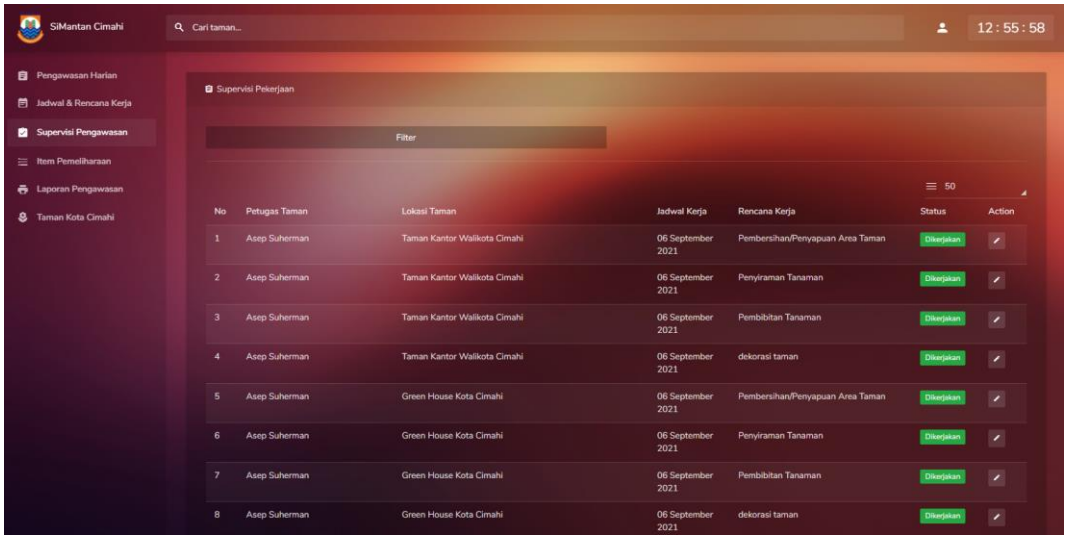
BEMARA adalah akronim dari BErbasis MAsyaRAkat, dan NURSERIES adalah kata dalam Bahasa Inggris yang artinya adalah pembibitan tanaman, dalam pertamanan berarti pembibitan tanaman hias. Jadi BEMARA NURSERIES adalah pembibitan tanaman hias berbasis masyarakat. Dalam dunia industri pertamanan, pembibitan tanaman hias adalah pemasok tanaman hias untuk pembuatan taman. Maksud dari inovasi tersebut adalah Kota Cimahi ingin mewujudkan pembibitan tanaman hias raksasa yang tersebar di setiap RW yang bermitra dengan Petani Tanaman Hias Cihideung.




Gambar 4. 6 Kegiatan Bemara Nurseries

4.6 Aplikasi SiMantan

Inovasi Sistem Informasi Manajemen Pertamanan atau SIMANTAN merupakan inovasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Cimahi. Latar belakang dari inovasi ini adalah sejauh ini laporan pengawasan pemeliharaan petugas taman oleh para Korwil masih bersifat manual dan pengaturan jadwal kerja petugas taman kurang maksimal. Diadakannya sistem informasi manajemen dapat membantu pelaporan dan pengontrolan kerja petugas taman sehingga dapat terekam secara otomatis dalam sistem. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPKP) berperan memaduserasikan kebutuhan pelaporan pemeliharaan taman di lapangan dalam suatu program inovasi berkelanjutan berbasis IT. Dengan adanya aplikasi SiMantan monitoring pelaksanaan pengelolaan taman kota dilakukan secara digital menggunakan aplikasi web, sehingga membantu pengawasan kinerja petugas taman dengan pelaporan yang terekam secara digital.



Gambar 4. 7 Tampilan Website SiMantan

4.7 Pelestarian Kampung Adat Cireundeu

Kampung Adat Cireundeu terletak di Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Terdiri dari 50 kepala keluarga atau 800 jiwa, yang sebagian besar bermata pencaharian bertani ketela. Kampung Adat Cireundeu sendiri memiliki luas 64 ha terdiri dari 60 ha untuk pertanian dan 4 ha untuk pemukiman. Sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan hingga saat ini. Selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan serta terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka.

Masyarakat adat Cireundeu sangat memegang teguh kepercayaannya, kebudayaan serta adat istiadat mereka. Mereka memiliki prinsip "Ngindung Ka Waktu, Mibapa Ka Jaman" arti kata dari "Ngindung Ka Waktu" ialah kita sebagai warga kampung adat memiliki cara, ciri dan keyakinan masing-masing. Sedangkan "Mibapa Ka Jaman" memiliki arti masyarakat Kampung Adat Cireundeu tidak melawan akan perubahan zaman akan tetapi mengikutinya seperti adanya teknologi, televisi, alat komunikasi berupa hand phone, dan penerangan. Masyarakat ini punya konsep

kampung adat yang selalu diingat sejak zaman dulu, yaitu suatu daerah itu terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Leuweung Larangan (hutan terlarang) yaitu hutan yang tidak boleh ditebang pepohonannya karena bertujuan sebagai penyimpanan air untuk masyarakat adat Cireundeu khususnya.
b. Leuweung Tutupan (hutan reboisasi) yaitu hutan yang digunakan untuk reboisasi, hutan tersebut dapat dipergunakan pepohonannya namun masyarakat harus menanam kembali dengan pohon yang baru. Luasnya mencapai 2 hingga 3 hektar.
c. Leuweung Baladahan (hutan pertanian) yaitu hutan yang dapat digunakan untuk berkebun masyarakat adat Cireundeu. Biasanya ditanami oleh jagung, kacang tanah, singkong atau ketela, dan umbi-umbian.

Hingga kini, masyarakat adat mengonsum-si singkong atau ketela yang disebut dengan rasi sebagai makanan pokok secara turun temurun. Diawali pada tahun 1918 ketika sawah-sawah yang mengering. Kemu-dian para leluhur menyarankan dan berpesan untuk menanamkan ketela sebagai pengganti padi. Karena tanaman ketela dapat dita-nam pada musim kering maupun musim hujan dan melihat ketersediaan lahan untuk menanam padi semakin sempit dan kecil, banyak sawah-sawah yang telah berganti gedung.

Memasuki jalan Kampung Cireundeu, terdapat tulisan Hanacaraka yang menandakan di situ terletak desa adat. Desa Cireundeu eksistensinya sudah lama di Kelurahan Leuwigajah. Akan tetapi daerah ini lebih terkenal sebagai TPA sampah dibandingkan sebagai Obyek dan Daya Tarik Wisata di Kelurahan Leuwi gajah. Desa Cireundeu lebih fokus pada desa yang masih memelihara tradisi lama yang telah mengakar yang diwariskan oleh tetua adat dulu. Masyarakat Kampung Cireundeu beranggapan bahwa sekecil apa pun filosofi kehidupan yang diwariskan oleh nenek moyang mereka wajib untuk dipertahankan. Melihat secara kasat mata, ada dua hal

menarik yang masih dipertahankan oleh Warga Adat Kampung Cireundeu yaitu bahan makan pokok dan tradisi 1 Suro. Beralihnya makanan pokok masyarakat adat kampung Cireundeu dari nasi beras menjadi nasi singkong di mulai kurang lebih tahun 1918, yaitu di pelopori oleh Ibu Omah Asnamah, Putra Bapak Haji Ali yang kemudian di ikuti oleh saudara - saudaranya di kampung Cireundeu. Ibu Omah Asnamah mulai mengembangkan makanan pokok non beras ini, berkat kepeloporannya tersebut Pemerintahan melalui Wedana Cimahi memberikan suatu penghargaan sebagai "Pahlawan Pangan", tepatnya pada tahun 1964.



Gambar 4. 8 Peta Wisata Kampung Cireundeu



Gambar 4. 9 Kegiatan Adat Warga Kampung Cireundeu

4.8 Uji Emisi Gratis

Uji emisi adalah salah satu upaya pengujian untuk mengetahui kinerja mesin yang terdeteksi oleh monitor khusus. Upaya ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin. Pengujian ini memiliki ketentuan khusus bagi beberapa jenis kendaraan untuk lulus sesuai dengan kriterianya. Kelulusan uji ini memberikan dampak yang baik bagi lingkungan maupun kesehatan kendaraan itu sendiri. Melalui proses ini beberapa poin penting terkait dengan kondisi kendaraan dapat diketahui. Seperti halnya kondisi *injector*, kadar gas buang mesin, hingga kadar sisa gas buang dari knalpot.

Manfaat Uji Emisi Pada Kendaraan Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, uji emisi ini memberikan dampak positif di beberapa aspek. Salah satunya adalah lingkungan. Melalui proses ini akan diketahui kadar buangan dari hasil pembakaran mesin yang akan berpengaruh pada lingkungan.

Jika kadar buangan mesin memiliki jumlah yang melebihi batas maksimal, berarti kendaraan tersebut sedang dalam kondisi tidak beres. Dalam hal ini, uji emisi juga bermanfaat untuk mengetahui ukuran kesehatan mesin kendaraan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui kondisi kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara, untuk melaksanakan pengendalian pencemaran udara, mewujudkan Kota Cimahi menjadi kota ramah lingkungan dan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya pemeliharaan emisi kendaraan roda empat yaitu agar kinerja mesin meningkat, konsumsi bahan bakar lebih hemat, komponen kendaraan berusia lebih lama, dan membantu mengurangi kadar polusi udara.

Adapun sasaran dari kegiatan ini yaitu kendaraan roda 4 (empat) pribadi dan/atau kendaraan operasional dinas yang berbahan bakar bensin dan solar sebanyak 600 kendaraan yang melintas/berada di area pelaksanaan kegiatan uji emisi dalam tiga hari pelaksanaan.

- Pelaksanaan Kegiatan:

a. Pengaturan lalu lintas dan pengarahan kendaraan yang akan diuji dilakukan oleh anggota Kepolisian, Dishub, dan anggota Sub Datasemen Polisi Militer dengan memasang traffic cone di setengah badan jalan raya roda empat melalui ajakan (dengan lisan dan melalui spanduk) dilakukan uji emisi terhadap kendaraan roda empat.
b. Dilakukan identifikasi kendaraan bermotor sebelum diuji yaitu pencatatan nomor polisi, jenis kendaraan, tahun pembuatan serta jenis bahan bakar yang dipergunakan melalui pencatatan STNK. Data tersebut kemudian direkap dan diinput ke dalam sistem.
c. Selanjutnya dilakukan pengetesan terhadap emisi gas buang melalui knalpot/saluran gas buang kendaraan bermotor,

d. Alat uji emisi akan mengeluarkan hasil berupa angka (konsentrasi) gas buang;
e. Hasil ini akan dibandingkan dengan baku mutu kendaraan roda empat dalam hal kualitas gas buangnya;
f. Untuk kendaraan roda empat yang lulus uji emisi akan diberikan sticker "lulus uji" dan sertifikat tanda lulus uji emisi yang berlaku selama 12 bulan (sampai Juni 2023). Untuk stiker lulus uji emisi akan di pasang oleh petugas di kaca depan mobil bagian pojok kanan atas;
g. Untuk kendaraan roda empat yang tidak lulus uji emisi akan diberikan sertifikat hasil uji emisi serta saran untuk memperbaiki kualitas emisi kendaraannya.

- Hasil data pengujian:

Tabel 4. 1 Hasil Pengujian Emisi Kota Cimahi

Tanggal	Lokasi	Bahan Bakar Bensin		Bahan Bakar Solar	
		Lulus	Tidak Lulus	Lulus	Tidak Lulus
6 Juni 2023	Jalan Gedung Empat	235	8	25	1
7 Juni 2023	Jln HMS Mintaredia	178	13	47	27
8 Juni 2023	Pasar Citeureup	186	11	27	5
Jumlah I (Kendaraan)		599	32	99	33
Jumlah II (per bahan bakar)		631		132	
Total (Kendaraan berbahan bakar bensin dan solar		763			

1. Kendaraan mobil berbahan bakar bensin yang di uji sebanyak 631 unit, 599 unit mobil lulus uji emisi dan 32 unit tidak lulus.
2. kendaraan mobil berbahan bakar solar yang di uji sebanyak 132 unit, 99 unit mobil lulus uji emisi dan 33 unit tidak lulus.



Gambar 4. 10 Pelaksanaan Uji emisi Gratis di kota Cimahi

4.9 GRAK OMPIMPAH (Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah)

Program GRAK OMPIMPAH mengacu pada prinsip pemanfaatan kembali sampah atau yang biasa dikenal dengan nama 3R (*Reduce, Reuse*

dan Recycle) yang dilakukan melalui upaya-upaya yang cerdas, efisien dan terprogram, maka pengelolaan sampah dapat lebih efisien. Namun dalam perjalanannya, program 3R masih menghadapi kendala utama, yakni kesadaran masyarakat yang masih rendah untuk memilah sampah.

Dengan dilaksanakannya program GRAK OMPIMPAH ini diharapkan akan membantu Pemerintah Daerah Kota Cimahi dalam mengurangi timbulan sampah ke TPA melalui pilah sampah dari rumah dan menjadikan sebuah kebiasaan baik di masyarakat dalam mengatasi sampah.

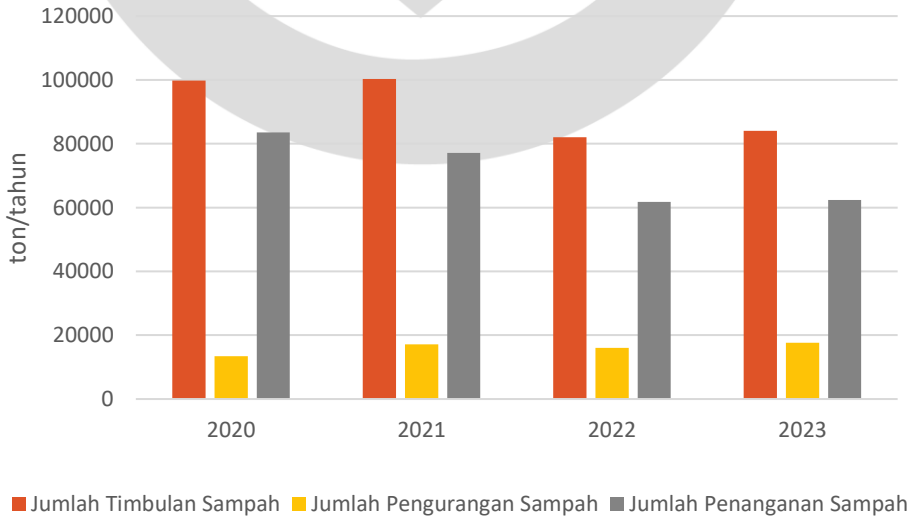
Masyarakat yang terlibat sudah secara perlahan memiliki kesadaran akan pengelolaan sampah bertanggung jawab serta mulai memilah sampah rumah tangga. Tidak hanya itu, keberadaan Bank Sampah juga semakin dimanfaatkan. Bank Sampah Cimahi atau Bank Samici, program yang diinisiasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Cimahi, kini semakin tersebar luas dengan 189 unit bank sampah didirikan serta memiliki nasabah sebanyak 1.124 anggota di seluruh Kota Cimahi.

Hadirnya Grak Ompimpah juga mendapat apresiasi dari banyak pihak, salah satunya melalui penghargaan *Katadata Green Initiative Awards*. Penghargaan ini diberikan atas inisiatif perusahaan atau instansi untuk menerapkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan dampak positif bagi lingkungan dan menciptakan sistem yang berkelanjutan.

Dalam program tersebut, dipilih 4 kader dari masing-masing untuk melaksanakan *door to door education* atau disingkat DTDE. Pada DTDE, kader di tiap RW mengedukasi masyarakat di RW dari rumah ke rumah untuk memilah sampah. Setelah DTDE dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan *door to door collection* atau DTDC, dimana kader kembali ke rumah-rumah yang telah diedukasi untuk memastikan bahwa masyarakat telah memilah sampah. DTDC bisa dilakukan beberapa kali sampai rumah tersebut benar-benar memilah sampah.



Gambar 4. 11 Kegiatan Grak Ompimpah



Gambar 4. 12 Tren Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi

- **TEPUNG (Teknologi Pendukung) GRAK OMPIMPAH**

TEPUNG GRAK OMPIMPAH merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan cakupan layanan pengelolaan sampah di Kota Cimahi yang akan dipergunakan untuk pengurangan sampah ke TPA, yang melibatkan semua unsur masyarakat yang melakukan pemilahan sampah di sumber sampah yaitu rumah tangga, serta peran dari kader di seluruh RW di Kota Cimahi yang membantu melakukan edukasi, monitoring dan pemantauan, serta pihak pemerintah yang melakukan pengolahan sampah, yang akan dilaksanakan di seluruh RW di Kota Cimahi sebanyak 312 RW. Teknologi Pendukung GRAK OMPIMPAH ini merupakan salah satu alternatif dalam menambah kapasitas pengolahan sampah. Peralatan pengolahan sampah yang akan digunakan di TPS 3R akan mengubah sampah menjadi energi alternatif pengganti batubara yang bisa digunakan oleh industri dalam menghemat anggaran pembelian batubara juga dapat mengurangi emisi dari bahan bakar yang digunakan. Selain itu kegiatan ini akan dilengkapi dengan teknologi informasi sebagai pusat pengendalian data dan informasi pengelolaan sampah yang dilakukan di masing-masing wilayah. Akan dilakukan pula peningkatan kapasitas dari petugas pengelola sampahnya. Data sarana prasarana sampah untuk mendukung kegiatan Grak Ompimpah diantaranya:

(1) Bank Sampah Induk
(2) TPS Gibrig
(3) TPS
(4) TPS 3R
(5) TPS Sentiong dan TPS Lebaksaat

Manfaat dari adanya tepung Grak Ompimpah diantaranya adalah

- Penyediaan peralatan dan mesin di lokasi pengolahan sampah
- *Up scaling* TPS menjadi TPS 3R
- Peningkatan kapasitas petugas pengolah sampah
- Penyediaan teknologi informasi pengelolaan sampah
- Monitoring dan evaluasi



Gambar 4. 13 Penggunaan Tepung Grak Ompimpah

- **Pentas Bank Sampah**

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa Dalam melakukan pengelolaan Sampah, Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah. Sebagai bentuk upaya pengurangan timbulan dan sampah yang dikirim ke TPA Sarimukti serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka dicanangkanlah program Peningkatan Kapasitas Bank Sampah atau disingkat Pentas Bank Sampah. Program ini merupakan program pengembangan dari program Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah atau disingkat Grak Ompimpah yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 lalu. Masyarakat yang telah diedukasi dalam pemilahan sampah, kemudian diberdayakan kembali untuk mengelola sampah yang telah mereka pilah antara organik, anorganik, dan residu. Sampah anorganik yang masih bernilai kemudian masih bisa dijual untuk diolah kembali dengan sarana pembentukan bank sampah unit. Sampah dari bank sampah unit kemudian disetorkan ke bank sampah induk. Program Pentas Bank Sampah tersebut dimulai dengan ditunjuknya masing-masing 2 fasilitator dari tiap kelurahan dan narasumber sebanyak 1 orang tiap 5 RW di masing-masing kelurahan. Fasilitator dan narasumber di masing-masing wilayah akan bertugas untuk mensosialisasikan mengenai Bank Sampah, mendorong tiap RW di

wilayahnya masing-masing untuk membentuk Bank Sampah Unit, serta mengevaluasi keaktifan Bank Sampah Unit yang telah dibentuk tersebut. Dengan ini masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Dalam pelaksanaannya, tentu tidak lepas koordinasi dengan perangkat kewilayahan yakni kelurahan dan kecamatan. Legalitas Bank Sampah Unit, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 12 ayat (3) huruf b bahwa Bank Sampah Unit dibentuk oleh Kepala Kelurahan, dan akta pendirian/dokumen lain yang menjelaskan legalitas Bank Sampah berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan, namun karena Kelurahan bukan merupakan SKPD maka penandatanganan dilimpahkan kepada Camat. Dengan adanya program Pentas Bank ini selain mengurangi timbulan dan pengiriman sampah ke TPA, tapi dapat pula memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Peningkatan Kapasitas Bank sampah (PENTAS BANK SAMPAH) merupakan lanjutan dari pengelolaan Bank sampah yang sudah dilakukan Kota Cimahi sejak Tahun 2015, akan tetapi kapasitas anorganik terkelolanya belum cukup signifikan. Dengan pembentukan bank sampah unit di setiap RW di 312 RW Kota Cimahi melalui program besar GRAK OMPIMPAH, akan memberikan dampak terhadap peningkatan volume sampah anorganik yang terkelola. Bank sampah unit baru yang terbentuk di setiap RW tersebut perlu dilakukan peningkatan kapasitasnya baik secara manajemen ataupun personil atau sumber daya manusianya. Kegiatan Pentas Bank Sampah diantaranya adalah sebagai berikut:

(1) Sosialisasi dan Edukasi
(2) Pembentukan Bank Sampah Unit di setiap RW
(3) Peningkatan Kapasitas Petugas Bank Unit
(4) Peningkatan Kapasitas Bank Sampah Induk
(5) Penyediaan peralatan pengolahan di Bank sampah
(6) Pengembangan Sirkular Ekonomi

Manfaat dari pentas bank sampah ini adalah untuk Meningkatkan kualitas lingkungan melalui pelayanan pengelolaan sampah, Meningkatkan daya dukung pengelolaan sampah di Bank Sampah Induk dan Bank Sampah Unit, Meningkatkan mutu lingkungan perkotaan yang bersih dan nyaman dan Meningkatkan nilai ekonomis dari pengelolaan sampah.



Gambar 4. 14 Sosialisasi Pentas bank Sampah

- **CEU OMAH (Cimahi Edukasi Pengolahan Sampah)**

Perkembangan fisik Kota Cimahi yang diiringi dengan pertambahan penduduk dan peningkatan timbulan sampah menuntut adanya sebuah

sistem pengelolaan dan penanganan masalah persampahan yang baik. Pengelolaan dan penanganan persampahan diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat dari timbulan sampah yang ada. Oleh karenanya harus ada usaha pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya. Perkembangan aktivitas masyarakat yang pesat bila dibandingkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah menuntut Pemerintah Kota untuk terus menambah program kegiatan dalam proses pengelolaan persampahan, diantaranya dengan menggalakkan program pemilahan awal sampah di sumber, dimana warga diharuskan untuk memilah sampah di rumahnya masing-masing sebelum dibuang ke tempat sampah serta dengan mengembangkan gerakan 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace*) dengan mengurangi barang-barang yang hanya satu kali pemakaian dapat menyebabkan timbulan sampah, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan, dan memanfaatkan kembali sampah dengan proses daur ulang.

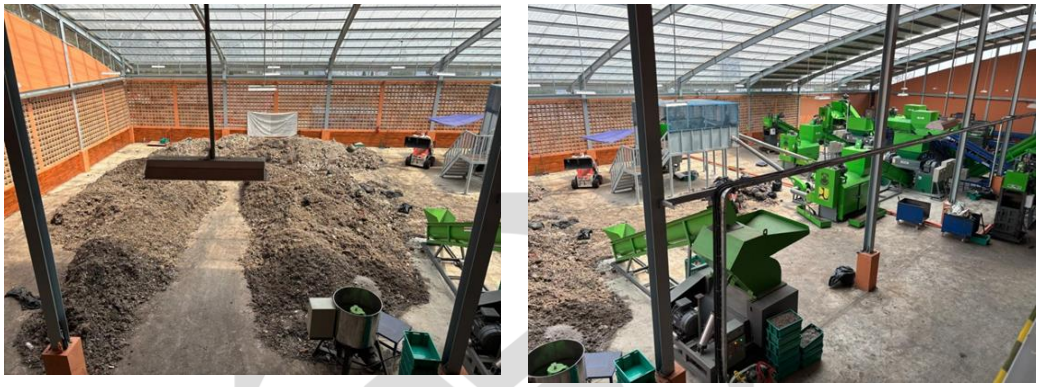
Kegiatan Cimahi Edukasi Pengolahan Sampah (CEU OMAH) di sekolah ini dilakukan dengan cara sosialisasi, pelatihan pengolahan sampah dan permainan yang berkaitan tentang pengolahan sampah serta pemberian hadiah dari permainan pengolahan sampah agar dapat menarik pagi seluruh peserta didik.



Gambar 4. 15 Kegiatan CEU OMAH di Kota Cimahi

4.10 TPS RDF Santiong

RDF atau *refuse derived fuel* adalah bahan bakar alternatif dari sampah campuran pengganti batu bara. RDF dapat mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Terdiri dari sampah campuran, pengolahan sampah dengan teknologi RDF diterapkan di TPST Santiong yang memiliki kapasitas 50 ton/hari dan *offtaker* dari RDF tersebut adalah PT Indocement.



Gambar 4. 16 Kondisi TPS RDF Santiong

4.11 TIPIRING SAMPAH (Tindak Pidana Ringan Pembuangan Sampah)

Menindaklanjuti Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 658/Kep.579-DLH/2023 tentang penetapan status darurat sampah Bandung Raya dan Keputusan Walikota Cimahi Nomor 658.1/Kep.2563-DLH/2023 tentang Penetapan Status Darurat Sampah di Daerah Kota Cimahi maka Pemerintah Daerah Kota Cimahi melakukan serangkaian upaya untuk menanggulangi hal tersebut, salah satunya dengan penegakan hukum. DLH Kota Cimahi telah melaksanakan serangkaian kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah Kota Cimahi nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah yang dilaksanakan pada tanggal 15, 18, 22, 25, 29 September 2023 dan 2 Oktober 2023. Dalam kegiatan operasi yustisi dan sidang tindak pidana ringan bagi pelanggar yang kedapatan melanggar perda Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah DLH Kota Cimahi mengikutsertakan

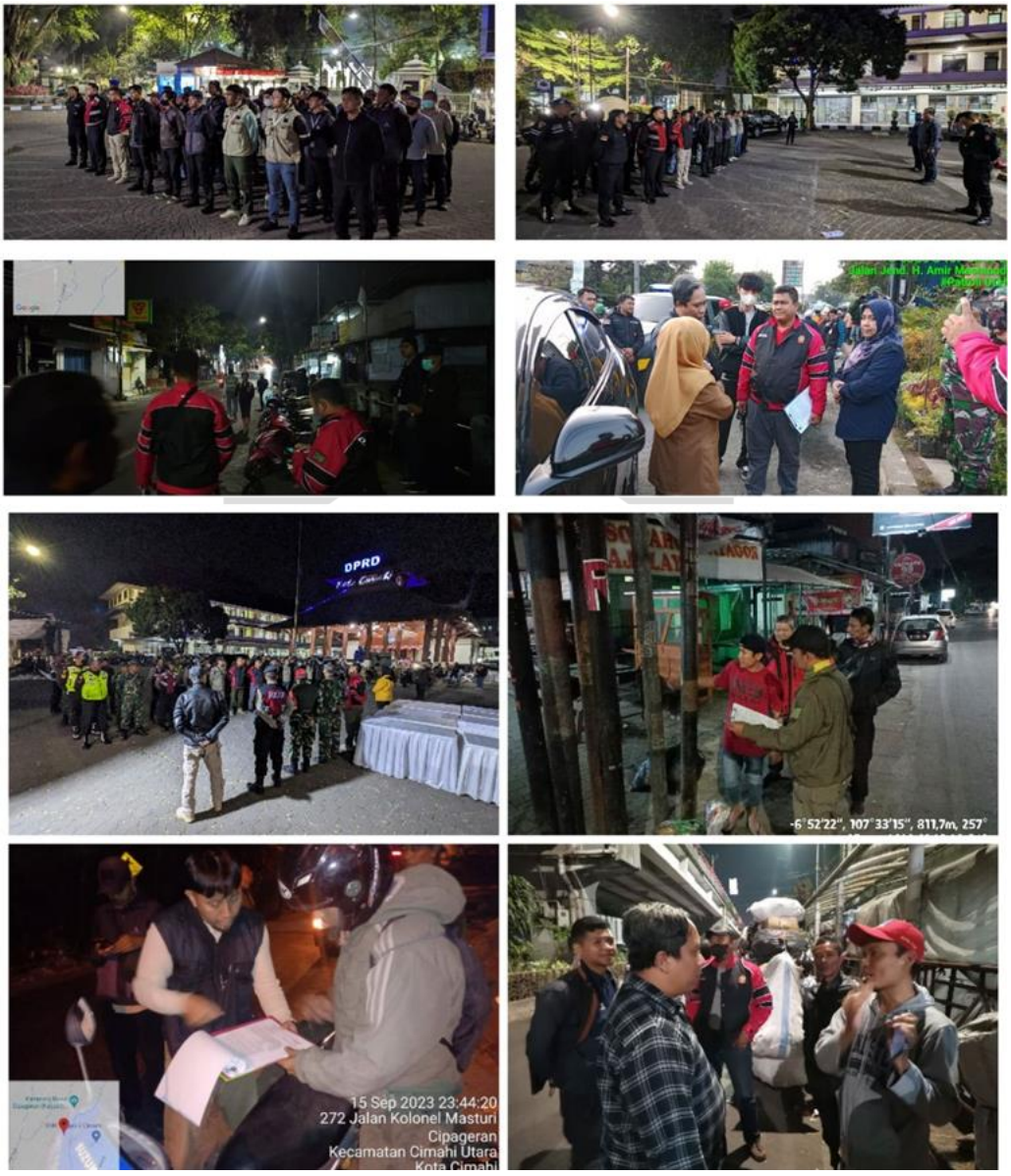
aparat penegak hukum dan perangkat daerah terkait seperti unsur pengadilan negeri bale Bandung kelas 1A, unsur kejaksaan negeri Cimahi, kepolisian dari polres Cimahi, Kodim 0609, Sub Garnisun, Sub denpom, satgas citarum harum, Satpol PP Kota Cimahi, unsur bagian hukum sekretariat daerah kota Cimahi.

Dalam kegiatan Operasi Yustisi yang dilaksanakan pada tanggal 15 dan 18 September 2023 berhasil diamankan sebanyak total 46 orang pelanggar dimana 31 orang pelanggar mendapatkan surat panggilan sidang dan diamankan kartu identitasnya sedangkan 15 orang pelanggar lainnya telah diproses terlebih dahulu oleh penyidik pegawai negeri sipil pada satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sehubungan dengan aksi buang sampah ke sungai Citopeng yang mereka lakukan viral di media sosial. Para pelanggar dijatuhi Pidana Denda berkisar dari Rp. 20.000 s.d. Rp. 200.000 (dua puluh ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah) dalam sidang yang dipimpin oleh hakim Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., dan perangkat lainnya untuk membayar denda sesuai dengan vonis majelis hakim dan kemudian disetor ke kas negara.

Dalam kegiatan Operasi Yustisi yang dilaksanakan pada tanggal 22 dan 25 September 2023 berhasil diamankan sebanyak total 58 (lima puluh delapan) orang pelanggar. Para pelanggar dijatuhi pidana denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Nurhayati Nasution, S.H., M.H. dan perangkat lainnya untuk membayar denda sesuai dengan vonis majelis hakim dan kemudian disetor ke kas negara.

Dalam kegiatan Operasi Yustisi yang dilaksanakan pada tanggal 29 September dan 2 Oktober 2023 berhasil diamankan sebanyak total 70 (tujuh puluh) orang Pelanggar. ara pelanggar dijatuhi Pidana Denda berkisar dari Rp. 20.000 s.d. Rp. 200.000 (dua puluh ribu rupiah sampai dengan dua ratus ribu rupiah) dalam sidang yang dipimpin oleh hakim Dr. Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., dan perangkat lainnya untuk membayar

denda sesuai dengan vonis majelis hakim dan kemudian disetor ke kas negara.



Gambar 4. 17 Kegiatan Tipiring Sampah

4.12 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa tim teknis/pelaksana PROPER adalah KLHK dan Dinas Lingkungan Hidup

Provinsi, yang artinya tidak ada kota/kabupaten sebagai pelaksana PROPER setelah adanya PermenLHK No.1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun DLH Kota Cimahi melaksanakan kegiatan sejenis PROPER yaitu Monev Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan demi melakukan pembinaan secara menyeluruh terhadap para pelaku usaha di Kota Cimahi sehingga terstimulasi untuk mendapatkan predikat taat baik pengelolaan pencemaran air, pengelolaan pencemaran udara, pengelolaan limbah B3.

Banyaknya aturan terkait pengelolaan lingkungan hidup membuat para pelaku usaha kesulitan baik dari hal pengelolaan hingga pelaporan sehingga banyak perusahaan yang diawasi abai terhadap kewajibannya, dengan adanya Monev Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan dapat membentuk dan membiasakan para pelaku usaha agar mendapatkan predikat 'Compliance' dalam kewajiban pengelolaan lingkungan hidup di Perusahaannya (taat terhadap kewajiban Dokumen Lingkungan, Pengelolaan Pencemaran Air, Pengelolaan Pencemaran Udara dan Pengelolaan Limbah B3), sehingga Perusahaan di Kota Cimahi diharapkan dapat taat dalam seluruh aspek pengawasan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi merupakan perintis Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan yang merupakan kegiatan sejenis PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) dari KLHK, yang tidak semua kota/kabupaten membuat/memiliki kegiatan sejenis.

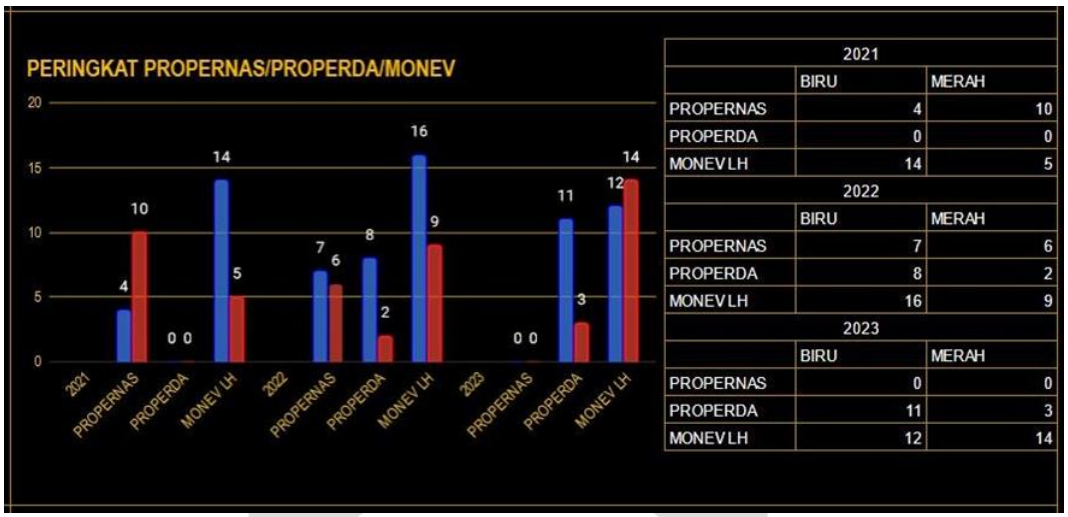
Berikut adalah salah satu contoh perusahaan yang sebelumnya tidak taat menjadi taat dalam pengelolaan limbah B3:



Gambar 4. 18 Hasil monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaku Usaha

Dampak keberhasilan dari inovasi ini adalah bagi perusahaan yang sebelumnya tidak taat karena belum mengetahui apa saja yang menjadi kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup setelah menjadi peserta monev akan mengetahui hal apa saja yang menjadi poin untuk perbaikan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan sehingga bisa menjadi taat melalui pendekatan pembinaan dan mendapat rapor merah lalu diikutsertakan kembali menjadi peserta monev hingga mendapat rapor biru. Bagi perusahaan yang telah taat akan mendapatkan rapor biru serta penghargaan, yang mana penghargaan ini dapat menjadi bukti bahwa

perusahaan telah taat terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai periode penilaiannya.



	BIRU	MERAH
2021		
PROPERNAS	4	10
PROPERDA	0	0
MONEV LH	14	5
2022		
PROPERNAS	7	6
PROPERDA	8	2
MONEV LH	16	9
2023		
PROPERNAS	0	0
PROPERDA	11	3
MONEV LH	12	14

Gambar 4. 19 Rekap Peringkat Penilaian Ketaatan Kegiatan Usaha

4.13 Proklim (Pembinaan Program Kampung Iklim)

Proklim merupakan pembinaan dan apresiasi terhadap masyarakat atas peran sertanya dalam adaptasi mitigasi perubahan iklim, sehingga terbentuknya lingkungan masyarakat yang berbudaya lingkungan. Dasar Pelaksanaan PROKLIM adalah

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM
- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim NOMOR P.1/PPI /SET/KUM.1/2/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM
- Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim NOMOR P.4/PP I /AP I /PP I .0/3/2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM
- SE Gubernur Jawa Barat No.08/GUB/DLH/2018 Upaya Pengendalian Perubahan Iklim

Inovasi dalam pembinaan Proklim Kota Cimahi Tahun 2024 diantaranya:

1. *Training Of Trainers* bagi pembina, kegiatan ini dilaksanakan dengan narasumber dari KLHK untuk mempersiapkan pembina sebelum membina masyarakat.
2. Study banding lokasi Proklim
3. Sistem pengumpulan data dukung dari masyarakat, menggunakan *word* dengan format yang sudah disiapkan sehingga masyarakat mudah untuk memasukkan data dukung.
4. Klinik Proklim

Tujuan Proklim sendiri adalah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi lokal (RW) untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Manfaat program ini adalah:

- Meningkatnya ketahanan masyarakat dalam menghadapi variabilitas iklim dan dampak perubahan iklim
- terukurnya potensi dan kontribusi pengurangan emisi GRK suatu lokasi, terhadap pencapaian target penurunan emisi GRK nasional
- tersedianya data kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta potensi pengembangannya di tingkat lokal yang dapat menjadi bahan masukan dalam perumusan kebijakan, strategi dan program terkait perubahan iklim.

Bentuk dorongan yang diberikan dengan memberikan status pengakuan yang ditandai dengan pemberian sertifikat dan atau tropi berdasarkan hasil verifikasi lapangan. Kriteria penilaian proklim terdiri dari:

1. Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor
2. peningkatan ketahanan pangan
3. pengendalian penyakit terkait iklim
4. pengelolaan sampah, limbah padat dan cair
5. budidaya pertanian rendah emisi
6. penggunaan energi baru terbarukan, konservasi dan penghematan energi

7. meningkatkan/mempertahankan tutupan vegetasi

4.14 UPTD Rusunawa *Ecogreen*

Rusunawa Leuwigajah Kota Cimahi bermula dari adanya masalah yang terjadi sejak Rusunawa itu berdiri tahun 2014, yaitu tidak adanya saluran pembuangan air limbah domestik (*greywater*) ke luar. IPAL saat itu tidak dijalankan secara baik, mengakibatkan IPAL tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Alhasil, dengan tidak berfungsinya IPAL untuk mengolah air limbah domestik penghuni rusun, ditambah tidak adanya saluran pembuangan air limbah ke luar rusun mengakibatkan limbah *greywater* itu menumpuk dan memenuhi saluran-saluran air di area rusun.

Pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari membersihkan genangan air limbah yang ada di saluran-saluran air rusun, dengan bantuan dari UPTD SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik), lumpur-lumpur tebal hitam diangkat dari dasar saluran air. Selanjutnya, mulai proses Revitalisasi dan Reaktivasi IPAL yang ada di Rusunawa Leuwigajah termasuk memperbaiki dan menambah kapasitas *chamber* penampungan. Memperbaiki sistem pemipaan dan pembersihan bak-bak kontrol termasuk mengganti penutup bak kontrol yang sudah rusak dengan pelat besi agar mudah dibuka dan dibersihkan saat *maintenance.*







Gambar 4. 20 Kegiatan Rusunawa *Ecogreen*

4.15 Data *Ngahiji*

Sebagai solusi integrasi data pemerintahan, Data *Ngahiji* hadir sebagai platform terpusat untuk penyimpanan dan akses data spasial, mendukung visi integrasi data dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cimahi. Data *Ngahiji* berupa aplikasi berbasis WEB *opensource* menggunakan *CMDBuild* versi 3.4

Perwujudan Satu Data Satu Peta menjadi hal yang penting dalam setiap pengambilan kebijakan dari tataran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk semua kepentingan, sehingga keberadaan Data *Ngahiji* sebagai wadah atau alat dalam penyelenggaraan pembangunan informasi geospasial di Kota Cimahi yang dapat mengumpulkan semua data spasial, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh semua perangkat daerah dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi dapat melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran, karena dengan satu data satu peta ini dapat terwujud anggaran yang tepat sasaran dan tepat kebijakan. Dengan terwujudnya satu data satu peta ini pula dapat dengan mudah menilai tingkat perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dalam kurun waktu tertentu, informasi terkait pengembangan investasi di Kota Cimahi pun dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Kualitas dokumen Rencana Tata Ruang dan upaya pengendaliannya akan juga akan mudah dan akurat.

Pengembangan dan penetapan status melalui Keputusan Walikota untuk aplikasi Data *Ngahiji* sebagai wadah pengelolaan data informasi geospasial di Kota Cimahi melalui kelembagaan Simpul Jaringan Daerah Kota Cimahi yang terkoneksi dengan Geoportal BIG yang merupakan Simpul Jaringan Nasional.

Keunikan Data *Ngahiji* yang telah terbangun adalah sebagai berikut:

(1) Data yang sudah ada didalam aplikasi Data Ngahiji adalah:
- Peta Ortho skala 1 : 1000
- Informasi Geospasial Dasar (Peta Garis)
- Informasi Geospasial Tematik Dasar (Peta Administrasi Wilayah, Batas Kelurahan, Batas RW di beberapa Kelurahan)
- Informasi Geospasial Tematik Sektor (beberapa masih berupa arahan lokasi belum dilengkapi dengan atribut)
- Informasi administrasi Pertanahan (Slot untuk data persil pertanahan) dengan tematik data perijinan dan PBB
- Informasi Toponimi sudah terkoneksi dengan aplikasi SINAR di BIG yang dioperasionalkan oleh Bagian Pemerintahan Setda

(2) Data Ngahiji sudah terkoneksi dengan Geoportal Kota Cimahi di BIG, sehingga data yang akan dipublish bisa langsung terpublish melalui geoportal tanpa harus upload ulang data peta, tinggal menentukan data-data petamana saja yang sudah siap untuk di publish.

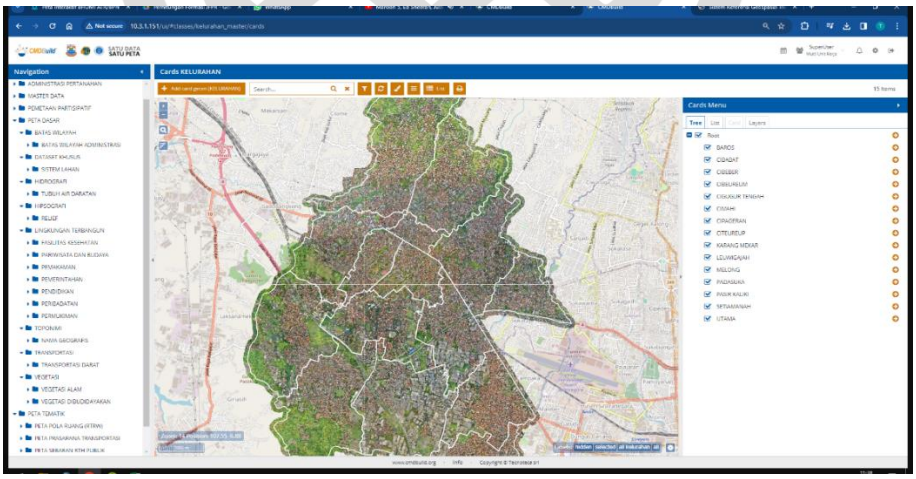
(3) Guna mempermudah pemanfaatan peta ortho dan peta garis, FITB membuat aplikasi "Data Ngahiji" dan telah masuk ke dalam web servis Pemerintah Kota Cimahi melalui Diskominfo tanggal 7 Agustus 2023 dengan alamat web : http://10.3.1.151:8080/datangahiji

(4) Pembuatan Peta Pendataan Data Kelurahan Presisi Kota Cimahi:
- Data sensus untuk 2 kelurahan yaitu Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Pasirkaliki pada tahun 2023, dan dilanjutkan sensus 13 kelurahan pada tahun 2024

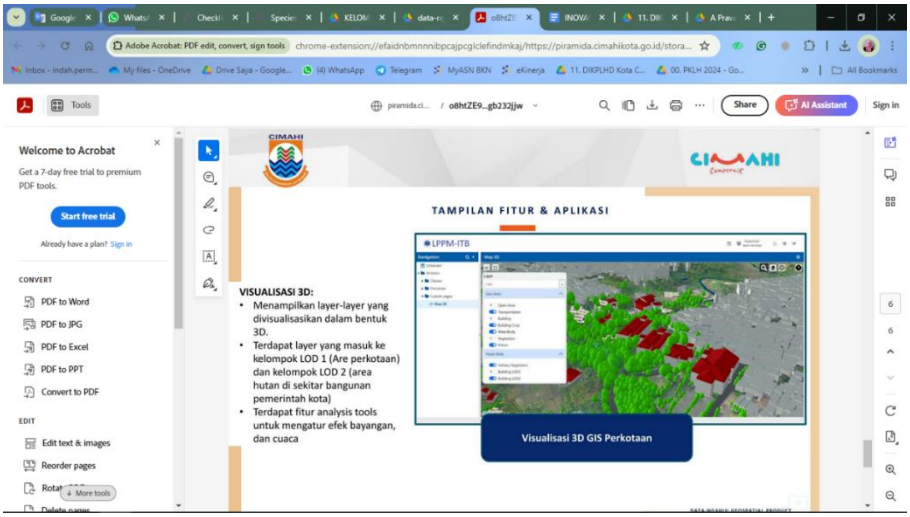
- Peta kerja yang terdiri dari peta ortho, peta administrasi, peta sarana dan prasarana, dan peta topografi telah dilakukan untuk seluruh kelurahan di Kota Cimahi (15 Kelurahan). Data yang dihasilkan dalam kerjasama dengan IPB ini nantinya akan mengisi atribut dan menambahkan peta-peta tematik pada aplikasi data ngahiji yang kedepannya harus dilakukan pemutakhiran data oleh perangkat daerah yang terkait.

(5) Kondisi Perangkat Daerah Di Kota Cimahi berdasarkan Prioritas Ketersediaan Data Spasial/Peta Tahun 2023 terdiri dari :

- Prioritas I : Perangkat Daerah yang telah memiliki data informasi geospasial dan yang memiliki aplikasi yang berbasis GIS sebanyak 11 Perangkat Daerah
- Prioritas II : Perangkat Daerah yang sudah memiliki data tabular yang sudah atau belum mempunyai koordinat lokasi sebanyak 28 Perangkat Daerah.
- Prioritas III : Perangkat Daerah yang masih memerlukan inventarisasi kebutuhan data peta sebanyak 4 Perangkat Daerah.



Gambar 4. 21 Dashboard Aplikasi Cimahi *Ngahiji*



Gambar 4. 22 Visualisasi 3D GIS Perkotaan

4.16 JAWARA

Sungai merupakan salah satu sumber kehidupan yang utama bagi kehidupan manusia, dan sungai yang bersih akan menciptakan kehidupan yang sehat. Namun, melihat kondisi sungai saat ini sangat memprihatinkan, terbukti dengan adanya sampah, limbah domestik, dan limbah industri yang dibuang langsung ke aliran sungai. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pencemaran sungai ini, contohnya seperti banjir, longsor, dan berbagai penyakit. Hal ini, disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian dan kebersihan sungai. Krisis kebersihan sungai dapat dilihat dari tingkat pencemaran yang terjadi pada DAS Citarum, dan Kota Cimahi merupakan salah satu kota yang dilalui oleh anak sungai Citarum. Untuk mengurangi tingkat pencemaran pada DAS Citarum, kita harus mengurangi tingkat pencemaran aliran anak sungai yang ada di Kota Cimahi. Hal ini, dapat dilakukan dengan adanya sinergitas antara pemerintah kota dan masyarakat. Maka dari itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai dan mengurangi tingkat pencemaran pada sungai, kami membuat kegiatan Jawara (Jaga

Walungan Sarerea) atau dalam bahasa Indonesia berarti menjaga sungai bersama-sama.

Kegiatan Jawara ini bertujuan untuk menjalin sinergitas dengan masyarakat dalam menjaga kelestarian sungai. Dengan harapan, kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan menurunkan tingkat pencemaran sungai yang ada di Kota Cimahi, agar dapat menghasilkan aliran sungai yang lebih bersih dan sehat. Kegiatan sosialisasi Jawara ini diikuti oleh para ketua RW dan tokoh masyarakat di masing-masing wilayah yang ada di Kota Cimahi.

- Contoh Kegiatan Jawara

  LAPORAN KEGIATAN PEMBERSIHAN SUNGAI CITOPENG RW 22 JL. Terusan Karang Sari RW 01 kel. Cibeurem perbatasan RW 22 Kel. Melong.

  Menindaklanjuti informasi yang ramai di media sosial, terkait pembuangan sampah ke aliran sungai. Tim Patroli Sungai Cimahi berkolaborasi dengan Satgas Citarum Harum sektor 21, Gober, BPBD, Kelurahan, Babinsa dan masyarakat setempat untuk membersihkan dan mengangkat sampah yang menumpuk di aliran sungai untuk diangkut ke wilayah satgas sektor 7.



Gambar 4. 23 Proses Pembersihan dan Pengangkutan Sampah



Gambar 4. 24 Sosialisasi terkait Larangan Pembuangan Sampah ke Sungai

4.17 Gema Bugar

Gerakan Makan Buah Segar merupakan suatu gerakan melibatkan pegawai yang bekerja di perkantoran Jl. raden demang hardjakusumah, untuk makan buah-buahan segar dan memilah bijinya untuk dilanjutkan melaksanakan persemaian di posko bibit. Dasar hukum inovasi gema bugar adalah Instruksi Wali Kota Cimahi Nomor 02 tahun 2021 tentang Gerakan Makan Buah Untuk Peningkatan Luasan Konservasi ("Gema bugar untuk Konser") Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi.



Gambar 4. 25 Kegiatan Gema Bugar Kota Cimahi

4.18 QRIS Retribusi Sampah

Penggunaan QRIS sudah dijajaki sejak tahun 2022, di bulan Mei, oleh UPTD Pelayanan Persampahan Kota Cimahi. Hal ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kaidah SPBE yang sedang giat diselenggarakan di tingkat pemerintah Kota Cimahi sebagai bentuk implementasi kebijakan pemerintah pusat. Sampai dengan tahun 2023, dari penerimaan retribusi persampahan sebesar 2,3 milyar, sebesar 12,5% transaksi sudah menggunakan QRIS, atau setara dengan 287 juta.



Gambar 4. 26 Kegiatan Pembayaran Retribusi Sampah

4.19 GRIYA PLUS

Griya PLUS adalah perbaikan rumah tidak layak huni yang dilengkapi dengan perbaikan jamban atau disebut Griya PLUS (Pastikan Layak Utamakan Sehat).Tahun 2023, pekerjaan perbaikan jamban griya plus telah dilaksanakan sebanyak 25 unit. Di lokasi P2WKSS (RW 12 Kelurahan Utama) sebanyak 10 unit, serta pada lokasi BBGR di setiap kelurahan total 15 unit.



(a) (b)

Gambar 4. 27 Kegiatan Perbaikan Jamban. (a) Sebelum Perbaikan (b) Setelah Perbaikan



(a) (b)

Gambar 4. 28 Kegiatan Perbaikan Rumah. (a) Sebelum Perbaikan (b) Setelah Perbaikan

4.20 Gertam Parti

Gerakan Tanam Cepat Panen Hortikultura yang dapat meningkatkan ekonomi dan daya beli masyarakat dan juga sebagai salah satu upaya menekan inflasi sehingga dengan ketersediaan komoditas penyumbang inflasi tertinggi ini dapat menekan harga.





Gambar 4. 29 Kegiatan Gertam Parti

4.21 Siterang-DIGI

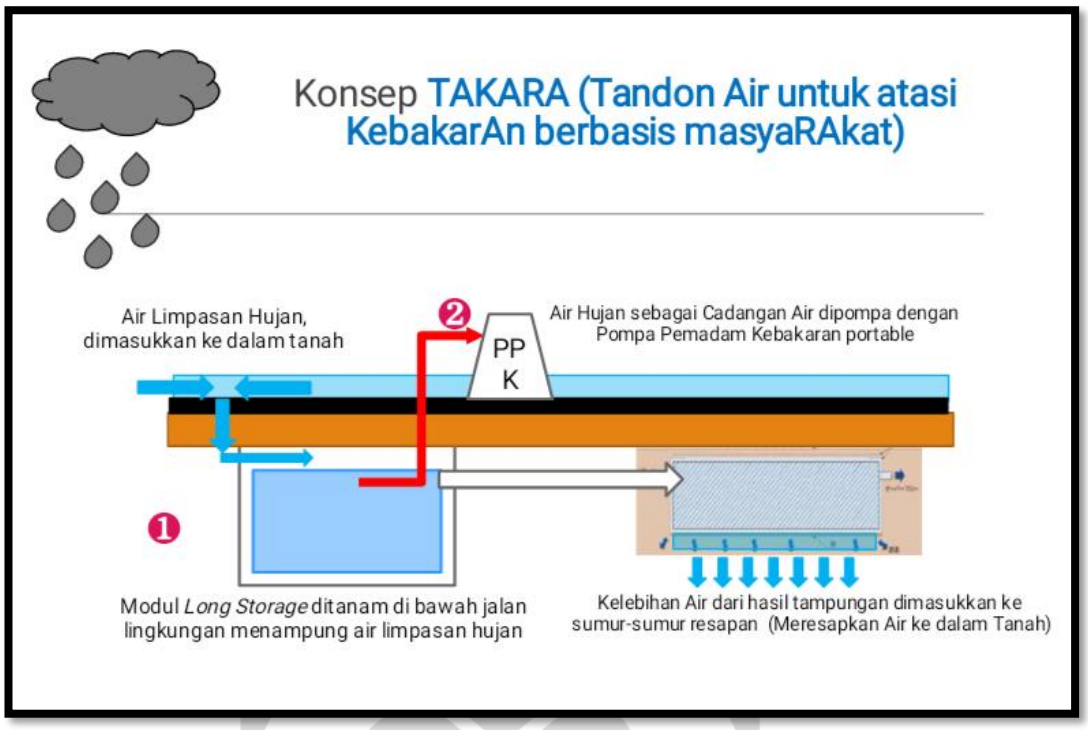
Vaksinasi rabies dan flu burung yang diberikan secara gratis untuk masyarakat Kota Cimahi. Vaksinasi dilakukan dengan mendatangi tempat vaksinasi sehingga memudahkan masyarakat untuk membawa hewan peliharaannya.



Gambar 4. 30 Pelaksanaan Inovasi Siterang

4.22 TAKARA

TAKARA adalah akronim dari **T**andon **A**ir untuk atasi keba**KA**ran berbasis masya**RA**kat. merupakan usulan inovasi untuk mengatasi genangan/banjir di permukiman. Konsep : genangan yang mengalir di permukiman ditampung (detensi) pada suatu *ground tank* yang berada di bawah jalan lingkungan, untuk *d*ijadikan cadangan air saat terjadi kebakaran. Pemanfaatannya menggunakan pompa pemadam kebakaran *portable* yang disimpan di masyarakat. Kelebihan air hasil tampungan dari Tandon air *(ground tank)* dialirkan ke sumur-sumur resapan yang juga berada di jala lingkungan (retensi).



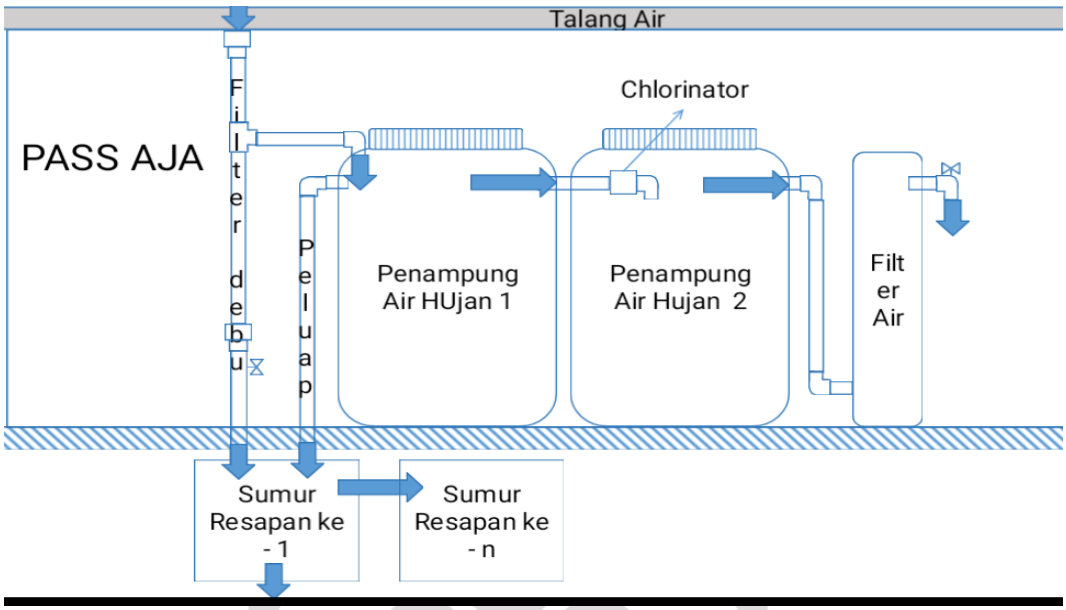
Gambar 4. 31 Konsep Inovasi TAKARA

4.23 PASS AJA

PASS AJA adalah akronim dari **P**emanenan **A**ir hujan dengan **S**aringan **S**ederhana **A**gar **J**adi **A**ir baku air minum. Merupakan usulan inovasi untuk alternatif mengatasi ketersediaan air bersih di permukiman kumuh karena sulitnya sumber air tanah (akibat larangan pengambilan air tanah di cekungan Bandung) dan belum adanya akses jaringan air minum perkotaan (PDAM).

Konsepnya air hujan yang jatuh di talang rumah dialirkan ke dalam tangki penampung 1 yang sebelumnya dipasang saringan kotoran/debu sederhana. Selanjutnya air hasil tampungan dialirkan ke Tangki penampungan 2 setelah melewati *chlorinator* (alat pembubuh klorin) agar air bebas bakteri patogen. Hasil tampungan kedua selanjutnya dialirkan ke filter sederhana yang berisi berbagai media saring (pecahan bata merah, batu gamping, zeolit, karbon aktif) agar air hujan mengandung mineral dan

siap jadi air baku air minum. Kelebihan air dari tampungan di penampungan pertama dialirkan ke sumur resapan.

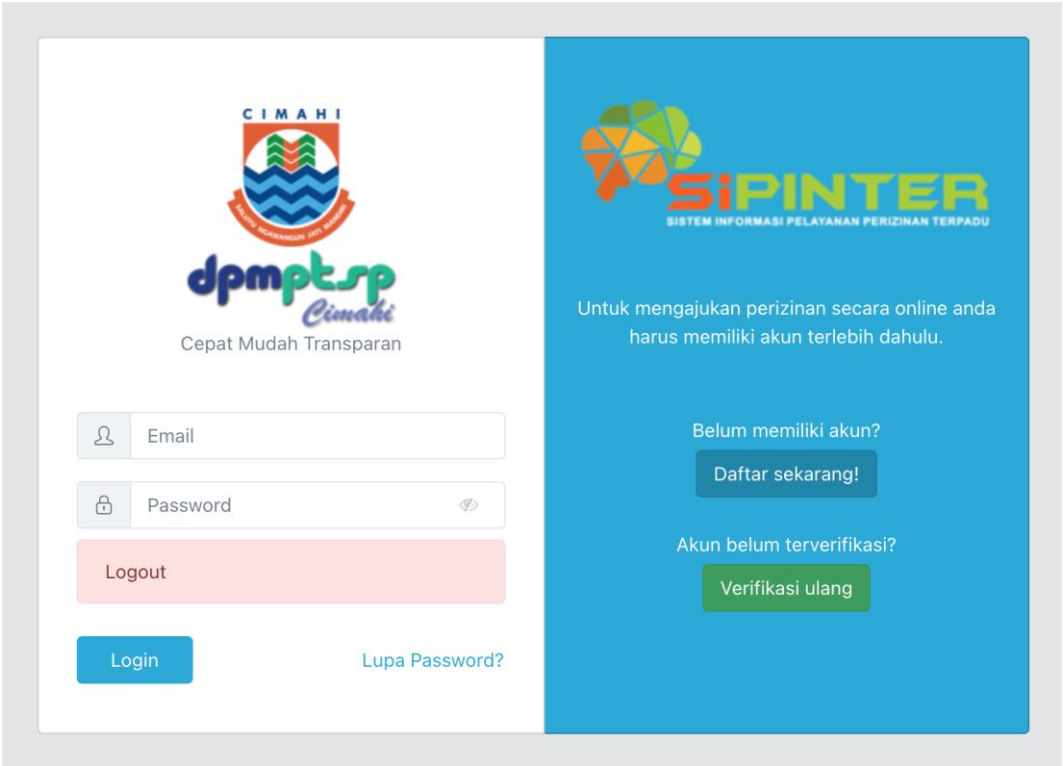


Gambar 4. 32 Konsep Inovasi PASS AJA

4.24 SiPinter (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu)

Tujuan Pengembangan Aplikasi Sipinter adalah untuk memberikan kemudahan kepada pemohon izin agar dapat mengajukan permohonan izin kapan pun dan dimanapun, sehingga terjadi efisiensi waktu, biaya dan tenaga dari masyarakat selaku pemohon izin. Manfaat Sipinter bagi masyarakat:

(1) Mempercepat durasi proses penerbitan izin
(2) Efisiensi waktu dan tenaga karena tidak harus datang langsung ke DPMPTSP
(3) Pendaftaran dengan akses internet bisa dilakukan kapan pun dan dimanapun;
(4) Memperkecil kemungkinan adanya praktik percaloan.



Gambar 4. 33 *Dashboard* Aplikasi SiPinter

BAB V
PENUTUP

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) berisikan laporan utama informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Penulisan laporan ini disajikan dengan melakukan hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status atau kondisi saat ini, akibat, dan Upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup dalam kerangka DPSIR (*Driving Force, Pressure, State, Impact, Response)*. DIKPLHD merupakan pijakan untuk pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi adalah gambaran secara umum pengelolaan lingkungan hidup yang berisi informasi aktual dalam hal ini disampaikan dalam tahun 2024. DIKPLHD Kota Cimahi juga membahas isu prioritas yang menjadi isu lingkungan hidup utama yang perlu diperhatikan secara seksama dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan inovasi-inovasi yang diluncurkan sepanjang tahun 2024. Dokumen IKPLHD merupakan salah satu Upaya dalam penyediaan sistem informasi lingkungan seperti yang tercantum dalam Undang-Undan Nomor 32 Tahun 2009. Sehingga dokumen IKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024 dapat menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup.

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis isu lingkungan hidup dan isu prioritas yang telah dilakukan menggunakan pendekatan DPSIR, dapat disimpulkan beberapa hal, yakni:

a. Sebagaimana disyaratkan dalam Pedoman Penyusunan DIKPLHD oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, sebagian besar data yang dibutuhkan telah berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber. Pengumpulan data ini dilakukan guna memberikan informasi dasar mengenai isu lingkungan hidup di Kota Cimahi Tahun 2023;
b. Penetapan isu lingkungan hidup prioritas dilakukan berdasarkan analisis DPSIR dan verifikasi dalam FGD dengan *stakeholder* terkait, didapatkan isu prioritas lingkungan hidup di Kota Cimahi pada tahun 2024 adalah:
    1. Kualitas dan Kuantitas Air
    2. Kualitas Udara
    3. Pengelolaan Sampah
    4. Alih Fungsi Lahan
    5. Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan
c. Upaya Pemerintah Kota Cimahi dalam mengatasi isu lingkungan hidup prioritas dituangkan dalam bentuk Inovasi Daerah Kota Cimahi, adapun inovasi yang dimaksud yaitu:
    1. Grak Ompimpah
    2. Data *Ngahiji*
    3. Pelaporan Persetujuan Lingkungan (Patali)
    4. Sistem Informasi Status Lingkungan (Sitangan)

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, rencana dan tindak lanjut termasuk yang berimplikasi kepada kebijakan Kepala Daerah yang perlu diperhatikan antara lain:

a. Menjadikan isu prioritas terkait lingkungan hidup sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan

Hidup Daerah (DIKPLHD) sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan Kota Cimahi.

b. Berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pengelolaan lingkungan pada wilayah Kota Cimahi untuk meningkatkan nilai IKLH
c. Meningkatkan cakupan layanan air minum dan sanitasi, sebagai implementasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan mengurangi beban pencemar yang dibuang ke badan air penerima, khususnya dari sektor domestik.
d. Melakukan berbagai pengembangan upaya pengelolaan sampah seperti pengurangan sampah dari sumbernya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sirkuler, untuk mengurangi jumlah timbulan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir dan mencapai target pengurangan-penanganan sampah sesuai Jakstrada Kota Cimahi.
e. Merencanakan pembangunan berkelanjutan melalui program unggulan Walikota, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik dan sistem informasi berbasis elektronik untuk memberikan kemudahan pada masyarakat juga mengurangi emisi sektor transportasi.
f. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan persetujuan lingkungan dari pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan memanfaatkan teknologi informasi terkait pengawasan emisi dari sumber titik.
g. Mengurangi terjadinya alih fungsi lahan, terutama ruang terbuka yang memiliki indikasi jasa ekosistem keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk meningkatkan nilai ekonomi dari lahan terbuka melalui pengembangan agroforestri dan ekowisata dengan memberdayakan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, R. P. (2018). Studi Sesar Lembang Menggunakan Citra Sentinel-1a Untuk Pemantauan Potensi Bencana Gempa Bumi. Jurnal Geodesi Undip, 7(4), 304–313.

Alaerts, G., & Santika, S. S. (1987). M*etode Penelitian Air*. Surabaya: Usaha Nasional.

Arkhovi, M. B. (2017). *Perencanaan Paket Ekowisata di Kampung Adat Cireundeu, Cimahi*. Bandung: Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.

Badan Pusat Statistik (2023). *Kota Cimahi Dalam Angka 2023*.

Badan Pusat Statistik (2022). *Kota Cimahi Dalam Angka 2022*.

Badan Pusat Statistik (2021). *Kota Cimahi Dalam Angka 2021*.

Badan Pusat Statistik (2020). *Kota Cimahi Dalam Angka 2020*.

Badan Pusat Statistik. (2019). *Kota Cimahi Dalam Angka 2019*.

Danoedoro, P. (2008). Membangun Sistem Klasifikasi Penggunaan Lahan Multiguna. Conference: Flora Tematik Sumber Daya Alam Darat, 1 (Agustus 2008).

Dinas Lingkungan Hidup Kota Kota Cimahi (2018). Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Tahun 2018-2022.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. (2017). Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2017.

Effendi, H. (2003). Telaah kualitas air, bagi pengelolaan sumber daya dan lingkungan perairan: Kanisius.

Hartanto, Nur, Zulkarnain, & Abror Aji Wicaksono (2022). *Analisis Beberapa Sifat Fisik Tanah Sebagai Indikator Kerusakan Tanah Pada Lahan Kering*. Kalimatan Timur: Jurnal Agroteknologi Tropika Lembab.

Juniari, T. (2020). KLHK Perpanjang Kontrak TPA Sarimukti Hingga 2025. https://ayobandung.com/read/2020/02/19/80022/klhk-perpanjang-

kontrak-tpa-sarimukti-hingga-2025, Diakses pada tanggal 19 Februari 2021

Juwana, I., Muttil, N., & Perera, B. (2012). I*ndicator-based water sustainability assessment—A review*. Science of the Total Environment, 438, 357-371.

Juwana, I., Perera, B., & Muttil, N. (2010a). A water sustainability index for West Java–Part 2: refining the conceptual framework using Delphi technique. Water Science and Technology, 62(7), 1641-1652.

Juwana, I., Perera, B., & Muttil, N. (2010b). *A water sustainability index for West Java. Part 1: developing the conceptual framework*. Water Science and Technology, 62(7), 1629-1640.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Kusmawati, I. K. A. (2010). Penataan Taman Kartini. 10(2), 1–11.

Kusmiyarti, Tati B., Rukmana, Riska P., Kusmawati T. (2016). K*ajian Potensi dan Status Kerusakan Tanah Pada Lahan Pertanian di Kecamatan Denpasar Timur*. Bali: Jurnal Agroteknologi Tropika.

Meik, Suhartatik, H. S. D. (2018). Keluarga Terhadap Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Di Kecamatan Tamalarea Kota Makassa. 12, 645–649.

Murphy, S. (2007). *General Information on Solids*. Dipetik dari *City of Boulder/USGS Water Quality Monitoring*: http://bcn.boulder.co.us/basin/data/FECAL/info/TSS.html.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2014). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Cimahi (2017).

Rustiadi, E. (2011). Alih Fungsi Lahan dalam Perspektif Lingkungan Perdesaan. Lokakarya Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Lingkungan Kawasan Perdesaan. Bogor.

Said, N, I,m & Hidayat, W. (2004). Pengisian Air Tanah Buatan Pemanenan Air Hujan dan Teknologi Pengolahan Air Hujan. Jakarta Pusat: BPPT Press.

Salim. (1990). *Towards a sustainable future Development* (Vol. 2, pp. 61-63): Christengraf.

Shehane, S. D., et al. (2005). The Influence of Rainfall on the incidence of Microbial Faecal Indicators and the Dominant Sources of faecal Pollution in Florida River. Journal of Applied Microbiology. Vol 98.

Soemirat, J. (2011). *Epidemiologi Lingkungan Edisi Revisi.* Jogjakarta: UGM Press.

Syaifuddin, A, H., & Dahlan (2013). Hubungan antara Jumlah Penduduk dengan Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Jurnal Agrisistem, 9(2), 169-179.

Tchobanoglous, G., Stensel, D., Tsuchihashi, R., Burton, F., Mohammad, A., Bowden, G., & Pfrang, W. (2014). *Wastewater Engineering: Treatment and Resource Recovery*. New York: Metcalf & Eddy, Inc: McGraw-Hill.

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

UNDSD. (1996). Indicators of Sustainable Development Framework and Methodologies. New York.

LAMPIRAN I
Kelengkapan Administrasi Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024

- SK Tim Penyusun
- Biodata Penyusun
- Sosialisasi Tim Penyusun
- Daftar Hadir Desk Pengumpulan Data 1
- Daftar Hadir Desk Pengumpulan Data 2
- Undangan Fokus Grup Diskusi (FGD)
- Berita Acara Fokus Grup Diskusi (FGD)
- Notulensi Fokus Grup Diskusi (FGD)
- Daftar Hadir Fokus Grup Diskusi (FGD)

SK TIM PENYUSUN

WALI KOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR 660/Kep. 1346 - DLH /2024
TENTANG
TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024

WALI KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024 tentang Penyampaian Pedoman Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi kepada Pj. Wali Kota Cimahi, Nomor 660/184-ND/TL, Tanggal 30 Januari 2024, Hal Pengajuan Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.

KEDUA : Susunan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KETIGA : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

a. melakukan analisis data pendukung Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 yang dihimpun dari

setiap perangkat daerah;

b. melaksanakan verifikasi data dan informasi yang berkaitan dengan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024; dan

c. melaksanakan penyusunan laporan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.

KEEMPAT : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai uraian tugas tim yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KELIMA : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024 dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 14 Maret 2024

PJ. WALI KOTA CIMAHI,

DICKY SAROMI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 660 /Kep. 1346 - DLH /2024
TANGGAL : 19 Maret 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM

I. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

II. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

III. Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi;
2. Chrisiana Agussalim, S.T.
NIP. 19780129 201001 2 002
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
3. Komme E. Siringoringo, S.T., M.B.A.
NIP. 19741115 200801 1 002;
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
4. Ferina Temy Setiarini, S.Si., MIL.
NIP. 19770228 200604 2 006
Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi;
5. Mohamad Riza Nazaruddin, S.Pd.
NIP. 19871009 201001 1 001
Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Cimahi;
6. Siti Rakhmah Tenrisui Pakki, S.T., M.E.
NIP. 19760728 200501 2 007
Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;

7. Henny Khairanisinaga, SKM.
   NIP. 19860121 200901 2 002
   Pengelola Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
8. Eri Rukmana.
   NIP. 19820423 200901 1 002
   Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi;
9. Agus Rohendi, S.E., M.Si.
   NIP. 19730817 200701 1 010
   Analis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi;
10. Agus Mustopa, S.I.P.
    NIP. 19771230 200801 1 008
    Analis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi;
11. Deasy Yuliquartiningsih, S.T.
    NIP. 19800729 200501 2 011
    Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi;
12. Linda Trisnayani, A.Md.
    NIP. 19780114 200902 2 001
    Analis Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
13. Sodikin
    NIP. 19821029 200801 1 003
    Analis Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi;
14. Muhammad Andri Darmawan, S.I.P.
    NIP. 19810506 201001 1 012
    Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi;

15. Nadya Presha Putri Witami, S.E.
    NIP. 19960922 202202 2 001
    Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Cimahi;
16. Agus Chelid Ridwan, A.Md.
    NIP. 19740612 200901 1 002
    Bendahara pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
17. Yudi Supriadi.
    NIP. 19760217 201001 1 004
    Perencana Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi;
18. Eka Ikhsan Wahyudin, S.T.
    NIP. 19951228 202202 1 001
    Analis Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi;
19. Odilia Lasrina, S.Si.
    NIP. 19891211 202202 2 001
    Penyuluh Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Cimahi;
20. Muhammad Benny Syahputra, S.STP.
    NIP. 19930511 201609 1 001
    Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
21. Maharani Timor, A.Md.
    NIP. 19931211 202321 2 019
    Pengendali Dampak Lingkungan Terampil pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
22. Dewita Rachman, S.T.
    NIP. 19820617 201001 2 009
    Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;

23. Ita Ruswati, S.S.T.
    NIP. 19790328 201001 2 004
    Penelaah Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
24. Citra Sylvanite Choerunoer, S.T.
    NIP. 19950801 201902 2 002
    Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
25. Siti Nurhasanah, S.T.
    NIP. 19900416 202202 2 001
    Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
26. Andri Dirjaya Azis, S.T.
    NIP. 19760624 200501 1 011
    Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
27. Diena Fadiah, ST
    NIP. 19950802 201902 2 002
    Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
28. Eti Muniati, S.Sos
    NIP. 19701015 201409 2 002
    Analis Konservasi Air dan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
29. Iwan Juwana, S.T., M.E.M., Ph.D.
    NPP. 010601
    Institut Teknologi Nasional Bandung
30. Dr. Susanti Withaningsih, M.Si.
    NIP. 19760519 201604 2 001
    Koordinator Riset pada Pusat Unggulan Lingkungan dan Ilmu Keberlanjutan Universitas Padjadjaran Bandung
31. Dr. Titin Rohayatin, S.IP., M.Si.
    NID. 412141573
    Dosen Tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Jenderal Achmad Yani;

32. Eva Yohana
    Sekretaris pada Yayasan *Greeone Go Green*;

PJ. WALI KOTA CIMAHI,

DICKY SAROMI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA CIMAHI
NOMOR : 660/Kep. 1396 - DLH /2024
TANGGAL : 19 Maret 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM

I. Ketua :
1. Mengoordinasikan tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan;
2. Melakukan pengaturan, pembagian tugas dan tanggung jawab dari tiap-tiap anggota yang ada di bawahnya;
3. Menyusun jadwal tahapan rencana kerja tim penyusun dalam penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan;
4. Mengawasi kerja seluruh anggota tim penyusun;
5. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja anggota tim penyusun;
6. Melakukan fungsi kontrol agar pencapaian tujuan kegiatan optimal; dan
7. Melaporkan hasil kegiatan tim penyusun kepada Wali Kota Cimahi.

II. Sekretaris :
1. Menyusun format penyusunan dokumen yang akan digunakan;
2. Melaksanakan kegiatan penyusunan bersama anggota; dan
3. Menyiapkan draf laporan yang akan disampaikan kepada Wali Kota Cimahi.

III. Anggota : 1. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Melaksanakan konsultasi, konsolidasi dan koordinasi, baik dengan antar anggota, sekretaris atau ketua tim penyusun dalam rangka pencapaian hasil kegiatan;
3. Melaksanakan kegiatan penyusunan secara bersama-sama dengan sekretaris dan anggota lainnya; dan
4. Melaporkan hasil kegiatan kepada ketua tim penyusun.

PJ. WALI KOTA CIMAHI,

DICKY SAROMI

BIODATA TIM PENYUSUN

PENGARAH

Nama	:	DICKY SAROMI
NIP	:	-
Pangkat/Golongan	:	-
Jabatan	:	Pj. WALI KOTA CIMAHI
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
No. Telpon	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Instansi	:	Pemerintah Kota Cimahi

KETUA

Nama	:	drg. CHANIFAH LISTYARINI, M.H.M.
NIP	:	19670320 199203 2 005
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
No. Telpon	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

SEKRETARIS



Nama	:	Agus Irwan Kustiawan, S.I.P
NIP	:	197308102005011009
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
Tempat, tanggal lahir	:	Cimahi, 10 Agustus 1973
Alamat	:	Jalan Asem Timur 22 RT 02 RW 05 Kelurahan Karangmekar Kec.Cimahi Tengah Kota Cimahi
No. Telpon	:	
Pendidikan Terakhir	:	S1
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup

ANGGOTA



Nama	:	Chrisiana Agussalim, S.T.
NIP	:	197801292010012002
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 29 Januari 1978
Alamat	:	Jl. Setrasari I no 11 Bandung
Pendidikan Terakhir	:	S1 Teknik Lingkungan
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Komme E. Siringoringo, S.T., M.B.A.
NIP	:	19741115 200801 1 002
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	S2
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Ferina Temy Setiarini, S.Si., MIL.
NIP	:	19770228 200604 4 2 006
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Perencana Ahli Muda
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Instansi	:	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Mohamad Riza Nazaruddin, S.Pd.
NIP	:	19871009 201001 1 001
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Instansi	:	Dinas Sosial Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Siti Rakhmah Tenrisui Pakki, S.T., M.E.
NIP	:	19760728 200501 2 007
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Analis Kebijakan Ahli Muda
Tempat, tanggal lahir	:	Cirebon, 28 Juli 1976
Alamat	:	Nusaindah 3 Blok 13 No. 7 Kel. Melong, Kec. Cimahi Selatan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Instansi	:	Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Dadi Madali, S.H.
NIP	:	19800706 200901 1 004
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Penyuluh Hukum Ahli Muda
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Instansi	:	Sekretariat Daerah Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Henny Khairani Sinaga, SKM
NIP	:	198601212009012002
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Penyehatan Kesehatan Lingkungan
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	S1
Instansi	:	Dinas Kesehatan Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Eri Rukmana
NIP	:	19820423 200901 1 002
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Pengelola Keuangan
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Instansi	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi

ANGGOTA



Nama	:	Agus Rohendi, S.E., M.Si.
NIP	:	19730817 200701 1 010
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Analis Bangunan dan Perumahan
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 17 Agustus 1973
Alamat	:	Kp. Bongkok RT.003 RW.008 Desa Padaasih Kec. Cisarua Kab. Bandung Barat
Pendidikan Terakhir	:	S2
Instansi	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Agus Mustopa, S. I.P
NIP	:	19771230 200801 1 008
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Analis Bencana
Tempat, tanggal lahir	:	Purwakarta, 12 November 1987
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	S1
Instansi	:	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Deasy Yuliquartiningsih, S.T.
NIP	:	19800729 200501 2 011
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 29 Juli 1980
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	S1
Instansi	:	Dinas Perhubungan

ANGGOTA

Nama	:	Linda Trisnayani, A. Md.
NIP	:	19780114 200902 2 001
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Analis Laporan Keuangan
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 14 Januari 1978
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	D3
Instansi	:	Badan Pengelola Pendapatan Daerah

ANGGOTA

Nama	:	Sodikin
NIP	:	19821029 200801 1 003
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Analis Kebakaran
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Instansi	:	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Muhammad Andri Darmawan S. IP
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Perencana Ahli muda
Tempat, tanggal lahir	:	6 Mei 1981
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	S1
Instansi	:	Dinas Pendidikan Kota Cimahi

ANGGOTA



Nama	:	Nadya Presha Putri Witami, S. E
NIP	:	19960922 202202 2 001
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Analis Perencanaan Anggaran
Tempat, tanggal lahir	:	Cimahi, 22 Septermber 1996
Alamat	:	Komplek Taman Pondok Mas Indah Baru No.3 Baros-Cimahi
Pendidikan Terakhir	:	S1
Instansi	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Agus Chelid Ridwan, A. Mr
NIP	:	197406122009011002
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Bendahara Penerimaan
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 12 Juni
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Instansi	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

ANGGOTA



Nama	:	Evan Fabian, S.T.
NIP	:	19930805 201902 1 001
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 5 Agustus 1993
Alamat	:	Komplek Mutiara langensari no 17 desa langensari kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat
Pendidikan Terakhir	:	S1

Instansi	:	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Yopi Eli Kurnaeli, S.E., M.M
NIP	:	19721012 200901 2 001
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 12 Oktober 1972
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	S2
Instansi	:	DISDAGKOPERIN

ANGGOTA



Nama	:	Devi Januar Hadi, S.Si., M.Si.
NIP	:	19850118 200604 1 004
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Analis Kebijakan Ahli muda
Tempat, tanggal lahir	:	Garut, 18 Januari 1985
Alamat	:	Griya Kelapa Gading No. 5B Tanimulya Bandung Barat
Pendidikan Terakhir	:	S2
Instansi	:	Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Cimahi.

ANGGOTA

Nama	:	Odilia Lasrina, S.Si.
NIP	:	19891211 202202 2 001
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Penyuluh Olahraga
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 11 Desember 1989
Alamat	:	Cluster Mega Bodasblok A2 no 17
Pendidikan Terakhir	:	Magister
Instansi	:	Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Cimahi

ANGGOTA



Nama	:	Eka Ikhsan Wahyudin
NIP	:	19951228 202202 1 001
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Analis Tata Ruang
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 28 Desember 1995
Alamat	:	Jalan Pasir Impun RT 003 RW 011 Kota Bandung 40195
Pendidikan Terakhir	:	S1
Instansi	:	DPUPR Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Muhammad Andri Darmawan S. IP
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Perencana Ahli muda
Tempat, tanggal lahir	:	6 Mei 1981
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	S1
Instansi	:	Dinas Pendidikan Kota Cimahi

ANGGOTA



Nama	:	Citra Sylvanite Choerunoer, S.T.
NIP	:	19950801 201902 2 002
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Penyuluh Lingkungan Hidup
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 1 Agustus 1995
Alamat	:	Jl. JembatanOpat No. 7A
Pendidikan Terakhir	:	S1
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

ANGGOTA



Nama	:	Andri Dirjaya Azis, S.T.
NIP	:	19760624 200501 1 011
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Analis Lingkungan Hidup
Tempat, tanggal lahir	:	Jakarta, 24 Juni 1976
Alamat	:	Jl melong 4 blok 10 no 160 kel. Melong Kota Cimahi
Pendidikan Terakhir	:	S1
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi

ANGGOTA

Nama	:	Iwan Juwana, S.T., M.E.M., Ph.D.
NIP	:	010601
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Instansi	:	Institut Teknologi Nasional Bandung

ANGGOTA

Nama	:	Dr. Susanti Withaningsih, M.Si.
NIP	:	19760519 201604 2 001
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Koordinator Riset
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	S3
Instansi	:	Pusat Unggulan Lingkungan dan Keberlanjutan Universitas Padjadjaran Bandung

ANGGOTA

Nama	:	Dr. Titin Rohayatin, S.IP., M.Si.
NIP	:	412141573
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Dosen Tetap
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	S3
Instansi	:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Jenderal Achmad Yani

ANGGOTA

Nama	:	Adryan Lukman Indira, S.T.
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	
Tempat, tanggal lahir	:	Bandung, 4 Desember 1996
Alamat	:	Jl Futsal IV No 10 Arcamanik
Pendidikan Terakhir	:	S1
Instansi	:	Institut Teknologi Nasional Bandung

ANGGOTA

Nama	:	Eva Yohana
NIP	:	
Pangkat/Golongan	:	
Jabatan	:	Sekretaris
Tempat, tanggal lahir	:	
Alamat	:	
Pendidikan Terakhir	:	
Instansi	:	Yayasan *Greenone Go Green*

SOSIALISASI TIM PENYUSUN

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Cimahi, Jawa Barat 40513,
Telepon (022) 6654274, Faksimile (022) 6654274,
Laman www.cimahikota.go.id, Pos-el setda@cimahikota.go.id

Cimahi, 15 Mei 2024

Nomor : 005/1467/DLH.
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lampiran
Hal : **Undangan**

Yth. (Daftar terlampir)
di
Cimahi

Sehubungan dengan akan disusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi tahun tahun 2024, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Acara *Focus Group Discussion* (FGD) DIKPLHD Kota Cimahi tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada :

hari/tanggal : Senin / 20 Mei 2024
waktu : 08.30 WIB s.d. selesai
tempat : *Ballroom Mall* Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi Lt. 4
Jl. Aruman Kel. Pasirkaliki, Cimahi, Jawa Barat

Mengingat pentingnya acara tersebut diharapkan kehadiran tepat pada waktunya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Citra (082115590893).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Tembusan :
Pj. Wali Kota Cimahi.

Lampiran Surat
Nomor : 600/478/DLH.
Tanggal : 6 Februari 2024

DAFTAR UNDANGAN

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
2. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cimahi;
6. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
7. Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
8. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
9. Ferina Temy Setiarini, S.Si., MIL., Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi;
10. Mohamad Riza Nazaruddin, S.Pd., Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Cimahi;
11. Siti Rakhmah Tenrisui Pakki, S.T., M.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
12. Henny Khairanisinaga, SKM., Pengelola Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
13. Eri Rukmana, Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi
14. Agus Rohendi, S.E., M.Si., Analis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi;
15. Deasy Yuliquartiningsih, S.T., Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi;
16. Linda Trisnayani, A.Md., Analis Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
17. Muhammad Andri Darmawan, S.I.P., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi;
18. Agus Mustopa, S.I.P., Analis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi;
19. Nadya Presha Putri Witami, S.E., Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Cimahi;
20. Agus Chelid Ridwan, S.Md., Bendahara pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
21. Eka Ikhsan Wahyudin, S.T., Analis Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi;
22. Odilia Lasrina, S.Si., Penyuluh Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Cimahi;
23. Muhammad Benny Syahputra, S.STP., Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;

Dipindai dengan CamScanner

24. Chrisiana Agussalim, ST., Pengendali Dampak Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
25. Komme Edcadian Siringoringo, ST., MAB., Pengendali Dampak Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
26. Fachruzia, S.T., Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
27. Dewita Rachman, S.T., Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
28. Mohammad Natsir, S.E., Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
29. Andri Dirjaya Azis, S.T., Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
30. Citra Sylvanite Choerunoer, S.T., Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
31. Iwan Juwana, S.T., M.E.M., Ph.D., Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Nasional Bandung;
32. Adryan Lukman Indira, ST., Asisten Teknik Lingkungan;
33. Pelaksana pada Bidang Tata Lingkungan.

SEKRETARIS DAERAH,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI SOSIALISASI







DAFTAR HADIR DATA DESK 1

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Raden Demang Hardjakusumah No. 3 Cimahi, Jawa Barat 40513,
Telepon /Fax.(022) 6632614 *Website* : www.cimahikota.go.id
email : dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

DAFTAR HADIR

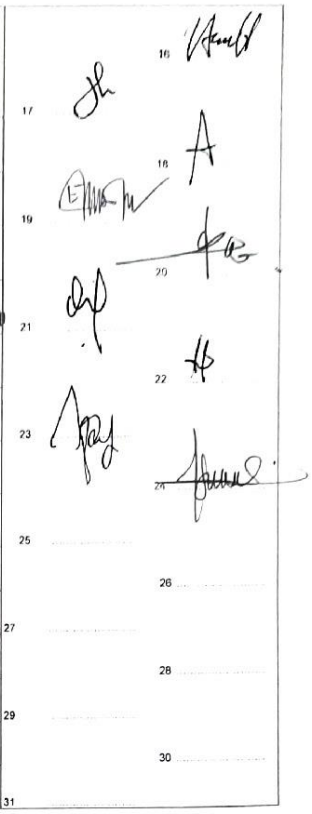
ACARA : *Desk* Pengumpulan Data untuk Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi 2024

HARI / TANGGAL : Kamis, 02 Mei 2024

TEMPAT : Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Cimahi

NO	NAMA	L/P	INSTANSI / JABATAN	NOMOR TELEPON / HP	TANDATANGAN
1	Agus Iwan G	L	Bid TL DLH		
2	Chrisiana		Pedal		
3					
4	Agus Rohendi	L	DPMPTSP		
5	Andri D. Aziz	L	DLH / Analis LH		
6	M. Riza	L	Dinsos		
7	Nayun.	L	DPKP		
8	EKA IKHSAN	L	DPUPR / Analis TK		
9	Siti Nurhasanah	P	DLH - TL		
10	Nadya	P	Bpbd / Analis pemberdayaan		
11	Agus	L	Dpkp		
12	Indah Permatasari	P	AP / Pedal		
13	Chica Sylvanie	P	Pelkat - DLH		
14	Tenri Pakki	P	Disperindag		
15	M. Benny	L	Disduk		

16	Nanda. K	P	DLH - TL	-
17	Ria R	P	Sekda	
18	Aco	L	-	
19	ETI MURNIATI	P	DLH	
20	KOMARUDIN	L	DLH	
21	Diena Fadiah	P	DLH	8/8/2024
22	Risna	P	DLH	08221693553
23	Muhamad Fachrul Rahman	L	Pokdil	
24	HENI Suwandi	L	DLH	
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6654274, Faximile (022) 6654274,
Laman www.cimahikota.go.id, Pos-el dlh@cimahikota.go.id

NOTULEN

Kegiatan	:	Rapat *Desk* Data Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi
Hari/Tanggal	:	Kamis, 2 Mei 2024
Waktu	:	08.30 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
Pencatat	:	Penyuluh Lingkungan Hidup
Peserta Rapat	:	Kelompok Kerja DIKPLHD, Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

Hasil Rapat:

Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan dilanjutkan dengan tanya jawab dan reviu pengisian tabel data dalam Dokumen Informasi Kinerja dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.

1. Terdapat beberapa tabel yang ketersediaan datanya ada di beberapa SKPD;
2. Data kendaraan tidak tersedia di Dinas Perhubungan Kota Cimahi, untuk selanjutnya akan dilakukan permohonan data ke samsat untuk dijadikan tabel tambahan;
3. Data yang dibutuhkan dari Bangkesbangpol adalah data LSM lingkungan hidup yang ada di Kota Cimahi;
4. Untuk izin wisata alam mohon untuk dilengkapi datanya, jika lokasi dimaksud memiliki surat keputusan wali kota mohon untuk diisikan informasi dalam tabel isian;
5. Inovasi tiap SKPD dimohon untuk mengirimkan deskripsi, bisnis proses, dokumentasi. Inovasi dimaksud bisa menggunakan data dari piramida / Cimahi Motekar Awards (Chima);

Data tabel setiap SKPD yang dikumpulkan melalui desk terangkum dalam link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1JWMCy4HLKxdSqwu43FWWTxqMyEFLFIRI untuk data yang belum lengkap mohon untuk dilengkapi sampai dengan tanggal 8 Mei 2024.

Notulen,



Citra Sylvanite C, ST

DOKUMENTASI KEGIATAN

Rapat *Desk* Data Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi

Jumat, 3 Mei 2024



Notulen,

Citra Sylvanite C, ST

DAFTAR HADIR DATA DESK 2

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Raden Demang Hardjakusumah No. 3 Cimahi, Jawa Barat 40513,
Telepon /Fax.(022) 6632614 *Website* : www.cimahikota.go.id
email : dlh@cimahikota.go.id Cimahi 40513 Jawa Barat

DAFTAR HADIR

ACARA : *Desk* Pengumpulan Data untuk Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi 2024

HARI / TANGGAL : Jumat, 03 Mei 2024

TEMPAT : Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Cimahi

NO	NAMA	L/P	INSTANSI / JABATAN	NOMOR TELEPON / HP	TANDATANGAN
1	Agus Irvan L	L	Sub TL DLH		1
2	Christiana	P	Pedal		2
3	Ferina Temy S.	P	Bappelitbangda / JF		3
4	[illegible]	L	Diskominfo / Perancang	08122 3333 483	4
5	Andri D Azis	L	DLH / Analis LH		5
6	Yopi Eli K	P	Dkbrastoperin	0878 24154843	6
7	Agusmustopa	L	BPBD / Analis Bencana		7
8	Odilia Lasrina	P	Disbudparpora	0813 2272 9088	8
9	Gita Sepriani	P	Disbudparpora	0898 9071 982	9
10	Indah Permatasari	P	AP / Pedal		10
11	Jeanyta Hario	P	DLH		11
12	Deasy Y.	P	Dishub / Fsb Progtek	0812 2427 7280	12
13	Muh. Andri D	L	Diskik/perencana	0812 2018 7234	13
14	Eri Rukmana	L	Bakesbangpol	0821 2135 9479	14
15	Citra Sylvanie	P	DLH	0821 1559 0893	15

16	Micky	L	Satpol	
17	Ade	L	Satpol	
18	Siti Nurhasanah	P	DLH - TL	
19	Diena Fadiah	P	DLH - TL	
20	Eti Murniati	P	DLH	
21	Muhamad Abdurahman	L	Pedal	
22	Heru Setiawandi	L	DLH	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6654274, Faximile (022) 6654274,
Laman www.cimahikota.go.id, Pos-el dlh@cimahikota.go.id

NOTULEN

Kegiatan	:	Rapat *Desk* Data Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi
Hari/Tanggal	:	Jumat, 3 Mei 2024
Waktu	:	08.30 WIB s.d selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Pimpinan Rapat	:	Kepala Bidang Tata Lingkungan
Pencatat	:	Penyuluh Lingkungan Hidup
Peserta Rapat	:	Kelompok Kerja DIKPLHD, Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

Hasil Rapat:

Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan dilanjutkan dengan tanya jawab dan reviu pengisian tabel data dalam Dokumen Informasi Kinerja dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024.

1. Terdapat beberapa tabel yang ketersediaan datanya ada di beberapa SKPD;
2. Data kendaraan tidak tersedia di Dinas Perhubungan Kota Cimahi, untuk selanjutnya akan dilakukan permohonan data ke samsat untuk dijadikan tabel tambahan;
3. Data yang dibutuhkan dari Bangkesbangpol adalah data LSM lingkungan hidup yang ada di Kota Cimahi;
4. Untuk izin wisata alam mohon untuk dilengkapi datanya, jika lokasi dimaksud memiliki surat keputusan wali kota mohon untuk diisikan informasi dalam tabel isian;
5. Inovasi tiap SKPD dimohon untuk mengirimkan deskripsi, bisnis proses, dokumentasi. Inovasi dimaksud bisa menggunakan data dari piramida / Cimahi Motekar Awards (Chima);

Data tabel setiap SKPD yang dikumpulkan melalui desk terangkum dalam link berikut https://drive.google.com/drive/folders/1JWMCy4HLKxdSqwu43FWWTxqMyEFLFIRI untuk data yang belum lengkap mohon untuk dilengkapi sampai dengan tanggal 8 Mei 2024.

Notulen,

Citra Sylvanite C, ST

DOKUMENTASI KEGIATAN

Rapat *Desk* Data Penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi

Jumat, 3 Mei 2024



Notulen,

Citra Sylvanite C, ST

Undangan FGD

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Nomor 3 Cimahi, Jawa Barat 40513,
Telepon (022) 6654274, Faksimile (022) 6654274,
Laman www.cimahikota.go.id, Pos-el setda@cimahikota.go.id

Cimahi, 15 Mei 2024

Nomor : 005/1467/DLH.
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Lampiran
Hal : **Undangan**

Yth. (Daftar terlampir)
di
Cimahi

Sehubungan dengan akan disusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Cimahi tahun tahun 2024, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Acara *Focus Group Discussion* (FGD) DIKPLHD Kota Cimahi tahun 2024 yang akan diselenggarakan pada :

hari/tanggal : Senin / 20 Mei 2024
waktu : 08.30 WIB s.d. selesai
tempat : *Ballroom Mall* Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi Lt. 4
Jl. Aruman Kel. Pasirkaliki, Cimahi, Jawa Barat

Mengingat pentingnya acara tersebut diharapkan kehadiran tepat pada waktunya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdri. Citra (082115590893).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Tembusan :
Pj. Wali Kota Cimahi.

Lampiran Surat
Nomor : 005 /1467 /DLH.
Tanggal : 15 Mei 2024

DAFTAR UNDANGAN

I. FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH KOTA CIMAHI

Ketua DPRD Kota Cimahi

II. PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

1. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Cimahi;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cimahi;
3. Asisten Administrasi Umum Setda Kota Cimahi;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi;
8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
9. Kepala Dinas Sosial Kota Cimahi;
10. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi;
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
13. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
14. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi;
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi;
16. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi;
17. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
18. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi;
19. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi;
20. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi;
21. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Cimahi;
22. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi;
23. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi;

24. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi;
25. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Cimahi;
26. Camat Cimahi Utara Kota Cimahi;
27. Camat Cimahi Tengah Kota Cimahi;
28. Plt. Camat Cimahi Selatan Kota Cimahi;
29. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
30. Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
31. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
32. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
33. Kepala UPTD Pelayanan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
34. Kepala UPTD Air Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
35. Kepala UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi.
36. Ferina Temy Setiarini, S.Si., MIL., Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi;
37. Mohamad Riza Nazaruddin, S.Pd., Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Sosial Kota Cimahi;
38. Siti Rakhmah Tenrisui Pakki, S.T., M.E., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi;
39. Henny Khairanisinaga, SKM., Pengelola Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
40. Eri Rukmana, Pengelola Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cimahi
41. Agus Rohendi, S.E., M.Si., Analis Bangunan dan Perumahan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi;
42. Deasy Yuliquartiningsih, S.T., Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kota Cimahi;
43. Linda Trisnayani, A.Md., Analis Laporan Keuangan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
44. Muhammad Andri Darmawan, S.I.P., Perencana Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kota Cimahi;
45. Agus Mustopa, S.I.P., Analis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi;
46. Nadya Presha Putri Witami, S.E., Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Cimahi;

47. Agus Chelid Ridwan, S.Md., Bendahara pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi;
48. Eka Ikhsan Wahyudin, S.T., Analis Tata Ruang Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cimahi;
49. Odilia Lasrina, S.Si., Penyuluh Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Cimahi;
50. Muhammad Benny Syahputra, S.STP., Pelaksana pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
51. Chrisiana Agussalim, ST., Pengendali Dampak Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
52. Komme Edcadian Siringoringo, ST., MAB., Pengendali Dampak Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
53. Fachruzia, S.T., Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Pertama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
54. Dewita Rachman, S.T., Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
55. Mohammad Natsir, S.E., Analis Rencana Program dan Kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
56. Andri Dirjaya Azis, S.T., Analis Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
57. Citra Sylvanite Choerunoer, S.T., Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi;
58. Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

III. INSTANSI/LEMBAGA LAINNYA

1. Direktur Pusat data dan Informasi, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Iwan Juwana, S.T., M.E.M., Ph.D., Ketua Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Nasional Bandung;
3. Adryan Lukman Indira, ST., Asisten Teknik Lingkungan;
4. Ketua LPM Kota Cimahi;
5. Ketua TP PKK Kota Cimahi;
6. Ketua Karang Taruna Kota Cimahi;
7. Ketua LPM Kecamatan Cimahi Utara;
8. Ketua LPM Kecamatan Cimahi Tengah;
9. Ketua LPM Kecamatan Cimahi Selatan;
10. Ketua TP PKK Kecamatan Cimahi Utara;
11. Ketua TP PKK Kecamatan Cimahi Tengah;
12. Ketua TP PKK Kecamatan Cimahi Selatan;
13. Ketua Karang Taruna Kecamatan Cimahi Utara;

14. Ketua Karang Taruna Kecamatan Cimahi Tengah;
15. Ketua Karang Taruna Kecamatan Cimahi Selatan.
16. Ketua Palang Merah Indonesia Kota Cimahi;
17. Ketua Komunitas Earth Hour Kota Cimahi;
18. Ketua Komunitas Bank Sampah Kota Cimahi;
19. Ketua Kader Lingkungan Kota Cimahi;
20. Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Kota Cimahi;
21. Ketua Kampung Siaga Bencana Kelurahan Cipageran;
22. Ketua Alelopati UNJANI;
23. Ketua Paranti Composter;
24. Ketua GEMI 0418;
25. Ketua *Greeone Go Green* Kota Cimahi;
26. Ketua *Real Estate* Indonesia Kota Cimahi;
27. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kota Cimahi;
28. Ketua Masyarakat Kampung Adat Kota Cimahi;
29. Ketua Rumah Zakat Kota Cimahi.

SEKRETARIS DAERAH,

DIKDIK S. NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Berita Acara FGD

BERITA ACARA

FOKUS GRUP DISKUSI DOKUMEN INFORMASI KINERJA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024

Cimahi, 20 Mei 2024

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kota Cimahi, telah dilaksanakan **Fokus Grup Diskusi Dokumen Informasi Kinerja Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024,** yang dihadiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Dinas/Instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi, pemangku kepentingan (OPD, akademisi, pelaku usaha, LSM, pegiat lingkungan) serta narasumber FGD DIKPLHD sebagaimana terlampir dalam absensi pelaksanaan kegiatan. Adapun beberapa hal yang dihasilkan dalam kegiatan ini adalah:

Isu prioritas yang disepakati dan akan dibahas dalam dokumen:

1. Kualitas dan Kuantitas Air
2. Kualitas Udara
3. Pengelolaan Sampah
4. Alih Fungsi Lahan
5. Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan

Demikian Berita Acara kegiatan Fokus Grup Diskusi Dokumen Informasi Kinerja Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 ini dibuat dan ditandatangani oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Cimahi dan pemangku kepentingan.

Cimahi, 20 Mei 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi,	LPPM Institut Teknologi Nasional,	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat,
(drg. Chanifah Listyarini, MHM)	(Iwan Juwana ST., MEM., Ph.D)	(Imas Kamaliah, ST)

Palang Merah Indonesia,	Masyarakat Adat Cireundeu,	*GreeOne Go Green,*
(Nanang, S.Pd., M.Pd., MM)	(Triyana Santika)	(Eva Yohana)

Notulensi FGD

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6654274, Faximile (022) 6654274,
Laman www.cimahikota.go.id, Pos-el dlh@cimahikota.go.id

NOTULEN

Kegiatan	:	*Focus Group Discusiion* (FGD) DIKPLHD Kota Cimahi Tahun 2024
Hari/Tanggal	:	Senin, 20 Mei 2024
Waktu	:	08.30 WIB s.d selesai
Tempat	:	*Ballroom Mall* Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 4
Pimpinan Rapat	:	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Pencatat	:	Penyuluh Lingkungan Hidup
Peserta Rapat	:	Perangkat daerah Kota Cimahi, Narasumber, Fungsional Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.

1. Didasari oleh UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 62 ayat (2) "Sistem Informasi Lingkungan Hidup dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi wajib dipublikasikan kepada masyarakat.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
3. Memperhatikan Surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. S.237/SETJEN/DATIN/DTN.2.1/B/04/2024, Tanggal 30 April 2024, Hal Penyampaian Pedoman DIKPLHD 2024.
4. Ketentuan penyusunan dokumen:
   - Disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah yang melibatkan setidaknya OPD terkait, perguruan tinggi, dan lembaga masyarakat, dikukuhkan dengan **SK Kepala Daerah.**
   - Penetapan isu prioritas berdasarkan proses partisipatif pemangku kepentingan menggunakan metode DPSIR. **Terdiri dari minimal 3 isu prioritas dan maksimal 6 isu.**
   - Penyusunan DIKPLHD mulai disusun pada bulan Januari dan telah selesai paling lambat di **30 Juni 2024.**

- Akademisi, LSM, masyarakat dan lainnya dalam SK Tim Penyusun
- Biodata Tim Penyusun Dokumen
- Data daerah berupa Peta Spasial
- Kelengkapan Dokumen Utama dan Ringkasan Eksekutif
- Ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mengetahui Kepala Daerah

1. Pengisian dalam Sistem
   a. Tabel diisi lengkap berdasarkan pedoman yang disesuaikan dengan tipologi daerah
   b. Tabel diberi judul dengan urutan Tabel 1, Tabel 2. Tabel 61
   c. Kemutakhiran data yang digunakan adalah data terbaru
   d. Sumber data wajib dicantumkan dan berasal dari lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan
   e. Data yang tidak bisa terisi karena perbedaan tipologi diisi N/A (*Not Available*)
   f. Data tidak dilakukan Pengukuran atau pengujian maka diisi dengan strip (-) dan diberi keterangan
2. Tahapan Penilaian
   a. Tahapan Penapisan

      Penilaian atas buku ringkasan eksekutif dan validitas, akurasi , serta kejelasan data menggunakan metode analisa pembobotan sederhana. Hasil penapisan ini digunakan untuk menentukan nominator yang akan memasuki tahapan selanjutnya
   b. Tahapan Penilaian

      Hasil dari penilaian buku utama ditetapkan nominator untuk setiap tingkatan pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota
   c. Tahapan Diskusi Panel

      Seleksi tahap akhir dalam bentuk presentasi Kepala Daerah

3. Penjelasan penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi 2023 untuk tabel data alam yang perlu direkapitulasi dari tiap SKPD di Pemerintah Kota Cimahi untuk selanjutnya di upload melalui aplikasi SILHKD (https://dataalam.menlhk.go.id).
4. Terdapat 61 tabel isian data untuk DIKPLHD Kota Cimahi 2023.
5. Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 yang dimaksud diterima oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan paling lambat 31 Juli 2023 pukul 24.00 dengan mengirimkan copy dokumen melalui email nirwasitatantra@menlhk.go.id.

Iwan Juwana, ST, MEM., Ph.D (Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat Institut Teknologi Nasional)

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara indonesia. Aktivitas sosio-ekonomi, industri, pembangunan infrastruktur, pertanian, perdagangan dan jasa, memberikan dampak, tersendiri terhadap, kelestarian lingkungan hidup. Pemerintah Kota Cimahi berdasarkan misi keempatnya juga mengembangkan SILH sebagai sarana penyedia data dan informasi lingkungan yang dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). DIKPLHD menjadi bagian penting sarana penyediaan data dan informasi serta sebagai acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.

Tahap penyusunan DIKPLHD Kota Cimahi 2024 adalah sebagai berikut: sosialisasi, analisis data isu lingkungan, evaluasi DIKPLHD tahun sebelumnya, penetapan isu potensial, verifikasi dan klasifikasi, dan inovasi daerah.

Analisis DPSIR dilakukan untuk menemukan isu prioritas yang akan menjadi pokok utama dalam penyusunan DIKPLHD. Beberapa isu potensial yang dapat menjadi isu prioritas adalah isu tata guna lahan, isu kualitas air, isu kualitas udara, isu resiko bencana, isu perkotaan/persampahan, dan isu tata kelo. Setiap isu akan dilakukan analisis DPSIR secara mendetail, dimana setiap DPSIR saling berhubungan dan saling berkesinambungan satu sama lain.

Isu prioritas lingkungan merupakan isu utama yang menjadi prioritas dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup di daerah. Kriteria-kriteria yang bisa menjadikan isu lingkungan menjadi prioritas, diantaranya yaitu:

1. Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.
2. Berdampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan kualitas lingkungan hidup.
3. Mendapat perhatian publik dan harus ditangani segera (urgent).
4. Berhubungan dengan tren IKLH dalam 5 tahun terakhir
5. Mengancam keanekaragaman hayati yang ada disekitarnya.
6. Berpengaruh pada daya dukung lingkungan.
7. Berdampak pada perubahan iklim
8. Menjadi kajian lebih lanjut dalam KLHS RTRW, KLHS RPJMD, dan RPPLH Kota Cimahi.

Sebelum penetapan isu prioritas, hasil analisis DPSIR diurai menjadi daftar pendek isu lingkungan yang dinamakan sebagai isu potensial. Penetapan isu potensial ini juga didasari atas studi literatur dan Panduan Nirwasita Tantra. Dari daftar isu yang telah disediakan peserta diminta memilih isu yang dianggap prioritas. Daftar isu potensial di Kota Cimahi tahun 2024:

1. Kualitas Udara
2. Kualitas dan Kuantitas Air
3. Alih Fungsi Lahan
4. Pengelolaan Sampah
5. Sanitasi dan Kesehatan Masyarakat
6. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
7. Kejadian Bencana Alam dan Kebakaran
8. Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan
9. Sistem Transportasi Umum dan Ramah Lingkungan

SARAN

1. **Bu Susi. (Bidang Pengelolaan Data, Pusat data, dan Informasi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)**
   - Diharapkan data yang dimasukan bukan data mentah.
   - BAB III harap disajikan tidak sama dengan apa yang terdapat di BAB II.
   - Jangan lupa memberikan keterangan perbedaan dengan tahun sebelumnya, sehingga tidak adanya pengulangan-pengulangan.

2. **Bu Imas (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat)**

Isu lingkungan yang terdapat di Kota Cimahi berdasarkan hasil analisis DLH Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

- Kota cimahi mengalami defisit kesediaan air, yang menyebabkan kota cimahi akan bergantung dengan daerah lain. Bukanberarti cimahi akan mengalami kekeringan hanya saja belum mampu memenuhi kebutuhan air di kota cimahi.
- Sebagian besar kota cimahi adalah industri mengakibatkan kota cimahi akan bergantung ke daerah sekitarnya, seperti kabupaten karwang, kabupaten sukabumi untuk memenuhi kebutuhan pangan.
- Kota cimahi salah satu kota dengan penduduk yang padat, sehingga isu persampahan menjadi isu yang wajib diprioritaskan oleh pemerintah.
- Pertambahan jumlah penduduk di kota cimahi yang berkembang pesat, menjadikan pencemaran udara di kota cimahi menjadi perhatian.
- Pertambahan penduduk juga membuat perubahan tata guna lahan, sehingga pemulihan lahan kritis sangat perlu dilakukan, seperti penanaman poho atau konservasi air.
- Kota cimahi diharapkan bisa memperhatikan eksploitasi air tanah dan lebih memperhatikan kualitas air permukaan, sehingga dapat menjadi alternatif konsumsi rumah tangga.
- Peningkatan penduduk akan meningkatkan laju perutmbuhan ekonomi dan berdampak dalam pertumbuhan industri. Apablia pertumbuhan industri tidak dapat dikontrol akan berdampak ke pencemaran udara Kota Cimahi.
- Peningkatan pertumbuhan industri akan berdampak ke jumlah kendaraan di Kota Cimahi dan menyebabkan polusi udara.
- Diharapkan adanya simulasi ke masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumbernya. Keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh dalam penyelesaikan masalah persampahan di Kota Cimahi.
- Diharapkan adanya kerjasama antar perangkat daerah di dalam pemerintahan Kota Cimahi dan antar daerah.
- DIKPLHD diharapkan bisa dikumpulkan pada tanggal 24 Juni 2024 melalu platfom yang telah disediakan.
- Data alam tidak diisi di aplikasi namun dilampirkan di DIKPLHD.

3. **Ibu Eva (Green One Go Green)**

   Cimahi telah memiliki 79 bank sampah yang telah membantu pengurangan sampah di Kota Cimahi. untuk kelengkapan gambar dan foto kegiatan bank sampah bisa dilengkapi dan ditambahkan agar dokumen yang dibuat lebih menarik. Tidak hanya komunikas lingkungan yang membantu dalam isu lingkungan Kota Cimahi, beberapa CSR dari perusahan, seperti PT. Trisulatex, PT. Chitos dan lainnya, juga telah berkontribusi dalam penangan sampah dan memberikan sumbangan dalam penanaman pohon.

4. **Kampung Adat Cireundeu**

   Tata wilayah di kampung cireundeu sudah memiliki 3 hutan arahan. Di wilayah hutan tersebut dicanangkan akan menjadi hutan adat. Hutan adat yang menjadi dampak ledakan TPA Leuwi Gajah sedang dalam perbaikan. Kampung adat cireundeu telah berkerjasama dengan ITB dalam pemulihan lahan. Diperkirakan pada 2029, kampung adat cireundeu bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengurangi sampah di kampung adat cireundeu dalam pemilahan sampah dari rumah dan dilakukan pengelolaan sampah sendiri. Rumah yang telah melakukan pemilahan berjumlah 100 dari 180 rumah yang ada di kampung adat cireundeu.

5. **PMI Kota Cimahi**

   Diharapkan adanya data tentang kesehatan masyarakat. Sehingga dengan penyusunan DIKPLHD pengendalian kesehatan masyarakat akibat dari pencemaran lingkungan maupun bencana alam yang terjadi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kesiapan dalam penangan akan maksimal.

KESIMPULAN

- Penetuan isu potensial di Kota Cimahi akan direkap sesuai hasil voting yang telah dilakukan
- Pengumpulan DIKPLHD dilakukan pada 24 Juni 2024, untuk mendapatkan rekomendasi dari DLH Provinsi Jawa Barat.
- Kota Cimahi mengalami defisit ketersedian air
- Pertumbuhan industri yang pesat menjadikan pencemaran air, udara, dan persampahan di Kota Cimahi perlu diperhatikan;
- Kota Cimahi diharapkan mampu melakukan pemulihan lahan kritis, peningkatan kualitas air permukaan dan tidak melakukan eksploitasi air tanah.

- Diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah dari sumber.
- Kerjasama dalam lingkungan kota cimahi dan antar daerah dalam peningkatan kualitas lingkungan Kota Cimahi.
- Diharapkan adanya analisis dampak dari isu lingkungan, sehingga dokumen tersebut dapat digunakan di berbagai kepentingan, contoh nya penanganan bencana atau adanya penyakit karena lingkungan.
- Isu prioritas pada Tahun 2023 adalah Kualitas dan Kuantitas air, Kualitas Udara, Pengelolaan Sampah, Ahli Fungsi Lahan, dan Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan.
- Isu prioritas sementara tahun 2024 adalah Kualitas dan Kuantitas Air, Pengelolaan Sampah, Kualitas Udara, Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan, dan Ahli Fungsi Lahan.

Isu prioritas Tahun 2023	Isu Prioritas Sementara Tahun 2024
Kualitas dan Kuantitas air	Kualitas dan Kuantitas Air
Kualitas Udara	Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah	Kualitas Udara
Ahli Fungsi Lahan	Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan
Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan	Ahli Fungsi Lahan

Rapat dibuka oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi dan dilanjutkan dengan paparan oleh Narasumber berkaitan dengan FGD DIKPLHD.

Notulen,

Citra Sylvanite C, ST

Daftar Hadir FGD

PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang, Cimahi,
Jawa Barat 40513, Telepon (022) 6632614, Faximile (022) 6632614,
Laman www.cimahikota.go.id, Pos-el dlh@cimahikota.go.id

DAFTAR HADIR

ACARA : *Focus Group Disscusion* (FGD) DIKPLHD Kota Cimahi tahun 2024

HARI / TANGGAL : Senin, 20 Mei 2024

TEMPAT : Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi Lantai 4 Jl. Aruman, Kota Cimahi

NO	NAMA	L/P	INSTANSI	TANDATANGAN
1	Asep Supratna	L	Lpkj Cimut	1
2	Yana Sriwulyani.	P	Cimut	
3	Dwi Agustini	P	DLH	3
4	Adang	L	Pamarus	4
5	Yuni. S.	P	TP. PKK Kota	5
6	Dewi Tri H.	P.	TPPKK Kota	6
7	Ayi Sobar Supriyanto	L	LPM Kota	7
8	Ivan	L	DLH - PSLCSPE	8
9	MARTINI	P	KSB Cipageran	9
10	Muchlis Wanto	L	CPA. KCT	10
11	REKSO. P.	L	FPRB BIMATHI.	11
12	Dani Supriatna	L	Kurnia Tirtha Ut	12
13	Sri Siti Syarah	P	Alelupati Unjani	13
14	Iwan S	L	— " —	14
15	Junjan Nurjaman	L	7666	15
16	Nurul Aulia	P	Karta Cimteng	16
17	Febriana Ninggih N	P	Earth Hour Cimahi	17
18	Asep Hendrawan	L	LPM-CS.	18
19	Asep Rohmat	L	KT. CIMUT	19
20	Temmi	L	Global media	20
21	Hendra	L	Jurnal Reformasi	21
22	Efri	L	Transaktuel	22
23	Pauz.	L	Zonasi Bdl	23
24	Aldi	L	Kurang Tunura CV	24
25	Ari Hidayat	L	ICT Cimteng	26

NO	NAMA	L/P	INSTANSI	TANDATANGAN
26	Ani Fahiratal	L	PMI	26
27	Mega	P	Kader Lingkungan	27
28	Syaril	L	Karang Taruna Cimsel	28
29	Pak Agus	L	Apindo	29
30	Aldi	L	Apindo	30
31	Dori	L	Paranti	31
32	Agus	L	LPM Cimut	32
33	David	L	LPM Cimsel	33
34	Topik	L	Karang Taruna Cimteng	34
35	Zaenal	L	KT Kota Cimahi	35
36	Tarya	P	Alelopati	36
37	Dudi	L	KP. Adat Cireundeu	37
38	Tatang	L	KT Cimsel	38
39	Gungun	L	Lpm kota Cimahi	39
40	Hasan	L	KT Cimahi Utara	40
41	Emma	L	PKK Cimahi Utara	41
42	[illegible]	L	FPRB	42
43	Dadan	L	REI	43
44	Rinie Atri	P	KEH Kota Cimahi	44
45	Santi A	P	Paranti Composter	45
46	Dinnie A	P	GEMI	46
47	Annestha Oktaviani	P	Alelopati	47
48	DANI	L	KSB CIMAHI	48
49	Sri	P	PKK Cimahi Tengah	49
50	Lilis	P	Tp PKK Cimut	50
51	Kadis			51
52	Kadis			52
53	[illegible]	L	TL DLH	53
54	Christiana		Pedal	54
55	Diena Fadiah	P	DLH Cimahi	55
56	Dearnisha Harto	P	DLH Cimahi	56
57	KOMAR CIRANGRANG	L	DLH Cimahi	57
58	Eti Murniati	P	DLH	58
59	Rising		DLH - Cimahi	59
60	Citra Sylvania	P	DLH	60

NO	NAMA	L/P	INSTANSI	TANDATANGAN
61	AGUS MUSTOPA	L	BPBD Kota Cimahi	61
62	Muhammad Thoha	L	DLH	62
63	Jati Hartanti	P	[redacted] PKK KCS	63
64	Iwan Juwana	L	Ilonas	64
65	Agus Js	L	DLH	65
66	Agy mu	L	DLH	66
67	NANANG	L	PMI	67
68	Ummu Atiah	P	DLH	68
69	Lilis Endang. S	P.	Asosi DPD Cimahi	69
70	EVA YOHANA	P	Yayasan GOGOGREEN	70
71	Achmad S	L	DPKP.	71
72	Eman Rachideni	L	Kec. Cimtang	72
73	Triyanu Santika	L	Cireundeu	73
74	M. Syarif	L	DLH	74
75	Agus Chelid a	L	DPKP	75
76	Muh. Benny	L	Disdik	76
77	EKA IKHSAN	L	BPUPR	77
78	Dewita R	P	DLH PSLB3PK	78
79	Linda T	P	Bappeda	79
80	Neneng Mastrah	P	Satpol PP	80
81	Deasy Y.	P.	Dishub.	81
82	Kurniawan	L	Kec. Cimsel	82
83	Yadi Supriyadi	L	kec cimut	83
84	Tatan H	P	DLH	84
85	Moh. Reza	L	Binsos	85
86	D Jaman	L	Ekada Setda	86
87	Agus Rohendi	L	DPMPTSP	87
88	Yopi. Alfi K	P	Disdagkoperin	88
89	Odilia	P	Disbudparpora	89
90	Yanti Retno Intani	P	BPKAD	90
91	Tina Restiana	P	Dpmptsp	91
92	ARIO WIBISONO	L	DLH.	92
93	Ita Ruswati	P	DLH	93
94	Siti Nurhasanah	P	DLH	94
95	Nanda. K	P	DLH	95

NO	NAMA	L/P	INSTANSI	TANDATANGAN
96	Adryan L	L	ITENAS	96
97	Bonni M. Pahlevi	L	Dinkes	97
98	Rizal	L	DPMPTSP	98
99	Ari Fahrizal	L	"	99
100	Ari Hidayat	L	"	100
101	Mega	P	"	101
102	Syahril	L	"	102
103	Pak Agus	L	"	103
104	Sandi	L	DPKP	104
105	Nur. M. Jamal	L	DPKP	105
106	Fajar	L	DPKP	106
107	Ruyan.	L	Prokolim	107
108	Lutfi	L	Prokopim	108
109	Cosmo Padma	L	DiskominFO	109
110	R. MULKY CHANDRA HALIM	L	DISHOMINFO	110
111	Reza F	L	DLH	111
112	RIKKO	L	DLH	112
113	Yosi	L	Setda	113
114	Dani	L	Setda	114
115				115
116				116
117				117
118				118
119				119
120				120
121				121
122				122
123				123
124				124
125				125

DOKUMENTASI FGD



LAMPIRAN II
Tabel Utama

Tabel-1. Luas Kawasan Lindung Berdasarkan RTRW dan Tutupan Lahannya
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kawasan Lindung	Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	1. Kawasan Hutan Lindung		N/A				
		2. Kawasan Bergambut		N/A				
		3. Kawasan Resapan Air		697,12				
	Kawasan Perlindungan Setempat	1. Sempadan Pantai		N/A				
		2. Sempadan Sungai		258,26				
		3. Kawasan Sekitar Danau atau Waduk		N/A				
		4. Ruang Terbuka Hijau		4,17				

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	1. Kawasan Suaka Alam		N/A				
		2. Kawasan Suaka Laut dan Perairan Lainnya		N/A				
		3. Suaka Margasatwa dan Suaka Marga Satwa Laut		N/A				
		4. Cagar Alam dan Cagar Alam Laut		N/A				
		5. Kawasan Pantai Berhutan Bakau		N/A				
		6. Taman Nasional dan Taman Nasional Laut		N/A				
		7. Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut		N/A				
		8. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan		1.486,7				

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kawasan Rawan Bencana	1. Kawasan Rawan Tanah Longsor		1.061,25				
		2. Kawasan Rawan Gelombang Pasang		N/A				
		3. Kawasan Rawan Banjir		181,72				
	Kawasan Lindung Geologi	1. Kawasan Cagar Alam	i. Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil	N/A				
			ii. Kawasan Keunikan Bentang Alam	1.242,97				
			iii. Kawasan Keunikan Proses Geologi	N/A				

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		2. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi	i. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi	N/A				
			ii. Kawasan Rawan Gempa Bumi	N/A				
			iii. Kawasan Rawan Gerakan Tanah	N/A				
			iv. Kawasan yang Terletak di Zona Patahan Aktif	N/A				
			v. Kawasan Rawan Tsunami	N/A				
			vi. Kawasan Rawan Abrasi	N/A				
			vii. Kawasan Rawan Gas Beracun	N/A				

Nama Kawasan				Luas Kawasan	Tutupan Lahan			
					Vegetasi	Area Terbangun	Tanah Terbuka	Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		3. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah	i. Kawasan Imbuhan Air Tanah	N/A				
			ii. Sempadan Mata Air	N/A				
	Kawasan Lindung Lainnya	1. Cagar Biosfer		N/A				
		2. Ramsar		N/A				
		3. Taman Buru		N/A				
		4. Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah		N/A				
		5. Kawasan Pengungsian Satwa		N/A				
		6. Terumbu Karang		N/A				
		7. Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau BiotaLaut yang Dilindungi		N/A				

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak ada data tersedia

Sumber: DPUPR Kota Cimahi, 2023

Tabel-2. Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kota	Luas Lahan Non Pertanian	Luas Lahan Sawah	Luas Lahan Kering	Luas Lahan Perkebunan	Luas Lahan Hutan	Luas Lahan Badan Air
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cimahi	3845,54	134,98	179,48	NA	NA	

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat kawasan tersebut di Kota Cimahi

Sumber: DUPR dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, 2023

Tabel-3. Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
A. Berdasarkan Fungsi Hutan		
1	Hutan Produksi	N/A
2	Hutan Lindung	N/A
3	Taman Nasional	N/A
4	Taman Wisata Alam	N/A
5	Taman Buru	N/A
6	Cagar Alam	N/A
7	Suaka Margasatwa	N/A
8	Taman Hutan Raya	N/A
B. Berdasarkan Status Hutan		
1	Hutan Negara (Kawasan Hutan)	N/A
2	Hutan Hak/Hutan Rakyat	N/A
3	Hutan Kota	237,12
4	Taman Hutan Raya	N/A
5	Taman Keanekaragaman Hayati	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak ada peruntukkan fungsi hutan tersebut di Kota Cimahi
2. Data diambil dari SK Walikota Tahun 2012
3. Tidak ada perubahan data

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-4. Keadaan Flora dan Fauna
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Hewan Menyusui	*Canis sp*	Anjing		Tidak	Tidak	Ya
		Felis silvestris catus	Kucing		Tidak	Tidak	Ya
		Felis domestika	Kucing		Tidak	Tidak	Ya
		Mus sp	Mencit		Tidak	Tidak	Ya
		Rattus rattus	Tikus rumah		Tidak	Tidak	Ya
		Rattus argentiventer	Tikus sawah		Tidak	Tidak	Ya
		Rattus norvegicus	Tikus got		Tidak	Tidak	Ya
		Rattus tiomanicus	Tikus pohon		Tidak	Tidak	Ya
		Bandicota indica	Tikus wirok		Tidak	Tidak	Ya
		Canis familiaris domesticus	Anjing		Tidak	Tidak	Ya
		Lariscus insignus	Bajing		Ya	Tidak	Ya
		Lutrogale perspicillata	Berang-berang/ Wregul		Ya	Tidak	Ya
		Cynopterus sphinx	Codot		Tidak	Tidak	Ya
		Herpetes javanicus	Garangan		Ya	Tidak	Ya
		Pteropus vampyrus	Kalong		Ya	Tidak	Ya
		Paradoxurus hermaphroditus	Musang/ Luwak		Ya	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tupaia javanica	Tupai		Ya	Ya	Tidak
		Bos taurus	Sapi potong		Tidak	Tidak	Ya
		Bosindicus	Sapi potong		Tidak	Tidak	Ya
		Bos taurus	Sapi perah		Tidak	Tidak	Ya
		Bubalus bubalis	Kerbau		Tidak	Tidak	Ya
		Equus ferus caballus	Kuda		Tidak	Tidak	Ya
		Capra aegagrus hircus	Kambing		Tidak	Tidak	Ya
		Ovis aries	Domba		Tidak	Tidak	Ya
		Sus scrofa demestica	Babi		Tidak	Tidak	Ya
		Lepus sp	Kelinci		Tidak	Tidak	Ya
2	Burung	*Passer montanus*	Burung gereja		Tidak	Tidak	Ya
		Acciptridae	Alap-alap		Ya	Ya	Tidak
		Falco severus	Alap-alap macan		Ya	Ya	Tidak
		Gallus gallus	Ayam hutan hijau		Ya	Tidak	Ya
		Gallus varius	Ayam hutan merah		Ya	Tidak	Ya
		Leptoptilius javanicus	Bangau		Ya	Tidak	Ya
		Psittacula alexandri	Betet		Ya	Tidak	Ya
		Ardeola speciosa	Blekok sawah		Ya	Tidak	Ya
		Lonchura leucogastroides	Bondol jawa		Ya	Tidak	Ya
		Lonchura punctulata	Bondol peking		Ya	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Bubu sp	Burung hantu		Ya	Tidak	Ya
		Otus migicus beccarii	Burung hantu		Ya	Tidak	Ya
		Anthreptes malacensis	Burung madu kelapa		Ya	Ya	Tidak
		Nectarinia jugularis	Burung madu Sriganti		Ya	Ya	Tidak
		Centropus bengalensis	Burung but-but		Ya	Tidak	Ya
		Dicaeum trochileum	Cabe Jawa		Ya	Tidak	Ya
		Larus sp	Camar		Ya	Tidak	Ya
		Halcyon cyanoventris	Cekakak Jawa		Ya	Ya	Tidak
		Phylloscopus borealis	Cikrak Kutub		Ya	Tidak	Ya
		Orthotomus ruficeps	Cinenen Kelabu		Ya	Tidak	Ya
		Orthotomus sutorius	Cinenen Pisang		Ya	Tidak	Ya
		Aegithina tiphia	Cipoh Kacat		Ya	Tidak	Ya
		Pycnonotus aurigaster	Cucak Kutilang		Ya	Tidak	Ya
		Pycnonotus zeylanicus	Cucak rowo		Ya	Tidak	Ya
		Streptopelia bitorquata	Deruk jawa		Ya	Tidak	Ya
		Accipiter soloensis	Elang Alap Cina		Ya	Tidak	Ya
		Spilornis cheela	Elang Ular Bido		Ya	Ya	Tidak
		Lonchura maja	Emprit haji		Tidak	Tidak	Ya
		Corvus enca	Gagak hutan		Ya	Ya	Tidak

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pada oryzivora	Gelatik		Ya	Tidak	Ya
		Parus major	Gelatik batu kelabu		Ya	Tidak	Ya
		Sturnus contra	Jalak suren		Ya	Tidak	Ya
		Sturnus melanopterus	Jalak putih		Ya	Ya	Tidak
		Acridotherus javanicus	Jalak kerbau		Ya	Ya	Tidak
		Leucopsarrothschildii	Jalak Bali		Ya	Ya	Tidak
		Zosterops palpebrosus	Kacamata biasa		Ya	Tidak	Ya
		Zosterops flavus	Kacamata jawa (Pleci)		Ya	Tidak	Ya
		Copsychus sechellarum	Kacer jawa		Ya	Tidak	Ya
		Cuculus saturatus	Kangkok ranting		Ya	Tidak	Ya
		Hypothymis azurea	Kehicap ranting		Ya	Tidak	Ya
		Oriolus chinensis	Kepodang kuduk hitam		Ya	Tidak	Ya
		Serinus canaria	Kenari		Ya	Tidak	Ya
		Bulbucus ibis	Kuntul		Ya	Ya	Tidak
		Pycnonotus aurigaster	Kutilang		Ya	Tidak	Ya
		Hirundo rustica	Layang layang api		Ya	Tidak	Ya
		Pycnonotus goiavier	Merbah cerukcuk		Ya	Tidak	Ya
		Columbia lifia	Merpati		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Copsychus malabaricus	Murai batu		Ya	Tidak	Ya
		Melopsittacus endulatus	Parkit		Ya	Tidak	Ya
		Malacocincla sepiarium	Pelanduk semak		Ya	Tidak	Ya
		Lanius sp	Pentet		Ya	Tidak	Ya
		Prinia polychroa	Perenjak coklat		Ya	Tidak	Ya
		Prinia inornata	Perenjak padi		Ya	Tidak	Ya
		Prinia familiaris	Perenjak jawa		Ya	Tidak	Ya
		Geopelia striata	Perkutut		Ya	Tidak	Ya
		Alcnedo atthis	Prenjak		Ya	Tidak	Ya
		Streptopelia bitorquata	Puter		Ya	Tidak	Ya
		Turnix suscifator	Puyuh		Tidak	Tidak	Ya
		Phyloscocum moratus	Raja udang		Ya	Tidak	Ya
		Pericrocotus cinnamomeus	Sepah kecil		Ya	Tidak	Ya
		Tyto alba	Serak Jawa		Ya	Tidak	Ya
		Anthereptes malacensis	Sesap madu		Ya	Tidak	Ya
		Pernis ptilorhynchus	Sikep madu asia		Ya	Tidak	Ya
		Hirundo rustica guturalis	Sriti		Ya	Tidak	Ya
		Streptopelia chinensis	Tekukur biasa		Ya	Tidak	Ya
		Pycnonotus goiavier	Terucuk		Ya	Tidak	Ya
		Colocalia esculenta	Walet sapi		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Collocalia linchi	Walet linchi		Ya	Tidak	Ya
		Gallus gallus domesticus	Ayam Buras		Tidak	Tidak	Ya
		Gallus gallus	Ayam Ras Petelur		Tidak	Tidak	Ya
		Gallus gallus	Ayam Ras Pedaging		Tidak	Tidak	Ya
		Anas sp	Itik		Tidak	Tidak	Ya
		Turnix suscitator	Puyuh		Tidak	Tidak	Ya
		Meleagris gallopavo	Kalkun		Tidak	Tidak	Ya
3	Reptil	*Naja sputatrix*	Ular cobra/sendok		Ya	Tidak	Ya
		Trimeresurus albbolabris	Ular hijau		Ya	Tidak	Ya
		Acerochordus granulatas	Ular kadut		Ya	Tidak	Ya
		Xenopeltis unicolor	Ular pelangi		Ya	Tidak	Ya
		Python reticulatus	Ular sawah		Ya	Tidak	Ya
		Bungarus javanicus	Ular welang		Ya	Tidak	Ya
		Rhamphotyphlops braminus	Ular kawat		Ya	Tidak	Ya
		Python reticulatus	Ular sanca kembang		Ya	Tidak	Ya
		Morelia viridis	Ular sanca hijau.		Ya	Tidak	Ya
		Homalopsis buccata	Ular kadut belang		Ya	Tidak	Ya
		Ahaetulla prasina	Ular gadung		Ya	Tidak	Ya
		Boiga dendrophila	Ular cincin mas		Ya	Tidak	Ya
		Dendrelaphis pictus	Ular tambang		Ya	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Ptyas korros	Ular tikus / ular jali		Ya	Tidak	Ya
		Sibynophis geminatus	Ular serasah		Ya	Tidak	Ya
		Calloselasma rhodostoma	Ular tanah		Ya	Tidak	Ya
		Bungarus canddius	Ular weling		Ya	Tidak	Ya
		Calotes cristatellus	Bunglon		Tidak	Tidak	Ya
		Cosymbotus platyuru	Cecak tembok		Tidak	Tidak	Ya
		Hemidactylus frenatus	Cecak kayu		Tidak	Tidak	Ya
		Gehyra mutilata	Cecak gula		Tidak	Tidak	Ya
		Cyrtodactylus marmoratus	Cecak batu		Tidak	Tidak	Ya
		Mabuya multifasciata	Kadal kebun		Tidak	Tidak	Ya
		Takydromus sexlineatus	Kadal rumput		Tidak	Tidak	Ya
		Gecko gecho	Tokek rumah		Tidak	Tidak	Ya
		Gecko monarchus	Tokek berbintik		Tidak	Tidak	Ya
		Cerberus rynchops	Ular air		Tidak	Tidak	Ya
		Varanus salvator	Biawak		Ya	Tidak	Ya
		Chelydra serpentia	Kura-kura		Ya	Tidak	Ya
4	Amphibi	*Bufo asper*	Bangkong sungai		Tidak	Tidak	Ya
		Microhyla achatina	Precil jawa		Tidak	Tidak	Ya
		Rana limnocharis	Katak sawah		Tidak	Tidak	Ya
		Rana cancrivora	Katak sawah		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Rana erythraea	Katak kolam		Tidak	Tidak	Ya
		Rana macrodon	Katak sungai		Tidak	Tidak	Ya
		Rana chalconota	Katak sungai		Tidak	Tidak	Ya
		Rana macrodon	Katak hijau		Tidak	Tidak	Ya
		Rana limnocharis	Katak rawa		Tidak	Tidak	Ya
		Rana cancrivora	Katak sawah		Tidak	Tidak	Ya
		Monopterus albus	Belut		Tidak	Tidak	Ya
5	Ikan	*Channa sp*	Ikan gabus		Tidak	Tidak	Ya
		Aplocheilus panchax	Ikan kepala timah		Tidak	Tidak	Ya
		Poecilia reticulata	Ikan seribu		Tidak	Tidak	Ya
		Barbodes gonionotus	Ikan Tawes		Tidak	Tidak	Ya
		Clarias batrachus	Lele lokal		Tidak	Tidak	Ya
		Oshpronemus gouramy	Gurame		Tidak	Tidak	Ya
		Ctenopharyngodon idella	Grass carp		Tidak	Tidak	Ya
		Cyprinus carpio	Ikan Emas		Tidak	Tidak	Ya
		Clarias batrachus	Lele		Tidak	Tidak	Ya
		Oreochromis mossambica	Mujair		Tidak	Tidak	Ya
		Oreochromis nilotica	Nila		Tidak	Tidak	Ya
		Pangasius sp	Patin		Tidak	Tidak	Ya
		Macrobrachium pilimanus	Udang galah		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Litopenacus sp	Udang vename		Tidak	Tidak	Ya
		Xiphophorus maculatus platy	Plati		Tidak	Tidak	Ya
		Poecillia reticulata guppy	Guppy		Tidak	Tidak	Ya
		Poecilia latipinna saifin molly	Molly		Tidak	Tidak	Ya
		Carassius auratus	Koki		Tidak	Tidak	Ya
		Cyprinus carpio	Koi		Tidak	Tidak	Ya
		Betta splendens	Ikan cupang		Tidak	Tidak	Ya
6	Keong	*Achatina fulica*	Bekicot		Tidak	Tidak	Ya
		Limnaea javanica	Keong sawah		Tidak	Tidak	Ya
		Pomacea canaliculata	Keong mas		Tidak	Tidak	Ya
		Helix sp	Siput kebun		Tidak	Tidak	Ya
		Brotia testudinaria	Molusca air tawar/siput		Tidak	Tidak	Ya
		Lymnaea sp	Molusca air tawar/siput		Tidak	Tidak	Ya
		Hydrometridae	Pengukur air		Tidak	Tidak	Ya
		Corbicula javanica	Remis		Tidak	Tidak	Ya
7	Serangga	*Oxya japonica*	Belalang hijau		Tidak	Tidak	Ya
		Valanga nigricormis	Belalang kayu		Tidak	Tidak	Ya
		Montis religiosa	Belalang sembah		Tidak	Tidak	Ya
		Periplaneta australasiae	Kecoa		Tidak	Tidak	Ya
		Neurothemis sp	Capung air		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Bombyx mori	Ngengat (ulat sutera)		Tidak	Tidak	Ya
		Antheraca	Ngengat		Tidak	Tidak	Ya
		Dundabia manifera	Tonggeret		Tidak	Tidak	Ya
		Nilaparvata lugens	Wereng coklat		Tidak	Tidak	Ya
		Leptocorisa oratorius	Walang sangit		Tidak	Tidak	Ya
		Orycetes rhinocerrous	Kumbang tanduk		Tidak	Tidak	Ya
		Diconocoris hewetti	Kepik		Tidak	Tidak	Ya
		Photuris lucicrescens	Kunang-kunang		Tidak	Tidak	Ya
		Apis cerana	Lebah madu/lokal		Tidak	Tidak	Ya
		Monomorium pharaonis	Semut pharaoh		Tidak	Tidak	Ya
		Solenopsis invicta	Semut api		Tidak	Tidak	Ya
		Oecophylla saragillina	Semut rangrang		Tidak	Tidak	Ya
		Oxyopes javanus	Laba-laba		Tidak	Tidak	Ya
		Androctonus sp	Kalajengking		Tidak	Tidak	Ya
		Musca domestica	Lalat rumah		Tidak	Tidak	Ya
		Culex	Nyamuk		Tidak	Tidak	Ya
		Julus virgatus	Kaki seribu		Tidak	Tidak	Ya
		Scoloppdridae	Kelabang		Tidak	Tidak	Ya
		Gryllotalpa sp	Jengkerik		Tidak	Tidak	Ya
8	Tumbuh-tumbuhan	*Fragaria vesea*	Arben		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Crinum asiaticum L.	Bakung		Tidak	Tidak	Ya
		Hensiowia frutescens champ	Benalu		Tidak	Tidak	Ya
		Bauhinia purpurea	Bunga kupu-kupu		Tidak	Tidak	Ya
		Allmania nodiflora R.Br.	Jenis rumput		Tidak	Tidak	Ya
		Borreria repens D.C.	Jenis rumput		Tidak	Tidak	Ya
		Cyperus aristatus Rottr	Jenis rumput teki		Tidak	Tidak	Ya
		Cyperus cyperinus V.S	Jenis rumput teki		Tidak	Tidak	Ya
		Ipomoea carssicaulis Rob	Krangkongan		Tidak	Tidak	Ya
		Portulaca olerarea L	Krokot		Tidak	Tidak	Ya
		Hibiscus rosasinensis	Kembang Sepatu		Tidak	Tidak	Ya
		Phyllantuhus acidus	Maja		Tidak	Tidak	Ya
		Euphorbia hirta	Patikan kebo		Tidak	Tidak	Ya
		Leucaena leucephala	Petai cina		Tidak	Tidak	Ya
		Buchanania arborescens	Popohan		Tidak	Tidak	Ya
		Mimosa pudica	Putri malu		Tidak	Tidak	Ya
		Euphorbia pulcherrima Willd.	Racunan		Tidak	Tidak	Ya
		Panicum repens	Rumput balungan		Tidak	Tidak	Ya
		Paspalum vaginatum Sw.	Rumput asinan		Tidak	Tidak	Ya
		Corchorus acutangulus lamk.	Rumput bayam		Tidak	Tidak	Ya
		Cyperus rotundus L	Rumput teki		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Heteropogon contortus	Rumput tombak		Tidak	Tidak	Ya
		Eragrostis unioloides	Rumput udang		Tidak	Tidak	Ya
		Eleusine indica L.gaertn	Suket tulangan		Tidak	Tidak	Ya
		Cassytha filiformis L	Taliputri		Tidak	Tidak	Ya
		Hanguana malayana	Bakung air		Tidak	Tidak	Ya
		Cyanotis cristata	Eceng		Tidak	Tidak	Ya
		Eichhornia crassipes	Eceng gondok		Tidak	Tidak	Ya
		Hydrilla verticillata	Ganggang		Tidak	Tidak	Ya
		Ficus septica burm.f	Awar-awar		Ya	Tidak	Ya
		Gigantolochloa apus kurz	Bambu apus		Tidak	Tidak	Ya
		Bambusa spinosa	Bambu duri		Tidak	Tidak	Ya
		Bambusa vulgaris	Bambu gading		Tidak	Tidak	Ya
		Ficus benyamina	Beringin		Ya	Tidak	Ya
		Casuarina equisetifolia	Cemara laut/udang		Tidak	Tidak	Ya
		Casuarina junghuniana	Cemara gunung		Tidak	Tidak	Ya
		Durio kutejensis	Durian hutan		Ya	Tidak	Ya
		Ficus glomerata roxb.	Elo		Ya	Tidak	Ya
		Delonix regia	Flamboyan		Ya	Tidak	Ya
		Dioscorea composita	Gadung		Tidak	Tidak	Ya
		Glyricidia sepium	Gamal		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Inocarpus edulis	Gayam		Ya	Tidak	Ya
		Pithecelobium jiringa	Jengkol		Tidak	Tidak	Ya
		Datura metel	Kecubung		Tidak	Tidak	Ya
		Moringa oleifera lam	Kelor		Ya	Tidak	Ya
		Murraya paniculata	Kemuning		Ya	Tidak	Ya
		Terminalia catapa	Ketapang		Tidak	Tidak	Ya
		Morinda citrifolia	Mengkudu		Tidak	Tidak	Ya
		Garcinia dulcis	Mundu		Ya	Tidak	Ya
		Morus alba	Murbei		Tidak	Tidak	Ya
		Mesua nagassarium	Nagasari		Ya	Tidak	Ya
		Cycas rumphi	Pakis haji		Tidak	Tidak	Ya
		Ceiba petranda	Randu		Tidak	Tidak	Ya
		Bombaxma labaricum	Randu Alas		Ya	Tidak	Ya
		Manilkara kauki	Sawo kecik		Ya	Tidak	Ya
		Achras zapota var	Sawo manila		Tidak	Tidak	Ya
		Caesalpinia sappan	Secang		Ya	Tidak	Ya
		Sesbania grandiflora	Turi		Tidak	Tidak	Ya
		Hibiscus tiliaceus	Waru		Tidak	Tidak	Ya
		Avicennia sp	Api-api		Tidak	Tidak	Ya
		Rhizophora sp	Bakau		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Limnocharis flava	Genjer		Tidak	Tidak	Ya
		Ipomoea aquatica	Kangkung air		Tidak	Tidak	Ya
		Nypa fruticans Wurmb	Nipah		Tidak	Tidak	Ya
		Nasturtium officinale	Selada air		Tidak	Tidak	Ya
		Pistia stratiotes	Selada air/ kapu-kapu		Tidak	Tidak	Ya
		Bruguiera sp	Tanjang		Tidak	Tidak	Ya
		Nymphoides indica	Teratai		Tidak	Tidak	Ya
		Marantha arundacea	Garut		Tidak	Tidak	Ya
		Dioscorea hispida dennst	Gadung		Tidak	Tidak	Ya
		Canna edulis	Ganyong		Tidak	Tidak	Ya
		Dioscorea aculeata	Gembili		Tidak	Tidak	Ya
		Dioscorea bulbifera L	Gembolo		Tidak	Tidak	Ya
		Zea mays	Jagung		Tidak	Tidak	Ya
		Phaseolus vulgaris	Kacang hijau		Tidak	Tidak	Ya
		Arachis hypogea	Kacang tanah		Tidak	Tidak	Ya
		Glicyne max	Kedelai		Tidak	Tidak	Ya
		Xanthosoma atrovirens	Kimpul		Tidak	Tidak	Ya
		Oryza sativa	Padi		Tidak	Tidak	Ya
		Oryza glutinosa	Padi ketan		Tidak	Tidak	Ya
		Ipomoea batatas	Ubi Jalar		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Manihot utilisima	Ubi kayu		Tidak	Tidak	Ya
		Colocasia esculenta schott	Talas bogor		Tidak	Tidak	Ya
		Zea Mays	Jagung		Tidak	Tidak	Ya
		Pandanus sp	Pandan		Tidak	Tidak	Ya
		Saccarum officinarum	Tebu		Tidak	Tidak	Ya
		Nicotiana tabacum	Tembakau rakyat		Tidak	Tidak	Ya
		Persea americana	Alpokat		Tidak	Tidak	Ya
		Vitis vinifera L.	Anggur		Tidak	Tidak	Ya
		Averrhoa carambola	Belimbing manis		Tidak	Tidak	Ya
		Averrhoa bilimbi	Belimbing wuluh		Tidak	Tidak	Ya
		Cucumis melo var canta	Blewah		Tidak	Tidak	Ya
		Hylocereus undatus	Buah Naga		Tidak	Tidak	Ya
		Artocarpus champeden	Cempedak		Tidak	Tidak	Ya
		Phyllanthus acidus	Cermai		Tidak	Tidak	Ya
		Punica granatum	Delima		Tidak	Tidak	Ya
		Lansium domesticum	Duku		Tidak	Tidak	Ya
		Durio zibethinus	Durian		Tidak	Tidak	Ya
		Syzygium aqueum	Jambu air		Tidak	Tidak	Ya
		Psidium guajava L	Jambu biji		Tidak	Tidak	Ya
		Syzygium jambos	Jambu mawar		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Eugenia densiflora	Jambu klampok		Tidak	Tidak	Ya
		Syzygium malaccense	Jambu bol/darsana		Tidak	Tidak	Ya
		Anacardium occidentale	Jambu mete		Tidak	Tidak	Ya
		Citrus nobilis	Jeruk siem		Tidak	Tidak	Ya
		Citrus aurantifolia	Jeruk nipis		Tidak	Tidak	Ya
		Spondias dulcis	Kedondong		Tidak	Tidak	Ya
		Dimocarpus longan	Kelengkeng		Tidak	Tidak	Ya
		Cucumis sativus L	Ketimum		Tidak	Tidak	Ya
		Dispyros kaki L	Kesemek		Tidak	Tidak	Ya
		Artocarpus altilis	Kluwih		Tidak	Tidak	Ya
		Lansium equem (Jacq) Miq	Kokosan		Tidak	Tidak	Ya
		Mangifera odorata	Kweni		Tidak	Tidak	Ya
		Mangifera indica L	Mangga		Tidak	Tidak	Ya
		Gracinia mangostana	Manggis		Tidak	Tidak	Ya
		Passiflora edulis	Markisa		Tidak	Tidak	Ya
		Pometia pinnata	Matoa		Tidak	Tidak	Ya
		Passiflora edulio	Markisa		Tidak	Tidak	Ya
		Cucumis melo	Melon		Tidak	Tidak	Ya
		Annona reticulata	Mulwo		Tidak	Tidak	Ya
		Garcinia dulcis	Mundu		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Morus alba	Murbei		Tidak	Tidak	Ya
		Artocarpus communis	Nangka		Tidak	Tidak	Ya
		Ananas comosus	Nanas		Tidak	Tidak	Ya
		Nephelium lappaceum	Rambutan		Tidak	Tidak	Ya
		Carica papaya Linn	Pepaya		Tidak	Tidak	Ya
		Musa sp	Pisang		Tidak	Tidak	Ya
		Salaca edulis	Salak		Tidak	Tidak	Ya
		Manilkara zapota	Sawo		Tidak	Tidak	Ya
		Achras zapota L	Sawo manila		Tidak	Tidak	Ya
		Citrulus vulgaris	Semangka		Tidak	Tidak	Ya
		Annona muricata	Sirsat		Tidak	Tidak	Ya
		Annona squamosa	Sirkaya		Tidak	Tidak	Ya
		Borassus sp	Siwalan		Tidak	Tidak	Ya
		Fragaria vesca	Stroberi		Tidak	Tidak	Ya
		Artocarpus commu nis forst	Sukun		Tidak	Tidak	Ya
		Amaranthus caudatus rumph	Bayam		Tidak	Tidak	Ya
		Allium cepa L.	Bawang merah		Tidak	Tidak	Ya
		Capsicum annum L.	Cabe merah		Tidak	Tidak	Ya
		Capsicum trutescens L.	Cabe rawit		Tidak	Tidak	Ya
		Luffa acutangula	Gambas		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Pithecellobium jiringa Prain	Jengkol		Tidak	Tidak	Ya
		Auricularia auriculatia	Jamur kuping		Tidak	Tidak	Ya
		Volvariella volvacea	Jamur merang		Tidak	Tidak	Ya
		Lentinus edodes	Jamur shitake		Tidak	Tidak	Ya
		Pleurotus ostreatus	Jamur tiram		Tidak	Tidak	Ya
		Citrus hystrix	Jeruk purut		Tidak	Tidak	Ya
		Vigna sinensis	Kacang panjang		Tidak	Tidak	Ya
		Cajanus cajan	Kacang gude		Tidak	Tidak	Ya
		Ipomoea aquatica forsk	Kangkung		Tidak	Tidak	Ya
		Dolichos lablab	Kara		Tidak	Tidak	Ya
		Xanthosoma violaceum schoot	Kimpul		Tidak	Tidak	Ya
		Lagenaria leucantha	Labu air		Tidak	Tidak	Ya
		Cucurbita mocshata Duch	Labu parang/kuning		Tidak	Tidak	Ya
		Sechium edule	Labu siem		Tidak	Tidak	Ya
		Gnetum gnemon L	Melinjo		Tidak	Tidak	Ya
		Momordica charantia	Pare		Tidak	Tidak	Ya
		Trichosanthes cucumerina	Pare ulo		Tidak	Tidak	Ya
		Brassica chinensis	Petsai/caisim		Tidak	Tidak	Ya
		Brassica campestris	Sawi hijau		Tidak	Tidak	Ya
		Brassica juncea	Sawi putih		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Apium graveolens L	Seledri		Tidak	Tidak	Ya
		Solanum melongena L.	Terong		Tidak	Tidak	Ya
		Lycopersicon esculente	Tomat		Tidak	Tidak	Ya
		Sesbania grandiflora pers	Turi		Tidak	Tidak	Ya
		Helianthus annus	Bunga matahari		Tidak	Tidak	Ya
		Clerodendron paniculatum	Bunga pagoda		Tidak	Tidak	Ya
		Mirabilis jalapa	Bunga pukul empat		Tidak	Tidak	Ya
		Hibiscus rosa sinensis	Bunga sepatu		Tidak	Tidak	Ya
		Kalanchoe blossfeldiana	Cocor bebek		Tidak	Tidak	Ya
		Dracaena sp	Dracaena		Tidak	Tidak	Ya
		Euphorbia sp	Euphorbia		Tidak	Tidak	Ya
		Dracaena fragrans	Hanjuang		Tidak	Tidak	Ya
		Coleus sp	Iler		Tidak	Tidak	Ya
		Celosia cristata L	Jengger ayam		Tidak	Tidak	Ya
		Gloriosa superba L	Kembang sungsang		Tidak	Tidak	Ya
		Datura metel L.	Kecubung		Tidak	Tidak	Ya
		Coriandrum sativum L.	Ketumbar		Tidak	Tidak	Ya
		Strobilanthes crispus bl.	Keji beling		Tidak	Tidak	Ya
		Cocos nicifera L.	Kelapa		Tidak	Tidak	Ya
		Piper cubeba l.f	Kemukus		Tidak	Tidak	Ya

No.	Golongan.	Nama Spesies		Status			
		Nama latin	Nama lokal	Endemik	Terancam	Dilindungi	Tidak dilindungi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Murraya paniculata	Kemuning		Tidak	Tidak	Ya
		Acacia sp	Akasia		Tidak	Tidak	Ya
		Pterocarpus indica willd	Angsana		Tidak	Tidak	Ya
		Antocephalus cadamba	Jabon		Tidak	Tidak	Ya
		Tectona grandis L.	Jati		Tidak	Tidak	Ya
		Swietenia mahagoni jacq	Mahoni		Tidak	Tidak	Ya
		Albiziz falcataria	Sengon		Tidak	Tidak	Ya
		Dalbergia pinnata	Sono keling		Tidak	Tidak	Ya
		Pithecolobium saman benth	Trembesi		Tidak	Tidak	Ya

Keterangan :

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Cimahi, 2023

Tabel-5. Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Nama Perusahaan	SK	Jenis Satwa Yang Ditangkarkan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	N/A	N/A	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat data

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-6. Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kota	Kritis (Ha)		Sangat Kritis (Ha)		Potensial Kritis (Ha)		Agak Kritis (Ha)		Tidak Kritis (Ha)	
		Hutan	Non-Hutan	Hutan	Non-Hutan	Hutan	Non-Hutan	Hutan	Non-Hutan	Hutan	Non-Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Cimahi Utara	N/A	84,95	N/A	439,99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Cimahi Tengah	N/A	3,43	N/A	2,97	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Cimahi Selatan	N/A	33,48	N/A	174,66	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak ada peruntukan kawasan tersebut di Kota Cimahi
2. Di Kota Cimahi tidak terdapat kawasan hutan sehingga tidak terdapat lahan kritis atau sangat kritis di kawasan hutan
3. Data berdasarkan SK.306/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Lahan Kritis Nasional
4. Tidak ada perubahan data

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, 2023

Tabel-7. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering Akibat Erosi Air
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Tebal Tanah	Ambang Kritis Erosi (PP 150/2000) (mm/10 tahun)	Besaran Erosi (mm/10 tahun)	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	< 20 cm	0,2 – 1,3	N/A	N/A
2	20 - < 50 cm	1,3 - < 4	N/A	N/A
3	50 - <100 cm	4,0 - < 9	N/A	N/A
4	100 – 150 cm	9,0 – 12	N/A	N/A
5	> 150 cm	> 12	N/A	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak dilakukannya pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-8. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Kering
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1		Ketebalan Solum	< 20 cm	Dari 30 sampel, terdapat 1 titik lokasi yang memiliki ketebalan solum 10cm	Tidak
2		Kebatuan Permukaan	> 40%	100% sampel kebatuan permukaan <40%	Tidak
3		Komposisi Fraksi	< 18% koloid;	Dari 30 sampel (100% sampel) komposisi fraksi clay (tanah liat) nilai persen di atas 18%, kategori rusak (R)	melebihi
4		Komposisi Fraksi	> 80% pasir kuarsitik	Dari 30 sampel, fraksi sand (pasir) tidak melebihi ambang kritis, kategori tidak rusak (N)	Tidak
5		Berat Isi	> 1,4 g/cm3	Dari 30 sampel 2 lokasi yang berat isi melebihi ambang kritis >1.4 g/cm3	Tidak
6		Porositas Total	< 30% ; > 70%	Dari 30 sampel ada 3 lokasi yg nilai porositas melebihi 70 % dan 1 lokasi kurang dari 30 %	Tidak
7		Derajat Pelulusan air	< 0,7 cm/jam; > 8,0		

No.	Lokasi	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8		pH (H2O) 1 : 2,5	< 4,5 ; > 8,5	pH rentang > 4,5 - 8	Tidak
9		Daya Hantar Listrik/DHL	> 4,0 mS/cm	Rentang DHL 0.02 - 0.28 dS/m	Tidak
10		Redoks	< 200 mV	Nilai redoks < 200 mV	Tidak
11		Jumlah Mikroba	< 10^2cfu/g tanah	> 10^2cfu/g tanah	Tidak

Keterangan:

1. Pengukuran dilakukan di 30 titik lokasi berbeda

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-9. Evaluasi Kerusakan Tanah di Lahan Basah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Parameter	Ambang Kritis (PP 150/2000)	Hasil Pengamatan	Status Melebihi/Tidak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Subsidens Gambut di atas pasir kuarsa	> 35 cm/tahun untuk ketebalan gambut ≥ 3 m atau 10%/5 tahun untuk gambut < 3 m	N/A	N/A
2	Kedalaman Lapisan Berpirit dari permukaan	< 25 cm dengan pH ≤ 2,5	N/A	N/A
3	Kedalaman air tanah dangkal	> 25 cm	N/A	N/A

Keterangan :
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat kerusakan di lahan yang dimaksud

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Cimahi, 2023

Tabel-10. Luas dan Kerapatan Tutupan Mangrove
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Lokasi	Luas Lokasi (Ha)	Persentase tutupan (%)	Kerapatan (pohon/Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Cimahi	N/A	N/A	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat kawasan mangrove di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-11. Luas dan Kerusakan Padang Lamun
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kecamatan	Luas (Ha)	Persentase Area Kerusakan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Cimahi	N/A	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat kawasan padang lamun di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-12. Luas Tutupan dan Kondisi Terumbu Karang
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kabupaten/Kota	Luas Tutupan (Ha)	Sangat baik (%)	Baik (%)	Sedang (%)	Rusak (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Cimahi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat kawasan laut dan terumbu karang di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-13. Perubahan Lahan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Jenis Penggunaan Baru	Luas Lama (Ha)	Luas Baru (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Permukiman	-	-
2	Industri	-	-
3	Tanah Kering	-	-
4	Perkebunan	-	-
5	Semak Belukar	-	-
6	Tanah Kosong	-	-
7	Perairan/Kolam	-	-
8	Lainnya (Sebutkan)	-	-

Keterangan:
1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Bappeda Kota Cimahi, 2024

Tabel-14. Pemanfaatan Lahan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Jenis Pemanfaatan Lahan	Jumlah	Skala Usaha	Luas	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tambang	N/A	Besar/Menengah/Kecil/Rakyat/Mikro	N/A	Tidak ada usaha pertanian yang berskala besar
2	Perkebunan	N/A	Rakyat	N/A	
3	Pertanian	N/A	Rakyat	314,46	
4	Pemanfaatan Lahan	N/A	Rakyat	N/A	

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat kawasan tersebut di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, 2023

Tabel-15. Luas Areal dan Produksi Pertambangan Menurut Jenis
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Jenis Bahan Galian	Nama Perusahaan	Luas Ijin Usaha Penambangan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan di Kota Cimahi tidak terdapat kawasan peruntukan yang dimaksud

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-16. Realisasi Kegiatan Penghijauan dan Reboisasi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kecamatan	Penghijauan			Reboisasi		
		Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)	Target (Ha)	Luas Realisasi (Ha)	Realisasi Jumlah Pohon (batang)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cimahi Utara	0,15	0,0954	1.590	N/A	N/A	N/A
2	Cimahi Selatan		0,0234	390	N/A	N/A	N/A

Keterangan:
1. Permen PU No. 5 Tahun 2008: Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Kawasan Perkotaan
2. Dokumen kontrak pengadaan tanaman
3. Tanda (N/A) menunjukkan tidak ada peruntukkan tersebut di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-17. Luas dan Kerusakan Lahan Gambut
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kota/Kecamatan	Luas (Ha)	Kedalaman (M)	Persentase Kerusakan (%)	Penyebab Kerusakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Cimahi	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat lahan gambut di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-18. Jumlah dan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kota/Kecamatan	SK Definitif		Keterangan
		Jumlah Unit	Luas (Ha)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Cimahi	N/A	N/A	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat jenis usaha pemanfaatan kayu yang dimaksud

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-19. Jumlah dan Luas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kota/Kecamatan	Jumlah Unit	Luas (Ha)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Cimahi	1	1,44	Zona Konservasi
		1	1,39	Zona Konservasi Produksi Pertanian
		1	0,31	Zona Intensif
		1	1,14	Zona Agroforestry
		1	0,67	Zona Semi Intensif

Keterangan: -
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-20. Perdagangan Satwa dan Tumbuhan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Nama Spesies	Bagian-Bagian Yang Diperdagangkan	Status Menurut CITES
(1)	(2)	(3)	(4)
1	N/A	N/A	N/A

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat perdagangan satwa dan tumbuhan di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-21. Jumlah dan Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Jenis IUPJLWA					
	Nama Perusahaan	Luas Pemanfaatan Jasa Aliran Air (Ha)	Luas Wisata Alam (Ha)	Luas Perlindungan Keanekaragaman Hayati (Ha)	Luas Penyelamatan dan Perlindungan Lingkungan (Ha)	Luas Penyerapan Karbon (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	GOR Sangkuriang	N/A	N/A	N/A	0,00043	N/A
2	Stadion Sangkuriang	N/A	N/A	N/A	2,3	N/A
3	Lahan Cibodas	N/A	N/A	N/A	1,143	N/A
4	Ekowisata Cimenteng	0,0055	0,6294	0,5798	0,5798	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Disbudpar Kota Cimahi, 2023

Tabel-22. Kualitas Air Sumur
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	RT/RW 04/29 Cipageran	01-Agtustus-23	6°51'38,36"	107°32'30,89"	25	6,42	3,49	4,14	tidak	tidak	376
2	RT/RW 02/04 Cipageran	01-Agtustus-23	6°51'34,3"	107°32'40,93"	25	6,26	0,78	4,14	tidak	tidak	322
3	RT/RW 03/06 Citeureup	01-Agtustus-23	6°51'43,26"	107°33'5,02"	30	6,38	212	4,14	tidak	tidak	308
4	RT/RW 05/08 Citeureup	01-Agtustus-23	6°51'57,6"	107°33'1,42"	24,5	6,55	8,08	4,14	tidak	tidak	324
5	RT/RW 04/19 Cibabat	01-Agtustus-23	6°52'1,14"	107°33'31"	25	6,24	3,41	7,64	tidak	tidak	744
6	RT/RW 03/07 Cibabat	01-Agtustus-23	6°53'3,38"	107°33'35,83"	27	6,61	4,68	4,14	tidak	tidak	347
7	RT/RW 02/02 Pasir Kaliki	01-Agtustus-23	6°53'5,6"	107°33'56,57"	26	6,29	3,08	7,64	tidak	tidak	392
8	RT/RW 05/03 Pasir Kaliki	01-Agtustus-23	6°53'12,8"	107°33'47,17"	26,5	6,45	3,52	9,89	tidak	tidak	435

No.	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9	RT/RW 03/13 Karangmekar	31-Juli-23	6°53'9,21"	107°32'40,37"	26	6,29	1,63	1,61	tidak	tidak	513
10	RT/RW 01/12 Karangmekar	31-Juli-23	6°52'56,79"	107°32'44,55"	25	6,57	3,1	4,14	tidak	tidak	317
11	RT/RW 02/14 Cigugur Tengah	31-Juli-23	6°53'32,1"	107°33'8,59"	26	6,3	19,8	4,14	tidak	tidak	432
12	RT/RW 03/17 Cigugur Tengah	31-Juli-23	6°52'11,7"	107°33'15,88"	24	7,43	8,06	4,14	tidak	tidak	435
13	RT/RW 01/22 Baros	31-Juli-23	6°53'8,03"	107°32'37,59"	25	6,69	14,6	4,14	tidak	tidak	438
14	RT/RW 03/04 Baros	31-Juli-23	6°53'20,3"	107°32'26,9"	25	6,55	1,44	4,14	tidak	tidak	383
15	RT/RW 04/05 Cimahi	01-Agtustus-23	6°52'8,17"	107°32'35,49"	25	6,7	4,45	4,14	tidak	tidak	342
16	RT/RW 02/09 Cimahi	01-Agtustus-23	6°52'12,11"	107°33'16,08"	26	6,52	1,51	4,14	tidak	tidak	347
17	RT/RW 02/12 Setiamanah	01-Agtustus-23	6°52'46,3"	107°31'56,95"	25	6,46	3,26	4,14	tidak	tidak	198
18	RT/RW 02/04 Setiamanah	01-Agtustus-23	6°52'18,48"	107°32'15,66"	24	7	5,72	4,14	tidak	tidak	352
19	RT/RW 03/05 Padasuka	01-Agtustus-23	6°52'48,09"	107°31'44,97"	24	6,42	1,53	4,14	tidak	tidak	256
20	RT/RW 05/08 Padasuka	01-Agtustus-23	6°52'43,24"	107°31'46,62"	25	6,41	1,45	4,14	tidak	tidak	233

No.	Lokasi Sumur	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Temperatur (°C)	pH	Kekeruhan	Warna	Rasa	Bau	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	RT/RW 01/12 Cibeber	26-Juli-23	6°52'4,1"	107°33'21,33"	25	6,35	1,57	4,14	tidak	tidak	250
22	RT/RW 02/14 Cibeber	26-Juli-23	6°54'1,04"	107°31'13,48"	26	6,18	2,38	7,64	tidak	tidak	525
23	RT/RW 01/11 Leuwigajah	26-Juli-23	6°53'59,95"	107°31'31,54"	25	7,5	15,6	56,5	tidak	tidak	343
24	RT/RW 04/18 Leuwigajah	26-Juli-23	6°53'54,52"	107°31'29,28"	25,5	6,89	5,98	4,14	tidak	tidak	330
25	RT/RW 06/08 Cibeureum	26-Juli-23	6°54'46,2"	107°33'46,4"	25	6,56	4,17	7,64	tidak	tidak	459
26	RT/RW 06/01 Cibeureum	26-Juli-23	6°54'37,5"	107°33'59,2"	26	6,4	2,25	7.64	tidak	tidak	316
27	RT/RW 02/01 Melong	26-Juli-23	6°55'15,6"	107°32'42,5"	29	6,98	3,27	2,77	tidak	tidak	725
28	RT/RW 05/06 Melong	26-Juli-23	6°55'31,3"	107°33'23,6"	24	5,36	2,72	4.14	tidak	tidak	284
29	RT/RW 02/06 Utama	26-Juli-23	6°53'58,47"	107°32'58,97"	25	6,81	1,73	9,77	tidak	tidak	217
30	RT/RW 02/07 Utama	26-Juli-23	6°54'8,9"	107°32'36,9"	26	7,64	1,03	7.64	tidak	tidak	440

Lanjutan Tabel-22.

No	Lokasi Sumur	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO_3 sebagai N (mg/L)	NH_3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	RT/RW 04/29 Cipageran	N/A	N/A	N/A	N/A	10,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	RT/RW 02/04 Cipageran	N/A	N/A	N/A	N/A	38,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	RT/RW 03/06 Citeureup	N/A	N/A	N/A	N/A	51,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	RT/RW 05/08 Citeureup	N/A	N/A	N/A	N/A	2,73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	RT/RW 04/19 Cibabat	N/A	N/A	N/A	N/A	120	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	RT/RW 03/07 Cibabat	N/A	N/A	N/A	N/A	16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	RT/RW 02/02 Pasir Kaliki	N/A	N/A	N/A	N/A	45,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	RT/RW 05/03 Pasir Kaliki	N/A	N/A	N/A	N/A	2,52	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	RT/RW 03/13 Karangmekar	N/A	N/A	N/A	N/A	31	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	RT/RW 01/12 Karangmekar	N/A	N/A	N/A	N/A	21	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Lokasi Sumur	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO_3 sebagai N (mg/L)	NH_3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
11	RT/RW 02/14 Cigugur Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	16,4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	RT/RW 03/17 Cigugur Tengah	N/A	N/A	N/A	N/A	2,82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	RT/RW 01/22 Baros	N/A	N/A	N/A	N/A	35,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	RT/RW 03/04 Baros	N/A	N/A	N/A	N/A	59,5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	RT/RW 04/05 Cimahi	N/A	N/A	N/A	N/A	31,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	RT/RW 02/09 Cimahi	N/A	N/A	N/A	N/A	16,7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	RT/RW 02/12 Setiamanah	N/A	N/A	N/A	N/A	14,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	RT/RW 02/04 Setiamanah	N/A	N/A	N/A	N/A	18,1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	RT/RW 03/05 Padasuka	N/A	N/A	N/A	N/A	50,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	RT/RW 05/08 Padasuka	N/A	N/A	N/A	N/A	5,01	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	RT/RW 01/12 Cibeber	N/A	N/A	N/A	N/A	1,41	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	RT/RW 02/14 Cibeber	N/A	N/A	N/A	N/A	2,71	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No	Lokasi Sumur	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	DO (mg/L)	Total Fosfat sbg P (mg/L)	NO_3 sebagai N (mg/L)	NH_3-N (mg/L)	Arsen (mg/L)	Kobalt (mg/L)	Barium (mg/L)	Boron (mg/L)	Selenium (mg/L)	Kadmium (mg/L)	Khrom (VI) (mg/L)
(1)	(2)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
23	RT/RW 01/11 Leuwigajah	N/A	N/A	N/A	N/A	6,63	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	RT/RW 04/18 Leuwigajah	N/A	N/A	N/A	N/A	6,23	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	RT/RW 06/08 Cibeureum	N/A	N/A	N/A	N/A	4,9	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	RT/RW 06/01 Cibeureum	N/A	N/A	N/A	N/A	25,6	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	RT/RW 02/01 Melong	N/A	N/A	N/A	N/A	61,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	RT/RW 05/06 Melong	N/A	N/A	N/A	N/A	19,8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	RT/RW 02/06 Utama	N/A	N/A	N/A	N/A	10,2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	RT/RW 02/07 Utama	N/A	N/A	N/A	N/A	4,53	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lanjutan Tabel-22.

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
(1)	(2)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
1	RT/RW 04/29 Cipageran	N/A	0,0398	N/A	0,504	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,03	N/A	0,39
2	RT/RW 02/04 Cipageran	N/A	0,0398	N/A	0,0363	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,0226	N/A	<0,05
3	RT/RW 03/06 Citeureup	N/A	0,0758	N/A	0,0721	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,05	N/A	1,46
4	RT/RW 05/08 Citeureup	N/A	0,0378	N/A	3,59	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,03	N/A	0,38
5	RT/RW 04/19 Cibabat	N/A	0,0398	N/A	0,0363	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,02	N/A	0,41
6	RT/RW 03/07 Cibabat	N/A	0,0398	N/A	0,0363	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,02	N/A	0,4
7	RT/RW 02/02 Pasir Kaliki	N/A	0,0398	N/A	0,0363	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,02	N/A	0,33
8	RT/RW 05/03 Pasir Kaliki	N/A	6,18	N/A	0,131	N/A	N/A	N/A	N/A	1,38	0.0226	N/A	0,35
9	RT/RW 03/13 Karangmekar	N/A	0,0398	N/A	0,0162	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0.0226	N/A	<0,05

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
(1)	(2)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
10	RT/RW 01/12 Karangmekar	N/A	0,0398	N/A	0,059	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0.0226	N/A	0,4
11	RT/RW 02/14 Cigugur Tengah	N/A	0,0369	N/A	0,378	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,03	N/A	0,14
12	RT/RW 03/17 Cigugur Tengah	N/A	0,0229	N/A	0,947	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,04	N/A	<0,05
13	RT/RW 01/22 Baros	N/A	0,0398	N/A	0,0173	N/A	N/A	N/A	N/A	0,22	0,02	N/A	0,6
14	RT/RW 03/04 Baros	N/A	0,0398	N/A	0,0363	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0.0226	N/A	<0,05
15	RT/RW 04/05 Cimahi	N/A	0,106	N/A	0,0875	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,02	N/A	0,33
16	RT/RW 02/09 Cimahi	N/A	0,0398	N/A	0,0363	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,03	N/A	0,38
17	RT/RW 02/12 Setiamanah	N/A	0,0398	N/A	0,0363	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,02	N/A	0,26
18	RT/RW 02/04 Setiamanah	N/A	0,0398	N/A	0,319	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,1	N/A	0,38
19	RT/RW 03/05 Padasuka	N/A	0,0398	N/A	0,0363	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,03	N/A	0,3
20	RT/RW 05/08 Padasuka	N/A	0,0398	N/A	0,0363	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,02	N/A	0,29

No	Lokasi Sumur	Tembaga (mg/L)	Besi (mg/L)	Timbal (mg/L)	Mangan (mg/L)	Air Raksa (mg/L)	Seng (mg/L)	Khlorida (mg/L)	Sianida (mg/L)	Fluorida (mg/L)	Nitrit sebagai N (mg/L)	Sulfat (mg/L)	Khlorin bebas (mg/L)
(1)	(2)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
21	RT/RW 01/12 Cibeber	N/A	0,0815	N/A	0,0363	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,01	N/A	<0,05
22	RT/RW 02/14 Cibeber	<0,0237	0,0398	N/A	0,113	N/A	0,0796	N/A	<0,01	0,101	0,02	N/A	<0,05
23	RT/RW 01/11 Leuwigajah	N/A	0,52	N/A	1,41	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,05	N/A	0,05
24	RT/RW 04/18 Leuwigajah	N/A	0,0981	N/A	0,109	N/A	N/A	N/A	N/A	0,101	0,02	N/A	0,54
25	RT/RW 06/08 Cibeureum	<0,0237	0,2	N/A	0,22	N/A	0,0962	N/A	<0,01	1,67	0,04	N/A	<0,05
26	RT/RW 06/01 Cibeureum	<0,0237	0,0398	N/A	0,0363	N/A	0,0787	N/A	<0,01	0,89	0.02	N/A	<0,05
27	RT/RW 02/01 Melong	<0,0237	4,14	N/A	0,0288	N/A	0,0693	N/A	<0,01	0,06	0,03	N/A	<0,05
28	RT/RW 05/06 Melong	<0,0237	0,0345	N/A	0,174	N/A	0,323	N/A	<0,01	0,26	0,02	N/A	<0,05
29	RT/RW 02/06 Utama	<0,0237	0,0749	N/A	0,844	N/A	0,0503	N/A	<0,01	0,18	0,02	N/A	<0,05
30	RT/RW 02/07 Utama	<0,0237	0,0398	N/A	0,984	N/A	0,0334	N/A	<0,01	0,41	0,02	N/A	0,11

Lanjutan Tabel-22.

No	Lokasi Sumur	Belerang sebagai H_2S (mg/L)	Fecal coliform (Jmlh/1000 ml)	Total coliform (Jmlh/1000 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)	MBAS (mq/L)	NH_3 (mq/L)
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)
1	RT/RW 04/29 Cipageran	N/A	2920	24810	N/A	N/A	0,161	<0,0544
2	RT/RW 02/04 Cipageran	N/A	1440	13760	N/A	N/A	0,221	<0,0544
3	RT/RW 03/06 Citeureup	N/A	24810	27550	N/A	N/A	0,172	<0,0544
4	RT/RW 05/08 Citeureup	N/A	730	92080	N/A	N/A	0,2	<0,0544
5	RT/RW 04/19 Cibabat	N/A	12,6	4790	N/A	N/A	0,226	<0,0544
6	RT/RW 03/07 Cibabat	N/A	100	410	N/A	N/A	0,137	<0,057
7	RT/RW 02/02 Pasir Kaliki	N/A	200	4140	N/A	N/A	0,127	<0,0544
8	RT/RW 05/03 Pasir Kaliki	N/A	1	100	N/A	N/A	0,164	<0,057
9	RT/RW 03/13 Karangmekar	N/A	100	860	N/A	N/A	0,327	<0,0544
10	RT/RW 01/12 Karangmekar	N/A	200	3590	N/A	N/A	0,283	<0,0544

No	Lokasi Sumur	Belerang sebagai H_2S (mg/L)	Fecal coliform (Jmlh/1000 ml)	Total coliform (Jmlh/1000 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)	MBAS (mq/L)	NH_3 (mq/L)
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)
11	RT/RW 02/14 Cigugur Tengah	N/A	3270	27550	N/A	N/A	0,315	<0,0544
12	RT/RW 03/17 Cigugur Tengah	N/A	200	5760	N/A	N/A	0,2	<0,0544
13	RT/RW 01/22 Baros	N/A	100	2310	N/A	N/A	0,296	<0,0544
14	RT/RW 03/04 Baros	N/A	630	36540	N/A	N/A	0,279	<0,0544
15	RT/RW 04/05 Cimahi	N/A	10,4	1730	N/A	N/A	0,286	<0,0544
16	RT/RW 02/09 Cimahi	N/A	6	30760	N/A	N/A	0,291	<0,0544
17	RT/RW 02/12 Setiamanah	N/A	1710	18600	N/A	N/A	0,138	<0,0544
18	RT/RW 02/04 Setiamanah	N/A	1080	29090	N/A	N/A	0,232	<0,0544
19	RT/RW 03/05 Padasuka	N/A	2780	19890	N/A	N/A	0,195	<0,0544
20	RT/RW 05/08 Padasuka	N/A	510	3880	N/A	N/A	0,098	<0,0544
21	RT/RW 01/12 Cibeber	N/A	24196	24196	N/A	N/A	0,186	<0,0544
22	RT/RW 02/14 Cibeber	N/A	31400	365400	N/A	N/A	0,152	<0,0544

No	Lokasi Sumur	Belerang sebagai H_2S (mg/L)	Fecal coliform (Jmlh/1000 ml)	Total coliform (Jmlh/1000 ml)	Gross-A (Bq/L)	Gross-B (Bq/L)	MBAS (mq/L)	NH_3 (mq/L)
(1)	(2)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)
23	RT/RW 01/11 Leuwigajah	N/A	24196	24196	N/A	N/A	0,32	0,0296
24	RT/RW 04/18 Leuwigajah	N/A	5200	24196	N/A	N/A	0,143	<0,0544
25	RT/RW 06/08 Cibeureum	N/A	24300	24196	N/A	N/A	0,295	<0,0544
26	RT/RW 06/01 Cibeureum	N/A	12400	24196	N/A	N/A	0,141	<0,0544
27	RT/RW 02/01 Melong	N/A	21600	1414000	N/A	N/A	0,172	<0,0544
28	RT/RW 05/06 Melong	N/A	63800	770100	N/A	N/A	0,183	<0,0544
29	RT/RW 02/06 Utama	N/A	18600	24196	N/A	N/A	0,125	<0,0544
30	RT/RW 02/07 Utama	N/A	2	5,2	N/A	N/A	0,051	<0,0544

Keterangan:

1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pengujian
2. Pengujian dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi dan UPTD Laboratorium Kabupaten Bandung

Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Sumur, 2023

Tabel-23. Kualitas Air Laut
Provinsi/Kota : Kota Cimahi
Tahun Data : 2024

No	Nama Lokasi	Waktu Sampling (tgl/bln/thn)	Koordinat		Lokasi Sampling	Warna (Mt)	Bau	Kecerahan (M)	Kekeruhan (NTU)	TSS (mg/l)	Sampah	Lapisan Minyak	Temperatur (°C)
			Lintang	Bujur									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Lanjutan Tabel-23.

No	Nama Lokasi	pH	Salinitas (‰)	DO (mg/l)	BOD_5 (mg/l)	COD (mg/l)	Amonia total (mg/l)	NO_2-N (mg/l)	NO_3-N (mg/l)	PO_4-P (mg/l)	Sianida (CN^-) (mg/l)	Sulfida (H_2S) (mg/l)	Klor (mg/l)	Minyak bumi (mg/l)	Fenol (mg/l)	Pestisida (mg/l)	PCB (mg/l)
(1)	(2)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat laut di Kota Cimahi

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-24. Curah Hujan Rata-rata Bulanan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Titik Koordinat		Bulan											
		Latitude	Longitude	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Stasiun Geofisika Bandung			35	154	218	94	188	61	22	6	12	63	70	225

Keterangan:
1. Satuan dalam mm

Sumber: BMKG Stasiun Geofisika, 2023

Tabel-25. Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kabupaten/Kota	Mata Air	Ledeng/PAM	Sumur	Sungai	Hujan	Kemasan	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kota Cimahi	N/A	33.919 SR	112.612 SR	N/A	N/A	N/A	2.693 SR

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan
2. Huruf SR menunjukkan Sambungan Rumah

Sumber: Pendataan Pemenuhan Kebutuhan Air bersih Kota Cimahi Tahun 2023

Tabel-26. Kualitas Air Hujan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Lokasi Pemantauan	Titik Koordinat		Waktu Pemantauan	pH	DHL (µmhos/em)	SO_4 (mg/L)	NO_3 (mg/L)	Cr (mg/L)	NH_4 (mg/L)	Na (mg/L)	Ca^{2+} (mg/L)	Mg^{2+} (mg/L)
		Latitude	Longitude										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Permukiman, Kelurahan Cipageran			13 Februari 2023	6,24	-	10,9	3,83	<0,0335	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Perkantoran, Pemerintah Kota Cimahi			16 Februari 2023	7,08	-	10,6	0,977	<0,0335	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Transportasi, Jalan Sangkurian			27 Februari 2023	6,09	-	2,07	0,236	<0,0335	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Inudstri			01 Maret 2023	6,83	-	2,01	0,941	<0,0335	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pengukuran untuk parameter tersebut

Sumber: LHU Kualitas Air Hujan, 2023

Tabel-27. Kondisi Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar Permukaan (m)	Lebar Dasar (m)	Kedalaman (m)	Debit Maks (m^3/dtk)	Debit Min (m^3/det)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	S. Cimahi	8,620	4 s/d 8	4 s/d 8	1,5 - 4	365	84
2	S. Cisangkan	7,952	4 s/d 8	4 s/d 8	1,5 - 4	-	-
3	S. Cilember	7,208	2,5- 5	2,5- 5	1,5- 3	117	100
4	S. Cibeureum	3,629	4 s/d 8	4 s/d 8	1,5 - 4	630	330

Keterangan:
1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: DPKP Kota Cimahi, 2023

Tabel-28. Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No	Nama Danau/ Waduk/ Situ/ Embung	Luas (Ha)	Volume (m^3)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Embung Pemkot	0,0378	0,0378
2	Embung Setiamanah	0,0401	0,0401
3	Embung Melong	0,1056	0,1056
4	Embung Leuwigajah 1	0,108	0,108
5	Embung Leuwigajah 2	0,0804	0,0804

Keterangan : -
Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2023

Tabel-29. Kualitas Air Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	06⁰ 51' 18"	107⁰ 33' 44,8"	06-Maret-23	20	7,63	114	126
		Sungai Cimahi Tengah	06⁰ 53' 32,4"	107⁰ 32' 28,7"	06-Maret-23	22	6,95	141	160
		Sungai Cimahi Hilir	06⁰ 53' 44,9"	107⁰ 32' 18,6"	06-Maret-23	22	7,28	165	153
2	**Cilember**	Sungai Cilember Hulu	06⁰ 52' 28,7"	107⁰ 33' 41,4"	07-Maret-23	23	7,18	484	565
		Sungai Cilember Tengah	06⁰ 53' 57,2"	107⁰ 33' 39,6"	07-Maret-23	26	7,62	556	401
		Sungai Cilember Hilir	06⁰ 55' 43,5"	107⁰ 32' 24,5"	07-Maret-23	22	7,4	1294	874
3	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	06⁰ 51' 15,7"	107⁰ 32' 06,2"	07-Maret-23	23	7,02	331	310
		Sungai Cisangkan Tengah	06⁰ 52' 57,2"	107⁰ 31' 41,6"	07-Maret-23	25	7,34	502	322
		Sungai Cisangkan Hilir	06⁰ 55' 05,5"	107⁰ 32' 00,4"	07-Maret-23	25	7,57	883	583

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	**Cihaur**	Sungai Cihaur Hulu	06⁰ 50' 50,5"	107⁰ 33' 20,5"	07-Maret-23	22	7,22	229	174
		Sungai Cihaur Tengah	06⁰ 51' 30,5"	107⁰ 32' 06,9"	07-Maret-23	24,5	7,35	421	302
		Sungai Cihaur Hilir	06⁰ 51' 29,4"	107⁰ 31' 59,0"	07-Maret-23	25	7,54	410	314
5	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	06⁰ 53' 37,5"	107⁰ 34' 08,0"	07-Maret-23	21	7,28	654	488
		Sungai Cibeureum Tengah	06⁰ 54' 09,8"	107⁰ 34' 55,4"	07-Maret-23	21,5	7,54	609	482
		Sungai Cibeureum Hilir	06⁰ 55' 55,1"	107⁰ 33' 42,8"	07-Maret-23	24	7,41	692	698

Lanjutan Tabel-29.

No	Nama Sungai	Titik Pantau	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO_2 (mg/L)	NO_3 (µg/L)	NH_3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	29,3	2,21	25,6	74,1	0,04	3,36	<0,057	0,32
		Sungai Cimahi Tengah	27,8	3,22	17,1	59,3	0,08	0,702	<0,057	0,48
		Sungai Cimahi Hilir	43,4	3,02	22,2	66,7	0,09	2,03	<0,057	0,42
2	**Cilember**	Sungai Cilember Hulu	40	5,43	18,1	48,2	0,49	0,863	<0,057	0,57
		Sungai Cilember Tengah	61,7	3,02	16,1	44,4	0,63	2,01	<0,057	0,78
		Sungai Cilember Hilir	94,8	7,24	28,2	66,7	0,05	1,84	<0,057	0,57
3	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	43,5	1,81	181	657	0,52	1,8	<0,057	<0.05
		Sungai Cisangkan Tengah	27,5	1,01	26,2	63	0,1	1,16	<0,057	0,33
		Sungai Cisangkan Hilir	19,6	2,41	15,1	40,7	0,04	1,39	<0,057	0,39
4	**Cihaur**	Sungai Cihaur Hulu	6,5	3,42	15,1	44,4	0,05	4,62	<0,057	<0,05
		Sungai Cihaur Tengah	7,62	4,12	19,1	55,6	0,53	4,58	<0,057	0,24
		Sungai Cihaur Hilir	6,44	2,21	15,1	40,7	0,745	4,82	<0,057	0,37
5	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	78,2	8,95	16,1	55,6	0,31	2,19	<0,057	0,68
		Sungai Cibeureum Tengah	73,5	1,61	17,1	48,2	0,61	2,97	<0,057	0,68
		Sungai Cibeureum Hilir	101	2,82	15,1	40,7	0,59	1,97	<0,057	0,72

Lanjutan Tabel-29.

No	Nama Sungai	Titik Pantau	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000ml)	Total coliform (jmlh/1000ml)	Sianida (mg/L)	H_2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(33)
1	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	0,227	0,172	4,25	0,272	2.690	20.000	<0,01	<0,0166
		Sungai Cimahi Tengah	0,284	0,175	4,05	0,205	22.240	63.000	0,016	0,0195
		Sungai Cimahi Hilir	0,537	0,22	3,95	0,306	12.200	31.000	0,018	0,0145
2	**Cilember**	Sungai Cilember Hulu	0,624	0,177	1,97	0,203	200	10.000	<0,01	0,0128
		Sungai Cilember Tengah	0,243	0,29	3,6	0,814	72.150	28.100	<0,01	<0,0166
		Sungai Cilember Hilir	0,78	0,428	3,3	0,69	68.930	443.000	<0,01	<0,0166
3	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	0,132	0,486	3,05	0,61	96.100	657.000	<0,01	<0,0166
		Sungai Cisangkan Tengah	0,331	0,307	2,8	1,28	75.560	609.000	0,011	<0,0166
		Sungai Cisangkan Hilir	0,41	0,324	3,8	0,616	17.250	63.000	<0,01	<0,0166
4	**Cihaur**	Sungai Cihaur Hulu	0,224	0,126	1,56	0,39	5.460	52.000	0,018	<0,0166
		Sungai Cihaur Tengah	0,316	0,151	2,5	0,743	15.150	272.000	0,01	<0,0166
		Sungai Cihaur Hilir	0,381	0,098	3,39	0,49	17.850	31.000	<0,01	<0,0166
5	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	0,958	0,202	2,87	0,297	24.000	110.000	<0,01	<0,0166
		Sungai Cibeureum Tengah	0,428	0,219	1,95	0,446	68.930	288.000	<0,01	<0,0166

No	Nama Sungai	Titik Pantau	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (mg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/1000ml)	Total coliform (jmlh/1000ml)	Sianida (mg/L)	H_2S (mg/L)
		Sungai Cibeureum Hilir	0,59	0,404	3,4	0,534	65.860	158.000	<0,01	<0,0166

Keterangan:

1. Pengujian dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi dan UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Bandung
2. Tanda (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pengukuran pada parameter tersebut

Sumber: LHU Kualitas Air Sungai, 2023

Tabel-30. Kualitas Air Danau/Waduk/Situ/Embung
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No	Nama	Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Titik Koordinat		Temperatur (°C)	Residu Terlarut (mg/L)	Residu Tersuspensi (mg/L)	pH	DHL (µmhos/cm)
			Lintang	Bujur					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Embung Brigif	21-Februari-23	06° 53' 36,6"	107° 31' 49,0"	27	-	-	8,87	315
2	Embung Cibabat	21-Februari-23	06° 52' 39,3"	107° 33' 04,3"	23	-	-	6,52	333
3	Embung Ciseupan	21-Februari-23	06° 53' 37,0"	107° 30' 54,9"	28	-	-	8,21	336
4	Kolam retensi Pasirkaliki	21-Februari-23	06° 53' 15,4"	107° 33' 45,9"	26	-	-	7,93	381
5	Embung Pemkot	21-Februari-23	06° 52' 10,6"	107° 33' 17,6"	22	-	-	7,52	176
6	Embung Setiamanah	21-Februari-23	06° 52' 23,1"	107° 32' 03,3"	25	-	-	7,14	358

Lanjutan Tabel-30.

No	Nama	TDS (mg/L)	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO2 (mg/L)	NO3 (mg/L)	NH3 (mg/L)	Klorin Bebas (mg/L)	T-P (mg/L)
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Embung Brigif	272	41	10	31,4	106	-	-	<0,057	0,73	-
2	Embung Cibabat	349	38,5	1,62	22,3	77,4	-	-	<0,057	<0,05	-
3	Embung Ciseupan	280	21	8,52	218	624	-	-	<0,057	0,66	-
4	Kolam retensi Pasikaliki	316	46,2	8,92	29,4	105	-	-	<0,057	1,14	-
5	Embung Pemkot	269	66,7	4,06	15,2	45,9	-	-	<0,057	<0,05	-
6	Embung Setiamanah	268	23,2	3,65	16,2	50,2	-	-	<0,057	0,57	-

Lanjutan Tabel-30.

No	Nama	Fenol (µg/L)	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh / 100 ml)	Total coliform (jmlh / 100 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	Embung Brigif	0,476	2,93	0,428	100	31.000	0,011	<0,0166
2	Embung Cibabat	0,137	4,59	0,388	200	41.000	<0,01	0,0566
3	Embung Ciseupan	0,5	3,68	0,359	28.510	121.000	<0,01	<0,0166
4	Kolam retensi Pasikaliki	0,335	3,15	0,322	410	31.000	<0,01	<0,0166
5	Embung Pemkot	0,2	2,11	0,421	850	10.000	<0,01	<0,0166
6	Embung Setiamanah	0,415	2,93	0,395	4.730	97.000	0,014	<0,0166

Keterangan:
1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pengujian pada parameter tersebut
2. Pengujian dilakukan oleh UPTD Laboratorium Lingkungan Kota Cimahi

Sumber: Hasil Uji Kualitas Air Embung 2023

Tabel-31. Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat Buang Air Besar
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No	Lokasi	Jumlah KK	Fasilitas Tempat Buang Air Besar			
			Sendiri	Bersama	Umum	Sungai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kecamatan Cimahi Utara	46.083	32.728	237	4517	19.915
2	Kecamatan Cimahi Tengah	48.139	17.102	775	16.963	14.619
3	Kecamatan Cimahi Selatan	67.181	43.734	1.185	17.172	4.385

Keterangan: -
Sumber: Dinas Kesehatan dan DPKP Kota Cimahi, 2023

Tabel-32. Penduduk Laki-laki dan Perempuan Menurut Tingkatan Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No	Kecamatan	Tidak Sekolah		SD		SLTP		SLTA		Diploma		S1		S2		S3	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)	(9)	(10)
1	Cimahi Selatan			0	0	9.566	9.037	4.064	3.95								
2	Cimahi Tengah			196	138	7.089	6.781	3.127	2.973								
3	Cimahi Utara			0	0	7.343	7.017	3.803	3.886								

Keterangan: -
Sumber: Dapodikdasmen, 2023

Tabel-33. Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Cimahi	*Acute upper respiratory infections / infeksi saluran pernafasan bagian atas akut*	64.019
2	Kota Cimahi	*Hypertensive diseases / Hipertensi*	35.126
3	Kota Cimahi	*Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws*	29.371
4	Kota Cimahi	*Diseases of oesophagus, stomach and duodenum*	18.435
5	Kota Cimahi	*Soft tissue disorders*	13.871
6	Kota Cimahi	*Diabetes mellitus*	13.065
7	Kota Cimahi	*Dermatitis and eczema*	9.000
8	Kota Cimahi	*Intestinal infectious diseases*	8.204
9	Kota Cimahi	*Tuberculosis*	7.295
10	Kota Cimahi	*Dorsopathies*	5.415
11	Kota Cimahi	*Chronic lower respiratory diseases*	5.392
12	Kota Cimahi	*Ischaemic heart diseases*	5.384
13	Kota Cimahi	*Other forms of heart disease*	4.425
14	Kota Cimahi	*Arthrosis*	3.865
15	Kota Cimahi	*Infections of the skin and subcutaneous tissue*	3.740

No.	Lokasi	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Kota Cimahi	*Disorders of ocular muscles, binocular movement, accommodation and refraction*	3.599
17	Kota Cimahi	*Cerebrovascular diseases*	3.561
18	Kota Cimahi	*Pediculosis, acariasis and other infestations*	3.344
19	Kota Cimahi	*Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders*	3.112
20	Kota Cimahi	*Episodic and paroxysmal disorders*	2.683

Keterangan: -
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Cimahi, 2023

Tabel-34. Jumlah Rumah Tangga Miskin
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Jumah Rumah Tangga Miskin	Prosentase Rumah Tangga Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Cimahi	187.858	91.975	48,95985265

Keterangan:
1. Satuan yang digunakan pada kolom jumlah rumah tangga dan jumlah rumah tangga miskin adalah Kepala Keluarga (KK
2. Satuan prosentase rumah tangga miskin dalam persen (%)

Sumber: Dinas Sosial Kota Cimahi, 2023

Tabel-35. Jumlah Limbah Padat dan Cair Berdasarkan Sumber Pencemaran
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Sumber Pencemaran	Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pasar Atas	Terminal dan Pasar	-	-	-		
2	Pasar Antri	Terminal dan Pasar	-	-	-		
3	Stasiun kereta api	Stasiun	-	-	-		
4	Pasar Baros	Pasar	-	-	-		
5	Antelas. PT	Industri	-	-	-	706,775	0
6	Aswindo Jaya Sentosa. PT	Industri	-	-	-	1.556,666	0
7	Ayoe Indotama Textile. PT	Industri	-	-	-	634,469	2,3
8	Benang Warna Indonusa. PT	Industri	-	-	-	537,450	0
9	Berdikari Metal Engeneering. PT	Industri	-	-	-	0,100	3,1

No.	Sumber Pencemaran	Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Bina Nusantara Prima. PT	Industri	-	-	-	240,220	1,8
11	Binausaha Cipta Prima. PT	Industri	-	-	-	760,000	0
12	Central Georgette Nusantara. PT	Industri	-	-	-	3.611,660	3,24
13	Chitose Internasional Tbk. PT	Industri	-	-	-	60,814	0,5
14	Dam Sinar Button Factory. PT	Industri	-	-	-	0,300	0
15	Dewasutratex - Cibeureum. PT	Industri	-	-	-	1.771,150	1,8
16	Dewasutratex - Melong. PT	Industri	-	-	-	5.159,685	2,9
17	Diamond Cold Storage - Kota Cimahi. PT	Industri	-	-	-	0,053	1
18	Elizabeth Hanjaya. PT	Industri	-	-	-	2,359	0
19	Fuji Palapa Textile Industries. PT	Industri	-	-	-	0,553	0,3

No.	Sumber Pencemaran	Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
20	Garuda Mas Semesta. PT	Industri	-	-	-	214,507	0,32
21	Ginatex. PT	Industri	-	-	-	171,180	2
22	Graha Seribu Satu Jaya. PT	Industri	-	-	-	126,590	0
23	Guna Mitra Prima. PT	Industri	-	-	-	459,936	2
24	Hegar Mulya. PT	Industri	-	-	-	515,216	1,8
25	Heksatex Indah. PT	Industri	-	-	-	615,406	0
26	Holi Pharma. PT	Industri	-	-	-	44,168	0
27	How Are You Indonesia. PT	Industri	-	-	-	326,673	0
28	Indowira Putra. PT	Industri	-	-	-	5,550	0

No.	Sumber Pencemaran	Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Jenshiang Nusantara Textile Chemical Industrial. PT	Industri	-	-	-	11,010	0,1
30	Jerdytex. PT	Industri	-	-	-	6,273	0,1
31	Kahatex Cijerah I. PT	Industri	-	-	-	5.602,332	5,76
32	Kamarga Kurnia Textile Industry. PT	Industri	-	-	-	2.472,970	0
33	Klinik Pratama Kahatex	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	0,043	0
34	Lab. Klinik Pramita	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	0,100	0
35	Laju Makmur Sentosa. PT	Industri	-	-	-	1.296,108	0
36	Leuwijaya Utama Textile. PT	Industri	-	-	-	40.031,000	0
37	Mitra Global Prima. PT	Industri	-	-	-	0,202	0,1

No.	Sumber Pencemaran	Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
38	Nisshinbo Indonesia. PT	Industri	-	-	-	4.384,210	0
39	Oriental Embroidery. PT	Industri	-	-	-	84,438	0
40	Prodia Widyahusada Tbk - Cabang Cimahi. PT	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	4,700	0
41	Perseroan Dagang dan Industri Farmasi Afiat. PT	Industri	-	-	-	16,496	0
42	Rajawali Hiyoto. PT	Industri	-	-	-	40,269	1
43	RS. Avisena	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	16,900	0
44	RSUD. Cibabat	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	59,396	0
45	RS. Kasih Bunda	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	29,282	0,01
46	RS. Mitra Anugrah Lestari	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	8,056	0

No.	Sumber Pencemaran	Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
47	RS. Mitra Kasih	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	42,107	0
48	RS. TK II 03.05.01 Dustira	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-	-	-	55,926	0
49	Sanbe Farma Unit I. PT	Industri	-	-	-	91,411	0
50	Sanbe Farma Unit II. PT	Industri	-	-	-	9,714	0
51	Sanbe Farma Unit R&D. PT	Industri	-	-	-	5,306	0
52	Sansan Saudaratex Jaya 1. PT	Industri	-	-	-	2.241,248	0
53	Setia Busanatex. PT	Industri	-	-	-	123,200	0
54	Sinar Continental. PT	Industri	-	-	-	1.772,079	0
55	Sinar Pangjaya Mulia Textile Industry. PT	Industri	-	-	-	1.379,049	1
56	Suritex. CV	Industri	-	-	-	1.240,704	0

No.	Sumber Pencemaran	Jenis/Klasifikasi	Luas (Ha)	Volume Limbah Padat (ton/hari)	Volume Air Limbah (m^3/hari)	Jumlah Limbah B3 Padat (ton/tahun)	Jumlah Limbah B3 Cair (m^3/tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57	Triana Harvestindo Nusantara. PT	Industri				547,800	1
58	Trisula Textile Industries Tbk. PT	Industri				1.646,459	1
59	UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi	Laboratorium Lingkungan				2,470	0
60	Wiraswasta Gemilang Indonesia - Cimahi. PT	Pengumpul Limbah B3				-	1907

Keterangan: Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-36. Suhu Udara Rata-rata Bulanan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

Januari	Nama dan Lokasi Stasiun	Lokasi	Suhu Udara Rata-Rata Bulanan(°C)											
			Jan	Feb	Januari	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Stasiun Geofisika Bandung	Bandung	24	23,3	23,6	24,1	24,6	24,2	23,7	23,8	24,7	25,6	25	25

Keterangan: -
Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, 2023

Tabel-37. Kualitas Udara Ambien
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Lokasi	Titik Koordinat		Lama Pengukuran	SO_2 (µg/Nm³)	CO (µg/Nm³)	Januari$_2$ (µg/Nm³)	O_3 (µg/Nm³)	HC (µg/Nm³)
		Latitude	Longitude						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Januari Logam Bima/Transportasi	06⁰ 52’ 06,4”	107⁰ 31’ 52,10”	-	35,93	1,912	22,36	54,31	6,21
2	Kantor Kel. Cigugur Tengah	06⁰ 53’ 28,67”	107⁰ 33’ 16,88”	-	< 30,22	1,145	14,4	42,49	4,59
3	Januari Jenshiang Nusantara	06⁰ 55’ 08,4”	107⁰ 32’ 50,0”	-	32,53	1,145	17,43	36,46	5,71
4	Perumahan Pilar Mas	06⁰ 54’ 02,57”	107⁰ 32’ 17,65”	-	<30,22	<1.145	6,78	<23,25	2,36

Keterangan: -
Sumber: LHU Kualitas Udara Tahun 2023

Lanjutan Tabel-37.

No.	Lokasi	PM_{10} (µg/Nm^3)	$PM_{2,5}$ (µg/Nm^3)	TSP (µg/Nm^3)	Pb (µg/Nm^3)	Dustfall (µg/Nm^3)	Total Fluorides Sebagai F (µg/Nm^3)	Fluor No. (µg/Nm^3)	Khlorine dan Khlorine Dioksida (µg/Nm^3)	Sulphat No. (µg/Nm^3)
(1)	(2)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	No. Logam Bima/Transportasi	68,83	32,3	110,35	0,98	-	-	-	-	-
2	Kantor Kel. Cigugur Tengah	59,22	29,48	106,98	0,61	-	-	-	-	-
3	No. Jenshiang Nusantara	69,95	35,8	116,22	1,06	-	-	-	-	-
4	Perumahan Pilar Mas	67,47	29,3	92,22	0,48	-	-	-	-	-

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pengujian

Sumber: LHU Kualitas Udara, 2023

Tabel-38. Penggunaan Bahan Bakar Industri dan Rumah Tangga
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Penggunaan	Banyak Perusahaan	Minyak Bakar	Minyak Diesel	Minyak Tanah	Pelumas (liter)	Gas PGN (m^3)	Gas bukan dari PGN (m^3)	Batubara (kg)	Gas LPG (kg)	Briket Batubara (kg)	Kayu Bakar	Biomassa	Bensin (liter)	Solar (liter)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)			
1	Kimia Dasar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Mesin dan logam dasar	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	Industri kecil	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	Aneka Industri	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35,720.16 ton/bulan	76,070.58 kg/bulan	N/A	N/A	N/A	N/A	276,945.38 L/bulan

Keterangan:
1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Data GRK dan Kapasitas Produksi Kota Cimahi, 2023

Tabel-39. Jumlah Kendaraan Bermotor dan Jenis Bahan Bakar yang Digunakan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Jumlah (Unit)			
		Jumlah	Bensin	Solar	Gas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mobil Beban	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Penumpang pribadi	7.722	N/A	N/A	N/A
3	Penumpang umum	860	N/A	N/A	N/A
4	Bus besar pribadi	N/A	N/A	N/A	N/A
5	Bus besar umum	N/A	N/A	N/A	N/A
6	Bus kecil pribadi	N/A	N/A	N/A	N/A
7	Bus kecil umum	47	N/A	N/A	N/A
8	Truk besar	N/A	N/A	N/A	N/A
9	Truk kecil	49	N/A	N/A	N/A
10	Roda tiga	N/A	N/A	N/A	N/A
11	Roda dua	32.478	N/A	N/A	N/A

Keterangan:
1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pengujian

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Cimahi, 2023

Tabel-40. Perubahan Penambahan Ruas Jalan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kelas Jalan	Panjang Jalan Dua Tahun Terakhir (Km)	
		2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jalan Bebas Hambatan		
2	Jalan Raya		
3	Jalan Sedang	13,98	13,98
4	Jalan Kecil	91,21	91,21

Keterangan:
1. Tidak ada penambahan jalan sejak 2020

Sumber: Inventaris Jalan Kota Cimahi, 2023

Tabel-41. Dokmen Izin Lingkungan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
1	UKL-UPL	Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (660/Kep.48-DLH/2023)	No. Berdikari Metal Engineering
2	UKL-UPL	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup kegiatan perkantoran, gudang, rumah tinggal dan industri pakaian jadi/konveksi dari tekstil CV. Bianda Usaha Maju	Herlis Nurjanah (Direktur)
3	UKL-UPL	Persetujuan Pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan pabrik es Tirta Hijau	Hiemawan Saputra (Direktur)
4	UKL-UPL	Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan pabrikasi/pembuatan barang dari logam oleh a.n No. Sinar metalindo utama	David Budiman (Direktur)
5	SPPL	Puskesmas Cipageran	drg. Irmawati Pusita Dewi
6	SPPL	Pembangunan Gudang a.n perorangan	Natasa
7	SPPL	Ruko No. Primafood No.	Yurman Bu'ulolo, S.E., M.M.
8	SPPL	Rumah Toko a.n. Perorangan	Mega Silitonga
9	SPPL	Rumah Ibadah Masjid Jami Nurul Iman	Kasmidi
10	SPPL	Pembangunan Ruko Praktik Dokter an. Perorangan	Zesty Virgiondita
11	SPPL	Pembangunan Rumah Tinggal dan Toko a.n. Perorangan	Ronalita Aini
12	SPPL	No. Shanum Aditama Cosmindo (Industri Kosmetik / KBLI 20232)	Muhammad Arief Rahman
13	SPPL	Pembangunan Rumah Tinggal dan Toko a.n. Perorangan	Naufal Firdaus

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
14	SPPL	Gedung Kantor Pengadilan Agama Kota Cimahi	Rudi Hartono
15	SPPL	Industri sabun dan bahan pembersih keperluan RT a.n. No. Sterin Healthcare No.	Agus Mulyadhi Susanto
16	SPPL	Pasar Swalayan kecil dan reklame No. Sumber Alfaria Trijaya/Stanislaus Kostka	Stanislaus Kostka Novianto
17	SPPL	Ghazy Farras Idrafauzi/Toko bertingkat a.n. No. Arista Mitra Lestari	Ghazy Farras Idrafauzi
18	SPPL	Minimarket & Reklame No. Sumber Alfaria Trijaya tbk Jl. Kerkof Kp. Kohapit Rt. 06 RW 20 Leuwigajah, Cimahi	Stanislaus Kostka Novianto
19	SPPL	Minimarket & Reklame No. Sumber Alfaria Trijaya tbk Jl. Jend. H. Amir Machmud No. 361 Rt. 01 Rw 01 Cigugur Tengah, Cimahi	Stanislaus Kostka Novianto
20	SPPL	Klinik utama dan reklame a.n perorangan	dr. Anugrah Ramdhani
21	SPPL	Masjid Manba'ul Huda	Achmad Zulkarnain
22	SPPL	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)	SRIKANDI MERAH PUTIH
23	SPPL	Perdagangan Eceran Komputer Dan Perlengkapannya, furnitur, Hasil Pencetakan Dan Penerbitan, Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Administrasi Kantor	MAKTABAH STORE RETAIL SOLUTION
24	SPPL	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi	SEMBILAN BELAS BERKAWAN
25	SPPL	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	CAHAYA LESTARI OTOMOTIF

No.	Jenis Dokumen	Kegiatan	Pemrakarsa
(1)	(2)	(3)	(4)
26	SPPL	Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki, Industri Mesin Dan Perlengkapan ytdl, Industri Alat Angkutan Lainnya, Industri Barang Logam, Bukan Mesin Dan Peralatannya	QHYRA UTAMA
27	SPPL	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor, Aktivitas Pos dan Kurir, Penyediaan Makanan Dan Minuman	ALVAREL
28	SPPL	INDUSTRI PAKAIAN JADI	AGUNG SAMUDRA LARI
29	SPPL	Pendidikan Kelompok Bermain	NAWWIRNAA BIL QUR'AN
30	SPPL	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	SULUNG JAYA UTAMA
31	SPPL	Industri Makanan	USAHA MILYARDER MUDA No.
32	SPPL	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	WIRSA ARDHANA UTAMA
33	SPPL	Pertanian Tanaman, Peternakan, Perburuan dan Kegiatan YBDI	SWARGA MANILOKA NUSWANTARA
34	SPPL	Perdagangan Besar, Bukan Mobil Dan Sepeda Motor	KARYA PUTRO NUSANTARA
35	SPPL	Aktivitas Penerbitan, Aktivitas Jasa Informasi	WARTA NUSANTARA UTAMA
36	SPPL	Perdagangan Eceran, Bukan Mobil Dan Motor	RIZKI FADILAH
37	SPPL	Pendidikan Kelompok Bermain	INSAN MANDIRI BERSAMA
38	SPPL	Penyediaan Akomodasi, Real Estate	HOLIDAY LOVERS

Keterangan: -
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-42. Perusahaan yang Mendapat Tanggapan Persetujuan Teknis/Rincian Teknis Mengelola Limbah B3
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2023	KLINIK UTAMA PRAMITHA	JL. JEND. H. AMIRMACHMUD No.101 KEL. CITEUREUP KEC. CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI	LABORATORIUM DAN PELAYANAN KESEHATAN	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/0014/PSLB3PK
2	2023	No. GEDE INDAH	JL. INDUSTRI I No. 11 KEL. UTAMA KEC. CIMAHI SELATAN	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/0110/PSLB3PK
3	2023	No. INDAH JAYA GEMILANG	JL. MAHAR MARTANEGARA No.169 RT.01/08 KEL. UTAMA KEC. CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI	INDUSTRI TEKSTIL	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/0170/PSLB3PK
4	2023	CV. BIANDA USAHA MAJU	JL. KERKOF No. 142 RT.001 RW. 009 KEL. LEUWIGAJAH KEC. CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI	INDUSTRI PAKAIAN JADI/ KONVEKSI	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/0010/PSLB3PK
5	2023	No. DIAMOND COLD STORAGE	JL. Daeng Rd. Ardiwinata No.33 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara Kota Cimahi	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/0021/PSLB3PK
6	2023	No. MAHLIGAI PUTERI BERLIAN	JL. AMIR MACHMUD No.327 RT.03 RW.16 KEL. CIGUGUR TENGAH KEC. CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI	SHOWROOM PENJUALAN DAN WORKSHOP	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/0025/PSLB3PK

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	2023	UPTD – LABLING DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI	JL. RD. DEMANG HARDJAKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG KOMP. PERKANTORAN PEMKOT CIMAHI	LABORATORIUM	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/0235/PSLB3PK
8	2023	PABRIK KECAP "KENCANA"	JL. CIAWITALI No. 03 RT. 004 RW. 009 KEL. CITEREUP KEC. CIMAHI UTARA KOTA CIMAHI	INDUSTRI KECAP	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/0298/PSLB3PK
9	2023	No. HETZER MEDICAL No. TBK	JL. MAHAR MARTANEGARA No.106 KEL. CIGUGUR TENGAH KEC. CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI	PRODUKSI DAN GUDANG ALAT – ALAT KESEHATAN	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/807/PSLB3PK
10	2023	No. JAYA MELAJU ABADI	JL. Kerkof Blok Kihapit Kel. Leuwigajah Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi	Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/794/PSLB3PK
11	2023	No. KERETA API No. – CIMAHI	JL. STASIUN KELURAHAN BAROS KEC. CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI	AKTIVITAS STASIUN KERETA API DAN KONSULTASI REL	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/1115/PSLB3PK
12	2023	KLINIK UTAMA	JL. KERKOF No. 23 RT.005/009 KEL. LEUWIGAJAH KEC. CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI	AKTIVITAS KLINIK SWASTA	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/1135/PSLB3PK
13	2023	No. SUGIHARTONO AGRA MAKMUR (RUMAH SAKIT MITRA KASIH)	JL. JEND. H. AMIRMACHMUD No.341 RT. 001/ 004 KEL. CIGUGUR TENGAH KEC. CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI	RUMAH SAKIT UMUM KELAS C	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/1172/PSLB3PK

No.	Tahun	Nama Perusahaan	Lokasi	Jenis Kegiatan/Usaha	Jenis Izin	Nomor SK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	2023	CV. EBOD JAYA	JL. NANJUNG No. 105 RT. 003/ 013 KEL. UTAMA KEC. CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI	INDUSTRI KONSENTRAT MAKANAN HEWAN DAN PERDAGANGAN SANGKAR BURUNG	PENYIMPANAN LIMBAH B3	660.3/1158/PSLB3PK

Keterangan: -
Sumber: DLH Kota Cimahi, 2023

Tabel-43. Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL))
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2023	RS Mitra Kasih	Selasa, 10 No. 2023	Rahasia
2	2023	No. Mahligai Puteri Berlian	Selasa, 10 No. 2023	Rahasia
3	2023	No. Guna Mitra Prima	Rabu, 18 No. 2023	Rahasia
4	2023	No. BINA NUSANTARA PRIMA	Rabu, 18 No. 2023	Rahasia
5	2023	No. LEUWIJAYA UTAMA TEXTILE	Selasa, 31 No. 2023	Rahasia
6	2023	No. TRIDHARMA MEGAMITRA	Selasa, 31 No. 2023	Rahasia
7	2023	No. SINAR CONTINENTAL	Selasa, 07 Februari 2023	Rahasia
8	2023	CV SURITEX	Kamis, 09 Februari 2023	Rahasia
9	2023	PUSKESMAS CIGUGUR TENGAH	Senin, 06 No. 2023	Rahasia
10	2023	PUSKESMAS CIMAHI TENGAH	Rabu, 08 No. 2023	Rahasia
11	2023	No. DEWASUTRATEX 1	Kamis, 09 No. 2023	Rahasia
12	2023	No. ASWINDO JAYA SENTOSA	Jumat, 10 No. 2023	Rahasia
13	2023	PUSKESMAS PADASUKA	Senin, 27 No. 2023	Rahasia
14	2023	PUSKESMAS CIMAHI UTARA	Rabu, 29 No. 2023	Rahasia
15	2023	TANJUNG HARAPAN	Jumat, 31 No. 2023	Rahasia
16	2023	No. INDOWIRA PUTERA	Rabu, 05 April 2023	Rahasia
17	2023	PUSKESMAS CITEUREUP	Senin, 10 April 2023	Rahasia

No.	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	2023	PUSKESMAS CIMAHI SELATAN	Kamis, 13 April 2023	Rahasia
19	2023	PUSKESMAS CIBEUREUM	Senin, 17 April 2023	Rahasia
20	2023	PUSKESMAS PASIRKALIKI	Senin, 17 April 2023	Rahasia
21	2023	PUSKESMAS CIBEBER	Rabu, 03 Mei 2023	Rahasia
22	2023	PUSKESMAS LEUWIGAJAH	Rabu, 03 Mei 2023	Rahasia
23	2023	PUSKESMAS MELONG ASIH	Senin, 08 Mei 2023	Rahasia
24	2023	PUSKESMAS MELONG TENGAH	Senin, 08 Mei 2023	Rahasia
25	2023	PUSKESMAS CIPAGERAN	Kamis, 11 Mei 2023	Rahasia
26	2023	STASIUN KA CIMAHI	Selasa, 23 Mei 2023	Rahasia
27	2023	No. DWIMULYA TATATUNGGAL	Senin, 12 Juni 2023	Rahasia
28	2023	No. BINTANG WARNA MANDIRI	Rabu, 14 Juni 2023	Rahasia
29	2023	No. AMANTRUS CIPTA MANDIRI	Jumat, 21 Juli 2023	Rahasia
30	2023	No. BINTANG WARNA MANDIRI	Senin, 24 Juli 2023	Rahasia
31	2023	No. BENANG WARNA INDONUSA	Selasa, 25 Juli 2023	Rahasia
32	2023	No. SANSAN SAUDARATEX JAYA I	Senin, 31 Juli 2023	Rahasia
33	2023	CV GINATEX	Selasa, 01 Agustus 2023	Rahasia
34	2023	No. SANBE FARMA UNIT R&D	Jumat, 04 Agustus 2023	Rahasia
35	2023	No. SINAR CONTINENTAL	Senin, 07 Agustus 2023	Rahasia
36	2023	No. SANBE FARMA UNIT CIBODAS	Kamis, 14 September 2023	Rahasia
37	2023	No. kahatex Nanjung (Indoputra)	Selasa, 31 Oktober 2023	Rahasia
38	2023	No. Puninar Jaya (Anter No.)	Kamis, 07 Desember 2023	Rahasia
39	2023	No. Indo Extrusion	Kamis, 07 Desember 2023	Rahasia

No.	Tahun	Nama Perusahaan/Pemrakarsa	Waktu (tgl/bln/thn)	Hasil Pengawasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
40	2023	No. Pola Manunggal Sejati	Senin, 11 Desember 2023	Rahasia
41	2023	No. Mitra Artha Cemerlang	Senin, 11 Desember 2023	Rahasia
42	2023	No. Setia Busanatex	Senin, 11 Desember 2023	Rahasia
43	2023	No. Berdikari Metal Engineering II	Selasa, 12 Desember 2023	Rahasia
44	2023	No. Sansan Saudaratex Jaya II	Selasa, 12 Desember 2023	Rahasia
45	2023	No. Oriental Embroidery	Rabu, 13 Desember 2023	Rahasia
46	2023	No. Citra Bandung Laksana	Senin, 18 Desember 2023	Rahasia
47	2023	No. Leuwijaya Utama Textile	Senin, 18 Desember 2023	Rahasia
48	2023	No. Daya Utama Logam	Selasa, 19 Desember 2023	Rahasia
49	2023	No. Antelas	Rabu, 20 Desember 2023	Rahasia
50	2023	No. Graha Seribu Satujaya	Rabu, 20 Desember 2023	Rahasia
51	2023	No. TRIDHARMA MEGAMITRA	Jumat, 28 Juli 2023	Rahasia
52	2023	No. GUCCI RATU TEXTILE No.	Jumat, 31 No. 2023	Rahasia
53	2023	No. SANBE FARMA UNIT I	Rabu, 11 No. 2023	Rahasia

Keterangan: -
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (Bidang PHL) Kota Cimahi, 2023

Tabel-44. Kebencanaan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cimahi Utara	Komplek Cimindi Raya Blok AH-06	ANGIN KENCANG		-		
2	Cimahi Utara	Jl. Cihanjuang Gg. Ikras II	PERGERAKAN TANAH	Luas area keseluruhan : 70 m^2	-		28000000
3	Cimahi Utara	Jl. Budi 22	PERGERAKAN TANAH	Luas area terdampak: 96 m^2 Luas area keseluruhan : 168 m^2 Kategori kerusakan : Berat	-		300000000
4	Cimahi Utara	Kp. Legok Veteran	PERGERAKAN TANAH	Luas area terdampak rumah : • Bapak Tardi : 18 m^2 • Bapak Rohmat : 12 m^2. Luas area keseluruhan :	-		96000000

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				• Bapak Tardi : 70 m^2 • Bapak Rohmat : 56 m^2.			
5	Cimahi Utara	Jl. Budi 26	PERGERAKAN TANAH	80	11		300000000
6	Cimahi Utara	Jl. Budi 26	PERGERAKAN TANAH	80	49		550000000
7	Cimahi Utara	Gg. Edeng	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : Zamroni = 6 m^2 Hamdani = 18 m^2 Dedi = 6 m^2 Luas area keseluruhan : Zamroni = 24 m^2 Hamdani = 70 m^2 Dedi = 42 m^2	7		15000000
8	Cimahi Utara	Jl. Gunung Batu	ANGIN KENCANG		7		5000000
9	Cimahi Selatan	Kp. Nyenyerean Jl. Sadarmanah Gg. Samoja	BANJIR		26		50000000
10	Cimahi Utara	Kp. Anggaraja	TANAH LONGSOR	24	-		10000000
11	Cimahi Utara	Kp. Cimekar	TANAH LONGSOR	24	30		50000000
12	Cimahi Utara	Jl. Kolmas Depan AWC	ANGIN KENCANG		4		

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	Cimahi Utara	Kp. Lebak Saat Girang	ANGIN KENCANG	29	-		22000000
14	Cimahi Utara	Kp. Cimenteng	ANGIN KENCANG		-		
15	Cimahi Utara	Kantor Dispangtan (Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi)	TANAH LONGSOR		-		15000000
16	Cimahi Utara	Jl. Cihanjuang Gg. Bakti	TANAH LONGSOR	Luas area terdampak : ± 10 x 6 m^2 Luas area keseluruhan : ± 30 x 35 m^2	5		12000000
17	Cimahi Selatan	Kp. Sindang Sari	TANAH LONGSOR	Luas area terdampak : ± 30 m^2 Luas area keseluruhan : ± 45 m^2	-		60000000
18	Cimahi Tengah	Jl. Gatot Subroto No. E3	ANGIN KENCANG		-		
19	Cimahi Utara	Kp Cileutik	TANAH LONGSOR	Luas area terdampak : ± 10 m^2 Luas area keseluruhan :	-		

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				± 18 m^2 Kategori Kerusakan Ringan			
20	Cimahi Utara	Toko Tanaman Hias	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : ± 40 m^2 Luas area keseluruhan : ± 100 m^2	4		
21	Cimahi Utara	Jl. Gunung Rahayu	ANGIN KENCANG		4		
22	Cimahi Utara	RW 08 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara	BANJIR		7		
23	Cimahi Selatan	Perumahan Leuwigajah Permai	BANJIR		5		
24	Cimahi Selatan	Kp. Saradan	BANJIR		-		
25	Cimahi Selatan	Komplek Pemda I	BANJIR		14		
26	Cimahi Selatan	Jl. Ibu Ganirah	BANJIR		3		
27	Cimahi Selatan	Kp. Baru Gg. Nuryadi	BANJIR		-		
28	Cimahi Selatan	Komp. Alamanda	BANJIR		-		

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	Cimahi Selatan	Kp. Babakan Utama Gg. Panyaweuyan	BANJIR		-		
30	Cimahi Selatan	Kp. Lembur Sawah	BANJIR		-		
31	Cimahi Selatan	Jl. Cibogo	BANJIR	Panjang 5 m dan tinggi 1 m	-		
32	Cimahi Selatan	Blok Ciseupan	TANAH LONGSOR	10 x 4 m	-		
33	Cimahi Selatan	Kp. Nyenyerean	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : 12 x 10 = 240 m² Luas area keseluruhan : 24 x 24 = 576 m²	-		50000000
34	Cimahi Selatan	Kp. Cibogo	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : 5 m² Luas area keseluruhan : 25 m²	-		7500000
35	Cimahi Selatan	Kp. Kihapit Timur	ANGIN KENCANG		3		
36	Cimahi Utara	Jl. Ciawitali	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : 8 m² Luas area keseluruhan : 70 m²	13		50000000

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
37	Cimahi Selatan	Jl. Pojok Cireundeu	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 2000 m^2 Luas area keseluruhan : ± 4000 m	7		
38	Cimahi Selatan	Kp. Babakan Utama	BANJIR		10		
39	Cimahi Selatan	Kp. Pojok Cireundeu	TANAH LONGSOR	Luas area terdampak : Tinggi 6 m dan Lebar 8 m Luas area keseluruhan : 90 m^2	46		48000000
40	Cimahi Selatan	Kp. Saradan	BANJIR		34		
41	Cimahi Selatan	Kp. Cireundeu	KEBAKARAN	700 m^2	13		
42	Cimahi Utara	Kamarung Komp. Romansa	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 1000 m^2	-		
43	Cimahi Utara	Kp. Pasirkiara	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 200 m^2 Luas area keseluruhan : ± 5000 m^2	6		
44	Cimahi Selatan	Jl. Aki Ina Gg. Muasim	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 800 m^2	3		

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Luas area keseluruhan : ± 2000 m^2			
45	Cimahi Utara	Komp. Nata Endah	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 15 m^2 Luas area keseluruhan : ± 30 m^2	9		
46	Cimahi Selatan	Jl. Terusan Kerkof, Bukit Kolonel	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 10.000 m^2 Luas area keseluruhan : ± 180.000 m^2	8		
47	Cimahi Utara	Jl. Sukarasa No. 40	ANGIN KENCANG		40		1000000
48	Cimahi Utara	Jl. Kolonel Masturi belakang AWC (Alam Wisata Indah)	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 500 m^2 Luas area keseluruhan : ± 1.500 m^2	7		
49	Cimahi Selatan	Kp. Cireundeu	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 250 m^2 Luas area keseluruhan : ± 600 m^2	-		
50	Cimahi Selatan	Kp. Cireundeu	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 2.000 m^2	-		

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Luas area keseluruhan : ± 4.000 m^2			
51	Cimahi Utara	Jl. Sangkuriang Barat II	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 100 m^2 Luas area keseluruhan : ± 500 m^2	-		
52	Cimahi Utara	Jl. Aruman	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 6 m^2 Luas area keseluruhan : ± 25 m^2	4		
53	Cimahi Utara	Kp. Pasir Kiara	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : 6 m^2 Luas area keseluruhan : 30 m^2	8		3000000
54	Cimahi Selatan	Jl. Kerkof Blok Padakasih	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 300 m^2 Luas area keseluruhan : ± 600 m^2	9		
55	Cimahi Selatan	Kp. Cibogo	KEKERINGAN		-		
56	Cimahi Utara	Kp. Lebak Saat	KEKERINGAN		3		
57	Cimahi Selatan	Kp. Ciseupan	KEKERINGAN		-		
58	Cimahi Utara	Jl. Babakan Loa	KEKERINGAN		-		

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
59	Cimahi Selatan	Kp. Cireundeu	KEKERINGAN		3		
60	Cimahi Selatan	Kp. Padakasih	KEKERINGAN		2		
61	Cimahi Utara	Komplek Edeleweis Resident	KEKERINGAN		9		
62	Cimahi Utara	Jl. Sukarasa	KEKERINGAN		5		
63	Cimahi Utara	Permana Barat Kp. Kamarung	KEKERINGAN		14		
64	Cimahi Utara	Komplek Griya Asih	KEKERINGAN		7		
65	Cimahi Utara	Jl. Karya Bakti Kp. Pasir Kiara	KEKERINGAN		5		
66	Cimahi Tengah	SDN Sukamaju 1 dan 2	KEKERINGAN		-		
67	Cimahi Selatan	Kavling Amir Mahmud	KEKERINGAN		1196		
68	Cimahi Utara	Kp. Babut Girang	KEKERINGAN		8		
69	Cimahi Utara	Jl. Permana Timur Gg. Sauyunan	KEKERINGAN		14		

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
70	Cimahi Selatan	Gg. Dukuh Blok 7	KEKERINGAN		26		
71	Cimahi Utara	Komp. Permana Indah Jl. Nyiruan	KEKERINGAN		-		
72	Cimahi Tengah	Jl. Haji Tajudin	ANGIN KENCANG	42	11		3000000
73	Cimahi Tengah	Gg. Sukawahyu	KEKERINGAN		7		
74	Cimahi Tengah	Warung Contong	KEKERINGAN		-		
75	Cimahi Utara	Jl. Roket	KEKERINGAN		4		
76	Cimahi Utara	Kp. Ciledug	KEKERINGAN		-		
77	Cimahi Utara	Gg. Karya Bakti	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 800 m^2 Luas area keseluruhan : ± 5.000 m^2	25		
78	Cimahi Selatan	Jl. Sapta Daya Kp. Cireundeu	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 400 m^2 Luas area keseluruhan : ± 3.000 m^2	9		
79	Cimahi Selatan	Jl. Sapta Daya Kp. Cireundeu	KEBAKARAN	Luas area terdampak : ± 3.000 m^2 Luas area keseluruhan : ± 6.000 m^2	3		

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
80	Cimahi Tengah	Jl. Warung Contong	KEKERINGAN		23		
81	Cimahi Tengah	Jl. Kalidam	KEKERINGAN		4		
82	Cimahi Tengah	Jl. Kebon Manggu	KEKERINGAN		4		
83	Cimahi Utara	Kp. Paku Haji Tengah	KEKERINGAN		-		
84	Cimahi Utara	Gg. Awi Gombong	KEKERINGAN		-		
85	Cimahi Utara	Jl. Sentral	KEKERINGAN				
86	Cimahi Utara	SDN Pasir Kaliki MANDIRI 1	KEKERINGAN				
87	Cimahi Utara	Jl. Nurpa'i	KEKERINGAN				
88	Cimahi Utara	Jl. Gunung Rahayu 1	KEKERINGAN				
89	Cimahi Tengah	Jl. Margamulya	KEKERINGAN				
90	Cimahi Tengah	Jl. Bapak Ampi	KEKERINGAN				
91	Cimahi Tengah	Jl. Bapak Ampi	KEKERINGAN				
92	Cimahi Tengah	Jl. H. Haris	KEKERINGAN				
93	Cimahi Tengah	Jl. H. Haris Gg. Djuarta	KEKERINGAN				

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
94	Cimahi Tengah	Jl. Sukimun	KEKERINGAN				
95	Cimahi Tengah	Jl. Kebon Rumput	KEKERINGAN				
96	Cimahi Selatan	Kp. Cireundeu	KEBAKARAN				
97	Cimahi Tengah	Kp. Pojok Selatan	KEKERINGAN				
98	Cimahi Tengah	Jl. Simpang	KEKERINGAN				
99	Cimahi Tengah	Kp. Margajaya	KEKERINGAN				
100	Cimahi Selatan	Jl. Ibu Sangki Gg. Umjani	KEKERINGAN				
101	Cimahi Tengah	Komplek Pemda	KEKERINGAN				
102	Cimahi Selatan	Kp. Cibogo	KEKERINGAN				
103	Cimahi Tengah	Jl. Cisangkan Girang	KEKERINGAN				
104	Cimahi Selatan	Kp. Cibogo	KEKERINGAN				
105	Cimahi Utara	Jl. Cimenteng	KEKERINGAN				
106	Cimahi Tengah	Jl. KH. Usman Dhomiri	KEKERINGAN				
107	Cimahi Utara	Jl. Budi	KEKERINGAN				
108	Cimahi Utara	Jl. Martasik	KEKERINGAN				

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
109	Cimahi Utara	Kp. Ciawitali	KEKERINGAN				
110	Cimahi Selatan	Jl. Sindangsari Kp. Cicekek	KEKERINGAN				
111	Cimahi Tengah	Jl. Penembakan Utara	KEKERINGAN				
112	Cimahi Utara	Komplek GACC	KEKERINGAN				
113	Cimahi Tengah	Komplek Nusa Cisangkan Permai	KEKERINGAN				
114	Cimahi Tengah	Asrama Bekang	KEKERINGAN				
115	Cimahi Selatan	Kp. Cibogo	ANGIN KENCANG	32			96000000
116	Cimahi Utara	Komplek Nata Endah	ANGIN KENCANG				
117	Cimahi Utara	Jl. Encep Kartawiria	ANGIN KENCANG	8			1000000
118		Jl. Sukasenang	ANGIN KENCANG				
119	Cimahi Utara	Kantor Kec. Cimahi Utara	ANGIN KENCANG	KR 4			5000000
120	Cimahi Utara	Kantor Pemerintahan Kota Cimahi	ANGIN KENCANG				

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
121	Cimahi Utara		ANGIN KENCANG				
122	Cimahi Tengah		ANGIN KENCANG				
123	Cimahi Selatan	Kp. Babakan Utama	ANGIN KENCANG				
124	Cimahi Tengah	Jl. Cibaligo	ANGIN KENCANG				
125	Cimahi Tengah	Jl. Mahar Martanegara	ANGIN KENCANG				
126	Cimahi Tengah	Jl Marga Mulya	ANGIN KENCANG				
127	Cimahi Selatan		ANGIN KENCANG				
128	Cimahi Utara	Jl. Sangkuriang	ANGIN KENCANG				
129	Cimahi Selatan		ANGIN KENCANG				
130	Cimahi Selatan	Jl. H. Bakar	ANGIN KENCANG				
131	Cimahi Tengah	Gg. Mawar 5	ANGIN KENCANG				
132	Cimahi Tengah	Jl. Haji Haris SDN Baros Mandiri 3	ANGIN KENCANG				10000000
133	Cimahi Selatan	Jl. Sadarmanah Gg. H. Mustopa No. 167	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : 42 m^2 Luas area keseluruhan : 98 m^2			50000000

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
134	Cimahi Tengah	Jl. Baros Utama	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : 6 m^2 Luas area keseluruhan : 400 m^2			1000000
135	Cimahi Tengah	Jl. Haji Haris	ANGIN KENCANG				
136	Cimahi Tengah	Jl. H. Haris	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : • Ibu Tia : 35 m^2 • Masjid : 10 m^2 • Bapak Bana : 16 m^2 Luas area keseluruhan : • Ibu Tia : 200 m^2 • Masjid : 66 m^2 • Bapak Bana : 120 m^2			10000000
137	Cimahi Tengah	Jl. KH Usman Dhomiri	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : 10 m^2 Luas area keseluruhan : 168 m^2			8000000
138	Cimahi Tengah	Jl. Kebon Rumput D26 No. 22	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : 1.5 m^2 Luas area keseluruhan : 300 m^2			550000

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
139	Cimahi Selatan	Kp. Hujung Kulon	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : 10 m^2 Luas area keseluruhan : 70 m^2			1500000
140	Cimahi Utara	Komplek perkantoran pemerintah Kota Cimahi Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang No.1, Kelurahan Cibabat, Kec. Cimahi Utara	ANGIN KENCANG				
141	Cimahi Selatan	Jl. Melong Raya Gg. Anis	ANGIN KENCANG	88			8000000
142	Cimahi Tengah	Babakan Anyar	ANGIN KENCANG	30			
143	Cimahi Utara	Perum Bukit Cipageran Indah Blok C	TANAH LONGSOR	25			

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
144	Cimahi Tengah	Jl. Sasmita No. 72	ANGIN KENCANG	96			48000000
145	Cimahi Selatan	Kp. Cibodas Campaka	ANGIN KENCANG	137			48400000
146	Cimahi Selatan	Jl. Melong blok sekolah	ANGIN KENCANG	6			2500000
147	Cimahi Selatan	Jl. Sindangsari Blok IV	ANGIN KENCANG				
148	Cimahi Utara	Kp. Sawah Lega	PERGERAKAN TANAH	Luas area terdampak : 60 m² Luas area keseluruhan : 70 m²			100000000
149	Cimahi Utara	Jl. Martasik Kp. Cipanawar	TANAH LONGSOR	Luas area terdampak : 70 m² Luas area keseluruhan : 150 m²			21000000
150	Cimahi Utara	Kp. Cileutik	TANAH LONGSOR	Luas area terdampak : 1. Kokom Luas area terdampak 35 m^2 2. Sudirman Luas area terdampak 56			35000000

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				m^2 Luas area keseluruhan : 1. Kokom : Luas area keseluruhan 35 m^2 2. Sudirman : Luas area keseluruhan 56 m^2			
151	Cimahi Utara	Kp. Tegal Kawung	TANAH LONGSOR	Luas area terdampak : 20 m^2 Luas area keseluruhan : 60 m^2			
152	Cimahi Utara	Jl. Cipageran Asri	TANAH LONGSOR	Luas area terdampak : 50 m^2 Luas area keseluruhan : 500 m^2			
153	Cimahi Selatan	Gang martobi	BANJIR	Luas area terdampak : 1. Bapak Warno Luas area terdampak 8 m^2 2. Ibu Ncas Luas area terdampak 12x3 m 3. Bapak Usup Luas area terdampak 14x2 m 4. Bapak Ruslan Luas			8000000

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				area terdampak 4x4 m 5. Bapak Musiran Luas area terdampak 21 m^2 Luas area keseluruhan : 1. Bapak Warno : Luas area keseluruhan 8 m^2 2. Ibu Ncas : Luas area keseluruhan 14x2 m 3. Bapak Usup Luas area keseluruhan 14x2 m 4. Bapak Ruslan Luas area keseluruhan 4x4 m 5. Bapak Musiran Luas area keseluruhan 21 m^2			
154	Cimahi Tengah	Jl. Mahar Martangera	BANJIR				
155	Cimahi Selatan	Jl. Babakan Gempol Sari	BANJIR				
156	Cimahi Selatan	Jl. Melong Tengah 3	BANJIR	Luas area terdampak : 8 m^2			16000000

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Luas area keseluruhan : 70 m²			
157	Cimahi Selatan	Jl. Wakaf	TANAH LONGSOR	Luas area terdampak : 72 m² Luas area keseluruhan : 288 m²			16000000
158	Cimahi Utara	Jl. Kamarung	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : 10 m² Luas area keseluruhan : 20 m²			25000000
159	Cimahi Utara	Jl. Koco Negoro	ANGIN KENCANG				
160	Cimahi Tengah	Jl. Kebon Manggu No. 6B	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : 36 m² Luas area keseluruhan : 144 m²			54000000
161	Cimahi Utara	Komplek GACC Blok D	TANAH LONGSOR	Luas area terdampak : • Rumah = 16m² • Tanah longsor = tinggi 10m dan lebar 16m Luas area keseluruhan : • Rumah = 55 m²			50000000

No.	Kecamatan	Lokasi	Jenis Bencana	Jumlah Areal Terdampak	Jumlah Korban		Perkiraan Kerugian (Rp)
					Mengungsi	Meninggal	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				• Tanah longsor = 100 m			
162	Cimahi Selatan	Blok Citopeng No. 117	ANGIN KENCANG	Luas area terdampak : 18 m² Luas area keseluruhan : 60 m²			18000000
163	Cimahi Tengah	Kp. Sukasenang RT 03 dan 04	ANGIN KENCANG				105000000

Keterangan:

1. Huruf (N/A) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: BPBD, Satpol PP dan Damkar Kota Cimahi, 2023

Tabel-45. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kota	Luas (Km^2)	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk (Jumlah/ Km^2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kota Cimahi	42,43	575519	1,59	13563
2	Kecamaan Cimahi Selatan	17,41	240363	1,46	13806
3	Kecamaan Cimahi Tengah	10,89	164179	1,5	15071
	Kecamaan Cimahi Utara	14,13	170977	1,85	12102

Keterangan: -
Sumber: Database Kondolidasi Bersih Semester II 2023 Kota Cimahi

Tabel-46. Jenis Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Prov/Kota/Kab	Lokasi	Nama TPA	Jenis TPA	Luas TPA (Ha)	Kapasitas (m^3/hari)	Volume Eksisting (m^3)
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)			
1	Kota Cimahi	Desa Sarimukti Kabupaten Bandung Barat	TPPAS Regional Sarimukti	Open Dumping	25,5	6.135,91	36.684.093

Keterangan : -
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-47. Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah Per Hari
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kecamatan	Lokasi	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m^3/hari)	Status Pengelolaan Sampah		
					Open Dumping	Sanitary Landfill	Controlled Landfill
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Cimahi Utara		170.977	425,73			
2	Cimahi Tengah		164.179	408,81			
3	Cimahi Selatan		240.363	598,50			

Keterangan : -
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-48. Jumlah Bank Sampah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cimahi	2023	Bank Sampah Induk Kota Cimahi		303826.26		Kota Cimahi	10 orang	
2	Cimahi	2023	BSU Apotek Madaira Cimahi		1178.9				
3	Cimahi	2023	BSU Apotek Nico Farma		323.5				
4	Cimahi	2023	BSU Apotek Serumpun Bambu		278.2				
5	Cimahi	2023	BSU Apotek Shafira Medika		14.1				
6	Cimahi	2023	BSU Apotek Wulan Kasih		85.8				
7	Cimahi	2023	BSU Asisten Pemerintahan		24.4				
8	Cimahi	2023	BSU Asoka 18 melong		2460				
9	Cimahi	2023	BSU Aster		1347.05				
10	Cimahi	2023	BSU Aster rt 05 rw 10 Cipageran		941.72				
11	Cimahi	2023	BSU Bagian Hukum PEMKOT Cimahi		56.3				
12	Cimahi	2023	BSU Bagian Organisasi Pemkot Cimahi		94.4				
13	Cimahi	2023	BSU Bagian Pemerintahan Pemkot Cimahi		425.4				
14	Cimahi	2023	BSU Anggrek		234.6				

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
15	Cimahi	2023	BSU Puspa		1533.9				
16	Cimahi	2023	BSU Bappelitbangda		26.8				
17	Cimahi	2023	BSU Belah Doeren		1240.2				
18	Cimahi	2023	BSU BEM IKIP SILIWANGI		14.7				
19	Cimahi	2023	BSU Berkah Bersama Rw.15		2134				
20	Cimahi	2023	BSU Berkah Mandiri 07		40872.5				
21	Cimahi	2023	BSU Bidang PSLB3PK DLH		85.8				
22	Cimahi	2023	BSU Bougenville 21		3576.2				
23	Cimahi	2023	BSU Bsbabe		235.5				
24	Cimahi	2023	BSU Damlan		744.7				
25	Cimahi	2023	BSU Formula RW10 Setiamanah		1632.9				
26	Cimahi	2023	BSU Harapan Kita		11.5				
27	Cimahi	2023	BSU Hepi RW24 Cibabat		5789.8				
28	Cimahi	2023	BSU Saradan		963.65				
29	Cimahi	2023	BSU Cetar		740.4				
30	Cimahi	2023	BSU Delima RW 13 Melong		1982				
31	Cimahi	2023	BSU Dinas Kesehatan Kota Cimahi		356.9				
32	Cimahi	2023	BSU Dinas PUPR		305.8				
33	Cimahi	2023	BSU Dinas Sosial		125.9				
34	Cimahi	2023	BSU Diskominfoarpus		113.9				
35	Cimahi	2023	BSU Disnaker Kota Cimahi		377				
36	Cimahi	2023	BSU DPRD KOTA CIMAHI		796.5				

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
37	Cimahi	2023	BSU Eropa RT 04 RW 10 Cipageran		1415.7				
38	Cimahi	2023	BSU Flamboyan 22		353				
39	Cimahi	2023	BSU foto copy salip		458.5				
40	Cimahi	2023	BSU Hujung Kidul RW 07 Utama		664.1				
41	Cimahi	2023	BSU Inaka Coffee		545				
42	Cimahi	2023	BSU Kampung Tangguh		654.9				
43	Cimahi	2023	BSU Kampus STIA Cimahi		26.5				
44	Cimahi	2023	BSU Kantor DPRD		103.5				
45	Cimahi	2023	BSU Kantor Kelurahan Cibeber		27.5				
46	Cimahi	2023	BSU Kantor Kelurahan Pasirkaliki		86.5				
47	Cimahi	2023	BSU Kebon Jeruk RT 04 RW 22		470.33				
48	Cimahi	2023	BSU Kecamatan cimahi tengah		502.4				
49	Cimahi	2023	BSU Kel Cimahi (tuti)		56.1				
50	Cimahi	2023	BSU Kel. Karang Mekar		1000.1				
51	Cimahi	2023	BSU Kenanga Rw 17 Buciper		2021.8				
52	Cimahi	2023	BSU Kesbang Pemkot Cimahi		72.3				
53	Cimahi	2023	BSU Kesra Pemkot Cimahi		63.1				
54	Cimahi	2023	BSU khanita olshop		90				
55	Cimahi	2023	BSU klinas bintang 9		3993.8				

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
56	Cimahi	2023	BSU Klinik Denanti		38.8				
57	Cimahi	2023	BSU Klinik Harapan Sehat		140				
58	Cimahi	2023	BSU Klinik Pratama Amanah		305.2				
59	Cimahi	2023	BSU Klinik Pratama Polres Cimahi		27.6				
60	Cimahi	2023	BSU Klinik Siliwangi		285.1				
61	Cimahi	2023	BSU Klinik Utama Amanah 2		65.1				
62	Cimahi	2023	BSU Klinik Waluyajati		91.1				
63	Cimahi	2023	BSU Koperasi Wangun Raharja		519.9				
64	Cimahi	2023	BSU Koperasi Pt Trisula		5566.2				
65	Cimahi	2023	BSU Kuttab Cimahi		23.5				
66	Cimahi	2023	BSU Kwt Dahlia		42.5				
67	Cimahi	2023	BSU laboratarium lingkungan		216.7				
68	Cimahi	2023	BSU Lembah Hanjuang		272.1				
69	Cimahi	2023	BSU Mawar RW 14 Melong		199.1				
70	Cimahi	2023	BSU Mekar Mandiri		600.7				
71	Cimahi	2023	BSU Oki (RT 07 RW 06 Cipageran)		289.4				
72	Cimahi	2023	BSU Osis SMKN 1 Cimahi		30.5				
73	Cimahi	2023	BSU PAUD Melati 17		41.8				
74	Cimahi	2023	BSU PAUD NUSAINDAH 07		189.8				
75	Cimahi	2023	BSU Permata 2		630.6				
76	Cimahi	2023	BSU PKK RW 1 Cihanjuang		125.6				
77	Cimahi	2023	BSU PLN		598.1				

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
78	Cimahi	2023	BSU Pondok Dominikus		78.4				
79	Cimahi	2023	BSU Pondok Mutiara 03		386.2				
80	Cimahi	2023	BSU Pondok Pesantren Al Maqom		213.8				
81	Cimahi	2023	BSU Pondok Pesantren Baitul Izza		780.9				
82	Cimahi	2023	BSU Ponpes Nur Al-Rahman		22				
83	Cimahi	2023	BSU Pos Paud Mawar Putih 13		130				
84	Cimahi	2023	BSU Pt Ayoe Indotama Textile		3808.9				
85	Cimahi	2023	BSU PT Beton Elemen Persada		192.5				
86	Cimahi	2023	BSU Pt Lutan Lepas		1820.6				
87	Cimahi	2023	BSU PT Mega Alpenindo		160.2				
88	Cimahi	2023	BSU PT Trisula		3209.1				
89	Cimahi	2023	BSU Pusdaloptin		10.5				
90	Cimahi	2023	BSU puskemas cimahi utara		197.1				
91	Cimahi	2023	BSU Puskesmas Cibeber		546.2				
92	Cimahi	2023	BSU Puskesmas Cibeureum		45.5				
93	Cimahi	2023	BSU puskesmas cimahi selatan		157.2				
94	Cimahi	2023	BSU Puskesmas Cimahi Tengah		41.5				
95	Cimahi	2023	BSU Puskesmas Citeureup		500.5				

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
96	Cimahi	2023	BSU Puskesmas Leuwigajah		429.5				
97	Cimahi	2023	BSU Puskesmas Melong Asih		323				
98	Cimahi	2023	BSU Puskesmas Melong Tengah		444.1				
99	Cimahi	2023	BSU Puskesmas Padasuka		16.3				
100	Cimahi	2023	BSU Puskesmas PasirKaliki		180.1				
101	Cimahi	2023	BSU RA Miftahus shiddiq		812.81				
102	Cimahi	2023	BSU Rahayu RW 11 Pasirkaliki		5307.55				
103	Cimahi	2023	BSU Resto Hangry		827.8				
104	Cimahi	2023	BSU RKM Cibabat		1730.2				
105	Cimahi	2023	BSU Roboti Komuniti		57				
106	Cimahi	2023	BSU Rs Cibabat		20207.75				
107	Cimahi	2023	BSU Rs Kasih Bunda		2135.1				
108	Cimahi	2023	BSU RS. Avisena		1015.9				
109	Cimahi	2023	BSU RS. Mitra Kasih		381.8				
110	Cimahi	2023	BSU RT 01 RW 18 BAROS		255.2				
111	Cimahi	2023	BSU RT 04 RW18 BAROS		587.2				
112	Cimahi	2023	BSU RT 05 RW 18 BAROS		633.5				
113	Cimahi	2023	BSU Rt 2 Rw 18 Padasuka		11.6				
114	Cimahi	2023	BSU RT 3 RW 18 Baros		151.5				
115	Cimahi	2023	BSU RT 7 RW 18 Baros		0.5				
116	Cimahi	2023	BSU Rt 7 Rw 9 Cibeber		1744.6				
117	Cimahi	2023	BSU RT2 RW18 Baros		446.9				

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
118	Cimahi	2023	BSU RT2 RW4 Cibeber		101.3				
119	Cimahi	2023	BSU rt8/rw9 purifajar		314.6				
120	Cimahi	2023	BSU Rumah Sampah Gemi 0418		1442.89				
121	Cimahi	2023	BSU Rusunawa Leuwigajah Gedung C		379.2				
122	Cimahi	2023	BSU Rw 08 Cibereum		5299				
123	Cimahi	2023	BSU Rw 13 Karang Mekar		779.3				
124	Cimahi	2023	BSU Rw 17 Buciper		161.6				
125	Cimahi	2023	BSU Rw 17 Padasuka		2085.1				
126	Cimahi	2023	BSU RW 21 Puri Cipageran		84.1				
127	Cimahi	2023	BSU RW 27 Cibeureum		427.7				
128	Cimahi	2023	BSU Rw 28 Cipageran		2417.15				
129	Cimahi	2023	BSU RW 08 Cibeureum		473.5				
130	Cimahi	2023	BSU Rw 08 Citeureup		604.1				
131	Cimahi	2023	BSU Rw13 Karangmekar		206.1				
132	Cimahi	2023	BSU RW17 Pusenarhanud		100.5				
133	Cimahi	2023	BSU RW26 Cipageran		1407.1				
134	Cimahi	2023	BSU Safa Marwah		1205				
135	Cimahi	2023	BSU Saodah (TK Al Istiqomah)		20.8				
136	Cimahi	2023	BSU Sd Baros Mandiri 4		2.2				
137	Cimahi	2023	BSU Sd Bina Harapan		132.2				
138	Cimahi	2023	BSU sd budi luhur		31.5				
139	Cimahi	2023	BSU Sd Cibabat Mandiri 2		23.3				

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
140	Cimahi	2023	BSU SD Cibeureum 5		227.6				
141	Cimahi	2023	BSU SD Cibeureum Mandiri 1		457.6				
142	Cimahi	2023	BSU Sd Cimindi 2		29				
143	Cimahi	2023	BSU Sd Cimindi 4		58.55				
144	Cimahi	2023	BSU Sd Cimindi 5		38				
145	Cimahi	2023	BSU SD Hikmah Teladan		3661.5				
146	Cimahi	2023	BSU Sd Kartika 5		127.3				
147	Cimahi	2023	BSU Sd Melong Mandiri 6		70.1				
148	Cimahi	2023	BSU SD N Sukanampa		102.1				
149	Cimahi	2023	BSU SD Negeri Linggabudi		31.5				
150	Cimahi	2023	BSU SD Negeri Sukamaju 1		122.9				
151	Cimahi	2023	BSU Sd Nurul Aulia		1120.5				
152	Cimahi	2023	BSU SD Padasuka Madiri 2		17.5				
153	Cimahi	2023	BSU SD Santa Maria		429.7				
154	Cimahi	2023	BSU Sd Santo Yusup		237.4				
155	Cimahi	2023	BSU SDN Baros Mandiri 3		166.1				
156	Cimahi	2023	BSU SDN Baros Mandiri 7		115.4				
157	Cimahi	2023	BSU Sdn Cibabat Mandiri		93.4				
158	Cimahi	2023	BSU SDN Cibeber 1		16.5				
159	Cimahi	2023	BSU SDN Cibeber 2		53.7				
160	Cimahi	2023	BSU SDN Cibeber 3		123.8				
161	Cimahi	2023	BSU Sdn Cibeber 4		22.1				
162	Cimahi	2023	BSU Sdn Cibeber Mandiri 1		8.7				
163	Cimahi	2023	BSU SDN Cibeber Mandiri 2		115.5				

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
164	Cimahi	2023	BSU SDN Cibodas 3		18.6				
165	Cimahi	2023	BSU Sdn Karang Mekar Mandiri 2		22.8				
166	Cimahi	2023	BSU SDN Karangmekar Mandiri 1 Cimahi		121.8				
167	Cimahi	2023	BSU Sdn Kihapit		23.4				
168	Cimahi	2023	BSU Sdn Leuwigajah 1		55.5				
169	Cimahi	2023	BSU sdn leuwigajah 3		59.6				
170	Cimahi	2023	BSU sdn leuwigajah 5		192.4				
171	Cimahi	2023	BSU Sdn Leuwigajah 6		138.3				
172	Cimahi	2023	BSU SDN PADASUKA MANDIRI 3		142.7				
173	Cimahi	2023	BSU Setra Asih		2126.9				
174	Cimahi	2023	BSU SIMPATI RW 30 Melong		4889.6				
175	Cimahi	2023	BSU SMA Budi Luhur		135.15				
176	Cimahi	2023	BSU SMA Negeri 5 Cimahi		46.5				
177	Cimahi	2023	BSU SMK Kes Bhakti Kencana Cimahi		218.4				
178	Cimahi	2023	BSU SMP Islam Sabiilul Wafa		124.3				
179	Cimahi	2023	BSU SMP IT Baitul Anshor		332.4				
180	Cimahi	2023	BSU SMP Negeri 1 Cimahi		51.8				
181	Cimahi	2023	BSU smp negeri 3 cimahi		1170.8				
182	Cimahi	2023	BSU SMP Negeri 8 Cimahi		1603.5				
183	Cimahi	2023	BSU SMP Santo Mikael		642				
184	Cimahi	2023	BSU SMPIT Budi Luhur		33.4				

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
185	Cimahi	2023	BSU SMPK BPK Penabur Cimahi		79				
186	Cimahi	2023	BSU SMPN 2 Cimahi		221.7				
187	Cimahi	2023	BSU SMPN 9 Cimahi		49.5				
188	Cimahi	2023	BSU SPBU Sangkuriang		880.5				
189	Cimahi	2023	BSU Tabuci Rt 7 Rw 17 Leuwigajah		478.4				
190	Cimahi	2023	BSU Tabuci RT.01 RW.17 Leuwigajah		191.7				
191	Cimahi	2023	BSU Tatarias dinsos jabar		67.2				
192	Cimahi	2023	BSU Taufik Cell		20.6				
193	Cimahi	2023	BSU Teratai Rw 14 Pasirkaliki		955.6				
194	Cimahi	2023	BSU TK Al-Istiqoomah		55.8				
195	Cimahi	2023	BSU Tk Aulia		365.9				
196	Cimahi	2023	BSU Tk Dahlia 4 / Kober Zahria		26.4				
197	Cimahi	2023	BSU Tk Kartini		380.5				
198	Cimahi	2023	BSU Tk Kasih Ibu		158.8				
199	Cimahi	2023	BSU TK Plus tunas bakti pertiwi		242				
200	Cimahi	2023	BSU Toko Aga		117.8				
201	Cimahi	2023	BSU Toko Antz		6.2				
202	Cimahi	2023	BSU Toko Atis		430.9				
203	Cimahi	2023	BSU Toko Deon		146.8				

No.	Lokasi	Tahun	Nama Bank Sampah	SK	Jumlah Sampah	Status	Wilayah Pelayanan	Jumlah Karyawan	Omset (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
204	Cimahi	2023	BSU Toko Hendra		326.7				
205	Cimahi	2023	BSU Toko Jayanti		142.4				
206	Cimahi	2023	BSU Toko Keli		62.4				
207	Cimahi	2023	BSU Toko Lestari		82.3				
208	Cimahi	2023	BSU Toko Rido Kolmas		2525.35				
209	Cimahi	2023	BSU Toko Src Tri		284				
210	Cimahi	2023	BSU Toko Warjo		186.4				
211	Cimahi	2023	BSU Tps Cibeber		20				
212	Cimahi	2023	BSU TPS Interceng		108.1				
213	Cimahi	2023	BSU Unit Cetar		653.42				
214	Cimahi	2023	BSU Delima rw 13 melong		225.15				
215	Cimahi	2023	BSU Upside Down Studio Cimahi		118.7				
216	Cimahi	2023	BSU Uptd Dinsos PPSGHD		154.3				
217	Cimahi	2023	BSU Venus		569.4				
218	Cimahi	2023	BSU W.N Ampera Cibabat		965.5				
219	Cimahi	2023	BSU Yogya Plaza Cimahi		3779.3				

Keterangan:

1. Tanda (-) menunjukkan tidak dilakukan pendataan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-49. Kegiatan Fisik Lainnya oleh Instansi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan/Keterangan	Pelaksana Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Paket Rehabilitasi Saluran Sungai Cibeureum	RT 04 RW 26 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan	CV. PUALAM CIPTA SARANA
2	Rehabilitasi Saluran Irigasi se Kota Cimahi	RW 18 dan 19 Kelurahan Cibabat Kecamatan Cimahi Utara	CV. TRI TUNGGAL ABADI
3	Pembangunan Saluran Drainase Permukiman Long Storage Air Hujan/GWTSAHABAT GAGAH di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan	RW 30 Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan	PT. HEMBI GEMILANG
4	Peningkatan Kapasitas Saluran Drainase Permukiman di Lokasi kumuh	RW 06 Kelurahan Cipageran Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara	CV. ABDI JAYA

Keterangan: -

Sumber: DPKP Kota Cimahi, 2023

Tabel-50. Status Pengaduan Masyarakat
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ryan Ristalana (Supervisor) Jl. Industri II No.8 Cibaligo, Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi	**Sumber pencemar :** Diduga dari pembakaran batubara cerobong boiler dari PT Rajawali Hyoto sejak bulan Juni 2022 (selama 6 bulan) **Pokok Aduan :** 1. Adanya pencemaran udara berupa flyash batubara diduga dari aktivitas boiler batubara 2. terdapat butiran flyash batubara di ruang kemasan plastik cat dan ruang solvent base	2022	Selesai
2	Media Cimahi.Media3.ID https://cimahikota.go.id	**Sumber pencemar :** Diduga dari saluran pembuangan air limbah CV Suritex ke sungai Cibodas P**okok Aduan :** Adanya dugaan pencemaran air akibat pembuangan air limbah kotor dan berbusa	2023	Selesai

No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dengan pH air yang tidak memenuhi baku mutu sesuai peraturan yang mengalir deras		
3	Media Cimahi, Matainvestigasi.com	**Sumber pencemar:** diduga dari saluran pembuangan air limbah PT. Aswindo **Pokok Aduan:** 1. Adanya dugaan pencemaran air akibat pembuangan air limbah/limbah cair yang mengandung lumpur dan busa 2. Pembuangan air limbah yang berwarna kuning dengan busa tebal dan mengandung lumpur ke sungai Cibaligo	2023	Selesai
4	Media Cimahi, Matainvestigasi.com	**Sumber pencemar:** diduga dari saluran pembuangan air limbah PT Dewasutratex **Pokok Aduan:** Adanya dugaan pencemaran air akibat pembuangan air limbah/limbah cair yang berwarna cokelat keruh ke sungai Cibaligo	2023	Selesai
5	Media Sinarsuryanews.com dilakukan Verlap bulan April	**Sumber pencemar :** Diduga dari saluran pembuangan air limbah CV Tanjung Harapan Jaya **Pokok Aduan :** Adanya dugaan pencemaran air akibat	2023	Selesai

No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pembuangan air limbah kotor dan berbusa ke sungai Cibodas		
6	Media Cimahi, Matainvestigasi.com	**Sumber pencemar** : Diduga dari saluran pembuangan air limbah PT Dwimulya Tatatunggal **Pokok Aduan:** Adanya dugaan pencemaran air sungai akibat pencemaran air limbah berwarna kuning dan pH 5 ke badan air dari PT Dwimulya Tatatunggal	2023	Selesai
7	Anggota Dewan Cimahi	**Sumber Pencemar :** Diduga dari saluran pembuangan air limbah CV Tanjung Harapan Jaya lokasi Kel. Utama, Kec. Cimahi Selatan **Pokok Aduan :** Adanya dugaan pencemaran air akibat pembuangan air akibat pembuangan air limbah kotor dan berbusa ke sungai	2023	Selesai
8	Perwakilan Warga RT 3 dan RT 4 Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi	**Sumber Pencemar :** Diduga dari PT Sansan Saudaratex Jaya 1 Jl. Cibaligo No. 33 Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi **Pokok Aduan :** Terjadi tumpahan air limbah dari bak aerasi	2023	Selesai

No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ke tanah warga RT 3 dan RT 4 RW 29 Kel. Cibeureum yang berlangsung 30 menit yang diduga dari instalasi pipa udara antara diffuser yang pecah atau lepas		
9	Identitas pengadu : Dasep Darisman Alamat : Jl. Pahlawan Desa Kp. Cibodas RT 01/RW 15 Kel. Utama (kontrak di Komplek Cibogo Kel. Leuwigajah)	**Sumber pencemar :** diduga dari pembakaran sampah **Pokok Aduan :** diduga terdapat pembakaran sampah di area padat penduduk sehingga menyebabkan asapnya membuat sesak nafas khususnya pada anak-anak	2023	Selesai
10	Media Online buser.id dan youtube (jubirnews_omdwichannelofficial)	**Sumber pencemar** : diduga dari PT Sinar Continental , Jl. Industri II No. 20 Kel. Utama Kec. Cimahi selatan **Pokok Aduan** : Pengelolaan Limbah B3 dan limbah domestik tanpa penanganan yang tepat	2023	Selesai
11	Identitas Pengadu : P. Sofyana Warga RT 4 RW 14 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi	**Sumber pencemar:** diduga adanya limbah darah, kotoran ayam dan bulu bulu ayam dari pemotongan ayam yang menyebabkan bau dan pencemaran air **Pokok aduan :** diduga terdapat RPU/kegiatan pemotongan	2023	Selesai

No.	Pihak yang mengadukan	Masalah yang diadukan	Tahun	Progres Pengaduan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		ayam tanpa ada penanganan pengelolaan limbah dari kegiatan tersebut.		
12	Perwakilan Warga RW 09 dan RW 14 Kelurahan Utama	**Pengaduan dari Warga RW 14** **Sumber pencemar :** diduga dari PT Leuwijaya Utama tekstil jl. Cibaligo km. 1,75 kel. Utama Kec Cimahi Selatan Kota Cimahi **Pokok aduan :** diduga adanya rembesan di area pemakaman warga dari bak instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang mengakibatkan warga merasa terganggu saat mengguburkan jenazah **Pengaduan dari Warga RW 09** **Pokok Aduan:** diduga adanya debu batubara dari tempat penyimpanan batu bara yang berdekatan dengan pemukiman sehingga berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan suara bising dan getar dari boiler yang menganggu	2023	Selesai

Keterangan : -

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-51. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan Hidup
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Nama LSM	Lokasi	Akta Pendirian	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JARAMBAH	Kel. Cipageran Cimahi Utara	AHU-00195333.AH.01.04	Kel. Cipageran Cimahi Utara
2	PAKU SUNDA	jl. Central Kel. Cibabat Cimahi Utara	AHU-0008997.AH.01.05	jl. Central Kel. Cibabat Cimahi Utara
3	Badan Advokasi Lingkungan Cimahi	Kp. Leuweung Gede RT.01 RW.11	Skt. 220.1/16/Kesbang	Kp. Leuweung Gede RT.01 RW.11
4	Soroti Lingkungan Hidup dan Korupsi (SOLUSI)	Jl. Sangkuriang No.31 RT.04 RW.20	AHU-0064111.AH.07. Tahun 2016	Jl. Sangkuriang No.31 RT.04 RW.20
5	Yayasan Peduli Lingkungan Cimahi (YPLC)	Jl. Kihapit Barat No. 34 RT.04 RW.09	AHU-0011340.AH.01.04. Tahun 2016 Tanggal 31 Mei 2022	Jl. Kihapit Barat No. 34 RT.04 RW.09
6	Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan (GMP Ling)	Jl. Pojok Selatan No.1 RT.02 RW.07	AHU-0001149.AH.01.07 Tahun 2019 12 Februari 2019	Jl. Pojok Selatan No.1 RT.02 RW.07
7	Pecinta Alam Jaya Lestari Kota Cimahi	Komplek KCVRI Blok A No. 13-14	SKt. 00.32.77/73/X/2013	Komplek KCVRI Blok A No. 13-14

Keterangan : -
Sumber : Kesatuan Pembangunan Kota Cimahi, 2023

Tabel-52. Jumlah Personil Lembaga Pengelola Lingkungan Hidup menurut Tingkat Pendidikan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Tingkat Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Maister (S2)	9	6	15
2	Sarjana (S1)	14	14	28
3	Diploma (D IV)	3	2	5
4	Diploma (D III)	1	6	7
5	SMA	25	-	25
6	SMP	7	1	8
7	SD	11	-	11

Keterangan :
Sumber : Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-53. Jumlah Staf Fungsional Bidang Lingkungan dan Staf yang Telah Mengikuti Diklat
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Nama Instansi	Staf Fungsional			Staf yang sudah diklat	
		Jabatan Fungsional	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Dinas Lingkungan Hidup	PPLH	0	0	3	2
2.	Dinas Lingkungan Hidup	PPNS LH	0	0	2	0
3.	Dinas Lingkungan Hidup	PPNS	0	0	0	0
4.	Dinas Lingkungan Hidup	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama	1	2	0	0
5	Dinas Lingkungan Hidup	Pranata Laboratorium Lingkungan	0	0	1	3

Keterangan:
1. Angka (0) menunjukkan tidak terdapat staf yang dimaksud

Sumber: Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-54. Penerima Penghargaan Lingkungan Hidup
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PT. AJUTEX	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
2	PT. DIAMOND COLD STORAGE	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
3	PT. SAMA INDAH	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
4	PT. INDAH JAYA GEMILANG	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
5	PT. ANUGERAH SINAR ABADI TEXTILE	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
6	PT. KAMARGA KURNIA TEXTILE INDUSTRY	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
7	PT. HEKSATEX INDAH	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
8	PT. HETZER MEDICAL INDONESIA	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
9	PT. OPELON GARMENT INDONESIA	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
10	CV. SURITEX	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
11	PT. TEODORE PAN GARMINDO	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
12	PT. ELIZABETH HANJAYA	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023

No.	Nama Orang/Kelompok/Organisasi	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	PT. GRAHA SERIBU SATU JAYA	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
14	PT. MEWAH NIAGA JAYA	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
15	PT. NAM NAM FASHION INDUSTRIES	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
16	RS. BAROS	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
17	PT. CIBALIGO INDAH TEXTILE MILLS	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
18	PT. SANLIT INTI PLASTIK	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
19	PT. KAWI MEKAR	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
20	PT. ADONAI ALFA OMEGA	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
21	PT. BERDIKARI METAL ENGINEERING	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
22	PT. BINA NUSANTARA PRIMA	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
23	PT. MARGAJAYA	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
24	RS. MITRA KASIH	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
25	PT. LAJU MAKMUR SENTOSA	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023
26	PT. SANITYA UTAMA	MONEV (PROPER)	DLH CIMAHI	2023

Keterangan: -
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-55. Kegiatan/Program yang Diinisiasi Masyarakat
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (Bulan/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan Kampung Hortikultura	Dinas Pangan dan Pertanian	Kelompok Wanita Tani	Tahun 2022-2023
2	Rencana Penanaman Pohon (Penghijauan RTH)	Dinas Lingkungan Hidup	Rw 13 Kel. Leuwi Gajah	Agustus 2023
3	Penanaman Pohon	Dinas Lingkungan Hidup	Kel. Cibeber	Nopember 2023
4	Karya Bakti dan Gerakan Pungutr Sampah (Pembersihan Saluran Air)	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	RW 03 Kel, Padasuka	Oktober 2023
5	Penanganan Longsor yang berlokasi di RW.26 Sungai Cibeureum Kelurahan Melong	DPKP	Masyarakat	Maret 2023
6	Pengerukan Saluran Irigasi Leuwilayung	DPKP	Masyarakat	Juli 2023
7	Pengerukan/Pembersihan Saluran Permukiman dan Saluran Sungai di RW.02 Kelurahan Melong	DPKP	Masyarakat	September 2023
8	Launching Inovasi mesin Pengelola Sampah Kodam III Siliwangi	Kodim Cimahi		Januari 2023
9	Pelatihan CPS untuk DWP DLH Kota Cimahi	DWP DLH Kota Cimahi		Januari 2023
10	Kunjungan Pengelolan Sampah Organik dan Budidaya Maggot	DWP DLH Kota Cimahi		Januari 2023

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (Bulan/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Sosialisasi Pilah Sampah	SDN Utama Mandiri 1		Februari 2023
12	Sosialisasi Pengelolaan Sampah	BEM IKIP Siliwangi		Februari 2023
13	Kunjungan Bank Sampah Induk	SD Hikmah Teladan		Februari 2023
14	Peringatan HPSN Kota Cimahi	Kampung Adat Cireundeu		Februari 2023
15	Kunjungan Bank Sampah Induk	SMPN 14 Cimahi		Februari 2023
16	Pelatihan Pengolahan Sampah Organik dengan Maggot	Asobsi Kota Cimahi		Februari 2023
17	Audiensi Food Waste Management	Forum Bank Sampah Jawa Barat		April 2023
18	Launching We Fight Climate Change	GEMI 0418		April 2023
19	Pertemuan rutin Kader Grak Ompimpah	Kelurahan Cipageran		Juni 2023
20	Sosialisasi Pengelolaan Sampah	SMA Santa Maria 3		Juli 2023
21	Sosialisasi Grak Ompimpah	RW 13 Pasirkaliki		Agustus 2023
22	Sosialisasi Penanganan Sampah	SMA Kartika XIX-4		Agustus 2023
23	Sosialisasi Pengelolaan Sampah	Kelurahan Setiamanah		Agustus 2023
24	Sosialisasai Pemilahan dan Pengelolaan Sampah Terperinci	SDN Baros Mandiri 4		Agustus 2023
25	Sosialisasi Pilah Sampah	Kelurahan Cimahi		Agustus 2023
26	Pembahasan Pengelolaan Sampah	KKVI KAFAH		September 2023
27	Edukasi Pengelolaan Sampah	Komunitas BSU		Oktober 2023

No.	Nama Kegiatan	Instansi Penyelenggara	Kelompok Sasaran	Waktu Pelaksanaan (Bulan/Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	SMKN 2 Cimahi		Oktober 2023
29	Edukasi Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sekolah	SMA Baitul Ansor Berbudi Luhur		Oktober 2023
30	Sosialisasi Pemilahan Sampah	Hayu Maca Fondation		Oktober 2023
31	Diskusi Pengelolaan Sampah	FORSIP Kota Cimahi		Oktober 2023
32	Kunjungan ke Bank Sampah Induk	Jelajah Family Club		November 2023
33	Volunteer Day Sedunia	SMKN 1 Cimahi		November 2023

Keterangan : -
Sumber : Bakesbanpol Kota Cimahi, 2022 dan Dispangtan, 2023

Tabel-56. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya	Satu Tahun Sebelumnya
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERTANIAN	69,22	76,58
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3	Industri Pengolahan	17964,71	18525,85
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	147,03	157,59
5	Bangunan	4637,08	5206,48
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	6191,13	6885,36
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3776,77	4347,77
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1584,44	1741,9
9	Jasa-Jasa	3167,82	3557,88
PRODUK DOMESTIK BRUTO		37538,2	40499,41
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		37538,2	40499,41

Keterangan : -
Sumber : Kota Cimahi dalam Angka, 2023

Tabel-57. Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	URAIAN	Dua Tahun Sebelumnya (%)	Satu Tahun Sebelumnya (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PERTANIAN	34,1	34,63
	a. Pertanian Sempit		
	- Tanaman Bahan Makanan		
	- Tanaman Perkebunan		
	- Peternakan dan Hasil-hasilnya		
	b. Kehutanan		
	c. Perikanan		
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-
3	Industri Pengolahan	11340,69	11404,2
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	81,86	86,57
5	Bangunan	2954,76	3242,48
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	4054,19	4353,58
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3305,78	3684,76
8	Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1047,68	1115,56
9	Jasa-Jasa	1833,66	2010,2
PRODUK DOMESTIK BRUTO		24652,72	25931,98
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS		24652,72	25931,98

Keterangan: -
Sumber: Kota Cimahi dalam Angka, 2024

Tabel-58. Produk Hukum Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Jenis Produk Hukum Bidang LH	Jenis Produk Hukum Bidang Kehutanan	Nomor dan Tanggal	Tentang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan:
1. Tanda (N/A) menunjukkan tidak terdapat produk hukum yang dimaksud

Sumber: Bagian Hukum Setda Kota Cimahi, 2023

Tabel-59. Anggaran Pengelolaan Lingkungan Hidup
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan anggaran (kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DPUPR	Program Penyelenggaraan Penataan ruang	2.964.729.457	50.695.055.369
2	DISHUB	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	29.209.103.922	
3	DPKP	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.777.753.021	
4	DPKP	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	19.438.599.202	
5	DPKP	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	12.089.106.059	
6	DPKP	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	5.803.512.728	
7	DPKP	Program Pengembangan Perumahan	3.900.253.550	
8	DPKP	Program Kawasan Pemukiman	13.351.337.528	
9	DPKP	Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)	19.396.218.379	
10	DISBUDPAR	Program Pengembangan Kebudayaan	1.576.091.764	

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan anggaran (kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	DISBUDPAR	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	212.270.000	
12	DISBUDPAR	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Parawisata	2.061.929.300	
13	DISBUDPAR	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	400.702.428	
14	DLH	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan regional	300.000.000	
15	DLH	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	662.934.000	
16	DLH	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.002.136.904	
17	DLH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayato (KEHATI)	1.281.098.142	
18	DLH	Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbab B3)	86.555.000	
19	DLH	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	1.085.493.940	
20	DLH	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	145.476.390	
21	DLH	Program Pengelolaan Persampahan	33.985.409.867	

No.	Sumber Anggaran	Peruntukan anggaran (kegiatan)	Jumlah Anggaran Tahun Sebelumnya (Rp)	Jumlah Anggaran Tahun Berjalan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
22	DLH	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	20.058.295.489	
TOTAL			176.789.007.070	50.695.055.369

Keterangan:
Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Anggaran Daerah Kota Cimahi, 2023

Tabel-60. Pendapatan Asli Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Sumber	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pajak	210.047.163.097
2	Retribusi	
3	Laba BUMD	11.627.628.409
4	Pendapatan lainnya yang Sah	13.941.963.607

Keterangan: -
Sumber: Bappenda Kota Cimahi, 2023

Tabel-61. Inovasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Cimahi	APaH SICh	Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, Pasal 48 disebutkan bahwa Perlindungan Pertanian dilaksanakan dengan sistem Pengelolaan Hama Terpadu "Sistem PHT" serta penanganan dampak perubahan iklim. Pengertian dari PHT adalah Perpaduan berbagai teknik pengendalian untuk mencegah dan mengurangi timbulnya kerugian secara ekonomi dan kerusakan lingkungan hidup. Dengan demikian untuk menghadapi permasalahan petani dalam pengendalian OPT/ hama penyakit tanaman supaya tidak menggunakan pestisida kimiawi secara berlebihan dan petani bisa melaksanakan Pengelolaan hama terpadu, harus ada alternatif pengendalian secara ramah lingkungan, yaitu INOVASI yang diterapkan untuk Petani adalah penggunaan/Pemanfaatan Agens Pengendali hayati/ Microorganisme yang digunakan untuk mengendalikan OPT. INOVASI "APaH SICh" atau yang disebut AGEN PENGENDALI HAYATI SAHABAT PETANI CIMAHI merupakan salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh petani dalam upaya pengendalian hama dan peyakit tanaman secara berkelanjutan. Upaya perubahan pola pikir, pengetahuan, sikap dan keterampilan petani untuk mulai terbiasa melaksanakan Pengelolaan Hama Terpadu (PHT) salah satunya dengan menggunakan Agen Pengendali Hayati dalam pengendalian hama dan peyakit tanaman diharapkan bisa terwujud dengan adanya INOVASI "APaH SICh" atau yang disebut AGEN PENGENDALI HAYATI SAHABAT PETANI CIMAHI ini	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	Kota Cimahi	Data Ngahiji	Sebagai solusi integrasi data pemerintahan, Data Ngahiji hadir sebagai platform terpusat untuk penyimpanan dan akses data spasial, mendukung visi integrasi data dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cimahi. Data Ngahiji berupa aplikasi berbasis WEB opensource menggunakan CMDBuild versi 3.4	
3	Kota Cimahi	DILANDA CITA	DILANDACITA (Digitalisasi Layanan Dokumen Adminduk Cimahi Kota) dikembangkan seiring dengan diberlakukannya SIAK Terpusat di seluruh Kabupaten/ Kota se-Indonesia. Dengan diberlakukannya SIAK Terpusat, maka aplikasi pelayanan daring sebelumnya (Sipade dan Sibenar tahun 2021) yang sudah dipakai menjadi tidak bisa digunakan karena koneksi Data Base Kependudukan yang terputus. Di awal pelaksanaan SIAK Terpusat, google Form digunakan sebagai media pelayanan daring sementara. Namun media google Form memiliki keterbatasan seperti tidak adanya validasi pemohon, konfirmasi status pengajuan, dan komunikasi antara pemohon dengan petugas. Maka dikembangkan kembali aplikasi pelayanan daring yang diberi nama DILANDACITA yang merupakan Transformasi layanan digital AdmindukPerwujudan Satu Data Satu Peta menjadi hal yang penting dalam setiap pengambilan kebijakan dari tataran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk semua kepentingan, sehingga keberadaan Data Ngahiji sebagai wadah atau alat dalam penyelenggaraan pembangunan informasi geospasial di Kota Cimahi yang dapat mengumpulkan semua data spasial, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh semua perangkat daerah dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi dapat melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran, karena dengan satu data satu peta ini dapat terwujud anggaran yang tepat sasaran dan tepat kebijakan. Dengan terwujudnya satu data satu peta ini pula dapat dengan mudah menilai tingkat perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dalam kurun waktu tertentu, informasi terkait pengembangan investasi di Kota Cimahi pun dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Kualitas dokumen Rencana Tata Ruang dan upaya pengendaliannya akan juga akan mudah dan akurat	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Kota Cimahi	GEMA BUGAR UNTUK KONSER (Gerakan Makan Buah Segar untuk Meningkatkan Luasan Konservasi)		

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Kota Cimahi	GERTAM PARTI (Gerakan Tanam Pangan Cepat PAnen Hortikultura)	A. Dasar Hukum dan Ide Inovatif Rancang bangun inovasi GERTAM PARTI berawal dari kondisi meningkatnya komoditas tanaman hortikultura seperti cabai merah, bawang merah dan bawah putih. Secara ekonomi cabai merupakan komoditas yang memainkan peranan penting dalam struktur perekonomian. Fluktuasi harga cabai berkontribusi terhadap terjadinya inflasi bahan makanan di Indonesia. Harga cabai yang tiba-tiba melonjak tinggi melebihi harga normal dapat menurunkan daya beli masyarakat. Fluktuasi harga cabai berefek pada budget masyarakat. Sejatinya masyarakat dapat membeli kebutuhan lain, namun terjadi disparitas harga yang menganggu secara structural pada pemenuhan kebutuhan. Untuk mengendalikan inflasi di Kota Cimahi dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional, maka ditetapkan Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 500/Kep.3223-Ekosda/2023 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cimahi. Tugas pokok dan fungsi dari Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Cimahi diantaranya mengendalikan harga komoditas pemicu terjadinya inflasi. Cabai merupakan salah satu komoditas tanaman hortikultura yang sering memicu terjadinya inflasi. Untuk mengendalikan fluktuasi harga cabai di Kota Cimahi diperlukan satu Inovasi yaitu Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen Hortikultura (GERTAM PARTI) yang melibatkan berbagai stakeholder seperti kelembagaan petani yaitu Kelompok Tani Hortikultura, Kelompok Wanita Tani dan Masyarakat Kota Cimahi, melalui optimalisasi lahan pertanian yang terbatas untuk budidaya tanaman cabai sehingga dapat meningkatkan produksi dan ketersediaan tanam cabai di Masyarakat. B. Kebaruan/Nilai Tambah GERTAM PARTI komoditas Cabai memiliki beberapa keunikan yang patut diperhatikan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait inovasi ini: 1. Penanaman bersama: Inovasi ini melibatkan penanaman cabai secara bersama dengan melibatkan Masyarakat Kota Cimahi, Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani. Penanaman dilakukan dengan memanfaatkan lahan pertanian maupun areal pekarangan di sekitar rumah masing-masing.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Stabilitas Harga Cabai: Inovasi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga cabai di Kota Cimahi. Cabai merupakan salah satu komoditas pangan yang sering mengalami fluktuasi harga dan menjadi pemicu kenaikan inflasi. Dengan penanaman serentak, diharapkan dapat membantu menjaga harga cabai agar tetap terjangkau bagi masyarakat. 3. Meningkatkan Produksi Cabai: Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan produksi cabai di Kota Cimahi. Dengan penanaman cabai secara masif, potensi hasil panen akan lebih besar dan dapat memenuhi kebutuhan minimal memenuhi kebutuhan keluarga. 4. Kolaborasi Inovasi ini melibatkan berbagai stakeholder selain Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, Bank Indonesia, Champion Cabai yang tergabung dalam Kelompok Cabai Tricipta, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani. Selain itu, juga ada kolaborasi dengan para penyuluh dalam sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan teknis budidaya untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan inovasi ini. 5. Solusi Gejolak Harga Cabai: Gerakan tanam cabai di pekarangan rumah juga merupakan solusi untuk mengatasi gejolak harga cabai di pasar. Dengan menekan permintaan cabai dari rumah tangga di pasar, harga cabai dapat lebih stabil. 6. Peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat. Keunggulan terbesar dari inovasi ini adalah penanggulangan inflasi yang dihitung berdasarkan substitusi biaya belanja yang dikeluarkan untuk membeli cabai dibandingkan dengan pemenuhan dari budidaya sendiri sebesar + 50 %. Inovasi GERTAM PARTI komoditas Cabai memiliki kebaruan/nilai tambah dan keunikan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait inovasi ini:Inovasi ini melibatkan penanaman cabai secara bersama dengan melibatkan Masyarakat Kota Cimahi, Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			1. Gerakan menanam cabai secara masif, memungkinkan potensi hasil panen akan lebih besar dan dapat meningkatkan ketersediaan cabai di Kota Cimahi, 2. Inovasi melibatkan berbagai stakeholder selain Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi, Bank Indonesia, Champion Cabai yang tergabung dalam Kelompok Cabai Tricipta, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani. 3. Dengan menekan permintaan cabai dari rumah tangga di pasar, harga cabai dapat lebih stabil. 4. Pengendalian inflasi di Kota Cimahi yang dihitung berdasarkan substitusi biaya belanja yang dikeluarkan untuk membeli cabai dibandingkan dengan pemenuhan dari budidaya sendiri. C. Adaptabilitas Inovasi GERTAM PPARTI sudah direplikasi yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Yaitu dari: – Surat Pernyataan replikasi dari Dinas Pertanian Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat. – Surat Pernyataan replikasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. – Surat Pernyataan replikasi dari Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi Jawa Barat. Potensi inovasi untuk direplikasi sangat mudah karena dapat dilakukan di lahan yang luas tapi bisa juga melalui pemanfaatan lahan yang ada disekitar rumah atau pekarangan dengan polybag atau memanfaatkan tempat bekas sebagai media tanam. Dengan konsep optimalisasi lahan sempit, budidaya tanaman cabai memiliki prospek yang cukup bagus terutama pada saat harga bahan pangan seperti cabai melonjak tajam yang menjadi pemicu terjadinya inflasi selain itu baik juga untuk ketahanan pangan keluarga maupun perekonomian keluarga, dengan hasil panen cabai masyarakat tidak lagi membeli bahan pangan sehingga pengeluaran untuk belanja dapat ditabung atau digunakan untuk keperluan	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			lain. Dari hasil panen tersebut untuk 1 pohon cabai, rata-rata menghasilkan 0,7 kg meskipun tidak besar, tapi cukup penting dan bermanfaat baik secara ekonomi maupun sosial. D. Strategi Keberlanjutan 1. Strategi Institutsional Surat Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 500/Kep.3223-Ekosda/2023 Tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Cimahi. 2. Strategi Sosial Strategi sosial dilakukan dengan adanya keterlibatan kelompok tani, kelompok Wanita tani dan masyarakat, dalam budidaya cabai, mengoptimalkan peran serta Kecamatan, Kelurahan, Rt dan Rw sebagai penggerak pelaksanaan inovasi ditingkat lapangan serta dengan melibatkan peran penyuluh pertanian dan POPT sebagai pendamping/penyuluh pelaksanaan budidaya cabai. 3. Strategi Manajerial Strategi Manajerial dilakukan dengan memastikan bahwa inovasi GERTAM PARTI dapat terlaksana dan berjalan secara maksimal. Sosialisasi Inovasi GERTAM PARTI dilakukan dalam ditingkat kelompok tani, kelompok Wanita tani dan Masyarakat kota cimahi. Untuk monitoring dan evaluasi keberhasilan inovasi GERTAM PARTI dilakukan pendampingan oleh penyuluh dan penyuluh Petugas Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) di 15 kelurahan.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Kota Cimahi	GPM Pangsi	Permasalahan gejolak harga pangan hingga saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah baik pusat maupun daerah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Harga pangan yang berfluktuasi akan mempengaruhi kesejahteraan petani selaku produsen pangan maupun masyarakat luas selaku konsumen akhir. Oleh karena itu, stabilisasi harga pangan menjadi salah satu tujuan prioritas dalam pembangunan nasional. Dalam menjaga ketahanan pangan, pemerintah berkewajiban menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis, baik di tingkat produsen maupun konsumen serta mewujudkan keterjangkauan pangan masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan. Stabilitas tersebut dimaksudkan untuk melindungi produsen baik petani/peternak, kelompok/gabungan kelompok, distributor atau pelaku usaha pangan lainnya yang memproduksi atau menyediakan komoditas pangan pokok, serta menjaga keterjangkauan konsumen terhadap pangan. Dalam rangka peningkatan aksesibilitas masyarakat guna memperoleh bahan pangan pokok strategis yang berkualitas dengan harga terjangkau dan dibawah pasar, diperlukan upaya pemerintah yang secara berkesinambungan dan sinergi guna memenuhi akan konsumsi masyarakat tgersebut. Salah satu program yang mendukung usaha itu salah satunya adalah dengan melaksanakan gerakan pangan murah dan fasilitasi distribusi pangan yang dilaksanakan di berbagai wilayah secara serentak, khususnya di beberapa daerah baik di Provinsi/Kabupaten/Kota yang terdampak inflasi ataupun wilayah dengan indek harga konsumen tinggi berdasarkan data BPS.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	Kota Cimahi	KWT Peduli	Kesejahteraan Masyarakat selama pandemi Covid-19 pada 2 (dua) tahun terakhir tidak hanya membuat perekonomian mengalami tekanan berat, melainkan juga membuat kesejahteraan masyarakat Indonesia melemah, termasuk Kota Cimahi. Kondisi pandemi memaksa seluruh masyarakat beradaptasi dengan tantangan yang ada, karena memberikan dampak sistemik terhadap kondisi ekonomi, kesehatan, dan sosial masyarakat. Namun demikian pemerintah berupaya dalam rangka penanganan pandemi dan perlindungan kesejahteraan masyarakat dengan dibantu kerja sama dan dukungan semua pihak, sehingga meskipun beberapa sektor mengalami pertumbuhan nilai negatif, namun diharapkan mampu melakukan recovery baik secara cepat atau bertahap di tahun- tahun mendatang. Kondisi pembangunan kesehatan di Kota Cimahi juga dapat dilihat dari perkembangan Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi yang merupakan perhitungan rasio jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH) dan rasio jumlah kematian bayi per 1000 KH berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Rasio Kematian Ibu di Kota Cimahi mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2017 berada pada angka 113,98 yang kemudian mengalami peningkatan secara fluktuatif hingga pada 2021 berada pada angka 195,35 Sementara untuk Rasio Kematian Bayi Kota Cimahi pada tahun 2017 berada pada angka 6,17 yang kemudian berfluktuatif pada tahun tahun berikutnya hingga naik kembali di tahun 2021 menjadi 7,03. Kondisi kesehatan masyarakat Kota Cimahi juga dapat dilihat dari kondisi prevalensi stunting pada balita. Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Sehingga, anak lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Diketahui bahwa Stunting di Kota Cimahi pada Tahun 2021 mencapai 10,18%. Adapun kecamatan yang paling rendah adalah Kecamatan Cimahi Utara yaitu sebesar 9,63%, dan Kecamatan yang paling banyak adalah Kecamatan Cimahi Tengah yaitu sebesar 11,25%. Selanjutnya untuk angka prevalensi kurang gizi (underweight) di Kota Cimahi pada Tahun 2017 sebesar 6,91% dan mengalami penurunan di Tahun 2018 menjadi 6,29%. Kemudian, pada Tahun 2019 mengalami penurunan kembali hingga menjadi 5,58%. Namun kondisi ini meningkat kembali di tahun 2020 menjadi 7,70% yang kemudian turun kembali di tahun 2021 menjadi 6,9%. Inovasi yang digagas diberi nama	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			"KELOMPOK WANITA TANI (KWT) PEDULI". Kota Cimahi sebagai daerah perkotaan memiliki keterbatasan lahan pertanian, oleh karena itu dikembangkan model pertanian perkotaan (Urban Farming). Jumlah penduduk yang cukup tinggi berkolerasi dengan tingkat kemiskinan dan angka prevalensi stunting menjadi tinggi di Kota Cimahi, maka kebutuhan terhadap akses ketersediaan pangan pun sangat tinggi. Inovasi ini merupakan strategi percepatan penurunan prevalensi stunting dengan melakukan kemitraan antara KWT dengan kelompok stunting yang dilaksanakan di 3 (tiga) KWT di Kota Cimahi. Proyek perubahan ini dimulai dengan melakukan sosialisasi terhadap KWT dilanjutkan dengan pelatihan budidaya pertanian dan pelatihan pengolahan pasca panen. Tanaman yang akan dibudidayakan adalah tanaman yang cepat panen sementara untuk pengolahan pasca penen menggunakan komoditas tanaman yang sudah ada di daerah Kota Cimahi. Selain dari komoditas pertanian dapat diintegrasikan juga dengan komoditas perikanan dan peternakan. Konsep yang digunakan dalam kemitraan adalah KWT yang telah ditetapkan diberikan bantuan berupa sarana dan prasarana pertanian, perikanan, peternakan seperti benih, bibit, kompos, obat-obatan, dll, kemudian KWT tersebut melaksanakan proses pertanian dan setelah KWT tersebut melakukan panen, maka 5% dari hasil panennya (sebagai value added) diserahkan kepada kelompok stunting sebagai upaya dalam rangka perbaikan dan ketersediaan pangan dan gizi untuk menurunkan prevalensi stunting di Kota Cimahi. Proyek perubahan ini tentunya harus mendapat dukungan dari berbagai stakeholder, antara lain Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Dispangtan, unsur OPD internal terkait (Bappelitbangda, Dinas Kesehatan, DP3AP2KB, Diskominfo, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, BPKAD, Bapenda, Bagian Hukum Setda, Kecamatan, Kelurahan), unsur OPD eksternal (BPS), unsur masyarakat (Kelompok Wanita Tani, dan PKK), Perguruan Tinggi, unsur media (media cetak, online dan elektronik).	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8	Kota Cimahi	LASKAR SEHATI	A. Ide Inovasi dan Dasar Hukum Para pemuda mengalami perubahan persepsi seiring arus modernisasi sehingga menjadi petani tidak lagi menjadi pilihan. Padahal Indonesia membutuhkan petani-petani yang produktif untuk memaksimalkan produksi pangan, terutama karena Indonesia adalah negara agraris. Hal ini disebabkan belum banyaknya sosialisasi atau promosi seputar dunia pertanian yang dilakukan pemerintah ataupun swasta guna mengenalkan pertanian kepada generasi generasi penerus. Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya dijamin oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Tidak hanya sekedar memenuhi kuantitas pangan tetapi juga kualitasnya. Pasal 60 UU No 18/2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Penjabaran dari Undang-Undang Pangan tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi dimana dalam Pasal 26 disebutkan bahwa upaya penganekaragaman pangan salah satunya dilakukan melalui pemanfaatan lahan pekarangan dalam hal ini pekarangan sekolah. Kegiatan Sekolah Berkebun pada prinsipnya merupakan Upaya-upaya realistis dalam memanfaatkan lahan di sekolah untuk bercocok tanam, baik itu secara konvensional maupun Teknik Perkebunan lain seperti hidroponik, aquaponic dan sebagainya. Sejumlah lahan tersebut bisa berupa lahan yang dialokasikan khusus untuk berkebun, bisa juga dengan memanfaatkan lahan kosong lain baik berupa lahan datar (tanah maupun bagian bangunan berupa halaman Gedung), Kebun sekolah dapat menjadi media pembelajaran yang menyenangkan dan bermanfaat bagi siswa. Untuk membangkitkan minat anak sekolah terhadap dunia pertanian sekaligus memberikan pemahaman tentang pentingnya pangan bagi kehidupan yang sehat, cerdas dan produktif sekaligus menciptakan kenyaman dilingkungan sekolah, maka diperlukan suatu inovasi yaitu Kelas Ketahanan Pangan Anak dan Remaja, Sekolah Hijau, Anak Tercukupi Gizi yang singkat LASKAR SEHATI.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			B. Signifikansi/Metode Pembaharuan Inovasi LASKAR SEHATI secara signifikan berpengaruh terhadap berbagai aspek pembelajaran. Berikut adalah beberapa manfaat dari Inovasi LASKAR SEHATI: a. Keterampilan Hidup dan Kepedulian Lingkungan - Inovasi Laskar Sehati menanamkan keterampilan sosial penting yang akan siswa bawa seumur hidup, seperti tanggung jawab, komunikasi, kerja tim, kepemilikan dan kepemimpinan. - Inovasi Laskar Sehati juga menjadi sarana pembelajaran yang efektif diluar kelas, memperkuat konsep daur nutrisi, produksi pangan, dan lainnya melalui kegiatan berkebun yang menyenangkan. b. Media Edukasi Pembangunan Berkelanjutan: Implementasi Inovasi Laskar Pelangi melalui kegiatan kebun sekolah tidak hanya mengajarkan menanam sayuran yang dapat dimakan tetapi juga menjadi media pembelajaran yang menarik untuk berbagai mata Pelajaran. C. Adaptabilitas Inovasi LASKAR SEHATI dengan konsep sekolah berkebun sangat mudah untuk direplikasi dan memberikan banyak manfaat bagi siswa karena menerapkan konsep yang sangat praktis dalam pelaksanaannya, sebagai berikut : 1. Lahan Sekolah Kegiatan ini memanfaatkan lahan di sekolah untuk berkebun. Lahan tersebut bisa berupa area khusus yang dialokasikan untuk berkebun atau bahkan menggunakan lahan kosong seperti dinding atau area yang menjadi bagian dari Gedung sekolah. 2. Teknik Berkebun Kegiatan ini akan mengajarkan siswa tentang cara menanam tanaman baik secara konvensional maupun modern, merawat tanaman, memanen dan pengendalian hama penyakit tanaman. 3. Sumber Gizi Kebun sekolah dapat menjadi sumber makanan yang sehat untuk siswa, dan meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya makanan sehat dan bergizi. Mengajarkan siswa untuk gemar mengkonsumsi sayur dan buah.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			D. Strategi Keberlanjutan 1. Strategi Institutsional Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Nomor : 050/Kep. 451-Dispangtan/2023 Tentang Tim Inovasi Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2023 tanggal 17April 2023. 2. Strategi Sosial Strategi sosial dilakukan dengan adanya keterlibatan Dinas Pendidikan Kota Cimahi guru, siswa dan orang tua murid, dalam pelaksanaan Inovasi Laskar Sehati melalui Kegiatan Sekolah Berkebun, melibatkan peran penyuluh pertanian dan POPT sebagai pendamping/penyuluh pelaksanaan inovasi. 3. Strategi Manajerial dilakukan dengan memastikan bahwa inovasi LASKAR SEHATI dapat terlaksana dan berjalan secara maksimal. Strategi manajerial dilakukan melalui : - Sosialisasi petunjuk pelaksanaan inovasi yang melibat unsur dari Dinas Pangan dan Pertanian, guru sekolah dasar (13 SD) dan guru sekolah menengah pertama (7 SMP), penyuluh pertanian dan POPT - Membuat Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Inovasi yang berisikan tahapa-tahapan pelaksanaan inovasi seperti : Sosialisasi inovasi, pembentukan tim pelaksana peserta inovasi, pemberian sarana penunjang pelaksanaan inovasi, pelatihan dan pendampingan selama kegiatan inovasi dilaksanakan serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Kota Cimahi	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan	Banyaknya aturan terkait pengelolaan lingkungan hidup membuat para pelaku usaha kesulitan baik dari hal pengelolaan hingga pelaporan sehingga banyak perusahaan yang diawasi abai terhadap kewajibannya, dengan adanya Monev Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan dapat membentuk dan membiasakan para pelaku usaha agar mendapatkan predikat 'Compliance' dalam kewajiban pengelolaan lingkungan hidup di Perusahaannya (taat terhadap kewajiban Dokumen Lingkungan, Pengelolaan Pencemaran Air, Pengelolaan Pencemaran Udara dan Pengelolaan Limbah B3), sehingga Perusahaan di Kota Cimahi di harapkan dapat taat dalam seluruh aspek pengawasan lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi merupakan perintis Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaku Usaha dalam Pengelolaan Lingkungan yang merupakan kegiatan sejenis PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan) dari KLHK, yang tidak semua kota/kabupaten membuat/memiliki kegiatan sejenis.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Kota Cimahi	PANGAN SINGKONG	A. Ide Inovasi dan Dasar Hukum Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal merupakan landasan untuk mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan di Indonesia. Perpres ini menetapkan bahwa diperlukan berbagai upaya sistematis dan terintegrasi untuk mencapai kondisi konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman pada tingkat rumah tangga. Jadi, Perpres ini memberikan arahan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengendalikan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Salah satu sumber daya lokal adalah singkong. Singkong sering disebut-sebut sebagai bahan makanan ndeso atau berasal dari kampung, meski saat ini beranekaragam usaha makanan berbahan baku singkong mulai menjamur, namun rata-rata usaha tersebut masih bermotivasi untuk mengangkat derajat singkong supaya lebih bergengsi artinya singkong masih dianggap sebagai makanan rendahan di mata pemerintah dan Masyarakat. Singkongpun masih dianggap sebagai bahan makanan local yang perlu digalakkan sebagai bahan makanan pokok alternatif. B. Signifikansi/Metode Pembaharuan 1. Singkong memiliki potensi unik dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan. Berikut beberapa aspek menarik terkait singkong: Singkong dapat dikembangkan menjadi produk pangan strategis yang mendukung ketahanan pangan nasional. Beberapa makanan pokok berbahan dasar singkong di Kota Cimahi meliputi beras singkong yang dapat dioah menjadi nasi goreng singkong, mie singkong dan olahan lainnya. 2. Keanekaragaman Produk, selain singkong sebagai bahan pokok, ada beragam olahan lain yang menggunakan singkong, seperti eggroll, dendeng kulit singkong, dan kue kering. 3. Singkong merupakan salah satu komoditas yang memiliki potensi besar untuk memperkaya variasi konsumsi pangan dan mendukung ketahanan pangan di Kota Cimahi.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			C. Adaptabilitas Inovasi "Pangan Singkong" mudah untuk direplikasi, dapat diterima dan diikuti oleh berbagai kalangan Masyarakat mulai dari ibu rumah tangga, anak sekolah sampai ke kalangan Perguruan Tinggi. Bahan baku pengembangan inovasi Pangan Singkong dapat diperoleh dengan mudah dan murah karena bahan bakunya mudah didapat di Kota Cimahi, harga singkongpun tidak terlalu murah. D. Strategi Keberlanjutan 1. Strategi Institutsional Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi Nomor 050/Kep.451-Dispangtan/2023 tentang Tim Inovasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi. 2. Strategi Sosial - Strategi sosial dilakukan dengan mengajal semua lapisan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan terhadap beras sebagai makanan pokok dan beralih ke singkong sebagai pangan alternatif. - Menciptakan/berinovasi melalui penciptaan menu makanan berbahan baku singkong mulai dari makanan utama, balita dan kudapan (selingan). 3. Strategi Manajerial - Strategi Manajerial dilakukan dengan memastikan bahwa inovasi "Pangan Singkong" dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Sosialisasi Inovasi "Pangan Singkong' dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan Masyarakat mulai dari kelurahan, kecamatan dan Tingkat Kota. Untuk monitoring dan evaluasi keberhasilan inovasi "Pangan Singkong" salah satunya dengan mengikutsertakan olahan pangan berbasis singkong ke berbagai ajang lomba seperti Lomba Cipta Menu Makanan Beragam Bergizi Seimbang berbahan baku singkong baik Tingkat Kota, Provinsi maupun nasional. E. Kolaborasi/Kemitraan Menjalin kerjasama/kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pelaksanaan Inovasi : Kolaborasi/kemitraan dilakukan dengan Dinas Katahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat, Akademi Gizi, Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Tim Penggerak PKK Kota Cimahi, Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan. Untuk mengukur dampak inovasi dan menjaga	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			keberlangsungan dilakukan pendampingan, Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan pelaksanaan inovasi. 1. Pendampingan dilakukan oleh Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi. 2. Monitoring dilakukan secara berkala melalui laporan hasil tinjauan kondisi dilapangan dan visualisasi berupa laporan melalui sosial media (WathApp Group). 3. Evaluasi pelaksanaan pelaporan pelaksanaan inovasi	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	Kota Cimahi	Patali	Patali merupakan sistem informasi yang dibuat untuk mempermudah pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam melaksanakan kewajibannya melakukan pelaporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem informasi ini memuat basis data perizinan yang dimiliki oleh perusahaan, informasi usaha dan/atau kegiatan serta limbah yang dihasilkan, dan laporan pemantauan lingkungan yang dilakukan, berupa laporan jumlah limbah yang dihasilkan, dan hasil uji kualitas zat pencemar yang dilepaskan ke lingkungan. Dengan adanya sistem informasi ini, maka pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat dengan mudah melakukan pengisian data laporan pada sistem tanpa harus menyusun dokumen laporan hasil pemantauan lingkungan. Laporan yang sudah disampaikan melalui sistem informasi kemudian diverifikasi kebenarannya oleh petugas verifikator di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, untuk kemudian diberikan Tanda Terima Elektronik (TTE) terhadap laporan yang disampaikan melalui surel. Sampai saat ini Patali memfasilitasi pengguna untuk melaporkan data pemantauan kualitas air, kualitas udara baik itu udara ambien maupun udara emisi dan pelaporan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dihasilkan oleh perusahaan	
12	Kota Cimahi	PCOS (Pembinaan Catin One Stop Service)	menjalankan amanat perban bkkbn nomor 12 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting maka dp3ap2kb selaku sekretariat tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tingkat kota melaksanakan kegiatan upaya percepatan penurunan stunting dari hulu dengan sasaran calon pengantin yang bersinergi pada pelaksanaannya bersama dinkes, puskesmas, kemenag dan unjani (yang juga masuk di SK TPPS Kota Cimahi) untuk dapat memberikan manfaat sesuai tupoksi dari instansi masing2 terhadap masyarakat khususnya calon pengantin. kegiatan yang semula berfokus pada agama islam kemudian diluaskan dengan menggaet fkub untuk pengembangan program melalui aplikasi kelambi catin berbasis e learning yang menjadi pintu edukasi, promosi dan sosialisasi dengan reward voucer pemeriksaan kesehatan gratis sebagai salah satu syarat mengisi data catin ke elsimil	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13	Kota Cimahi	Pembinaan Program Kampung Iklim (PROKLIM) Kota Cimahi	Proklim merupakan pembinaan dan apresiasi terhadap masyarakat atas peran sertanya dalam adaptasi mitigasi perubahan iklim, sehingga terbentuknya lingkungan masyarakat yang berbudaya lingkungan. Dasar Pelaksanaan PROKLIM 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 TENTANG PROGRAM KAMPUNG IKLIM 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim NOMOR P.1/PPI /SET/KUM.1/2/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM 3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim NOMOR P.4/PP I /AP I /PP I .0/3/2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM 4. SE Gubernur Jawa Barat No.08/GUB/DLH/2018 Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Inovasi dalam pembinaan Proklim Kota Cimahi Tahun 2024 diantaranya : • Training Of Trainers bagi pembina, kegiatan ini dilaksanakan dengan narasumber dari KLHK untuk mempersiapkan pembina sebelum membina masyarakat. • Study banding lokasi Proklim • Sistem pengumpulan data dukung dari masyarakat, menggunakan word dengan format yang sudah disiapkan sehingga masyarakat mudah untuk memasukan data dukung. • Klinik Proklim	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	Kota Cimahi	PEMPEK KELILING	Secara umum, permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya adalah : i) penyediaan dan distribusi induk unggul dan benih berkualitas masih terbatas; ii) isu jaminan keamanan pangan produk yang menjadi tuntutan, baik pasar luar negeri maupun dalam negeri; iii) efisiensi pakan; iv) biaya produksi yang masih tinggi; v) penurunan kualitas lingkungan perairan sebagai akibat dari limbah budidaya maupun limbahlainnya; vi) ancaman penyakit, baik dari dalam maupun dari luar negeri; vii) keterbatasan sarana dan prasarana perikanan budidaya, terutama terkait dengan kondisi saluran air, jalan produksi, jaringan listrik dan lainnya; viii) akses permodalan ke perbankan yang masih terbatas; ix) sumber daya manusia pelaku usaha perikanan budidaya yang masihkurang pengetahuannya sehingga agak sulit untuk dilakukan perubahan teknologi budidaya yang digunakan; dan x) sistem pendataan dan pelaporan yang belum optimalsehingga berakibat terjadinya keterlambatan penyampaian data dukung. Dari permasalahan tersebut diperlukan lah pembinaan pada kelompok pembudidaya perikanan. Maksud diselenggarakannya Pendampingan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) adalah sebagai salah satu wahana diskusi dan menyatukan persepsi serta langkah strategis dalam menumbuh kembangkan pola kerjasama dan kemitraan usaha agar bisa membuka jaringan pemasaran dan jejaring bisnis perikanan, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat dalam rangka menyatukan langkah agar semua dapat memahami kondisi yang ada serta menentukan apa yang dibutuhkan dan yang perlu dilakukan sehingga berdampak peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan hasil perikanan. Adapun tujuannya adalah :	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			a. Mengetahui apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan dan kendala, serta antisipasi atau pemecahan masalah dari kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembudidayaan ikan baik itu budidaya ikan konsumsi maupun budidaya ikan hias di Kota Cimahi; Meningkatkan kemampuan anggota kelompok, baik pengetahuannya, keterampilannya, maupun sikapnya sehingga menjadi pembudidaya yang tangguh. b. Meningkatkan komunikasi dan hubungan usaha antara pelaku usaha bidang perikanan; c. Meningkatkan produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran produk serta hasil produksi perikanan; d. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha perikanan.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15	Kota Cimahi	Pentas Bank Sampah	Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah, dalam Pasal 2 ayat (3) disebutkan bahwa Dalam melakukan pengelolaan Sampah, Pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk Bank Sampah. Sebagai bentuk upaya pengurangan timbulan dan sampah yang dikirim ke TPA Sarimukti serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, maka dicanangkanlah program Peningkatan Kapasitas Bank Sampah atau disingkat Pentas Bank Sampah. Program ini merupakan program pengembangan dari program Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah atau disingkat Grak Ompimpah yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 lalu. Masyarakat yang telah diedukasi dalam pemilahan sampah, kemudian diberdayakan kembali untuk mengelola sampah yang telah mereka pilah antara organic, anorganik, dan residu. Sampah anorganik yang masih bernilai kemudian masih bisa dijual untuk diolah kembali dengan sarana pembentukan bank sampah unit. Sampah dari bank sampah unit kemudian disetorkan ke bank sampah induk. Program Pentas Bank Sampah tersebut dimulai dengan ditunjuknya masing-masing 2 fasilitator dari tiap kelurahan dan narasumber sebanyak 1 orang tiap 5 RW di masing-masing kelurahan. Fasilitator dan narasumber di masing-masing wilayah akan bertugas untuk mensosialisasikan mengenai Bank Sampah, mendorong tiap RW di wilayahnya masing-masing untuk membentuk Bank Sampah Unit, serta mengevaluasi keaktifan Bank Sampah Unit yang terlah terbentuk tersebut. Dengan ini masyarakat dapat berkontribusi langsung dalam pengelolaan sampah di Kota Cimahi. Dalam pelaksanaannya, tentu tidak lepas koordinasi dengan perangkat kewilayahan yakni kelurahan dan kecamatan. Legalitas Bank Sampah Unit, sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021, Pasal 12 ayat (3) huruf b bahwa Bank Sampah Unit dibentuk oleh Kepala Kelurahan, dan akta pendirian/dokumen lain yang menjelaskan legalitas Bank Sampah berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan, namun karena Kelurahan bukan merupakan SKPD maka penandatanganan dilimpahkan kepada Camat. Dengan adanya program Pentas Bank ini selain mengurangi timbulan dan pengiriman sampah ke TPA, tapi dapat pula memberdayakan masyarakat dalam pengelolaan sampah.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
16	Kota Cimahi	PETERPAN (Pengobatan Hewan Panggilan)	Dalam memelihara hewan ternak, kesehatan ternak menjadi salah satu faktor yang menunjang keberhasilan produksi ternak. Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan secara nasional diatur dalam UU Nomor 18 tahun 2009 juncto UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di tingkat Kota Cimahi, urusan peternakan dan kesehatan hewan diatur pada Perda Kota Cimahi Nomor 1 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Manajemen pemeliharaan hewan ternak yang kurang baik dapat meningkatkan potensi adanya masalah kesehatan pada hewan ternak. Hewan ternak yang tidak sehat memerlukan penanganan medik veteriner agar masalah kesehatan yang terjadi, dapat segera teratasi. Apabila masalah kesehatan ternak dibiarkan berlarut, maka potensi kerugian ekonomi peternak dapat terjadi akibat (1) Biaya berobat hewan ternak ke dokter hewan; (2) Biaya maintenance untuk pemulihan kondisi ternak dan (3) Biaya transportasi ternak; dan (4) Biaya – biaya lainnya. Kerugian ekonomi dapat diperparah apabila terjadi kematian pada hewan ternak terlebih harga ternak ditaksir mulai Rp. 1 juta hingga puluhan juta rupiah per ekornya. Menanggapi hal tersebut, sebagai upaya mendukung pilar smart economy untuk mitigasi kerugian ekonomi peternak, Dispangtan Kota Cimahi menggagas inovasi Pengobatan Ternak Panggilan (PETERPAN). Adapun keunggulan dari PETERPAN, masyarakat tidak perlu jauh – jauh membawa hewan ternak ke Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) dan merogoh kocek transportasi ternak senilai Rp. 100.000 s/d Rp 300.000,-. Petugas kesehatan hewan (terdiri dari dokter hewan berizin praktik dan paramedik veteriner dating langsung ke lokasi kandang pemeliharaan hewan ternak, dan layanan ini tidak dipungut biaya (GRATIS) sehingga menyelamatkan ekonomi peternak yang hewannya sakit. Pemilik ternak di anamnesa mengenai kondisi hewannya, pakan, dan manajemennya, selanjutnya dilaksanakan physical examination dan serangkaian pemeriksaan penunjang yang memungkinkan untuk dilakukan, selanjutnya ditarik diagnosa dan dilaksanakanlah Pengobatan pada ternak yang sakit. Inovasi PETERPAN diterapkan dengan tahapan yaitu : 1) Peternak menelpon petugas kesehatan hewan di call canter (083832300062) apabila merasakan ada keluhan pada hewan ternak; 2) Petugas kesehatan hewan datang dan melaksanakan anamnesa pada pemilik ternak;	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3) Dilaksanakan serangkaian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang apabila diperlukan; 4) Dokter hewan menegakkan diagnosa; 5) Dilaksanakan pengobatan pada hewan ternak; 6) Pelayanan selesai, dokter hewan memberikan saran manajemen perawatan pasca pengobatan, melaporkan pengobatan pada aplikasi sistem informasi Peternakan dan Kesehatan Hewan (iSIKHNAS), kemudian meninggalkan kandang. Adapun kolaborasi yang dijalin selama pelaksanaan yaitu stakeholder : (1) Dinas Peternakan Provinsi dan Kementerian Pertanian; (2) Universitas (Permagangan mahasiswa); (3) Kelompok ternak / Kelompok masyarakat; dan (4) Masyarakat perorangan pemilik hewan ternak.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
17	Kota Cimahi	PMT SUSTER LARASATI	A. RANCANG BANGUN Undang-undang Repubik Indonesiia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan nasional. Balita adalah anak usia di bawah lima tahun, dimana pada usia ini merupakan periode yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Apabila terjadi permasalahan kesehatan pada periode ini, maka besar kemungkinan terjadi permasalahan kesehatan pada periode kehidupan selanjutnya. Balita merupakan salah satu bagian dari kelompok yang rawan mengalami masalah gizi, terutama masalah kekurangan gizi seperti kurus, pendek, dan gizi kurang Permasalahan gizi pada balita masih menjadi permasalahan utama. Isu ini masih menjadi permasalahan global baik di negara maju maupun di negara berkembang seperti Indonesia. Dalam penanganan permasalahan gizi pada balita ini, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai program percepatan perbaikan gizi. Program perbaikan gizi ini diharapkan dapat menurunkan pervalensi permasalahan gizi masyarakat salah satunya pada balita melalui "Pemberian Makanan Tambahan Susu Steril dan Telur Ayam Ras untuk Anak Stunting" yang disingkat dengan Inovasi PMT SUSTER LARASATI B. SIGNIFIKANSI/DAMPAK INOVASI Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pada balita memiliki manfaat yang penting, terutama bagi anak yang sudah mulai diberikan Makanan Pendamping ASI (MPASI). Berikut beberapa manfaatnya: 1. Meningkatkan Status Gizi Anak: PMT membantu memenuhi kebutuhan zat gizi anak, sehingga status gizi dan kondisi kesehatannya sesuai dengan usianya. 2. Memulihkan Kondisi Gizi: Pemberian tambahan makanan, selain makanan sehari-hari, bertujuan untuk memulihkan keadaan gizi dan kesehatan anak C. ISU STRATEGIS	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Sesuai dengan arahan aktual Presiden Joko Widodo, bahwa permasalahan stunting harus dapat tertanggulangi dan harus mencapai target Zero New Stunting. Namun demikian di Kota Cimahi angka prevalensi stunting masih cukup tinggi sebesar 3.261 anak atau sebesar 10,18% dan angka prevalensi kurang gizi (underweight) sebesar 6,9%, hal ini disebabkan oleh : 1. Kurangnya ketersediaan pangan 2. Pola asuh yang kurang efektif 3. Pola makan yang tidak seimbang 4. Ketersediaan sarana dan prasarana sanitasi D. ADAPTABILITAS Inovasi "PMT Suster Larasati" mudah untuk direplikasi, dapat diterima dan diikuti oleh berbagai kalangan Masyarakat terutama ibu rumah tangga dalam memberikan makanan tambahan kepada balita yang bergizi untuk tumbuh kembangnya. E. KEBERLANJUTAN 1. Strategi Institutsional Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 476/Kep.1409-DP3P2KB/2022 Tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kota Cimahi Tahun 2022. 2. Strategi Sosial Strategi sosial dilakukan dengan mengajal semua lapisan masyarakat untuk menurunkan angka balita gizi buruk dan stunting di Kota Cimahi. 3. Strategi Manajerial - Strategi Manajerial dilakukan dengan memastikan bahwa inovasi PMT-Suster Larasati terlaksana dan berjalan dengan baik, dengan melibatkan Masyarakat mulai dari kelurahan, kecamatan dan Tingkat Kota. - Untuk monitoring dan evaluasi keberhasilan inovasi salah satunya dengan membangun Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, Puskesmas dan Posyandu yang ada di kelurahan. F. KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Menjalin kerjasama/kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pelaksanaan Inovasi seperti dengan Dinas Kesehatan Kota Cimahi, DP3P2KB Kota Cimahi, Camat dan Lurah, Kader Posyandu Kecamatan dan Kelurahan dan TP. PKK Kecamatan dan Kelurahan. Untuk mengukur dampak inovasi dan menjaga keberlangsungan dilakukan pendampingan, Monitoring dan Evaluasi serta pelaporan pelaksanaan inovasi berupa laporan data penimbangan balita yang menjadi sasaran inovasi.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
18	Kota Cimahi	Pojok Ikan Hias	kan hias tidak pernah ditinggalkan oleh penggemarnya. Setiap tahunnya, selalu saja ada tren-tren salah satu jenis ikan hias, seperti arwana, lohan, hingga ikan cupang. Kondisi pasar yang cenderung stabil ini tidak terlepas dari keindahan dan manfaat yang diberikan ketika memiliki ikan hias di rumah. Sejak awal pandemi, tren memelihara ikan hias bahkan makin naik daun lagi. Hal ini dilatarbelakangi oleh masyarakat yang banyak menghabiskan waktunya di rumah sehingga hobi merawat ikan hias digandrungi oleh lebih banyak orang. Oleh sebab itu diperlukanlah wadah untuk penjual ikan hias di Kota Cimahi	
19	Kota Cimahi	PUSDALOPTIN BARENGRAS (Pusat Pengendalian Operasi, Data dan Informasi Bareng-bareng Kurangi Sampah)	Pembentukan Pusdaloptin Barengras merupakan suatu keniscayaan untuk mendapatkan prestasi atas keberhasilan pengendalian kegiatan penanganan dan pengurangan sampah di Kota Cimahi. Upaya ini tentunya sebagai bentuk membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sampah dengan manajemen kinerja yang mengendalikan seluruh proses inklusi pengolahan sampah. Pembentukan tim efektif merupakan awal untuk membantu proses implementasi aksi perubahan kinerja organisasi Pusdaloptin Pengelolaan Sampah Kota Cimahi dengan lingkup administrasi dan pelaporan, perumusan regulasi dan kebutuhan sarana prasarana lapangan. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan lainnya, yaitu : penyusunan grand design, pemanfaatan sarana prasarana pendukung, rekuritmen personil yang andal, penetapan personil yang lulus seleksi, penyusunan regulasi kerja, penerapan regulasi kerja, mitigasi risiko dan peningkatan kapasitas. Budaya kerja dalam sudut pandang emosional merupakan suatu kebiasaan dalam melaksanakan tugas yang tetap menjunjung nilai-nilai humanis, inklusif atau keberagaman dan profesionalitas organisasi yang berkinerja tinggi. Dengan budaya kerja diharapkan pembangunan sumberdaya manusia yang kreatif dan inovatif dapat berjalan konsisten dan bertahan untuk jangka Panjang. Dengan adanya Pusdaloptin barengras, maka lima permasalahan mendasar dalam pengelolaan sampah diharapkan sedikit demi sedikit dapat teratasi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun, sehingga berbagai keuntungan Pemerintah Kota Cimahi dalam efisiensi anggaran dan penuntasan masalah persampahan dapat terwujud demi kepentingan masyarakat Kota Cimahi. Membangun integritas dan akuntabilitas kinerja organisasi melalui penerapan inovasi pusat pengendalian operasi, data dan informasi dapat	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			diartikan sebagai kepemimpinan kinerja yang mampu dan konsisten mengatasi permasalahan pengelolaan sampah dengan manajemen kinerja yang mengendalikan seluruh proses inklusi pengolahan sampah, baik pada kegiatan pengurangan maupun pananganan timbulan sampah secara terpusat, serta mengintegrasikan pengolahan data dan informasi, sehingga menghasilkan produk yang valid dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh stakeholders. Upaya membangun integritas dan akuntabilitas kinerja dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut : 1. Menyamakan visi mengenai urgensi pengelolaan sampah 2. Memberikan gambaran deskriptif dan pemahaman tentang pentingnya inovasi kepada seluruh jajaran 3. Memberikan gambaran dan keyakinan terhadap perubahan perubahan yang akan terjadi dengan diberlakukannya inovasi 4. Memperjelas metode-metode, standar kinerja dan mekanisme kerja yang diperlukan 5. Merancang pola kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang baik dan berdaya guna 6. Pendekatan emosional dan teknis dalam menyelesaikan berbagai potensi permasalahan yang terjadi di lapangan 7. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif 8. Penerapan reward and punishment 9. Penyajian laporan capaian kinerja sebagai bentuk pertanggung jawaban yang mudah diakses stakeholders	
20	Kota Cimahi	Sappeuting Emas (Sarana Aplikasi Percepatan Penurunan Stunting dan Edukasi Masyarakat)		

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	Kota Cimahi	Siaga Masa (optimalisaSIkAmpung keluarGA berkualitas (kb) dalam meningkatkan kualitas hidup MASyArakat)	Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, yang mengatur terjadi transformasi Kampung Keluarga Berencana menjadi Kampung Keluarga Berkualitas yang merupakan inovasi strategi untuk mengimplementasikan kegiatan kegiatan prioritas Program Bangga Kencana secara Utuh di lini lapangan dengan kegiatan terdiri dari 4 sasaran, yakni (1) Penyediaan data dan dokumen kependudukan, (2) Perubahan Perilaku, (3) Peningkatan Cakupan Layanan dan rujukan pada keluarga, dan (4) Penataan Lingkungan keluarga dan masyarakat. Untuk menindak lanjuti Intruksi Presiden tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung KB maka di Kota Cimahi diperlukan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan kampung kb yang sesuai dengan Peraturan yang berlaku maka harus dilaksanakan konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah sampai tingkat kelurahan. Strategi Optimalisasi Kampung KB melalui Akselerasi Laporan Online Kampung Keluarga Berkualitas atau disingkat AKSI PINTAS dengan mengoptimalkan web kampung KB yang sudah ada yaitu https://kampungkb.bkkbn.go.id serta Aplikasi New siga melalui https://newsiga.bkkbn.go.id serta pemanfaatan dan penggunaan Aplikasi Rumah dataku melalui https://rumahdataku.bkkbn.go.id sebagai solusi penanganan permasalahan program Kampung Keluarga Berkualitas yang kurang optimal selama ini. Dengan adanya strategi AKSI PINTAS, pemerintah Kota Cimahi dipastikan memiliki profil kampung kb yang up to date dan sesuai Inpres nomor 3 Tahun 2022 sehingga dapat mewujudkan Masyarakat sejahtera dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.	
22	Kota Cimahi	SI KOPER	berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Nomor : 660?Kep.03 DLH/2024 tentang Penerapan Inovasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2024, SIKOPER merupakan pengumpulan data pengunaan BBM lebih mudah dikontrol, pencatatan penggunaan lebih cepat dan efisien. pelaporan bisa dilakukan dimanapun sehingga bisa menghindari kesalahan inpu dan data yang dihasilkan lebih akurat.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
23	Kota Cimahi	SIMAK (SISTEM IFORMASI MANAJEMEN KEHADIRAN) WARGA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI KOTA CIMAHI	Sistem Informasi Manajemen Absensi Terpadu (SIMAT) Dinas Pendidikan Kota tidak dapat digunakan karena pandemi Covid-19. Di sisi lain, satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan dituntut untuk memiliki peta risiko Covid-19 warga satuan pendidikan. Karena itu dikembangkan Sistem Informasi Manajemen Kehadiran (SIMAK) sebagai upaya pemutakhiran fasilitas pendidikan yang aman dan efektif, sebagai bagian dari salah satu point dalam tujuan ke-4 SDGs. SIMAK dapat diakses melalui platform web untuk operator sekolah dan admin Dinas Pendidikan, serta melalui platform mobile berbasis android untuk siswa dan GTK sebagai user. Inovasi SIMAK terletak pada bisnis proses baru dalam sistem informasi kehadiran, yaitu mengelola data kehadiran GTK dan siswa, sekaligus mengumpulkan data survielence untuk memetakan risiko penyebaran Covid-19 pada warga satuan pendidikan. Bisnis proses SIMAK ini potensial untuk direplikasi oleh daerah lain mengingat semua instansi memerlukan sistem informasi kehadiran dan perlu membuat peta risiko Covid-19 pada warga satuan pendidikan. SIMAK dibangun menggunakan anggaran APBD Kota Cimahi tahun 2021 sebesar Rp. 49.500.000, dengan mamanfatkan sumber daya yang ada, yaitu Tim Cimahi Smart City, Tim e-Gov Diskominfoarpus, admin Dapodik, serta operator sekolah. SIMAK dihosting pada salah satu server di data center Pemkot Cimahi dan ditautkan pada Google Playstore. Sesuai Keputusan Wali Kota nomor: 841/Kep.331-Disdik/2021, tanggal 15 Februari 2021 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cimahi nomor: 421.2/Kep.0662-Disdik/2021 tanggal 16 Februari 2021, TKD GTK ASN maupun Insentif GTK diberikan berdasarkan sistem proporsional menggunakan data daftar kehadiran SIMAK. Evaluasi terhadap SIMAK dilakukan dengan metode 360 derajat, yaitu menganalisa dan menginterpretasikan umpan balik dari admin, operator sekolah, maupun user. Sejak ditaukan di Google Play, SIMAK mendapat 10.000+ downloads, dengan rating 3,8*/5, digunakan oleh 9.489 pengguna aktif, serta mendapat 64 ulasan. GTK antusias menggunakan SIMAK karena berdampak terhadap penerimaan TKD dan insentif. Namun demikian masih ada GTK yang mengisi SIMAK tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.	
24	Kota Cimahi	SI-TANGKAL		

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
25	Kota Cimahi	SITERANG (Vaksinasi On The Spot Hewan Penular Rabies dan Flu Burung)	Dengan kedudukan Cimahi sebagai kota, masyarakat tidak hanya hidup sendirian melainkan dengan hewan kesayangan (Pet Animals) maupun hewan ternak. Adapun hewan yang sering dipelihara oleh masyarakat kota Cimahi salah satunya adalah pada golongan hewan kesayangan dan unggas kesayangan. Hal tersebut menyebabkan tingginya potensi penularan penyakit dari hewan ke manusia (zoonosis). Dalam hal ini, ancaman zoonosis pada hewan serta unggas kesayangan mayoritas yang dipelihara masyarakat Cimahi berada di peringkat pertama dan kedua pada daftar Penyakit Zoonosis Prioritas (Berdasar Kepmentan no 237 th 2019), yaitu Flu Burung yang menyerang unggas dan Rabies yang menyerang hewan kesayangan. Berangkat dari permasalahan tersebut, sebagai upaya pencegahan dan pelaksanaan upaya preventif pada Perda Kota Cimahi No. 1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dispangtan Kota Cimahi menerapkan inovasi Vaksinasi On The Spot Hewan Penular Rabies dan Flu Burung (SITERANG). Kegiatan SITERANG menerapkan sistem jemput bola dengan datangnya petugas ke titik – titik lokasi vaksinasi rabies dan flu burung dengan titik yang tersebar di seluruh wilayah di Kota Cimahi, untuk kemudian melakukan vaksinasi kepada hewan yang dipelihara masyarakat maupun yang berada di jalanan yang berdampingan dengan wilayah hidupnya masyarakat. Inovasi SITERANG diterapkan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut : (1) Berkoordinasi dengan Kelurahan dan RW lokasi pelaksanaan SITERANG; (2) Melaksanakan layanan vaksinasi hewan di lokasi tiap – tiap RW pada kelurahan; (3) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk vaksinasi hewan untuk melindungi keluarga melalui layanan yang terjangkau lokasinya sehingga masyarakat tidak perlu jauh ke PUSKESWAN (Pusat Kesehatan Hewan). Inovasi SITERANG berkontribusi terhadap capaian terjaganya Kota Cimahi dari Kasus Rabies atau 0 (Nol) Kasus Rabies pada hewan dan manusia hingga tahun 2024. SITERANG juga berperan dalam pilar Smart Living dimana memiliki kontribusi untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat berdasarkan elemen kelayakan kualitas kesehatan dimana bebas kasus zoonosis prioritas (rabies), dengan tingkat kematian mencapai 99% yang mengancam hidup masyarakat Kota Cimahi. Adapun nilai kebaharuan yang diusung dari Inovasi ini adalah pelaksanaannya jemput bola di tiap kelurahan (cakupan kelurahan, 100% pertahun),	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pelaksanaannya sesuai jadwal, dan layanan ini bisa dilaksanakan sesuai permohonan. SITERANG mulai dibranding tahun 2021 dan terus dilanjutkan hingga sekarang. Kebutuhan masyarakat untuk menjaga kesehatan dengan mencegah penularan zoonosis menjadi nilai keberlanjutan dari inovasi ini. Adapun kolaborasi yang telah dilaksanakan pada SITERANG ini melibatkan berbagai stakeholder : (1) Kecamatan dan Kelurahan pelaksana program; (2) Dinas Peternakan tingkat Provinsi; (3) Kementerian Pertanian (Untuk Pelaporan); (4) Universitas dan Sekolah Menengah Peternakan (Siswa magang pada program); (5) Media (untuk publikasi agar terjadi peningkatan awareness pada masyarakat); (6) Komunitas Pecinta Hewan, dan (7) Masyarakat Kota Cimahi Pemilik Hewan	
26	Kota Cimahi	Tepung Grak Ompimpah	Sampah merupakan isu lingkungan yang dihadapi kota besar dan padat penduduk. Begitupun di Kota Cimahi, pertambahan penduduk dan perkembangan fisik Kota menyebabkan peningkatan timbulan sampah menuntut adanya sistem pengelolaan dan penanganan persampahan. Pengelolaan dan penanganan persampahan diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat dari timbulan sampah yang ada, mengingat jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Kota Cimahi menimbulkan problema dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Cimahi saat ini sudah mulai meninggalkan paradigma lama penanganan sampah yang sentralistik dengan cara kumpul-angkut-buang dan beralih ke tata kelola sampah skala kawasan yang terdesentralisasi dengan pemilahan sampah di rumah tangga sebagai ujung tombaknya. Tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi telah membina 8 RW di Kelurahan Melong, 2 RW di Leuwigajah, 2 RW di Citeureup, dan 1 RW Pasirkaliki yang dijadikan kawasan pilah sampah organik (AWAS PANIK), dimana sampah organik yang telah terpilah dikelola di sarana pengelolaan milik Pemerintah seperti TPS 3R dan PDU, serta pembinaan kepada 26 RW yang tersebar di beberapa Kelurahan di Kota Cimahi untuk membentuk Kawasan Tuntas Pilah Sampah Organik Maggotisasi Mandiri (AWAS PANIK	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			MAMA), dimana sampah organik yang telah terpilah dikelola di kawasan untuk dijadikan pakan maggot. Tahun 2023 ini Pemerintah Daearah Kota Cimahi mencanangkan GRAK OPMPIMPAH (Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah) yang akan dilaksanakan di seluruh RW yang ada di Kota Cimahi yang berjumlah 312 RW. Untuk menunjang program tersebut diperlukan sarana pengolahan sampah dengan kapasitas lebih besar dan metode yang lebih baik sehingga diperlukan adanya teknologi pendukung berupa peralatan pengelolaan sampah di TPS 3R seperti mesin pencacah, mesin crusher, mesin pengering sampah, mesin briket, mesin mixer, serta pembuatan sistem informasi pengelolaan sampah agar memudahkan dalam pemantauan dan monitoringnya, sehingga seluruh pengelolaah sampah melalui GRAK OMPIMPAH ini dapat terkelola dengan baik. Harapan ke depannya solusi penyediaan Teknologi Pendukung GRAK OMPIMPAH dapat meningkatkan layanan pengelolaan sampah di Kota Cimahi, sesuai dengan target Kebijakan Strategi Nasional serta Kebijakan Strategi Kota Cimahi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yaitu dapat pengurangan sampah sebesar 28% dan penanganan sampah sebesar 71% sehingga total layanan pengelolaan sampah menjadi 99% pada Tahun 2024	
27	Kota Cimahi	Cing Kuriling dan Ku-Penting	SK Puskesmas No. 440/025/PKM/2023 mengenai Inovasi Cing Kuriling dan Ku-Penting merupakan upaya dalam mencegah dan menurunkan prevalensi stunting di wilayah kerja Puskesmas Melong Tengah. Cing Kuriling (Cegah Stunting dengan Kunjungan Rumah, Konseling pendampingan) merupakan kegiatan preventif, promotif dan kuratif yang dikemas untuk meningkatkan pelayanan kesehatan balita sedangkan Ku-Penting (Kartu Pemantauan Balita Stunting) merupakan pengembangan inovasi Cing Kuriling berupa alat bantu petugas kesehatan di puskesmas Melong Tengah dalam pemantauan balita stunting. Hasilnya dapat menurunkan angka stunting sebanyak 1,1% dan mempermudah petugas Kesehatan dalam pencatatan pemantauan Kesehatan balita stunting	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28	Kota Cimahi	DIGIT si EMPUS	Sebagai salah satu unit pelayanan publik yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa pelayanan kesehatan hewan, maka pelaksanaan pelayanan publik di UPTD Puskeswan harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan pada tahun 2019, 2020 dan 2021 terhadap pelayanan yang diberikan oleh UPTD Puskeswan, didapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar 81,48 di tahun 2019, 81,28 di tahun 2020 dan 80,40 di tahun 2021. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi penurunan indeks kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan kesehatan hewan yang diberikan oleh UPTD Puskeswan. Adapun permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskeswan dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan anara lain : 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya paramedik veteriner (perawat hewan); 2. Belum terlayaninya kasus atau pasien gawat darurat; 3. Kurang optimalnya pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan hewan; 4. Kurang efektifnya pendaftaran pelayanan kesehatan hewan; 5. Kuota pelayanan kesehatan hewan yang jumlahnya masih terbatas. Berdasarkan analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth) didapatkan hasil bahwa permasalahan utama dari pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskeswan adalah "Kurang efektifnya pendaftaran pelayanan kesehatan hewan". Setelah diketahui masalah utama, selanjutnya dilakukan kembali analisis menggunakan Fishbone Diagram untuk mengetahui faktor faktor penyebab dari masalah tersebut. Setelah dilakukan identifikasi faktor-faktor penyebab masalah, ditemukan bahwa faktor penyebab utama dari kurang efektifnya pendaftaran pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan Kota Cimahi adalah : 1. Pendaftaran online hanya bisa dilakukan pada hari yang sama dengan pelayanan pada pukul 06.00; 2. Belum adanya fitur booking di aplikasi pendaftaran online; 3. Pembayaran retribusi pada saat pendaftaran ulang masih dilakukan secara tunai. Untuk itu dirancang inovasi DIGIT si EMPUS (Digitalisasi Booking Pendaftaran dan Transaksi Pembayaran Retribusi di Puskeswan Kota Cimahi). Inovasi DIGIT si EMPUS merupakan pengembangan dari inovasi	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			"CeK ADRENALINE" (Cegah Kerumunan Antrian Dengan caRa pENdAftarAn onLINE) yang sebelumnya telah diterapkan di Puskeswan Kota Cimahi. Adapun tujuan dari inovasi DIGIT si EMPUS adalah : 1. Tersedianya fitur booking di aplikasi pendaftaran online dan fasilitas pembayaran retribusi secara digital atau non tunai berupa QRIS; 2. Minimal 10% dari transaksi pembayaran retribusi menggunakan QRIS; 3. Peningkatan indeks kepuasan masyarakat (IKM) 81,5 di tahun 2023. Nilai tambah dari inovasi "DIGIT si EMPUS" adalah : 1. Digital yang berarti proses pendaftaran pelayanan dan pembayaran retribusi dapat dilakukan secara digital mengikuti perkembangan dan tuntutan pelayanan publik; 2. Mudah yang berarti pendaftaran dapat dilakukan dari mana saja tanpa harus datang untuk mengambil nomor antrian dan waktu pelayanan sudah ditentukan sesuai nomor antrian; 3. Cepat yang berarti pembayaran retribusi dapat dilakukan secara cepat, hanya dengan memindai QRIS pembayaran berhasil diselesaikan tanpa harus pengembalian uang. DIGIT si EMPUS berkontribusi terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan juga Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Pemerintah Daerah Kota Cimahi sebagai Upaya mewujudkan SMART CITY melalui pilar SMART GOVERNENCE. Penerapan inovasi DIGIT si EMPUS juga selaras dengan tema ChiMA 2024 yaitu "Berinovasi, Bertransformasi, Mewujudkan Cimahi Campernik". Inovasi DIGIT si EMPUS telah diadaptasi oleh UPT Klinik Hewan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung. Adaptasi yang dilakukan berupa penerapan pendaftaran secara onine berbasis web dengan fitur yang sama seperti yang diterapkan di Puskeswan Kota Cimahi. Namun untuk digitalisasi pembayaran retribusi belum diadaptasi, dikarenakan di UPT Klinik Hewan Kota Bandung belum menerapkan tarif retribusi pelayanan kesehatan hewan. Untuk mendukung keberlanjutan inovasi, beberapa strategi telah dilakukan diantaranya : 1. Strategi institusional berupa pembuatan SK Kepala Dinas tentang Tim Inovasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi ; https://drive.google.com/file/d/1aAKdeEjKaAw8pa5TGanPIgp2X3NjO4wL/view?usp=drive_link 2. Strategi sosial dengan cara berbagi informasi di media sosial (IG) @puskeswankotacimahi dan membuat serta memuat tutorial cara pendaftaran online di Youtube channel Puskeswan Cimahi	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			https://www.youtube.com/watch?v=m6FyytuuwPE&t=64s https://www.instagram.com/p/ClmvEgzui3D/?next=%2F https://www.instagram.com/p/Cm8d_OThfAR/?next=%2F 3. Strategi manajerial dengan cara pelatihan petugas administrasi dalam pengelolaan antrian dan rekam medik, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) https://drive.google.com/file/d/1ySZxHDAH2SuZYteUSScTcEdZ5uGLn2G7/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1ELZUCly4g2XXU38fiJ_ocgDh5MG2UP8w/view?usp=share_link Membangun kemitraan, kolaborasi dan koordinasi merupakan salah satu kunci keberhasilan penerapan suatu program. Inovasi ini dilaksanakan dengan kerjasama yang melibatkan berbagai pihak. Adapun beberapa pihak yang bekerja sama dan memberikan kontribusi dalam kelancaran penerapan inovasi adalah : 1. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Cimahi berperan dalam penyediaan jaringan internet dan evaluasi penerapan aplikasi pendaftaran online berbasis web; 2. Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Barat dalam penyediaan fasilitas WIFI gratis bagi masyarakat/pemilik hewan yang akan memerlukan jaringan internet untuk mengakses aplikasi pendaftaran online; 3. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi berperan dalam mengevaluasi penerimaan retribusi dan penerapan ETPD (pembayaran retribusi secara non tunai menggunakan QRIS) di Puskeswan Kota Cimahi; 4. Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Cimahi dalam penyediaan QRIS untuk pembayaran retribusi di Puskeswan Kota Cimahi; 5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Bagian Organisasi Setda Kota Cimahi berperan dalam pendampingan, monitoring dan evaluasi penerapan inovasi; 6. KPK (komunitas pecinta kucing), pemilik hewan dan masyarakat secara umum berperan dalam mengevaluasi, memberikan masukan dan saran agar inovasi pendaftaran online	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			semakin ditingkatkan kualitasnya. https://www.youtube.com/watch?v=qiRZjnmdO_4&list=PLYfr2OzXbQbKrgWvOVDNo7TeWwCRkb5p&index=10) Selain beberapa strategi yang dilakukan untuk mendukung keberlanjutan inovasi, faktor kekuatan internal dan eksternal juga sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan inovasi. Faktor internal untuk mendukung keberlanjutan inovasi adalah : 1. Anggaran kegiatan Puskeswan; 2. Pegawai Puskeswan yang kompeten; 3. Bangunan gedung Puskeswan, Obat-obatan dan peralatan kesehatan hewan; 4. Aplikasi pendaftaran berbasis Web yang mudah diakses oleh siapa saja; 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP). Faktor eksternal/peluang untuk mendukung keberhasilan inovasi adalah : 1. Meningkatnya minat masyarakat/pemilik hewan untuk memelihara hewan peliharaan/kesayangan; 2. Jenis dan jumlah hewan peliharaan terus bertambah; 3. Kebutuhan akan layanan kesehatan hewan terus bertambah dan bervariasi; 4. Penerapan SPBE di Pemerintah Kota Cimahi untuk mendukung Cimahi SMART City; 5. Fakultas Kedokteran Hewan UNPAD, UNAIR dan SMK Keperawatan hewan menjadikan Puskeswan Cimahi sebagai tempat magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian; 6. Masyarakat/pemilik hewan sudah familiar dengan gawai dan sudah melek digital.	
29	Kota Cimahi	https://dasukecimteng.com	Dasukecimteng merupakan suatu aplikasi yang dipergunakan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola, mengendalikan, memonitor dan mengevaluasi permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah SKPD terutama Kecamatan Cimahi Tengah dalam melakukan validasi data yang didapatkan dengan cepat dan mudah. Aplikasi dasukecimteng ini ini terdiri dari beberapa modul. Masing-masing modul mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya. Aplikasi ini dikembangkan melalui beberapa tahap pengembangan . Pada tahap pertama pengembangan modul-modul yang dikembangkan adalah modul data umkm , modul data posyandu dan modul data stunting Pada tahap ketiga dilakukan lagi pengembangan aplikasi dasukecimteng yang	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			mencakup penyempurnaan modul-modul yang ide-ide baik dari operator SKPD maupun pihak pimpinan yang membutuhkan variasi data yang belum tersedia dipengembangan sebelumnya.	
30	Kota Cimahi	PADAPENDAK (Paperless Database Pengujian dan Administrasi Kelaboratoriuman)	Rancang Bangun Penerapan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan berdasarkan keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi Nomor: 660/Kep.04-DLH/2023. Ide inovasi ini muncul untuk memberikan peningkatan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan dan mempermudah personil laboratorium dalam mengelola data pengujian, mengelola data informasi dari bentuk hardfile ke format digital. Personil Pendukung atau kolaborasi pemangku kepentingan: 1. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan: a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terkait keberlangsungan PADAPENDAK, b. Berkontribusi dalam membangun data base pada kegiatan pencocokan dan koreksi Laporan Hasil Uji (LHU) secara elektronik pada Google sheets, c. Berkontribusi dalam membangun data base pada kegiatan memeriksa dan memparaf SKRD secara elektronik menggunakan BeSign atau Panter, d. Berkontribusi dalam membangun data base pada kegiatan memeriksa dan menandatangani LHU secara elektronik menggunakan BeSign atau Panter. 2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan: a. Membantu Ka UPTD dalam pengawasan dan evaluasi terkait keberlangsungan PADAPENDAK, b. Berkontribusi dalam membangun data base pada kegiatan memeriksa dan memparaf SKRD secara elektronik melalui Google sheets menggunakan BeSign atau Panter, c. Berkontribusi dalam membangun data base pada kegiatan memeriksa dan memparaf LHU secara elektronik melalui Googlesheets menggunakan BeSign atau Panter 3. Petugas Pelayanan/Pengelola Laboratorium: a. Memberikan masukan terkait pelaksanaan PADAPENDAK,	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			b. Berkontribusi dalam membangun data base pada kegiatan input data pelanggan pada google form dan Google sheets, c. Berkontribusi dalam membangun data base pada kegiatan pembuatan draft LHU dan SKRD secara elektronik melalui Googlesheets 4. Pengelola Sarpras: a. Memberikan masukan terkait pelaksanaan PADAPENDAK, b. Berkontribusi dalam membangun data base pada kegiatan input data hasil sampling pada google form dan Google sheets, 5. Pengendali Dampak Lingkungan: a. Memberikan masukan terkait pelaksanaan PADAPENDAK, b. Berkontribusi dalam membangun data base pada kegiatan input data hasil pengamatan sampling dan pengujian parameter lingkungan pada Google sheets 6. Koordinator Pengujian: a. Memberikan masukan terkait pelaksanaan PADAPENDAK, b. Berkontribusi dalam membangun data base pada kegiatan verifikasi menggunakan Google sheets untuk pembuatan LHUS dan LHU per sampel yang diterima 7. Koordinator Pengendali Mutu: a. Memberikan masukan terkait pelaksanaan PADAPENDAK, b. Berkontribusi dalam membangun data base pada kegiatan verifikasi menggunakan Google sheets untuk jaminan mutu pengujian per sampel yang diterima, c. Berkontribusi dalam membangun data base pada kegiatan penyusunan dokumen sistem mutu laboratorium ISO 17025 pada Google drive 8. Koordinator Administrasi: a. Memberikan masukan terkait pelaksanaan PADAPENDAK, b. Berkontribusi dalam membangun data base pada kegiatan pemeriksaan dan pelaporan stock opname bahan kimia menggunakan Google sheets yang diterima	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31	Kota Cimahi	QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) Retribusi Pelayanan Persampahan	Sebagai alat untuk mempermudah pembayaran Retribusi Pelayanan Pelayanan Persampahan. Merupakan pilihan cara pembayaran tagihan retribusi pelayanan persampahan melalui kanal digital atau non tunai. Penyediaan QRIS diberikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Proses untuk mendapatkan QRIS ditempuh melalui pengajuan permohonan kepada Bank BJB. Memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran retribusi sampah secara non tunai. sebelumnya, masyarakat yang ingin membayar retribusi atas layanan persampahan yang telah dinikmati, harus melakukannya secara tunai dengan datang langsung ke Bank. Membawa uang tunai dirasa tidak praktis dan kurang dari segi keamanan. Selain itu, dengan pembayaran tunai, masyarakat harus meluangkan waktu untuk datang ke bank (kurang efektif dan efisien). Dengan pembayaran menggunakan QRIS, masyarakat dapat melakukannya kapan saja dan dimana saja, praktis dan aman. Selain itu, dari segi pertanggungjawaban, bagi dinas penerima akan lebih aman, akuntabel dan transparan. Aliran dana jelas dan langsung masuk ke kas daerah, dengan "jejak" atau bukti secara digital akan secara akurat mencatat bukti transaksi.	
32	Kota Cimahi	SISENJA (Sistem Informasi Sedot Tinja)	Sebelum konsep inovasi Sisenja (sistem informasi sedot tinja) dilaksanakan banyak masyarakat kota cimahi belum mengetahui adanya layanan sedot tinja yang di fasilitasi oleh pemetintah kota cimahi melalui UPTD SPALD rata-rata masyarakat menggunakan layanan sedot tinja milik swasta yang cenderung biayanya lebih mahal Berdasarkan hal tersebut di buatlah sisenja untuk mempermudah masyarakat mengenal tugas dan fungsi uptd spald Sebuah inovasi yang digunakan dalam proses pelayanan penyedotan lumpur tinja secara terpadu kepada masyarakat Kota Cimahi, meliputi : a. Penyedotan Lumpur Tinja di Perumahan dan Permukiman b. Penyedotan Lumpur Tinja di Kantor Pemerintah, Kantor Swasta, Pengguna Bangunan Komersial dan Fasilitas umum c. Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Industri (Pabrik) Keunggulan akan inovasi SISENJA 1. Mempermudah proses penyelesaian penyedotan lumpur tinja dari masyarakat ke uptd spald menjadi lebih efisien	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Mempermudah penanganan lumpur tinja dari masyarakat ke uptd spald jadi lebih mudah cepat melalui whatsapp ataupun call center yang ada di uptd spald 3. Penanganan yang simple melalui call center langsung dan diteruskan ke petugas penyedotan uptd spald dan melakukan pembayaran menggunakan QRIS Dasar hukum : 1. Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik 2. Perda Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kota Cimahi Nomor 2 Tahum 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum 3. Perwal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 4. Perwal Nomor 47 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Retribusi Pengolahan Air Limbah Domestik 5. Perwal Nomor 48 tahun 2018 tentang Pengelolaan Lumpur Tinja 6. Perwal Nomor 27 tahun 2020 tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Dengan adanya inovasi SISENJA peningkatan pendapatan yang signifikan terhadap retribusi penyedotan dari tahun 2018 sampai tahun 2023 dan masih ada potensi pengembangan kedepan bekerjasama dengan 390 industri yang memerlukan penanganan lebih lanjut untuk saat ini kita baru menjalin kerjasama dengan 10 industri dari total keseluruhan 400 industri	
33	Kota Cimahi	SITEMAN CIMUT	LATAR BELAKANG Pusat Kesehatan Masyarakat Cimahi Utara berada di wilayah Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi yang memiliki luas wilayah kerja 287,38 Ha yang terdiri dari 138 RT dan 25 RW dengan dihuni oleh lebih kurang 17.238 KK dengan 54.414 penduduk. Jumlah sasaran terdiri dari 1183 ibu hamil, 1148 ibu bersalin, 3521 balita, 31 posyandu, dan 25 posbindu. Berdasarkan hasil identifikasi masalah pada tahun 2021, angka kesakitan di Puskesmas Cimahi Utara tahun 2021 masih cukup tinggi. Kasus hipertensi sebanyak 2686 kasus, kasus influenza sebanyak 2362, Myalgia atau nyeri otot sebanyak 1955, dyspepsia sebanyak 1619 dan COVID-19 sebanyak 1486 kasus. DBD 39 kasus, TB sebanyak 53 kasus. Berdasarkan data tersebut di atas, maka disusunlah kegiatan untuk menanggulangi masalah kesehatan yang ada di wilayah Cimahi Utara Kelurahan Cibabat. Seiring dengan	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			perkembangan zaman kemajuan ilmu pengetahuan teknologi mulai berkembang, kemudian teknologi berfungsi sebagai alat yang mempermudah akses penyebaran informasi atau ilmu pengetahuan yang kemudian akan berdampak kepada penggunanya. Perkembangan teknologi juga berdampak dalam aspek pelayanan kesehatan, dimana masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, mudah dan tepat. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Pada masa pandemi, konseling online disarankan menjadi pilihan meski masyarakat masih bias menjangkau fasilitas medis. Jadi bukan hanya mereka yang tinggal di daerah terpencil yang bisa memperoleh manfaat telemedicine, melainkan masyarakat secara umum. PENJELASAN Perkembangan teknologi berdampak dalam aspek pelayanan kesehatan, dimana masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, mudah dan tepat. Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Terkait dengan pelayanan sesuai SMART City, informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terintegrasi secara digital mengikuti perkembangan zaman, sehingga dapat disampaikan lebih mudah dan menjangkau masyarakat luas, dalam hal ini, gagasan dibuat dengan menggunakan aplikasi media sosial, sehingga mudah digunakan dan diakses oleh masyarakat. Di zaman digital dan penggunaan media sosial untuk mencari informasi, serta masih adanya dampak dari pandemi covid, maka dibuatlah Inovasi pengembangan untuk meningkatkan layanan Puskesmas terutama dalam komunikasi interpersonal dan konseling. Diberi nama SITEMAN CIMUT akronim dari Sistem Pelayanan Konseling Kesehatan Puskesmas Cimahi Utara. Dengan memanfaatkan sistem hotline puskesmas yang dikhususkan untuk konseling kesehatan secara online menggunakan media sosial WhatsApp, dimana pengguna aplikasi ini cukup besar dari semua kalangan, mudah digunakan, mudah diakses, dan terjangkau. SITEMAN CIMUT memudahkan masyarakat khususnya warga Cibabat sebagai kelurahan binaan mendapat pelayanan kesehatan berupa konseling, edukasi, dan informasi mengenai kesehatan perseorangan (penyakit menular dan penyakit tidak menular), Gizi dan Tumbuh kembang anak serta remaja, Kesehatan lingkungan, berhenti merokok, konsultasi obat, serta kesehatan ibu dan anak dari mana saja.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	Kota Cimahi	Web Retribusi Persampahan	Sebagai penyimpan database Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan yang sudah membayarkan secara rutin setiap bulannya. Memiliki dua "jendela" yaitu fitur pada web yang dapat diakses oleh masyarakat berbeda dengan fitur yang dapat diakses oleh UPTD. 1. Memudahkan UPTD Pelayanan Persampahan dalam pengelolaan data retribusi pelayanan persampahan 2. Data retribusi pelayanan persampahan dapat dipantau secara online (kapan saja dan dimana saja) 3. Data yang terhimpun lebih aman karena tersimpan secara online 4. Masyarakat dapat ikut memantau data retribusi atas nama masyarakat itu sendiri sebagai wajib retribusi 5. Web berpotensi dikembangkan dengan penyedia jasa aplikasi versi mobile baik android maupun iOS yaitu membuat versi mobile pada telepon pintar 6. Web berpotensi dikembangkan dengan salah satu penyedia jasa pembayaran online (gopay, dana, ovo, dll) 7. Mengembangkan fitur pada web sehingga dapat menyesuaikan dengan perubahan sistem/peraturan perundangan/kebijakan sehingga web dapat terus dipergunakan 8. Melaksanakan sosialisasi kepada seluruh wajib retribusi yang secara garis besar terbagi menjadi 2, masyarakat umum dan sektor komersil 9. Sumber daya keuangan : 100 - 200 juta untuk membangun pengembangan sistem pada web 10. Sumber daya manusia : 2 - 5 orang untuk mengelola web 11. Sumber daya lainnya : konsultan untuk membangun pengembangan sistem pada web 12. Diperlukan pegawai yang bertugas secara khusus untuk mengelola web secara berkelanjutan, hal mana yang belum tentu dapat dipenuhi oleh UPTD Pelayanan Persampahan 13. Belum tentu semua unsur masyarakat mau menerima dan menyesuaikan metode pembayaran dari tunai (offline) menjadi nontunai (online).	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Kota Cimahi	WISBEN (Wisata Perbenihan Ikan)	WISBEN adalah Wisata Perbenihan Ikan. Inovasi ini diusung oleh UPTD Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Cimahi.Balai Benih Ikan Air Tawar yang selanjutnya disingkat BBIAT merupakan penyedia kebutuhan benih ikan bagi masyarakat pembudidaya ikan air tawar. BBI memiliki peluang untuk menjadi acuan teknis budidaya bagi masyarakat sekaligus juga dapat menjadi barometer perkembangan budidaya perikanan di daerah yang bersangkutan. Namun pada kenyataannya, banyak BBI yang tidak dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena kendala- kendala yang dialami BBI, dimana kendala tersebut berbeda-beda di setiap daerah. Misalnya sumber daya manusia yang kurang menguasai teknis, kurangnya dana yang dimiliki, atau kendala lainnya. Benih ikan yang dibudidayakan diharapkan dapat meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat dan mensupport Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena selama ini banyak peminat yang membeli benih ikan di BBIAT. Berangkat dari latar belakang tersebut inovasi WIBEN digagas, Ide menjadikan wisata edukasi itu muncul karena banyaknya kunjungan dari pelajar dan PAUD. Begitu pun para guru yang melakukan pembelajaran dan praktek di BBI. Selain itu untuk menarik para Pelajar akan adanya : 1. Program pembenihan ikan hias dan ikan konsumsi sambil bermain 2. Program pembenihan ikan konsumsi dan ikan Hias yang baik. Untuk itu BBIAT menjadikan penyangga bibit ikan hias maupun konsumsi, dan sekaligus sebagai pusat edukasi bagi pelajar dan masyarakat umum yang ingin membudidayakan ikan. “Sebagai langkah awal, kita akan perbaiki dan memanfaatkan sarana yang ada dengan banyak belajar. Tentunya salah satu yang paling harus kita tekankan yaitu kita ingin memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi kepada Pelajar agar tahu dan bisa memperdalam belajar budidaya ikan disini di BBIAT Kota Cimahi. Keunikan inovasi WISBEN diarahkan untuk mendukung Pendapatan Daerah yang melibatkan Para Pelajar SD dan PAUD kota cimahi sebagai upaya tempat Edukasi Wisata Pembenihan Ikan di Kota Cimahi. Inovasi WISBEN dilaksanakan melalui sistem Pembenihan Ikan dengan Bermain sambil Belajar. Kebaruan/nilai tambah inovasi ini selain meningkatkan ketersediaan Benih Ikan juga untuk pemenuhan dalam mendukung peningkatan ekonomi dan daya beli masyarakat. Keunggulan terbesar dari inovasi ini adalah Penguatan penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihitung berdasarkan	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			pembelajaran kepada pelajar dan mahasiswa juga ke Pembudidaya dengan cara menjual benih ikan ke pada peserta pelatihan setiap orang diwajibkan beli benih ikan 10 ekor/peserta. Inovasi WISBEN diimplementasikan karena secara ekonomi perikanan budi daya bisa berkembang dengan baik hingga mencapai produksi yang maksimal, diperlukan pasokan pakan ikan berkualitas untuk semua pelaku usaha budi daya ikan, baik sekala besar maupun kecil. Kebutuhan tersebut, mutlak dipenuhi karena akan menentukan kualitas ikan yang dihasilkan. Dengan pengetahuan ini nantinya anak-anak setelah lulus sekolah memiliki keterampilan sehingga bisa hidup mandiri dan tidak sekedar ingin menjadi pegawai. Wisata edukasi ini sejalan dengan Kurikulum 13 (K-13). Dimana anak anak dituntut lebih kreatif dan mandiri, dan tugas guru hanya memfasilitasi. Dari setiap kunjungan yang dilakukan, anak-anak diminta membuat laporan dari kunjungannya dengan memanfaatkan wisata edukasi perikanan ini. "Karena dengan adanya wisata ini, anak-anak belajar dan menambah wawasan tentang dunia perikanan," Inovasi WISBEN bisa berkontribusi mendasar kepada Balai Benih Ikan Air Tawar Kota Cimahi dan khalayak sasaran secara ekonomi adalah meningkatkan pendapatan dan pengetahuan bagi para pelajar dan masyarakat. Adapun secara sosial adalah (1) Mengoptimalkan potensi perikanan sebagai sentra ikan hias dan ikan konsumsi, (2) Memberikan kebanggaan kepada para pelajar (3) Menyalurkan potensi positif para pelajar sebagai penggerak wisata edukatif berbasis budidaya ikan. Sedangkan secara pendidikan adalah meningkatkan kemampuan pelajar dalam mengenal budidaya ikan ,sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di usia dini. Dalam implementasinya, Inovasi melibatkan sejumlah langkah strategis. Pertama, pengenalan potensi perikanan sejak usia dini yang terdiri dari para PAUD dan SD di wilayah Kota Cimahi. Ini bertujuan untuk memperkenalkan pembenihan ikan terhadap anak anak untuk mengetahui cara pembenihan ikan. Kedua, infrastruktur tambahan juga dibangun untuk mendukung kegiatan Wisata Pembenihan ikan. Hal ini meliputi pembuatan kolam pembenihan yang dilengkapi dengan sistem aerasi dan filter air yang canggih. Selain itu, sarana untuk pemberian pakan ikan yang aman dan menarik bagi anak-anak menjadi fokus dalam program ini untuk memastikan keselamatannya. Hal ini memberikan dampak positif terhadap pengetahuan bagi	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			anak-anak dalam pengenalan perikanan sejak usia dini. Inovasi ini mudah direplikasi karena tidak membutuhkan biaya yang besar dan lahan yang luas tapi bisa merekayasa lahan yang ada dijadikan tempat yang nyaman dan menarik bagi wisata anak – anak. Dari kegiatan tersebut untuk 1 anak sekolah bisa membawa ikan untuk dijadikan ikan kesayangan di rumahnya dengan membeli setiap anak 10 ekor dengan harga murah dan juga bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk BBIAT Kota Cimahi	
36	Kota Cimahi	Aplikasi Smart City (https://smartcity.cimahikota.go.id/)	Smartcity Cimahi merupakan sebuah visi pengembangan perkotaan untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan teknologi Internet Of Things (IoT) dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota. Aset ini meliputi sistem informasi instansi pemerintahan lokal, sekolah, perpustakaan, sistem transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum, dan pelayanan masyarakat lainnya. Smart city ditujukan dalam hal penggunaan informatika dan teknologi perkotaan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. TIK memungkinkan para pejabat kota berinteraksi langsung dengan masyarakat dan infrastruktur kota serta memantau apa yang terjadi di kota, bagaimana kota berkembang, dan bagaimana menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Melalui penggunaan sensor yang terintegrasi dengan real-time monitoring sistem, data yang dikumpulkan dari warga dan perangkat – kemudian diolah dan dianalisis. Informasi dan pengetahuan yang dikumpulkan adalah kunci untuk mengatasi inefisiensi	
37	Kota Cimahi	Sistem Pengaduan Pelayanan Informasi melalui Email Kota Cimahii	Sistem pelaporan aduan masyarakat terkait layanan Pemerintah Daerah Kota Cimahi melalui email resmi Pemerintah Daerah Kota Cimahi	
38	Kota Cimahi	Klinik Yanlik	Inovasi untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, untuk meningkatkan kepatuhan UPPP, meningkatkan sinergitas pembinaan UPPP Yanlik serta meningkatkan kompetensi SDM dan mendorong tumbuh nya budaya inovasi	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
39	Kota Cimahi	BPHTB Online/ SI BAH OCI (Sistem Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Online)	Merupakan sebuah Aplikasi Mengenai Pelayanan seputar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berbasis online dimana sebelumnya berbasis pelayanan konvensional (terpadu di loket pelayanan)	
40	Kota Cimahi	Bemara Nurseries	BEMARA NURSERIES (Pembibitan Tanaman Hias Berbasis Masyarakat). Penataan lahan di lingkungan RW, Sekolah, dan perkantoran yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik; taman yang dibangun menjadi tambahan luas bagi taman kota dan akan di kelola oleh pemohon. DPKP memberikan pelatihan dan bantuan bahan pendukung dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat untuk memeliharan taman disekitar mereka.	
41	Kota Cimahi	Simantan	Monitoring pelaksanaan pengelolaan taman kota secara digital menggunakan aplikasi web, sehingga membantu pengawasan kinerja petugas taman dengan pelaporan yang terekam secara digital.	
42	Kota Cimahi	Bemara Planning	BEMARA PLANNING (Perencanaan Taman Berbasis Masyarakat). Penataan lahan di lingkungan RW, sekolah dan perkantoran yang belum dimanfaatkan dan dikelola dengan baik, taman yang dibangun menjadi tambahan luas bagi taman kota dan akan direncanakan dan dikelola oleh pemohon. DPKP melibatkan masyarakat dalam perencanaannya bersama-sama dengan konsultan perencana dalam rangka mendorong kemandirian masyarakat untuk merencanakan taman di sekitar mereka.	
43	Kota Cimahi	Sanimas	Sanitasi Berbasis Masyarakat merupakan salah satu program yang rutin dilaksanakan oleh Kota Cimahi untuk menyediakan sarana pengolahan air limbah domestik di masyarakat. Dengan Sanimas masyarakat diajak untuk menyelesaikan permasalahan sanitasi berdasarkan kebutuhan masyarakat. Tujuan Sanimas yaitu: 1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. Mencapai kualitas kehidupan masyarakat. Di Cimahi sendiri sudah dibangun IPAL Sanimas sebanyak 118 unit dengan kapasitas rata-rata 50 KK yang melayani hingga 10.676 KK hingga tahun 2022.	
44	Kota Cimahi	Pembentukan Kampung hortikultura	merintis pembentukan kampung hortikultura di kota cimahi sebagai tempat budidaya, edukasi dan sebagai bangkitan ekonomi masyarakat disekitarnya terutama dalam pengelolaan lanjutan dari hasil kampung hortikultura tersebut	
45	Kota Cimahi	AWAS PANIK MAMA (Kawasan Tuntas Pilah Sampah Organik Magotisasi Mandiri)	Pemerintah Kota Cimahi saat ini sudah mulai secara perlahan meninggalkan paradigma lama penanganan sampah yang sentralistik dengan cara kumpul-angkut-buang dan beralih ke tata kelola sampah skala kawasan yang terdesentralisasi dengan pemilahan sampah di rumah tangga sebagai ujung tombaknya. Latar belakang inovasi ini dikarenakan banyaknya sampah yang masih tercampur dan langsung dibuang ke kontainer sampah sedangkan potensi sampah organik sangat besar untuk dapat diolah menjadi hasil organik yang bermanfaat seperti kompos, pakan ternak dan bahan bakar biogas. Disamping memanfaatkan sampah organik yang terbuang inovasi ini juga sekaligus bisa mengurangi volume sampah yang terbuang ke kontainer yang pada akhirnya dapat menyumbang angka penurunan volume sampah yang dibuang ke TPA Regional Sarimukti. Awas panik merupakan pengembangan inovasi Kawasan Tuntas Pilah Sampah Organik (Awas Panik). Masyarakat yang telah memilah sampah, kemudian diberdayakan untuk mengelola sampah organiknya secara mandiri dengan metode maggotisasi. Jadi inovasi ini bertujuan mengurangi timbulan sampah tercampur yang terbuang dengan menanamkan pola pemilahan kepada warga agar dapat memanfaatkan sampah organiknya. Program ini memiliki kontribusi terhadap capaian tujuan pembangunan berkelanjutan terutama pada capaian nomor 11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan dan nomor 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab karena mengedepankan pengelolaan dan pelayanan persampahan serta pengolahan sampah di suatu wilayah	

46	Kota Cimahi	CEU OMAH (Cimahi Edukasi Pengolahan Sampah)	Perkembangan fisik Kota Cimahi yang diiringi dengan pertambahan penduduk dan peningkatan timbulan sampah menuntut adanya sebuah sistem pengelolaan dan penanganan masalah persampahan yang baik. Pengelolaan dan penanganan persampahan diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul akibat dari timbulan sampah yang ada. Oleh karenanya harus ada usaha pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya. Perkembangan aktivitas masyarakat yang pesat bila dibandingkan dengan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah menuntut Pemerintah Kota untuk terus menambah program kegiatan dalam proses pengelolaan persampahan, diantaranya dengan menggalakan program pemilahan awal sampah di sumber, dimana warga diharuskan untuk memilah sampah di rumahnya masing-masing sebelum dibuang ke tempat sampah serta dengan mengembangkan gerakan 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace) dengan mengurangi barang-barang yang hanya satu kali pemakaian dapat menyebabkan timbulan sampah, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan, dan memanfaatkan kembali sampah dengan proses daur ulang. Di samping itu, program pengurangan sampah juga dilakukan untuk memenuhi target yang ditetapkan melalui Kebijakan dan Strategi Nasional dalam pengelolaan sampah yang diturunkan kedalam kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan sampah, dimana Pemerintah daerah harus mampu melakukan pengelolaan sampah melalui pengurangan timbulan sampah. Salah satu kegiatan yang dapat mendukung pengurangan sampah adalah melalui edukasi pengolahan sampah. Kota Cimahi membuat suatu program kegiatan yang bernama Cimahi Edukasi Pengolahan Sampah (CEU OMAH), yang salah satunya targetnya adalah peserta didik mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP. Pendidikan lingkungan hidup terutama mengenai persampahan yang dilaksanakan disekolah merupakan suatu program pendidikan untuk membina anak atau peserta didik agar memiliki pengetahuan, kesadaran sikap dan prilaku dan tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan oleh setiap individu. Pendidikan lingkungan hidup tersebut ditanamkan sedari kecil kepada peserta didik untuk membentuk karakter sadar dan cinta akan lingkungan sekitar. Sikap ini harus ditanamkan secara berulang-ulang supaya peserta didik lebih peduli akan lingkungan dan akan menjadi kebiasaan yang akan dibawa di lingkungan rumah. Kegiatan Cimahi Edukasi Pengolahan Sampah (CEU OMAH) di sekolah ini dilakukan dengan cara sosialisasi, pelatihan pengolahan sampah dan permainan yang berkaitan tentang	

			pengolahan sampah serta pemberian hadiah dari permainan pengolahan sampah agar dapat menarik pagi seluruh peserta didik	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
47	Kota Cimahi	GRAK OMPIMPAH (Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah)	Untuk mendukung optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Cimahi, tentu harus dimulai dari sumbernya. Hal ini harus didukung dengan peran serta masyarakat untuk memilah sampah. Kota Cimahi melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi mencanangkan program Gerakan Orang Cimahi Pilah Sampah (Grak Ompimpah). Dalam program tersebut, dipilih 4 kader dari masing-masing untuk melaksanakan *door to door education* atau disingkat DTDE. Pada DTDE, kader di tiap RW mengedukasi masyarakat di RW dari rumah ke rumah untuk memilah sampah. Setelah DTDE dilaksanakan kemudian dilanjutkan dengan *door to door collection* atau DTDC, dimana kader kembali ke rumah-rumah yang telah diedukasi untuk memastikan bahwa masyarakat telah memilah sampah. DTDC bisa dilakukan beberapa kali sampai rumah tersebut benar-benar memilah sampah	
48	Kota Cimahi	TPST RDF SANTIONG	RDF atau *refuse derived fuel* adalah bahan bakar alternatif dari sampah campuran pengganti batu bara. RDF dapat mengurangi sampah yang dibuang ke TPA. Terdiri dari sampah campuran, pengolahan sampah dengan teknologi RDF diterapkan di TPST Santiong yang memiliki kapasitas 50 ton/hari dan *offtaker* dari RDF tersebut adalah PT Indocement.	
49	Kota Cimahi	TIPIRING SAMPAH (Tindak Pidana RIngan Pembuangan Sampah)		
50	Kota Cimahi	PATALI	Kewajiban melaporkan pemantauan lingkungan berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 480 yang mengamanatkan pemerintah untuk menyediakan informasi melalui Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang dikembangkan terintegrasi secara elektronik. Patali sendiri merupakan implementasi dari sistem informasi pelaporan persetujuan lingkungan, dimana sistem ini terus dikembangkan agar dapat memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 483, Peraturan Pemerintah Nomor	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedepannya, sistem ini juga akan dikembangkan sebagai input data dalam sistem informasi status lingkungan hidup, terutama untuk menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan.	
51	Kota Cimahi	Uji Emisi	Uji emisi adalah salah satu upaya pengujian untuk mengetahui kinerja mesin yang terdeteksi oleh monitor khusus.	
52	Kota Cimahi	Si Tangan	Upaya ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi pembakaran dalam mesin. Pengujian ini memiliki ketentuan khusus bagi beberapa jenis kendaraan untuk lulus sesuai dengan kriterianya.	
53	Kota Cimahi	DATA NGAHIJI	Sebagai solusi integrasi data pemerintahan, Data Ngahiji hadir sebagai platform terpusat untuk penyimpanan dan akses data spasial, mendukung visi integrasi data dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Cimahi. Data Ngahiji berupa aplikasi berbasis WEB opensource menggunakan CMDBuild versi 3.4. Perwujudan Satu Data Satu Peta menjadi hal yang penting dalam setiap pengambilan kebijakan dari tataran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk semua kepentingan, sehingga keberadaan Data Ngahiji sebagai wadah atau alat dalam penyelenggaraan pembangunan informasi geospasial di Kota Cimahi yang dapat mengumpulkan semua data spasial, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh semua perangkat daerah dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi dapat melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran, karena dengan satu data satu peta ini dapat terwujud anggaran yang tepat sasaran dan tepat kebijakan. Dengan terwujudnya satu data satu peta ini pula dapat dengan mudah menilai tingkat perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dalam kurun waktu tertentu, informasi terkait pengembangan investasi di Kota Cimahi pun dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Kualitas dokumen Rencana Tata Ruang dan upaya pengendaliannya akan juga akan mudah dan akurat. Pengembangan dan penetapan status melalui Keputusan Walikota untuk aplikasi Data Ngahiji sebagai wadah pengelolaan data informasi geospasial di Kota Cimahi melalui kelembagaan	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Simpul Jaringan Daerah Kota Cimahi yang terkoneksi dengan Geoportal BIG yang merupakan Simpul Jaringan Nasional. KEUNIKAN / KREATIFITAS Data Ngahiji yang telah terbangun adalah sebagai berikut : 1. Data yang sudah ada didalam aplikasi Data Ngahiji adalah : - Peta Ortho skala 1 : 1000 - Informasi Geospasial Dasar (Peta Garis) - Informasi Geospasial Tematik Dasar (Peta Administrasi Wilayah, Batas Kelurahan, Batas RW di beberapa Kelurahan) - Informasi Geospasial Tematik Sektor (beberapa masih berupa arahan lokasi belum dilengkapi dengan atribut) - Informasi administrasi Pertanahan (Slot untuk data persil pertanahan) dengan tematik data perijinan dan PBB - Informasi Toponimi sudah terkoneksi dengan aplikasi SINAR di BIG yang dioperasionalkan oleh Bagian Pemerintahan Setda 2. Data Ngahiji sudah terkoneksi dengan Geoportal Kota Cimahi di BIG, sehingga data yang akan dipublish bisa langsung terpublish melalui geoportal tanpa harus upload ulang data peta, tinggal menentukan data-data petamana saja yang sudah siap untuk di publish. 3. Guna mempermudah pemanfaatan peta ortho dan peta garis, FITB membuat aplikasi "Data Ngahiji" dan telah masuk ke dalam web servis Pemerintah Kota Cimahi melalui Diskominfo tanggal 7 Agustus 2023 dengan alamat web : http://10.3.1.151:8080/datangahiji 4. Pembuatan Peta Pendataan Data Kelurahan Presisi Kota Cimahi : - Data sensus untuk 2 kelurahan yaitu Kelurahan Cimahi dan Kelurahan Pasirkaliki pada tahun 2023, dasn dilanjutkan sensus 13 kelurahan pada tahun 2024 - Peta kerja yang terdiri dari peta ortho, peta administrasi, peta sarana dan prasarana, dan peta topografi telah dilakukan untuk seluruh kelurahan di Kota Cimahi (15 Kelurahan). Data yang dihasilkan dalam kerjasama dengan IPB ini nantinya akan mengisi atribut dan menambahkan peta-peta tematik pada aplikasi data ngahiji yang kedepannya harus dilakukan pemutakhiran data oleh perangkat daerah yang terkait.	

No.	Lokasi	Nama Inovasi	Deskripsi Inovasi	Dasar Hukum Inovasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			5. Kondisi Perangkat Daerah Di Kota Cimahi berdasarkan Prioritas Ketersediaan Data Spasial/Peta Tahun 2023 terdiri dari : - Prioritas I : Perangkat Daerah yang telah memiliki data informasi geospasial dan yang memiliki aplikasi yang berbasis GIS sebanyak 11 Perangkat Daerah - Prioritas II : Perangkat Daerah yang sudah memiliki data tabular yang sudah atau belum mempunyai koordinat lokasi sebanyak 28 Perangkat Daerah. - Prioritas III : Perangkat Daerah yang masih memerlukan inventarisasi kebutuhan data peta sebanyak 4 Perangkat Daerah. Perwujudan Satu Data Satu Peta menjadi hal yang penting dalam setiap pengambilan kebijakan dari tataran perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk semua kepentingan, sehingga keberadaan Data Ngahiji sebagai wadah atau alat dalam penyelenggaraan pembangunan informasi geospasial di Kota Cimahi yang dapat mengumpulkan semua data spasial, yang kemudian dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh semua perangkat daerah dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Pemerintah Kota Cimahi dapat melakukan efisiensi dan efektifitas anggaran, karena dengan satu data satu peta ini dapat terwujud anggaran yang tepat sasaran dan tepat kebijakan. Dengan terwujudnya satu data satu peta ini pula dapat dengan mudah menilai tingkat perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang dalam kurun waktu tertentu, informasi terkait pengembangan investasi di Kota Cimahi pun dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Kualitas dokumen Rencana Tata Ruang dan upaya pengendaliannya akan juga akan mudah dan akurat. Rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Cimahi dalam upaya perwujudan kebijakan satu peta di Kota Cimahi adalah : Penguatan Tata Kelola Sistem Informasi Geospasial (Data Ngahiji) sebagai instrumen Simpul Jaringan melalui Peraturan Walikota. Kebijakan tersebut juga mengatur terkait integrasi sistem dan pemanfaatan data geospasial sebagai sumber data untuk pengambilan kebijakan, pelaksanaan kegiatan, monitoring, evaluasi dan pengendaliannya	

Keterangan: -

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

LAMPIRAN III
Tabel Tambahan

Tabel-1a. Tabel Tambahan Rincian Luas Kawasan Perlindungan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi/Jawa Barat
Tahun : 2024

Versi Sebelum Revisi	
Muatan	**Luas (Ha)**
Kaw. Perlindungan Setempat	
Sempadan Sungai	258,26
Sempadan Jalur Ka	19,67
Sempadan Tol	72,9
Sempadan SUTT	97,98
RTH	
RTH Skala BWK	0,76
RTH Skala Kota	1,17
RTH Skala Lokal	2,34
Kaw. Yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya	
KBU	1.488,62
Kaw. Resapan Air	697,12
TOTAL	**2.638,82**

Versi Setelah Revisi	
Muatan	**Luas (Ha)**
Kaw. Perlindungan Setempat	
Kaw. Perlindungan Setempat	21,71
RTH	
Rimba Kota	366,28
Taman Kota	4,81
Taman Kecamatan	4,74
Taman Kelurahan	0,23
Taman RW	3,12
Pemakaman	32,5
Jalur Hijau	77,81
Badan Air	
Badan Air	13,75
Total	**524,95**

Keterangan: -
Sumber:
Sebelum revisi: Perda Kota Cimahi No 4 Tahun 2013 Tentang RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032

Setelah Revisi: Draft Revisi RTRW Kota Cimahi, 2023

Tabel-1b. Tabel Tambahan Penutup lahan Eksisting Kota Cimahi 2012-2032 (Revisi)
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi/Jawa Barat
Tahun : 2024

No	Tutupan Lahan Eksisting	Luas (Ha)
1	Jalan Tol	34,92
2	Kolam	4,36
3	Lapangan	56,27
4	Perkebunan/Kebun	136,23
5	Permukiman dan Tempat Kegiatan	2958,38
6	Sawah	343,63
7	Semak Belukar	132,56
8	Situ	0,44
9	Tanah Kosong/Gundul	129,78
10	Tegalan/Ladang	446,64
	Grand Total	**4.243,20**

Keterangan: -
Sumber: DPUPR Kota Cimahi, 2023

Tabel-2b. Tabel Tambahan Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Utama
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi/Jawa Barat
Tahun : 2024

No	Guna Lahan	Luas (Ha)
1	Area Parkir	0.06
2	Bangunan/Permukiman	2126.85
3	Embung	2.56
4	Fasilitas Olah Raga Lainnya	0.98
5	Hutan Kerapatan Sedang	0.22
6	Industri	471.71
7	Jalan	252.78
8	Jalan Kereta Api	3.19
9	Jalur Hijau	4.45
10	Kolam	30.20
11	Ladang	408.15
12	Lahan Terbuka	343.12
13	Lapangan Olah Raga	6.59
14	Makam	25.02
15	Objek Wisata	4.80
16	Pasar	1.65
17	Perkebunan	341.86
18	Sawah	204.51

No	Guna Lahan	Luas (Ha)
19	Sirkuit	0.06
20	Sungai	13.19
21	Taman	7.00

Keterangan: -
Sumber: Peta RBI Tahun 2016 dan Digitasi citra Peta Tahun 2019 skala 1:5000

Tabel-3a. Tabel Tambahan SK Wali Kota Cimahi Tahun 2012 Tentang Hutan Kota

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi/Jawa Barat

Tahun : 2023

No	Lokasi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Kawasan Blok Cimenteng	4,00
2	Kawasan Jl. Jend. H. Amir Machmud	0,864
3	Kawasan Jl. Baros	0,284
4	Kawasan Simpang Jl. Leuwigajah Nanjung	0,354
5	Kawasan Jl. Gandawijaya	0,080
6	Kawasan Jl. Sudirman	0,22
7	Kawasan Jl. Urip Sumihardjo	0,060
8	Kawasan Jl. Rd. Demang Hardjakusumah	0,120
9	Kawasan Jl. Mahar Martanegara	0,156
10	Kawasan Jl. HMS Mintadiredja	0,280
11	Kawasan Citeureup	0,25
Total		**6,668**

Keterangan: -

Sumber: SK Walikota Cimahi Tahun 2012 tentang Hutan Kota

Tabel-3b. Tabel Tambahan Rincian Luas Hutan Berdasarkan Fungsi dan Status di Kota Cimahi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi/Jawa Barat
Tahun : 2023

No	Lokasi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Hutan Kota Publik dan privat lainnya	213,60
2	RW 18 Lebak Saat	0,48
3	Penambahan Taman Kehati	0,93
4	Peta Kawasan RTH dari PUPR (RTRW 2012-2022)	4,17
5	RW 8 Cibeber	0,90
6	RW 5 Citeureup PDU (Pusat Daur Ulang)	0,22
7	RW 12 Cipageran	0,86
8	RW 21 Cipageran	0,20
9	RW 21 Cipageran	0,43
10	RW 21 Cipageran	0,55
11	RW.15 Padasuka	0,10
12	Hutan Kota (SK 2007)	8,02
13	Hutan Kota (SK 2012)	6,67
Total		**237,12**

Keterangan: -
Sumber: SK Walikota Cimahi Tahun 2012 tentang Hutan Kota

Tabel-3c. Tabel Tambahan Rincian Luas Kawasan Hutan Publik dan Privat di Kota Cimahi

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi/Jawa Barat

Tahun : 2023

No	Fungsi	Luas (m^2)
(1)	(2)	(3)
1	Kawasan RW 10 Kel Leuwigajah	50.000,00
2	Kawasan Sepanjang Jalan Tol Cipularang	188.000,00
3	Kawasan UNJANI	100.000,00
4	Kawasan Bukit Cirendeu	250.000,00
5	Kawasan Perkantoran TTUC	50.000,00
6	Kawasan Lap Brigif TNI AD	140.000,00
7	Gunung Bohong	500.000,00
8	Bukit Cibogo	822.000,00
9	Tikungan Ciawitali	4.000,00
10	P4TK	30.000,00
11	Hutan Perumahan Kota Mas	1.650,00
12	DPRD Kota Cimahi	350,00
Total dalam meter		**2.136.000,00**
Total dalam Ha		**213,60**

Keterangan: Profil Keanekaragaman Hayati tahun 2021

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2022

Tabel-3d. Tabel Tambahan Tren Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2023

No.	Kabupaten/Kota/Kecamatan	Nilai IKTL					
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Kota Cimahi	28,96	26,2	25,87	22,19	25,70	25,53

Keterangan: -
Sumber: Hasil Analisis, 2023

Tabel-7. Tabel Tambahan Luas Berdasarkan Jenis Tanah
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

Kecamatan	Luas Berdasarkan Jenis Tanah (Ha)			
	Aluvial	Gley	Latosol	Total
Cimahi Selatan	356,07	373,12	754,99	**1484,18**
Cimahi Tengah	17,5	21,01	1309,43	**1347,94**
Cimahi Utara			1411,09	**1411,09**
Total	**373,57**	**394,13**	**3475,51**	**4243,21**

Keterangan: -
Sumber: DPUPR Kota Cimahi, 2023

Tabel-20a. Tabel Tambahan Spesies Flora dan Fauna yang dapat Dianggap Langka atau Dilindungi di Kota Cimahi

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2023

No.	Nama Spesies	Keterangan	Status menurut CITES
1	Rafflesia patma	Salah satu spesies Rafflesia yang dapat ditemukan di Jawa Barat, termasuk sekitar Cimahi	tidak termasuk dalam lampiran CITES
2	Phalaenopsis amabilis	Salah satu anggrek endemik Indonesia yang tersebar luas termasuk di sekitar kota Cimahi	tidak termasuk dalam lampiran CITES
3	Nepenthes spp.	Tumbuhan kantong semar dengan berbagai spesies, beberapa di antaranya bisa ditemukan di sekitar kota Cimahi	tidak termasuk dalam lampiran CITES
4	Pycnonotus goiavier	Burung ini cukup umum di Indonesia tetapi habitat alaminya bisa terancam di beberapa area perkotaan, termasuk Cimahi	tidak termasuk dalam lampiran CITES
5	Lonchura leucogastroides	Burung ini termasuk dalam burung endemik Jawa yang populasinya semakin menurun	tidak termasuk dalam lampiran CITES
6	Tropidurus spp.	Kadal ini adalah salah satu jenis kadal yang bisa ditemui di sekitar kota Cimahi	tidak termasuk dalam lampiran CITES

Keterangan: -

1. Spesies-spesies yang termasuk dalam Lampiran I adalah yang paling terancam dan dianggap hampir punah. Perdagangan internasional spesies-spesies ini biasanya hanya diizinkan dalam keadaan yang sangat terbatas, seperti untuk tujuan penelitian ilmiah atau upaya konservasi yang ketat. Izin ekspor dan impor diperlukan dan dikeluarkan hanya jika tujuan tersebut terpenuhi.
2. Spesies-spesies yang termasuk dalam Lampiran II tidak dianggap segera terancam punah, tetapi perdagangan mereka harus diatur agar tidak mengancam kelangsungan populasi mereka di alam liar. Perdagangan internasional spesies-spesies ini memerlukan izin ekspor dan impor, yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang di setiap negara anggota CITES.
3. Spesies-spesies yang termasuk dalam Lampiran III adalah spesies-spesies yang dilindungi di satu atau beberapa negara anggota CITES dan negara-negara lainnya telah meminta kerja sama internasional untuk mengatur perdagangan mereka. Penambahan spesies ke Lampiran III biasanya didasarkan pada kebutuhan untuk melindungi spesies di tingkat regional atau internasional.

4. Status konservasi setiap spesies dapat berubah seiring waktu dan perlu dipantau secara teratur oleh otoritas konservasi setempat

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi, 2023

Tabel-25a. Tabel Tambahan Jumlah Rumah Tangga dan Sumber Air Minum dari WTP (UPT)

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2021

No.	Lokasi	WTP
(1)	(2)	(3)
1	Cimahi Utara	66
2	Cimahi Tengah	3.372
3	Cimahi Selatan	0

Keterangan: -

Sumber: UPT Air Minum Kota Cimahi, 2020

Tabel-27a. Tabel Tambahan Kondisi Sarana dan Prasarana Drainase Kota Cimahi Tahun 2020

Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi

Tahun : 2020

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
A	**Saluran Primer**							
1	Sungai Cimahi	8.620	Kotak	3,8 - 13 m	1,1-6 m	Berfungsi	-	1 x
	Bangunan Pelengkap							
	Rumah Pompa		-	-		-	-	-
	Pintu Air		-	NA		-	-	1 x
	Kolam Retensi		Trapesium				-	2 x
	Trash rack/saringan sampah		-	-		-	Tidak berfungsi	-
2	Sungai Cisangkan		Kotak	3,0 - 13 m	1,5-6 m	Berfungsi		1 x
	Bangunan Pelengkap							
	Pintu Air		-	NA		-	-	1 x
	Kolam Retensi		Trapesium				-	2 x

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
3	Sungai Cilember		Kotak	1,7 - 6,6 m	1,2-3,9m	Berfungsi		1 x
	Bangunan Pelengkap							
	Pintu Air		-	NA		-	-	1 x
	Kolam Retensi		Trapesium				-	2 x
4	Sungai Cibeureum		Kotak	2,3 - 23,3 m	0,5 - 8,9 m	Berfungsi		1 x
	Bangunan Pelengkap							
	Trash rack/saringan sampah		-	-		-	Tidak berfungsi	-
B	**Saluran Sekunder**							
	Sub Sistem Drainase Cibiuk	3.116						
1	CBI12	294	Kotak	1	1,5	Berfungsi	-	
2	CBI2	781	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
3	CBI3	420	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
4	CBI4	438	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
5	CBI6	734	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
6	CBI7	449	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
	Sub Sistem Drainase Bongkok	8.484						
1	CBK1	1010	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
2	CBK11	639	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
3	CBK14	303	Kotak	1,5	1,8	Berfungsi	-	
4	CBK15	190	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
5	CBK17	376	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
6	CBK2	493	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
7	CBK21	558	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
8	CBK21	559	Kotak	0,8	1	Berfungsi	-	
9	CBK4	1282	Kotak	0,8	0,8	Berfungsi	-	
10	CBK5	2053	Kotak	0,8	0,9	Berfungsi	-	
11	CBK7	1022	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
	Sub Sistem Drainase Cibolang	2.215						
1	CBL1	1152	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
2	CBL2	687	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
3	CBL4	376	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
	Sub Sistem Drainase Cibeureum	5.527						
1	CBR1	174	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
2	CBR11	1177	Kotak	1,5	1,8	Berfungsi	-	
3	CBR14	1122	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
4	CBR3	194	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
5	CBR6	858	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
6	CBR8	945	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
7	CBR9	1058	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
	Sub Sistem Drainase Cihaur	4.815						
1	CHR1	710	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
2	CHR2	150	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
3	CHR3	469	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
4	CHR4	84	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
5	CHR5	457	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
6	CHR6	676	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
7	CHR8	579	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
8	CHR8	734	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
9	CHR9	956	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
	Sub Sistem Drainase Cilember	17092						
1	CLBR1	840	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
2	CLBR11	97	Kotak	1,5	1,6	Berfungsi	-	
3	CLBR12	298	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
4	CLBR14	425	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
5	CLBR17	1317	Kotak	1,5	1,8	Berfungsi	-	
6	CLBR18	1302	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
7	CLBR19	361	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
8	CLBR2	533	Kotak	1,8	2,3	Berfungsi	-	
9	CLBR25	625	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
10	CLBR26	451	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
11	CLBR26	157	Kotak	0,8	1,1	Berfungsi	-	
12	CLBR27	834	Kotak	1,5	1,8	Berfungsi	-	
13	CLBR28	788	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
14	CLBR3	637	Kotak	0,8	0,9	Berfungsi	-	
15	CLBR30	604	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
16	CLBR30	367	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
17	CLBR32	137	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
18	CLBR34	332	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
19	CLBR35	401	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
20	CLBR37	393	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
21	CLBR37	1096	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
22	CLBR4	483	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
23	CLBR41	342	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
24	CLBR41	314	Kotak	0,5	0,9	Berfungsi	-	
25	CLBR43	612	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
26	CLBR43	170	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
27	CLBR45	171	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
28	CLBR45	309	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
29	CLBR47	151	Kotak	0,4	0,6	Berfungsi	-	
30	CLBR49	1212	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
31	CLBR5	587	Kotak	0,8	1,3	Berfungsi	-	
32	CLBR50	206	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
33	CLBR8	542	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
	Subsistem Drainase Cimancong	4.396						
1	CMC1	788	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
2	CMC13	773	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
3	CMC14	261	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
4	CMC15	531	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
5	CMC16	840	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
6	CMC17	623	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
7	CMC5	195	Kotak	1,5	1,5	Berfungsi	-	
8	CMC6	213	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
9	CMC9	171	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
	Subsistem Drainase Cimahi	13.494						
1	CMH1	67	Kotak	1	1,5	Berfungsi	-	
2	CMH14	489	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
3	CMH15	534	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
4	CMH16	293	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
5	CMH17	348	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
6	CMH18	285	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
7	CMH19	159	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
8	CMH2	205	Kotak	0,8	0,9	Berfungsi	-	
9	CMH2	149	Kotak	1	1,3	Berfungsi	-	
10	CMH20	688	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
11	CMH21	720	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
12	CMH26	959	Kotak	1,2	1,3	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
13	CMH28	981	Kotak	1	1,3	Berfungsi	-	
14	CMH3	304	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
15	CMH34	141	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
16	CMH36	510	Kotak	0,8	0,9	Berfungsi	-	
17	CMH37	247	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
18	CMH38	516	Kotak	0,6	0,8	Berfungsi	-	
19	CMH39	296	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
20	CMH40	502	Kotak	0,6	0,8	Berfungsi	-	
21	CMH41	224	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
22	CMH45	656	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
23	CMH46	832	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
24	CMH49	736	Kotak	1	1,2	Berfungsi	-	
25	CMH5	672	Kotak	0,8	1	Berfungsi	-	
26	CMH6	705	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
27	CMH7	430	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
28	CMH8	363	Kotak	0,8	1	Berfungsi	-	
29	CMH9	482	Kotak	0,8	1,3	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
	Subsistem Drainase Cisangkan	28.164						
1	CSK14	140	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
2	CSK17	240	Kotak	1,8	2,3	Berfungsi	-	
3	CSK2	435	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
4	CSK20	399	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
5	CSK21	89	Kotak	0,5	0,9	Berfungsi	-	
6	CSK22	453	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
7	CSK24	602	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
8	CSK25	331	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
9	CSK26	612	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
10	CSK27	1091	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
11	CSK28	552	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
12	CSK3	395	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
13	CSK30	826	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
14	CSK31	382	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
15	CSK32	450	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
16	CSK33	564	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
17	CSK35	356	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
18	CSK4	206	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
19	CSK40	610	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
20	CSK43	326	Kotak	0,8	1	Berfungsi	-	
21	CSK44	399	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
22	CSK45	351	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
23	CSK46	632	Kotak	0,8	1	Berfungsi	-	
24	CSK47	454	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
25	CSK48	532	Kotak	0,8	1	Berfungsi	-	
26	CSK49	571	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
27	CSK5	1433	Kotak	0,8	1	Berfungsi	-	
28	CSK50	987	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
29	CSK51	787	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
30	CSK52	294	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
31	CSK53	296	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
32	CSK54	589	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
33	CSK56	320	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
34	CSK59	166	Kotak	0,8	1	Berfungsi	-	
35	CSK6	1463	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
36	CSK63	1055	Kotak	0,8	1	Berfungsi	-	
37	CSK64	1072	Kotak	0,8	1,1	Berfungsi	-	
38	CSK69	480	Kotak	0,8	0,9	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
39	CSK7	827	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
40	CSK70	480	Kotak	0,8	1	Berfungsi	-	
41	CSK71	757	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
42	CSK74	550	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
43	CSK81	316	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
44	CSK82	816	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
45	CSK83	665	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
46	CSK85	360	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
47	CSK88	430	Kotak	0,6	0,8	Berfungsi	-	
48	CSK89	346	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
49	CSK90	629	Kotak	0,6	0,8	Berfungsi	-	
50	CSP1	663	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
51	CSP2	389	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
	Sub Drainase Sistem Melong	5.153						
1	MLG1	1076	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
2	MLG14	1213	Kotak	1,5	1,8	Berfungsi	-	
3	MLG19	293	Kotak	1	1,1	Berfungsi	-	
4	MLG4	786	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
5	MLG5	673	Kotak	1	1,2	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
6	MLG8	526	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
7	MLG9	586	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
	Subsistem Drainase Reungas	7.037						
1	RGS1	1015	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
2	RGS18	633	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
3	RGS19	320	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
4	RGS2	204	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
5	RGS20	101	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
6	RGS21	401	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
7	RGS22	748	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
8	RGS23	659	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
9	RGS24	860	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
10	RGS25	164	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
11	RGS27	229	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
12	RGS3	696	Kotak	1	1,2	Berfungsi	-	
13	RGS5	108	Kotak	0,5	0,9	Berfungsi	-	
14	RGS6	253	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
15	RGS7	535	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
16	RGS8	111	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
C	**Saluran Tersier**							
	Sub Sistem Drainase Cibiuk	1.023						
1	CBI11	101	Kotak	0,6	0,8	Berfungsi	-	
2	CBI5	439	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
3	CBI8	94	Kotak	0,5	0,9	Berfungsi	-	
4	CBI9	388	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
	Sub Sistem Drainase Bongkok	1.104						
1	CBK12	131	Kotak	0,4	0,8	Berfungsi	-	
2	CBK13	480	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
3	CBK17	357	Kotak	0,4	0,9	Berfungsi	-	
4	CBK18	136	Kotak	0,5	0,9	Berfungsi	-	
	Sub Sistem Drainase Cibolang	190						
1	CBL3	190	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
	Sub Sistem Drainase Cibeureum	2.407						
1	CBR10	604	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
2	CBR12	788	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
3	CBR2	183	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
4	CBR4	182	Kotak	0,4	0,8	Berfungsi	-	
5	CBR5	410	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
6	CBR7	241	Kotak	0,5	0,9	Berfungsi	-	
	Sub Sistem Drainase Cihaur	-						
	Sub Sistem Drainase Cilember	1.667						
1	CLBR10	252	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
2	CLBR13	347	Kotak	0,8	0,9	Berfungsi	-	
3	CLBR15	96	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
4	CLBR16	113	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
5	CLBR23	188	Kotak	0,5	0,9	Berfungsi	-	
6	CLBR32	372	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
7	CLBR39	157	Kotak	0,5	0,5	Berfungsi	-	
8	CLBR9	142	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
	Subsistem Drainase Cimancong	773						
1	CMC10	198	Kotak	0,4	0,7	Berfungsi	-	
2	CMC11	128	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
3	CMC12	316	Kotak	0,5	0,7	Berfungsi	-	
4	CMC2	131	Kotak	0,8	0,9	Berfungsi	-	
	Subsistem Drainase Cimahi	3.149						
1	CMH10	93	Kotak	0,4	0,8	Berfungsi	-	
2	CMH11	95	Kotak	0,4	0,8	Berfungsi	-	
3	CMH12	97	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
4	CMH13	279	Kotak	0,5	0,9	Berfungsi	-	
5	CMH22	276	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
6	CMH23	218	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
7	CMH24	178	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
8	CMH25	128	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
9	CMH3	146	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
10	CMH30	38	Kotak	0,3	0,6	Berfungsi	-	
11	CMH32	67	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
12	CMH33	72	Kotak	0,4	0,6	Berfungsi	-	
13	CMH4	186	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
14	CMH42	244	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
15	CMH47	132	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
16	CMH49	352	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
17	CMH50	215	Kotak	0,5	0,9	Berfungsi	-	
18	CMH50	134	Kotak	0,4	0,6	Berfungsi	-	
19	CMH52	199	Kotak	0,5	0,9	Berfungsi	-	
	Subsistem Drainase Cisangkan	6.561						
1	CSK10	131	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
2	CSK11	207	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
3	CSK13	391	Kotak	1,2	1,6	Berfungsi	-	
4	CSK13	125	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
5	CSK16	599	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
6	CSK16	435	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
7	CSK18	475	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
8	CSK19	526	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
9	CSK23	344	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
10	CSK29	266	Kotak	1	1,4	Berfungsi	-	
11	CSK34	322	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
12	CSK41	356	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
13	CSK42	300	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
14	CSK44	399	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
15	CSK58	349	Kotak	0,6	0,8	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
16	CSK61	230	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
17	CSK65	123	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
18	CSK77	96	Kotak	0,6	0,9	Berfungsi	-	
19	CSK8	254	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
20	CSK84	343	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
21	CSK9	290	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
	Sub Drainase Sistem Melong	4.605						
1	MLG12	445	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
2	MLG13	476	Kotak	1	1,2	Berfungsi	-	
3	MLG15	400	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
4	MLG16	644	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
5	MLG17	624	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
6	MLG17	156	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
7	MLG18	285	Kotak	0,4	0,9	Berfungsi	-	
8	MLG2	433	Kotak	1	1,2	Berfungsi	-	
9	MLG3	759	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	
10	MLG6	192	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
11	MLG8	192	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	

No.	Jenis Prasarana / Sarana	Satuan (m)	Bentuk penampang saluran (kotak/trapesium)	Dimensi		Kondisi		Frekuensi Pemeliharaan (kali/tahun)
				Lebar dasar saluran	Tinggi saluran	Berfungsi	Tidak berfungsi	
	Subsistem Drainase Reungas	1.116						
1	RGS15	295	Kotak	0,4	0,7	Berfungsi	-	
2	RGS17	413	Kotak	0,6	1	Berfungsi	-	
3	RGS26	166	Kotak	0,4	0,7	Berfungsi	-	
4	RGS28	138	Kotak	0,5	0,8	Berfungsi	-	
5	RGS4	103	Kotak	0,8	1,2	Berfungsi	-	

Keterangan: -
Sumber: Masterplan Drainse Kota Cimahi, Dinas Pekerjaan Umum Kota Cimahi Tahun 2011 & DED Sungai Tahun 2014

Tabel-28a. Tabel Tambahan Kondisi Danau/Waduk/Situ/Embung
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2022

No	Lokasi				Dimensi					Keterangan
	Kecamatan	Kelurahan	RT	RW	Panjang (m)	Lebar (m)	Dalam (m)	Luas (m)	Volume (m^3)	
1	Cimahi Utara	Citeureup	3	9	19	10,5	4	199,5	798	Existing, Pemkot
	Cimahi Utara	Citeureup	3	9	17	10,5	3	178,5	535,5	Existing, Pemkot
2	Cimahi Utara	Cibabat	1	3	32	19	5	608	3.040,00	Existing, RSUD Cibabat
3	Cimahi Tengah	Padasuka-Setiamanah	9	8	36,5	11	3	401,5	1.204,50	Existing
4	Cimahi Selatan	Leuwigajah	8	2	54	20	6	1080	6.480,00	Existing, Keramat
5	Cimahi Selatan	Leuwigajah	4	4	33,5	24	5	804	4.020,00	Existing, Keramat
6	Cimahi Selatan	Cibeureum-Melong	8	27	48	22	6	1056	6.336,00	Existing
Total/rerata					**34,3**	**16,7**	**4,6**	**4.328**	**22.414**	

Keterangan: -
Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, 2022

Tabel-29a. Tabel Tambahan Kualitas Air Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	06º 51' 18"	107º 33' 44,8"	21-Juni-23	22	7,77	181	202
		Sungai Cimahi Tengah	06º 53' 32,4"	107º 32' 28,7"	21-Juni-23	24	7,44	287	748
		Sungai Cimahi Hilir	06º 53' 44,9"	107º 32' 18,6"	21-Juni-23	25	7,05	299	146
2	Cilember	Sungai Cilember Hulu	06º 52' 28,7"	107º 33' 41,4"	21-Juni-23	24	7,01	523	399
		Sungai Cilember Tengah	06º 53' 57,2"	107º 33' 39,6"	21-Juni-23	25	7,59	542	342
		Sungai Cilember Hilir	06º 55' 43,5"	107º 32' 24,5"	21-Juni-23	28	7,41	1.853	330
3	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	06º 51' 15,7"	107º 32' 06,2"	20-Juni-23	23	7,01	291	558
		Sungai Cisangkan Tengah	06º 52' 57,2"	107º 31' 41,6"	20-Juni-23	25	7,31	432	152
		Sungai Cisangkan Hilir	06º 55' 05,5"	107º 32' 00,4"	20-Juni-23	25	7,58	652	288
4	Cihaur	Sungai Cihaur Hulu	06º 50' 50,5"	107º 33' 20,5"	20-Juni-23	22	7,25	172	20,5
		Sungai Cihaur Tengah	06º 51' 30,5"	107º 32' 06,9"	20-Juni-23	24	7,32	402	196
		Sungai Cihaur Hilir	06º 51' 29,4"	107º 31' 59,0"	20-Juni-23	24	7,31	390	86,5
5	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	06º 53' 37,5"	107º 34' 08,0"	21-Juni-23	22,5	7,25	615	194
		Sungai Cibeureum Tengah	06º 54' 09,8"	107º 34' 55,4"	21-Juni-23	23	7,22	627	316
		Sungai Cibeureum Hilir	06º 55' 55,1"	107º 33' 42,8"	21-Juni-23	26	6,96	1067	595

(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO_2 (mg/L)	NO_3 (mg/L)	NH_3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	13,2	6,9	9,65	26,5	0,03	3,55	<0,057	<0,05	0,125	0,183
		Sungai Cimahi Tengah	66	5,27	11,2	35,6	0,31	2,47	<0,057	0,49	0,338	0,057
		Sungai Cimahi Hilir	11	4,97	11,4	39,6	0,42	2,95	<0,057	0,47	0,319	0,079
2	Cilember	Sungai Cilember Hulu	216	3,65	10,4	40,2	0,07	0,614	<0,057	0,63	0,759	0,095
		Sungai Cilember Tengah	76,2	2,84	24,1	66	0,51	2,26	<0,057	0,66	0,894	0,167
		Sungai Cilember Hilir	102	2,03	31,4	167	0,09	1,25	<0,057	0,7	0,639	0,676
3	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	59	3,65	16,2	57,1	0,3	2,42	<0,057	1,09	0,332	0,69
		Sungai Cisangkan Tengah	78,2	4,87	16,7	53	0,21	1	<0,057	0,63	0,633	0,292
		Sungai Cisangkan Hilir	8,67	2,43	25,1	68,1	0,09	0,953	<0,057	0,51	0,442	0,278
4	Cihaur	Sungai Cihaur Hulu	13,8	7,4	10,4	26	0,03	2,55	<0,057	0,61	0,133	0,08
		Sungai Cihaur Tengah	202	4,87	25,1	64,4	0,35	1,97	<0,057	0,47	0,218	0,198
		Sungai Cihaur Hilir	9,12	5,27	14,6	41	0,52	3,38	<0,057	0,61	0,293	0,183
5	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	86,2	7,81	12,6	41,7	0,51	7,36	<0,057	0,92	0,528	0,261
		Sungai Cibeureum Tengah	86,3	6,49	18,8	45,1	0,61	5,34	<0,057	0,86	0,675	0,248
		Sungai Cibeureum Hilir	112	4,06	18,8	60,8	0,69	2,73	<0,057	0,77	0,809	0,291

(Tabel 29a Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/ 1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	3,26	0,236	310.000	1.340.000	<0,01	<0,0166
		Sungai Cimahi Tengah	4,95	0,431	960.600	14.210.000	<0,01	<0,0166
		Sungai Cimahi Hilir	1,21	0,244	5.200.000	22.820.000	<0,01	<0,0166
2	Cilember	Sungai Cilember Hulu	11,6	0,451	1.340.000	3.990.000	<0,01	0,0467
		Sungai Cilember Tengah	13,6	0,295	8.600.000	62.940.000	<0,01	0,0178
		Sungai Cilember Hilir	7,05	0,672	755.600	25.890.000	<0,01	0,024
3	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	3,15	0,643	27.230.000	52.470.000	0,01	0,0701
		Sungai Cisangkan Tengah	10,6	1,14	8.840.000	9.320.000	<0,01	0,313
		Sungai Cisangkan Hilir	11,4	0,646	980.000	1.990.000	<0,01	<0,0166
4	Cihaur	Sungai Cihaur Hulu	9,31	0,207	1.000	46.400	<0,01	0,0253
		Sungai Cihaur Tengah	12,6	0,734	1.870.000	16.970.000	<0,01	<0,0166
		Sungai Cihaur Hilir	8,95	0,502	108.100	740.000	<0,01	<0,0166
5	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	11,2	0,315	2.790.000	4.220.000	<0,01	0,0401
		Sungai Cibeureum Tengah	10,9	0,372	5.120.000	10.760.000	<0,01	0,108
		Sungai Cibeureum Hilir	10,4	0,447	5.200.000	13.140.000	<0,01	0,0466

Sumber: LHU Kualitas Air Sungai, 2023

Tabel-29b. Tabel Tambahan Kualitas Air Sungai
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Titik Koordinat		Waktu sampling (tgl/bln/thn)	Temperatur (°C)	pH	DHL (µmhos/cm)	TDS (mg/L)
			Lintang	Bujur					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Cimahi	Sungai Cimahi Hulu	06º 51' 18"	107º 33' 44,8"	19-Oktober-23	20	7,56	458	184
		Sungai Cimahi Tengah	06º 53' 32,4"	107º 32' 28,7"	19- Oktober -23	28	7,46	841	236
		Sungai Cimahi Hilir	06º 53' 44,9"	107º 32' 18,6"	19- Oktober -23	29	8	1102	354
2	Cilember	Sungai Cilember Hulu	06º 52' 28,7"	107º 33' 41,4"	20- Oktober -23	23	7,43	1637	472
		Sungai Cilember Tengah	06º 53' 57,2"	107º 33' 39,6"	20- Oktober -23	24	7,4	1543	406
		Sungai Cilember Hilir	06º 55' 43,5"	107º 32' 24,5"	20- Oktober -23	29	7,71	6465	2100
3	Cisangkan	Sungai Cisangkan Hulu	06º 51' 15,7"	107º 32' 06,2"	20- Oktober -23	24	7,23	59,4	373
		Sungai Cisangkan Tengah	06º 52' 57,2"	107º 31' 41,6"	18- Oktober -23	26	7,43	1618	447
		Sungai Cisangkan Hilir	06º 55' 05,5"	107º 32' 00,4"	20- Oktober -23	27	7,78	6247	2037
4	Cihaur	Sungai Cihaur Hulu	06º 50' 50,5"	107º 33' 20,5"	18- Oktober -23	22	7,33	22,7	348
		Sungai Cihaur Tengah	06º 51' 30,5"	107º 32' 06,9"	18- Oktober -23	26,5	7,63	101	570
		Sungai Cihaur Hilir	06º 51' 29,4"	107º 31' 59,0"	18- Oktober -23	26	7,35	1028	363
5	Cibeureum	Sungai Cibeureum Hulu	06º 53' 37,5"	107º 34' 08,0"	19- Oktober -23	24	7,44	1204	362
		Sungai Cibeureum Tengah	06º 54' 09,8"	107º 34' 55,4"	19- Oktober -23	24	7,41	1313	383
		Sungai Cibeureum Hilir	06º 55' 55,1"	107º 33' 42,8"	19- Oktober -23	27	7,6	398	1172

(Tabel 29b Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	TSS (mg/L)	DO (mg/L)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	NO_2 (mg/L)	NO_3 (mg/L)	NH_3 (mg/L)	Klorin bebas (mg/L)	T-P (mg/L)	Fenol (µg/L)
(1)	(2)	(3)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	5,42	6,79	14,1	24,9	0,035	2,09	<0.057	0,71	0,315	0,195
		Sungai Cisangkan Tengah	10,7	4,05	142	233	0,149	1,32	<0,057	0,64	0,657	0,148
		Sungai Cisangkan Hilir	65	5,27	126	222	0,03	1,07	<0,057	0,81	1,88	0,539
2	**Cihaur**	Sungai Cihaur Hulu	53	<1.51	62,8	153	<0,0226	1,48	<0,057	0,66	3,79	0,911
		Sungai Cihaur Tengah	63,5	<1.51	116	247	0,047	2,15	<0,057	1,26	2,71	1,413
		Sungai Cihaur Hilir	185	<1.51	334	1510	0,075	0,835	<0,057	1,41	1,77	1,59
3	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	87,5	<1.51	67,1	124	0,03	1,84	<0,057	0,43	2,62	0,771
		Sungai Cibeureum Tengah	57,3	<1.51	101	225	<0,0226	0,86	<0,057	1,29	3,51	2,05
		Sungai Cibeureum Hilir	20,5	<1.51	106	211	0,035	0,776	<0,057	1,5	2,11	1,72
4	**Cilember**	Sungai Cilember Hulu	50,5	6,56	30,4	58,2	0,03	2,99	<0,057	<0.05	0,448	0,129
		Sungai Cilember Tengah	44,8	2,02	142	255	<0,0226	0,75	<0,057	0,25	2,09	1,27
		Sungai Cilember Hilir	12	5,25	23,6	43,7	0,326	1,68	<0,057	<0.05	0,832	0,26
5	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	37	6,08	32,9	51	0,482	4,91	<0,057	0,7	0,644	0,241
		Sungai Cimahi Tengah	45,5	3,65	132	386	0,896	1,03	<0,057	0,62	0,819	0,4
		Sungai Cimahi Hilir	52	2,43	324	2337	0,028	0,6	<0,057	0,66	1,26	0,567

(Tabel 29b Lanjutan)

No	Nama Sungai	Titik Pantau	Minyak dan Lemak (µg/L)	Detergen (µg/L)	Fecal coliform (jmlh/ 1000 ml)	Total coliform (jmlh/ 1000 ml)	Sianida (mg/L)	H2S (mg/L)
(1)	(2)	(3)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	**Cisangkan**	Sungai Cisangkan Hulu	12,1	0,351	52.000	1.137.000	<0,01	<0,0166
		Sungai Cisangkan Tengah	11,1	0,498	1.664.000	4.106.000	<0,01	<0,0166
		Sungai Cisangkan Hilir	1,95	0,372	960.000	1.236.000	<0.01	<0,0166
2	**Cihaur**	Sungai Cihaur Hulu	7,79	0,884	1.000.000	8.600.000	<0,01	0,05
		Sungai Cihaur Tengah	20,2	1,85	1.000.000	4.100.000	0,011	0,053
		Sungai Cihaur Hilir	8,08	0,911	2.000.000	7.500.000	0,014	0,054
3	**Cibeureum**	Sungai Cibeureum Hulu	5,88	1,82	25.900.000	79.800.000	<0.01	0,027
		Sungai Cibeureum Tengah	9,95	1,8	60.900.000	15.5300.000	<0.01	0,069
		Sungai Cibeureum Hilir	10,8	1,12	35.900.000	83.600.000	0,011	0,933
4	**Cilember**	Sungai Cilember Hulu	7,82	0,586	10.900.000	22.800.000	<0.01	<0,0166
		Sungai Cilember Tengah	1,27	1,96	27.200.000	93.300.000	<0,01	0,019
		Sungai Cilember Hilir	9,83	0,552	18.900.000	37.900.000	<0,01	<0,0166
5	**Cimahi**	Sungai Cimahi Hulu	8,46	0,376	5.200.000	13.500.000	<0,01	<0,0166
		Sungai Cimahi Tengah	6,94	0,46	3.000.000	6.300.000	<0.01	<0,0166
		Sungai Cimahi Hilir	5,05	0,643	12.000.000	13.400.000	<0,01	0,021

Sumber: LHU Kualitas Air Sungai, 2023

Tabel-29c. Tabel Tambahan Tren Indeks Kualitas Air
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No	Kabuapten/Kota	Nilai Indeks Kualitas Air						
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kota Cimahi	18,67	10,67	12	10,67	17,11	29,11	22,5

Keterangan: -
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel-31a. Tabel Tambahan Jumlah Rumah Tangga dan Fasilitas Tempat BAB
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No	Fasilitas Tempat Buang Air Besar	Tahun						
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sendiri (Jamban Sehat)	100.029	120.262	100.266	92.011	126.817	125.903	93.564
2	Bersama (IPAL Komunal)	5.295	8.039	244	1.677	N/A	8.490	2.197
3	Umum (MCK)	2.240	2.270	1.531	245	2.550	2.610	38.652
4	Sungai	57.339	35.472	69.099	84.901	36.193	27.424	38.919
	Jumlah	164.903	166.043	171.140	178.834	165.560	164.427	173.332

Keterangan: -
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel-32a. Tabel Tambahan Data Peserta Didik Kota Cimahi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No	Wilayah	Total			TK			KB			TPA			SPS		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Cimahi Selatan	41,353	21,647	19,706	1,604	836	768	1,277	632	645	0	0	0	960	500	460
2	Kec. Cimahi Utara	36,283	18,262	18,021	1,527	801	726	610	315	295	29	17	12	1,003	507	496
3	Kec. Cimahi Tengah	32,463	16,668	15,795	1,206	615	591	841	413	428	25	17	8	937	437	500
Total	**Total**	**110,099**	**56,577**	**53,522**	**4,337**	**2,252**	**2,085**	**2,728**	**1,36**	**1,368**	**54**	**34**	**20**	**2,9**	**1,444**	**1,456**

No	Wilayah	PKBM			SKB			SD			SMP			SMA		
		Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Cimahi Selatan	1,273	802	471	0	0	0	18,603	9,566	9,037	8,014	4,064	3,95	3,202	1,267	1,935
2	Kec. Cimahi Utara	1,186	700	486	334	196	138	13,87	7,089	6,781	6,1	3,127	2,973	1,923	856	1,067
3	Kec. Cimahi Tengah	795	482	313	0	0	0	14,36	7,343	7,017	7,689	3,803	3,886	5,106	2,23	2,876
Total	**Total**	**3,254**	**1,984**	**1,27**	**334**	**196**	**138**	**46,833**	**23,998**	**22,835**	**21,803**	**10,994**	**10,809**	**10,231**	**4,353**	**5,878**

No	Wilayah	SMK			SLB		
		Jml	L	P	Jml	L	P
1	Kec. Cimahi Selatan	6,28	3,888	2,392	140	92	48
2	Kec. Cimahi Utara	9,298	4,422	4,876	403	232	171
3	Kec. Cimahi Tengah	1,368	1,242	126	136	86	50
Total	Total	16,946	9,552	7,394	679	410	269

Keterangan: -
Sumber: Dapodikdasmen, 2023

Tabel-34a. Tabel Tambahan Tren Rumah Tangga Miskin
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No.	Kabupaten/Kota	Tahun	Persentase Rumah Tangga Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Cimahi	2018	20,87%
2	Kota Cimahi	2019	28,21%
3	Kota Cimahi	2020	57,00%
4	Kota Cimahi	2021	54,86%
5	Kota Cimahi	2022	47,15%
6	Kota Cimahi	2024	48,95%

Keterangan: -
Sumber: Dinsos dan Disdukcapil (Data Data Konsolidasi Bersih Kota Cimahi), 2023

Tabel-37a. Tabel Tambahan Tren Nilai Indeks Kualitas Udara
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2024

No	Kabuapten/Kota	Nilai Indeks Kualitas Udara						
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kota Cimahi	39,21	27,03	73	69,74	72,58	74	70,26

Keterangan: -
Sumber: Hasil Analisis, 2024

Tabel-47a. Tabel Tambahan Tren Timbulan Sampah dan Proyeksi
Provinsi/Kabupaten/Kota : Kota Cimahi
Tahun : 2023

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m^3/hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2017	535.685	1.333,85
2	2018	548.373	1.365,45
3	2019	553.755	1.378,85
4	2020	557.911	1.389,20
5	2021	560.746	1.396,25
6	2022	566.746	1.410,68
7	2025	611.705	1.523,14
8	2030	664.603	1.654,86

Keterangan: -
Sumber: Hasil Analisis, 2023

LAMPIRAN IV
Peta Spasial

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Batas Administrasi Kota Cimahi

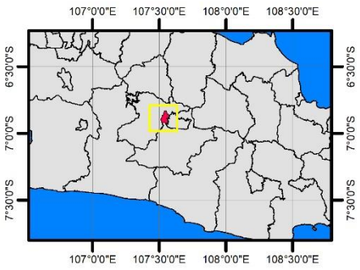
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Batas Kota
- Batas Kelurahan
- Sungai
- Danau

Batas Kecamatan

Kecamatan

- Kecamatan Cimahi Selatan
- Kecamatan Cimahi Tengah
- Kecamatan Cimahi Utara

Sumber Data dan Riwayat Peta :
Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Tata Guna Lahan Kota Cimahi

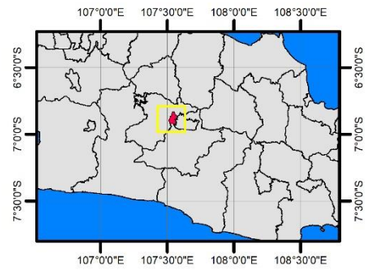
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Batas Kota
- Batas Kelurahan
- Sungai
- Danau

GUNA LAHAN

KETERANGAN

- Hutan Kerapatan Sedang
- Industri Manufaktur
- Industri Tekstil
- Ladang
- Lahan Terbuka
- Makam
- Perkebunan
- Peternakan
- Rumah Tinggal
- Sawah
- Taman

Sumber Data dan Riwayat Peta :
Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI 2024

Peta Pola Ruang Kota Cimahi

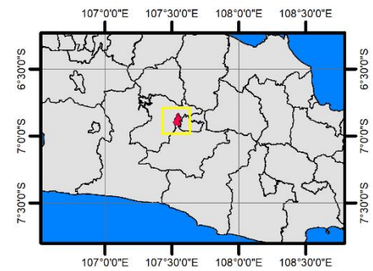
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500 Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Batas Kota
- Batas Kelurahan
- Sungai
- Danau

POLA RUANG

Zona

- Industri
- Perairan
- Perdagangan dan Jasa
- Perkantoran
- Perlindungan Setempat
- Perumahan
- Peruntukan Campuran
- Peruntukan Khusus
- Peruntukan Lainnya
- Ruang Terbuka Hijau
- Sarana Pelayanan Umum

Sumber Data dan Riwayat Peta : Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Penggunaan Lahan Kota Cimahi

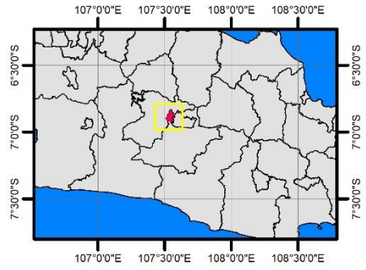
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Batas Kota
- Batas Kelurahan
- Sungai
- Danau

Penggunaan Lahan

KETERANGAN

- Badan Jalan
- Belukar
- Empang
- Industri
- Kebun
- Kolam Limbah
- Kuburan
- Lapangan
- Pemukiman
- Perumahan
- Sawah
- Sungai
- Tanah Kosong

Sumber Data dan Riwayat Peta :
Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Daerah Aliran Sungai Kota Cimahi

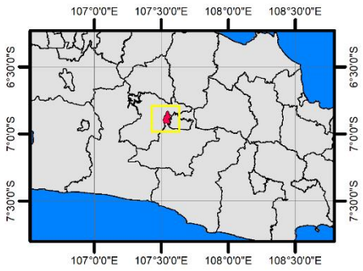
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Batas_Kota
- Sungai
- Danau

Nama DAS

- DAS Cibeureum
- DAS Cihaur
- DAS Cilember
- DAS Cimahi
- DAS Cisangkan

Sumber Data dan Riwayat Peta : Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Kemiringan Lereng Kota Cimahi

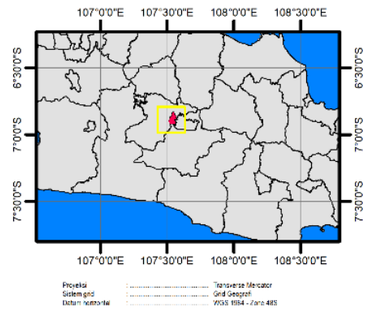
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zona 48S

LEGENDA

- Batas Kota
- Batas Kelurahan
- Sungai
- Danau

Kemiringan Lereng

Kategori

- 0 - 8 %
- 8 - 15 %
- 15 - 25 %
- 25 - 40 %

Sumber Data dan Riwayat Peta :
Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Bahaya Banjir
Kota Cimahi

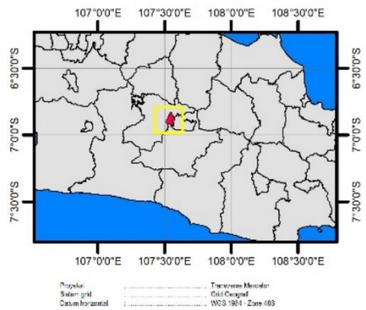
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 46414

0 220 440 660 880 1,100 2,200
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Batas Kelurahan
- Sungai
- Danau
- Batas Kota

Bahaya Banjir

Kategori

- Menengah
- Tinggi

Sumber Data dan Rikayat Peta : Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI 2024

Peta Bahaya Bencana Tanah Longsor Kota Cimahi

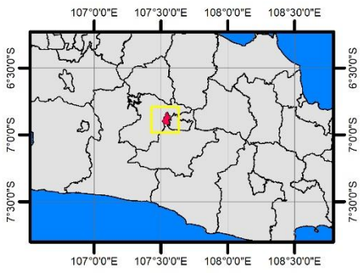
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 46414

0 220 440 660 880 1.100 2.200
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Danau
- Sungai
- Batas Kelurahan
- Batas Kota

Bahaya Tanah Longsor

Kategori

- Menengah
- Tinggi

Sumber Data dan Riwayat Peta : Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Bahaya Bencana Gempa Bumi Kota Cimahi

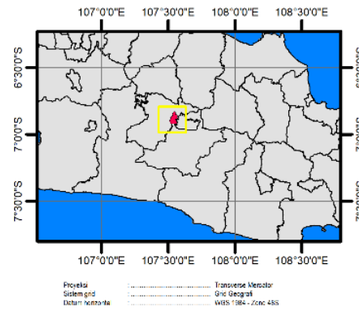
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Batas Kelurahan
- Sungai
- Danau
- Batas Kota

Bahaya Gempa Bumi

Kategori

- Rendah
- Tinggi

Sumber Data dan Riwayat Peta :
Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Persentase Fasilitas Tempat Buang Air Besar Sendiri Kota Cimahi

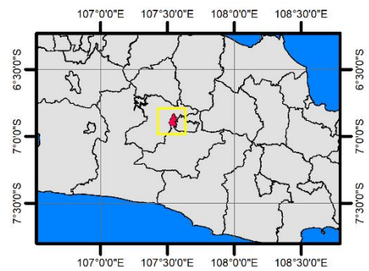
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 46414

0 220 440 660 880 1.100 2.200
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi ..... Transverse Mercator
Sistem grid ..... Grid Geografi
Datum horizontal ..... WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Danau
- Sungai
- Batas Kelurahan
- Batas Kota

Persentase Fasilitas Tempat BAB Sendiri

- 80-100%
- 60-80%
- 40-60%
- 20-40%
- 0-20%

Sumber Data dan Riwayat Peta :
Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Pemantauan Air Sumur Kota Cimahi

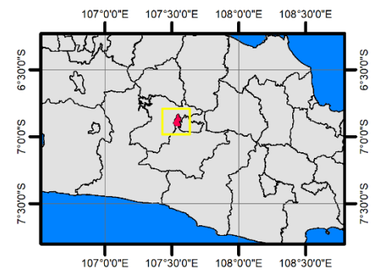
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 46414

0 220 440 660 880 1:100 2,200
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

Legend

- Batas Kelurahan
- Sungai
- Danau
- Batas Kota

Titik Pemantauan Sumur
Lokasi

- RT/RT 02/04 Kel. Cipageran
- RT/RW 01/11 Kel. Leuwigajah
- RT/RW 01/12 Kel. Cibeber
- RT/RW 01/12 Kel. Karangmekar
- RT/RW 01/22 Kel. Baros
- RT/RW 02/01 Kel Melong
- RT/RW 02/02 Kel. Pasirkaliki
- RT/RW 02/04 Kel. Setiamanah
- RT/RW 02/06 Kel. Utama
- RT/RW 02/07 Kel. Utama
- RT/RW 02/09 Kel. Cimahi
- RT/RW 02/12 Kel. Setiamanah
- RT/RW 02/14 Kel. Cibeber
- RT/RW 02/14 Kel. Cigugur Tengah
- RT/RW 03/04 Kel. Baros
- RT/RW 03/05 Kel. Padasuka
- RT/RW 03/06 Kel. Citeureup
- RT/RW 03/07 Kel. Cibabat
- RT/RW 03/13 Kel. Karangmekar
- RT/RW 03/17 Kel. Cigugur Tengah
- RT/RW 04/05 Kel. Cimahi
- RT/RW 04/18 Kel. Leuwigajah
- RT/RW 04/19 Kel. Cibabat
- RT/RW 04/29 Kel. Cipageran
- RT/RW 05/03 Kel. Pasirkaliki
- RT/RW 05/06 Kel. Melong
- RT/RW 05/08 Kel. Citeureup
- RT/RW 05/08 Kel. Padasuka
- RT/RW 06/01 Kel. Cibeureum
- RT/RW 06/08 Kel. Cibeureum

Sumber Data dan Riwayat Peta : Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Hasil Pengujian Parameter NO3 di Air Sumur Kota Cimahi Kota Cimahi

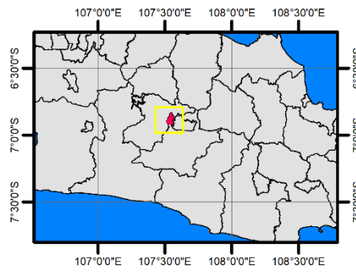
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Batas Kelurahan
- Sungai
- Danau
- Batas Kota

Hasil Uji Parameter NO3

- Memenuhi Baku Mutu
- Tidak Memenuhi Baku Mutu

Sumber Data dan Riwayat Peta : Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Peta Pemantauan Embung/Danau Kota Cimahi

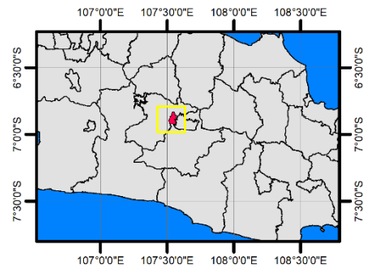
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 46414

0 220 440 660 880 1.100 2.200
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Sungai
- Danau
- Batas Kelurahan
- Batas Kota

Lokasi

- Embung Brigif
- Embung Cibabat
- Embung Ciseupan
- Embung Pemkot
- Embung Setiamanah
- Kolam retensi Pasirkaliki

Sumber Data dan Riwayat Peta : Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KOTA CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA CIMAHI
2024

Titik Pemantauan Kualitas Udara Ambien Kota Cimahi

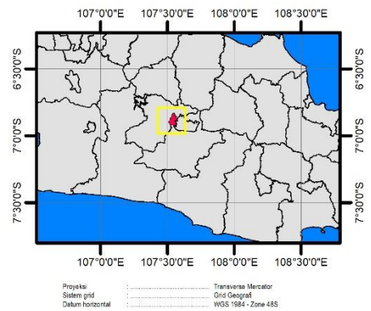
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Sungai
- Batas Kelurahan
- Danau
- Batas Kota

Lokasi Pemantauan

- Industri/PT Jenshiang Nusantara
- Kantor
- Perumahan
- Transportasi

Sumber Data dan Riwayat Peta :
Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019

DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KOTA CIMAHI

CIMAHI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIMAHI 2024

Indeks Standar Pencemaran Udara Parameter PM2,5 Kota Cimahi

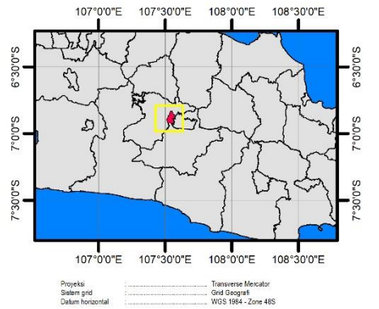
TAHUN 2024

N

SKALA 1 : 50000

0 250 500 750 1.000 1.250 2.500
Meters

INDEKS PETA



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi
Datum horizontal : WGS 1984 - Zone 48S

LEGENDA

- Sungai
- Batas Kelurahan
- Danau
- Batas Kota

Kategori

- Sedang
- Tidak Sehat

Sumber Data dan Riwayat Peta :
Citra Satelit Google Earth Pro, 2024
Badan Informasi Geospasial, 2019
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2019